ptpn x

2017
Annual Report
Laporan Tahunan

Mewujudkan Profitabilitas Berlandaskan Kinerja Optimal

Achieving Profitability through Optimal Performance

PT Perkebunan Nusantara X

Penjelasan Tema
Theme Explanation

Mewujudkan Profitabilitas Berlandaskan Kinerja Optimal

Achieving Profitability through Optimal Performance

Tahun 2017 tak lepas dari kondisi yang menaungi industri gula di tahun 2016. Cuaca ekstrem yang diakibatkan badai La Nina dan curah hujan yang tinggi di sepanjang tahun 2016 menyebabkan kebun mengalami kebanjiran sehingga pertumbuhan tanaman terganggu atau bahkan tanaman mati akibat banjir/genangan sehingga harus tanam ulang, yang berakibat pada mundurnya bulan tanam/kepras dan keterlambatan kultivasi secara mekanis dari sebagian kebun di tahun 2017. Hal ini kemudian berdampak pada turunnya protas tebu yang digiling di tahun 2017.

Kebijakan strategis kemudian dijalankan, salah satunya adalah keputusan untuk melakukan *start* giling beberapa Pabrik Gula (PG) secara bertahap, bergantung pada kesiapan bahan baku tebu yang tersedia di masing-masing PG. Strategi ini dianggap cukup berhasil, khususnya bagi PTPN X untuk memperoleh bahan baku dengan kualitas yang baik dan memberikan efisiensi serta efektivitas pada proses produksi gula.

"Mewujudkan Profitabilitas Berlandaskan Kinerja Optimal" berupaya menggambarkan pengelolaan kebijakan strategis yang dilandasi pada kinerja yang optimal. Kalkulasi kekuatan dan keunggulan, serta kelemahan dan ancaman, menjadikan PTPN X memahami potensinya, dan mampu mengoptimalkan seluruh kinerjanya untuk dapat merealisasikan profitabilitas dan nilai tambah, baik bagi pemegang saham, petani sebagai pemangku kepentingan, maupun industri gula dan harapan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

The year 2017 was inseparable from the conditions that dominated the sugar industry in 2016. Extreme weather caused by La Nina storm as well as heavy rainfall throughout 2016 has caused plantations to be flooded, which disturbed the plants growth, some plants were even dead due to the flood; hence rep-planting has to be done, which affected to the delay of planting month/kepras and mechanical cultivation delay in some plantations in 2017. These impacts have caused milled sugarcane protas to decline in 2017.

Strategic policy was then implemented, one of which was the decision to start the milling process of several Sugar Factory (PG) gradually, depending on the readiness of sugarcane raw materials available in each PG. This strategy was considered to be quite successful, especially for PTPN X to obtain raw materials with good quality and encourage efficiency and effectivity in the sugar production process.

"Achieving Profitability Based on Optimal Performance" seeks to illustrate strategic policy management based on optimal performance. The calculation of strengths and advantages, as well as weaknesses and threats, makes the Company understand its potential, and able to optimize its performance to realize profitability and added value for the shareholder, farmers as stakeholders, as well as sugar industry and the hope to achieve food security.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2016

Ketika menghadapi tantangan, seringkali muncul ketakutan akan bahaya dan risiko yang dihadapi. Ketakutan kemudian melahirkan kesendirian dan keterasingan dari lingkungan di sekitarnya. Padahal, memandang tantangan harus dibarengi dengan kemauan untuk mengevaluasi diri, dan mawas diri untuk dapat melihat peluang dalam merumuskan solusi. Tantangan bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan menjadi batu loncatan untuk terus belajar dan berkembang.

When we face challenges, we often fear the danger and the risk. That fear will create the birth of a solitude and alienation from the surrounding environment. In fact, looking at challenges must be accompanied with the willingness to evaluate ourselves, and introspection to allow ourselves to see the opportunities in framing a solution. Challenges are not something to be scared of, instead, a stepping stone to continue to learn and to grow.

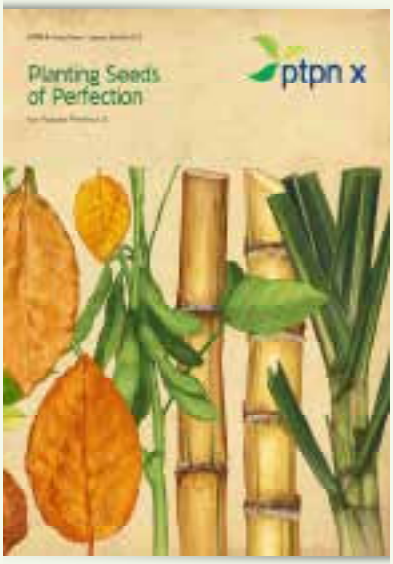

2015

PT Perkebunan Nusantara X senantiasa menanamkan bibit-bibit kesempurnaan dalam setiap aspek usaha dengan harapan bahwa melalui proses dan pengawasan yang berkelanjutan, bibit-bibit tersebut akan tumbuh berkembang membawa PT Perkebunan Nusantara X menjadi perusahaan yang memimpin industri agribisnis di Indonesia.

PT Perkebunan Nusantara X always plant the seeds of perfection in each and every business aspect with hopes that with continuous process and development, those seeds will mature and able to become a vessel to help PT Perkebunan Nusantara X in becoming a leading company in Indonesian agribusiness industry.

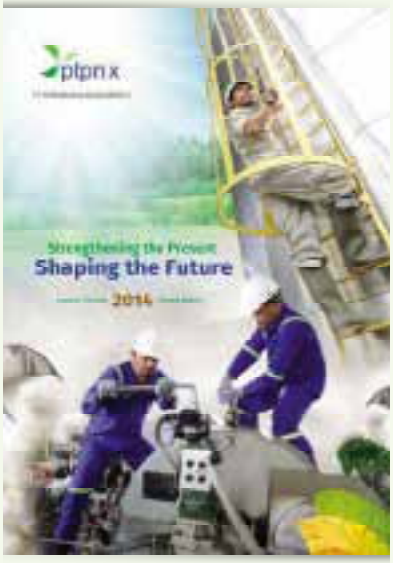

2014

PT Perkebunan Nusantara X menyadari pentingnya melakukan berbagai langkah bermakna untuk menjaga pertumbuhan perseroan secara berkelanjutan. Kesinambungan usaha perusahaan bergantung bagaimana visi dan misi perusahaan dibuat dan diarahkan untuk senantiasa memberikan manfaat bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan lain seluas-luasnya tanpa mengabaikan hak generasi mendatang untuk ikut menikmati manfaat yang sama di masa depan.

PT Perkebunan Nusantara X realizes The importance of conducting various meaningful steps in order to keep the Corporate growth continously. Company viability depends on how company vision and mission are made and directed to continously give optimal benefits to the shareholders and other stakeholders without ignoring rights of future generations.

MENJAGA GULA, MENJAGA INDUSTRI YANG STRATEGIS

SUSTAINING SUGAR, SUSTAINING A STRATEGIC INDUSTRY

Mendorong ketahanan pangan, demikian salah satu misi yang ingin dicapai Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam konsep Nawa Cita. Ketahanan pangan dapat diartikan pada berbagai perspektif, termasuk menciptakan sebuah *grand design* tentang pengelolaan hulu dan hilir dari industri yang menopang pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

Di bidang industri gula, ketahanan pangan diupayakan melalui kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara permintaan pasar dan kemampuan memenuhi permintaan pasar tersebut. Lekatnya gula dengan kultur masyarakat dan kebutuhan sehari-hari membuat gula digolongkan sebagai salah satu komoditas khusus (*special products*) bersama beras, jagung dan kedelai yang memiliki kemampuan nilai ekonomis untuk mempengaruhi perekonomian masyarakat. Pada titik inilah gula menjadi sebuah industri strategis, yang harus dijaga agar tidak menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan.

Ketahanan pangan juga dapat dilihat dari kemampuan pemanfaatan teknologi dan pengolahan tebu sebagai bahan baku dasar gula. Sejarah pengolahan tebu secara massif, yang telah terlihat sejak berkembangnya perkebunan tebu dan pabrik gula di masa kolonial Belanda, terus mengalami inovasi sejalan dengan perkembangan teknologi *modern*. Pemanfaatan teknologi masa kini telah memungkinkan tebu untuk dapat diproses hingga ke bagian ampas, seperti yang dapat dilihat pada gambar.

To promote food security is one of the missions to be achieved by the Government of Indonesia specified in the Nawa Cita concept. Food security can be interpreted in a variety of perspectives, including creating a grand design of upstream and downstream management of the industry that sustains the Indonesian people's needs of food.

In the sugar industry, food security is pursued through a policy to maintain a balance between market demand and the ability to meet market demand. The adhesion to the culture of society and daily necessities has placed sugar as one of special commodities group together with rice, corn and soybeans, with an economic value that can affect the economy of the people. At this point, sugar becomes a strategic industry that must be sustained in order to avoid undesired fluctuation.

Food security can also be seen from the ability to utilize technology and process sugar cane as basic raw material of sugar. The history of massive processing of sugar cane, which can be traced since the development of sugarcane plantations and sugar mills in the Dutch colonial period, continues with the making of innovations in line with the development of modern technology. The utilization of today's technology has enabled sugar cane to be processed down to the dregs, as can be seen in the chart below.

TEBU
Sugar Cane

Gula 7-8%
Sugar 7-8%

Blotong 3-4%
- Pupuk (Fertilizer)
- Pakan (Feed)
- Lilin Alam (Natural candle)

Protein dari nira
Protein from Sugar Juice

Ampas 30-35%
Bagasse 30-35%

Tetes 4-5%
Molasses 4-5%

Pucuk dan Daun 30-35%
Shoots and leaves 30-35%

Flue Gasses

Abu Cerobong
Ash from Chimney

Bahan Bakar (Fuel)
- Electricity
- Charcoal Briquettes
- Methane & Product Gas

Produk Berserat (Fiber Products)
- Pulp and Paper
- Paperboard & cardboard
- Fiber board
- Particle board
- Molded board
- Cement board

Lainnya (Others)
- Furfural & Derivati ves
- Alpha Cellulose
- Carboxymethyl Cellulose
- Xyloltyl
- Diacetyl
- Plastics
- Ethanol
- Ammonia
- Poultry litter & mulch
- Bagasse concrete
- Soil amendement
- Animal feed

Pemakaian Langsung (Direct Use)
- Exportation
- Fertilizer
- Dehydrated molasses
- Animal feed

Industri Fermentasi (Fermentation industry)
- Rum
- Ethyl Alcohol
- Spirits
- Anhydrous alcohol
- Alcohol derivatives

Industri Fermentasi Lainnya (Other Fermentation Industries)
- Vinegar & Acetic Acids
- Acetone Butanol
- Citric acid
- Lactic acid
- Glycerol
- Yeast
- Single Cell Protein

Lain-lain (Other)
- Aconitic Acid
- Monosodium glutamate
- Dextrain
- L-Lysine
- Xanthanqum Clon
- Itaconic acid

Bagan di atas menggambarkan bagaimana tebu dapat dimanfaatkan bagi industri lainnya; termasuk Bioethanol dan Pembangkit Listrik yang justru dapat mendorong ketahanan energi. Dari cara pandang inilah, gula dan tebu menjadi sebuah industri yang sangat strategis, yang memiliki *added value* dan berperan untuk menopang ketahanan pangan, seperti yang dicita-citakan oleh kita semua.

The above chart illustrates how sugar cane can be used for other industries; including Bioethanol and Power Plant that can actually spur the energy security. From this perspective, sugar and sugar cane have become very strategic industries, which offer added value and contribute to sustaining food security aspired by us all.

Pendahuluan
Introduction

DIVERSIFIKASI USAHA SEBAGAI BASIS PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

Sebagai produsen gula yang dimiliki oleh *holding* perkebunan, PTPN X memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan khususnya untuk produk gula. Hal ini dilakukan karena posisi penting gula sebagai bahan pangan strategis nasional yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Gula tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pokok saja tetapi juga merupakan bahan pemanis utama yang digunakan sebagai bahan baku pada industri makanan dan minuman.

Namun demikian, Perseroan memandang perlu untuk melakukan diversifikasi usaha guna mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan di luar segmen bisnis gula sebagai bisnis inti PTPN X. Selain itu, melalui diversifikasi usaha ini diharapkan mampu menurunkan risiko konsentrasi pada bisnis gula sehingga segmen usaha lain diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada PTPN X jika segmen usaha gula menghadapi tantangan dan risiko bisnis yang meningkat diantaranya karena penurunan produksi akibat cuaca, persaingan usaha yang meningkat dan faktor-faktor lainnya.

DIVERSIFIKASI DAN KONTRIBUSI

Saat ini Perseroan memiliki lima segmen usaha yang terdiri dari segmen gula, segmen tetes, segmen tembakau, segmen rumah sakit dan segmen lainnya. Dari kelima segmen usaha tersebut, jenis segmen usaha yang terkait dengan bisnis inti Perseroan adalah (i) budidaya tebu dan industri gula; (ii) budidaya dan proses pengolahan tembakau; dan (iii) pengelolaan energi terbarukan berbasis tebu. Sedangkan segmen usaha yang tidak terkait dengan bisnis inti Perseroan adalah segmen rumah sakit dan segmen usaha lainnya. Segmen bisnis rumah sakit selain melayani pasien intern juga memberikan layanan kepada masyarakat umum di sekitarnya. Sementara itu, segmen usaha lainnya meliputi produk edamame dan okra, karung plastik, bioethanol dan *cutting Bobbin*.

BUSINESS DIVERSIFICATION AS THE BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

As a sugar producer owned by plantation holding, the Company has an important role in maintaining food security, particularly sugar products. This is done due to the important position of sugar as national strategic food comestibles consumed by all levels of society. Sugar is not only considered as a basic needs, but also the main sweetener used as raw material in the food and beverage industry.

However, the Company consideres necessary to diversify its business in order to optimize the various sources of revenue outside the sugar business segment as the Company's core business. In addition, business diversification is also expected to reduce the concentration risk on sugar business, so that other business segments are expected to contribute to the Company, if the sugar business segment faces increasing challenges and business risks, such as the decline in production due to weather, increased business competition as well as other factors.

DIVERSIFICATION AND CONTRIBUTION

The Company currently has five business segments consisting of sugar segment, molasses segment, tobacco segment, hospital segment and other segments. Of the five business segments, the types of business segments related to the Company's core business are (i) cultivation of sugarcane and sugar industry; (ii) cultivation and processing of tobacco; and (iii) management of sugarcane-based renewable energy. Meanwhile, the business segments, which are not related to the Company's core business are hospital segment and other business segments. In addition to serving internal patients, these four hospitals also provide services to the general public in its surrounding. Meanwhile, other business segments include edamame and okra products, plastic bags, bioethanol and cutting bobbin.

Laba Operasi Per Segmen Usaha (Rp-juta)

Operating Profit per Business Segment (Rp-milion)

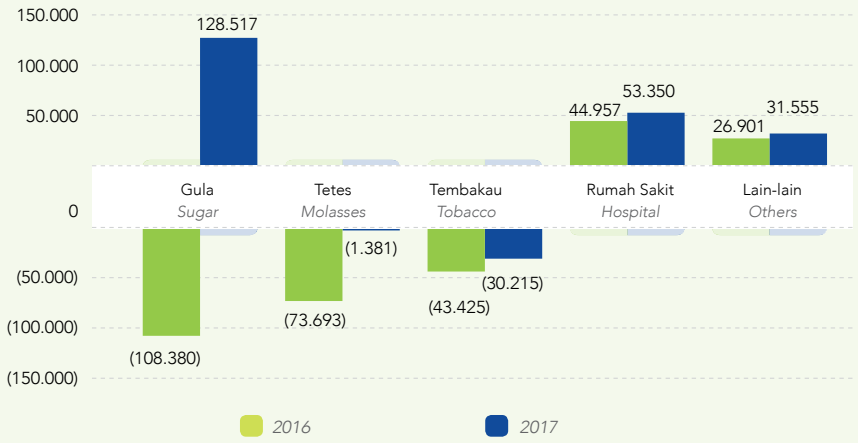

Sumber: Lap Keu Audit Perseroan 2017

Sources: The Company Financial Report 2017

Diversifikasi segmen usaha yang dilakukan oleh PTPN X memberikan kontribusi ketika bisnis inti Perseroan mengalami penurunan kinerja seperti yang terjadi di tahun 2016. Segmen usaha yang tidak terkait dengan bisnis inti Perseroan mampu meningkatkan kontribusinya secara berkelanjutan dalam 2 tahun terakhir. Bahkan segmen usaha ini mampu menurunkan risiko pelemahan kinerja keuangan Perseroan di tahun 2016 yang membukukan profitabilitas yang negatif.

Rugi operasi yang dibukukan oleh segmen inti pada tahun 2016 mencapai Rp108,38 miliar untuk segmen gula, Rp73,69 miliar untuk segmen tetes dan Rp43,42 miliar untuk segmen tembakau. Di saat laba operasi dari bisnis inti mengalami pelemahan, diversifikasi usaha yang tidak terkait dengan bisnis inti mampu menunjukakan kinerja yang positif dengan pendapatan operasi mencapai Rp44,96 miliar dan Rp26,90 miliar.

Peningkatan laba operasi dari segmen usaha di luar bisnis inti ditopang dengan peningkatan aset dari segmen rumah sakit dan segmen usaha lainnya. Aset dari kedua segmen usaha ini masing-masing naik sebesar 38,26% dan 6,53% menjadi Rp206,01 miliar dan Rp442,70 miliar di tahun 2017. Disaat bersamaan, laba operasi dari kedua segmen ini mampu tumbuh 18,7% dan 17,30 % menjadi Rp53,35 miliar untuk segmen rumah sakit dan Rp21,55 miliar.

The Company's diversification of business segments contributed when its core business experienced a decline in performance as it occurred in 2016. Non-related business to the Company's core business was able to increase its contribution continuously in the last 2 years. In fact, this business segment was able to reduce the risk of declining in the Company's financial performance in 2016, which recorded a negative profitability.

The operating loss recorded by the Company's core segments in 2016 amounted to IDR108.38 billion for sugar segment, IDR73.69 billion for molasses segment, and IDR43.42 billion for tobacco segment. When the operating profit from the Company's core business declined, diversification of non-related business to core business was able to to show a positive performance with operating revenues of IDR44.96 billion and IDR26.90 billion.

The increase in operating profit from business segments outside the core business was supported by the increase in assets from hospital segment and other business segments. In 2017, the assets of the two business segments increased by 38.26% and 6.53% to IDR206.01 billion and IDR442.70 billion respectively. At the same time, the operating profit of both segments increased by 18.7% and 17.30% to IDR53.35 billion for hospital segment and IDR21.55 billion for other business segment.

Aset Per Segmen Usaha (Rp-juta)

Assets per Business Segment (Rp-million)

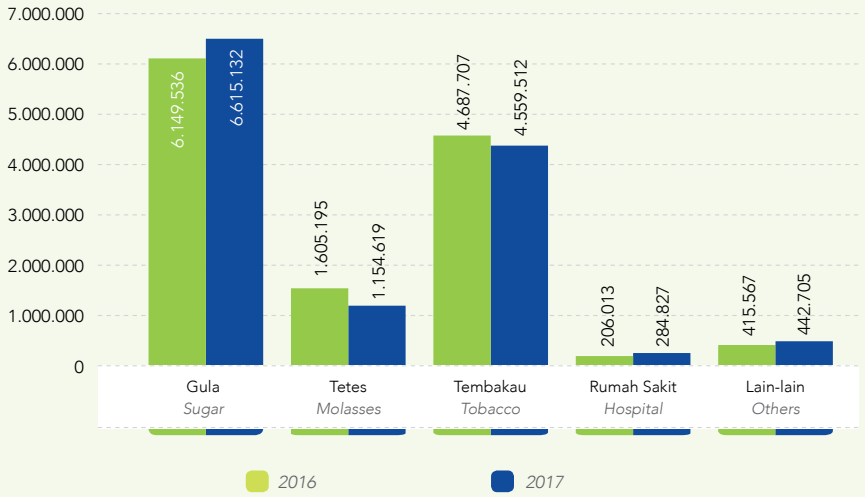

Sumber: Lap Keu Audit Perseroan 2017

Sources: The Company Financial Report 2017

Dengan mengacu kondisi ini diversifikasi usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah langkah yang tepat untuk mengurangi risiko konsentrasi pendapatan usaha pada bisnis inti. Diversifikasi usaha ini sekaligus merupakan *competitive advantage* Perseroan karena mampu memberikan manfaat atas layanan kesehatan kepada masyarakat umum disamping turut berperan dalam penyediaan berbagai produk yang memberikan nilai tambah dalam hal penyediaan produk *flexible packaging*, campuran bahan bakar jenis yang ramah lingkungan dan produk turunannya, *frozen vegetables*, dan *Cutting* Bobbin.

In reference to these conditions, diversification of business conducted by the Company is the right step to reduce the concentration risk of operating revenues on its core business. At the same time, the diversification of business is also a competitive advantage of the Company as it is able to provide benefits on health services to the general public while contributing to the provision of various products, which generate added value in terms of flexible packaging product delivery, environmentally friendly mix of fuel and its derivative products, frozen vegetables, and Cutting Bobbin.

PETANI SEBAGAI MITRA STRATEGIS

Sejak awal perjalanannya, PTPN X telah memiliki ikatan yang kuat dengan petani, khususnya petani tebu. Hubungan mutual antara PTPN X dan petani terus dibangun dan ditingkatkan, yang terlihat dari besarnya komposisi area lahan tebu tertebang yang diperoleh PTPN X dari lahan para petani. Per 31 Desember 2017, jumlah tebu digiling berasal dari luas areal tertebang sebesar 57,56 ribu hektar, yang terdiri dari 3,38 ribu hektar areal "Tebu Sendiri", dan 54,18 ribu hektar areal "Tebu Rakyat". "Tebu Sendiri" merupakan area lahan yang dimiliki/dikelola langsung oleh PTPN X, sementara "Tebu Rakyat" merupakan area lahan para petani tebu yang berada di sekitar lokasi Pabrik Gula. Hubungan ini berjalan dengan baik dikarenakan kuatnya ikatan kepercayaan antara Pabrik Gula dan Petani.

FARMERS AS STRATEGIC PARTNERS

Since the beginning of its journey, the Company has strong ties with farmers, especially sugarcane farmers. The mutual relationship between the Company and farmers continues to be built and improved, as can be seen from the large composition of the area of sugarcane felled by the Company from the farmers land. As of December 31, 2017, the amount of milled sugarcane derived from the total area of 57.56 thousand hectares, consisting of 3.38 thousand hectares of "Sugarcane Lands", and 54.18 thousand hectares of "Sugarcane Farmers Lands". "Sugarcane Lands" are plantation areas owned/managed directly by the Company, while "Sugarcane Farmers Lands" are plantation areas of sugarcane farmers located in the surrounding of Sugar Factory. This relationship works well due to the strong bond of trust between Sugar Factory and Farmers.

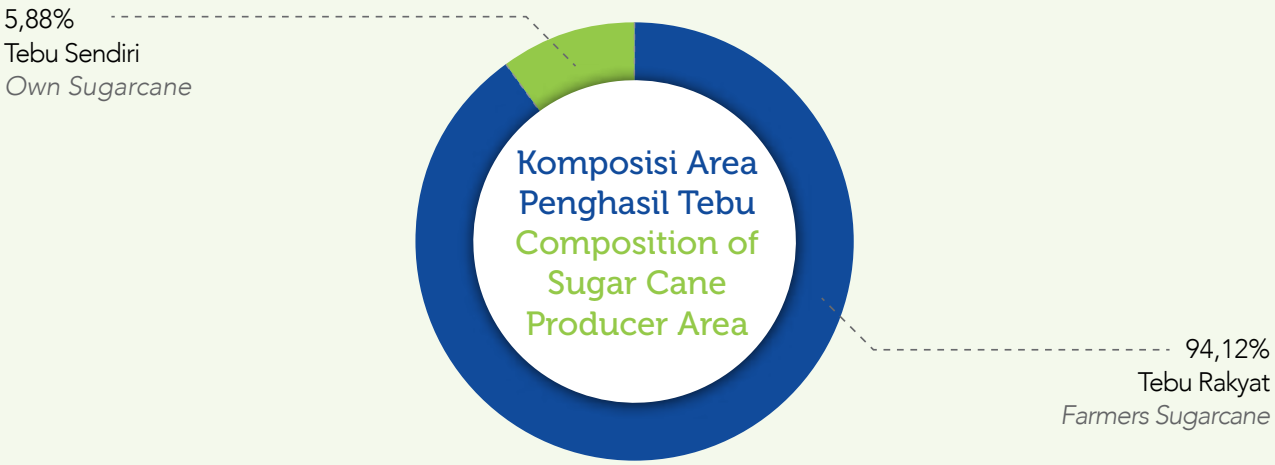

"PTPN X berkomitmen untuk menjadi mitra strategis bagi petani, terutama untuk memberikan solusi atas permasalahan petani tebu hari ini, yaitu persoalan sarana produksi, produktivitas dan pendanaan."

"The Company is committed to be a strategic partner for farmers, primarily in providing solutions on the existing issues of sugarcane farmers, namely issues on production facilities, productivity and funding."

Daftar Isi
Contents

2 Penjelasan Tema
Theme Explanation
3 Kesinambungan Tema
Theme Continuity
6 Pendahuluan
Introduction
10 Daftar Isi
Contents

Kilas Kinerja
Performance Highlight

14 Ikhtisar Operasional
Operational Highlights
15 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
19 Ikhtisar Saham
Share Highlights
19 Ikhtisar Obligasi
Bonds Highlights
20 Peristiwa Penting
Important Events

Laporan Manajemen
Management Report

25 Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners
32 Laporan Direksi
Report of the Board of Directors
44 Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017 PT Perkebunan Nusantara X
Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Responsibility for the 2017 Annual Report of PT Perkebunan Nusantara X

Profil Perusahaan
Company Profile

48 Informasi Umum Tentang PTPN X
General Information about PTPN X
50 Riwayat Singkat PTPN X
Brief History of PTPN X
53 Maksud dan Tujuan Pendirian PTPN X
Purpose and Objective of the Establishment of PTPN X
54 Bidang Usaha
Line of Business
55 Produk dan Jasa
Products and Services
59 Kompetensi Inti
Core Competencies
60 Struktur Organisasi
Organizational Structure
62 Visi, misi dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission and Corporate Culture
64 Makna Branding Logo
Meaning of Branding Logo
65 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile
70 Profil Direksi
Board of Directors Profile
74 Profil Pejabat Puncak
Senior Executives Profile
77 Demografi Karyawan
Employee Demographics
78 Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition
81 Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)
List of Subsidiaries and Associates/ Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)
85 Struktur Grup PTPN X
Group Structure of PTPN X
85 Kronologis Penerbitan Saham
Share Listing Chronology
86 Kronologis Penerbitan Obligasi
Bonds Listing Chronology
87 Kronologis Penerbitan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology
87 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Institution and Profession
88 Penghargaan dan Sertifikasi
Award and Certification
92 Daftar Alamat entitas anak dan kantor cabang/kantor perwakilan
Address of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices
97 Informasi pada Situs Web Perseroan
Information on Company's Website
98 Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal
Education and/or Training of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

104 Tinjauan Ekonomi
Economic Review
108 Tinjauan Industri
Industrial Review
113 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment
121 Tinjauan Keuangan
Financial Review

Fungsi Penunjang Bisnis
Business Supporting Functions

162 Sumber Daya Manusia
Human Resources
168 Teknologi Informasi
Information Technology

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

178 Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik
General Principles of Good Corporate Governance
180 Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup PTPN X
Development of Good Corporate Governance Implementation in PTPN X
211 Organ Tata Kelola Perusahaan
Organs of Corporate Governance
307 Manajemen Risiko
Risk Management
324 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
326 Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility
327 Perkara Penting
Important Issues
330 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Company's Data and Information Access
334 Kode Etik: Pedoman Perilaku Perusahaan
Code of Ethics: Company's Code of Conduct
340 Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi
Anti Corruption Policy and Gratification Control
341 Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik
Information on Political Activity Funding
341 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
State Official Wealth Report
344 Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement Policy
346 Whistleblowing System
Whistleblowing System
349 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Composition Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors
354 Transparansi Praktik Bad Governance
Transparency on Bad Governance Practice

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

358 Prinsip Umum dan Kebijakan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
General Principles and Implementation Policy of Corporate Social Responsibility
363 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibility on Environment
377 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Corporate Social Responsibility on Employment, Occupational Health and Safety
379 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility on Social and Community Empowerment
382 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Terhadap Produk/Jasa serta Konsumen
Corporate Social Responsibility on Responsibility to Product/Services and Customers

Lampiran
Attachment

Kilas Kinerja
Performance Highlight

Langkah strategis Perseroan dalam menghadapi kondisi industri gula yang terjadi di sepanjang tahun 2017 mampu menghasilkan pencapaian kinerja keuangan yang tumbuh positif.

The Company's strategic measures in dealing with the sugar industry condition throughout 2017 resulted in positive growth in the financial performance achievement.

Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

Indikator *Indicator*	Segmen *Segment*	Uraian *Description*	2017	2016	2015	2014	2013
Luas Area Tanam *Plantation Area Size*	Tebu *Sugarcane*	Luas Area (ha): *Area Size (ha):*	57.560	70.612	70.301	72.434	77.787
		TS (Ha)	3.383	3.170	2.438	2.266	2.973
		TR (Ha)	54.177	67.442	67.863	70.168	74.814
	Tembakau *Tobacco*	Luas Area (ha): *Area Size (ha):*	878	1.078	1.123	1.052	1.328
		TBN/VBN	878	878	805	776	752
		FIN/FIK	-	-	67	75	100
		NO	-	200	251	201	476
Produksi *Production*	Tebu *Sugarcane*	Produksi Tebu Giling (ton) *Milled Sugarcane Production (tons)*	4.333.410	5.944.896	5.188.355	6.110.957	6.737.553
		Produktivitas tebu/ha (ton) *Sugarcane Productivity/ha (tons)*	75,3	84,2	73,8	84,4	86,6
		Rendemen (%) *Yield (%)*	7,93	6,36	8,30	7,65	7,19
		Produksi gula (ton) *Sugar Production (tons)*	343.747	380.507	430.749	468.338	485.473
		Produksi tetes (ton) *Molasses Production (tons)*	250.417	333.002	323.758	371.437	393.318
	Tembakau *Tobacco*	Produksi Daun Hijau (ton) *Leaves Production (tons)*	15.536	19.075	21.475	17.676	21.174
		Rendemen (%) *Yield (%)*	10	9	10	9	8
		Produksi Kering Rompos (ton) *Dried Tobacco Production (tons)*	1.506	1.727	2.139	1.646	1.694
		Protas Kering Rompos (ton/ha) *Dried Protas (tons/ha)*	1.71	1,60	1,90	1,56	1,28
	Cutting Bobbin	Produksi cutting bobbin (potong) *Cutting Bobbin Production (pieces)*	527	522	549	563	716
	Rumah Sakit *Hospital*	Bed Occupation Rate (BOR) %	88,43	86,86	83,48	83,36	70,94
		Hari Perawatan (Hari) *Inpatient (days)*	175.592	164.361	147.789	123.536	102.278
		Jumlah Tempat Tidur (Buah) *Number of Bed (units)*	523	485	485	400	387

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

Uraian	2017	2016	2015	2014	2013	Description
Aset Lancar (Rp Juta)	2.354.154	2.557.767	2.436.820	1.843.418	1.540.274	*Current Assets (IDR Million)*
Aset Tidak Lancar (Rp Juta)	10.719.686	10.506.251	9.891.072	2.702.929	2.324.597	*Non-Current Assets (IDR Million)*
Jumlah Aset (Rp Juta)	13.073.841	13.064.018	12.327.892	4.546.348	3.864.872	*Total Assets (IDR Million)*
Liabilitas Jangka Pendek (Rp Juta)	2.146.972	1.303.877	943.379	1.230.827	1.148.425	*Current Liabilities (IDR Million)*
Liabilitas Jangka Panjang (Rp Juta)	1.872.603	2.708.846	2.098.120	2.236.897	1.492.262	*Non-Current Liabilities (IDR Million)*
Jumlah Liabilitas (Rp Juta)	4.019.575	4.012.723	3.056.462	3.467.724	2.640.687	*Total Liabilities (IDR Million)*
Jumlah Ekuitas (Rp Juta)	9.054.266	9.051.296	9.286.393	1.078.623	1.224.184	*Total Equity (IDR Million)*
Pendapatan (Rp Juta)	2.593.942	2.260.374	2.531.558	1.902.441	2.375.078	*Revenue (IDR Million)*
Laba Kotor (Rp Juta)	527.281	250.799	618.336	288.385	429.493	*Gross Profit (IDR Million)*
Laba Usaha (Rp Juta)	181.825	-153.638	302.290	61.130	191.821	*Operating Profit (IDR Million)*
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (Rp Juta)	93.945	-207.555	198.363	-31.189	185.414	*Profit (Loss) Before Tax (IDR Million)*
Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Rp Juta)	64.746	-152.556	126.428	-27.639	129.329	*Profit (Loss) for the Year (IDR Million)*
Laba (Rugi) Komprehensif (Rp Juta)	3.550	-149.987	7.220.886	-128.442	129.329	*Comprehensive Profit (Loss) (IDR Million)*
Laba (Rugi) Per Saham (Rp/lembar)	30.520	-96.273	136.749	-37.905	14.703.150	*Earnings (Loss) Per Share (IDR/share)*
EBITDA (Rp Miliar)	344.734	22.431	413.867	182.813	368.855	*EBITDA (IDR Billion)*
Pertumbuhan Penjualan (%)	14,76	-10,71	33,07	-19,90	10,70	*Sales Growth (%)*
Marjin Laba Kotor (%)	20,33	11,10	24,43	15,16	18,08	*Gross Profit Margin (%)*
Marjin Laba Usaha (%)	7,01	-6,80	11,94	3,21	8,08	*Net Operating Profit (%)*
Marjin Laba Bersih (%)	3,62	-9,18	7,84	-1,64	7,81	*Net Profit Margin (%)*
Rasio Kewajiban terhadap Aset (%)	30,75	30,72	24,79	76,27	68,33	*Debt to Total Assets (%)*
Tingkat Pengembalian Ekuitas (%)	0,72	-1,69	1,36	-2,56	10,56	*Return on Equity (%)*
Tingkat Pengembalian Investasi (%)	0,50	-1,17	1,03	-0,61	3,35	*Return on Investment (%)*
Rasio Kas (%)	59,61	92,65	140,6	23,08	60,04	*Cash Ratio (%)*
Rasio Lancar (%)	109,65	196,17	258,31	149,77	134,12	*Current Ratio (%)*
Tingkat Kolektibilitas (Hari)	24,74	153,02	96,72	73,27	55,36	*Collection Ratio (Days)*
Perputaran Persediaan (x)	9,91	3,5	3,77	2,9	5,9	*Inventory Turnover (x)*
Perputaran Aset (x)	0,21	0,17	0,21	0,43	0,63	*Asset Turnover (x)*
Rasio DER (x)	0,44	0,44	0,33	3,21	2,16	*Debt to Equity Ratio (%)*
EBITDA Marjin (%)	18,18	4,37	19,97	29,91	15,99	*EBITDA Margin (%)*
ROA (%)	0,50	-1,17	1,03	-0,61	3,35	*ROA (%)*
Rasio EBITDA terhadap beban bunga (x)	2,25	0,88	4,68	19,44	13,41	*EBITDA to Interest Expense Ratio (x)*
Tingkat Kesehatan Perusahaan	Kurang Sehat *Not Healthy* (BBB)	Kurang Sehat *Not Healthy* (BBB)	Sehat *Healthy* (A)	Sehat *Healthy* (A)	Sehat *Healthy* (AA)	*The Company's Soundness Level*

Total Aset
Total Assets

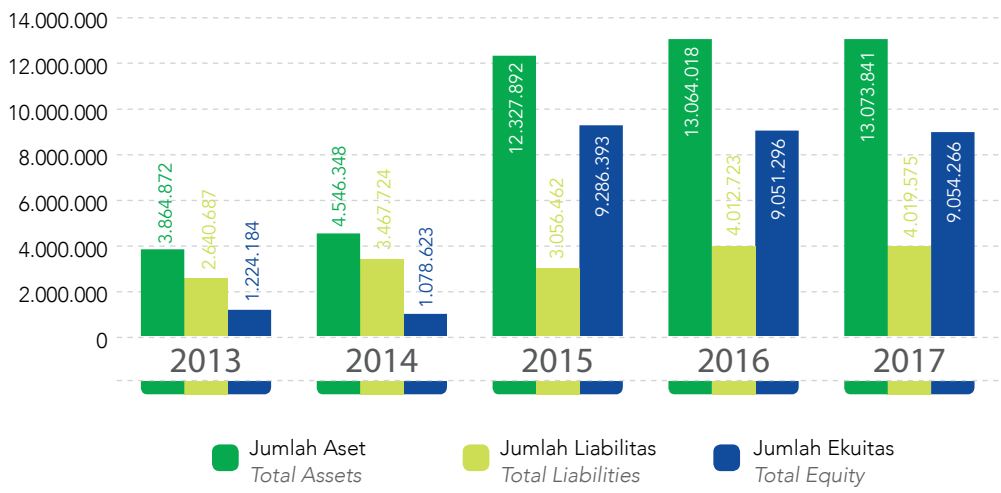

Pendapatan
Revenue

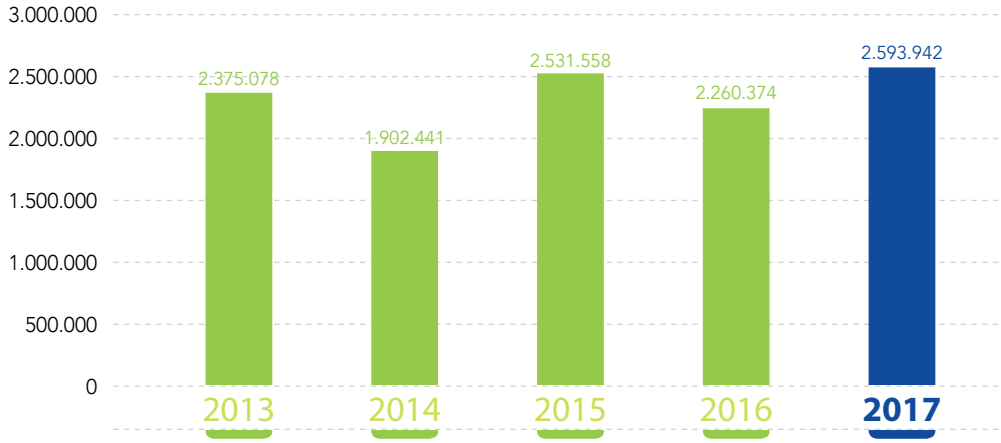

EBITDA

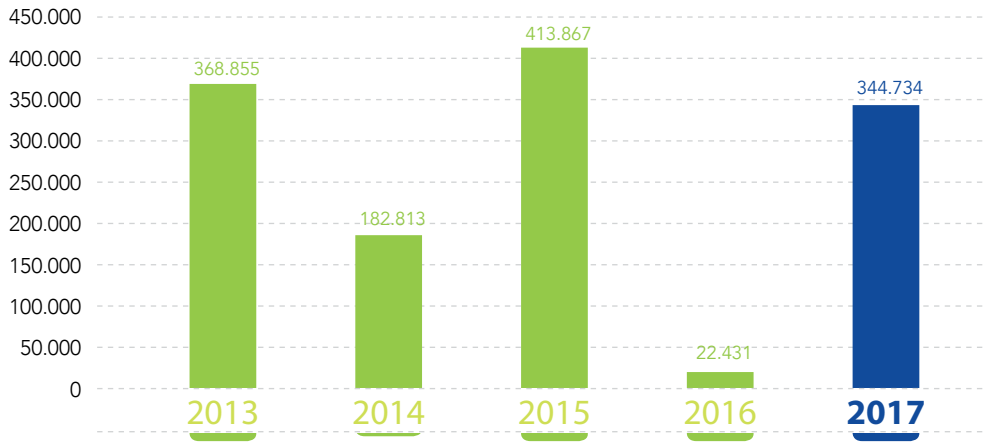

Produksi Tebu Giling
Milled Sugarcane Production

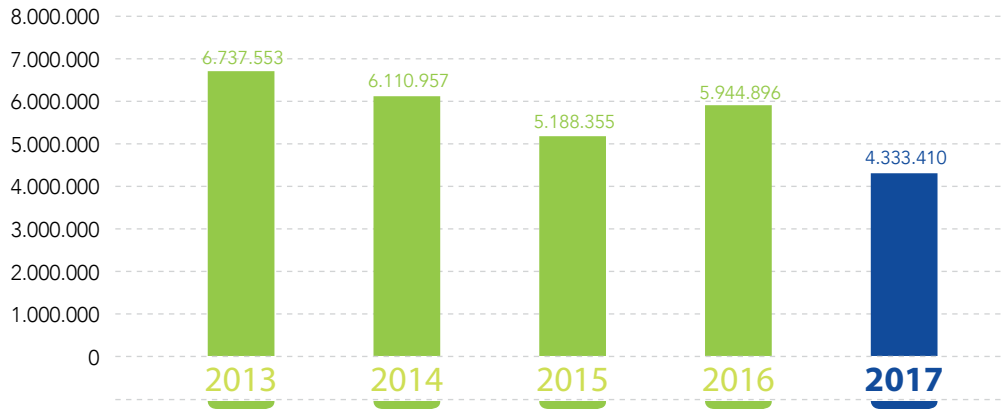

Produksi Gula dan Tetes
Sugar and Molasses Production

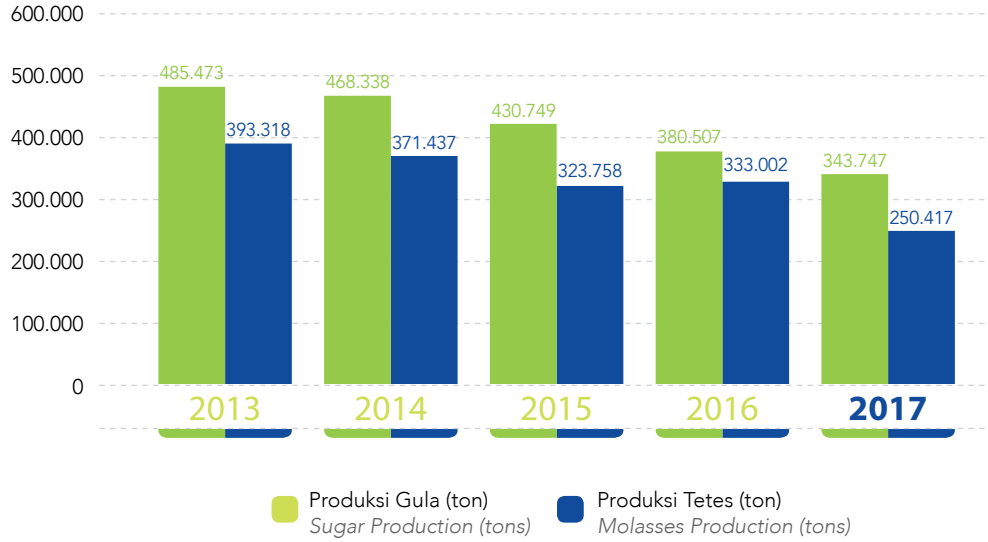

Produksi Daun Hijau dan Kering Rompos
Leaves and Dried Tobacco Production

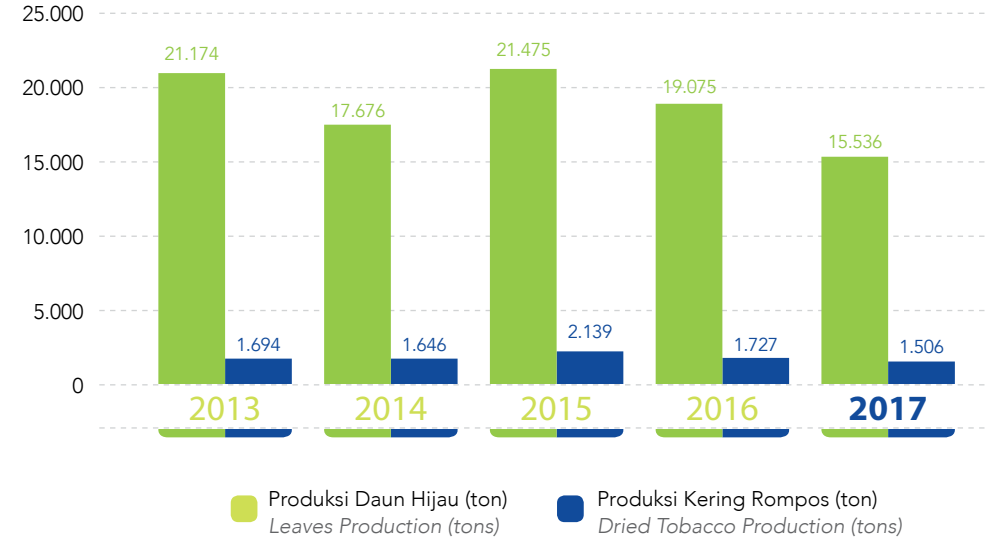

Produksi Cutting Bobbin
Cutting Bobbin Production

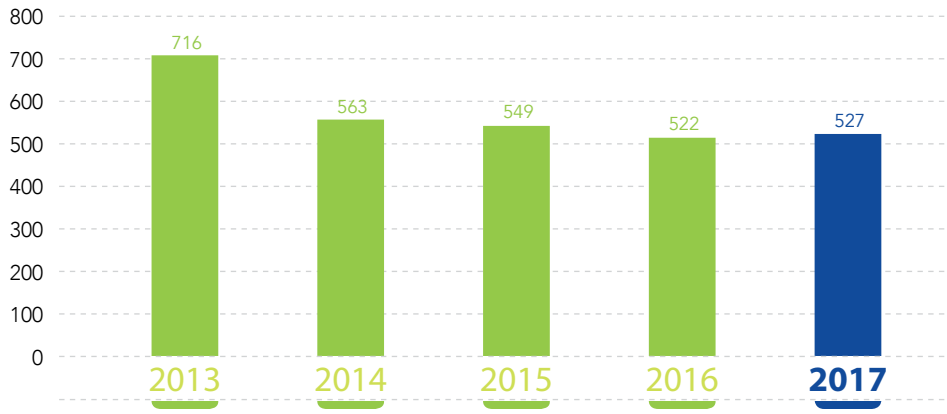

Bed Occupation Rate (%)

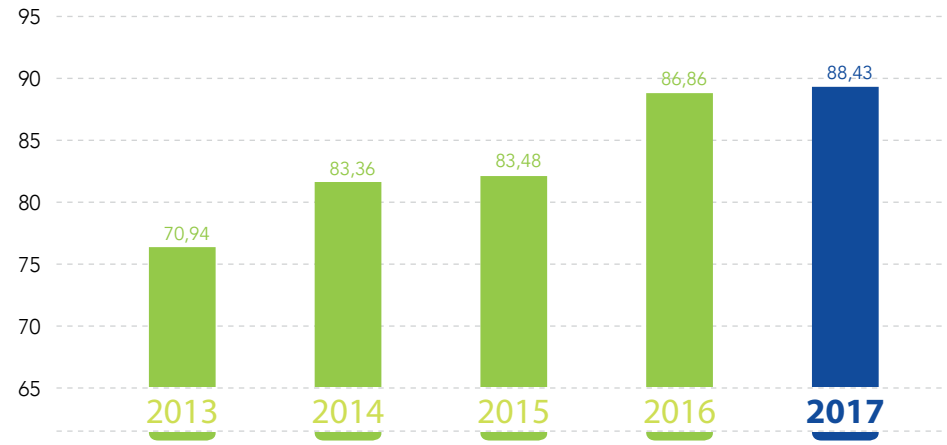

Ikhtisar Saham
Share Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2017, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X belum melakukan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak terdapat informasi yang memuat tentang: (1) Jumlah saham yang beredar; (2) Kapitalisasi pasar; (3) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan (4) Volume perdagangan.

As of the end of 2017, the Company has not traded any shares at the Indonesia Stock Exchange, hence there has been no information on the following: (1) Total shares outstanding; (2) Market capitalization; (3) Highest, lowest, and closing share price; and (4) Share trading volume.

Ikhtisar Obligasi
Bonds Highlights

Nama Obligasi *Bonds Name*	**Jumlah (Rp)** *Amount (IDR)*	**Jangka Waktu (Tahun)** *Tenor (Years)*	**Tingkat Bunga (Kupon)** *Interest Rate (Coupon)*	**Tanggal Penerbitan** *Issuance Date*	**Tanggal Jatuh Tempo** *Maturity Date*	**Peringkat*** *Rating*
Obligasi I PTPN X Tahun 2013 *Bond I of PTPN X Year 2013*	Rp700.000.000.000,-	5 tahun *5 years*	Tetap 8,9% per tahun *Fixed 8.9% per year*	05 Juli 2013 *July 5, 2013*	05 Juli 2018 *July 5, 2018*	BBB/stable

*Berdasarkan hasil pemantauan tahunan pemeringkatan atas Obligasi I PTPN X Tahun 2013, sesuai dengan surat No. RC-102/PEFDIR/ II/2017 tanggal 20 Februari 2017.

*Based on the monitoring result of annual rating on Bond I of PTPN X Year 2013, in accordance with the Letter No. RC-102/PEFDIR/II/2017 dated February 20, 2017.

Peristiwa Penting
Important Events

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1	**20 Januari 2017** *January 20, 2017*	Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR meninjau Pabrik Gula (PG) Watoetoelis dan PG Toelangan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur *Specific Work Visit Team (Kunspek) Commission VI of the Parliament to visit Sugar Factory (PG) Watoetoelis and PG Toelangan in Sidoarjo Regency, East Java*
2	**3 Februari 2017** *February 3, 2017*	PTPN X melalui PTPN Magz berhasil menjadi salah satu yang terbaik dalam ajang Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2017 Kategori BUMN yang digelar oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS), di Jakarta *Through PTPN Magz, PTPN X succeeded in becoming one of the best in Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2017 event for SOE Category, which was conducted by Indonesian News Publishers Association (SPS), in Jakarta*
3	**16 Februari 2017** *February 16, 2017*	Pusat Penelitian Gula - Jengkol mengadakan acara Diseminasi Hasil Penelitian Gula, di Kediri, Jawa Timur. Adapun tema dalam acara tersebut adalah "Dukungan Riset On Farm dalam Pemenuhan Bahan Baku Tebu (BBT) yang Berkualitas dan Berkelanjutan". *Sugar Research Center – Jengkol held Dissemination Event of Sugar Research results, in Kediri, East Java. The theme of the event is "Support On Farm Research in Fulfilling Good Quality and Sustainable Sugarcane Raw Material (BBT)".*
4	**8 & 22 Maret 2017** *March 8 & 22, 2017*	Penadatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama dengan Institut Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Jember. *Signing of Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation with Sepuluh Nopember Technology Institute (ITS) and Jember University.*
5	**6 April 2017** *April 6, 2017*	Ekspose hasil penelitian Tembakau di Royal Hotel and Lounge, Jember, Jawa Timur *Presentation of the results of Tobacco research at Royal Hotel and Lounge, Jember, East Java*
6	**17 April 2017** *April 17, 2017*	Peresmian Poliklinik Eksekutif RS Gatoel, Mojokerto Jawa Timur *Inauguration of Executive Polyclinic of Gatoel Hospital, Mojokerto, East Java*
7	**27 Juli 2017** *July 27, 2017*	Dilaksanakan penandatanganan MoU Kerjasama Uji Multilokasi Calon Varietas Unggul Baru (VUB) Tebu Amphibi, antara PTN X dan Puslitbang Perkebunan Balitbangtan Kementerian Pertanian. *Signing of MoU for Cooperation in Multi-location Test of New Superior Variety (VUB) Candidate of Amphibious Sugarcane between PTPN X and Research and Development Center of Plantation, Research and Development Agency, Ministry of Agriculture.*
8	**23 Agustus 2017** *August 23, 2017*	PTPN X menggelar panen perdana demplot tebu rakyat di Desa Gro'om, Kecamatan Proppo, Pamekasan, Madura. *PTPN X held the first harvest of sugarcane demplot in Gro'om Village, Proppo Sub-District, Pamekasan, Madura.*
9	**30 Agustus 2017** *August 30, 2017*	*Grand Opening* NX Mart, yakni koperasi karyawan PTPN X yang ditampilkan dengan lebih modern serta produk yang lebih lengkap *Grand Opening of NX Mart, i.e. the Company's employee cooperative, which is displayed with a more modern look and complete products.*
10	**16 September 2017** *September 16, 2017*	*Launching* Edamame (salah satu makanan yang kaya akan vitamin A, C, serat dan protein) di Coffee Toffee, Surabaya. *Launching of Edamame (one of the foods rich in vitamin A, C, fiber and protein) at Coffee Toffee, Surabaya.*
11	**18-19 September 2017** *September 18-19, 2017*	Kunjungan Dewan Ketahanan Nasional ke PG Watoetoelis, PG Gempolkrep, PT Enero, PG Pesantren Baru, dan PG Ngadiredjo. Kunjungan ini untuk memantau langsung hulu hingga hilir proses produksi gula *Visit of the National Resilience Board to PG Watoetoelis, PG Gempolkrep, PT Enero, PG Pesantren Baru, and PG Ngadiredjo. This visit was conducted to directly monitor the sugar production process from upstream to downstream.*
12	**Oktober 2017** *October 2017*	Penadatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama antara PTPN X dengan Perum Perhutani. *Signing of Memorandum of Understanding (MoU) for the cooperation between PTPN X and Perum Perhutani.*
13	**Oktober 2017** *October 2017*	Kunjungan Komisaris Holding Perkebunan ke PG Gempolkrep , PG Pesantren Baru, PT Enero *Visit of Commissioner of Plantation Holding to PG Gempolkrep, PG Pesantren Baru, PT Enero*
14	**9 November 2017** *November 9, 2017*	Kunjungan Direktur Utama Holding Perkebunan ke PTPN X *Visit of the President Director of Plantation Holding to PTPN X*
15	**16 November 2017** *November 16, 2017*	Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Kebun Kertosari dan Kejari Jember guna menangani kegiatan hukum yang dimiliki unit usaha milik PTPN X *Signing of Cooperation Agreement (PKB) between Kebon Kertasari and Kejari Jember for handling legal activities of work unit owned by PTPN X*
16	**16 November 2017** *November 16, 2017*	Kunjungan Menteri BUMN Rini M Soemarno *Visit of the Minister of State-Owned Enterprises, Rini M. Soemarno*
17	**24 November 2017** *November 24, 2017*	Kerjasama POC antara PT Enero dan ITS, di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya *POC Cooperation between PT Enero and ITS, at Sepuluh Nopember Institute Technology, Surabaya*
18	**27 November 2017** *November 27, 2017*	*Focus Group Discussion* (FGD) Komite IV DPR RI di Kantor Pusat PTPN X *Focus Group Discussion (FGD) of Commission IV of Parliament of the Republic of Indonesia at the Head Office of PTPN X*

Laporan Manajemen

Management Report

Perseroan berhasil menorehkan pencapaian yang positif dari berbagai lini bisnis yang dijalankan, melalui langkah strategis yang dilakukan Perseroan untuk mengembangkan berbagai peluang usaha.

The Company succeeded in recording positive achievements in various owned lines of business, through the strategic measures undertaken by the Company to acquire a variety of business opportunities.

Menghadapi tantangan faktor alam yang tak dapat dihindarkan, Perseroan mampu mengelola dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya, untuk dapat membukukan pencapaian produksi dan keuangan di tahun 2017.

Facing the inevitable challenge of natural factors, the Company is able to manage and optimize all its resources, to achieve production and financial achievements in 2017.

RUDI WIBOWO
Komisaris Utama
President Commissioner

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Izinkan kami selaku Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara X, atau disebut juga "Perseroan" atau "PTPN X", mengawali laporan tahunan 2017 dengan sekilas laporan dari Dewan Komisaris. Kiranya laporan yang menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban manajemen ini juga dapat digunakan sebagai kunci gambaran kinerja PTPN X di sepanjang tahun 2017.

SEKILAS TENTANG INDUSTRI GULA TAHUN 2017

Agribisnis perkebunan Indonesia pada dasarnya telah melalui jalan dan pengalaman yang sangat panjang, bahkan jauh sebelum jaman kemerdekaan. Sejarah mencatat bahwa industri agro di bidang perkebunan setiap waktu mengalami pasang dan surutnya, mengikuti dinamika pasar, baik domestik maupun internasional. Beberapa komoditas telah sangat populer dan menduduki tempat penting di pasar internasional seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh dan bahkan tembakau bahan cerutu.

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Please allow us, the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara X or referred to also as "the Company" or "PTPN X", started the 2017 annual report with a brief report from the Board of Commissioners. The report which is part of the management accountability report can also be used as PTPN X's performance overview throughout 2017.

A GLANCE ON 2017 SUGAR INDUSTRY

Indonesia's agribusiness has basically gone through a long road and experience, even long before the independence era. History recorded that agro industry in the field of plantation experienced its ups and downs at any given moment, following the domestic and international market dynamics. Some commodities have been very popular and occupied important places in international markets such as palm oil, rubber, coffee, cocoa, tea and even cigar tobacco.

Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

Pertama, pada setiap tahun, tidak terkecuali sepanjang tahun 2017, bahwa faktor eksternal dari lingkungan agronomis memiliki peran yang penting, terutama iklim dan cuaca. Untuk hampir semua komoditas, terutama komoditas perkebunan semusim seperti tebu dan tembakau, faktor eksternal iklim dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kinerja kultur teknik budidaya. Khusus untuk tahun 2017, iklim dan cuaca berkenaan dengan kultur teknis tebu dan tembakau relatif normal, lebih baik dibandingkan dengan 2016 yang relatif kurang baik yang menunjukkan adanya cuaca ekstrem.

Kedua, kondisi lingkungan strategis terkait dengan pasar internasional maupun domestik memang lebih dinamis dan cenderung semakin ketat. Regulasi dan situasi pasar internasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung menekan perdagangan tembakau bahan cerutu, seperti WHO-FCTC, STP, *Corresta Guidance*, dan lainnya. Untuk itu, regulasi domestik terkait pemasaran produk-produk Gula Kristal Putih dan produk-produk turunannya telah dan terus akan memacu kinerja Perseroan untuk lebih baik, berdaya saing dan berkreasi dalam mengembangkan produk-produk hilirnya.

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DAN HUBUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) wajib memiliki 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham; Direksi yang bertugas menjalankan pengurusan PT; dan Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya pengurusan PT yang dilakukan Direksi.

Hubungan antara fungsi pengurusan oleh Direksi dan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris harus berjalan secara sinergis. Dalam tatanan organisasi yang berlaku di Perseroan, hubungan sinergis ini terbangun baik secara formal maupun informal. Secara formal, Dewan Komisaris memiliki forum rapat gabungan dengan mengundang Direksi untuk melakukan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi.

Di sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris menggelar 13 kali rapat gabungan dengan Direksi. Rapat-rapat tersebut menjadi forum pembahasan sekaligus pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi, yang membahas beberapa agenda strategis seperti pemantauan dan pemberian rekomendasi atas penyusunan dan realisasi

Firstly, every year, including throughout 2017, external factors of the agronomic environment have an important role, especially climate and weather. For almost all commodities, especially seasonal plantation commodities such as sugarcane and tobacco, external factors of climate and weather greatly affected the performance of cultivation techniques culture. Especially for the year 2017, climate and weather related to the technical culture of sugar cane and tobacco was relatively normal, better compared to the relatively inferior 2016 which showed extreme weather.

Secondly, strategic environmental condition related to national and international markets are indeed more dynamic and they tend to be tighter. The regulation and situation of the international market for the last few years have suppressed cigar tobacco trade such as WHO-FCTC, STP, Corresta Guidance, and others. Hence, domestic regulation related to the marketing of Refined Sugar and its derivative products has and keeps on pushing the Company's performance to be better, competitive and creative in developing its downstream products.

SUPERVISORY FUNCTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND WORK RELATIONSHIP WITH THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 concerning Limited Liability Company, business entity in the form of Limited Liability Company (PT), shall have three (3) main organs i.e., General Meeting of Shareholders (GMS) as a forum for the shareholders; the Board of Directors assigned to run the management of the Company; and the Board of Commissioners who function in the supervisory towards the Company's management performed by the Board of Directors.

The relationship between the management function of the Board of Directors and the supervisory function of the Board of Commissioners shall run in synergy. In the Company's organizational structure, this synergy relationship is built formally and informally. Formally, the Board of Commissioners has a joint meeting forum, inviting the Board of Directors in order to conduct monitoring function on the management of the Company performed by the Board of Directors.

Throughout 2017, the Board of Commissioners held 13 joint meetings with the Board of Directors. These meetings became the discussion forum as well as supervisory of the Board of Commissioners on the Board of Directors' performance, discussing several strategic agendas such as monitoring and recommendations on the development

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017, pemantauan atas pelaksanakan penerapan GCG, pemantauan atas pelaksanaan investasi Perseroan, sinergi dalam *holding* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan, serta beberapa agenda strategis lainnya.

Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris merupakan bagian dari aspirasi dan amanat pemegang saham. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Dewan Komisaris menjadi representasi atas kepentingan pemegang saham untuk mengawasi pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Kompetensi anggota Dewan Komisaris memungkinkan untuk memberikan masukan kepada Direksi terkait arah dan strategi pengurusan Perseroan; tentunya dengan batas-batas hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi.

Melalui upaya pengembangan hubungan sinergis berlandaskan tatanan organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan, Dewan Komisaris berharap fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja Perseroan.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Lingkungan agroteknis di sepanjang tahun 2017 tidak sesulit pada tahun sebelumnya, sehingga kinerja agroteknis tebu maupun tembakau relatif lebih baik. Namun demikian, lingkungan sosial ekonomi di tahun 2017 yang kurang bersahabat dan kompetisi yang semakin ketat mengharuskan Perseroan menciptakan inovasi-inovasi baru. Kebijakan Pemerintah mengharuskan Perseroan senantiasa meningkatkan efisiensi akibat ketatnya harga produk yang dihasilkan, sementara kompetisi dengan kompetitor sejenis semakin ketat.

Meskipun demikian, secara umum Perseroan masih mampu mencapai kinerja yang cukup baik. Dalam lingkup makro, capaian usaha tahun 2017 memang belum sepenuhnya mampu mengembalikan kinerja usaha seperti pada tahun-tahun 2012-2013 yang sangat baik, mengingat lingkungan agroteknis dan agrobisnis kala itu memang sangat bersahabat, terutama bagi produk-produk berbasis tebu maupun tembakau.

Berpijak atas visi dan misi yang telah ditetapkan Perseroan, Dewan Komisaris menilai bahwa meskipun dengan semua keterbatasannya, Direksi telah dan terus menunjukkan kinerjanya berdasarkan strategi dan fokus yang ingin diraih Perseroan. Strategi tersebut bermuara pada upaya peningkatan efisiensi, diversifikasi, dan optimalisasi (EDO) pada setiap lini Perseroan. Hal ini terlihat dari upaya untuk terus-menerus meningkatkan produktivitas tebu

and realization of the Company's 2017 Work Plan and Budget (RKAP), monitoring on the implementation of GCG, monitoring on the Company's investment implementation, synergy in plantation sector SOE, and several other strategic agendas.

Supervisory function run by the Board of Commissioners is part of the shareholders' aspiration and mandate. Directly or indirectly, the Board of Commissioners became the representation of the shareholders' interest in supervising the Company's management performed by the Board of Directors with regards to the direction and strategy of the Company's management; certainly with limitations on rights, authorities and obligations owned by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Through the effort of developing synergetic relationship based on accountable organizational structure, the Board of Commissioners expects that the supervisory function can be carried out effectively and comprehensively, eventually providing positive impact to the Company's performance.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS IN THE COMPANY'S MANAGEMENT

Agro technique environment in 2017 was not as difficult as previous year, making the agro technique of sugarcane and tobacco relatively better. However, the socio-economic environment in 2017 was not too friendly and the competition was getting tighter, requiring the Company to keep creating new innovations. The government's policy required the Company to keep improving efficiency due to the tight prices of the produced products, while the competition is getting ever tighter.

Nevertheless, in general the Company was still able to perform quite well. In the macro environment, business achievement in 2017 was indeed not able to fully restore the performance to what it was like in the years of 2012-2013 which was very good, considering the agro technique environment and agro business at the time was very friendly, especially for cane or tobacco-based products.

Based on the vision and mission set by the Company, the Board of Commissioners assessed that, with all of its limitations, the Board of Directors have and are continuing to show its performance based on the strategy and focus the Company would like to achieve. This strategy is focused on the efforts to improve efficiency, diversification, and optimization (EDO) in each line of the Company. This is seen from the efforts to continuously improve sugarcane

dan rendemen gula serta produk-produk diversifikasinya. Kelincahan, kecepatan dan keluwesan manajemen sangat dibutuhkan mengingat cepatnya perubahan lingkungan strategis dalam agroteknis dan agribisnis, sehingga dapat segera menemu-kenali serta mengeliminasi hambatan-hambatan yang dihadapi.

Untuk itu, Direksi diharapkan mampu secara berkesinambungan meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya. Perbaikan teknis budidaya dan produksi, kemitraan dengan petani, serta penyempurnaan pengembangan *Enterprise Resource Planning* (ERP) adalah beberapa ilustrasi penting untuk melangkah lebih baik ke depan. Meskipun demikian, soliditas antar Direktorat serta unit-unit bisnis dan entitas anak juga harus menjadi bagian penting agar Perseroan mampu mewujudkan visi dan misi yang diharapkan.

Pengelolaan tim kerja yang solid terlihat dari sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang memang bukan merupakan hal mudah dan sederhana. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kompetensi (baik teknis maupun manajerial dan *leadership*) yang harus disiapkan oleh manajemen sehingga sistem meritokrasi dapat berjalan dengan baik. Sejauh ini, meskipun sistem meritokrasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, akan tetapi penataan dan pengembangan SDM di lingkup Perseroan terus dilakukan agar sistem dapat berlangsung dengan baik. Pelatihan dan pengembangan kompetensi dan karakter cukup baik dilaksanakan pada berbagai tingkatan dan kualifikasi SDM, baik di tingkat unit maupun di tingkat Direksi.

Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan yang tertuang dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga menjadi bagian dari keberhasilan Direksi dalam mengelola Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan CSR telah dilakukan dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidah yang harus dilakukan. Meskipun besaran nilai program CSR Perseroan tidak terlalu tinggi, akan tetapi pendayagunaannya dinilai sesuai dengan penugasannya, misalnya mendorong peningkatan lingkungan yang kondusif, pelatihan kewirausahaan masyarakat sekitar lokasi usaha, inovasi produktif sektor usaha mikro dan kecil, serta kesehatan dan pendidikan. Hal ini terlihat juga dari predikat pelaksanaan CSR yang setiap tahun senantiasa memperoleh penilaian yang baik dari pemegang saham.

Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui pengukuran sesuai arahan dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ("PTPN III") sebagai pemegang saham utama sekaligus *holding* BUMN sektor perkebunan. Hasil penilaian menjadi pertimbangan bagi pemegang saham untuk memberikan apresiasi terhadap Direksi.

and yields productivity, as well as other diversified products. Agility, speed, and flexibility of the management are desperately needed considering the swift change of strategic environment in agro technique and agribusiness, enabling the management to immediately identify and eliminate the obstacles being faced.

Hence, the Board of Directors is expected to be able to sustainably improve their capability and competence. Improvement in cultivation and production techniques, partnership with farmers, as well as refinement of Enterprise Resource Planning (ERP) development are some important illustrations to go forward better. However, the solidity between the Directorates and business units and subsidiaries shall also become an important part so that the Company can realize its expected vision and mission.

The management of a solid working team is visible from the Human Resource Management (HR) system is not an easy nor simple thing to do. This is caused by the many competencies (both technical and managerial & leadership) which must be prepared by the management so that the meritocracy system can run well. Thus far, although the meritocracy system has not fully functioned properly, human resource management and development in the Company's scope continues to be carried out in order for the system to run properly. Training and development of competence and character are implemented quite well at various levels and qualifications of human resources, both at the unit level and at the Board of Directors level.

The management of relationships with stakeholders as stipulated in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) is also part of the success of the Board of Directors in managing the Company. The Board of Commissioners considers that the implementation of CSR has been carried out well, in accordance with the rules that must be adhered to. Although the value of the CSR program is not very high, the utilization is assessed in accordance with its assignments, such as promoting a conducive environment, entrepreneurship training around the business location, productive innovations in micro and small enterprises, and health and education. This is also seen from the predicate of the implementation of CSR which always get a good assessment from shareholders every year.

The performance assessment of the Board of Directors through measurement was conducted in line with the direction of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ("PTPN III") as the main shareholder of plantation sector SOE holding. The assessment result became the consideration for shareholders to provide appreciation to the Board of Directors.

Aspek Key Performance Indicator (KPI) Direksi PTPN X

Aspect of the Company's Board of Directors Key Performance Indicator (KPI)

Aspek Keuangan *Financial Aspect*	**Aspek Operasional** *Operational Aspect*	**Aspek Administrasi** *Administrative Aspect*
↓	↓	↓
Profitability Ratios *Coverage Ratios* *Corporate Size Growth Ratios* *Cash-Generating Ratios*	*Production Growth - On Farm Level* *Production Growth - Ending Product* *Crop Fertilizing (Ton Pupuk TM+TBM)* *Plant Utilization Rate*	Ketepatan Penyampaian Laporan Efektivitas Penyaluran Pinjaman Kemitraan Kolektabilitas Pinjaman Kemitraan *Timeliness of Report Submission* *Effectiveness of Partnership Loan Distribution* *Collectability of Partnership Loan*

Secara umum, keberhasilan Direksi dalam melakukan pengelolaan Perseroan terlihat dari pencapaian realisasi terhadap target RKAP yang telah ditentukan di awal tahun. Jika dibandingkan dengan target RKAP, volume penjualan gula mencapai 82,88%, sedangkan nilai penjualan mencapai 82,63% dibandingkan RKAP tahun 2017. Untuk produk tembakau, volume penjualan ekspor tembakau sebesar 42,04%, dan nilai penjualan ekspor mencapai 66,00% dibandingkan target RKAP tahun 2017. Pendapatan Perseroan tahun 2017 sebesar Rp2,59 triliun, atau 79,01% dibandingkan target RKAP 2017. Sedangkan laba usaha mencatat pencapaian 78,41% dibandingkan target RKAP tahun 2017.

Secara khusus, Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi selama tahun 2017 atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Komitmen dan fokus terus-menerus dalam mencapai misi, dengan strategi EDO pada setiap tingkatan manajemen.
2. Pengembangan instrumen-instrumen manajemen dan komitmen pelaksanaannya, seperti ERP, peningkatan produktivitas, peningkatan pelayanan kepada petani, dan terus berupaya memenangkan kompetisi terhadap perusahaan sejenis.
3. Kinerja entitas anak yang baik, seperti PT Mitratani Dua Tujuh ("MT 27") yang mengembangkan industri Edamame dan Okra serta PT Nusantara Medika Utama ("NMU") yang mengelola pelayanan rumah sakit yang dimiliki Perseroan, patut mendapatkan apresiasi. Meskipun demikian, upaya pengembangan dan diversifikasi dari PT Dasaplast Nusantara ("DPN") untuk industri plastik dan *fiber* perlu segera ditangani lebih baik, sehingga kinerja pabrik pengolah plastik di Tulangan dapat diakselerasi. Untuk PT Energi Agro Nusantara ("ENERO") yang mengembangkan industri bahan bakar, kajian Direksi atas pilihan apakah tetap sebagai entitas anak atau menjadi kompleks unit bisnis tak terpisahkan harus dilakukan secermat mungkin, sehingga segera berkinerja positif.

Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja di tahun 2018 adalah:

In general, the success of the Board of Directors in managing the Company is evident from the achievement of the realization of RKAP targets set at the beginning of the year. When compared to 2017 RKAP target, sugar sales volume reached 82.88%, while the sales value reached 82.63% compared to 2017 RKAP. For tobacco products, tobacco export sales volume reached 42.04%, and export sales reached 66.00% compared to 2017 RKAP target. The Company's revenue in 2017 amounted to IDR2.59 trillion, or 79.01% compared to 2017 RKAP target. Meanwhile, operating profit recorded 78.41% achievement compared to 2017 RKAP target.

Specifically, the Board of Commissioners would like to convey its appreciation to the performance of the Board of Directors in 2017 based on the following considerations:

1. Commitment and continuous focus on achieving missions, with EDO strategies at every level of management.
2. Development of management instruments and implementation commitments, such as ERP, productivity increase, service improvement to farmers, and continue striving to win the competition against similar companies.
3. Good performance of the Company's subsidiaries, such as PT Mitratani Dua Tujuh ("MT 27"), which develops Edamame and Okra industries and PT Nusantara Medika Utama ("NMU"), which manages the Company's hospital services, deserves appreciation. However, the development and diversification efforts of PT Dasaplast Nusantara ("DPN") for plastic and fiber industries need to be handled better in order to accelerate the performance of plastic processing plant in Tulangan. PT Energi Agro Nusantara ("ENERO"), which develops the fuel industry, a review of the Board of Directors on whether to remain as a subsidiary or to become an inseparable business unit complex, should be done as accurately as possible, so that it will soon show a positive performance.

Nevertheless, several things need to be a concern performance improvements in 2018, namely:

1. Kapabilitas di dalam mengantisipasi risiko-risiko manajemen yang terjadi akibat dinamika lingkungan strategis, baik secara agroteknis maupun agribisnis.
2. Kapabilitas dalam mengadaptasi inovasi maupun pengembangan teknologi, terutama berkaitan dengan upaya merealisasikan strategi EDO.
3. Pengembangan kompetensi dan meritokrasi SDM bagi semua tingkatan manajemen, yang merupakan prasyarat dasar bagi korporasi yang berkembang secara produktif dan *sustainable*.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA DARI PERUSAHAAN YANG DISUSUN DIREKSI

Dewan Komisaris melihat, lingkungan strategis perekonomian di tahun 2018 terutama situasi pasar dunia menjadi tantangan tersendiri bagi situasi Perseroan. Harga produk-produk Perseroan, terutama gula menunjukkan kecenderungan menurun, mengingat surplus dunia dalam beberapa komoditas termasuk gula. Untuk pasar internasional komoditas tembakau, tekanan regulasi pasar dunia dan kompetisi yang semakin tinggi merupakan tantangan yang harus terus-menerus diantisipasi dan dikelola oleh Perseroan. Selain itu, situasi 2018 sebagai "tahun politik" dengan agenda-agenda pemilihan umum di tingkat daerah harus diantisipasi dengan sebaik-baiknya.

Memasuki tahun 2018, Direksi telah menyusun RKAP yang dipandu oleh *holding* BUMN perkebunan, dan telah ditetapkan pada RUPS yang diselenggarakan tanggal 6 Januari 2017. Parameter-parameter sasaran yang akan dicapai telah dianggap realistis, meskipun Dewan Komisaris menilai masih terbuka peluang akan peningkatan kinerja di atas parameter-parameter sasaran yang telah ditetapkan oleh RUPS-RKAP. Dewan Komisaris memperoleh gambaran bahwa beberapa sasaran pencapaian kinerja baik unit usaha strategis maupun entitas anak masih mampu untuk meningkatkan sasaran kinerja pada akhir tahun 2018 dengan kinerja yang lebih baik. Meskipun demikian, kehati-hatian dan kecermatan dalam menentukan prognosa perkembangan aspek-aspek kinerja *on-farm* maupun *off-farm* sangat diperlukan mengingat dinamika lingkungan internal maupun eksternal sangat tinggi kemungkinannya, terutama menghadapi tahun-tahun politik 2018-2019.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PERAN DEWAN KOMISARIS

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, perkembangan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkup Perseroan

1. Capability in anticipating management risks that occur due to the dynamics of the strategic environment, both agro technique and agribusiness.
2. Capability in adapting innovation and technology development, especially related to the efforts in realizing EDO strategy.
3. Development of competencies and meritocracy of human resources for all levels of management, which are the basic prerequisite for productively and sustainably growing company.

VIEWS ON THE COMPANY'S BUSINESS OUTLOOK FORMULATED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners views that the strategic environment of the economy in 2018, especially the world market situation, becomes a challenge for the Company's situation. The price of the Company's products, especially sugar shows a declining trend, given the world surplus in some commodities, including sugar. For the international market of tobacco commodities, the increasing pressure on world market regulation and competition are challenges, which should be consistently anticipated and managed by the Company. In addition, the 2018 situation as a "political year" with electoral agenda at the local level, should also be properly anticipated.

Entering 2018, the Board of Directors has developed the RKAP guided by the SOE holding for plantation sector, and has been stipulated at the GMS held on January 6, 2017. The target parameters to be achieved have been considered realistic, although the Board of Commissioners believes that there is still an opportunity for performance improvement above target parameters established by the GMS-RKAP. The Board of Commissioners has a description that some of the performance target of both strategic business units and subsidiaries are still able to improve performance objectives by the end of 2018 with better performance. However, prudence and accuracy in determining the prognosis of development aspects of on-farm and off-farm performance are strongly required given the dynamics of both internal and external environments are very likely, especially in facing the political years of 2018-2019.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND THE ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

When compared to previous years, the development of Good Corporate Governance (GCG) implementation in the Company's showed a very good progress. Basically, it

memperlihatkan kemajuan yang sangat baik. Pada dasarnya telah cukup lama segenap insan PTPN X menyadari bahwa GCG harus dilaksanakan untuk menjadi landasan setiap perilaku dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Itu sebabnya, sudah lebih dari 5 (lima) tahun ini Perseroan melaksanakan GCG secara optimal sesuai dengan *Code of Conduct* yang disusun dan disosialisasikan, termasuk pemberlakuan *Whistleblowing System* (WBS) atau Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkup Perseroan. Dengan demikian, Dewan Komisaris meyakini bahwa pelaksanaan GCG saat ini telah berlangsung dengan baik, meskipun perlu peningkatan pada beberapa aspek.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Dewan Komisaris bersama organ Komite Audit telah berupaya maksimal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberikan berbagai nasehat serta masukan dan pengawasan kepada jajaran Perseroan, baik melalui rapat-rapat gabungan dan rapat kerja, kunjungan ke berbagai unit usaha strategis dan entitas anak, serta secara rutin memberikan respon dan masukan tertulis terkait aspek-aspek kinerja Perseroan dan melaporkannya kepada pemegang saham. Komite audit, satu-satunya komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan masukan secara rutin pada setiap rapat internal, khususnya terkait aspek-aspek pemantauan dan evaluasi kinerja Perseroan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam berkenaan dengan kinerja Perseroan, Dewan Komisaris melakukan kajian-kajian akademik pada topik-topik tertentu dengan bantuan tenaga-tenaga akademik dari universitas.

Secara keseluruhan, tugas dan fungsi Dewan Komisaris telah dan akan terus dilaksanakan secara maksimal untuk peningkatan kinerja Perseroan, baik dalam aspek-aspek administratif, operasional maupun finansial. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan atas penerapan GCG tercermin dalam nilai KPI dengan berbagai indikatornya, yang secara keseluruhan mendapatkan penilaian baik.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komsiaris Perseroan dibantu oleh 1 (satu) komite sebagai organ pendukung, yaitu Komite Audit. Sejauh ini Komite Audit senantiasa bekerja dengan sangat baik. Sesuai dengan tugasnya, Komite Audit setiap bulan melaporkan tugas-tugas auditnya pada seluruh unit bisnis di lingkungan Perseroan, dan setiap 3 (tiga) bulan dilakukan pembahasan laporan Komite Audit pada rapat internal Dewan Komisaris. Bahan tersebut menjadi referensi bagi Dewan Komisaris dalam rapat gabungan dengan Dewan Direksi pada setiap bulannya. Untuk itu, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kinerja yang telah ditunjukkan Komite Audit.

has been quite some time since the Company's personnel has realized that GCG should be implemented to become the basis of every behavior in carrying out their roles and responsibilities. Hence, in more than 5 (five) years, the Company has implemented GCG optimally in accordance with the Code of Conduct prepared and disseminated, including the application of Whistleblowing System (WBS) or the Reporting System of Violations, within the Company. Thus, the Board of Commissioners believes that the current GCG implementation has been well implemented, although it still needs improvement in several aspects.

As mentioned above, the Board of Commissioners together with the Audit Committee's organs have made every effort to carry out their duties and functions by providing various advice and inputs and supervision to the Company's management, either through joint meetings and work meetings, visits to various strategic business units and subsidiaries, and regularly provide written responses and input regarding aspects of the Company's performance and report it to shareholders. The Audit committee, the only committee under the Board of Commissioners, has performed its duties and functions in providing regular feedback at each internal meeting, especially on aspects of supervision and evaluation of the Company's performance. To obtain a broader and deeper picture of the Company's performance, the Board of Commissioners conducts academic studies on certain topics with the assistance of academic staff from the university.

In overall, the duties and functions of the Board of Commissioners have been and will continue to be fully implemented for the improvement of the Company's performance, both in administrative, operational and financial aspects. The performance assessment of the Board of Commissioners in its supervisory function towards GCG implementation is reflected in KPI score with its various indicators, which in overall obtained good assessment.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMMITTEE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In performing its duties, the Company's Board of Commissioners is supported by 1 (one) committee as supporting organ, namely the Audit Committee. To this point, the Audit Committee has always worked very well. In accordance with its duties, the Audit Committee reports its monthly audit duties to all business units within the Company, and every 3 (three) months the Audit Committee report is discussed at the internal meeting of the Board of Commissioners. The materials are used as reference for the Board of Commissioners in joint meetings with the Board of Directors every month. Hence, the Board of Commissioners appreciates the performance, which has been shown by the Audit Committee.

INFORMASI TENTANG PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DI TAHUN 2017

Di sepanjang tahun 2017 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2017 adalah sama, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

INFORMATION ON CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2017

Throughout 2017, there has been no changes in the composition of the Board of Commissioners. Hence, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2016 and December 31, 2017 is the same, as described in the following table:

Susunan Dewan Komisaris PTPN X
per 31 Desember 2017

Composition of the Board of Commissioners of PTPN X
As of December 31, 2017

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Masa Jabatan *Term of Office*
Rudi Wibowo (Komisaris Utama) *(President Commissioner)*	21 November 2013 - RUPS 2018 *November 21, 2013 – 2018 GMS*
Sukardi Rinakit (Komisaris) *(Commissioner)*	31 Maret 2016 - RUPS 2021 *March 31, 2016 – 2021 GMS*
Y.B. Priyatmo Hadi (Komisaris) *(Commissioner)*	1 September 2016 - RUPS 2021 *September 1, 2016 – 2021 GMS*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen) *(Independent Commissioner)*	1 September 2016 - RUPS 2021 *September 1, 2016 – 2021 GMS*

Pergantian susunan Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi keputusan pemegang saham yang dituangkan melalui mekanisme RUPS.

The changes in the composition of the Board of Commissioners is entirely the shareholder's decision as outlined in the GMS mechanism.

PENUTUP

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham, pemangku kepentingan, dan para investor; PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai pemegang saham utama, pelanggan dan mitra usaha, Direksi dan karyawan, atas seluruh dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan. Semoga Perseroan terus dapat bertumbuh untuk mewujudkan visi dan misinya, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan.

CLOSING

The Board of Commissioners would like to thank to all shareholders, stakeholders and investors; PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as the major shareholder, customers and business partners, the Board of Directors and employees, for all dedication and hard work, which have been demonstrated. May the Company continue to grow to realize its vision and mission, which will ultimately add value to shareholders and all stakeholders.

Surabaya, 25 Mei 2018

Surabaya, May 25, 2018

Rudi Wibowo
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi
Report of the Board of Directors

DWI SATRIYO ANNUROGO
Direktur Utama
President Director

Di tengah kondisi industri gula yang terjadi di sepanjang tahun 2017, Perseroan berhasil membukukan Pendapatan sebesar Rp2,59 triliun, meningkat 14,76% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp2,26 triliun

In the midst of unfavorable sugar industry condition throughout 2017, the Company managed to record Revenue of Rp2.59 trillion, increased by 14.76% compared to 2016 of Rp2.26 trillion

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Sebagai bagian dari *holding* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perkebunan, PT Perkebunan Nusantara X, atau disebutnya juga sebagai "PTPN X" atau "Perseroan", mengembangkan kompetensi intinya melalui budidaya tanaman, produksi hasil tanaman, perdagangan dan pemasaran, pengembangan usaha bidang perkebunan, serta usaha lain yang menunjang usaha pokoknya. Kegiatan usaha utama Perseroan dilakukan melalui penjualan melalui persaingan bebas dan terkoordinir untuk produk gula dan tembakau. Selain itu, Perseroan juga menjalankan usaha industri tetes, industri karung plastik, *Innerbag* dan *Waring*, jasa kesehatan yaitu rumah sakit, jasa *Cutting Bobbin*, serta industri bioethanol serta makanan/sayuran beku, yang seluruhnya dijalankan oleh 4 (empat) entitas anak yang dimiliki Perseroan, yaitu PT Mitratani Dua Tujuh ("M27") untuk industri Edamame dan Okra *(frozen vegetables)*, PT Dasaplast Nusantara ("DPN") untuk industri karung dan *flexible packaging*, PT Nusantara Medika Utama ("NMU") untuk pelayanan rumah sakit, dan PT Energi Agro Nusantara ("ENERO") untuk industri bahan bakar.

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

As part of the holding State-Owned Enterprise (SOE) in the plantation sector, PT Perkebunan Nusantara X, also known as "PTPN X" or "the Company", develops its core competencies through crop cultivation, crop production, trade and marketing, plantation business development, and other businesses that support the Company's main business. The Company's main business activities are conducted through sales in a free and coordinated competition for sugar and tobacco products. In addition, the Company also engages in molasses industry, plastic bags industry, Innerbag and Waring, health services such as hospitals, Cutting Bobbin services, as well as bioethanol industry and frozen food/vegetables industry, which carried out by its 4 (four) subsidiaries, namely PT Mitratani Dua Tujuh ("M27") for Edamame and Okra (frozen vegetables) industry, PT Dasaplast Nusantara ("DPN") for plastic bags and flexible packaging industry, PT Nusantara Medika Utama ("NMU") for hospital services, and PT Energi Agro Nusantara ("ENERO") for the fuel industry.

Melalui pengembangan kompetensi intinya, Perseroan mengambil peran dan tanggung jawab untuk berkontribusi pada industri gula dan tembakau di Indonesia, khususnya ketika gula pasir menjadi salah satu dari 9 (sembilan) bahan pokok sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 115/MPP/KEP/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat. Dengan tanggung jawab tersebut, Perseroan berharap mampu menjalankan perannya sebagai bagian dari program Pemerintah Indonesia untuk menciptakan industri gula yang terkoordinir.

PERKEMBANGAN INDUSTRI GULA TAHUN 2017

Perkembangan operasional dan usaha Perseroan tahun 2017 tidak dapat dilepaskan dari situasi yang melingkupi industri gula di sepanjang tahun 2016. Efek cuaca ekstrem dari badai La-Nina yang terjadi di tahun 2016 membawa dampak pada tebu giling di tahun 2017, yakni mundurnya bulan tanam/kepras dan keterlambatan kultivasi sebagian kebun secara mekanis karena curah hujan yang tinggi di tahun 2016. Kondisi cuaca tersebut juga mengakibatkan kebun mengalami kebanjiran sehingga pertumbuhan tanaman terganggu atau bahkan tanaman mati akibat banjir/genangan sehingga harus dilakukan tanam ulang. Dampak-dampak tersebut menyebabkan protas tebu yang digiling di tahun 2017 mengalami penurunan.

Untuk penjualan gula, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah menugaskan BUMN untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Perum BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional, gula telah menjadi salah satu komoditi pangan pokok sehingga seluruh gula produksi milik BUMN harus dijual melalui BULOG. Sebagai produsen gula yang tergabung dalam *holding* BUMN perkebunan, Perseroan berkomitmen untuk terus mendukung program ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia, diantaranya dengan mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan. Kementerian Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi gula pada level Rp12.500 per kilogram, kecuali daerah yang dianggap terpencil sehingga membutuhkan ongkos distribusi yang tinggi. Penetapan harga tersebut dilakukan pada 16 Januari 2017 melalui penandatanganan nota kesepahaman antara 11 produsen dan 8 (delapan) distributor gula.

Kementerian Perdagangan juga bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi persaingan usaha dan pemberian sanksi

Through the development of its core competencies, the Company has taken the role and responsibility to contribute to the sugar and tobacco industry in Indonesia, especially when sugar became one of the 9 (nine) basic commodities in accordance with Decree of the Minister of Industry and Trade No. 115/MPP/KEP/2/1998 dated February 27, 1998 concerning the Type of Basic Commodities Needed by the Community. With this responsibility, the Company expects to be able to perform its role as part of the Government of Indonesia's program to create a coordinated sugar industry.

DEVELOPMENT OF THE SUGAR INDUSTRY IN 2017

The Company's operational and business development in 2017 was inseparable from the situation surrounding the sugar industry throughout 2016. The extreme weather effects due to La-Nina storm that occurred in 2016 have impacted milled sugarcane in 2017, namely the delay of planting month/kepras and mechanical cultivation delay in some plantations due to heavy rainfall in 2016. The extreme weather has caused plantations to be flooded, which disturbed the plants growth, some plants were even dead due to the flood; hence, re-planting had to be done. These impacts have caused milled sugarcane protas to decline in 2017.

For sugar sales, in order to achieve national food security, the Government assigned SOE to maintain food availability and stabilize food prices at the customer and producer levels. Based on the Presidential Regulation No. 48/2016 concerning the Assignment to Perum BULOG for national food security, sugar became one of the basic food commodities, hence all SOE-produced sugar had to be sold through BULOG. As a sugar producer incorporated in the holding SOE in the plantation sector, the Company is committed to continuously supporting the food security program established by the Government of Indonesia, among others by complying with the agreement signed by the Minister of Trade. The Ministry of Trade has set the highest retail price of sugar at IDR12,500 per kilogram, except for areas considered to be remote areas, which require high distribution costs. The pricing was determined on January 16, 2017 through the signing of a memorandum of understanding between 11 producers and 8 (eight) sugar distributors.

The Ministry of Trade also worked together with the Commission for the Supervisory of Business Competition (KPPU) in overseeing business competition and the

maupun denda jika terjadi pelanggaran oleh produsen atau distributor. Kesepakatan harga melalui intervensi di tingkat distributor ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Nota kesepahaman tersebut juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan terkait kekurangan stok gula.

Di tahun 2017, Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Untuk gula pembelian di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp9.100 per kilogram dan penjualan ke konsumen senilai Rp12.500 per kilogram. Ketentuan ini berlaku hingga Juli 2017. Kemudian Pemerintah menetapkan bahwa Bulog membeli gula petani dan Perseroan seharga Rp9.700 per kilogram, sesuai hasil rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian pada bulan Agustus 2017.

Salah satu kebijakan penting dalam industri gula adalah dihapuskannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk gula konsumsi, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.010/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN. Keputusan ini memberikan imbas yang positif terhadap pelaku industri, khususnya para petani penanam tebu dan produsen gula seperti Perseroan. Penghapusan PPN untuk gula menjadi insentif tersendiri, dan memberikan kegairahan bagi industri gula nasional.

KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2017

Untuk menghadapi kondisi industri gula yang terjadi di sepanjang tahun 2017, Perseroan mengupayakan berbagai langkah strategis agar mampu terus mengembangkan berbagai peluang usaha. Salah satunya adalah kebijakan sentralisasi keputusan dimulainya giling dari Pabrik Gula (PG) yang dikelola Perseroan. Hingga akhir tahun 2017, Perseroan mengelola 11 PG yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur, yaitu PG Watoetoelis, PG Toelangan (stop operasi) dan PG Kremboong, ketiganya terletak di Sidoarjo; PG Gempolkrep di Mojokerto; PG Djombang Baru dan PG Tjoekir di Jombang, PG Lestari di Nganjuk, PG Meritjan, PG Pesantren Baru dan PG Ngadiredjo, ketiganya di Kediri; serta PG Modjopanggoong di Tulungagung.

Kebijakan sentralisasi tersebut ditempuh agar sinergi operasional antar PG yang dikelola Perseroan dapat tercipta, dan memberikan keuntungan efektivitas dan efisiensi atas keseluruhan proses operasional Perseroan. Proses giling dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan bahan baku tebu

imposition of sanctions and fines in the event of a breach by the manufacturer or distributor. Price agreement through interventions at distributor level was in accordance with the Presidential Regulation No. 71/2015 concerning the Establishment and Storage of Basic Goods and Essential Items. The memorandum of understanding also aimed to address the issue related to the shortage of sugar stock.

In 2017, the Ministry of Trade also issued the Minister of Trade Regulation of the Republic of Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017 dated May 16, 2017 concerning the Determination of Reference Price for Purchase at Farmers and Reference Price for Sales to Customers. For purchase at farmers' level, the reference was set at IDR9,100 per kilogram and sales to customers at IDR12,500 per kilogram. This provision was valid until July 2017. Then, the Government decided that BULOG shall purchase sugar from farmers and the Company for IDR9,700 per kilogram, as referred to in the result of coordination meeting at the Coordinating Ministry of Economic Affairs office in August 2017.

One of the important policies in the sugar industry was the elimination of Value Added Tax (VAT) for consumption sugar, in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 116/PMK.010/2017 dated August 15, 2017 concerning Basic Necessities Exempted From Value Added Tax. This decision has positive impact for industry players, especially sugarcane farmers and sugar producers, such as the Company. The elimination of VAT for sugar has become an incentive and has created excitement to the national sugar industry.

2017 STRATEGIC POLICY

In facing the condition of the sugar industry throughout 2017, the Company has strived for various strategic measures to be able to continue developing different business opportunities. Such as the centralized decision policy for starting the milling process from Sugar Factory (PG) managed by the Company. Until the end of 2017, the Company managed 11 PGs spread across several areas in East Java, namely PG Watoetoelis, PG Toelangan (no longer operating) and PG Kremboong, all three located in Sidoarjo; PG Gempolkrep in Mojokerto; PG Djombang Baru and PG Tjoekir in Jombang, PG Lestari in Nganjuk, PG Meritjan, PG Pesantren Baru and PG Ngadiredjo, all three in Kediri; and PG Modjopanggoong in Tulungagung.

The centralized decision policy was adopted to enable the creation of operational synergies between PGs managed by the Company, as well as to provide benefits for the effectiveness and efficiency of the Company's entire operational process. The milling process is done gradually according to the availability

dari area perkebunan tebu yang menjadi wilayah masing-masing PG. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk memperoleh bahan baku dengan kualitas yang baik (manis, bersih dan segar) sehingga sasaran jumlah gula dapat memenuhi target yang diharapkan. Hingga bulan Mei 2017, baru 3 (tiga) PG di bawah naungan Perseroan yang telah memulai proses giling, yaitu PG Pesantren Baru, PG Ngadiredjo, dan PG Gempolkrep. Sedangkan untuk PG lainnya memulai proses giling setelah momen Idul Fitri atau pada akhir Juni 2017.

Pada pengolahan tembakau, Perseroan mengupayakan untuk terus memperluas pasar-pasar baru, khususnya pasar ekspor yang sesuai dengan produk tembakau premium yang dimiliki Perseroan. Lebih kurang 80% dari produk tembakau Perseroan dipasarkan secara ekspor, yang menunjukkan diterimanya produk tembakau oleh pasar internasional.

Perseroan juga terus mencoba mengoptimalkan kinerja 4 (empat) entitas anak yang dimilikinya. Arahan untuk melakukan ekspansi dan pengembangan diberikan kepada M27 yang bergerak di industri produk Edamame dan Okra *(frozen vegetables)*. Dengan kapasitas terpasang sebesar 10 ribu ton per tahun, di tahun 2017 kapasitas produksi M27 telah mencapai 9.500 ton per tahun, atau 95% atas optimalisasi kapasitas yang dimilikinya. Perseroan memandang perlunya peningkatan kapasitas produksi yang dimiliki M27, agar mampu terus menciptakan peluang usaha secara berkelanjutan. Selain itu, M27 diminta untuk membuka pasar baru selain di Jepang untuk menopang peningkatan kapasitas produksi tersebut.

Demikian pula dengan NMU yang mengelola pelayanan rumah sakit yang dimiliki Perseroan. *Bed Occupancy Rate* (BOR) rumah sakit yang dikelola NMU telah mencapai 88,43%, menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat akan layanan rumah sakit. Diperlukan penambahan kapasitas rawat inap agar tingkat pelayanan rumah sakit tidak mengalami penurunan. Kepada NMU, Perseroan tidak menekankan profitabilitas sebagai sasaran utama dalam pengelolaan operasinya, namun bagaimana NMU dapat menghadirkan kualitas pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan pengguna layanan rumah sakit.

Entitas anak, DPN, untuk industri karung dan *flexible packaging*, serta ENERO yang menjalankan industri bahan bakar memiliki prospek pengembangan usaha yang cukup baik. *Flexible packaging* yang dikembangkan DPN diharapkan mampu memperluas pasar baru dan meningkatkan profitabilitas DPN ke depan. Sementara ENERO diharapkan mampu mengembangkan hilirisasi produk melalui variasi produk sehingga mampu meningkatkan daya tawar penjualan, serta mampu mendapatkan bahan baku tetes di pasar yang lebih kompetitif.

of sugarcane raw material from the sugarcane plantation within the area of each PG. This has become one of the efforts to obtain good quality raw materials (sweet, clean and fresh) to enable the Company in achieving the targeted amount of sugar. Until May 2017, only 3 (three) PGs under the Company's management have started the milling process namely, namely PG Pesantren Baru, PG Ngadiredjo, and PG Gempolkrep. Meanwhile, other PGs started the milling process after Idul Fitri or at the end of June 2017.

In tobacco processing, the Company strived to continue expanding new markets, particularly export markets, which suitable with the Company's premium tobacco products. Approximately 80% of the Company's tobacco products were marketed through export, which indicated that these tobaccos products were accepted by the international market.

The Company also continued to try optimizing the performance of its 4 (four) subsidiaries. Directions for expansion and development have been given to M27, which engaged in Edamame and Okra (frozen vegetables) product industry. With an installed capacity of 10 thousand tons per year, in 2017, M27 production capacity has reached 9,500 tons per year or 95% of its capacity optimization. The Company considered the need to increase production capacity owned by M27 to enable them in continuously creating business opportunities. In addition, M27 was also requested to open up new markets other than in Japan to support the increase of its production capacity.

Similarly with NMU, which engaged in the Company's hospital services. Bed Occupancy Rate (BOR) of the hospital managed by NMU has reached 88.43%, indicated the substantial needs of the community for hospital services. Increased hospitalization capacity was needed to prevent the hospital service level from declining. Towards NMU, the Company has not focused on profitability as the main target of its operational management, but on how NMU could deliver the best quality of services to customers or users of hospital services.

Other subsidiaries of the Company, DPN, which engaged in plastic bags and flexible packaging industry, and ENERO, which engaged in fuel industry, have good prospect in their business development. DPN has developed flexible packaging, which was expected to expand new market and improve DPN's profitability in the future. While ENERO was expected to be able to develop product down-streaming through product variation so as to increase sales bargaining power, and able to obtain the raw material of molasses in a more competitive market.

Salah satu strategi besar yang ditempuh Perseroan di tahun 2017 adalah peningkatan pengelolaan hubungan petani tebu sebagai mitra Perseroan. Perubahan cara berpikir dari "dibutuhkan oleh petani" menjadi "membutuhkan petani" merupakan kunci untuk dapat membentuk hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan petani.

Dengan seluruh upaya pengelolaan yang telah dilakukan, Perseroan mencatat produksi tebu digiling tahun 2017 sebesar 4,33 juta ton, turun 27,11% dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,18 juta ton. Penurunan pencapaian jumlah produksi tebu digiling terutama disebabkan penurunan luas areal 18,48% dan produktivitas tebu yang turun 10,57%.

Turunnya produktivitas tebu per hektar, dari 84,2 ton per hektar di tahun 2016 menjadi 75,3 ton per hektar sebagian besar dipicu oleh cuaca ekstrem yang terjadi di tahun 2016 yang kemudian berdampak terhadap produksi tebu di tahun 2017. Curah hujan yang tinggi di sepanjang tahun 2016 telah menyebabkan mundurnya bulan tanam/kepras, keterlambatan kultivasi secara mekanis dari sebagian kebun, sebanyak 138,9 hektar atau 4% kebun mengalami kebanjiran sehingga pertumbuhan tanaman terganggu, dan sebanyak 84,1 hektar atau 2% kebun mengalami tanaman mati akibat banjir/genangan sehingga harus dilakukan tanam ulang.

Namun, rendemen tahun 2017 sebesar 7,93% mengalami kenaikan 24,69% dibandingkan tahun 2016 sebesar 6,36%. Hal ini merupakan hasil dari upaya meraih kemasakan tebu yang optimal dengan penataan proses dimulainya giling pabrik gula berdasarkan kesiapan BBT (minimal umur 12 bulan) didukung dengan kondisi musim kemarau yang cukup tegas sehingga kemasakan tebu dapat tercapai secara optimal. Volume penjualan produk gula Perseroan mengalami peningkatan 33,31%, dari 102,48 ribu ton di tahun 2016 menjadi 136,61 ribu ton di sepanjang tahun 2017. Untuk nilai penjualan produk gula tahun 2017 mencapai Rp1,30 triliun, meningkat 27,12% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp1,02 triliun.

Untuk tembakau, hingga akhir tahun 2017, produksi daun hijau tembakau TBN/VBN mencapai 15.536 ton dari luas lahan 878 hektar. Rendemen yang dicapai adalah 9,70% dengan produksi kering rompos mencapai 1.506 ton untuk tembakau TBN/VBN. Untuk produksi siap jual, atau *Ready for Sale* (RFS) mencapai 467 ton. Volume penjualan ekspor produk tembakau mengalami penurunan 32,64%, sementara nilai penjualan ekspor mengalami peningkatan 2%. Rata-rata harga satuan produk tembakau tahun 2017 mencapai Rp403 juta per ton, meningkat hingga 51,50% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp266 juta per ton.

One of the major strategies adopted by the Company in 2017 was the improved management of sugarcane farmers' relationships as a partner of the Company. Changes in the way of thinking of "needed by farmers" to "need farmers" was the key to establishing a harmonious relationship between the Company and the farmers.

With all the management efforts undertaken, the Company recorded milled sugarcane production of 4.33 million tons, a decline of 27.11% compared to 2016 of 5.18 million tons. The decline was due to the decline of area size of 18.48% as well as sugarcane productivity, which declined by 10.57%.

The decline in sugarcane productivity per hectare, from 84.2 tons per hectare in 2016 to 75.3 tons per hectare, was largely triggered by extreme weather occurred in 2016, which then impacted sugarcane production in 2017. Heavy rainfall throughout 2016 has caused the delay of planting month/kepras, mechanical cultivation delay in some plantations, as many as 138.9 hectares or 4% of plantations were flooded, which disturbed the plants growth, while 84.1 hectares or 2% of plantations were dead due to flood; hence, it must re-planted.

However, the yield in 2017 achieved 7.93%, increased by 24.69% compared to the year of 2016 at 6.36%. This was derived from the efforts to achieve the optimal maturity of sugarcane by structuring the starting process of sugar milling factory based on BBT/seed readiness (minimum 12 months) supported by the dry season conditions, which was quite significant, so that the maturity of sugarcane could be achieved optimally. The sales volume of the Company's sugar products increased by 33.31% from 102.48 thousand tons in 2016 to 136.61 thousand tons throughout 2017. While for the sales of sugar products in 2017 achieved IDR1.30 trillion, an increase of 27.12% compared to 2016 of IDR1.02 trillion.

For tobacco, until the end of 2017, the production of tobacco green leaves TBN/VBN achieved 15,536 tons of 878 hectares of land area. The yield achieved was 9.70% with the production of dry tobacco achieved 1,506 tons for TBN/VBN tobacco. For Ready for Sale (RFS) products achieved 467 tons. Sales volume of tobacco products exports declined by 32.64%, while export sales increased by 2%. The average unit price of tobacco products in 2017 achieved IDR403 million per ton, increased by 51.50% compared to 2016, which amounted to IDR266 million per ton.

Nilai Penjualan Gula dan Tembakau
(Rp juta)

Sugar and Tobacco Sales
(IDR Million)

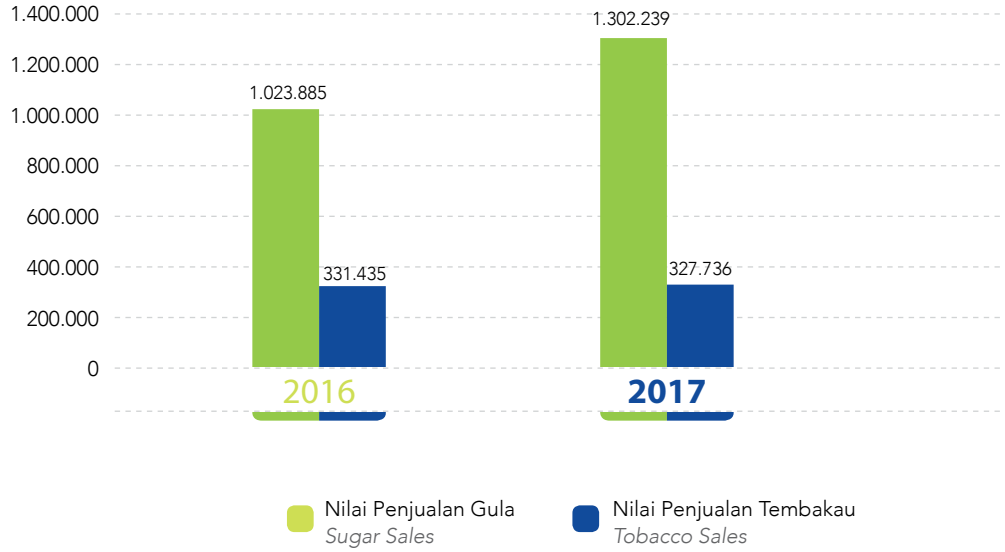

Pendapatan Perseroan tahun 2017 sebesar Rp2,59 triliun, meningkat 14,76% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp2,26 triliun. Peningkatan pendapatan ini terutama didapatkan dari adanya peningkatan nilai penjualan baik produk gula maupun tembakau yang diproduksi Perseroan. Laba usaha tahun 2017 tercatat sebesar Rp178,64 miliar, meningkat hingga 306,63% dibandingkan rugi usaha tahun 2016 sebesar Rp86,46 miliar. Melalui pencapaian tersebut, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp56,33 miliar, tumbuh 135,62% dibandingkan tahun 2016 yang mencatat rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp158,13 miliar.

In 2017, the Company's revenue amounted to IDR2.59 trillion, increased by 14.76% compared to 2016 of IDR2.26 trillion. The increase in revenue was mainly derived from the increase in product sales, namely sugar and tobacco, which produced by the Company. In 2017, the Company recorded operating profit of IDR178.64 billion, increased by 306.63% compared to the operating loss of IDR86.46 billion in 2016. With these achievements, the Company managed to obtain profit for the year attributable to owners of the parent entity of IDR56.33 billion, an increase of 135.62% compared to 2016, where the Company recorded loss for the year attributable to owners of the parent entity of IDR158.13 billion.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2017

Di setiap awal tahun, Perseroan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai target yang akan diraih Perseroan di sepanjang tahun, dengan pengesahan dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk target RKAP tahun 2017 disahkan melalui RUPS yang diselenggarakan tanggal 6 Januari 2017.

Jika dibandingkan dengan target RKAP, realisasi produksi tebu digiling mencapai 83,71% dan rendemen sebesar 98,02%. Produktivitas tebu mencapai 93,54% terhadap target RKAP tahun 2017. Volume penjualan gula mencapai 82,88%, sedangkan nilai penjualan mencapai 82,63% dibandingkan RKAP tahun 2017. Untuk produk tembakau, produksi daun hijau mencapai 74,00%, dan rendemen 97,00% terhadap target RKAP 2017. Volume penjualan ekspor tembakau sebesar 42,04%, dan nilai penjualan ekspor mencapai 66,00% dibandingkan target RKAP tahun 2017.

COMPARISON OF 2017 TARGET VS. REALIZATION

At the beginning of each year, the Company established the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as the targets to be achieved by the Company throughout the year, with ratification through the General Meeting of Shareholders (GMS). The 2017 RKAP targets were ratified through the GMS held on January 6, 2017.

Compared to RKAP targets, the realization of milled sugarcane production achieved 83.71%, while yields achieved 98.02%. Sugarcane production achieved 93.54% of its 2017 RKAP target. Sugar sales volume achieved 82.88%, while sales achieved 82.63% compared to 2017 RKAP target. Tobacco product, green leaves production achieved 74.00%, and yield 97.00% compared to its 2017 RKAP target. Tobacco export sales volume was 42.04%, and export sales achieved 66.00% compared to its 2017 RKAP target.

Pendapatan Perseroan tahun 2017 sebesar Rp2,59 triliun, tercatat mencapai 79,01% dibandingkan target RKAP 2017. Demikian pula dengan laba usaha yang mencatat pencapaian 78,41% dibandingkan target RKAP tahun 2017.

KENDALA-KENDALA DAN TANTANGAN TAHUN 2017 SERTA SOLUSINYA

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Perseroan adalah memberikan solusi menyeluruh kepada petani sebagai mitra Perseroan. Seperti yang telah disebutkan di atas, Perseroan berupaya untuk merubah cara berpikir "dibutuhkan oleh petani" menjadi "membutuhkan petani". Perubahan ini memberikan paradigma menyeluruh tentang bagaimana Perseroan mampu mengelola industri gula secara terkoordinir.

Perseroan melihat, kendala petani muncul pada 2 (dua) aspek mendasar, yaitu pendanaan untuk modal kerja dan pupuk. Di sepanjang tahun 2017 Perseroan telah mengupayakan berbagai langkah strategis untuk dapat memberikan solusi atas kedua kendala yang ditemui petani. Di akhir tahun 2017, Perseroan telah menjadi Avalist Investor dengan kapabilitas mampu menjadi penjamin investasi kepada petani. Selain itu, Perseroan mengupayakan sinergi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari berbagai BUMN yang dapat disalurkan kepada petani binaan. Demikian pula dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta kredit koperasi yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pendanaan modal kerja para petani. Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara *holding* BUMN di sektor perkebunan, pupuk dan perbankan agar mampu memberikan dampak positif terhadap pola pendanaan dan ketersediaan pupuk baik produk pupuk subsidi maupun non subsidi.

Selain perihal di atas, di tahun 2017 Perseroan mendapatkan kendala kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib untuk produk Gula Kristal Putih (GKP) atas sebagian produk yang dihasilkan. Untuk itu, di tahun 2018 Perseroan telah menargetkan perbaikan dan modifikasi pada proses produksi untuk memenuhi SNI Wajib tersebut.

Tantangan lain yang muncul di tahun 2017 adalah penyerapan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perseroan sebesar Rp975 miliar yang diberikan pada akhir tahun 2015. Adanya dinamika bisnis khususnya pada industri ethanol membuat rencana proyek pengembangan Pabrik Bioethanol Perseroan tidak lagi layak secara finansial. Perseroan telah mengajukan perubahan peruntukan atas PMN yang telah diberikan, dengan peruntukan pada revitalisasi dan peningkatan produksi PG Gempolkrep hingga 8.000 ton per hari, serta hilirisasi produk dari entitas anak, ENERO. Perubahan peruntukan ini telah disetujui oleh pemegang saham pada akhir Maret 2018, yang akan memberikan Perseroan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan produksi serta profitabilitasnya.

In 2017, the Company recorded revenue of IDR2.59 trillion or 79.01% of its 2017 RKAP target. While the Company's operating profit was recorded at 78.41% of its 2017 RKAP target.

2017 CONSTRAINTS AND CHALLENGES AND THE SOLUTIONS

One of the main challenges faced by the Company was to provide a comprehensive solution to farmers as its partner. As mentioned above, the Company strived to change the way of thinking of "needed by farmers" to "need farmers". This change provided an overall paradigm of how the Company was able to manage the sugar industry in a coordinated manner.

The company saw that the constraint of farmers occurred in 2 (two) fundamental aspects, namely funding for working capital and fertilizer. Throughout 2017, the Company has pursued various strategic measures to provide solutions to both constraints encountered by farmers. At the end of 2017, the Company has become an Avalist Investor with the capability to be a guarantor of investment to farmers. In addition, the Company strived to synergize Partnership and Community Development Program (PKBL) from various SOEs that can be distributed to the assisted farmers. Similarly, the scheme of People's Business Credit (KUR) and cooperative credit were expected to meet the funding needed by farmers for working capital. Therefore, synergy between holding SOE in the plantation sector, fertilizer and banking sectors was required to provide a positive impact on the funding model and the availability of fertilizers, both subsidized and non-subsidized fertilizer products.

In addition, in 2017, the Company also experienced constraint on the compliance with the Mandatory Indonesian National Standard (SNI) for Refined Sugar products, i.e. for some of the products produced by the Company. Therefore, in 2018, the Company has targeted improvements and modifications to the production process to meet the Mandatory SNI.

Another challenge occurred in 2017 was the absorption of State Equity Participation (PMN) to the Company of IDR975 billion, which provided at the end of 2015. The existence of business dynamics, especially in the ethanol industry has made the plan to develop the Company's Bioethanol Plant Project to be no longer financially viable. The Company has submitted a change in the allocation of PMN, which has been granted, with the allocation for revitalization and production improvement of PG Gempolkrep to 8,000 tons per day, and product downstreaming of its subsidiary, ENERO. The change has been approved by the shareholders at the end of March 2018, which would give the Company the opportunity to improve its production capability and profitability.

PROSPEK USAHA TAHUN 2018

Tahun 2018 akan menjadi tahun penuh tantangan bagi Perseroan. Dengan beberapa tantangan yang ditemui di sepanjang tahun 2017, Perseroan telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut, yang kemudian dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan.

Untuk produksi, target produksi tebu digiling tahun 2018 diharapkan mampu mencapai 4,95 juta ton, meningkat 14,27% dibandingkan realisasi tahun 2017. Produtivitas tebu diproyeksikan tumbuh 3,09% dibandingkan realisasi tahun 2017, dan nilai penjualan gula meningkat 3,04% terhadap realisasi tahun 2017. Untuk tembakau, produksi daun hijau di tahun 2018 diharapkan meningkat 2,92%.

Pendapatan tahun 2018 diproyeksikan mencapai Rp3,00 triliun, tumbuh 15,55% dari realisasi tahun 2017 yang sebesar Rp2,59 triliun. Beban pokok pendapatan meningkat 13,08%, dan laba usaha tahun 2018 diproyeksikan mampu tumbuh hingga 25,26% terhadap realisasi tahun 2017. Laba tahun berjalan diharapkan mampu tumbuh 61,58% dan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2018 meningkat 68,12% jika dibandingkan realisasi tahun 2017.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2017

Sebagai entitas anak dari *holding* BUMN sektor perkebunan, Perseroan memiliki tanggung jawab moral sebagai agen perubahan, termasuk memenuhi seluruh kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut telah dijalankan Perseroan, yang berdampak positif terhadap pola pengelolaan Perseroan oleh manajemen. Kemitraan strategis melalui pengawasan oleh Dewan Komisaris berdampak pada pengelolaan Perseroan yang lebih berimbang. RUPS yang memberikan forum bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan strategis turut mendorong praktik penerapan prinsip GCG yang berlandaskan pada transparansi dan akuntabilitas.

Perseroan telah melengkapi diri dengan manajemen risiko dan audit internal. Kedua pendekatan yang berfungsi layaknya 2 sisi 1 mata koin ini berfungsi memberikan pendeteksian dini atas kemungkinan-kemungkinan risiko yang dihadapi Perseroan, sekaligus memberikan evaluasi dan pengawasan pada proses bisnis yang telah berjalan. Terutama dengan profil risiko dari faktor eksternal seperti cuaca serta profil risiko dalam proses produksi Perseroan, pengelolaan risiko telah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan.

2018 BUSINESS OUTLOOK

The year 2018 will be a challenging year for the Company. With several challenges encountered throughout 2017, the Company has made various efforts to respond to these challenges, which then could contribute positively to the Company's overall performance.

For production, the Company targets to achieve 4.95 million tons, an increase of 14.27 percent compared to 2017. Sugar cane production is projected to grow by 3.09 percent compared to 2017, and sugar sales increased by 3.04 percent compared to the realization in 2017. For tobacco, green leaves production in 2018 is expected to increase by 2.92%.

In 2018, revenue is projected to achieve IDR3.00 trillion, an increase of 15.55% from the realization in 2017, which amounted to IDR2,59 trillion. Cost of sales increased by 13.08%, and operating profit in 2018 is projected to increase up to 25.26% compared to the realization in 2017. The profit for the year is expected to increase by 61.58%, while profit for the year attributable to owners of the parent entity in 2018 is expected to increase by 68.12% compared to the realization of 2017.

DEVELOPMENT OF 2017 GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) IMPLEMENTATION

As a subsidiary of SOE holding in the plantation sector, the Company has a moral responsibility as a change agent, including fulfilling all compliance with the applicable laws and regulations. The compliance has been executed by the Company, which has positive impact on the Company's management model carried out by the management. The strategic partnership through supervision by the Board of Commissioners has created an impact, namely a more balanced management of the Company. The GMS, which provided a forum for the shareholders to make strategic decisions, also encouraged the implementation of GCG principles based on transparency and accountability.

The Company has equipped itself with risk management and internal audit. Both approaches, which functioned like two sides of a coin, provided early detection of any potential risks faced by the Company, as well as evaluation and supervision on the implemented business processes. Particularly related to the risk profile of external factors, such as weather, as well as the risk profile in the Company's production process, risk management has become an inevitable requirement.

Transparansi informasi kepada pemegang saham juga menjadi perhatian manajemen. Melalui fungsi Sekretaris Perusahaan, Perseroan memberikan informasi yang komprehensif kepada pemegang saham, investor dan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan menyadari transparansi informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan keberlanjutan yang ditopang oleh keterikatan investor dan pemangku kepentingan dalam proses pengawasan tidak langsung.

Transparansi informasi yang komprehensif juga dilakukan melalui penyajian Laporan Keuangan Teraudit, yang telah melalui proses audit independen oleh akuntan publik. Penunjukan akuntan publik juga dilakukan melalui rangkaian mekanisme berjenjang, yang melibatkan pemegang saham melalui RUPS. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi akuntan publik, yang pada akhirnya akan memberikan opini yang sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Agar penerapan prinsip GCG dapat terukur, Perseroan melakukan *assessment* secara periodik tahunan. *Assessment* ini, baik *assessment* oleh pihak independen maupun *self assessment* yang dilakukan tim internal, akan menjadi evaluasi dan masukan bagi perbaikan penerapan prinsip GCG di lingkup Perseroan. Untuk *assessment* tahun ukur 2017 dilakukan melalui metode *self assessment* oleh Tim *Self Assessment* GCG Perseroan, dengan hasil 82,80 dengan kategori "Baik".

Selain itu, Perseroan melaksanakan penilaian kinerja berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), sesuai arahan dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku pemegang saham utama. Melalui penilaian KPKU dengan penilaian terhadap "proses" dan "hasil", Perseroan memiliki evaluasi menyeluruh terhadap keseluruhan aspek kinerjanya. Perseroan mencatat hasil KPKU tahun 2016 mencapai 415,75 dengan kategori "*Early Improvement*".

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pembangunan berkelanjutan mempersyaratkan entitas usaha yang memiliki dan mewujudkan aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penerapan program CSR didasarkan pada 4 (empat) aspek utama, yaitu aspek lingkungan, aspek ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta aspek tanggung jawab terhadap konsumen.

Keempat aspek di atas sesungguhnya dilandasi oleh keterikatan pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam proses bisnis Perseroan, khususnya pengawasan tidak langsung. Melalui aspek-aspek tersebut, akan tercipta sebuah hubungan yang harmonis, yang akan menjadi landasan bagi pembangunan berkelanjutan.

Information transparency to the shareholders was also a concern of the management. Through Corporate Secretary function, the Company has provided comprehensive information to the shareholders, investors and all stakeholders. The Company recognized information transparency as an integral part of sustainability development, which supported by investor and stakeholder engagement in the indirect supervision process.

Comprehensive information transparency was also performed through the presentation of Audited Financial Statements, which have been audited independently by public accountants. The appointment of public accountants was conducted through a series of tiered mechanisms, involving the shareholders through the GMS. This was done to maintain the independence of public accountants, which in turn would provide opinions in accordance with the provisions of the applicable Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia.

In enabling the implementation of GCG principles to be measurable, the Company conducted annual periodic assessments. This assessment, both independent assessment and self-assessment conducted by the internal team, would be an evaluation and input for improving the implementation of GCG principles in the Company. The 2017 assessment was conducted through self-assessment method by the Company's GCG Self-Assessment Team, resulted in the score of 82.80 under the "Good" category.

In addition, the Company also conducted performance assessment based on the Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU), as directed by PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as its main shareholder. Through KPKU assessment, which include "process" and "outcome" assessment, the Company has a thorough evaluation of all aspects in terms of its performance. In 2016, the Company achieved KPKU result of 415.75, under the "Early Improvement" category.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Sustainable development requires a business entity that owns and embodies the Corporate Social Responsibility (CSR) aspect. The implementation of CSR program is based on 4 (four) main aspects, namely environmental aspect, employment, occupational safety and health (K3) aspect, social and community development aspect, as and responsibility to customer aspect.

The above four aspects are in fact based on the shareholder and stakeholder's engagement in the Company's business processes, particularly indirect supervision. Through these aspects, a harmonious relationship can be achieved, which will be the foundation for a sustainable development.

Ke-4 aspek di atas telah menjadi perhatian Perseroan. Pada aspek lingkungan, Perseroan telah melakukan sejumlah upaya lindung lingkungan, khususnya pada proses produksi yang membutuhkan pengelolaan limbah. Pada aspek ketenagakerjaan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Perseroan menaruh perhatian terhadap penerapan prinsip K3 pada Pabrik Gula yang dimiliki Perseroan. Di samping itu, pemenuhan aspek ketenagakerjaan dilakukan dengan pemenuhan hak dan kesejahteraan pegawai, serta pengembangan kompetensi yang akan berdampak positif terhadap pengembangan talenta setiap individu pegawai.

Untuk aspek sosial kemasyarakatan, Perseroan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar lokasi usaha untuk dapat terlibat sebagai tenaga kerja. Di samping efisiensi biaya, keterlibatan masyarakat sekitar lokasi usaha akan mendorong tingkat perekonomian setempat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Perseroan juga menggelar sejumlah kegiatan donasi untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.

Secara khusus, Perseroan melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bagian dari program perwujudan hadirnya BUMN secara nyata kepada masyarakat. Pelaksanaan program ini khususnya pada hal pendanaan bersifat akuntabel, dengan adanya audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) atas laporan keuangan PKBL.

Pada aspek tanggung jawab terhadap konsumen, Perseroan telah melengkapi dirinya dengan layanan pengaduan pelanggan serta survei kepuasan pelanggan. Agar produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan memenuhi SNI Wajib di seluruh PG yang ada, serta menerapkan ISO 9001 : 2008 tentang Sistem Manajemen

The above four aspects have been the Company's concerns. In terms of the environmental aspect, the Company has undertaken a number of environmental protection efforts, particularly in production processes requiring waste management. In terms of Employment and Occupational Health and Safety (K3), the Company gave attention to the implementation of K3 principles in Sugar Factory owned by the Company. In addition, the fulfillment of employment aspect was conducted by meeting the rights and welfare of employees, as well as competency development, which would impact positively the development of each individual employee's talents.

In terms of the social aspect, the Company provided opportunity to the community surrounding the business location to be involved as workforce. In addition to cost efficiency, the community involvement surrounding the business location would encourage the level of local economy, which ultimately would improve the living quality. Additionally, the Company also held a number of donation activities to provide direct assistance to the community.

In particular, the Company implemented the Partnership and Community Development Program (PKBL) as part of the program in realizing BUMN actual presence to the public. The implementation of this program especially in terms of funding was accountable, with the audit of Public Accounting Firm (KAP) on PKBL financial statements.

In terms of responsibility to customers aspect, the Company has equipped itself with customer complaints services as well as customer satisfaction surveys. In order for the products to be accountable, the Company has met the Obligatory SNI in all existing PGs, and implemented ISO 9001: 2008 on Quality Management System. The entire implementation of the

Mutu. Seluruh pelaksanaan program CSR Perseroan diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Company's CSR program was expected to create harmonious relationships with the shareholders and stakeholders.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DI TAHUN 2017

Di tahun 2017, terdapat pergantian susunan dan komposisi Direksi sebagai hasil dari keputusan RUPS. Berikut disampaikan kronologi susunan dan komposisi Direksi di sepanjang tahun 2017.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2017

In 2017, there has been changes in the composition of the Board of Directors as a result of the GMS resolution. The chronology on the composition of the Board of Directors throughout 2017 is presented in the following:

Kronologi Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2017

Chronology on the Composition of the Board of Directors throughout 2017

1 Januari - 23 Februari 2017 *January 1 – February 23, 2017*	24 Februari - 28 September 2017 *February 24 – September 28, 2017*	29 September - 10 Desember 2017 *September 29 – December 10, 2017*	11 - 31 Desember 2017 *December 11 – 31, 2017*	Keterangan *Remarks*
Subiyono (Direktur Utama) *(President Director)*				Subiyono efektif tidak lagi menjabat Direktur Utama sejak 24 Februari 2017 *Subiyono has no longer served as President Director effectively since February 24, 2017*
Tarsisius Sutaryanto (Direktur Operasional) *(Director of Operations)*				Tarsisius Sutaryanto efektif tidak lagi menjabat Direktur Operasional sejak 24 Februari 2017 *Tarsisius Sutaryanto has no longer served as Director of Operations effectively since February 24, 2017*
Muhammad Hanugroho (Direktur Komersil) *(Director of Commercial)*	Muhammad Hanugroho (Direktur Komersil) *(Director of Commercial)*			Muhammad Hanugroho efektif tidak lagi menjabat Direktur Komersil sejak 28 September 2017 *Muhammad Hanugroho has no longer served as Director of Commercial effectively since September 28, 2017*
Djoko Santoso (Direktur Sumber Daya Manusia & Umum) *(Director of Human Resources & General Affairs)*				Djoko Santoso efektif tidak lagi menjabat Direktur SDM & Umum sejak 24 Februari 2017 *Djoko Santoso Sutaryanto has no longer served as Director of Human Resources & General Affairs effectively since February 24, 2017*
	Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	Dwi Satriyo Annurogo efektif menjabat Direktur Utama sejak 24 Februari 2017 *Dwi Satriyo Annurogo has started serving as President Director effectively since February 24, 2017*
	Mustaqim (Direktur Operasional) *(Director of Operations)*	Mustaqim (Direktur Operasional) *(Director of Operations)*	Mustaqim (Direktur Operasional) *(Director of Operations)*	Mustaqim efektif menjabat Direktur Operasional sejak 24 Februari 2017 *Mustaqim has started serving as Director of Operations effectively since February 24, 2017*
			Slamet Djumantoro (Direktur Komersil) *(Director of Commercial)*	Slamet Djumantoro efektif menjabat Direktur Komersil sejak 11 Desember 2017 *Slamet Djumantoro has started serving as Director of Commercial effectively since December 11, 2017*

Sehingga, susunan Direksi per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Hence, the composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2017 is as follows:

Susunan Direksi PTPN X per 31 Desember 2017

Composition of the Board of Directors of PTPN X as of December 31, 2017

Direksi *Board of Directors*	**Masa Jabatan** *Term of Office*
Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama/*President Director)*	24 Februari 2017 - RUPS 2022 *February 24, 2017 – GMS 2022*
Mustaqim (Direktur Operasional/*Director of Operations)*	24 Februari 2017 - RUPS 2022 *February 24, 2017 – GMS 2022*
Slamet Djumantoro (Direktur Komersil/*Director of Commercial)*	11 Desember 2017 - RUPS 2022 *December 11, 2017 – GMS 2022*

Pergantian susunan Direksi sepenuhnya menjadi keputusan pemegang saham yang dituangkan melalui mekanisme RUPS.

The changes in the composition of the Board of Directors is entirely the shareholder's decision as outlined in the GMS mechanism.

AKHIR KATA

Atas pencapaian di tahun 2017, izinkan Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris, serta pemegang saham utama, PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Direksi juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan pemegang saham. Terima kasih juga diucapkan kepada regulator, pelanggan, pemasok, mitra usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, atas kerja sama yang telah tercipta. Kepada seluruh pegawai Perseroan, Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja yang telah ditunjukkan. Semoga pencapaian ini akan menginspirasi seluruh pihak untuk dapat terus mengoptimalkan kemampuannya dan menjadi modal Perseroan untuk dapat terus tumbuh hingga ke masa-masa yang akan datang.

Surabaya, 25 Mei 2018

CLOSING

Upon the achievement in 2017, please allow us, the Board of Directors, to express our respect and gratitude to the Board of Commissioners, as well as the major shareholder, PT Perkebunan Nusantara III (Persero). The Board of Directors would like to thank the shareholders for the trust given. We also would like to thank the regulators, customers, suppliers, business partners, and all stakeholders, for the collaboration that has been created. To all employees of the Company, the Board of Directors would like to express the highest appreciation for the performance that has been demonstrated. Hopefully this achievement will inspire all parties to be able to continue to optimize their capabilities and become the Company's resources to continue growing in the future.

Surabaya, May 25, 2018

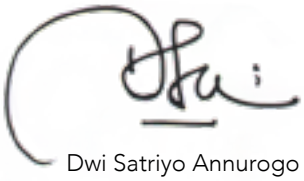

Dwi Satriyo Annurogo
Direktur Utama
President Director

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017 PT Perkebunan Nusantara X

Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Resposibility for the 2017 Annual Report of PT Perkebunan Nusantara X

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara X tahun buku 2017 sudah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 25 Mei 2018

We, the undersigned, declare that the information in the 2017 Annual Report of PT Perkebunan Nusantara X is presented in its entirity and we are fully responsible for the correctness of the contents of this Annual Report.

The above statement is made truthfully.

Surabaya, May 25, 2018

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Rudi Wibowo
Komisaris Utama
President Commissioner

Sukardi Rinakit
Komisaris
Commissioner

Y.B Priyatmo Hadi
Komisaris
Commissioner

Arvan Rivaldy Rebion Siregar
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi
Board of Directors

Dwi Satriyo Annurogo
Direktur Utama
President Director

Mustaqim
Direktur Operasional

Slamet Djumantoro
Direktur Komersil

halaman ini sengaja dikosongkan
this page intentionally left blank

Profil Perusahaan

Company Profile

Hingga akhir tahun 2017, Perseroan mengelola 11 PG yang saling bersinergi untuk memberikan keuntungan efektivitas dan efisiensi atas keseluruhan proses operasional Perseroan.

Until the end of 2017, the Company is managing 11 PGs in synergy to provide the effectiveness and efficiency benefits of the Company's overall operational process.

Informasi Umum Tentang PTPN X

General Information about PTPN X

Nama Perusahaan *Name of the Company*	:	PT Perkebunan Nusantara X
Cikal Bakal *The Embryo*	:	Nasionalisasi aset Belanda berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda *Nationalization of Dutch Assets based on Law No. 86 of 1958 regarding to nationalization of Dutch Owned Enterprises*
Tanggal Pendirian *Date of Establishment*	:	11 Maret 1996 *March 11, 1996*
Dasar Hukum Pendirian *Legal Basis of Establishment*	:	Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas No. 43 tanggal 11 Maret 1996 dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C28338.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 020/BH.13.01/Sept/1996 tanggal 18 September 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, Tambahan No. 8681 *Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 43 dated March 11, 1996 made before Harun Kamil, S.H., notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on the Decree No. C28338.HT.01.01.TH.96 registered into the Limited Liability Company Registry No. 020/BH.13.01/Sept/1996 dated September 18, 1996, and has been published on State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated 8 October 1996, additional No. 8681*
Bidang Usaha *Line of Business*	:	Budidaya tanaman, produksi hasil tanaman, perdagangan dan pemasaran, pengembangan usaha bidang perkebunan serta usaha lain yang menunjang usaha pokok Perusahaan *Plant cultivation, crop production, trade and marketing, plantation business development and other business that support the Company's main business*
Kegiatan Usaha yang Dilakukan *Business Activities*	:	• Industri gula • Tetes • Industri tembakau • Rumah Sakit • Bioethanol • Industri *Woven Bag and Flexible Packaging* • Sayuran Beku • Lain-lain, mencakup: » Jasa Cutting Bobbin • *Sugar industry* • *Molasses* • *Tobacco industry* • *Hospital* • *Bioethanol* • *Woven Bag and Flexible Packaging Industry* • *Frozen Vegetables* • *Miscellaneous:* » *Cutting Bobbin Service*

Jaringan Usaha *Business Network*	:	11 Pabrik Gula, 3 Kebun Tembakau, serta 4 anak usaha di bidang Bioetanol, *woven bag* dan *flexible packaging*, Rumah Sakit, dan sayuran beku *11 Sugar Mills, 3 Tobacco Plantations, 4 Subsidiaries in Bioetanol, woven bag and flexible packaging, Hospital, and Frozen Vegetables sector*
Kepemilikan *Ownership*	:	• Negara Republik Indonesia 10% • PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 90% • *The Republic of Indonesia 10%* • *PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 90%*
Modal Dasar *Authorized Capital*	:	Rp7.300.000.000.000
Modal Belum Disetor *Non Paid-Up Capital*	:	Rp5.454.404.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor *Issued and Fully Paid-up Capital*	:	Rp1.845.596.000.000
Pemeringkatan Obligasi *Bond Rating*	:	BBB (2017)
Jumlah Karyawan *Number of Employees*	:	18.311 orang/*person*
Alamat *Address*	:	Jl. Jembatan Merah No. 3 – 11 Surabaya 60175 Jawa Timur, Indonesia
Telepon *Phone*	:	+62 31 3523143 (*hunting*)
Email *Email*	:	contact@ptpn10.co.id
Situs Web *Website*	:	http://ptpn10.co.id

Riwayat Singkat PTPN X
Brief History of PTPN X

KILAS SEJARAH PTPN X

PT Perkebunan Nusantara X ("Perseroan") memulai riwayatnya sebagai sebuah perusahaan milik Belanda yang berada dalam wilayah Republik Indonesia, yang kemudian dinasionalisasi dan dinyatakan menjadi miliki penuh dan bebas Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1958, Perseroan diubah menjadi Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Nasional. Landasan dari perubahan ini adalah timbulnya kesadaran Pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk percepatan atas pelaksanaan dasar-dasar ekonomi nasional dengan menasionalisasikan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pemerintah Negara Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1963 Jo. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1963 sebagai tindak lanjut dari program nasionalisasi perusahaan milik Belanda khususnya yang bergerak di bidang Pertanian dan Perkebunan. Dengan landasan hukum ini, status Perseroan menjadi Perusahaan Perkebunan Gula Negara. Bersama dengan peraturan ini dibentuk pula Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU – PPN) Gula dan Karung Goni untuk melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pengawasan pekerjaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1968 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula dan Karung Goni, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Karet, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman dan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau kemudian dibubarkan. Dasar pemikiran disahkannya Peraturan Pemerintah tersebut secara umum sebagai usaha untuk menertibkan, menyempurnakan dan menyederhanakan aparatur pemerintah. Secara khusus, Peraturan Pemerintah tersebut juga menjadi awal pelaksanaan asas delegasi kendali dan penyederhanaan birokrasi pada perusahaan-perusahaan milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1973 untuk pertimbangan efisiensi dan efektivitas usaha, Perusahaan Negara Perkebunan XXI dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII mengalami pengalihan bentuk menjadi PT Perkebunan XXI–XXII (Persero) sesuai daftar keputusan Menteri Kehakiman tanggal 1 Februari 1974 No. YA-5/28/9. Pada saat pengalihan status tersebut, PT Perkebunan XXI–XII (Persero) membawahi 12 Pabrik Gula dan 2 (dua) Rumah Sakit .

PTPN X AT A GLANCE

PT Perkebunan Nusantara X ("Company") began its history as a Dutch-owned enterprise located within the area of the Republic of Indonesia, which then was subjected to nationalization program and stated as fully and independently owned by Government of the Republic Indonesia. In accordance with Law Number 86 of 1958 on Nationalization of Dutch-owned Enterprises, authorized in Jakarta on December 27, 1958, the Company was then transformed into State-Owned Agriculture/ Plantation Enterprise. The rationale behind this transformation was the awareness from Government of the Republic of Indonesia to accelerate the establishment of national economic foundation by means of nationalizing production areas that were important for general public and had related to the welfare of Indonesian people.

Government of the Republic of Indonesia then issued Government Regulation No. 1 of 1963 juncto Government Regulation No. 2 of 1963 as a follow up to the nationalization of Dutch-owned Enterprises, especially those related with Agriculture and Plantation industries. By this legal basis, the status of the Company became State-Owned Sugar Enterprise. This regulation also became the legal establishment basis for General Governing Body of State-Owned Plantation Enterprise (BPU-PPN) for Sugar and Gunny Sacks as a central coordinator in the operation and supervision of State-Owned Sugar Plantation Enterprise and State-Owned Gunny Sacks Enterprise.

In accordance with Government of the Republic Indonesia Regulation No. 13 of 1968 regarding dismissal of General Governing Body of State-Owned Sugar Plantation and Gunny Sacks Enterprises, General Governing Body of State-Owned Rubber Enterprises, General Governing Body of State-Owned Various Crops Enterprise and General Governing Body of State-Owned Tobacco Enterprise, the BPU-PPN was then disbanded. This was done in general to regulate, improve and simplify government bodies. Specifically, the Government Regulation also became as the starting point that led to control delegation and simplification of State-Owned Enterprises.

Pursuant to Government Regulation No. 23 of 1973 as a consideration to the business efficiency and effectiveness, Perusahaan Negara Perkebunan XXI and Perusahaan Negara Perkebunan XXII were transformed into PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) based on Minister of Justice Decree dated February 1, 1974 No. YA-5/28/9. At the time of this transformation, PT Perkebunan XXI–XII (Persero) supervised 12 sugar mills and 2 hospitals.

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Pertanian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1996 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 1996, PT Perkebunan XIX (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1990, PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1973, dan PT Perkebunan XXVII yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1972, dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara X (Persero).

Berdasarkan peleburan tersebut didirikan suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perusahaan perseroan (Persero) terbatas, berkedudukan di Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X atau disingkat PTPN X (Persero) berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas No. 43 tanggal 11 Maret 1996 dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C28338. HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 020/BH.13.01/Sept/1996 tanggal 18 September 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, Tambahan No. 8681. Melalui Akta Pendirian tersebut, Perseroan resmi berdiri sebagai entitas usaha di Indonesia dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana Negara Republik Indonesia memiliki 100% saham Perseroan.

Di tahun 2014, kepemilikan saham Perseroan mengalami perubahan, sejalan dengan pembentukan *Holding* BUMN yang diharapkan mampu mendorong kinerja BUMN di setiap sektornya. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ("PTPN III") dipilih menjadi *Holding* BUMN di sektor perkebunan, dimana Perseroan menjadi anak usaha dari PTPN III. Sejak pembentukan *Holding* tersebut, kepemilikan Negara Republik Indonesia atas saham Perseroan menjadi 10%, sementara sisanya 90% dimiliki oleh PTPN III.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, terakhir kali sebagaimana dimaksud dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 48 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat di hadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU45899.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 16 September 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0061814.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 16 September 2009.

In order to enhance efficiency and effectiveness of State-Owned Enterprise that came under the purview of the Department of Agriculture, based on Government Regulation No. 15 of 1996 as stipulated in Jakarta on February 14, 1996, PT Perkebunan XIX (Persero) which was established under Government Regulation No. 13 of 1990, PT Perkebunan XXI – XXII (Persero) which was established under Government Regulation No. 23 of 1973, and PT Perkebunan XXVII which was established under Government Regulation No. 7 of 1972, were merged into PT Perkebunan Nusantara X (Persero).

As a result of this merger, an Indonesian legal entity was formed as "Limited Liability Company/Perusahaan Perseroan (Persero) Terbatas", domiciled in Surabaya City, East Java Province under the name of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X, or PTPN X (Persero), based on Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 43 dated March 11, 1996 made in presence of Harun Kamil, S.H., Notary in Jakarta and has been granted authorization from Minister of Justice Republic of Indonesia pursuant to Decree No.C2-8338.HT.01.01.TH.96 dated August 8, 1996 and registered on the Company Register No.020/ BH.13.01/ Sept/1996 dated September 18, 1996, as announced on National Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated October 8, 1996, appendix No. 8681. Through the Deed of Establishment, the Company was officially established as a business entity in Indonesia with the status as State-Owned Enterprise (SOE), in which the Republic of Indonesia owns 100% of the Company's shares.

In 2014, the Company's share ownership changed, in line with the formation of SOE Holding which is expected to boost the performance of SOEs in each sector. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ("PTPN III") was selected to be the SOE Holding in the plantation sector, where the Company became a subsidiary of PTPN III. Since the establishment of the Holding, the ownership of the Republic of Indonesia on Company's shares diluted to 10%, while the remaining 90% owned by PTPN III.

The Company's articles of association have been amended several times, lastly as referred in:

1. Deed of Minister of State-Owned Enterprise Decree No. 48 dated August 13, 2008 made in presence of Dyah Ambarwaty Setyoso, SH., Notary in Surabaya, as approved by Minister of Law and Human Rights pursuant to Decree No. AHU-45899.AH.01.02 Year 2009 dated September 16, 2009 and registered on Company List No. AHU-0061814.AH.01.09. Year 2009 dated September 16, 2009.

2. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 36 tanggal 27 Juli 2010 dibuat di hadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H. Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No. AHUAH.01.10-22426 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-065129. AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010.
3. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara BUMN tentang Peningkatan Modal Dasar, Penambahan Modal Disetor, dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 18 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU04572.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0007931. AH.01.09. tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013.
4. Pada tanggal 23 Oktober 2014 terdapat perubahan Anggaran Dasar PTPN X tahun 2014 No. 30 Tahun 2014 dengan Notaris Nanda Fauz Iwan SH., MKn., mengenai ditunjuknya PTPN X sebagai salah satu anak perusahaan *Holding* PTPN III (Persero).

PERUBAHAN NAMA PERSEROAN

Di tahun 2014, kepemilikan saham Perseroan mengalami perubahan, sejalan dengan pembentukan *Holding* BUMN. Sejak pembentukan *Holding* tersebut, Perseroan melepas status Badan Usaha Milik Negara dan merubah namanya, dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) menjadi PT Perkebunan Nusantara X.

2. Deed of Minister of State-Owned Enterprise Decree No. 36 dated July 27, 2010 made in presence of Sri Eliana Tjahjoharto, SH., Notary in Surabaya as granted approval for Articles of Association amendment based on Letter No. AHUAH.01.10-22426 dated August 30, 2010 regarding Company's Data Amendment Notification Approval, and registered on Company List No. AHU-0065129.AH.01.09. Year 2010 dated August 30, 2010.

3. Deed of Minister of State-Owned Enterprise regarding to Addition of Authorized Capital and Addition of Paid-Up Capital, as well as Amendment of Articles of Association No. 18 dated October 18, 2012 made in presence of Sri Eliana Tjahjoharto, SH., Notary in Surabaya and has been approved by Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-04572.AH.01.02. Year 2013 dated February 6, 2013 and has been registered on Company Register No. AHU-0007931.AH.01.09. of 2013 dated February 6, 2013, and
4. On October 23, 2014 there was an amendment to the Articles of Association of PTPN X 2014 No. 30, 2014 made in presence Notary Nanda Fauz Iwan SH., MKn., regarding the appointment of PTPN X as one of the subsidiaries of PTPN III (Persero) as the holding company.

CHANGES OF COMPANY NAME

In 2014, the Company's share ownership changed, in line with the formation of SOE Holding. Since the formation of the holding, the Company has released the status as State-Owned Enterprise and changed its name, from PT Perkebunan Nusantara X (Perseo) to PT Perkebunan Nusantara X.

1996
BUMN
SOE

PT Perkebunan Nusantara X (Persero)

2014
Perusahaan Swasta
Private Enterprise

PT Perkebunan Nusantara X

Maksud dan Tujuan Pendirian PTPN X

Purpose and Objective of the Establishment of PTPN X

Tujuan pendirian Perseroan seperti tercantum dalam Akte Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. No 48 tanggal 13 Agustus 2008 adalah melakukan usaha di bidang agrobisnis dan agroindustri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip entitas usaha.

Kegiatan usaha untuk mencapai tujuan Perseroan antara lain:

1. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sehubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut.
2. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produksi turunannya.
3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan
4. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis, dan agro *forestry*.
5. Usaha lain yang menunjang Perseroan.

As stated in Notarial Deed of Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. No. 48 dated August 13, 2008, the objectives of establishing the Company are to conduct business in agro-business and agro-industry and to optimize the utilization of Company's resources to produce goods and/services of high quality and strong competitiveness, whilst seeking profit in order to increase the value of the Company with the principles of business entities.

The business activities undertaken to achieve the Company's objectives include:

1. Concession of plants cultivation covering the opening and processing of land, nursery, planting and maintenance, and harvesting of crops as well as carrying out other activities related to the plants cultivation.
2. Production covering processing of own or other parties' crops into semi-finished goods and/or finished goods and production of its derivatives.
3. Trading covering marketing activities of various produced products and conducting other trading activities related to the Company's business.
4. Development of business in the field of plantation, agro-tourism, agro-business, and agro-forestry
5. Other business that supports the Company.

Bidang Usaha
Line of Business

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah budidaya tanaman, produksi hasil tanaman, perdagangan dan pemasaran, pengembangan usaha bidang perkebunan serta usaha lain yang menunjang usaha pokok Perusahaan.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Perseroan memiliki lini usaha utama di bidang usaha industri gula dan tembakau. Pada kedua segmen tersebut, Perseroan melakukan penjualan melalui persaingan bebas dan terkoordinir. Disamping kedua segmen usaha utama, Perseroan juga menjalankan usaha industri tetes, industri *woven bag and flexible packaging*, jasa kesehatan yaitu rumah sakit, jasa *Cutting Bobbin*, industri bioetanol serta sayuran beku. Semua dijalankan melalui anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's business activities is plant cultivation, crop production, trade and marketing, development of plantation business and other businesses supporting the Company's main business.

BUSINESS ACTIVITIES UNDERTAKEN

The Company's main line of business is sugar and tobacco industry. In both segments, the Company sells through free and coordinated competition. Besides the two main business segments, the Company also runs the molasses industry, woven bag and flexible packaging industry, health services (hospital), Cutting Bobbin services, bioethanol industry and frozen vegetables, managed by its subsidiaries.

Industri Gula	*Sugar industry*
Tetes	*Molasses*
Industri Tembakau	*Tobacco industry*
Rumah Sakit	*Hospital*
Bioetanol	*Bioethanol*
Industri Woven Bag and Flexible Packaging	*Woven Bag and Flexible Packaging Industry*
Sayuran Beku	*Vegetables*
Lain-lain, mencakup:	*Miscellaneous*
• Jasa Cutting Bobbin	• *Cutting Bobbin Service*

Produk dan Jasa
Products and Services

INDUSTRI GULA

Perseroan menjalankan usaha pada segmen industri gula melalui 11 Pabrik Gula yang dimiliki oleh Perseroan. Sebagai bahan baku dari PG tersebut, Perseroan memanfaatkan produksi dari kebun tebu milik Perseroan ditambah dengan produksi dari kebun tebu milik petani gula. Pabrik Gula milik Perseroan yaitu:

1. Pabrik Gula Watoetoelis di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
2. Pabrik Gula Toelangan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. (stop operasi tahun 2017)
3. Pabrik Gula Kremboong di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
4. Pabrik Gula Gempolkrep di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
5. Pabrik Gula Djombang Baru di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
6. Pabrik Gula Tjoekir di Kabupaten Jombang Jawa Timur.
7. Pabrik Gula Lestari di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
8. Pabrik Gula Meritjan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
9. Pabrik Gula Pesantren Baru di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

SUGAR INDUSTRY

The Company operates its sugar industry segment through 11 Sugar Mills (PG) owned by the Company. The raw materials used by those Sugar Mills are gathered from Company-owned sugarcane farm and farmer-owned sugarcane farm. Below is the list of Company's Sugar Mills:

1. Watoetoelis Sugar Mill in Sidoarjo Regency, East Java.
2. Toelangan Sugar Mill in Sidoarjo Regency, East Java. (Stop operating in 2017)
3. Kremboong Sugar Mill in Sidoarjo Regency, East Java.
4. Gempolkrep Sugar Mill in Mojokerto Regency, East Java.
5. Jombang Baru Sugar Mill in Jombang Regency, East Java.
6. Tjoekir Sugar Mill in Jombang Regency East Java.
7. Lestari Sugar Mill in Nganjuk Regency, East Java.
8. Meritjan Sugar Mill in Kediri Regency, East Java.
9. Pesantren Baru Sugar Mill in Kediri Regency, East Java.

10. Pabrik Gula Ngadiredjo di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
11. Pabrik Gula Modjopanggoong di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Pemasaran produk gula Perseroan dilakukan di pasar dalam negeri melalui penjualan ke BULOG dikarenakan berdasar Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Perum BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional, dimana gula menjadi salah satu komoditi pangan pokok sehingga seluruh gula produksi milik BUMN harus dijual melalui BULOG. Apabila pembeli/distributor ingin membeli gula, maka pembeli tersebut harus menjadi mitra/rekanan BULOG. Kemudian, Kementerian Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi gula pada level Rp 12.500,-/kilogram, kecuali daerah yang dianggap terpencil sehingga membutuhkan ongkos distribusi yang tinggi.

Penetapan harga itu dilakukan pada bulan 16 Januari 2017 melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara 11 produsen dan delapan distributor gula. Selanjutnya, pun di tahun 2017, Kemendag mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer: 27/M-DAG/PER/5/2017, tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen, dimana untuk gula pembelian ditingkat petani Rp 9.100,-/kg dan penjualan ke konsumen Rp 12.500,-/kg ketentuan ini sampai Juli 2017 masih berlaku. Kemudian pemerintah menetapkan bahwa Bulog membeli gula petani dan PTPN seharga Rp 9.700,-/kg (hasil rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian pada bulan Agustus 2017).

Melalui pabrik gula yang dimiliki, Perseroan memiliki kapasitas terpasang untuk giling tebu sebesar 40.150 ton tebu per hari (TCD).

TETES

Tetes merupakan produk samping dari proses produksi tebu menjadi gula, yang memiliki nilai ekonomis. Produk tetes dari Perseroan dapat digunakan sebagai bahan baku pada beberapa kebutuhan industri, seperti penyedap rasa serta bahan baku Bioetanol.

INDUSTRI TEMBAKAU

Pada industri tembakau, Perseroan memiliki 3 (tiga) lahan kebun tembakau yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu:
1. Kebun Kertosari di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
2. Kebun Ajong Gayasan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
3. Kebun Kebonarum, Gayamprit, Wedibirit di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

10. Ngadiredjo Sugar Mill in Tulungagung District, East Java.

11. Modjopanggoong Sugar Mill in Kediri Regency, East Java.

The Company's sugar products is marketed domestically through sales to BULOG due to the Presidential Regulation Number 48 of 2016 on the Assignment of Perum BULOG in the framework of national food security, in which sugar becomes one of the staple food commodities so all sugar produced and owned by an SOE must be sold through BULOG. If a buyer/distributor wants to buy sugar, then the buyer must first become BULOG's partner. Afterward, the Ministry of Trade set the highest retail price of sugar at the level of Rp 12,500/ kilogram, unless the area is considered remote and requiring high distribution costs.

The pricing was made on January 16, 2017 through the signing of a memorandum of understanding (MoU) between 11 producers and eight distributors of sugar. Furthermore, in 2017, the Ministry of Trade issued Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 27/M-DAG/PER/5/2017, on the Purchase Reference Price at Farmers and the Sales Reference Price at Consumers, where for sugar purchased at the farmer level is Rp 9,100/kg and sales to consumers Rp 12,500/kg. This provision was valid until July 2017. Then the government determined that Bulog shall purchase sugar from farmers and PTPN for Rp 9,700/kg (the result of a coordination meeting at the Coordinating Minister for Economic Affairs office in August 2017).

Through its owned sugar mills, the Company has an installed capacity to mill sugar amounted to 40,150 ton sugar cane per day (TCD).

MOLASSES

Molasses are by-product of the production process from sugar cane to sugar, which has an economic value. Molasses products from the Company can be used as raw material for several industries, such as flavoring and bioethanol.

TOBACCO INDUSTRY

In the tobacco industry, the Company has 3 (three) tobacco fields that are located in several areas, namely:
1. Kertosari field in Jember Regency, East Java.
2. Ajong Gayasan field in Jember Regency, East Java.
3. Kebonarum field, Gayamprit, Wedibirit in Klaten Regency, Central Java.

Dari ketiga kebun tembakau ini Perseroan menghasilkan tembakau cerutu kualitas ekspor, yaitu jenis tembakau TBN/VBN dan FIN/FIK dengan *grade* NW, LPW, RFU dan *Filler*. Selain itu kebun Perseroan juga menghasilkan tembakau NO/VO dengan *grade Dekblad*, *Omblad* dan *Filler*.

Pemasaran produk tembakau milik Perseroan dilakukan dengan cara penjualan langsung kepada pembeli industri atau pabrikan dan pembeli perantara (*trader*). Selain itu Perseroan juga mengirim produk contoh ke luar negeri untuk mengikuti mekanisme lelang.

Sampai dengan Desember 2017, Perseroan mengelola lahan tembakau dengan luasan mencapai 1,078 hektar.

BIOETANOL

Perseroan melihat adanya peluang berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan energi melalui bioetanol, dimana Perseroan telah memiliki salah satu bahan baku untuk produksi bioetanol yaitu tetes tebu.

Dengan adanya peluang ini dan juga kesempatan mendapatkan hibah (*grant*) dari pemerintah Jepang melalui *New Energy Development Organization* (NEDO) berupa mesin dan teknologi bioetanol, Perseroan mendirikan PT Energi Agro Nusantara yang menjalankan produksi Bioetanol. Pabrik Bioetanol milik Perseroan berlokasi di Pabrik Gula Gempolkrep.

RUMAH SAKIT

Perseroan menjalankan jasa pelayanan kesehatan melalui pendirian dan pengoperasian rumah sakit yang saat ini telah menjadi unit usaha mandiri. Jasa pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui 4 (empat) buah rumah sakit yang seluruhnya berada di wilayah Jawa Timur, yaitu Rumah Sakit Gatoel di Mojokerto, Rumah Sakit Toeloengredjo di Kediri, Rumah Sakit Perkebunan di Jember dan Rumah Sakit Medika Utama di Blitar. Keempat rumah sakit milik Perseroan selain melayani pasien dari internal Perseroan juga memberikan layanan kepada masyarakat umum di sekitarnya.

JASA CUTTING BOBBIN

Bekerja sama dengan Burger Soehne AG Burg (BSB), Swiss, Perseroan menjalankan usaha Jasa *Cutting Bobbin*. Segmen usaha ini memberikan jasa pemotongan daun tembakau menjadi pembungkus cerutu. Lokasi operasional jasa *Cutting Bobbin* terletak di Jember.

From all three tobacco fields, the Company produces export quality cigar tobaccos, namely TBN/VBN and FIN/FIK varieties in NW, LPW, RFU and Filler grades. In addition, the Company' also produces NO/VO variety with Dekblad, Omblad and Filler grades.

The marketing of Company's tobacco products is conducted through direct selling to industrial or manufacturing buyers and traders. The Company also sends sample of tobacco products abroad to participate in auction.

As of December 2017, the Company is managing tobacco fields with an area of 1,078 hectares.

BIOETHANOL

The Company sees an oppurtiny to contribute in fullfilling the energy need through bioethanol, in which the Company already has one of raw material to produce bioethanol: sugar molasses.

To seize this opportunity and also the leverage grant opportunity from Japanese government through NEDO (New Energy Development Organization) in the form of machineries and bioethanol technology, the Company established PT Energi Agro Nusantara engaged in bioethanol production. The Bioethanol factory owned by the Company is located at Gempolkrep Sugar Mill.

HOSPITAL

The Company operates the health care service through building and operating hospitals of which has been an independent business unit. The health care service is conducted through the operation of four hospitals that are entirely located in East Java region: Gatoel Hospital in Mojokerto, Toeloengredjo Hospital in Kediri, Perkebunan Hospital in Jember, and Medika Utama Hospital in Blitar. All four hospitals accept patients from within the Company and also provide health services for general public around the area.

CUTTING BOBBIN SERVICE

Cooperating with Burger Soehne AG Burg (BSB), Switzerland, the Company operates the Cutting Bobbin Service business. This business segment provides a service of cutting bobbin (tobacco leave) into cigar wraps. The Cutting Bobbin service is located in Jember.

Dalam lingkup struktur organisasi Perseroan, jasa *Cutting Bobbin* berada masuk di dalam struktur Kebun Kertosari yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No. XX-SURKP/13.050 pada tanggal 21 Mei 2013 dan No. XXSURKP/13.076 pada tanggal 2013 perihal Penyempurnaan Struktur Organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan Perseroan.

INDUSTRI WOVEN BAG DAN FLEXIBLE PACKAGING

Perseroan membentuk kemitraan strategis dengan PT Surya Satria Sembada, yang berlokasi di Jakarta, dalam menjalankan usaha di segmen industri plastik dan fiber. Perseroan dan mitra strategis membentuk anak usaha dengan nama PT Dasaplast Nusantara.

PT Dasaplast Nusantara memiliki pabrik di Jepara, Jawa Tengah yang memproduksi karung plastik, *inner bag*, *waring* dan *flexible packaging*. Sebagian besar hasil produksi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal Perseroan, yaitu untuk Pabrik Gula dan Kebun Tembakau. Sebagian kecil dari hasil produksi dipasarkan ke pasar domestik dan internasional.

SAYURAN BEKU, BUDIDAYA EDAMAME DAN OKRA

Bekerja sama dengan mitra strategis PT Kelola Mina Laut, Perseroan memiliki usaha di segmen budidaya Edamame dan Okra dengan nama PT Mitratani Dua Tujuh. Produk Edamame hasil produksi PT Mitratani Dua Tujuh diutamakan untuk diekspor ke pasar internasional di Jepang dalam bentuk makanan beku.

In the Company's organizational structure, the Cutting Bobbin service is integrated in the structure of Kertosari Field, which has been mandated by the Company's Board of Directors Decree No. XX-SURKP/13.050 dated May 21, 2013 and No. XXSURKP/13.076 on 2013 regarding the Organizational Structure Enhancement and main duties of office holders in the Company.

WOVEN BAG AND FLEXIBLE PACKAGING INDUSTRY

The Company formed a strategic partnership with PT Surya Satria Sembada, which is located in Jakarta, to operate business in plastic and fiber industry. PT Dasaplast Nusantara was then established as subsidiary of both the Company and its strategic partner.

PT Dasaplast Nusantara owns and operates a factory in Jepara, Central Java, which produces plastic bags, inner bags, waring and flexible packaging.. Most of its production are aimed to fulfill internal needs of the Company, which is for sugar mills and tobacco fields. A small portion of production output is sold to domestic and international market.

FROZEN VEGETABLES, EDAMAME AND OKRA CULTIVATION

Cooperating with a strategic partner, PT Kelola Mina Laut, the Company runs business in the cultivation of Edamame and Okra, under the name of PT Mitratani Dua Tujuh. The Edamame produced by PT Mitratani Dua Tujuh is prioritized to be exported to the international market in Japan in the form of frozen food.

Kompetensi Inti
Core Competencies

Kompetensi inti adalah sumber daya dan kapabilitas yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk dapat melebihi para pesaingnya. Sebagai sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan, kompetensi inti membedakan perusahaan secara kompetitif dan merefleksikan kepribadiannya.

Core competencies are resources and capabilities as source of competitive advantage for the Company to outperform its competitors. The core competencies differentiate the Company competitively and reflecting its personality.

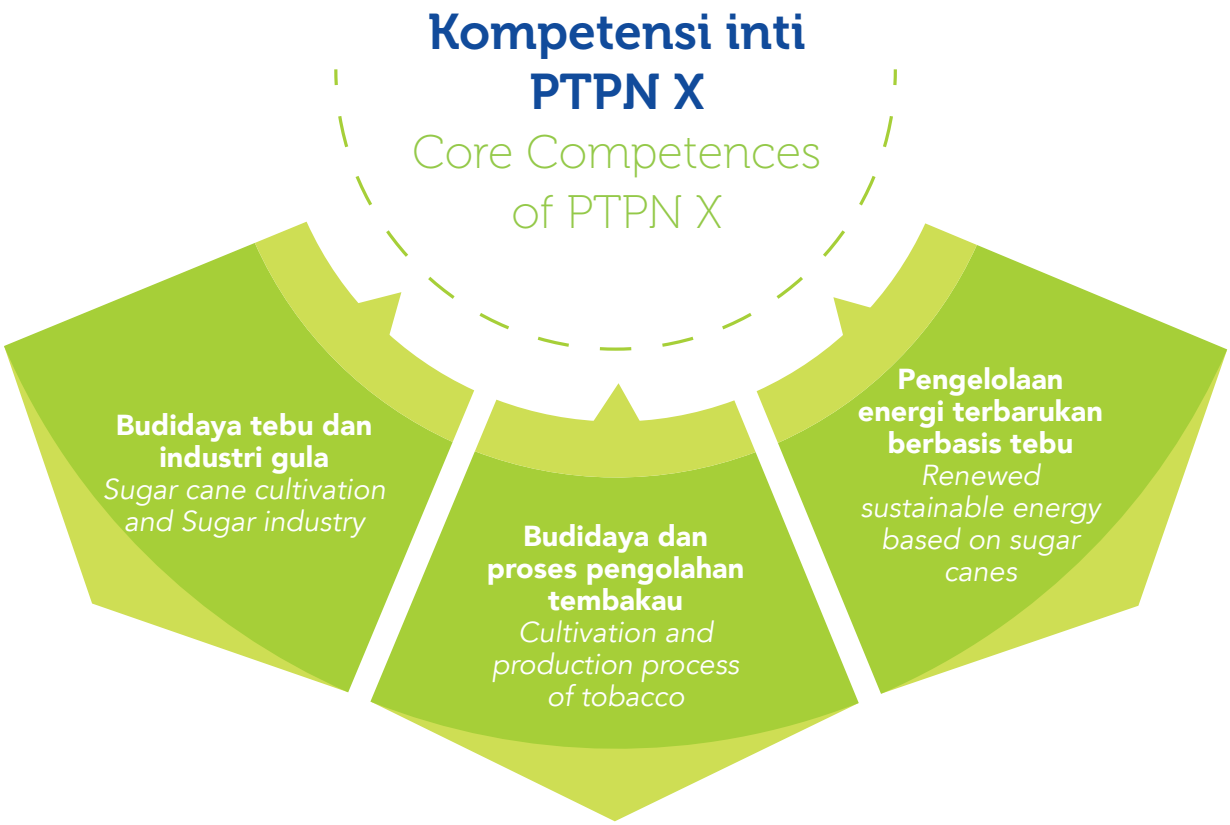

Struktur Organisasi
Organizational Structure

Melalui Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor XX-SURKP/17.055 tanggal 2 Maret 2017 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Pemegang Jabatan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara X, telah ditetapkan bahwa struktur Perusahaan sejak diterbitkannya keputusan ini, adalah sebagai berikut:

Through the Decree of Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara X No XX-SURKP/17.055 dated March 2, 2017 regarding on the amendment of the organizational structure and main tasks in the office holders PT Perkebunan Nusantara X, it has been determined that the Company's structure since the issuance of this decree is as follows:

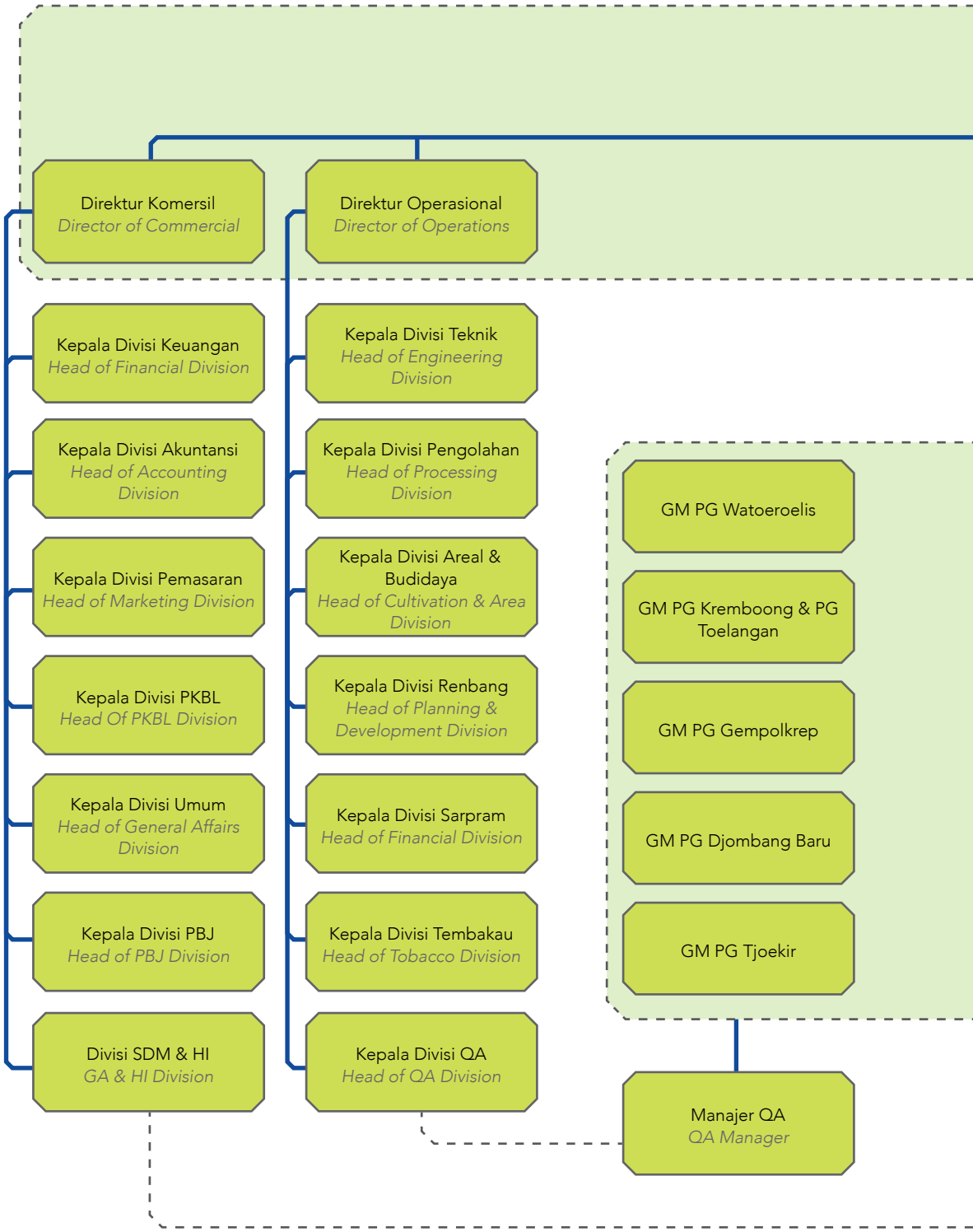

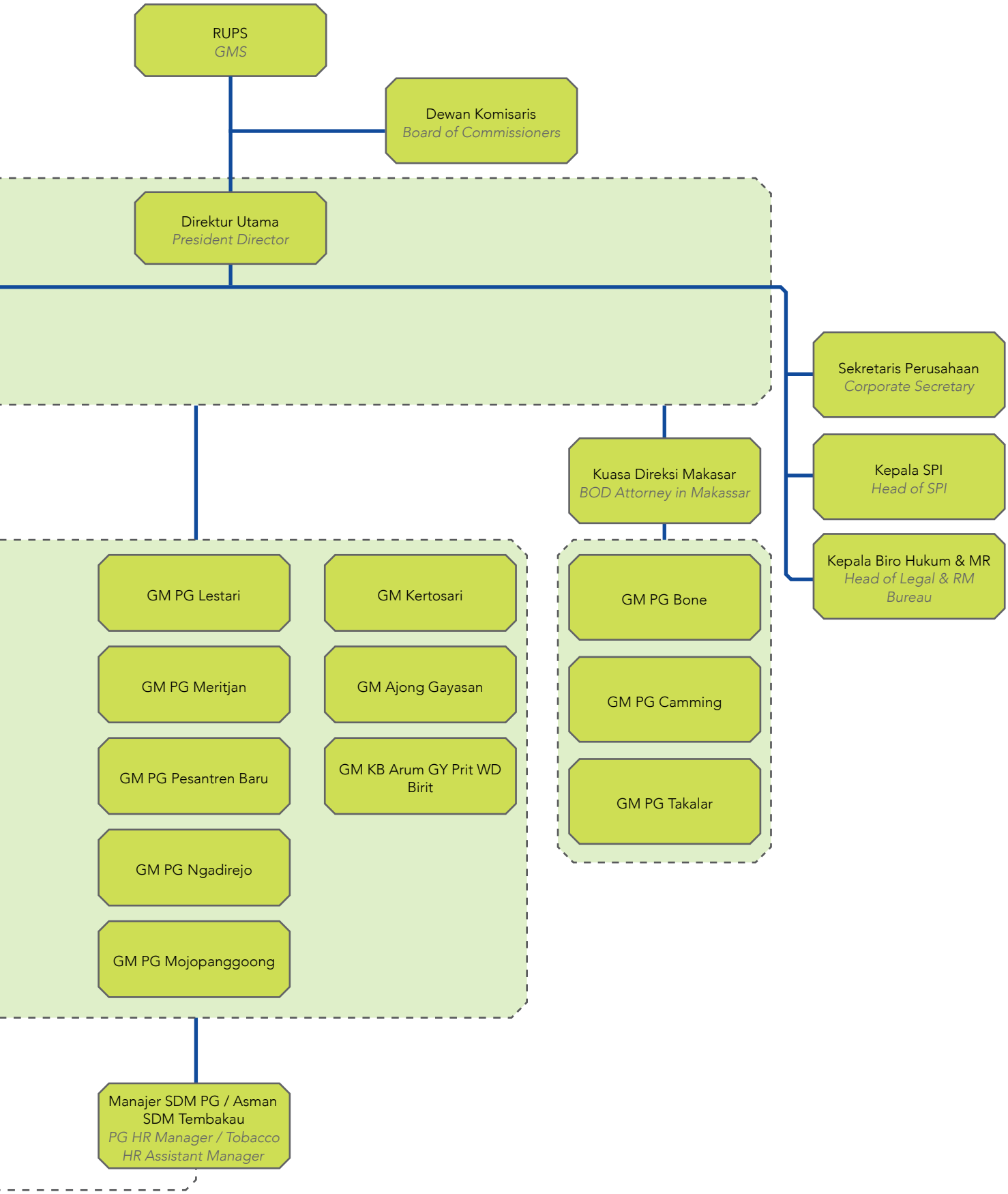
RUPS
GMS
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Direktur Utama
President Director
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
Kepala SPI
Head of SPI
Kepala Biro Hukum & MR
Head of Legal & RM Bureau
Kuasa Direksi Makasar
BOD Attorney in Makassar
GM PG Lestari
GM Kertosari
GM PG Meritjan
GM Ajong Gayasan
GM PG Pesantren Baru
GM KB Arum GY Prit WD Birit
GM PG Ngadirejo
GM PG Mojopanggoong
GM PG Bone
GM PG Camming
GM PG Takalar
Manajer SDM PG / Asman SDM Tembakau
PG HR Manager / Tobacco HR Assistant Manager

Visi, misi dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission and Corporate Culture

Berdasarkan Surat Keputusan No. XX-SURKP/13.074.1 tentang Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara X, Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Based on Decree: No. XX-SURKP/13.074.1 regarding the Vision and Mission of PT Perkebunan Nusantara X, the Company's Vision and Mission are as follows:

Visi
Vission

Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka yang berwawasan lingkungan

To become a leading environmentally sound agro-industry company.

Misi
Mission

Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tebu dan tembakau berdaya saing tinggi di pasar domestik dan internasional, yang berwawasan lingkungan.
Committed to produce highly competitive and environmentally sound products of sugar cane and tobacco for domestic and international market.

Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui optimalisasi dan efisiensi di segala bidang.
Committed to keep the growth and continuity of the business by doing optimalization and efficiency in every aspects.

Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan pemangku kepentingan melalui kepemimpinan, inovasi dan kerjasama tim serta organisasi yang profesional.
Dedicated to always improve corporate values for the satisfaction of stakeholders through leadership, innovation teamwork, and professional organization.

FILOSOFI BISNIS DAN BUDAYA KERJA

Di dalam menjalankan misi, Perseroan memiliki tuntunan yang berfungsi sebagai koridor dan batasan sekaligus pendorong bagi insan Perseroan untuk melakukannya dengan penuh integritas, sehingga apabila tuntunan ini dilakukan oleh seluruh jajaran karyawan, akan dapat membawa pencapaian visi Perseroan.

Filosofi Bisnis Perseroan terwujud dalam nilai-nilai organisasi sebagai berikut:

BUSINESS PHILOSOPHY AND CORPORATE CULTURE

In carrying its mission, the Company holds a reference as a corridor and guidance, also as a booster for the Company's people to perform with full integrity, that if practiced by all employees will lead to the achievement of Company's vision.

The Company's Business Philosophy is embodied on organizational values, as follows:

Profesionalisme
Professionalism

Senantiasa bekerja dengan dedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Always work with high dedication and full responsibility based on elevated competencies to pursue the best performance.

Visioner
Visionary

Senantiasa memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat peluang kedepan serta dapat berpikir di luar kebiasaan.

Always have a broad perspective and able to see future opportunities and to think outside of the box.

ProViSI

Integritas
Integrity

Senantiasa bertindak obyektif, adil dan konsisten sesuai dengan pedoman perilaku dan pedoman tata kelola perusahaan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Always act in an objective, fair and consistent manner in accordance with code of conduct and code of governance by upholding honesty and commitment.

Sinergi
Synergy

Senantiasa berkolaborasi secara produktif dan berkualitas dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Always conduct high quality collaboration productively with all internal and external stakeholders.

Budaya kerja yang dianut adalah "Profesional, Produktif dan Pembelajar (3P)".

The corporate culture is "Professional, Productive and Learner (3P)".

3P

PROFESIONAL — Professional
PRODUKTIF — Productive
PEMBELAJAR — Learner

Makna Branding Logo
Meaning of Branding Logo

Perubahan logo PTPN X sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris No. 26/DK/PTPN-X/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 yang telah disahkan dalam risalah RUPS No. RIS-005/XXKBUMN/2011 tanggal 28 Januari 2011.

Logo tersebut merupakan visualisasi dari visi PTPN X yakni "Tumbuh Berkembang Bersama". Dalam logo tersebut, terdapat gabungan *image* tangan yang saling meraih. Hal tersebut mencerminkan semangat kerja sama, baik itu kerja sama tim maupun bersama mitra. Gambar tangan tersebut dapat juga dilihat sebagai sekelompok daun berwarna hijau yang bergradasi dari hijau tua menuju hijau muda. Gradasi tersebut menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan, sekaligus membentuk pencitraan usaha agribisnis dari PTPN X. Warna Hijau tua yang terletak pada logo mencerminkan kepedulian dan pelayanan rumah sakit yang dikelola PTPN X bagi masyarakat luas dan perkebunan. Warna hijau juga melambangkan kenyamanan dan kesegaran.

Pada logo, juga terdapat *logotype* berupa teks PTPN X yang digunakan untuk memperkuat pencitraan, mempermudah pengidentifikasian identitas PTPN X kepada khalayak luas. Warna biru pada *logotype* mencerminkan kepemimpinan, kemandirian untuk memajukan PTPN X.

Sedangkan penggunaan huruf tanpa kait dan *layout* logo yang dinamis berfungsi untuk memperkuat citra modern serta inovasi PTPN X dalam bersaing di kancah usaha agribisnis internasional.

The redesign of PTPN X logo was according to the approval of the Board of Commissiners No. 26/DK/PTPN-X/III/2011 dated March 25, 2011, which was been ratified in the minutes of GMS No. RIS-005/XXKBUMN/2011 dated January 28, 2011.

The logo is a visualization of PTPN X's vision of "Growing Together". In the logo, there is a combined image of hands reaching each other. It reflects the spirit of teamwork within group or partners. The image can also be seen as a group of green leaves with gradation of dark green to light green. The gradation shows growth and development, and at once forming the image of PTPN X as an agribusiness company. The dark green color in the logo reflects care and service from hospital business managed by PTPN X for the public and the Company itself. The green color also symbolizes comfort and freshness.

In the logo, there is also a logotype of text: "PTPN X" which is used to strengthen the image and to simplify the identification of PTPN X identity to the public. The blue color in logotype reflects leadership, and independency of PTPN X to move forward.

While the use of letters with no hook and dynamic layout of the logo amplify the modern image and innovation of PTPN X to compete in the international agribusiness.

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

Rudi Wibowo

Komisaris Utama

President Commisioner

(Periode Jabatan: 13 Oktober 2013 - RUPS 2018, Periode Kedua)

(Term of Office: October 13, 2013 – 2018 GMS, 2nd Period)

Warga Negara Indonesia
Usia 65 tahun
Kelahiran Kebumen, 6 Juli 1952

Indonesian Citizen
65 years old
Born in Kebumen on July 6, 1952

Domisili
Jember, Jawa Timur, Indonesia.

Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Komisaris PTPN X
Jabatan Komisaris Utama diemban sejak RUPS Tahun 2013 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-390/MBU/2013 tanggal 21 November 2013. Jabatan Komisaris Utama ini merupakan periode ke-1. Sebelum itu, Rudi Wibowo pernah menjabat pada Dewan Komisaris Perseroan sebagai Komisaris untuk 2 (dua) kali periode (2008-2012).

Riwayat Pendidikan
Sarjana Pertanian jurusan Sosial Ekonomi, Universitas Jember (1978); Magister Sains Ekonomi Pertanian Insitut Pertanian Bogor (1981); Doktor Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan dari Institut Pertanian Bogor (1987); dan gelar Profesor dari Universitas Jember. Pendidikan tambahan diperoleh antara lain dari University California Davis (UCDUSA, 1994), SPAMEN-LAN (Jakarta, 1996), "*Good Governance*" in Germany Government, (Jerman, 1997).

Riwayat Profesi
Deputi Badan Eksekutif GAPPERINDO bidang SDM/Teknologi (2003-sekarang); Ketua Majelis Penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) (2011-2014); Sekretaris Jenderal PERHEPI (2004-2007); Sekditjen Tanaman Pangan dan Hortikultura Departemen Pertanian (1998-2000); Kepala Biro Tata Usaha BUMN (1997); Sekretaris Badan Agribisnis Departemen Pertanian (1994-1997).

Rangkap Jabatan
Deputi Badan Eksekutif GAPPERINDO bidang SDM/Teknologi (2003-sekarang).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham PTPN X
Tidak memiliki saham PTPN X.

Domicile
Jember, East Java, Indonesia

Appointment History as Board of Commissioners of PTPN X
Served as President Commissioner since 2013 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-390/MBU/2013 dated November 21, 2013, for the 1st period. Prior to that, Rudi Wibowo had served on Board of Commissioners of the Company as Commissioner for 2 (two) periods (2008-2012).

Educational Background
Bachelor of Agriculture majoring in Social Economics from Jember University (1978); Master of Agricultural Economic Science from Bogor Institute of Agriculture (1981); Doctor of Rural Development Planning from Bogor Institute of Agriculture (1987); and Professor title from Jember University. Additional educations are obtained from: California Davis University (UCDUSA, 1994), SPAMEN-LAN (Jakarta, 1996), "Good Governance" in Germany Government, (Germany, 1997).

Professional History
Deputy of Executive Board of GAPPERINDO in HR/Technology (2003-present); Chief Advisory Board of Association of Indonesian Agricultural Economy (PERHEPI) (2011-2014); Secretary General of PERHEPI (2004-2007); Secretary of Directorate General of Food Crops and Holticulture of Agriculture Department (1998-2000); Chief of SOE Administration Bureau (1997); Secretary of Agribusiness Body of the Ministry of Agriculture (1994-1997).

Concurrent Positions
Deputy Executive Board of GAPPERINDO in HR/Technology (2003-present).

Affiliate Relationship
Has no affiliate relationship with fellow Board of Commissioners, Board of Directors, and Major/Controlling Shareholders.

Share Ownership of PTPN X
Does not own shares of PTPN X.

Sukardi Rinakit

Komisaris
Commisioner
(Periode Jabatan: 31 Maret 2016 - RUPS 2021, Periode Pertama)
(Term of Office: March 31, 2016 – 2021 GMS, 1st Period)

Warga Negara Indonesia
Usia 54 tahun
Kelahiran Madiun, 5 Juni 1963

Indonesian Citizen
54 years old
Born in Madiun, on June 5, 1963

Domisili
Madiun, Jawa Timur, Indonesia.

Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Komisaris PTPN X
Jabatan Komisaris diemban sejak RUPS Tahun 2016 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-73/MBU/2016 tanggal 31 Maret 2016. Jabatan Komisaris ini merupakan periode ke-1. Sebelum itu, Sukardi Rinakit belum pernah menjabat pada Dewan Komisaris Perseroan.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (1989); M.A., Departement of Southeast Asian Studies, National University of Singapore (1996); Ph.D, *Departement of Political Science*, National University of Singapore (2003).

Riwayat Profesi
Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (2015-sekarang); Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) (2015-sekarang); Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (2001-2014); Dosen Tamu di Lemhanas dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2001-2014); Staf Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (1989-1998).

Rangkap Jabatan
Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (2015-sekarang).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham PTPN X
Tidak memiliki saham PTPN X.

Domicile
Madiun, East Java, Indonesia

Appointment History as Board of Commissioners of PTPN X
Served as Commissioner since 2016 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-73/MBU/2016 dated March 31, 2016, for the 1st period. Prior to that, Sukardi Rinakit had never served on the Board of Commissioners of the Company.

Educational Background
Bachelor of Social and Political Science, University of Indonesia (1989); M.A., Departement of Southeast Asian Studies, National University of Singapore (1996); Ph.D, Departement of Political Science, National University of Singapore (2003).

Professional History
Special Staff of the President of the Republic of Indonesia (2015-present); Member of Association of Indonesian Political Science (AIPI) (2015-present); Executive Director of Soegeng Sarjadi Syndicate (2001-2014); Guest Lecturer at Lemhanas and Graduate program at University of Indonesia (2001-2014); Research Staff of Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (1989-1998).

Concurrent Positions
Special Staff of the President of the Republic of Indonesia (2015-present).

Affiliate Relationship
Has no affiliate relationship with fellow Board of Commissioners, Board of Directors, and Major/Controlling Shareholders.

Share Ownership of PTPN X
Does not own shares of PTPN X.

Y.B. Priyatmo Hadi

Komisaris

Commisioner

(Periode Jabatan: 1 September 2016 - RUPS 2021, Periode Pertama)

(Term of Office: September 1, 2016 – 2021 GMS, 1st Period)

Warga Negara Indonesia
Usia 45 tahun
Kelahiran Boyolali, 16 Januari 1972

Indonesian Citizen
45 years old
Born in Boyolali, on January 16, 1972

Domisili
Depok, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Komisaris PTPN X
Jabatan Komisaris diemban sejak RUPS Tahun 2016 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/2016 tanggal 1 September 2016. Jabatan Komisaris ini merupakan periode ke-1. Sebelum itu, Y.B. Priyatmo Hadi belum pernah menjabat pada Dewan Komisaris Perseroan.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta (1996); Magister Ekonomi Universitas Indonesia (2007).

Riwayat Profesi
Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana, Prasarana Perhubungan 1b, Kementerian BUMN (2015-sekarang); Komisaris PT Reasuransi International Indonesia (2014-2016); Kepala Bidang Usaha Perbankan & Asuransi I, Kementerian BUMN (2014-2015); Komisaris PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (2014); Staf Sekretaris Komisaris PT Bank Mandiri (2011-2014); Kepala Sub Bidang Jasa 1 A2, Kementerian BUMN (2010-2014); Sekretaris Dewan Komisaris PTPN XI (2008-2011); Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kinerja Usaha Perkebunan II A Kementerian BUMN (2008-2010); Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kinerja Usaha Perkebunan II A, Kementerian BUMN (2006-2008); Sekretaris Dewan Komisaris PTPN IX (2006-2008); Sekretaris Dewan Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (2002-2006); Pelaksana pada Sub Bidang Perencanaan Usaha Bidang Sarana Perhubungan, Kementerian Keuangan/Kementerian Pembinaan BUMN (1999-2006); Staf Sekretaris Dewan Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (2000-2002).

Rangkap Jabatan
Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana, Prasarana Perhubungan 1b, Kementerian BUMN (2015-sekarang).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham PTPN X
Tidak memiliki saham PTPN X.
.

Domicile
Depok, West Java, Indonesia

Appointment History as Board of Commissioners of PTPN X
Served as Commissioner since 2016 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-207/MBU/2016 dated September 1, 2016, for the 1st period. Prior to that, Y.B. Priyatmo Hadi had never served on the Board of Commissioners of the Company.

Educational Background
Bachelor of Social and Political Science from University of Atmajaya, Yogyakarta (1996); Master of Economics from University of Indonesia (2007).

Professional History
Head of Construction and Facilities Department, Transportation Infrastructure 1b, Ministry of SOE (2015-present); Commissioner of PT Reasuransi International Indonesia (2014-2016); Head of Banking and Insurance Department I, Ministry of SOE (2014-2015); Commissioner of PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (2014); Staff of Secretary of Commissioner of PT Bank Mandiri (2011-2014); Head of Service Sub-Department 1 A2, Ministry of SOE (2010-2014); Secretary of Board of Commissioners of PTPN XI (2008-2011); Head of Plantation Planning and Business Performance Sub-Department II A, Ministry of SOE (2008-2010); Officer of Plantation Planning and Business Performance Sub-Department II A, Ministry of SOE (2006-2008); Secretary of Board of Commissioners of PTPN IX (2006-2008); Secretary of Board of Commissioners of PT Merpati Nusantara Airlines (2002-2006); Officer of Business Planning Sub-Department, Transportation Infrastructure Department, Ministry of Finance/Ministry of SOE Development (1999-2006); Staff of Secretary of Board of Commissioners of PT Merpati Nusantara Airlines (2000-2002).

Concurrent Positions
Head of Construction and Facilities Department, Transportation Infrastructure 1b, Ministry of SOE (2015-present).

Affiliate Relationship
Has no affiliate relationship with fellow Board of Commissioners, Board of Directors, and Major/Controlling Shareholders.

Share Ownership of PTPN X
Does not own shares of PTPN X.

Arvan Rivaldy Rebion Siregar

Komisaris Independen

Independent Commisioner

(Periode Jabatan: 1 September 2016 - RUPS 2021, Periode Pertama)

(Term of Office: September 1, 2016 – 2021 GMS, 1st Period)

Warga Negara Indonesia
Usia 37 tahun
Kelahiran Bandung, 31 Mei 1980

Indonesian Citizen
37 years old
Born in Bandung, on May 31, 1980

Domisili
Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Komisaris PTPN X
Jabatan Komisaris Independen diemban sejak RUPS Tahun 2016 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/2016 tanggal 1 September 2016. Jabatan Komisaris Independen ini merupakan periode ke-1. Sebelum itu, Arvan Rivaldy Rebion Siregar belum pernah menjabat pada Dewan Komisaris Perseroan.

Riwayat Pendidikan
Bachelor Comm – University of Queensland, Brisbane, Australia – *Specializing in Finance.*

Riwayat Profesi
Direktur PT Ingria Pratama Capitalindo (2015-sekarang); Komisaris PT Puri Amerta Sanjiwani (2009-sekarang); Direktur PT Petrobas Indonesia (2006-20090); Direktur PT Megah Tama Berjangka (2007-2008); *Assistant to Senior Vice President Coordinating Executive* PT Freeport Indonesia (2003-2005).

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain
Komisaris PT Puri Amerta Sanjiwani, (2009 – sekarang)
Direktur PT Ingria Pratama Capitalindo, (2015 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham PTPN X
Tidak memiliki saham PTPN X.

Domicile
East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appoinment History as Board of Commissioners of PTPN X
Served as Independent Commissioner since 2016 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-207/MBU/2016 dated September 1, 2016, for the 1st period. Prior to that, Arvan Rivaldy Rebion Siregar had never served on the Board of Commissioners of the Company.

Educational Background
Bachelor Comm – University of Queensland, Brisbane, Australia – Specializing in Finance.

Professional History
Director of PT Ingria Pratama Capitalindo (2015-present); Commissioner of PT Puri Amerta Sanjiwani (2009-present); Director of PT Petrobas Indonesia (2006-2090); Director of PT Megah Tama Berjangka (2007-2008); Assistant to Senior Vice President Coordinating Executive of PT Freeport Indonesia Co.(2003-2005).

Concurrent Positions
Commisioner of PT Puri Amerta Sanjiwani (2009 – present)
Director of PT Ingria Pratama Capitalindo (2015 – present)

Affiliate Relationship
Has no affiliate relationship with fellow Board of Commissioners, Board of Directors, and Major/Controlling Shareholders.

Share Ownership of PTPN X
Does not own shares of PTPN X.

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Dwi Satriyo Annurogo

Direktur Utama

President Director

(Periode Jabatan: 24 Februari 2017 - RUPS 2022, Periode Pertama)

(Term of Office: February 24, 2017 – 2022 GMS, 1st Period)

Warga Negara Indonesia
Usia 50 tahun
Kelahiran Lawang, 13 Desember 1967

Indonesian Citizen
50 years old
Born in Lawang, on December 13, 1967

Domisili
Gresik, Jawa Timur, Indonesia

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi PTPN X
Jabatan Direktur Utama diemban sejak RUPS Tahun 2017 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-35/MBU/02/2017 tanggal 24 Februari 2017. Jabatan Direktur Utama ini merupakan periode ke-1. Sebelum itu, Dwi Satriyo Annurogo belum pernah menjabat sebagai Direksi Perseroan.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Kimia Institut Teknologi Surabaya (ITS) (1991); Magister Teknik Kimia ITS (2007).

Riwayat Profesi
Direktur Produksi, Teknik & Pengembangan, PT Pupuk Iskandar Muda (2016-2017); *General Manager* Pabrik III, PT Petrokimia Gresik (2014-2016); *General Manager* Pabrik II, PT Petrokimia Gresik (2011-2014); Kepala Departemen Produksi II, PT Petrokimia Gresik (2009-2011); Kepala Bagian Pupuk Fosfat I, PT Petrokimia Gresik (2007-2009); Kepala Bagian Phonska, PT Petrokimia Gresik (2005); Kepala Bagian Perencanaan & Pengendalian Produksi II, PT Petrokimia Gresik (2002-2005); Staf di Departemen Produksi II, PT Petrokimia Gresik (1992-2002).

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham PTPN X
Tidak memiliki saham PTPN X.

Domicile
Gresik, Jawa Timur, Indonesia

Position History as Board of Directors of PTPN X
Served as President Director since 2017 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-35/MBU/02/2017 dated February 24, 2017, for the 1st period. Prior to that, Dwi Satriyo Annurogo had never served as Director of the Company.

Educational Background
Bachelor of Chemical Engineering from Surabaya Institute of Technology (ITS) (1991); Master in Chemical Engineering from ITS (2007).

Professional History
Director of Production, Engineering & Development, PT Pupuk Iskandar Muda (2016-2017); General Manager of Factory III, PT Petrokimia Gresik (2014-2016); General Manager of Factory II, PT Petrokimia Gresik (2011-2014); Head of Production Department II, PT Petrokimia Gresik (2009-2011); Head of Phosphate Fertilizer Department, PT Petrokimia Gresik (2007-2009); Head of Phonska Department, PT Petrokimia Gresik (2005); Head of Production Planning and Control II, PT Petrokimia Gresik (2002-2005); Staff of Production Department II, PT Petrokimia Gresik (1992-2002).

Concurrent Positions
Does not hold concurrent positions.

Affiliate Relationship
Has no affiliate relationship with Board of Commissioners, fellow Board of Directors, and Major/Controlling Shareholders.

Share Ownership of PTPN X
Does not own shares of PTPN X.

Mustaqim

Direktur Operasional

Director of Operations

(Periode Jabatan: 24 Februari 2017 - RUPS 2022, Periode Pertama)

(Term of Office: February 24, 2017 – 2022 GMS, 1st Period)

Warga Negara Indonesia
Usia 39 tahun
Kelahiran Blora, 26 Januari 1978

Indonesian Citizen
39 years old
Born in Blora, on January 26, 1978

Domisili
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi PTPN X
Jabatan Direktur Operasional diemban sejak RUPS Tahun 2017 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-35/MBU/02/2017 tanggal 24 Februari 2017. Jabatan Direktur ini merupakan periode ke-1. Sebelum itu, Mustaqim belum pernah menjabat sebagai Direksi Perseroan.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Elektro Universitas Diponegoro Semarang (2003).

Riwayat Profesi
Pjs. Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan - Kantor Pusat PTPN X (2016-2017); Manajer Instalasi, PG Gempolkrep (2015-2016); Manajer Instalasi, PG Lestari (2014-2015); Manajer Instalasi, PG Watoetoelis (2013-2014); Pjs. Kabag Instalasi PG Watoetoelis (2012-2013); Pemb. Masinis I, PG Ngadiredjo (2010-2012); Pemb. Masinis Ii, PG Ngadiredjo (2007-2010); Masa Percobaan, PG.Ngadiredjo (2004-2007); Pemb. Masinis Iii, PG Ngadiredjo (2004).

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham PTPN X
Tidak memiliki saham PTPN X.

Domicile
Surabaya, East Java, Indonesia

Position History as Board of Directors of PTPN X
Served as Director of Operations since 2017 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-35/MBU/02/2017 dated February 24, 2017, for the 1st period. Prior to that, Mustaqim had never served as Director of the Company.

Education
Bachelor of Electrical Engineering from Diponegoro University, Semarang (2003).

Professional History
Interim Head of Planning & Development Division – Head office of PTPN X (2016-2017); Installation Manager, PG Gempolkrep (2015-2016); Installation Manager, PG Lestari (2014-2015); Installation Manager, PG Watoetoelis (2013-2014); Interim Head of Installation Division, PG Watoetoelis (2012-2013); Assistant Machinist I, PG Ngadiredjo (2010-2012); Assistant Machinist II, PG Ngadiredjo (2007-2010); Probation period, PG Ngadiredjo (2004-2007); Assistant Machinist III, PG Ngadiredjo (2004).

Concurrent Positions
Does not hold concurrent positions.

Affiliate Relationship
Has no affiliate relationship with Board of Commissioners, fellow Board of Directors, and Major/Controlling Shareholders.

Share Ownership of PTPN X
Does not own shares of PTPN X.

Slamet Djumantoro

Direktur Komersil

Director of Commercial

(Periode Jabatan: 11 Desember 2017 - RUPS 2022, Periode Pertama)

(Term of Office: February 24, 2017 – 2022 GMS, 1st Period)

Warga Negara Indonesia
Usia 54 tahun
Kelahiran Jember, 4 Januari 1963

Indonesian Citizen
54 years old
Born in Jember, on January 4, 1963

Domisili
Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi PTPN X
Jabatan Direktur Komersil diemban sejak RUPS Tahun 2017 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-271/MBU/12/2017 dan PTPN III (Persero) sebagai induk perusahaan dengan nomor surat 3.06/SKPTS/R/136/2017 tanggal 11 Desember 2017. Jabatan Direktur ini merupakan periode ke-1. Sebelum itu, Slamet Djumantoro belum pernah menjabat sebagai Direksi Perseroan.

Pendidikan
Sarjana Hukum dari Universitas Mahasaraswati Bali pada tahun 1990, dan Magister Manajemen Pemasaran dari Universitas Udayana, Bali (2000).

Riwayat Profesi
Bekerja di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sejak tahun 2010. Beberapa jabatan yang pernah diemban: Pemimpin Divisi Usaha Kecil (2010-2011), Pemimpin Divisi *Procurement & Fixed Assets* (2012-2014), Pemimpin Divisi Kredit Khusus (2014-2015), Pemimpin Kantor Wilayah Makassar (2015-2017), Pemimpin Kantor Wilayah Surabaya (2017).

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Kepemilikan Saham PTPN X
Tidak memiliki saham PTPN X.

Domicile
Sidoarjo, East Java, Indonesia

Position History as Board of Directors of PTPN X
Served as Director of Commercial since 2017 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-271/MBU/12/2017 and PTPN III (Persero) as parent entity with the letter No. 3.06/SKPTS/R/136/2017 dated December 11, 2017, for the 1st period. Prior to that, Slamet Djumantoro had never served as Director of the Company.

Education
Bachelor of Law from Mahasaraswati University of Bali (1990), and Master of Marketing Management from Udayana University, Bali (2000).

Professional History
Worked in PT Bank Negara Indonesia Tbk since 2010, had held several positions: Head of Small Business Division (2010-2011), Head of Procurement & Fixed Assets Division (2012-2014), Head of Special Credit Division (2014-2015), Head of Makassar Regional Office (2015-2017), Head of Surabaya Regional Office (2017).

Concurrent Positions
Does not hold concurrent positions.

Affiliate Relationship
Has no affiliate relationship with Board of Commissioners, fellow Board of Directors, and Major/Controlling Shareholders.

Share Ownership of PTPN X
Does not own shares of PTPN X.

Profil Pejabat Puncak

Senior Executives Profile

KEPALA DIVISI/BIRO/SEKRETARIS PERUSAHAAN/GENERAL MANAGER

Adi Santoso
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Menjabat Sejak *Served Since*	:	18 Februari 2015 *February 18, 2015*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Juni 1993 *June 1, 1993*

Syahrial Koto
Pjs. Satuan Pengawas Intern
Act of SPI

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Januari 1991 *January 1, 1991*

Soekamto Partowijoyo
Kepala Divisi PKBL
Head of PKBL Division

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Desember 2017 *December 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Januari 1991 *January 1, 1991*

Tri Ari Sulistyawan
Kepala Biro Hukum
Head of Legal Bureau

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Juni 2017 *June 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	15 Desember 2007 *December 15, 2007*

Mifthakul Munir
Kepala Divisi Areal & Budidaya
Head of Cultivation & Area Division

Menjabat Sejak *Served Since*	:	30 Januari 2017 *January 30, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	16 Juni 1984 *June 16, 2984*

HEAD OF DIVISION/HEAD OF BUREAU/ CORPORATE SECRETARY/GENERAL MANAGER

Haryo Goenawan Wibisono
Pjs. Kepala Divisi *Quality Assurance*
Act. Head of Quality Assurance Division

Menjabat Sejak *Served Since*	:	30 Januari 2017 *January 30, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Januari 1989 *January 1, 1989*

Sugiharto Bisri
Kepala Divisi Pengadaan Barang & Jasa

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Januari 2014 *January 1, 2014*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Mei 2004 *May 1, 2004*

Hera Hertantina
Kepala Divisi Pemasaran
Head of Marketing Division

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Juni 2017 *June 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Juni 1993 *June 1, 1993*

Edy Purnomo
Pjs. Kepala Divisi Sarana Prasarana & Mekanisasi

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Mei 2004 *May 1, 2004*

Dwi Junianto
Pjs. Kepala Divisi Teknik
Act. Head of Engineering Division

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	30 April 2004 *April 30, 2004*

Marshal G. Pattiasina
Kepala Divisi Pengolahan
Head of Processing Division

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Juni 2017 *June 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	16 Desember 1986 *December 16, 1986*

Benny Sanjaya
Pjs. Kepala Divisi Akuntansi
Act. Head of Accounting Division

Menjabat Sejak *Served Since*	:	30 Januari 2017 *January 30, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	2 Januari 1989 *January 2, 1989*

Septo Kuswitjahjono
Kepala Divisi Keuangan
Head of Financial Division

Menjabat Sejak *Served Since*	:	30 Januari 2017 *January 30, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	12 Juli 1993 *July 12, 1993*

Herman
Pjs. Kepala Divisi SDM & HI
Act. Head of HR & IR Division

Menjabat Sejak *Served Since*	:	10 Agustus 2017 *August 10, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	15 Desember 2006 *December 15, 2006*

Suryanto
Kepala Divisi Umum
Head of General Affairs Division

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Januari 2015 *January 1, 2015*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Agustus 1985 *August 1, 1985*

Wakhyu Priyadi Siswosumarto
Pjs. Kepala Divisi Renbang
Act. Head of Planning & Development Division

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Mei 2004 *May 1, 2004*

Puji Setiyawan
Pimpinan Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN)

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Mei 2004 *May 1, 2014*

Heru Sinarjanto
General Manager PG Gempolkrep

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Januari 1991 *Janaury 1, 1991*

Soekamto Partowijoyo
General Manager PG Watoetoelis

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei – 30 November 2017 *May 1 - November 30, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Januari 1991 *Janaury 1, 1991*

Sugeng Purnomo
General Manager - PG. Kremboong

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Januari 1991 *Janaury 1, 1991*

Edwin Risananto
Pjs. General Manager PG. Djombang Baru

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Mei 2004 *May 1, 2004*

Benny Basuki Suryo Sularso
General Manager PG. Tjoekir

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	16 Oktober 1987 *October 16, 1987*

Iskandar
PJS. General Manager - PG. Lestari

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Oktober 1984 *October 1, 1984*

Koes Darmawanto
General Manager PG. Pesantren Baru dan PG Meritjan

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Januari 1991 *January 1, 1991*

Abdul Munib
General Manager - PG. Ngadiredjo

Menjabat Sejak *Served Since*	:	30 Januari 2017 *January 30, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Oktober 1984 *October 1, 1984*

Bambang Hari Nugroho
General Manager – PG. Modjopanggoong

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Januari 1991 *January 1, 1991*

L. ST. Gomo Tumanggor
Pjs. General Manager Kebun Kertosari

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 November 2000 *November 1, 2000*

Untung Mulyono
General Manager Kebun Ajong Gayasan

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 November 1983 *November 1, 1983*

Purwadi
General Manager - Kebun Kebonarum/Gayamprit/Wedibirit

Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Mei 2017 *May 1, 2017*
Bergabung di PTPN X *Joined PTPN X*	:	1 Juli 1987 *July 1, 1987*

Demografi Karyawan
Employee Demographics

Perkembangan Jumlah Karyawan Tahun 2013-2017
(orang)

The Development of Number of Employees in 2013-2017
(persons)

2013	2014	2015	2016	2017
11.658	11.270	10.821	9.885	18.311

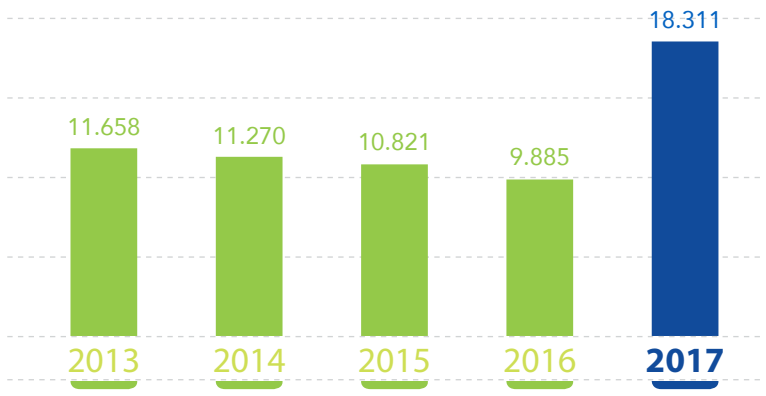

"18.311 karyawan yang berkarya di Perseroan tersebar di Kantor Pusat, 1 Kantor Perwakilan, 11 Pabrik Gula, 3 Kebun Tembakau, serta 4 anak usaha di bidang Bioetanol, Woven Bag dan Flexible Packaging, Rumah Sakit, dan Sayuran Beku"

"18,331 employees are working for the Company and located at the Head Office, 1 Representative Office, 11 Sugar Mills, 3 Tobacco Fields, and 4 subsidiaries in the field of Bioethanol, Woven Bag and Flexible Packaging, Hospital, and Frozen Vegetables"

Uraian tentang pengembangan kekaryawanan Perseroan dapat dilihat pada bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam bagian pembahasan Sumber Daya Manusia.

Description on the Company's employee development can be seen in the Business Support Function chapter in the discussion of Human Resources.

Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

RINCIAN PEMEGANG SAHAM

Komposisi Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

DETAILS OF SHAREHOLDERS

The Composition of Company's Shareholders are as follow:

Modal Saham dan Kepemilikan Saham PTPN X
per 31 Desember 2017

Share Capital and Share Ownership of PTPN X
per December 31, 2017

Pemegang Saham *Shareholders*	**Jumlah Saham (lembar)** *Number of Shares (share)*	**Nominal** *Par Value* **(Rp)**	**Persentase Kepemilikan** *Percentage of Ownership* **(%)**
Saham Seri A *Series A Share*			
• PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1	1.000.000	0,00%
Saham Seri B *Series B Share*			
• PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1.661.035	1.661.035.000.000	90,00%
• Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	184.560	184.560.000.000	10,00%
Jumlah *Total*	1.845.596	1.845.596.000.000	100,00%

Komposisi Kepemilikan Saham Seri B PTPN X

The Composition of Series B Share Ownership of PTPN X

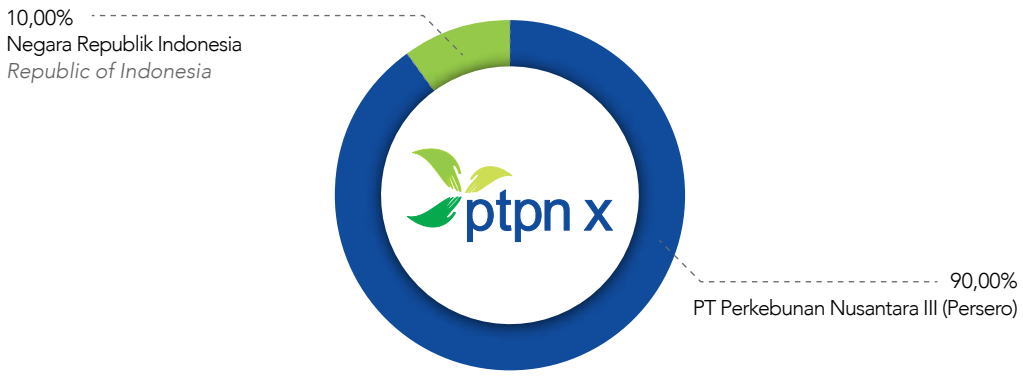

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA

Pemegang saham utama dari Perseroan adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero), atau PTPN III. PTPN III sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Negara Republik Indonesia memiliki seluruh saham atau 100% dari saham PTPN III. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia menjadi entitas induk akhir dari Perseroan.

Di bawah ini disajikan informasi dalam grafis tentang PTPN III sebagai pemegang saham utama Perseroan.

INFORMATION ON MAJOR SHAREHOLDER

The major shareholder of the Company is PT Perkebunan Nusantara III (Persero) or PTPN III. PTPN III is a State-Owned Enterprise in which the Republic of Indonesia owns its entire shares or 100% of PTPN III's shares. Thus, the Republic of Indonesia is the end parent entity of the Company.

Below is a graphic information about PTPN III as the major shareholder of the Company.

Struktur Pemegang Saham Utama PTPN X

The Structure of Major Shareholder of PTPN X

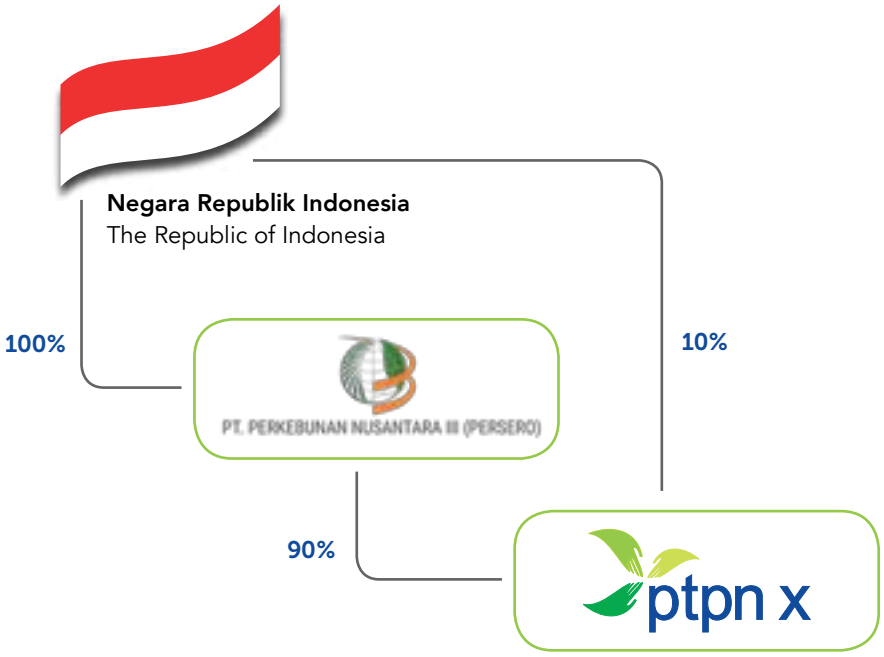

Komposisi Kepemilikan Saham PTPN III Sebagai Pemegang Saham Utama PTPN X

The Composition of Share Ownership of PTPN III As Major Shareholder of PTPN X

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASING-MASING DI BAWAH 5 (LIMA) PERSEN

Hingga 31 Desember 2017, Perseroan tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham Karyawan, atau *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan Program Kepemilikan Saham Karyawan, atau *Management Stock Ownership Program* (MSOP). Perseroan juga tidak melakukan Penawaran Umum

INFORMATION ON SHARE OWNERSHIP BY THE MANAGEMENT AND GROUP OF SHAREHOLDERS WITH LESS THAN 5 (FIVE PERCENT)

Until December 31, 2017, the Company did not have a policy regarding the Employee Stock Ownership Program (ESOP) and the Management Stock Ownership Program (MSOP). The Company also did not conduct an Initial Public Offering, which allowed the public to own the Company's shares. All

Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham Perseroan oleh publik. Seluruh kepemilikan saham sesuai dengan penjelasan di atas.

share ownership are in accordance with the explainations above.

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*	**Jumlah Kepemilikan Saham PTPN X** *Total Share Ownership in PTPN X*
Komisaris Utama *President Commissioner*	Rudi Wibowo	- Nihil - *- None -*
Komisaris *Commissioner*	Sukardi Rinakit	- Nihil - *- None -*
Komisaris *Commissioner*	Y.B. Priyatmo Hadi	- Nihil - *- None -*
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Arvan Rivaldy Rebion Siregar	- Nihil - *- None -*
Direktur Utama *President Director*	Dwi Satriyo Annurogo	- Nihil - *- None -*
Direktur Operasional *Director of Operations*	Mustaqim	- Nihil - *- None -*
Direktur Komersil *Director of Commercial*	Slamet Djumantoro	- Nihil - *- None -*

Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)

List of Subsidiaries and Associates/Joint Venture (JV)/ Special Purpose Vehicle (SPV)

Entitas Anak *Subsidiaries*	**Bidang Usaha** *Line of Business*	**Domisili** *Domicile*	**Tahun Beroperasi** *Year of Operational Commencement*	**Kepemilikan Saham** *Share Owership* **(%)**		**Aset Sebelum Eliminasi (Rp-juta)** *Assets Before Elimination (Rp-million)*		**Status Operasi** *Operating Status*
				2017	**2016**	**2017**	**2016**	
PT Mitratani Dua Tujuh	Industri *Frozen Vegetables* *Frozen Vegetables Industry*	Jember	2004	65,00%	65,00%	151.507	135.717	Beroperasi *Operating*
PT Dasaplast Nusantara	Industri *Woven Bag and Flexible Packaging* *Woven Bag and Flexible Packaging Industry*	Jepara	2004	90,00%	90,00%	191.033	159.431	Beroperasi *Operating*
PT Nusantara Medika Utama	Pelayanan rumah sakit *Hospital Services*	Mojokerto	2013	99,56%	99,56%	291.993	212.304	Beroperasi *Operating*
PT Energi Agro Nusantara	Industri bahan bakar *Fuel Industry*	Mojokerto	2013	99,30%	99,30%	55.992	55.120	Beroperasi *Operating*

PT MITRATANI DUA TUJUH (M27)

PT Mitratani Dua Tujuh ("M27") dibentuk sebagai kerja sama antara Perseroan dan PT Kelola Mina Laut ("PT KML"). Berlokasi di Mangli, Jember, Jawa Timur, M27 bergerak dengan komoditi utama *frozen vegetables* kedelai Edamame dan Okra yang dipasarkan melalui ekspor ke Jepang dan sebagian untuk pasar lokal.

Perseroan memiliki saham 65,00% atas M27, sementara PT KML memiliki 35,00% saham M27.

PT MITRATANI DUA TUJUH (M27)

PT Mitratani Dua Tujuh ("M27") was established as a cooperation between the Company and PT Kelola Mina Laut ("PT KML"). Located in Mangli, Jember, East Java, M27's main commodity is frozen vegetables such as Edamame soy and Okra, which are mostly marketed as export goods to Japan and some portion for local markets.

The Company owns 65.00% shares of M27, while 35.00% shares are owned by PT KML.

Ikhtisar Keuangan / **Financial Highlights**

Rp-juta *Rp-Million*	**2017 (Rp-miliar)** *(Rp-billion)*	**2016 (Rp-miliar)** *(Rp-billion)*
Pendapatan *Revenue*	246.714	208.638
Beban Usaha *Operating Expenses*	44.199	35.623
Laba Bersih *Net Profit*	23.302	14.140
Laba Komprehensif *Comprehensive Income*	21.487	13.309
Aset *Assets*	151.507	135.717
Liabilitas *Liabilities*	46.047	48.959
Ekuitas *Equity*	105.460	86.758

PT DASAPLAST NUSANTARA (DPN)

Dibentuk pada tahun 2004 sebagai perusahaan gabungan antara Perseroan dan perusahaan swasta, PT Dasaplast Nusantara ("DPN") berlokasi di Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. DPN bergerak di bidang industri karung plastik *Polypropylene* (PP) *Woven Bag, Polyethylene (PE) Inner Bag, Leno Mesh* (*Warring*) dan *flexible packaging* yang telah memenuhi standar internasional dengan kemampuan anti-slip sehingga mengurangi risiko tergelincir, mengurangi kecelakaan kerja dan merubah standar keamanan kerja. Untuk pemasaran produk selain di Indonesia, juga diekspor ke mancanegara antara lain ke Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika Selatan, Kanada, Amerika Serikat.

Perseroan memiliki saham mayoritas DPN yang mencapai 90,00%, sementara sisanya sebesar 10,00% dimiliki oleh PT Surya Satria Sembada.

PT DASAPLAST NUSANTARA (DPN)

Established in 2004 as a joint venture between the Company and a private company, PT Dasaplast Nusantara ("DPN") is located in Pecangaan, Jepara Regency, Central Java. DPN operates in plastic bags industry, such as Polypropylene (PP) Woven Bag, Polyethylene (PE) Inner Bag, Leno Mesh (Warring) and flexible packaging, which have met the internasional standard with its anti-slip ability that reduce the risk of slippery as well as work accidents, and change the work safety standards. Besides Indonesian market, the plastic bags are also exported to other countries, such as Asia, Europe, Middle East, South America, Canada, and the United States.

The Company is the major shareholder of DPN with 90.00% shares ownership, while the remaining 10.00% is owned by PT Surya Satria Sembada.

Ikhtisar Keuangan / Financial Highlights

Rp-juta *Rp-Million*	**2017** **(Rp-miliar)** *(Rp-billion)*	**2016** **(Rp-miliar)** *(Rp-billion)*
Pendapatan *Revenue*	129.045	111.993
Beban Usaha *Operating Expenses*	10.176	6.779
Laba Bersih *Net Profit*	1.270	5.129
Laba Komprehensif *Comprehensive Income*	-0,851	4.905
Aset *Assets*	191.033	159.431
Liabilitas *Liabilities*	109.065	75.844
Ekuitas *Equity*	81.967	83.588

PT NUSANTARA MEDIKA UTAMA (NMU)

PT Nusantara Medika Utama ("NMU") merupakan bentuk *spin off* dari *Strategic Business Unit* (SBU) Rumah Sakit milik Perseroan yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Sri Eliana Tjahjoharto, S.H. No. 14 tanggal 19 Januari 2013 dan berkantor pusat di Mojokerto, Jawa Timur. SBU Rumah Sakit Perseroan dibentuk pada 1 Desember 2003, meliputi

PT NUSANTARA MEDIKA UTAMA (NMU)

PT Nusantara Medika Utama ("NMU") is a spin off of the Company's Hospital Strategic Business Unit (SBU), established based on Notarial Deed of Sri Eliana Tjahjoharto, S.H. No. 14 dated January 19, 2013, with head office located in Mojokerto, East Java. The Company's Hospital SBU was formed in December 1, 2003, which included three

3 (tiga) unit usaha rumah sakit, yaitu RS Gatoel, RS HVA Toeloengredjo dan RS Perkebunan Jember. Perubahan bentuk pengelolaan rumah sakit dari SBU menjadi entitas anak usaha dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalitas pengelolaan rumah sakit dan menciptakan nilai tambah bagi Perseroan sebagai entitas induk. NMU juga mengakuisisi RS Cendana di Blitar kemudian meresmikan sebagai RS Medika Utama.

Perseroan memiliki saham mayoritas NMU yang mencapai 99,56%, sementara sisanya sebesar 0,04% dimiliki oleh Koperasi Karyawan (KOPKAR) RS Gatoel, KOPKAR RS HVA Toeloengredjo, dan KOPKAR Alamanda.

hospitals: Gatoel Hospital, HVA Toeloengredjo Hospital, and Perkebunan Jember Hospital. The changes in the form of hospital management from SBU into a subsidiary was executed in order to increase the professionalism of hospital management and create an added value for the Company as the parent entity. NMU also acquired RS Cendana at Blitar then launching RS Medika Utama.

Most of NMU's shares are owned by the Company, amounted to 99.56%, while the remaining 0.04% is owned by Employee Cooperative (KOPKAR) of Gatoel Hospital, KOPKAR of HVA Toeloengredjo Hospital, and KOPKAR of Alamanda.

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Rp-juta *Rp-Million*	**2017** **(Rp-miliar)** *(Rp-billion)*	**2016** **(Rp-miliar)** *(Rp-billion)*
Pendapatan *Revenue*	333.491	294.278
Beban Usaha *Operating Expenses*	21.525	23.347
Laba Bersih *Net Profit*	31.012	24.728
Laba Komprehensif *Comprehensive Income*	28.145	22.775
Aset *Assets*	291.993	212.304
Liabilitas *Liabilities*	168.601	113.348
Ekuitas *Equity*	123.391	98.955

PT ENERGI AGRO NUSANTARA (ENERO)

Pengembangan bisnis Bioetanol dengan memanfaatkan bahan baku tetes dari unit bisnis gula Perseroan merupakan strategi diversifikasi yang berkaitan dengan bisnis utamanya. Didirikan dengan Akta Notaris Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., No. 3 tanggal 5 Juni 2013, PT Energi Agro Nusantara ("ENERO") berlokasi di Desa Gempolkerep Mojokerto, Jawa Timur. ENERO merupakan langkah awal Perseroan untuk mewujudkan industri gula terintegrasi.

Perseroan memiliki saham mayoritas ENERO yang mencapai 99,30%, sementara sisanya sebesar 0,70% dimiliki oleh Koperasi Karyawan (KOPKAR) PTPN X.

PT ENERGI AGRO NUSANTARA (ENERO)

The development of Bioethanol business by utilizing the raw material of molasses from the Company's sugar business unit is a diversification strategy related to the main business. Established under the Notarial Deed of Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., No. 3 dated June 5, 2013, PT Energi Agro Nusantara ("ENERO") is located in Gempolkerep Village, Mojokerto, East Java. ENERO is the Company's first step in pursuing an integrated sugar industry.

The majority shares of ENERO up to 99.30% are owned by the Company, while the remaining 0.70% is owned by Employee Cooperative (KOPKAR) of PTPN X.

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Rp-juta *Rp-Million*	**2017** **(Rp-miliar)** *(Rp-billion)*	**2016** **(Rp-miliar)** *(Rp-billion)*
Pendapatan *Revenue*	88.598	115.028
Beban Usaha *Operating Expenses*	8.739	7.204
Laba Bersih *Net Profit*	(7.509)	2.203
Laba Komprehensif *Comprehensive Income*	(7.763)	2.205
Aset *Assets*	55.991	55.116
Liabilitas *Liabilities*	47.681	39.046
Ekuitas *Equity*	8.310	16.069

Struktur Grup PTPN X
Group Structure of PTPN X

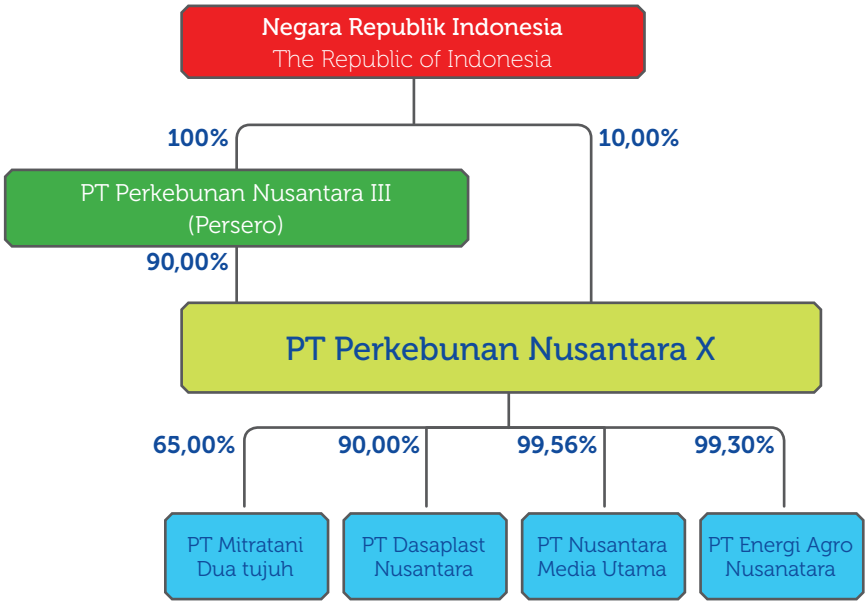

Kronologis Penerbitan Saham
Share Listing Chronology

Hingga tanggal 31 Desember 2017 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perseroan tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa dimana saham Perseroan dicatatkan.

Until December 31, 2017 and the date of submission of this data/information, the Company did not conducted an Initial Public Offering and did not trade its shares in any stock market. Therefore, there are no information related to the date of share listing, amount, par value, stock offering price for each corporate action, number of shares registered after each corporate action and the name of the stock exchange where the Company's share is listed.

Kronologis Penerbitan Obligasi

Bonds Listing Chronology

Melalui surat No. XX-PESWA/13/026 tanggal 19 April 2013, Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Emisi Obligasi Perseroan tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% dan nominal sebesar Rp700.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Pernyataan pendaftaran tersebut dinyatakan efektif berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-198/D.04.2013 tertanggal 27 Juni 2013.

Penerbitan Emisi Obligasi Perseroan dengan nama Obligasi I PTPN X Tahun 2013 tersebut dicatatkan pada tanggal 8 Juli 2013 di BEI dengan perincian sebagai berikut:

Through Letter No. XX-PESWA/13/026 dated April 19, 2013, the Company submitted a Registration Statement to the Financial Services Authority on the emission of corporate bonds in 2013 with fixed interest rate of 8,9% and par value of Rp700,000,000,000 with 5 years maturity through Indonesia Stock Exchange (IDX). The Registration Statement was efective based on the Financial Services Authority Letter No. S-198/D.04.2013 dated June 27, 2013.

The issuance of the Company's Bonds Emission under the name PTPN X Bond I of 2013 was recorded on July 8, 2013 in IDX with details as follow:

Nama *Name*	**Tanggal Penerbitan** *Isssuance Date*	**Tingkat Bunga/ Imbalan** *Interest Rate / Returns*	**Tanggal Jatuh Tempo** *Maturity Date*	**Nilai Penawaran** *Offering Price* **(Rp)**	**Bursa Pencatatan dan Perdagangan** *Listing and Trade Exchange*	**Peringkat** *Rank*
Obligasi I PTPN X Tahun 2013 Kode Obligasi: PPNX01 Kode ISIN: IDA000059604 *PTPN X Bond I of 2013* *Bond Code: PPNX01* *ISIN Code: IDA000059604*	5 Juli 2013 *July 5, 2013*	Tetap 8,9% per tahun *Fixed 8.9% per year*	5 tahun, 5 Juli 2018 *5 years, July 5, 2018*	700.000.000.000	Bursa Efek Indonesia *Indonesia Stock Exchange*	Pada saat penerbitan: A+ *At the Time of Listing: A+* Per 31 Desember 2016: BBB+ *Per December 31, 2016: BBB+*

Realisasi Penggunaan Dana Obligasi I PTPN X sebesar Rp700 miliar telah seluruhnya digunakan sesuai tujuan penggunaannya yaitu ± 39% untuk pelunasan *outstanding* kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan ± 61% digunakan sebagai belanja modal dan atau modal kerja dalam rangka optimalisasi 11 unit Pabrik Gula milik Perseroan. Pembayaran Bunga Obligasi I PTPN X dilakukan di setiap kuartal, dengan tanggal pembayaran bunga pertama dilakukan pada 5 Oktober 2013.

The realization of the use of PTPN X Bond I proceeds in amount of Rp 700 billion has been fully utilized according to its intended use of proceeds, which is approximately 39% (thirty nine percent) for the repayment of outstanding credit at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and approximately 61% (sixty one percent) for capital expenditure and or working capital in order to optimize 11 sugar mills of the Company. The Interest Payment of PTPN X Bond I is paid quarterly, with the first payment date at October 5, 2013.

Kronologis Penerbitan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology

Selain penerbitan Obligasi I PTPN X, hingga akhir tahun 2017 Perseroan tidak menerbitkan efek lainnya.

Besides the issuance of PTPN X Bond I, the Company did not issued other securities until the end of 2017.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Institution and Profession

Informasi Perdagangan dan Pencatatan Efek *Information of Trade and Stock Listing*	:	Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp: +62 21 515 0515 Email: callcenter@idx.co.id Website: www.idx.co.id
Kustodian *Custodian*	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Telp: +62 21 515 2855 Fax: +62 21 5299 1199 Bebas Pulsa: 0800-186-5734 Email: helpdesk@ksei.co.id Website: www.ksei.co.id
Wali Amanat *Trustee*	:	PT Bank CIMB Niaga Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Telp: +62 21 5460 555 / 666 Fax: +62 21 259 5205
Pemeringkat Efek/Obligasi *Stock/Bond Rating*	:	Ernst & Young Plaza BRI 9th Floor JL. Basuki Rachmat 122 Surabaya, 60271, Indonesia Telp: +62 31 532 5577 Fax: +62 31 532 7700 Website : www.ey.com
Akuntan Publik *Public Accountant*	:	Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office Office 8, Lantai 15, Suite H, SCBD Lot 28 Jl. Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190 Telp: +62 21 2933 2858 Fax: +62 21 2933 2857
Konsultan Hukum *Legal Counsel*	:	Arry Supratno, SH Gedung Arthaloka Lt 7 Suite 706 Jl. Jend Sudirman Kav. 2 Jakarta Telp: +62 21 251 1351 Fax: +62 21 251 1413
Notaris *Notary*	:	PT Bank CIMB Niaga Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Telp: +62 21 5460 555 / 666 Fax: +62 21 259 5205

Penghargaan dan Sertifikasi
Award and Certification

PENGHARGAAN DI TAHUN 2017 / AWARDS IN 2017

Tanggal *Date*	Nama Penghargaan *Name of Award*	Diberikan Oleh *Awarded By*
3 Februari 2017 *February 3, 2017*	*Gold Winner* dalam ajang The 6th SPS Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) 2017, "The Best of State Own Enterprise Inhouse Magazine (InMA) 2017" *Gold Winner in the 6th SPS Indonesia Inhouse Magazine Award (InMa) 2017, "The Best of State Own Enterprise Inhouse Magazine (InMA) 2017"*	SPS (Serikat Perusahaan Pers)
29 Juli 2017 *July 29, 2017*	Verifikasi Akreditasi I, versi 2012 untuk RS HVA Toeloengredjo yang merupakan unit usaha Rumah Sakit Perseroan melalui anak usahanya, yakni PT Nusantara Medika Utama *Verification Accreditation I, 2012 version of HVA Toeloengredjo Hospital, which is the Company's Hospital business unit through a subsidiary, PT Nusantara Medika Utama*	KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) *KARS (Hospital Accreditation Committee)*
17 September 2017 *September 17, 2017*	Juara 1 *Customer* Terbaik PT PLN (Persero) untuk RS Jember Klinik yang merupakan unit usaha Rumah Sakit Perseroan melalui anak usahanya, yakni PT Nusantara Medika Utama *1st Winner of Best Customer of PT PLN (Persero) for Jember Klinik Hospital, which is the Company's hospital business unit through a subsidiary, PT Nusantara Medika Utama*	PT PLN (Persero)

Tanggal *Date*	**Nama Penghargaan** *Name of Award*	**Diberikan Oleh** *Awarded By*
20 Oktober 2017 *October 20, 2017*	Verifikasi Akreditasi I, versi 2012 untuk RS Jember Klinik yang merupakan unit usaha Rumah Sakit Perseroan melalui anak usahanya, yakni PT Nusantara Medika Utama *Verification Accreditation I, 2012 version of Jember Klinik Hospital, which is the Company's Hospital business unit through a subsidiary, PT Nusantara Medika Utama*	KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) *KARS (Hospital Accreditation Committee)*
19 Desember 2017 *December 19, 2017*	Rumah Sakit Trauma Centre dengan Layanan Terbaik untuk RS HVA Toeloengredjo yang merupakan unit usaha Rumah Sakit Perseroan melalui anak usahanya, yakni PT Nusantara Medika Utama *Hospital Trauma Center with Best Service for HVA Hospital Toeloengredjo which is a business unit of Hospital of the Company through its subsidiary, PT Nusantara Medika Utama*	BPJSTK Cab. Kediri Raya *BPJSTK of Kediri Raya Branch (Jombang, Kertosono , Nganjuk, Blitar, Kediri)*
14 Desember 2017 *December 14, 2017*	Juara II *Brand Identity* Anak Perusahaan BUMN *2nd winner of Brand Identity of SOE Subsidiary*	BUMN Track (BUMN Branding and Marketing Award 2017)
15 Desember 2017 *December 15, 2017*	Penghargaan PROPER HIJAU dan BIRU *GREEN and BLUE PROPER Award*	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan *Ministry of Environment & Forestry*
21 Desember 2017 *December 21, 2017*	Penghargaan Industri Hijau *Green Industry Award*	Kementerian Perindustrian *Ministry of Industry*

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU HINGGA TAHUN 2017

VALID CERTIFICATIONS UNTIL 2017

Keterangan *Description*	**Sertifikat** *Certification*		**Masa Berlaku** *Validity period*		**LS-Pro Penerbit/** ***Publisher***
	Nama *Name*	**Nomor** *Number*	**Tanggal Dikeluarkannya** *Date Issued*	**Masa Berlaku Hingga** *Validity period until*	
Pabrik Gula *Sugar Mill*					
WT	ISO 9001:2008	160123-ABICS-ISO9001	22-Feb-16	15-Sep-18	BBIA (ABI-Pro)
	ISO 14001:2015	EU165298	22-Des-16	21-Des-19	EQA
	SNI 3140.3:2010	450/BBIA/LSPro-BBIA (GKP 1&2)	22-Feb-16	21-Feb-20	BBIA (ABI-Pro)
	Halal	07230032400316	11-Mar-16	11-Mar-18	MUI Jawa Timur
KB	ISO 9001:2015	180073-ABICS-ISO 9001	26-Jan-18	25-Jan-21	LSS-BBIA
	ISO 14001:2015	EA170432	19-Des-17	18-Des-20	EQA
	SNI 3140.3:2010	364/BBIA/LSPro-BBIA (GKP 1&2)	26-Jan-18	25-Jan-22	BBIA (ABI-Pro)
	SMK3	SK Menaker no. 143/2016	14-Mei-16	13-Mei-19	Kemenaker
	Halal	07230023761214	25-Okt-17	24-Okt-19	MUI Jawa Timur

Keterangan *Description*	**Sertifikat** *Certification*		**Masa Berlaku** *Validity period*		**LS-Pro Penerbit/** ***Publisher***
	Nama *Name*	**Nomor** *Number*	**Tanggal Dikeluarkannya** *Date Issued*	**Masa Berlaku Hingga** *Validity period until*	
GK	ISO 9001:2015	QA-D/IDN/9001/1084	20-Des-16	19-Des-19	QA TECHNIC
	ISO 14001:2015	QA-D/IDN/14001/1051	20-Des-16	19-Des-19	QA TECHNIC
	SNI 3140.3:2010/Amd1:2011	314/BBIA/LSPro-BBIA (GKP 1&2)	26-Jan-18	25-Jan-22	BBIA (ABI-Pro)
	SMK3	SK Menaker no. 357/2015	31-Agust-15	30-Agust-18	Kemenaker
	Halal	07230021260914	29-Mar-17	28-Mar-19	MUI Jawa Timur
DB	ISO 9001:2015	180074-ABICS-ISO 9001	01-Feb-18	31-Jan-21	LSS-BBIA
	ISO 14001:2015	EA170430	19-Des-17	18-Des-20	EQA
	SNI 3140.3:2010/Amd1:2011	363/BBIA/LSPro-BBIA (GKP 1&2)	01-Feb-18	31-Jan-22	BBIA (ABI-Pro)
	Halal	07230020550614	16-Agust-16	15-Agust-18	MUI Jawa Timur
TK	ISO 9001:2015	180072-ABICS-ISO9001	26-Jan-18	25-Jan-21	LSS-BBIA
	ISO 14001:2015	EA170433	19-Des-17	18-Des-20	EQA
	SNI 3140.3:2010	365/BBIA/LSPro-BBIA (GKP 1&2)	26-Jan-18	25-Jan-22	BBIA (ABI-Pro)
	Halal	07230020390514	19-Jul-16	18-Jul-18	MUI Jawa Timur
LS	ISO 9001:2015	180070-ABICS-ISO 9001	04-Jan-18	03-Jan-21	LSS-BBIA
	ISO 14001:2015	EA170441	27-Des-17	25-Des-20	EQA
	SNI 3140.3:2010	362/BBIA/LSPro-BBIA (GKP 1&2)	04-Jan-18	03-Jan-22	BBIA (ABI-Pro)
	SMK3	SK Menaker no. 143/2016	16-Mei-16	15-Mei-19	Kemenaker
	Halal	07230020380514	16-Agust-16	15-Agust-18	MUI Jawa Timur
MR	ISO 9001:2015	QA-D/IDN/9001/1084	20-Des-16	19-Des-19	QA TECHNIC
	ISO 14001:2004	71535/A/0001/UK/En	20-Okt-15	14-Sep-18	URS
	SNI 3140.3:2010/Amd1:2011	312/BBIA/LSPro-BBIA (GKP 1&2)	20-Apr-17	19-Apr-21	BBIA (ABI-Pro)
	SMK3	SK Menaker no. 143/2016	16-Mei-16	15-Mei-19	Kemenaker
	Halal	07230020370514	19-Jul-16	18-Jul-18	MUI Jawa Timur
PB	ISO 9001:2008	2012-1-0049	09-Sep-15	08-Sep-18	TÜV SÜD PSB Indonesia
	ISO 14001:2004	2015-0659	23-Okt-15	14-Sep-18	TÜV SÜD PSB Singapore
	SNI 3140.3:2010/Amd1:2011	360/BBIA/LSPro-BBIA (GKP 1&2)	14-Des-17	14-Des-21	BBIA (ABI-Pro)
	SMK3	SK Menaker no. 143/2016	16-Mei-16	15-Mei-19	Kemenaker
	Halal	07230019441213	04-Apr-16	04-Apr-18	MUI Jawa Timur
NG	ISO 9001:2008	150096-ABICS-ISO9001	14-Des-17	15-Sep-18	BBIA (ABI-Pro)
	ISO 14001:2004	56576/b/001/UK/En	04-Okt-13	14-Sep-18	URS
	SNI 3140.3:2010/Amd1:2011	304/BBIA/LSPro-BBIA (GKP 1&2)	14-Des-17	13-Des-21	BBIA (ABI-Pro)
	SMK3	SK Menaker no. 143/2016	16-Mei-16	15-Mei-19	Kemenaker
	Halal	07230020350514	01-Jun-16	31-Mei-18	MUI Jawa Timur

Keterangan *Description*	Sertifikat *Certification*		Masa Berlaku *Validity period*		LS-Pro Penerbit/ *Publisher*
	Nama *Name*	Nomor *Number*	Tanggal Dikeluarkannya *Date Issued*	Masa Berlaku Hingga *Validity period until*	
MP	ISO 9001:2015	150094-ABICS-ISO9001	04-Jan-18	03-Jan-21	BBIA (ABI-Pro)
	ISO 14001:2015	58216/B/0001/UK/En	14-Des-16	09-Okt-19	URS
	SNI 3140.3:2010	379/BBIA/LSPro-BBIA (GKP)	04-Jan-18	03-Jan-22	BBIA (ABI-Pro)
	SMK3	SK Menaker no. 357/2015	31-Agust-15	30-Agust-18	Kemenaker
	Halal	07230020360514	28-Sep-16	27-Sep-18	MUI Jawa Timur
BN	SNI 3140.3:2010	439/BBIA/LSPro-BBIA (GKP)	10-Des-15	09-Des-18	BBIA (ABI-Pro)
	Halal	6230004190911	09-Sep-16	08-Sep-18	MUI Sulsel
CA	SNI 3140.3:2010/Amd1:2011	04-314016009 R0 (GKP 1 & 2)	08-Mar-15	07-Mar-20	TÜV NORD Indonesia
	Halal	6220006150114	09-Sep-16	08-Sep-18	MUI Sulsel
TA	SNI 3140.3:2010	437/BBIA/LSPro-BBIA (GKP)	02-Des-15	01-Des-18	BBIA (ABI-Pro)
	Halal	6220006140114	24-Jun-16	23-Jun-18	MUI Sulsel
Kebun Tembakau *Tobacco Farms*					
KAG	ISO 9001:2015	01 100 018786	03-Okt-17	02-Okt-20	TÜV Rheinland
KKS	ISO 9001:2008	01 100 008956	23-Mei-11	14-Nop-13	TÜV Rheinland
KLT	ISO 9001:2015	824 100 17065	23-Agust-17	31-Jul-20	TÜV Rheinland
KP	ISO 9001:2015	67621/A/0001/UK/En	13-Apr-18	12-Apr-21	URS

Keterangan/Information:

WT : Watoetoelis
KB : Kremboong
GK : Gempolkrep
DB : Djombang Baru
TK : Tjoekir
LS : Lestari
MR : Meritjan
PB : Pesantren Baru
NG : Ngadiredjo

MP : Modjopanggoong
BN : Bone
CA : Camming
TA : Takalar
KAG : Kebun Tembakau Ajong Gayasan
KKS : Kebun Tembakau Kertosari
KLT : Kebun Tembakau Klaten
KP : Kantor Pusat/*Head Office*

Daftar Alamat entitas anak dan kantor cabang/kantor perwakilan

Address of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices

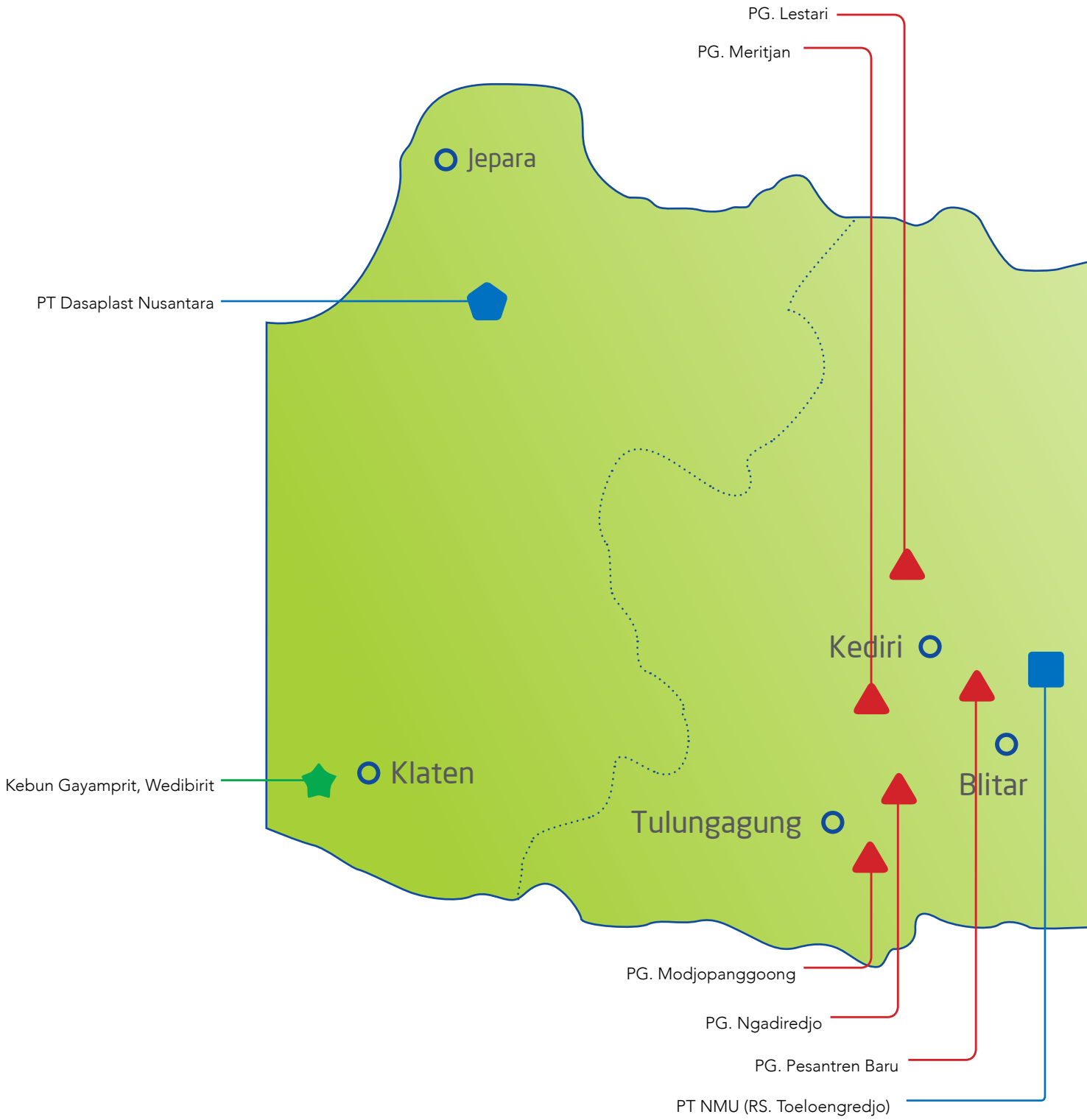

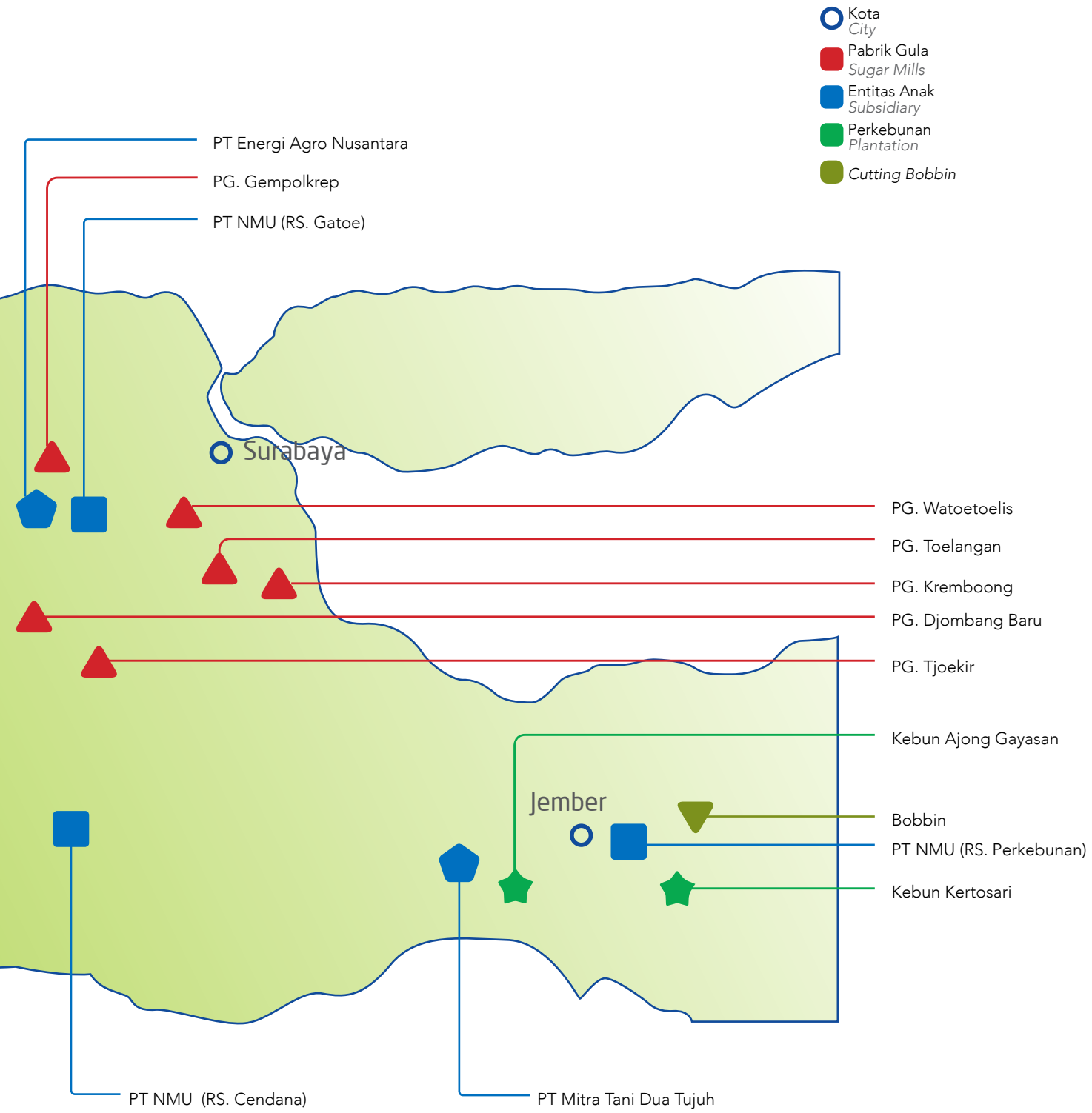
Kota
City
Pabrik Gula
Sugar Mills
Entitas Anak
Subsidiary
Perkebunan
Plantation
Cutting Bobbin
PT Energi Agro Nusantara
PG. Gempolkrep
PT NMU (RS. Gatoe)
Surabaya
PG. Watoetoelis
PG. Toelangan
PG. Kremboong
PG. Djombang Baru
PG. Tjoekir
Kebun Ajong Gayasan
Jember
Bobbin
PT NMU (RS. Perkebunan)
Kebun Kertosari
PT NMU (RS. Cendana)
PT Mitra Tani Dua Tujuh

Kantor Pusat PTPN X *Head Office of PTPN X*	:	Jl. Jembatan Merah No. 3 – 11 Surabaya 60175, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 31 3523143 (*hunting*) Website: http://ptpn10.co.id Email: contact@ptpn10.co.id
Kantor Perwakilan PTPN X *Branch Office of PTPN X*	:	Perumahan Taman Gandaria Valey Blok F 12 A, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12140, DKI Jakarta, Indonesia Telp/Fax: +62 21 7247733
Entitas Anak *Subsidiaries*		
PT Mitratani Dua Tujuh	:	Jl Brawijaya 83 Mangli Jember 68136, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 331-422222, 488881 Fax: +62 331-489456, 489457 Email: mitratani27@mitratani27.co.id
PT Dasaplast Nusantara	:	Kantor Pusat Jl. Raya Pecangaan 3 Jepara 59462, Jawa Tengah, Indonesia Telp : +62 291 755210 Fax : +62 291 755205 www.dasaplast.com
	:	Kantor Perwakilan Jl. Gajah Mada 23-27A Semarang 50133, Jawa Tengah, Indonesia Telp: +62 24 3543431 Fax: +62 24 3543843
PT Nusantara Medika Utama	:	Kantor Pusat Jl. Hayam Wuruk No. 88-90 Mojokerto 61321, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 321 328557, 390988 Fax: +62 321 395117 Website: www.nmu.co.id
		Rumah Sakit Gatoel Jl. Raden Wijaya No. 56 Mojokerto 61321, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 321 321681, 322329 Fax: +62 321 321684 UGD: +62 8155223444
		Rumah Sakit Toeloengredjo Jl. A Yani No. 25 Pare Kediri 64212, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 354 391047, 391145 Fax: +62 354 3392883
		Rumah Sakit Perkebunan Jl. Bedadung No. 2 Jember 68118, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 331 487104, 487226 Fax: +62 331 485912
		Rumah Sakit Cendana Jl. Kusuma Bangsa No. 1, Kanigoro Blitar 66171, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 342 442555

PT Energi Agro Nusantara	:	Desa Gempolkerep, Gedeg Mojokerto 61351, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 321 360360 Fax: +62321 363363 Email: customercare@enero.co.id
Pabrik Gula *Sugar Mills*		
		PG Watoetoelis Desa. Temu, Kec. Prambon Sidoarjo 61262, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 31 8971007, 8972383 Fax: +62 31 8970079 Email: pg.watoetoelis@ptpn10.co.id
		PG Toelangan Ds. Tulangan, Kec. Tulangan Sidoarjo 61273, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 31 8851002 Fax: +62 31 8851001 Email: pg.toelangan@ptpn10.co.id
		PG Kremboong Ds. Krembung, Kec. Krembung Sidoarjo 61275, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 31 8851609, 8851315 Fax: +62 31 8151661 Email: pg.kremboong@ptpn10.co.id
		PG Gempolkrep Ds. Gempolkerep, Kec. Gedeg Mojokerto 61302, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 321 362111, 362114 Fax: +62 321 362414 Email: pg.gempolkrep@ptpn10.co.id
		PG Djombang Baru Jl. Panglima Sudirman No. 1 Jombang 61417, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 321 861311 Fax: +62 321 866373 Email: pg.tjoekir@ptpn10.co.id
		PG Tjoekir Ds. Cukir, Kec. Diwek Jombang 61471, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 321 861441 Fax: +62 321 868600 Email: pg.tjoekir@ptpn10.co.id
		PG Lestari Ds. Ngrombot, Kec. Patianrowo Nganjuk 64391, Jawa Timur, Indonesia Telp : +62 358 552468, 551439 Fax : +62 358 552468 Email : pg.lestari@ptpn10.co.id
		PG Meritjan Jl. Merbabu, Ds. Mrican, Kec. Mojoroto Kediri 64102, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 354 771619, 773649 Fax: +62 354 773651 Email: pg.meritjan@ptpn10.co.id

	PG Pesantren Baru Jl. Mauni No. 334, Kec. Pesantren Kediri 64131, Jawa Timur, Indonesia Kotak Pos 6 Telp: +62 354 684610 Fax: +62 354 686538 Email: pg.pesantrenbaru@ptpn10.co.id
	PG Ngadiredjo Ds. Jambean, Kec. Kras Kediri 64102, Jawa Timur, Indonesia Tromolpos 5 Telp: +62 354 479700 Fax: +62 354 477178 Email: pg.ngadiredjo@ptpn10.co.id
	PG Modjopanggoong Ds. Sidorejo, Kec. Kauman Tulungagung 66261, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 355 321633, 324638 Fax: +62 355 327126 Email: pg.modjopanggoong@ptpn10.co.id
Kebun Tembakau *Tobacco Plantation*	
	Kebun Kebonarum/Gayamprit/Wedhibirit Jl. Pemuda Selatan No. 225 Klaten 57411, Jawa Tengah, Indonesia Telp: +62 272 321806, 320583, 321252 Fax: +62 272 322203 Email: wedibirit@ptpn10.co.id
	Kebun Kertosari Jl. A Yani No. 688 Pakusari Jember 68181, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 331 334177 Fax: +62 331 332854 Email: kt.kertosari@ptpn10.co.id
	Kebun Ajong Gayasan Jl. Mh Thamrin No.143 Ajung Jember 68175, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 331 321501, 331058 Fax: +62 331 335145 Email: kt.ajong@ptpn10.co.id

Informasi pada Situs Web Perseroan

Information on Company's Website

Perseroan memiliki situs web resmi dengan alamat http://ptpn10.co.id. Situs Web ini berisi informasi seputar korporasi Perseroan, meliputi diantaranya profil Perseroan, profil manajemen dan struktur organisasi Perseroan, ulasan produk-produk yang dimiliki, informasi unit usaha, informasi dan kebijakan organisasi, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), kumpulan media, kontak, hingga informasi tentang kesempatan berkarir di Perseroan. Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perseroan kepada khalayak luas.

The Company has an official website with the web address: http://ptpn10.co.id. This website contains information about the Company, including Company profile, management profile and organizational structure, product reviews, business unit information, organizational information and policies, Partnership and Community Development Program (PKBL), media collection, contacts, and information about career opportunities in the Company. This website becomes an openly accessible portal, with the aim of providing comprehensive information about the Company to the public.

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Remark
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu *Information about shareholders up to end individual owner*	v	Telah disajikan dalam bentuk struktur/ bagan. *Has been presented in the form of structure/chart.*
Isi Kode Etik *Code of Conduct Content*	v	Telah disajikan. *Has been presented.*
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan *Information about the General Meeting of Shareholders (GMS), which at least includes the agenda, summary of the minutes, and information on important dates, such as the date of GMS announcement, the date of GMS invitation, the date of GMS, the announcement date of summary of GMS minutes.*	v	Telah disajikan. *Has been presented.*
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) *Separated Annual Financial Report (the last 5 years)*	v	Telah disajikan. *Has been presented.*
Profil Dewan Komisaris dan Direksi *Profiles of Boards of Commissioners and Board of Directors*	v	Telah disajikan. *Has been presented.*
Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal *Charter of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit*	v	Telah disajikan. *Has been presented.*

v: tersedia pada situs web Perseroan

x: belum tersedia pada situs web Perseroan

v: available on the Company's website

x: not yet available on the Company's website

Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Education and/or Training of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Type of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Subject of Education and Training*	**Tempat/** *Tanggal Venue/ Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Direksi *Board of Directors*				
Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	Seminar	National Sugar Summit 2017	Jakarta, 24-25 Agustus 2017 *Jakarta, August 24-25, 2017*	Asosiasi Gula Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Ahli Gula Indonesia dan LPP
		Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penguatan Pabrik Gula Berbasis Tebu dalam Perlindungan Konsumen dan Peningkatan Kesejahteraan Petani" *Focus Group Discussion (FGD) with the theme "Strengthening Sugar Cane-Based Sugar Mills in Consumer Protection and Farmers Welfare Improvement"*	Yogyakarta, 9 September 2017 *Yogyakarta, September 9, 2017*	LPP
		World Plantation Conferences & Exhibition (WPLACE) 2017 dengan tema "Plantation in the Current and Future Challenges" *World Plantation Conferences & Exhibition (WPLACE) 2017 with the theme "Plantation in the Current and Future Challenges"*	Jakarta, 17-20 Oktober 2017 *Jakarta, October 17-20, 2017*	PT Riset Perkebunan Nusantara
		Business Forum/ Talkshow tentang "Peluang Kerjasama di Tiga Sektor Industri yaitu Ekonomi Maritim, Bio Farmasi dan Gula" serta kunjungan ke Pabrik Gula dan Koperasi Petani Tebu di India *Business Forum/Talkshow on "Opportunities for Cooperation in Three Industry Sectors, namely Maritime Economy, Bio Pharmaceuticals and Sugar" and visits to Sugar Mills and Sugarcane Farmers Cooperative in India*	India, 13-18 November 2017 *India, November 13-18, 2017*	Kedutaan Besar Indonesia

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Type of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Subject of Education and Training*	**Tempat/** *Tanggal Venue/ Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Mustaqim (Direktur Operasional) *(Director of Operations)*	Seminar	National Sugar Summit 2017	Jakarta, 24-25 Agustus 2017 *Jakarta, August 24-25, 2017*	Asosiasi Gula Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Ahli Gula Indonesia dan LPP
		Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penguatan Pabrik Gula Berbasis Tebu dalam Perlindungan Konsumen dan Peningkatan Kesejahteraan Petani" *Focus Group Discussion (FGD) with the theme "Strengthening Sugar Cane-Based Sugar Mills in Consumer Protection and Farmers Welfare Improvement"*	Yogyakarta, 9 September 2017 *Yogyakarta, September 9, 2017*	LPP
		World Plantation Conferences & Exhibition (WPLACE) 2017 dengan tema "*Plantation in the Current and Future Challenges*" *World Plantation Conferences & Exhibition (WPLACE) 2017 with the theme "Plantation in the Current and Future Challenges"*	Jakarta, 17-20 Oktober 2017 *Jakarta, October 17-20, 2017*	PT Riset Perkebunan Nusantara
Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary*				
Adi Santoso (Sekretaris Perusahaan) *(Corporate Secretary)*	Seminar/Konferensi *Seminar/ Conference*	Plantation Executive Development Program (PEDP) Batch V	4-16 September 2017 *September 4-16, 2017*	LPP
		World Plantation Conferences and Exhibition (WPLACE) 2017	Jakarta, 17-20 Oktober 2017 *Jakarta, October 17-20, 2017*	PT Riset Perkebunan Nusantara
	Sharing Session/ Seminar	Peran Corsec dan Media Handling *Role of Corporate Secretary and Media Handling*	Jawa Barat, 9-10 November 2017 *West Java, November 9-10, 2017*	Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)
Soetono Effendi Budi Utomo (Ka. Urs. Komunikasi Perusahaan) *(Head of Corporate Communications Affairs)*	Seminar/Konferensi *Seminar/ Conference*	World Plantation Conferences and Exhibition (WPLACE) 2017	Jakarta, 17-20 Oktober 2017 *Jakarta, October 17-20, 2017*	PT Riset Perkebunan Nusantara
Cindhy Psiche Larashati (Asisten Urusan Komunikasi Internal) *(Assistant of Internal Communications Affairs)*	Seminar/Workshop	*Leardership Training For Supervisor*	Surabaya, 13-15 Februari 2017 *Surabaya, February 13-15, 2017*	Dale Carnegie
	Sharing Session/ Seminar	Peran Corsec dan Media Handling *Role of Corporate Secretary and Media Handling*	Jawa Barat, 9-10 November 2017 *West Java, November 9-10, 2017*	Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Type of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Subject of Education and Training*	**Tempat/** *Tanggal Venue/ Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Danang Satriyo W. (Ass. Urusan Pemb. & Pengemb. Jaringan) *(Assistant of Network Building & Development Affairs)*	Seminar/Workshop	Kunjungan ke *Workshop* PT Teknik Bina Usaha *Visit to Workshop of PT Teknik Bina Usaha*	Cikarang, 20 April 2017 *Cikarang, April 20, 2017*	PT United Tractors Pandu Engineering
Ikhwan Krisnadi (Ass. Urusan Pemb. & Pengemb. Jaringan) *(Assistant of Network Building & Development Affairs)*	Seminar/Workshop	Kunjungan ke *Workshop* PT Teknik Bina Usaha *Visit to Workshop of PT Teknik Bina Usaha*	Cikarang, 20 April 2017 Cikarang, April 20, 2017	PT United Tractors Pandu Engineering
Veronica Kristi Wijayani (Asisten Urusan Analis Data & Pelaporan) *(Assistant of Data Analyst & Reporting Affairs)*	Seminar/Workshop	Pelatihan Interpretasi KPKU BUMN *Training on Interpretation of KPKU BUMN*	Bandung, 18-20 September 2017 *Bandung, September 18-20, 2017*	Forum Ekselen BUMN
M. Syaiful Rizal (Ass. Urs. Pemb. & Pengemb. Jaringan) *(Assistant of Network Building & Development Affairs)*	Seminar/Konferensi *Seminar/ Conference*	World Plantation Conferences and Exhibition (WPLACE) 2017	Jakarta, 17-20 Oktober 2017 *Jakarta, October 17-20, 2017*	PT Riset Perkebunan Nusantara
Daudana Dwi Purina (Ass. Urs. Pemb. & Pengemb. Jaringan) *(Assistant of Network Building & Development Affairs)*	Seminar/Konferensi *Seminar/ Conference*	World Plantation Conferences and Exhibition (WPLACE) 2017	Jakarta, 17-20 Oktober 2017 *Jakarta, October 17-20, 2017*	PT Riset Perkebunan Nusantara
Ilham Al An'aam (Ass. Muda Jaringan & Pemeliharan) *(Junior Assistant of Network & Maintenance)*	Seminar/Konferensi *Seminar/ Conference*	*In House Training* Interpretasi KPKU *Inhouse Training on Interpretation of KPKU*	9-11 Oktober 2017 *October 9-11, 2017*	Holding Perkebunan Nusantara
Daudana Dwi Purina (Ass. Urs. Pembangunan & Pengemb. Jaringan) *(Assistant of Network Building & Development Affairs)*	Sharing Session	*Sharing* Informasi dan Teknologi ke PTPN XI untuk Pendaftaran Lahan dan Kontrak Petani dengan Menggunakan Aplikasi *E-Farming* *Information and Technology Sharing to PTPN XI for Land Registration and Farmers Contract by Using E-Farming Application*	2017	PTPN XI

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Type of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Subject of Education and Training*	**Tempat/** *Tanggal Venue/ Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
M. Syaiful Rizal (Ass. Urs. Pembangunan & Pengemb. Jaringan) *(Assistant of Network Building & Development Affairs)*	Sharing Session	Sharing Informasi dan Teknologi ke PTPN XI untuk Pendaftaran Lahan dan Kontrak Petani dengan Menggunakan Aplikasi *E-Farming* *Information and Technology Sharing to PTPN XI for Land Registration and Farmers Contract by Using E-Farming Application*	2017	PTPN XI
Audit Internal *Internal Audit*				
Iwan Mahendra (Kepala Urusan Pengawasan Non Produksi) *(Head of Non Production Audit Affairs)*	Seminar	Diklat Dasar-dasar Audit *Basic Audit Education and Training*	17-27 Juni 2017 *June 17-27, 2017*	PPA & K
Tatok Pranoto (Auditor Pertama) *(First Auditor)*	Seminar/Workshop	Audit Kecurangan *Fraud Audit*	4-14 September 2017 *September 4-14, 2017*	PPA & K
Wellem Stefanus Ndoen (Auditor Madya) *(Middle Level Auditor)*	Seminar/Workshop	Diklat Audit Operasional *Operational Audit Education and Training*	16-26 Mei 2017 *May 16-26, 2017*	PPA & K

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Di tahun 2017, Perseroan berhasil membukukan laba usaha menjadi Rp181,83 miliar dibandingkan rugi usaha sebesar Rp153,64 miliar di tahun 2016.

In 2017, the Company successfully booked operating profit of Rp181.83 billion compared to the 2016's operating loss of Rp153.64 billion.

Tinjauan Ekonomi
Economic Review

PEREKONOMIAN DUNIA

Sinyal positif ekonomi dunia di tahun 2017 ditandai dengan perbaikan ekonomi di negara-negara maju dan penguatan peran negara-negara berkembang di perekonomian dunia. Perekonomian Amerika Serikat (AS) mengalami perbaikan karena peningkatan konsumsi sejalan dengan perbaikan yang konsisten atas kondisi ketenagakerjaan. Faktor-faktor tersebut menopang pertumbuhan kuartalan ekonomi AS yang lebih tinggi disepanjang tahun 2017 dibanding tahun 2016. Kebijakan Bank Sentral AS (*The Fed*) yang menaikkan suku bunga acuan secara bertahap menjadi 1,50% (Desember) di akhir tahun 2017 dibandingkan posisi akhir tahun 2016 sebesar 0,75% memperkuat optimisme bahwa ekonomi AS menunjukkan perbaikan.

Negara maju di negara-negara Eropa juga turut membukukan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari perkiraan. Penguatan ekonomi Jerman, Perancis dan Itali di tahun 2017 terutama didorong oleh peningkatan konsumsi. Kenaikan penjualan ritel, pertumbuhan kredit rumah tangga dan korporasi yang mendorong sektor industri dan manufaktur yang menuju ke arah ekpansif adalah kunci utama perbaikan ekonomi di negara maju tersebut. Merespon perbaikan ekonomi ini, Bank Sentral Eropa (ECB) berencana memangkas stimulus moneter berupa pengurangan separuh pembelian kembali obligasi menjadi 30 miliar Euro per bulan mulai Januari tahun 2018.

Perbaikan ekonomi di negara maju tersebut mampu menopang kenaikan kinerja ekspor Tiongkok. Selain itu, pertumbuhan konsumsi yang kuat sejalan dengan peningkatan kredit rumah tangga dan kepercayaan konsumen adalah faktor utama lain pertumbuhan ekonomi negara Tiongkok saat ini. Hal ini memperkuat pandangan bahwa ekonomi Tiongkok berada dalam transisi ekonomi ke arah pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi dibandingkan ekspor. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi India sebagai salah satu negara berkembang terkemuka lainnya di Asia masih stabil seperti tahun lalu. Pemulihan ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya yang tergabung dalam BRICS yakni Brazil, Rusia, dan Afrika Selatan di tahun 2017 mampu mengatasi ketimpangan pertumbuhan ekonomi diantara negara berkembang yang terjadi di tahun 2016.

Bank Dunia memproyeksikan bahwa ekonomi dunia naik sebesar 2,9% di tahun 2018 dari 2,7% di tahun 2017 dipengaruhi oleh perkembangan positif di negara maju dan berkembang sebagai motor utama perekonomian dunia. Penguatan pertumbuhan ekonomi dunia ini terutama ditopang oleh peran negara berkembang yang diproyeksikan mampu membukukan pertumbuhan PDB sebesar 4,5% disamping kontribusi pertumbuhan ekonomi negara maju sebesar 1,8%.

THE WORLD ECONOMY

The positive signals of the world economy in 2017 was marked by the improved economies in developed countries and the reinforced role of developing countries in the world economy. The United States (US) economy was improved due to the increase in consumption in line with the consistent improvements in labor conditions. These factors supported higher quarterly economic growth in US throughout 2017 compared to 2016. The US Federal Reserve's (The Fed) policy of raising the reference interest rate gradually to 1.50% (December) by the end of 2017 compared to 2016 year-end position of 0.75% has strengthened the optimism that US economy was showing improvement.

Developed countries in the European countries also recorded better economic growth than expected. The strengthening of the German, French and Italian economies in 2017 was primarily driven by the increase in consumption. The increase in retail sales, the growth of household and corporate loans that encouraged the industrial and manufacturing sectors towards expansion were the keys to economic improvement in these developed countries. In response to this economic recovery, the European Central Bank (ECB) planned to cut monetary stimulus in the form of cutting of in half the buyback of bonds to EUR30 billion per month starting January 2018.

Economic improvement in these developed countries was able to support the improved performance of China's export. In addition, a strong consumption growth in line with the increased household credit and consumer confidence were another major factor of China's current economic growth, which reinforced the view that China's economy was in an economic transition toward consumption-based economic growth versus exports. Meanwhile, India's economic growth as one of the other leading developing countries in Asia was still as stable as previous year. Economic recovery in other developing countries of BRICS namely Brazil, Russia and South Africa in 2017 was able to overcome the imbalance of economic growth among developing countries that occurred in 2016.

The World Bank projected that in 2018 the world economy will grow by 2.9% from 2.7% in 2017, which is influenced by the positive developments in developed and developing countries as the main driver of the world economy. The strengthening of world economic growth is mainly supported by the role of developing countries, which is projected to be able to record GDP growth of 4.5% in addition to the contribution of developed countries' economic growth of 1.8%.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terjaga dengan baik meski tumbuh terbatas sebesar 5,07% di tahun 2017 dibandingkan 5,02% setahun sebelumnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Pengeluaran konsumsi yang mampu memberikan kontribusi rata-rata sebesar 64,0% terhadap PDB Indonesia tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi. Meski tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,01%, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,95% menjadi Rp5.379,52 triliun di tahun 2017 masih menjadi faktor utama peningkatan pengeluaran konsumsi menjadi Rp6.283,02 triliun atau tumbuh sebesar 4,61% dibandingkan tahun sebelumnya.

Inflasi di sepanjang tahun 2017 masih terkendali yakni sebesar 3,81% atau masih dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 4%(±1%) menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, rendahnya harga impor dan terbatasnya konsumsi di tengah kekhawatiran penurunan daya beli masyarakat menjadi faktor utama terkendalinya inflasi di tahun 2017. Tekanan inflasi yang mengalami penurunan sejak pertengahan tahun 2017 menyebabkan BI melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuan. *BI 7-Day Repo Rate* diturunkan sebesar 25bps menjadi 4,50% di bulan Agustus 2017 dan 4,25% sebulan sesudahnya.

Realisasi investasi baik yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) juga mendukung perbaikan ekonomi Indonesia. Total realisasi investasi tumbuh sebesar 13,1% di tahun 2017 menjadi Rp692,8 triliun dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp612,8 triliun. Peningkatan investasi ini ditopang oleh perbaikan investasi PMA yang mencapai Rp430,5 triliun di tahun 2017 atau naik 8,55% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp396,5 triliun. Di sisi lain, realisasi investasi PMDN mampu tumbuh sebesar 21,3% menjadi Rp262,3 triliun dibandingkan posisi tahun 2016 sebesar Rp216,3 triliun.

Selain peningkatan realisasi investasi, perbaikan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh membaiknya neraca perdagangan Indonesia. Di tengah tantangan perlambatan ekonomi global, Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) mampu membukukan surplus perdagangan sebesar US$11,9 miliar (2017) atau lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$9,5 miliar (2016). Peningkatan surplus perdagangan ini terutama disebabkan oleh kinerja ekspor yang relatif lebih baik dibandingkan penurunan impor yang lebih tinggi di tengah perlambatan ekonomi dunia di periode

INDONESIAN ECONOMY

In 2017, Indonesia's economic growth was well maintained despite a limited growth of 5.07% compared to 5.02% in previous year in line with the economic growth of developing countries. Consumption spending that contributed an average of 64.0% to Indonesia's GDP remained a major contributor to national economic growth. Despite the slower growth compared to previous year of 5.01%, the growth of household consumption of 4.95% to IDR5,379.52 trillion in 2017 remained a key factor in the increased consumption spending to IDR6,283.02 trillion or increased by 4.61% compared to previous year.

The inflation throughout 2017 was still controllable, at 3.81%, or still within the Bank Indonesia target range of 4% (±1%), which supported the growth in household consumption. Inflation control between Bank Indonesia and the Government, both at the central and regional levels, low import prices and limited consumption in the midst of anxiety of a decline in public purchasing power were the main factors of controlled inflation in 2017. Inflation pressure, which has declined since mid-2017 has caused BI to adjust against the reference interest rate. The BI 7-Day Repo Rate was reduced by 25 bps to 4.50% in August 2017 and 4.25% a month later.

The realization of investment from both domestic investment (PMDN) and foreign investment (PMA) also supported the improvement of Indonesia's economy. Total investment realization grew by 13.1% in 2017 to IDR692.8 trillion compared to 2016 of IDR612.8 trillion. The increase in investment was sustained by an improvement in foreign direct investment (FDI) of IDR430.5 trillion in 2017, increased by 8.55% from IDR396.5 trillion in previous year. On the other side, the realization of domestic investment was able to increase by 21.3% to IDR262.3 trillion compared to the position in 2016 of IDR216.3 trillion.

In addition to the increase in investment realization, Indonesia's economic recovery was also supported by the improved Indonesia's trade balance. Amid the challenges of the global economic slowdown, Indonesia Trade Balance (NPI) was able to record a trade surplus of USD11.9 billion (2017) or better than previous year of USD9.5 billion (2016). The increase in trade surplus was mainly due to the relatively better export performance compared to higher import decline in the midst of global economic slowdown in that period. During the decline in oil production, Indonesia's

tersebut. Di tengah penurunan produksi minyak, ekspor non migas Indonesia mampu menopang kinerja ekspor Indonesia dengan rata-rata kontribusi sebesar 82,6% dalam lima tahun terakhir.

non-oil and gas exports were able to support Indonesia's export performance with an average contribution of 82.6% in the last five years.

Peningkatan surplus neraca perdagangan dikombinasikan dengan investasi baik langsung maupun portofolio di Indonesia menjadi faktor pendorong peningkatan cadangan devisa. Cadangan devisa Indonesia mencapai US$130,20 miliar atau naik 11,86% dibandingkan posisi tahun 2016 yang mencapai US$116,4 miliar. Peningkatan cadangan devisa ini dapat memberikan fleksibilitas kepada bank sentral untuk intervensi ke pasar jika diperlukan terutama untuk meredam gejolak fluktuasi mata uang Rupiah ditengah perkembangan pasar keuangan dunia yang dinamis termasuk ekpektasi kenaikan lebih lanjut atas suku bunga The Fed.

The increase in trade balance surplus combined with direct investment as well as Indonesia' portfolio have been the driving factors of the increase in foreign exchange reserves. Indonesia's foreign exchange reserves amounted to USD130.20 billion, increased by 11.86% compared to 2016's position at USD116.4 billion. The increase in foreign exchange reserves could provide the central bank with flexibility to intervene into the market, when required, primarily to mitigate the fluctuations of Rupiah currency in the midst of the dynamic development of world financial markets, including the expectation of a further increase in Fed interest rates.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2018 diharapkan tumbuh lebih baik seiring dengan ekspektasi perbaikan ekonomi global. Pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,4%, sedikit membaik dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,2%. Selain itu, inflasi diharapkan lebih terkendali di level sekitar 3,5% dan Rupiah ditransaksikan sebesar 13.400 per US$. Perbaikan ekonomi global juga diharapkan akan memberikan efek positif terhadap harga komoditas khususnya minyak mentah yang diproyeksikan bertahan di level US$ 48,0/barel pada tahun 2018. Secara lengkap proyeksi indikator-indikator ekonomi dapat dilihat di tabel berikut ini.

The Indonesian economy in 2018 is expected to grow better in line with the expected global economic recovery. The government projected the Indonesian economy to grow by 5.4%, slightly increased compared to the target of economic growth in 2017 of 5.2%. In addition, inflation is expected to be more controlled at around 3.5% and Rupiah is traded at 13,400 per USD. The improvement of global economy is also expected to have a positive effect on commodity prices, especially crude oil, which is projected to remain at USD48.0/barrel in 2018. The full projection of economic indicators can be seen in the following table.

Perkiraan perbaikan pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2018 sebesar 5,4% didukung oleh kontribusi konsumsi yang meningkat baik oleh rumah tangga maupun pemerintah. Perkiraan inflasi yang lebih terkendali diharapkan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,1% sedangkan konsumsi pemerintah akan naik sebesar 3,8% seiring dengan berlanjutnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran infrastruktur di tahun 2018 adalah sebesar Rp409,0 triliun atau lebih besar dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp401,1 triliun. Selain untuk layanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendorong perbaikan konektivitas, distribusi logistik, transportasi, dan elektrifikasi yang selanjutnya berdampak pada perbaikan daya saing, mendukung produktivitas, serta efisiensi perekonomian secara menyeluruh.

The estimated improvement of Indonesia's GDP growth in 2018 by 5.4% is supported by the increase in consumption contribution by both households and the government. A more controlled inflation outlook is expected to support 5.1% growth in household consumption while government consumption will increase by 3.8% as the government continues to spend on infrastructure development. The infrastructure budget in 2018 is IDR409.0 trillion or higher than previous year's budget of IDR401.1 trillion. In addition to public basic services, infrastructure development is directed to encourage connectivity improvements, logistics distribution, transportation, and electrification, which further impact competitiveness improvement, productivity support, and overall economic efficiency.

Kualitas pembangunan ekonomi di Indonesia juga ditopang oleh kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Saat ini peringkat utang negara Indonesia sudah masuk kategori layak investasi oleh ketiga lembaga pemeringkat internasional setelah Standard & Poor's (S&P) menaikan peringkat utang negara Indonesia menjadi BBB- dengan *outlook* stabil pada tanggal 19 Mei 2017. Dalam perkembangan selanjutnya, Fitch akhirnya kembali menaikkan peringkat surat utang Indonesia menjadi BBB dari BBB- dengan *outlook* stabil pada tanggal 21 Desember 2017.

Selain perbaikan kualitas peringkat utang, peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis *(Ease of Doing Business/ EODB)* 2018 juga mengalami perbaikan dengan peringkatnya naik ke posisi 72, naik 19 peringkat dibandingkan posisi tahun lalu. EODB adalah survei tahunan yang dilaksanakan Bank Dunia yang mencerminkan daya tarik investasi dari segi kebijakan pemerintah. Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia mengantongi skor 66,47 atau naik 2,25 dibanding tahun lalu. Berdasarkan indikatornya, kenaikan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia didorong oleh indikator penyelesaian kebangkrutan (*resolving insolvency*) naik paling tajam sebanyak 38 peringkat, di susul oleh proteksi kepada investor minoritas (*protecting minority ivestors*) yang naik 17 peringkat, dan kemudahan memulai bisnis yang naik 16 peringkat.

The quality of economic development in Indonesia is also supported by the confidence of foreign investors in Indonesian economy. Currently, Indonesia's sovereign credit rating has been categorized as worthy of investment by the three international rating agencies after Standard & Poor's (S & P) upgraded Indonesia's sovereign debt to BBB- with a stable outlook on May 19, 2017. In further developments, Fitch finally re-upgraded Indonesia's sovereign credit rating to BBB from BBB- with a stable outlook on December 21, 2017.

In addition to the upgraded of its debt rating, Indonesia's Ease of Doing Business (EODB) 2018 rating also improved as it increased to 72nd position, up by 19 positions from last year. EODB is an annual survey conducted by the World Bank reflecting the attractiveness of investment in terms of government policy. Based on the World Bank report, Indonesia recorded a score of 66.47 or an increase of 2.25 compared to last year. Based on the indicator, the increase in the ease of doing business rating in Indonesia was driven by the resolving insolvency indicator, which increased significantly by 38 positions, followed by protection to minority investors, which increased by 17 positions, and the ease of doing business up by 16 positions.

Tinjauan Industri
Industrial Review

SEKTOR PERKEBUNAN

Tanaman Tebu

Kontribusi sektor pertanian dan subsektor perkebunan terhadap perekonomian Indonesia mengalami tren kenaikan dalam lima tahun terakhir sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait program swasembada atau mengurangi impor pangan. Sektor pertanian dan sub sektor perkebunan memberikan kontribusi masing-masing sebesar Rp1.256,89 triliun dan Rp373,05 triliun. Subsektor perkebunan memiliki rata-rata pertumbuhan majemuk (*Compounded Average Growth Rate*) atau CAGR sebesar 3,95% atau lebih tinggi dari sektor pertanian sebesar 3,79% selama 2013-2017. Hal ini menunjukkan ekspansi bisnis perkebunan yang lebih besar untuk merespon peningkatan permintaan atas produk-produk perkebunan dalam lima tahun terakhir.

Rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap total PDB dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 13,00% sedangkan sub sektor perkebunan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 3,85%. Sementara itu, rata-rata kontribusi subsektor perkebunan terhadap sektor pertanian mencapai sekitar 29,63%.

PLANTATION SECTOR

Sugarcane

The contribution of agriculture and plantation sectors to the Indonesian economy has experienced an increasing trend in the last five years in line with the government policies related to self-sufficiency programs or reduction of food imports. The agriculture and plantation sectors contributed IDR1,256.89 trillion and IDR373.05 trillion respectively. The plantation subsector has a Compounded Average Growth Rate (CAGR) of 3.95% or higher than the agriculture sector of 3.79% during 2013-2017, which showed larger plantation business expansion in responding to the increased demand for plantation products in the last five years.

The average contribution of the agriculture sector to total GDP in the last five years reached approximately 13.00%, while the plantation sub-sector contributed an average of 3.85%. Meanwhile, the average contribution of plantation subsector to agriculture sector reached approximately 29.63%.

Grafik Kontribusi Pertanian & Perkebunan Terhadap PDB
Chart of Contribution of Agricultural & Plantation to GDP

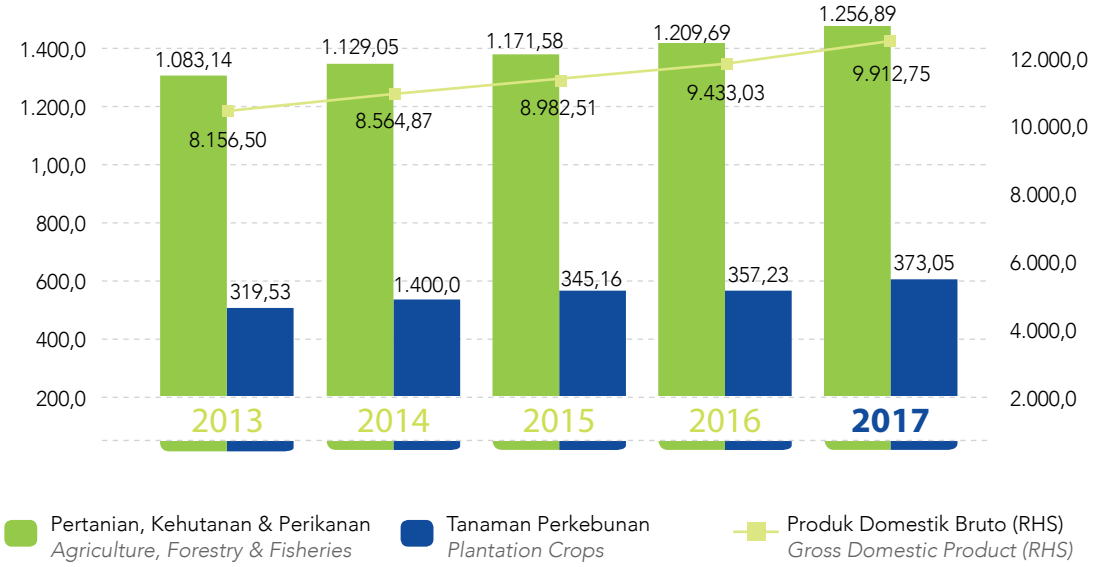

Sumber: BI dan BPS

Source : BI dan BPS

Salah satu tantangan utama dalam penyediaan kebutuhan pangan adalah ketersediaan lahan perkebunan. Peningkatan luas tanam lahan perkebunan tebu di Indonesia mengalami tantangan seiring dengan peningkatan kebutuhan lahan untuk perumahan dan industri. Peningkatan produktifitas tanaman tebu per hektar menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pasokan tebu untuk menunjang produksi gula di Indonesia. Ditengah tantangan penurunan lahan tanam perkebunan tebu, produktifitas tebu nasional mengalami perbaikan menjadi 5,44 ton/ha pada tahun 2017 dari 4,99 ton/ha setahun sebelumnya. Target kementrian pertanian atas produksi gula sekitar 7 juta ton di tahun 2019 adalah peluang bagi pelaku industri gula untuk meningkatkan ketersediaan lahan, produktivitas per ton dan kapasitas produksi pabrik gula dalam waktu dekat.

One of the main challenges in the provision of food needs is the availability of plantation areas. The increase of plantation area of sugarcane in Indonesia experienced challenges in line with the increasing demand for land for housing and industry. Increased productivity of sugarcane per hectare became the solution to meet the needs of sugarcane supply in supporting sugar production in Indonesia. In the midst of the challenge in declining land areas for sugarcane plantation, national sugarcane productivity improved to 5.44 ton/ha in 2017 from 4.99 ton/ha in previous year. The target of the Ministry of Agriculture for sugar production of approximately 7 million tons in 2019 is an opportunity for sugar industry players to the increase in land availability, productivity per ton and production capacity of sugar factories in the near future.

Grafik ketersediaan lahan dan produksi tebu nasional

Chart of State-Owned Land Availability and National Sugarcane Production

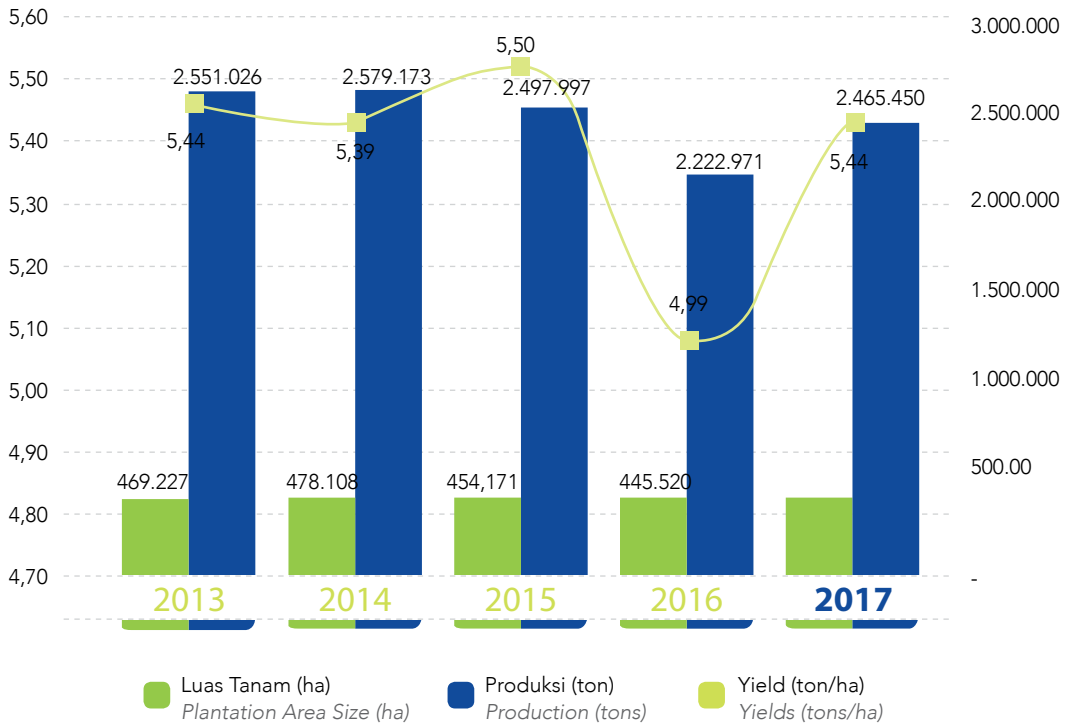

Sumber: Kementerian Pertanian

Source: Ministry of Agriculture

Peningkatan produktifitas tebu per hektar sangat penting untuk merespon kenaikan konsumsi per kapita gula pasir yang terjadi setiap tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi per kapita per tahun gula pasir di Indonesia mencapai 6,95 kg dibandingkan konsumsi tahun sebelumnya sebesar 6,86 kg. Rata-rata pertumbuhan konsumsi gula pasir selama 2013-2017 adalah sebesar 1,2%.

Increased productivity of sugarcane per hectare is essential to respond to the increase in sugar consumption occurring every year. According to the Central Bureau of Statistics (BPS), granulated sugar consumption per capita per year in Indonesia reached 6.95 kg compared to previous year consumption of 6.86 kg. The average growth of sugar consumption during 2013-2017 reached 1.2%.

Tanaman Tembakau

Tobacco Plants

Ketersediaan lahan dan produksi tembakau
Land Availability and Production of Tobacco

Sumber: Deptan

Source: Ministry of Agriculture

Lahan tembakau di Indonesia sejak tahun 2014 mengalami tren penurunan dari 215.865 hektar (2014) menjadi 206.514 hektar (2017). Meski demikian ditopang oleh perbaikan produktifitas tembakau per hektar, produksi tembakau di Indonesia diperkirakan mencapai 198.296 ton pada tahun 2017 atau lebih baik dari produksi tahun sebelumnya sebesar 196.154 ton. Dalam kurun lima tahun terakhir produksi tembakau sebesar tumbuh sebesar CAGR 4,79%. Produktifitas tembakau per hektar pada tahun 2017 adalah sebesar 0,96 ton/ha dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar 0,95 ton/ha.

Since 2014, tobacco fields in Indonesia has experienced a declining trend from 215,865 hectares (2014) to 206,514 hectares (2017). Nevertheless, supported by the improved tobacco productivity per hectare, tobacco production in Indonesia was estimated to achieve 198.296 tons in 2017 or better than previous year's production of 196,154 tons. In the last five years tobacco production grew by CAGR 4.79%. Tobacco productivity per hectare in 2017 was 0.96 ton/ha compared to previous year's position of 0.95 ton/ha.

Parameter konsumsi tembakau dapat dilihat dari konsumsi per kapita rokok di suatu negara. Indonesia adalah negara dengan konsumsi rokok per kapita tertinggi di ASEAN yang mencapai sekitar 1.322,3 batang per kapita untuk usia pengguna rokok di atas 15 tahun menurut *tobaccoatlas.org*. Pertambahan penduduk setiap tahun akan memicu permintaan tembakau yang lebih tinggi jika aturan larangan merokok dan kenaikan cukai rokok dengan skala lebih tinggi tidak dilakukan.

Parameters of tobacco consumption could be seen from the consumption of cigarettes per capita in a country. Indonesia is the country with the highest consumption of cigarette per capita in ASEAN with 1,322.3 bars per capita cigarette for users over the age of 15 according to tobaccoatlas.org. Population growth each year will trigger higher tobacco demand if the rules of smoking prohibition and higher cigarette tax excise are not implemented.

Sektor Jasa Kesehatan

Kontribusi sektor jasa kesehatan dan kegiatan lainnya terhadap PDB masih terbatas dengan rata-rata sebesar 1,08% dalam kurun lima tahun terakhir. Kontribusi sektor jasa kesehatan mencapai Rp109,45 triliun di tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 6,95% atau lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07%. Dalam kurun lima tahun terakhir pertumbuhan sektor jasa kesehatan mampu tumbuh sebesar CAGR 6,95% dengan kontribusi sektor jasa kesehatan sebesar Rp84,62 triliun pada tahun 2013. Prospek peningkatan kontribusi sektor jasa kesehatan berpotensi meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pelaksanaan BPJS Kesehatan.

Health Services Sector

The contribution of the health services sector and other activities to GDP was still limited by an average of 1.08% over the past five years. The contribution of the health services sector amounted to IDR109.45 trillion in 2017, with growth of 6.95% or better than the 5.07% economic growth. In the last five years, the health services sector was able to grow by CAGR 6.95% with the contribution of the health services sector of IDR84.62 trillion in 2013. The prospect of increased contribution of the health services sector has the potential to increase in line with the increase in population as well as the implementation of BPJS Kesehatan.

Grafik Sektor Jasa Kesehatan dan PDB
Chart of Health Services Sector and GDP

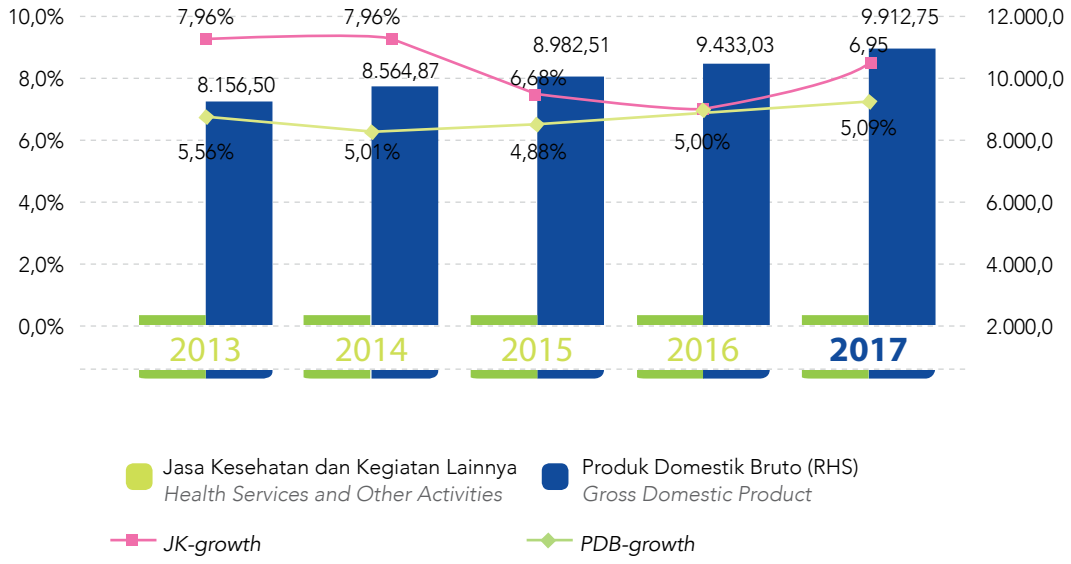

Sumber: BPS

Source: Central Bureau of Statistics (BPS)

Di sisi lain, seiring dengan peningkatan kebutuhan jasa kesehatan, beragam rumah sakit telah berdiri di indonesia untuk melayani kebutuhan jasa kesehatan baik yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda) maupun pihak Swasta. Berdasarkan data terakhir dari Kementrian Kesehatan, Rumah Sakit (RS) swasta membukukan pertumbuhan tertinggi sebesar CAGR 6,75% dalam hal pendirian rumah sakit selama kurun waktu 2013-2016. Jumlah RS swasta mencapai 1.691 unit pada tahun 2016 dibanding 1.390 unit di tahun 2013. Pertumbuhan RS swasta tersebut menjadi faktor utama peningkatan jumlah RS di Indonesia yang mencapai 2.601 unit pada tahun 2016.

On the other side, in line with the increasing needs for health services, various hospitals have been established in Indonesia to serve the needs for health services, both established by the Government, Local Government (Pemda) and Private. Based on the latest data from the Ministry of Health, private hospitals (RS) recorded the highest growth of CAGR 6.75% in terms of hospital establishment during the period 2013-2016. The number of private hospitals reached 1,691 units in 2016 compared to 1,390 units in 2013. The growth of private hospitals was a major factor in the increasing number of hospitals in Indonesia, which reached 2,601 units in 2016.

Grafik Fasilitas Kesehatan
Chart of Health Facilities

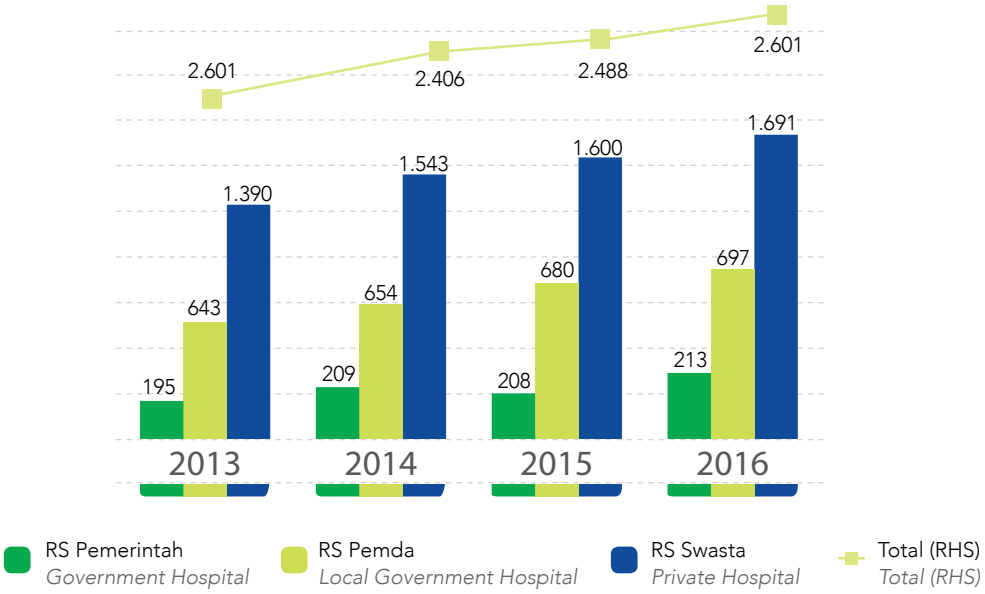

Sumber: Kementerian Kesehatan

Source: Ministry of Health

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment

Kegiatan usaha PTPN X terdiri dari lima segmen usaha yang terdiri dari segmen gula, segmen tetes, segmen tembakau, segmen rumah sakit dan segmen lainnya. Kompetensi inti Perseroan adalah (i) budidaya tebu dan industri gula; (ii) budidaya dan proses pengolahan tembakau; dan (iii) pengelolaan energi terbarukan berbasis tebu.

Perseroan memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

SEGMEN USAHA GULA DAN TETES

Produk utama Unit Usaha Gula adalah gula SHS dan tetes yang dihasilkan oleh 10 Pabrik Gula yang berlokasi di Jawa Timur dan tersebar di beberapa Kota/Kabupaten, sebagai berikut :

1. Kabupaten Sidoarjo : PG Watoetoelis dan PG Kremboong
2. Kabupaten Mojokerto : PG Gempolkrep
3. Kabupaten Jombang : PG Djombang Baru dan PG Tjoekir
4. Kabupaten Nganjuk : PG Lestari
5. Kabupaten Kediri : PG Meritjan, PG Pesantren Baru dan PG Ngadiredjo
6. Kabupaten Tulungagung : PG Modjopanggoong

Selain itu, PT. Perkebunan Nusantara X mendapat penugasan dari Kementrian BUMN untuk pengelolaan 3 Pabrik Gula di Sulawesi Selatan milik PT. Perkebunan Nusantara XIV yaitu PG. Bone, PG. Camming dan PG. Takalar. Pengelolaan PG. Bone dan PG. Camming

1. Dasar atas Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009: bahwa Menteri Negara BUMN memandang perlu untuk melibatkan PTPN X bersama-sama PT RNI untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan.
2. Surat Deputi Bidang Usaha Agro Industri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan tanggal 12 Agustus 2009, yang pada intinya PTPN X apabila diperlukan dapat melakukan kegiatan pendahuluan untuk mendukung operasional giling tahun 2009.

Untuk mendukung pengolahan tebu dan tetes, Perseroan memiliki lahan Tebu Sendiri dan Tebu Rakyat. PTPN X memiliki lahan Tebu Sendiri dengan status tanah berupa HGU ataupun tanah petani (masyarakat) yang dikerjasamakan ke PTPN X untuk pengelolaannya. Sedangkan, ±95% atau mayoritas tebu yang digiling oleh pabrik gula berasal dari

The Company classifies its business activities into five business segments consisting of sugar segment, molasses segment, tobacco segment, hospital segment and other segments. The Company's core competencies include (i) cultivation of sugarcane and sugar industry; (ii) cultivation and processing of tobacco; and (iii) management of sugarcane-based renewable energy.

The Company monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions on resource allocation and performance assessment. The performance of segment is evaluated based on the operating profit or loss and is measured consistently with the operating profit or loss on the consolidated financial statements.

SUGAR AND MOLASSES BUSINESS SEGMENT

The main products of Sugar Business Unit are SHS Sugar and molasses, which produced by the 10 Sugar Factories (PGs) located in East Java and spread across in several Cities/ Districts, namely:

1. Sidoarjo District : PG Watoetoelis and PG Kremboong
2. Mojokerto District : PG Gempolkrep
3. Jombang District : PG Djombang Baru and PG Tjoekir
4. Nganjuk District : PG Lestari
5. Kediri District : PG Meritjan, PG Pesantren Baru and PG Ngadiredjo
6. Tulungagung District : PG Modjopanggoong

In addition, PT. Perkebunan Nusantara X has been assigned by the Ministry of State-Owned Enterprises for the management of 3 Sugar Factories in South Sulawesi, namely PG. Bone, PG. Camming and PG. Takalar, which owned by PT. Perkebunan Nusantara. The management of PG. Bone and PG. Camming

1. Based on the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-549/MBU 2009 dated July 31, 2009: that the Minister of State-Owned Enterprises deems it necessary to involve both PTPN X and PT RNI in exercising rescue measures.
2. Letter of the Deputy for Agro Industry, Forestry, Paper, Printing and Publishing dated August 12, 2009, which stated in principal that if required, PTPN X may perform preliminary activity to support the milling operations in 2009.

To support the processing of sugarcane and molasses, the Company has its own Sugarcane Lands as well as Sugarcane Farmers Lands. PTPN X owns Sugar Cane field with the status of Business Usage Rights (HGU) or farmers land (community) where the management is performed in partnership with PTPN X. Meanwhile, ±95% or the majority of milled sugarcane

lahan Tebu Rakyat. Sampai akhir tahun 2017, Perseroan mengoperasikan lahan tanaman seluas 57.561 ha atau lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 70.611 ha.

Kegiatan giling seluruh pabrik gula PTPN X dilakukan selama rata-rata 119 hari dengan jumlah tebu digiling 4,33 juta ton dengan rendemen rata-rata 7,93% sehingga produksi gula total Perseroan mencapai 343.747 ton. Peningkatan rendemen tebu adalah hasil dari upaya yang dilakukan Perseroan untuk meraih kemasakan tebu yang optimal dengan penataan waktu mulai giling pabrik gula berdasarkan kesiapan BBT (minimal umur 12 bulan) didukung dengan kondisi musim kemarau yang cukup tegas sehingga kemasakan tebu optimal.

by sugar factories derived from sugarcane farmers lands. Until the end of 2016, the Company has operated 57,561 ha of plant area ha or smaller compared to 2016 of 70,611 ha.

Milling activities of all PTPN X sugar factories were conducted for an average of 119 days with 4.33 million tons of milled sugarcane with an average yield of 7.93%, resulting in total sugar production of 343,747 tons. The improvement of sugarcane yield was derived from the Company's efforts to achieve the optimal maturity of sugarcane by structuring the starting time for milling process at sugar factories based on BBT/seed readiness (minimum 12 months), supported by dry season conditions, which was quite significant, so that the maturity of sugarcane could be achieved optimally.

Tabel indikator produksi unit gula dan tetes

Table of Indicator of Sugar and Molasses Unit Production

No	Uraian *Description*	2017	2016
1	Luas Area (ha): *Area Size (ha):*	57.561	70.611
2	Produksi Tebu Giling (ton) *Milled Sugarcane Production (tons)*	4.333.410	5.944.896
3	Produktivitas tebu/ha (ton) *Sugarcane Productivity/ha (tons)*	75,3	84,2
4	Rendemen (%) *Yield (%)*	7,93	6,36
5	Produksi hablur (ton) *Crystal Production (tons)*	343.490	378.094
6	Produktivitas hablur /ha (ton) *Crystal Productivity/ha (tons)*	5,97	5,35
7	Produksi gula (ton) *Sugar Production (tons)*	343.747	377.495
8	Produksi tetes (ton) *Molasses Production (tons)*	250.417	333.002
	Kapasitas giling *Milling Capacity*		
	- Incl. jam berhenti (TTH) *- Incl. Stopping Hours*	36.421	35.724
	- Excl. jam berhenti (TTH) *- Excl. Stopping Hours*	39.333	38.824

Kinerja Segmen Usaha Tebu

Kinerja keuangan Perseroan mengalami perbaikan seiring dengan kenaikan pendapatan segmen usaha tebu sebesar 27,43% menjadi Rp1,30 triliun. Beban pokok pendapatan segmen ini naik sebesar 7,35% menjadi Rp989,62 miliar. Meski demikian, laba kotor tumbuh signifikan sebesar 212,45% menjadi Rp312,62 miliar di tahun 2017. Sejalan dengan peningkatan laba kotor dan efisiensi beban usaha, laba operasi segmen tebu juga tumbuh signifikan menjadi sebesar Rp128,52 miliar dibandingkan rugi laba operasi tahun 2016 sebesar Rp108,38 miliar.

Performance of Sugarcane Business Segment

The Company's financial performance has improved as the revenue of sugarcane segment increased by 27.43% to IDR1.30 trillion. The cost of sales of this segment increased by 7.35% to IDR989.62 billion. However, gross profit increased significantly by 212.45% to IDR312.62 billion in 2017. In line with the increase in gross profit and efficiency in operating expenses, the operating profit of sugarcane segment also increased significantly to IDR128.52 billion compared to the operating profit (loss) in 2016 of IDR108.38 billion.

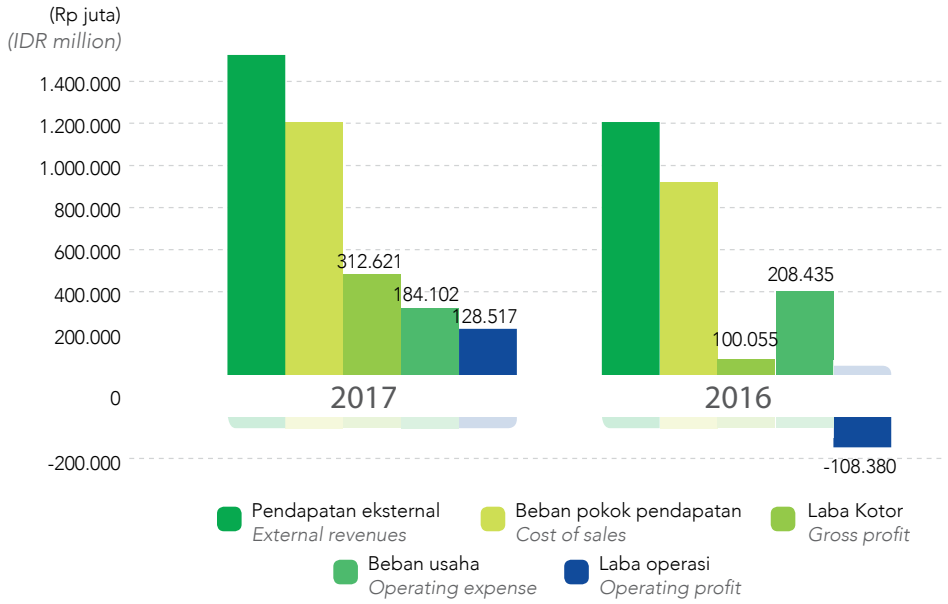

Kinerja segmen usaha tetes:

Pendapatan segmen ini turun sebesar 10,72% menjadi Rp183,07 miliar di tahun 2017. Meski demikian laba kotor membaik menjadi Rp24,50 miliar dibandingkan dengan rugi kotor tahun 2016 sebesar 28,18 miliar. Pada tahun 2017 Perseroan mampu membukukan penurunan beban usaha sebesar 43,13% menjadi Rp25,88 miliar sehingga rugi operasi turun menjadi hanya Rp1,38 miliar dibandingkan rugi sebesar Rp73,69 miliar di tahun 2016

Performance of Molasses Business Segment:

In 2017, this segment recorded a decline in revenue of 10.72% to IDR183.07 billion. However, gross profit increased to IDR24.50 billion compared with gross loss of 28.18 billion in 2016. In 2017, the Company recorded a decline in operating expenses by 43.13% to IDR25.88 billion, causing operating loss to decline to IDR1.38 billion compared to IDR73.69 billion in 2016.

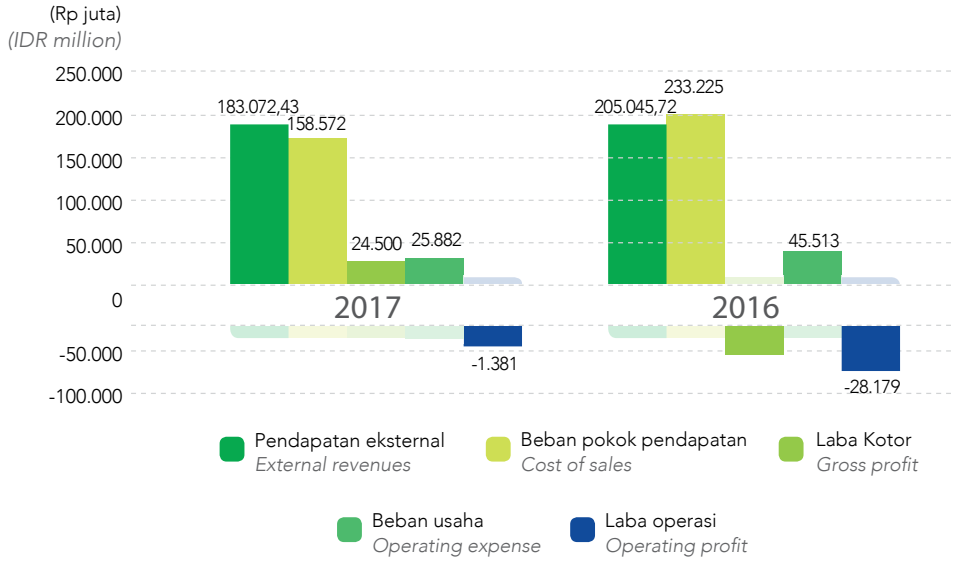

SEGMEN USAHA TEMBAKAU

Terdiri dari 3 Kebun Tembakau dengan wilayah kerja berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah yaitu :

1. Kota/Kab Jember : Unit Kebun Kertosari dan unit Kebun Ajong Gayasan
2. Kota/Kab Klaten : Unit Kebun Kebonarum, Gayamprit, Wedibirit (Klaten)

Kebun Tembakau Perseroan dikelola dengan menggunakan skema sewa lahan. Dalam skema ini, Perseroan menyewa kepada masyarakat kemudian dikelola untuk tanaman tembakau. Sampai dengan akhir tahun 2017, Perseroan mengoperasikan lahan tanaman seluas 878 hektar dengan produksi daun hijau sebesar 15.536 ton, lebih rendah dibandingkan luas lahan setahun sebelumnya sebesar 1.078 ha dan total produksi daun hijau sebesar 19.078 ton. Produksi yang lebih rendah di tahun 2017 ini karena tingkat kematian yang masih tinggi disebabkan serangan hama dan penyakit. Selain itu, keterlambatan pengadaan sarana dan sarana produksi seperti pupuk KS turut menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak optimal. Berikut adalah kinerja operasional segmen tembakau:

TOBACCO BUSINESS SEGMENT

Consists of 3 Tobacco Plantations with areas of operations located in East Java and Central Java, as follows:

1. Jember City/District : Kertosari and Ajong Gayasan Plantation Units
2. Klaten City/District : Kebonarum, Gayamprit, Wedibirit Plantation Units (Klaten)

The Company's tobacco plantations are managed using land lease scheme. In this scheme, the Company leases from the community and then managed the tobacco plants. Until the end of 2017, the Company has operated in 878 ha of plant area with green leaves production of 15,536 tons, which was lower compared to previous year with total green leaves production of 19,078 tons in 1,078 ha of plant area. The declined in 2017 production was caused by the high mortality rate due to pests and diseases. In addition, the delay in the procurement of production facilities and facilities, such as KS fertilizer, also contributed to the growth of plants to be not optimal. The operational performance of tobacco segment is as follows:

Tabel Produksi Tembakau / Table of Tobacco Production

	2017	2016
Luas areal (ha) *Area Sixe (ha)*	878	1.078
Produksi Daun Hijau (ton) *Green Leaves Production (tons)*	15.536	19.078
Rendemen (%) *Yield (%)*	9,7	9,1
Produksi Kering Rompos (ton) *Dried Tobacco Production (tons)*	1.506	1.736
Produktivitas Kering Rompos (ton/ha) *Dried Tobacco Productivity (tons/ha)*	1,72	1,61

Kinerja Segmen Usaha Tembakau:

Pendapatan usaha segmen ini mengalami penurunan sebesar 1,12% menjadi Rp327,73 miliar di tahun 2017. Namun demikian, kenanikan beban pokok penjualan yang lebih tinggi sebesar 3,00% menyebabkan laba kotor segmen ini turun sebesar 41,67% dari Rp30,53 miliar di tahun 2016 menjadi Rp17,81 miliar di tahun 2017. Meski demikian, penurunan beban operasi sebesar 35,06% menjadi Rp48,02 miliar turut menopang perbaikan laba operasi dimana rugi operasi segmen ini turun menjadi Rp30,21 miliar dari rugi operasi sebesar Rp43,41 miliar.

Performance of Tobacco Business Segment:

In 2017, this segment recorded a decline of 1.12% in operating revenues to IDR327.73 billion. However, the increase of 3.00% in cost of sales caused the gross profit of this segment to decline by 41.67% from IDR30.53 billion in 2016 to IDR17.81 billion in 2017. Nonetheless, the decline in operating expenses by 35.06% to IDR48.02 billion helped in increasing the operating profit of this segment, which the operating loss of this segment declined IDR30.21 billion from IDR43.41 billion.

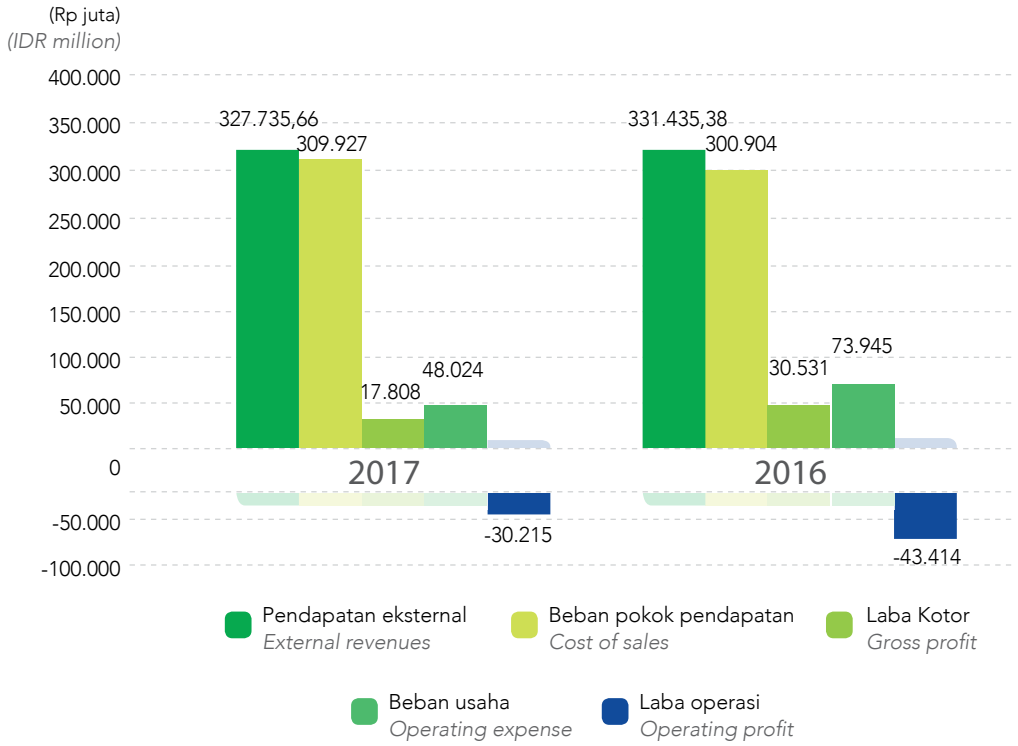

SEGMEN USAHA RUMAH SAKIT

Segmen bisnis ini dikelola oleh entitas anak yakni PT Nusantara Medika Utama (NMU). Perseroan ini adalah *spin off* dari SBU Rumah Sakit milik PT Perkebunan Nusantara X yang berdiri tanggal 19 Januari 2013 dan berkantor pusat di Mojokerto. Saat ini PT Nusantara Medika Utama (PT NMU) memiliki 4 unit usaha rumah sakit yaitu RS Gatoel di Kabupaten Mojokerto, RS Toeloengredjo di Kabupaten Kediri (Pare), RS Perkebunan di Jember dan RS Medika Utama di Kabupaten Blitar.

Keempat RS tersebut selain melayani pasien intern juga memberikan layanan kepada masyarakat umum di sekitarnya. PT NMU memiliki rumah sakit tipe C yang mampu melayani sekurang-kurangnya 11 pelayanan spesialis. Perubahan bentuk rumah sakit dari SBU menjadi anak Perseroan untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan rumah sakit dan menciptakan nilai tambah bagi Perseroan induk.

Ringkasan indikator produksi segmen rumah sakit adalah sebagai berikut:

HOSPITAL BUSINESS SEGMENT

This business segment is managed by the Company's subsidiary, namely PT Nusantara Medika Utama (NMU). This company is a spin off from SBU Hospital owned by PT Perkebunan Nusantara X, which was established on January 19, 2013 with its head office located in Mojokerto. Currently, PT Nusantara Medika Utama (PT NMU) has 4 hospital business units, namely Gatoel Hospital in Mojokerto District, Toeloengredjo Hospital in Kediri District (Pare), Plantation Hospital in Jember and Medika Utama Hospital in Blitar District.

In addition to serving internal patients, these four hospitals also provide services to the general public in its surrounding. PT NMU has a type C hospital, which capable of serving at least 11 specialist services. Changes in the form of hospital from SBU to the Company's subsidiary was done to improve the professionalism of hospital management and create added value for the holding company.

Summary of indicators of hospital segment production is as follows:

Keterangan *Description*	**2017**	**2016**
Tempat Tidur *Beds*	523	485
Hari Perawatan *Inpatient Days*	166.746	155.905
BOR *Bed Occupancy Rate*	88,43%	86,86%
LOS	3,76	4,07
TOI	0,45	0,56
BTO	84,80	78,98
Rawat Jalan *Outpatient*	486.635	412.666
Rawat Inap *Inpatient*	56.409	47.249
Penunjang Medis *Medical Support*	619.489	596.947
Total Kunjungan *Total Visits*	1.162.533	1.056.862

Kinerja segmen usaha rumah sakit:

Segmen usaha rumah sakit membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 13,33% menjadi Rp333,49 miliar di tahun 2017 seiring dengan peningkatan hari perawatan dan tingkat okupansi rumah sakit (BOR). Meski mengalami peningkatan beban pokok pendapatan sebesar 14,83% menjadi Rp257,67 miliar, laba kotor segmen rumah sakit naik sebesar 8,43% menjadi Rp74,92 miliar. Perbaikan laba kotor dan penurunan beban operasi sebesar 10,64% menjadi Rp21,57 miliar berdampak positif terhadap peningkatan laba operasi menjadi Rp53,35 miliar atau tumbuh 18,67% dibandingkan posisi tahun 2016.

Performance of Hospital Business Segment:

The hospital's business segment recorded a growth in revenue of 13.33% to IDR333.49 billion in 2017, in line with the increased inpatient days and bed occupancy rate (BOR). Despite its increase in cost of revenue of 14.83% to IDR257.67 billion, the gross profit of hospital segment increased by 8.43% to IDR74.92 billion. The increased gross profit and declined operating expenses by 10.64% to IDR21.57 billion had a positive impact towards the increase in operating profit to IDR53.35 billion or grew by 18.67% compared to 2016.

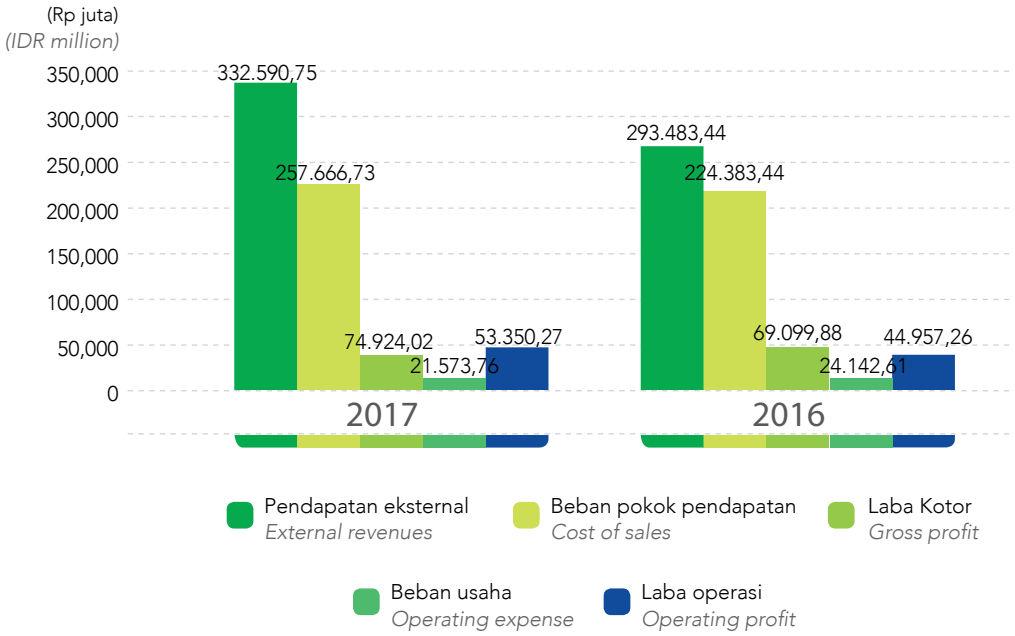

SEGMEN USAHA LAIN-LAIN

Segmen usaha lainnya meliputi produk edamame dan okra, karung plastik, bioethanol dan *cutting* Bobbin. Penjelasan terkait entitas anak perusahaan yang mengelola segmen bisnis ini adalah sebagai berikut:

1. PT Dasaplast Nusantara (DN) yang dibentuk pada tahun 2004 sebagai perusahaan gabungan antara perusahaan swasta dengan PT Perkebunan Nusantara X, berlokasi di Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Bergerak di industri karung plastik Polypropylene (PP) *Woven Bag*, Polyethylene (PE) *Inner Bag* dan Leno Mesh (*Warring*) yang telah memenuhi standar internasional. Usaha terbaru dari entitas anak ini adalah *flexible packaging* yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo.
2. PT Energi Agro Nusantara (ENERO) bergerak di bidang *bioetanol fuel grade* (99,5%) untuk bahan substitusi BBM atau campuran bahan bakar jenis yang ramah lingkungan dan produk turunannya. Pengembangan bisnis bioethanol dengan memanfaatkan bahan baku tetes dari unit bisnis gula PTPN X merupakan strategi diversifikasi yang berkaitan dengan bisnis utamanya. Perseroan ini didirikan pada tanggal 5 Juni 2013 yang berlokasi di Desa Gempolkerep Mojokerto.
3. PT Mitratani Dua Tujuh (M 27) merupakan kerja sama antara PTPN X dan PT Kelola Mina Laut dengan prosentase kepemilikan saham PTPN X : 65% dan PT KML : 35%. Berlokasi di Mangli, Jember, Jawa Timur dengan komoditi utama *frozen vegetables*, seperti kedelai edamame dan okra dengan kapasitas produksi 10.000 ton/tahun untuk ekspor ke Jepang (mayoritas) dan sebagian untuk pasar lokal.

OTHER BUSINESS SEGMENTS

Other business segments include edamame and okra products, plastic bags, bioethanol and cutting bobbin. Explanation related to the subsidiaries managing this business segment is as follows:

1. PT Dasaplast Nusantara (DN) was established in 2004 as a joint venture between a private company and PT Perkebunan Nusantara X, located in Pecangaan, Jepara District, Central Java. Engaged in Polypropylene (PP) Woven Bag, Polyethylene (PE) Inner Bag and Leno Mesh (Warring) products that meet international standards. The latest business of this subsidiary is flexible packaging, which operates in Sidoarjo District.
2. PT Energi Agro Nusantara (ENERO) is engaged in bioethanol fuel grade (99.5%) for fuel substitution materials or environmentally friendly fuel mix and its derivative products. The development of bioethanol business by utilizing raw material of molasses from the Company's sugar business is a diversification strategy related to its main business. The Company was established on June 5, 2013, located in Gempolkerep Village, Mojokerto.
3. PT Mitratani Dua Tujuh (M 27) is a joint venture between the Company and PT Kelola Mina Laut with share ownership percentage of the Company: 65% and PT KML: 35%. Located in Mangli, Jember, East Java with frozen vegetable as its main commodities, such as edamame and okra with a production capacity of 10,000 tons/year for exports to Japan (majority) and partly for local markets.

4. Industri *Cutting* Bobbin merupakan bentuk kerja sama PTPN X dengan BURGER SOEHNE AG BURG (BSB)-SWISS dalam jasa pemotongan daun tembakau menjadi pembungkus cerutu. Pada tahun 2016, industri ini memroduksi mencapai 527.000.000 potong, lebih tinggi dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 522.000.000 potong.

Cutting Bobbin Industry is a joint venture between the Company and BURGER SOEHNE AG BURG (BSB) – SWISS, which engaged in tobacco leaves cutting services into cigar wrappers. By 2016, the industry has produced 527.000.000 pieces, higher than previous year's production of 522.000.000 pieces.

Kinerja segmen usaha lain-lain:

Pendapatan usaha segmen usaha lain-lain tumbuh 9,74% menjadi Rp448,30 miliar di tahun 2017 dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp408,52 miliar. Peningkatan atas pendapatan usaha ini menopang perbaikan kinerja laba kotor dan laba operasi yang naik asing-masing sebesar 22,26% dan 25,71% menjadi Rp97,43 miliar dan Rp31,55 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp79,69 miliar dan laba operasi sebesar Rp27,29 miliar.

Performance of Other Business Segments:

In 2017, revenue of other business segments increased by 9.74% to IDR448.30 billion compared to previous year's position of IDR408.52 billion. The increase in operating revenues supported the improvement in gross profit and operating profit, which increased by 22.26% and 25.71% to IDR97.43 billion and IDR31.55 billion, respectively, compared to previous year's position of IDR79.69 billion and operating profit of IDR27.29 billion.

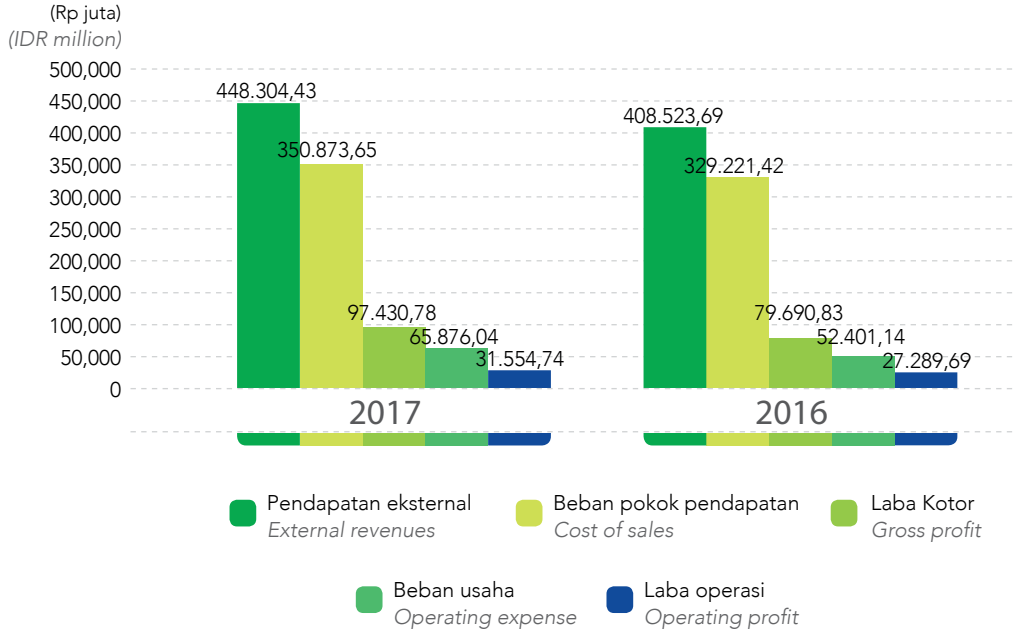

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Pembahasan tentang tinjauan keuangan berkaitan erat dengan data keuangan dan operasional serta laporan keuangan konsolidasi dan catatan atas laporan keuangan Perusahaan yang terdapat di dalam laporan tahunan ini. Pembahasan ini berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Perkebunan Nusantara X dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernest & Young atau EY) dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The discussion of the financial review is closely related to the financial and operational data as well as the consolidated financial statements and notes to the financial statements contained in this annual report. discussion is based on the consolidated financial statements of PT Perkebunan Nusantara X and its subsidiaries for the year ended on December 31, 2017 and December 31, 2016, as audited by the Public Accountants Firm of Purwantono, Sungkoro Surja (a firm member of Ernest & Young or EY), which the presented consolidated financial statements received fair opinion in all material aspects in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

ANALISA LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

ANALYSIS OF CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (LOSS

Tabel Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian

Table of Consolidated Statement of Comprehensive Income (Loss)

(Dalam jutaan Rupiah)

(In IDR Million)

	2017	2016	Perubahan *Change*	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha *Operating Revenues*	2,593,942	2,260,374	333,568.71	14.76%
Beban Pokok Penjualan *Cost of Sales*	-2,066,661	-2,009,575	-57,085.83	2.84%
Laba Kotor *Gross Profit*	527,281	250,799	276,482.88	110.24%
Beban Usaha *Operating Expenses*	-345,457	-404,437	58,980.26	-14.58%
Laba Usaha *Operating Profit*	181,825	-153,638	335,463.14	-218.35%
Pendapatan (Beban) Bukan Usaha *Non-Operating Revenue (Expense)*	52,159	57,629	-5,470.60	-9.49%
Beban Keuangan – net *Financial Expense – net*	-140,039	-111,546	-28,493.47	25.54%
Laba Sebelum Pajak *Profit before Tax*	93,945	-207,555	301,499.07	-145.26%
Pajak *Tax*	-29,199	54,998	-84,197.14	-153.09%
Laba Tahun Berjalan *Profit fot the Year*	64,746	-152,556	217,301.93	-142.44%

	2017	2016	Perubahan *Change*	
			Nominal	%
Pendapatan komprehensif lain neto *Other Comprehensive Income – net*	-61,195	2,569	-63,764.63	-2481.86%
Total Pendapatan komprehensif tahun berjalan *Total Comprehensive Income for the Year*	3,550	-149,987	153,537.30	-102.37%
Laba Tahun Berjalan: *Profir for the Year:*				
Diatribusikan kepada entitas induk *Attributable to the Parent Entity*	56,328	-161,353	217,680.59	-134.91%
Diatribusikan kepada non pengendali *Attributable to Non-Controlling Interests*	8,418	5,570	2,848.22	51.13%
Jumlah *Total*	64,746	-155,783	220,528.81	-141.56%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan: *Comprehensive Income for the Year*				
Diatribusikan kepada entitas induk *Attributable to the Parent Entity*	-4,008	-155,235	151,226.99	-97.42%
Diatribusikan kepada non pengendali *Attributable to Non-Controlling Interests*	7,558	5,248	2,310.32	44.02%
Total laba komprehensif tahun berjalan *Total Comprehensive Income for the Year*	3,550	-149,987	153,537.31	-102.37%

Pendapatan Usaha

Perseroan membukukan pendapatan usaha yang mencapai Rp2,59 triliun atau tumbuh 14,76% dibandingkan sebesar Rp2,26 triliun setahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan usaha ini terutama ditopang dengan peningkatan pendapatan dari produk gula, layanan rumah sakit, edamame dan okra serta karung plastik. Secara nominal, kenaikan pendapatan terbesar dibukukan oleh produk gula sebesar Rp280,35 miliar menjadi Rp1,30 triliun, lebih tinggi 27,43% dari posisi tahun 2016 sebesar Rp1,02 triliun.

Komposisi pendapatan Perseroan dari berbagai produk dan layanan kesehatan adalah sebagai berikut:

Operating Revenues

The Company recorded revenues of IDR2.59 trillion, a 14.76% increase compared to IDR2.26 trillion in previous year. The increase in operating revenues was mainly supported by the increased revenues from sugar products, hospital services, edamame and okra, as well as plastic bags. In nominal, the highest revenue increase was recorded by sugar products amounted to IDR280.35 billion to IDR1,30 trillion, 27.43% higher than 2016 position of IDR1.02 trillion.

The Company's composition of revenues from various health products and services is as follows:

(Dalam jutaan Rupiah) (In IDR Million)

	2017	2016	Perubahan *Changes*	
			Nominal	%
Gula *Sugar*	1.302.239,00	1.021.885,41	280.353,55	27,43%
Rumah sakit *Hospital*	332.590,75	293.483,31	39.107,44	13,33%
Tembakau *Tobacco*	327.735,66	331.435,38	-3.699,72	-1,12%
Edamame dan okra *Edamame and okra*	246.714,06	208.638,52	38.075,54	18,25%
Tetes *Molasses*	183.072,43	205.045,72	-21.973,30	-10,72%
Bioethanol *Bioethanol*	88.598,20	115.028,57	-26.430,37	-22,98%
Karung plastik *Plastic Bags*	81.879,00	51.873,72	30.005,28	57,84%
Cutting bobbin *Cutting Bobbin*	31.113,17	32.982,88	-1.869,72	-5,67%
Jumlah Pendapatan *Total Revenues*	2.593.942,23	2.260.373,52	333.568,71	14,76%

Pendapatan dari segmen gula masih memiliki kontribusi yang terbesar karena segmen ini merupakan bisnis inti yang telah dikembangkan oleh Perseroan sejak awal berdiri. Kontribusi segmen bisnis gula mencapai 50,20% pada tahun 2017 atau lebih tinggi dibandingkan 45,21% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, produk Perseroan dengan kontribusi di atas 10,00% adalah layanan rumah sakit sebesar 12,82% dan tembakau sebesar 12,63%.

Revenue from sugar segment still has the largest contribution since this segment is a core business, which has been developed by the Company since its establishment. In 2017, the contribution of sugar business segment achieved 50.20% or higher compared to 45.21% in previous year. Meanwhile, the Company's products with contributions above 10.00% include hospital services of 12.82% and tobacco of 12.63%.

Kontribusi Pendapatan 2017 dan 2016

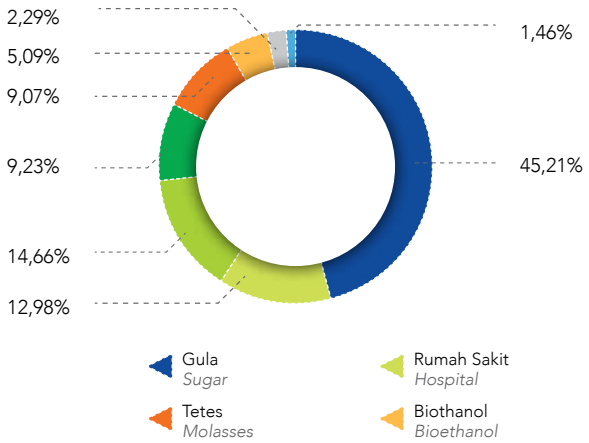

Revenue Contribution 2017 vs. 2016

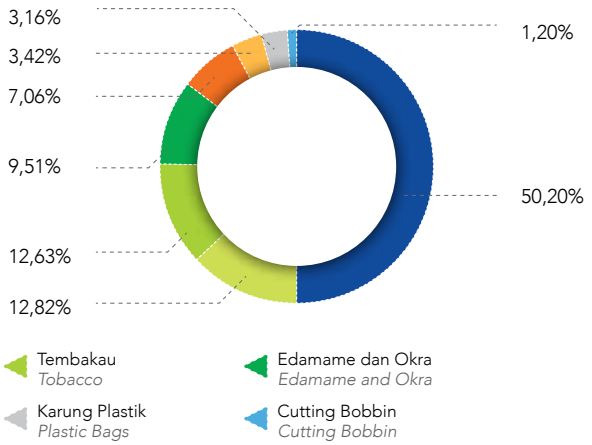

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan naik sebesar 2,84% dari Rp2,01 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp2,07 triliun atau tahun sesudahnya. Peningkatan beban pokok penjualan pada tahun 2017 tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan dari segmen gula dan rumah sakit yang masing-masing membukukan pertumbuhan sebesar 7,35% dan 14,83%. Beban pokok penjualan dari kedua tersebut mencapai Rp989,62 miliar dan Rp257,67 miliar pada tahun 2017 dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp921,83 miliar dan Rp224,38 miliar.

Cost of Sales

The Company's cost of sales increased by 2.84% from IDR2.01 trillion in 2016 to IDR2.07 trillion a year later. The increase in cost of goods sold in 2017 was mainly due to the increase in cost of sales in sugar and hospital segments, which recorded growth of 7.35% and 14.83%, respectively. In 2017, the cost of sales from the two segments achieved IDR989.62 billion and IDR257.67 billion respectively, compared to previous year's position of IDR921.83 billion and IDR224.38 billion.

Kontribusi Beban Pokok Penjualan 2017 vs 2016

Cost of Sales Contribution 2017 vs. 2016

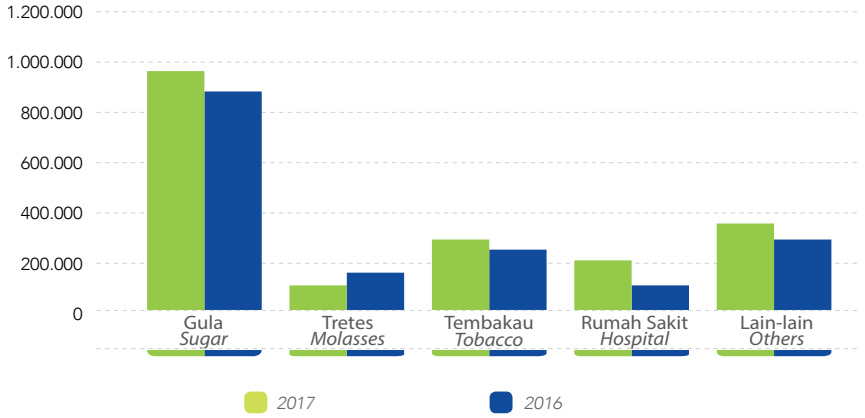

Laba Kotor

Kenaikan penjualan konsolidasi sebesar 14,86% turut menopang kenaikan signifikan laba kotor sebesar 110,24% menjadi Rp527,28 miliar pada tahun 2017. Laba kotor Perseroan pada tahun sebelumnya mencapai Rp250,80 miliar.

Gross Profit

The increase in consolidated sales of 14.86% helped sustain a significant increase of 110.24% gross profit to IDR527.28 billion in 2017. The Company's gross profit in previous year was IDR250.80 billion.

Beban Usaha

Secara kumulatif, beban usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar 14,58% pada tahun 2017 menjadi Rp345,46 miliar. Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 10,54% menjadi Rp328,74 miliar terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji, upah dan tunjangan karyawan. Beban ini meningkat menjadi Rp189,62 miliar di tahun 2017 dari Rp172,59 miliar.

Operating Expenses

Cumulatively, the Company's operating expenses declined by 14.58% in 2017 to IDR345.46 billion. The Company's general and administrative expenses increased by 10.54% to IDR328.74 billion, which primarily due to an increase in salaries, wages and employee benefits. This expense increased to IDR189.62 billion in 2017 from IDR172.59 billion.

Beban penjualan naik 1,79% menjadi Rp12,90 miliar pada tahun 2017 dari Rp19,55 miliar terutama disebabkan kenaikan beban transportasi. Beban ini naik sebesar dari Rp9,44 miliar di tahun 2016 menjadi Rp12,05 miliar di tahun 2017.

Penurunan beban operasional terutama disebabkan oleh penurunan beban operasional lain menjadi Rp39,69 miliar di tahun 2017 dari Rp137,70 miliar di tahun sebelumnya. Penurunan ini sejalan dengan penurunan beban penyisihan piutang menjadi hanya Rp4,62 miliar di tahun 2017 dari Rp37,86 miliar pada tahun sebelumnya.

Laba Usaha

Perseroan membukukan laba usaha menjadi Rp181,83 miliar pada tahun 2017 dibandingkan rugi usaha sebesar Rp153,64 miliar setahun sebelumnya. Kinerja profitabilitas yang menguat ini sejalan dengan penurunan beban operasional sebesar 14,58% di tahun 2017.

Laba Sebelum Pajak

Meskipun Perseroan membukukan beban bunga pinjaman yang lebih tinggi sebesar Rp140,04 miliar, ditopang dengan laba usaha yang membaik pada tahun 2017, Perseroan mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp93,95 miliar dibandingkan rugi sebelum pajak yang mencapai Rp207,55 miliar setahun sebelumnya.

Laba Tahun Berjalan

Perseroan berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp64,75 miliar pada tahun 2017. Pencapaian ini jauh lebih baik dibandingkan rugi tahun berjalan sebesar Rp152,56 miliar di tahun 2016 meski disaat yang sama menerima manfaat pajak tahun berjalan sebesar Rp55,00 miliar. Perbaikan profitabilitas ini sejalan dengan kenaikan pendapatan usaha dan penurunan beban operasional pada tahun 2017.

Dari total laba tahun berjalan tersebut, yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp56,33 miliar sedangkan porsi untuk kepentingan non pengendali sebesar Rp8,42 miliar.

In 2017, selling expenses increased by 1.79% to IDR12.90 billion from IDR19.55 billion, which mainly caused by the increase in transportation expenses. In 2017, this expense increased to IDR12.05 billion from IDR9.44 billion in 2016.

The decline in operating expenses was primarily due to the decline in other operating expenses to IDR39.69 billion in 2017 from IDR137.70 billion in 2016. This decline was in line with the decline in provision for impairment losses to only IDR4.62 billion in 2017 from IDR37.86 billion in previous year.

Operating Profit

In 2017, the Company recorded operating profit of IDR181.83 billion in to operating loss of IDR153.64 billion in previous year. The increased profitability performance was in line with the decline in operating expenses by 14.58% in 2017.

Profit Before Tax

Although the Company recorded a higher loan interest expense of IDR140.04 billion, with the support of an improved operating profit in 2017, the Company managed to record profit before tax of IDR93.95 billion compared to loss before tax of IDR207.55 billion in previous year.

Profit for the Year

The Company managed to record profit for the year of IDR64.75 billion in 2017. This achievement was significantly better compared to loss for the year of IDR152.56 billion in 2016, while at the same time receiving tax benefits for the year of IDR55.00 billion. The increased profitability was in line with the increase in operating revenues and decline in operating expenses in 2017.

From the total profit for the year, IDR56.33 billion was attributable to owners of the parent entity, while to non-controlling interests amounted to IDR8.42 billion.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Total laba komprehensif tahun berjalan mencapai Rp3,55 miliar dengan porsi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar –Rp4,01 miliar dibandingkan sebesar Rp7,56 miliar yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali.

Total Comprehensive Income for the Year

Total comprehensive income for the year amounted to IDR3.55 billion with a portion attributable to owners of the parent entity of –IDR4.01 billion compared to IDR7.56 billion attributable to non-controlling interests.

ANALISA POSISI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Total aset Perseroan tumbuh 0,08% menjadi Rp13,07 triliun pada tahun 2017 dari Rp13,06 triliun setahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kenaikan aset tidak lancar sebesar 2,03% menjadi Rp10,72 triliun dengan kenaikan terbesar dibukukan oleh piutang pihak berelasi jangka panjang sebesar 17,18%.

ANALYSIS OF CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

In 2017, the Company's total assets increased by 0.08% to IDR13.07 from IDR13.06 in 2016. This growth was mainly supported by the increase in non-current assets by 2.03% to IDR10.72 trillion, with the largest increase recorded by long-term receivables from related parties of 17.18%.

(Dalam jutaan Rupiah) (In IDR Million)

	2017	2016	Perubahan *Changes*	
			Nominal	%
Kas dan setara kas *Cash and cash equivalents*	319.687,91	235.427,13	84.260,77	35,79%
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya *Restricted cash and cash equivalents*	959.882,82	967.565,78	-7.682,96	-0,79%
Piutang usaha, neto *Trade receivables, net*	175.818,42	150.483,46	25.334,97	16,84%
Piutang petani tebu rakyat, neto *Sugarcane farmers receivables, net*	40.140,26	176.862,78	-136.722,52	-77,30%
Persediaan, neto *Inventories, net*	738.995,13	905.980,68	-166.985,56	-18,43%
Aset lancar lainnya *Other current assets*	119.629,73	121.447,29	-1.817,56	-1,50%
Jumlah Aset Lancar *Total Current Assets*	2.354.154,27	2.557.767,13	-203.612,86	-7,96%
Piutang pihak berelasi jangka panjang *Long-terms receivables from related parties*	1.424.945,31	1.216.017,17	208.928,15	17,18%
Aset tetap, neto *Fixed assets, net*	8.810.040,77	8.824.200,78	-14.160,00	-0,16%
Aset tidak lancar lainnya *Other non-current assets*	484.700,34	466.033,28	18.667,06	4,01%
Jumlah Aset Tidak Lancar *Total Non-Current Assets*	10.719.686,43	10.506.251,22	213.435,20	2,03%
Total Aset *Total Assets*	13.073.840,70	13.064.018,35	9.822,35	0,08%

ASET LANCAR

(Dalam jutaan Rupiah)

CURRENT ASSETS

(In IDR Million)

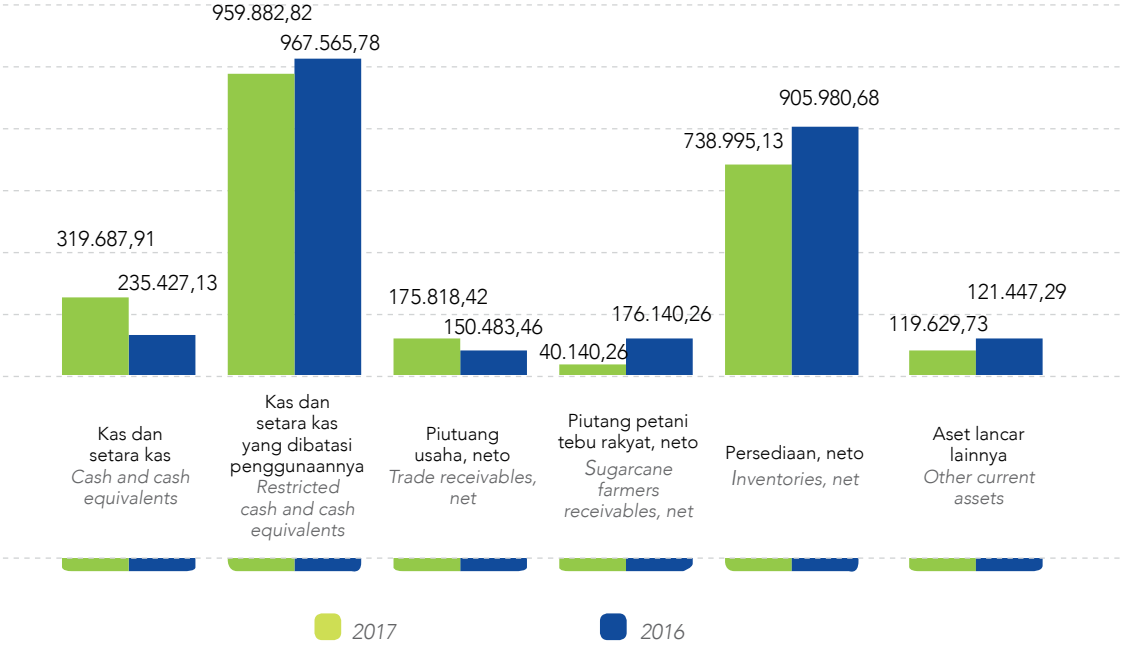

Aset lancar Perseroan turun 7,96% menjadi Rp2,35 triliun pada tahun 2017 dari Rp2,35 triliun. Penurunan aset lancar ini terutama dipengaruhi nilai persediaan Perseroan yang menurun 18,43% menjadi Rp738,99 miliar pada tahun 2017 disamping piutang petani tebu rakyat yang mengalami penurunan sebesar 77,30% menjadi Rp40,14 miliar.

Kas dan Setara Kas

Pada tahun 2017, posisi kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp319,69 miliar atau naik 35,79% dari posisi tahun 2016 sebesar Rp235,43 miliar yang sebagian sebagian besar disimpan di perbankan milik Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rata-rata tingkat bunga deposito per tahun adalah sebesar 7,00% pada tahun 2017 dibandingkan 6,75% pada tahun sebelumnya.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya

Perseroan membukukan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp959 miliar pada tahun 2017 dibandingkan Rp967,57 miliar satu tahun sebelumnya. Akun ini adalah dana yang diterima oleh Perseroan pada tahun 2015 terkait dengan program Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah ditentukan penggunaannya. Dana ini akan digunakan dalam beberapa program kegiatan Perseroan, antara lain:

In 2017, the Company's current assets declined by 7.96% to IDR2.35 trillion from IDR2.35 trillion. The decline in current assets was mainly affected by the Company's inventories, which declined by 18.43% to IDR738.99 billion in 2017 in addition to sugarcane farmers receivables, which declined by 77.30% to IDR40.14 billion.

Cash and Cash Equivalents

In 2017, the Company's cash and cash equivalents amounted to IDR319.69 billion, an increase of 35.79% from its position in 2016 of IDR235.43 billion, most of which is held in state-owned banks or state-owned enterprises (SOE). In 2017, the average annual deposit rate was 7.00% compared to 6.75% in the previous year.

Restricted Cash and Cash Equivalents

In 2017, the Company recorded restricted cash and cash equivalents amounted to IDR959 billion compared to IDR967.57 billion in previous year. This account represents funds received by the Company in 2015 related to the State Equity Participation (PMN) program of which the allocation has been determined. These funds will be used in several of the Company's activity programs, including:

1. Peningkatan kapasitas giling dan rendemen untuk PG Tjoekir dan PG Gempolkrep;
2. Pembangunan proyek *co-generation* untuk pembangkit listrik di PG Ngadiredjo, PG Tjoekir dan PG Gempolkrep;
3. Pemantapan kinerja pabrik Bioethanol di PG Gempolkrep; dan
4. Pembangunan 1 pabrik Bioethanol berkapasitas 100 KL/hari di PG Ngadiredjo

Piutang Usaha

Perseroan membukukan piutang usaha bersih sebesar Rp175,82 miliar pada tahun 2017 atau lebih tinggi dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp150,48 miliar. Berdasarkan umur piutang, piutang usaha yang telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai sebesar Rp13,86 miliar atau lebih rendah dibandingkan posisi tahun 2016 sebesar Rp14,73 miliar.

Kolektibilitas piutang Perseroan yang membaik juga ditandai dengan peningkatan nilai piutang usaha yang berumur 31-60 hari menjadi Rp28,83 miliar di tahun 2017 dibandingkan Rp8,99 pada tahun sebelumnya. Selain itu, nilai piutang usaha dengan umur piutang lebih dari 60 hari turun menjadi mencapai Rp2,46 miliar.

Piutang Petani Tebu Rakyat

Piutang petani tebu rakyat merupakan pinjaman antara lain berupa beban garap, sarana produksi (saprodi), bibit, beban traktor, termasuk pemberian pinjaman dalam rangka program Pemerintah "Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)". Pelunasan dari piutang ini akan dikompensasi dengan hasil penjualan gula dan tetes milik petani. Pinjaman ini berasal dari paket kredit bank melalui Koperasi Petani Tebu Rakyat. Dalam perjanjian pinjaman tersebut Perseroan bertindak sebagai penjamin. Perseroan membukukan piutang petani tebu rakyat sebesar Rp40,14 miliar pada tahun 2017 atau turun 77,30% dibandingkan posisi tahun 2016 sebesar Rp176,86 miliar.

Persediaan

Perseroan membukukan persediaan sebesar Rp738,99 miliar pada tahun 2017, turun 18,43% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp905,98 miliar. Penurunan persediaan ini terutama sejalan dengan penurunan persediaan barang jadi terutama gula yang turun menjadi Rp156,98 miliar dari sebesar Rp352,19 miliar di tahun 2016.

Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya terdiri adalah komponen-komponen aset lancar akun-akun aset lancar yang telah disebutkan sebelumnya. Aset lancar lainnya sebesar Rp119,63 miliar pada tahun 2017 atau lebih rendah 1,50% dari posisi tahun 2016 yang mencapai Rp121,45 miliar.

1. Increase of milling capacity and yields for PG Tjoekir and PG Gempolkrep;
2. Construction of co-generation projects for power plants in PG Ngadiredjo, PG Tjoekir and PG Gempolkrep;
3. Stabilization of Bioethanol plant performance at PG Gempolkrep; and
4. Construction of Bioethanol plant with a capacity of 100 KL/day at PG Ngadiredjo

Trade Receivables

In 2017, the Company recorded trade receivables-net amounted to IDR175.82 billion or higher than the previous year's position of IDR150.48 billion. Based on the aging of trade receivables, trade receivables that have matured and declined amounted to IDR13.86 billion or lower compared to 2016 of IDR14.73 billion.

The improved collectability of the Company's receivables was also indicated by the increase in trade accounts receivables with aging of 31-60 days to IDR28.83 billion in 2017 compared to IDR8.99 in previous year. In addition, trade receivables with aging od more than 60 days declined to IDR Rp2.46 billion.

Sugarcane Farmers Receivables

Sugarcane farmers receivables are loans, among others, in the form of cultivation expenses, production facilities (saprodi), seeds, tractor expenses, including loans for the Government program "Food and Energy Security Credit (KKPE)". Repayment from these receivables will be compensated with the sales of sugar and molasses belonging to the farmers. This loan is derived from the bank loan package through the Sugarcane Farmers Cooperative. In the loan agreement, the Company acts as the avalist (guarantor). The Company recorded sugarcane farmers receivables of IDR40.14 billion in 2017, declined by 77.30 percent compared to 2016's position of IDR176.86 billion.

Inventories

In 2017, the Company recorded inventories of IDR738.99, declined by 18.43% from IDR905.98 billion in previous year. The decline in inventories was mainly in line with the decline in finished goods inventories, especially sugar, which declined to IDR156.98 billion from IDR352.19 billion in 2016.

Other Current Assets

Other current assets consist of current assets components of current assets accounts. In 2017, other current assets amounted to IDR119.63 billion or 1.50% lower compared to 2016 of IDR121.45 billion.

ASET TIDAK LANCAR

NON-CURRENT ASSETS

(Dalam jutaan Rupiah)

(In IDR Million)

	2017	2016	Perubahan *Changes*	
			Nominal	%
Piutang pihak berelasi jangka panjang *Long-term receivables from related parties*	1.424.945,31	1.216.017,17	208.928,15	17,18%
Aset tetap, neto *Fixed assets, net*	8.810.040,77	8.824.200,78	-14.160,00	-0,16%
Aset tidak lancar lainnya *Other non-current assets*	484.700,34	466.033,28	18.667,06	4,01%
Jumlah Aset Tidak Lancar *Total Non-Current Assets*	10.719.686,43	10.506.251,22	213.435,20	2,03%

(Dalam jutaan Rupiah)

(In IDR Million)

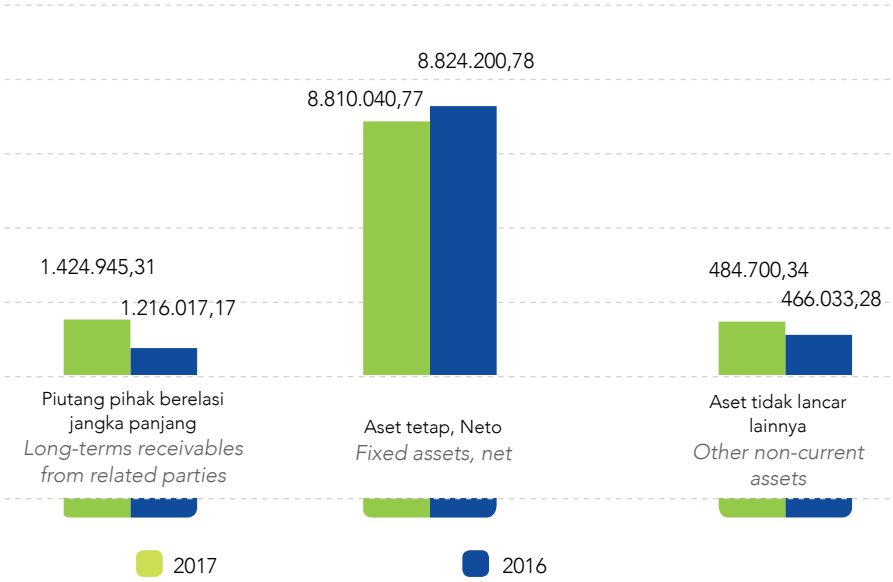

Aset tidak lancar mencapai Rp10,72 triliun pada tahun 2017, naik 2,03% dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp10,51 triliun. Kenaikan aset tidak lancar ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pihak berelasi jangka panjang yang mencapai Rp1,42 triliun pada tahun 2017 atau naik 17,18% dibandingkan posisi tahun 2016.

In 2017, the Company's non-current assets achieved IDR10.72 trillion, increased by 2.03% from previous year's position of IDR10.51 trillion. The increase in non-current assets in 2017 was mainly due to the increase in long-term receivables from related parties of IDR1.42 trillion, increased by 17.18% compared to 2016.

Piutang Pihak Berelasi Jangka Panjang

Perseroan membukukan kenaikan piutang pihak berelasi jangka panjang sebesar 2,03% menjadi Rp1,42 triliun dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp1,22 triliun.

Piutang PT Perkebunan Nusantara XIV merupakan pengeluaran Perseroan dalam rangka penyelamatan PT Perkebunan Nusantara XIV dari kerugian usaha Pabrik Gula

Long-term Receivables from Related Parties

The Company recorded an increase of 2.03% in long-term receivables from related parties to IDR1.42 trillion from previous year's position of IDR1.22 trillion.

Receivables from PT Perkebunan Nusantara XIV represent cost incurred by the Company in relation to taking care PT Perkebunan Nusantara XIV of Bone, Caming and Takalar

Bone, Caming dan Takalar (BCT) sesuai dengan penugasan dari Menteri BUMN berdasarkan surat No. S- 49/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Deputi Bidang Agro Industri S-187/MBU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 serta No. S- 653/ MBU/2011 tanggal 7 Desember 2011.

Termasuk dalam saldo piutang tersebut adalah pinjaman novasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dilakukan pada saat penyerahan BCT dari PT Rajawali Nusantara Indonesia, pengelola BCT sebelumnya kepada Perusahaan. Piutang kepada PT Perkebunan Nusantara XIV dikenakan bunga sebesar 8,9% per tahun

Aset Tetap

Aset tetap relatif stabil di tahun 2017 meski sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar Rp8,81 triliun dibandingkan Rp8,82 triliun setahun sebelumnya. Pencapaian nilai aset bersih Perseroan yang sedikit lebih rendah ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai akumulasi penyusutan menjadi Rp2,30 triliun di tahun 2017 dibandingkan Rp2,06 triliun satu tahun sebelumnya.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset tidak lancar lainnya terdiri dari komponen aset tidak lancar selain kedua komponen yang telah dijelaskan sebelumnya. Aset tidak lancar lainnya Perseroan tumbuh 4,01% dari Rp466,01 miliar menjadi Rp484,70 miliar pada tahun 2017. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan nilai aset pajak tangguhan menjadi Rp294,45 miliar di tahun 2017 dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp282,36 miliar.

LIABILITAS

Total liabilitas PTPN X relatif stabil yang mencapai Rp4,02 triliun di tahun 2017. Liabilitas jangka pendek Perseroan naik 64,66% menjadi Rp2,15 triliun terutama disebabkan oleh peningkatan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun menjadi Rp859,35miliar di tahun 2017. Disisi lain, liabilitas jangka panjang turun 30,87% dari Rp1,87 triliun karena utang obligasi Perseroan sebesar Rp700,00 miliar jatuh tempo di tahun ini.

(BCT) Sugar Factory operating loss in accordance with the assignment of Minister of SOEs as referred to in Letter No. S-49/MBU/2009 dated July 31, 2009 and Letter of Deputy Minister of Agro Industry No. S-187/MBU/2009 dated August 12, 2009 and No. S-653/MBU/ 2011 dated December 7, 2011.

Included in the receivables balance is loan novation from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk during transfer of BCT to the Company. Receivables from PT Perkebunan Nusantara XIV bears interest at 8.9% per year.

Fixed Assets

In 2017, the Company's assets remained relatively stable, although slightly declined to IDR8.81 trillion from IDR8.82 trillion in previous year. The slightly declined in the Company's net assets value was influenced by the increase in accumulated depreciation to IDR2.30 trillion in 2017 compared to IDR2.06 trillion in previous year.

Other Non-current Assets

Other non-current assets consist of non-current assets components other than those described above. In 2017, other non-current assets increased by 4.01% from IDR466.01 billion to IDR484.70 billion. The increase was in line with the increase of deferred tax assets to IDR294.45 billion in 2017 from previous year's position of IDR282.36 billion.

LIABILITIES

In 2017, the Company's total liabilities were relatively stable, which achieved IDR4.02 trillion. The Company's current liabilities increased by 64.66% to IDR2.15, which was mainly due to the increase in its current portion of long term loans to IDR859.35 billion 2017. On the other hand, non-current liabilities declined by 30.87% from IDR1.87 trillion was caused by the Company's bonds payable of IDR700.00 billion, which due this year.

(Dalam jutaan Rupiah)

(In IDR Million)

	2017	2016	Perubahan *Changes*	
			Nominal	%
Utang usaha *Trade payables*	186.634,76	466.676,10	-280.041,34	-60,01%
Utang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi *Food security and energy credit ("KKPE") payables*	174.662,95	242.547,96	-67.885,01	-27,99%

	2017	2016	Perubahan *Changes*	
			Nominal	%
Utang jangka pendek *Short-term loans*	475.713,71	220.418,59	255.295,12	115,82%
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun *Current portion of long-term loans*	859.352,72	139.935,11	719.417,61	514,11%
Liabilitas jangka pendek lainnya *Other current liabilities*	450.608,10	234.299,14	216.308,96	92,32%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek *Total Current Liabilities*	2.146.972,23	1.303.876,90	843.095,33	64,66%
Bagian utang jangka panjang dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun *Long-term loans, net of current portion*	1.014.435,70	1.256.966,46	-242.530,75	-19,29%
Utang obligasi *Bonds payables*	0,00	700.000,00	-700.000,00	-100,00%
Liabilitas lainnya *Other liabilities*	858.166,89	751.879,19	106.287,70	14,14%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang *Total Non-Current Liabilities*	1.872.602,59	2.708.845,65	-836.243,06	-30,87%
Total Liabilitas *Total Liabilities*	4.019.574,83	4.012.722,55	6.852,28	0,17%

LIABILITAS LANCAR

CURRENT LIABILITIE

(Dalam jutaan Rupiah)

(In IDR Million)

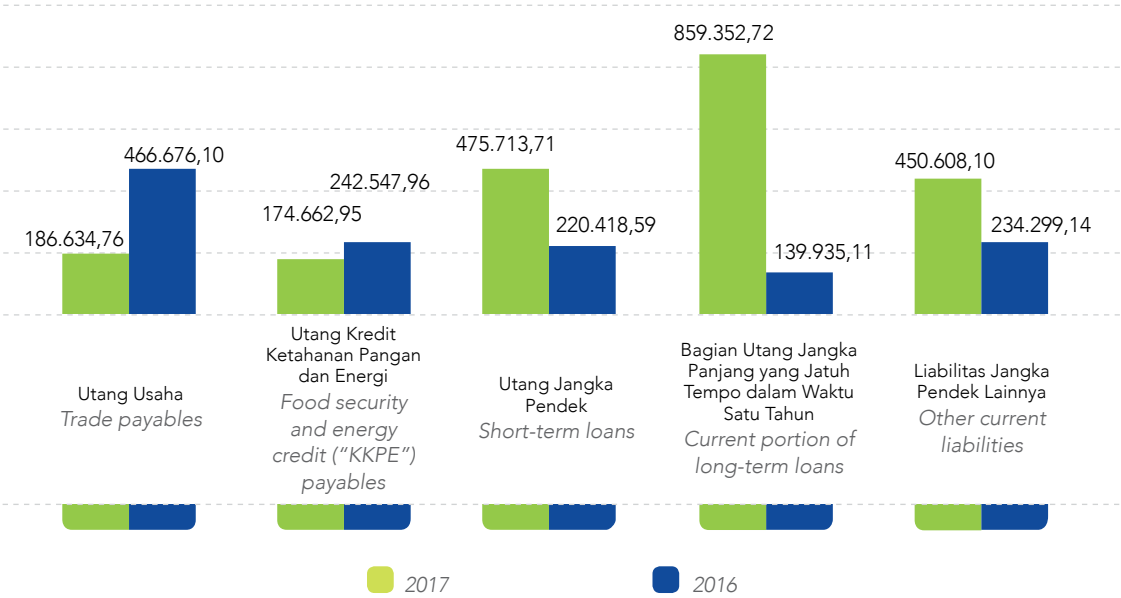

Liabilitas lancar Perseroan mencapai Rp2,15 triliun, tumbuh sebesar 64,66% dibandingkan Rp1,30 triliun di tahun 2016. Kenaikan aktiva lancar ini terutama disebabkan oleh peningkatan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun menjadi Rp859,35 miliar di tahun 2017.

Utang Usaha

Utang usaha Perseroan yang merupakan utang kepada para pemasok turun 60,01% menjadi Rp186,63 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp466,68 miliar. Penurunan utang usaha ini karena tidak adanya utang usaha dari pihak berelasi yang dibukukan di tahun 2017 dibandingkan sebesar Rp311,16 miliar di tahun 2016.

Utang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)

Utang KKPE merupakan kredit yang diperoleh Perseroan dari Bank-bank Pemerintah dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk diteruskan kepada Petani Tebu Rakyat melalui Pabrik Gula. Dalam perjanjian kredit ini, Perseroan bertindak sebagai *avalist* (penjamin) dengan menerbitkan *corporate guarantee*. Jaminan yang diberikan berupa jaminan fidusia atas tebu yang dimiliki petani, bukti pemilik kendaraan bermotor, dan Sertifikat Hak Milik dari petani atau koperasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, tingkat suku bunga pinjaman berubah menjadi 3% per tahun. Peraturan ini berlaku mulai 5 Juli 2017.

Posisi utang KPPE turun sebesar 27,99% dari Rp242,55 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp174,66 miliar setahun sesudahnya.

Utang Jangka Pendek

Perseroan membukukan kenaikan utang jangka pendek sebesar 115,82% menjadi Rp475,71 miliar dari Rp220,42 miliar di tahun 2016. Peningkatan utang ini disebabkan terutama oleh perolehan utang dari pihak berelasi dalam hal ini PTPN III sebesar Rp300,00 miliar di tahun 2017.

Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Total utang jangka panjang Perseroan yang jatuh tempo di tahun 2017 terdiri dari utang obligasi sebesar Rp700,00 miliar dan utang dari institusi keuangan sebesar Rp159,35 miliar. Secara kumulatif utang tersebut mencapai Rp859,35

In 2017, the Company's current liabilities achieved IDR2.15 trillion, increased by 64.66% compared to IDR1.30 trillion in 2016. The increase in current assets was primarily due to the increase in current portion of long-term loans to IDR859.35 billion in 2017.

Trade Payables

The Company's trade payables, which is payables to suppliers declined by 60.01% to IDR186.63 billion compared to previous year's position of IDR466.68 billion. The decline in trade payables was due to the absence of trade payables from related parties in 2017 compared to IDR311.16 billion in 2016.

Food Security and Energy Credit (KKPE)

KKPE payables represent credit obtained by the Company from Government banks and the Partnership Program and Community Development ("PKBL") to be distributed to the Sugarcane Farmers through Sugar Factory. In this agreement, the Company acts as an avalist (guarantor) by issuing corporate guarantee. The guarantee is given in the form of fiduciary guarantee on sugarcane owned by farmers, certificate of motor vehicles ownership, and Certificate of Ownership from farmers or cooperatives.

Based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 concerning Partnership Program and Community Development Program, loan interest rate changed to 3% per year. This regulation was effectively implemented on July 5, 2017.

KPPE payables declined by 27.99% from IDR242.55 billion in 2016 to IDR174.66 billion in 2017.

Short-Term Loans

In 2017, the Company recorded an increase of 115.82% in short-term loans to IDR475.71 billion from Rp220.42 billion in 2016. The increase in short-term loans was mainly due lending facility from related parties, namely PTPN III, amounted to IDR300.00 billion in 2017.

Current Portion of Long-Term Loans

In 2017, the Company's total current portion of long-term loans consists of bonds payables of IDR700.00 billion and payables from financial institutions of IDR159.35 billion. In cumulative, total loans achieved IDR859.35 billion in

miliar di tahun 2017, naik signifikan dibandingkan periode tahun sebelumnya sebesar Rp139,93 miliar.

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas jangka pendek lainnya adalah liabilitas selain dari keempat komponen liabilitas lancar yang disebutkan diatas. Secara kumulatif liabilitas lancar di tahun 2017 sebesar Rp450,61 miliar, naik 92,32% dibandingkan posisi tahun 2016 sebesar Rp234,30 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain dari pihak ketiga yang mencapai Rp273,33 miliar di tahun 2017 dari Rp129,89 miliar satu tahun sebelumnya.

LIABILITAS TIDAK LANCAR

Liabilitas tidak lancar Perseroan sebesar Rp1,87 triliun atau turun sebesar 30,87% dari posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,71 triliun. Penurunan ini disebabkan utang obligasi Perseroan sebesar Rp700,00 miliar jatuh tempo di tahun 2017.

(Dalam jutaan Rupiah)

2017, increased significantly from previous year's position of IDR139.93 billion.

Other Current Liabilities

Other current liabilities include liabilities other than the four components of current liabilities mentioned above. In cumulative, in 2017 current liabilities amounted to IDR450. 61 billion, increased by 92.32% compared to the position in 2016 f IDR234.30 billion. The decline was primarily due to the increased in other payables from third parties, which achieved IDR273.33 billion in 2017 from IDR129.89 billion in previous year.

NON-CURRENT LIABILITIES

In 2017, the Company's non-current liabilities amounted to IDR1.87 trillion or declined by 30.87% from previous year's position of IDR2.71 trillion. The decline was caused by the Company's bonds payables of IDR700.00 billion, which due in 2017.

(In IDR Million)

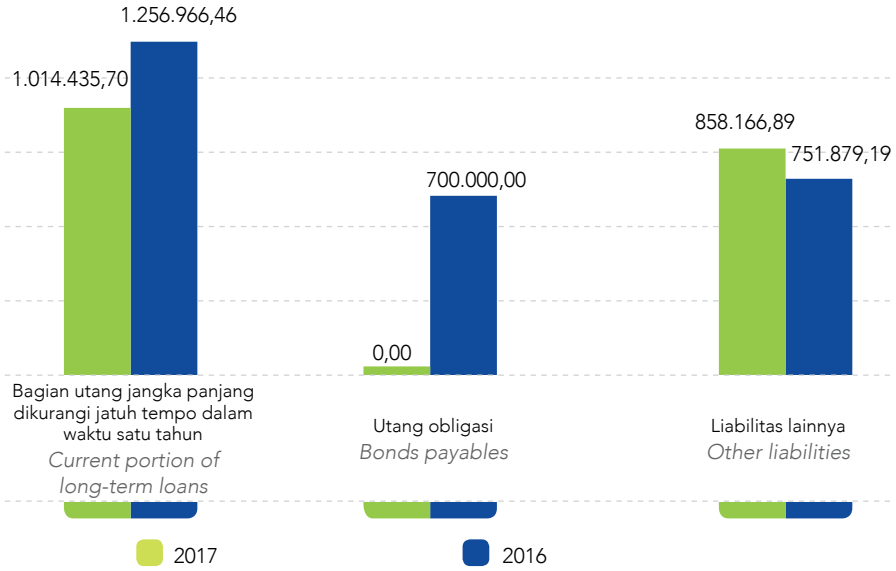

Bagian Utang Jangka Panjang Dikurangi yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

Perseroan membukukan total utang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dari berbagi insitusi keuangan adalah sebesar Rp1,01 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp1,26 triliun di tahun 2016. Perseroan membukukan pinjaman jangka panjang terbesar dari Bank Mandiri (Persero) yang mencapai Rp1,06 triliun di tahun 2017 dari Rp1,27 triliun satu tahun sebelumnya.

Long-Term Loans, Net of Current Portion

The Company recorded total long-term loans, net of current portion from financial institutions of IDR1.01 trillion, which was lower compared to IDR1.26 trillion in 2016. The Company recorded the largest long-term loans from Bank Mandiri (Persero), which achieved IDR1.06 trillion in 2017 from IDR1.27 trillion in 2016.

Utang Obligasi

Perseroan menerbitkan obligasi korporasi sejumlah Rp700,00 miliar pada bulan Juli 2013 dengan bunga tetap sebesar 8,9% per tahun dan akan jatuh tempo pada 5 Juli 2018. Tujuan dari penerbitan ini adalah 39% untuk pelunasan *outstanding* kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan 61% untuk belanja modal dan atau modal kerja dalam rangka optimalisasi 11 unit Pabrik Gula milik Perseroan. Peringkat obligasi yang akan jatuh tempo tanggal 5 Juli 2018 adalah BBB/stabil.

Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan membukukan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp858,17 miliar pada tahun 2017 dibandingkan Rp751,88 miliar setahun sebelumnya. Peningkatan nilai liabilitas imbalan kerja ini terutama akibat peningkatan nilai kini kewajiban imbalan pasti dari Rp1,05 triliun di tahun 2016 menjadi Rp1,17 triliun satu tahun berikutnya.

EKUITAS

Posisi ekuitas Perseroan relatif stabil sebesar Rp9,05 triliun pada tahun 2017 dibandingkan Rp9,04 triliun di tahun 2016. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan kepentingan non pengendali sebesar 16,52% menjadi Rp45,78 triliun di tahun 2017 dibandingkan Rp39,28 miliar di tahun sebelumnya. Di sisi lain, saldo laba dan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun masing-masing sebesar Rp3,52 triliun.

Bonds Payables

The Company issued corporate bonds amounted to IDR700.00 billion in July 2013 with a fixed interest rate of 8.9% per year with maturity date on July 5, 2018. The purpose of this issuance was for the repayment of outstanding credit (39%) at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and 61% for capital expenditure and or working capital in order to optimize 11 units of Sugar Factory owned by the Company. The bond rating with maturity date on July 5, 2018 is BBB/stable.

Employee Benefits Liability

In 2017, the Company recorded employee benefits liability of IDR858.17 billion compared to IDR751.88 billion in previous year. The increase in employee benefits liability was mainly due to the increase in the present value of benefit obligation from IDR1.05 trillion in 2016 to IDR1.17 trillion one year later.

EQUITY

In 2017, the Company's equity position was relatively stable at IDR9.05 trillion compared to IDR9.04 trillion in 2016. This was influenced by the increase in non-controlling interests by 16.52% to IDR45.78 trillion in 2017 compared to IDR39.28 billion in previous year. On the other side, retained earnings and equity attributable to owners of the parent entity declined by IDR3.52 trillion respectively.

(Dalam jutaan Rupiah) / (In IDR Million)

	2017	2016	Perubahan *Changes*	
			Nominal	%
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh *Issued and fully paid Capital*	1.845.596	1.845.596	0,00	0,00%
Modal Sumbangan *Donated capital*	10.062	10.062	0,00	0,00%
Komponen Ekuitas Lainnya *Other component of equity*	489	489	0,00	0,00%
Penghasilan Komprehensif Lainnya *Other comprehensive income*	7.101.140	7.101.140	0,00	0,00%
Saldo laba *Retained earnings*	51.204	54.724	-3.520,43	-6,43%
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk *Equity attributable to owners of the parent entity*	9.008.490	9.012.011	-3.520,43	-0,04%
Kepentingan Non Pengendali *Non-controlling interests*	45.776,25	39.285,74	6.490,50	16,52%
Total Ekuitas *Total Equity*	9.054.266,37	9.051.296,30	2.970,07	0,03%
Total Liabilitas dan Ekuitas *Total Liabilities and Equity*	13.073.841,19	13.064.018,85	9.822,35	0,08%

ANALISA ARUS KAS KONSOLIDASI

ANALYSIS OF CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

(Dalam jutaan Rupiah)

(In IDR Million)

	2017	2016	Perubahan	
			Nominal	%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi *Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities*	206.489,59	-349.276,28	555.765,87	-159,12%
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi *Net Cash Flows Used in Investing Activities*	-108.467,80	-382.752,53	274.284,73	-71,66%
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan *Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities*	-13.761,01	571.569,99	-585.331,00	-102,41%
(Penurunan) Kenaikan Neto Kas Dan Setara Kas *Net increase (decrease) in cash and cash equivalents*	84.260,77	-160.458,82	244.719,60	-152,51%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	235.427,13	395.885,96	-160.458,82	-40,53%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	319.687,91	235.427,13	84.260,77	35,79%

Arus kas dari aktivitas operasi

Perseroan membukukan surplus arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp206,49 miliar di tahun 2017. Pencapaian ini jauh lebih baik dibandingkan dari defisit Rp349,28 miliar pada tahun 2016. Perbaikan arus kas dari aktivitas operasi ini ditunjang oleh penurunan pembayaran kepada pemasok dari Rp2,50 triliun menjadi Rp1,44 triliun di tahun 2017.

Cash Flows from Operating Activities

The Company recorded surplus in net cash flows provided by operating activities of IDR206.49 billion in 2017. This achievement was significantly better compared to the deficit of IDR349.28 billion in 2016. The improvement in cash flows from operating activities was supported by the decline in cash paid to suppliers from IDR2.50 trillion to IDR1.44 trillion in 2017.

Arus kas dari aktivitas investasi

Perseroan membukukan defisit arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi yang lebih rendah sebesar di tahun 2017 sebesar –Rp108,47 miliar dari Rp-382,75 miliar di tahun sebelumnya seiring dengan realisasi capex berupa perolehan aset tetap yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Perolehan aset tetap turun dari Rp377,75 miliar menjadi Rp108,22 miliar di tahun 2017.

Cash Flows from Investing Activities

The Company recorded deficit in net cash flows used in investing activities of –IDR108.47 billion in 2017 compared to IDR383.75 billion in previous year as the realization of capex in the form of lower acquisition of fixed assets compared to previous period. Acquisition of fixed assets declined from IDR377.75 billion to IDR108.22 billion in 2017.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Perseroan membukukan defisit arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp13,76 miliar di tahun 2017 meski melakukan pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp1,21 triliun di tahun 2017 dibandingkan Rp990,21 miliar pada tahun sebelumnya. Hal ini ditopang dengan perolehan

Cash Flows from Financing Activities

The Company recorded deficit in cash flows from financing activities of IDR13.76 billion in 2017 despite making installment payments of IDR1.21 trillion in 2017 compared to IDR990.21 billion in previous year. This was supported by the acquisition of additional loans from related parties

tambahan utang dari pihak berelasi sebesar Rp450,00 miliar di tahun 2017 disamping utang bank. Selain itu, Perseroan tidak melakukan pembayaran dividen di tahun 2017.

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Posisi kas dan setara kas akhir tahun 2017 naik menjadi Rp319,69 miliar dibandingkan posisi tahun 2016 sebesar Rp235,43 miliar. Kenaikan ini ditopang oleh kenaikan neto kas dan setara kas menjadi Rp84,26 miliar di tahun 2017.

RASIO KEUANGAN PENTING

Profitabilitas Perseroan

Perseroan mampu menunjukkan perbaikan rasio-rasio profitabilitas seiring dengan perbaikan pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2017. Rasio *margin* laba bruto naik menjadi 19,83% pada tahun 2017 dibandingkan 12,16% setahun sebelumnya. Sejalan dengan perbaikan rasio ini, *margin* laba usaha dan *margin* laba bersih Perseroan membaik menjadi 8,73% dan 1,86% pada tahun 2017. Selain itu, rasio imbal hasil atas aset dan ekuitas membaik menjadi 0,37% dan 0,53% ditopang oleh pencapaian laba bersih yang lebih baik di tahun 2017 dibandingkan rugi usaha yang di tahun sebelumnya.

of IDR450.00 billion in 2017 in addition to bank loans. Furthermore, the Company has not made any dividend payments in 2017.

Cash and Cash Equivalents at End of Year

The Company's cash and cash equivalents at end of 2017 increased to IDR319.69 billion compared to previous year's position of IDR235.43 billion. The increase was supported by the increase in net cash and cash equivalents to IDR84.26 billion in 2017.

KEY FINANCIAL RATIO

Profitability of the Company

In 2017, the Company was able to show improvement in its profitability ratios in line with the improvement of its revenues. The Company's gross profit margin ratio increased to 19.83% in 2017 compared to 12.16% in previous year. In line with the improved ratio, the Company's operating profit margin and net profit margin improved to 8.73% and 1.86% in 2017. In addition, the return on assets and return on equity ratio improved to 0.37% and 0.53% respectively, supported by the increase in net profit in 2017 compared to previous year's operating loss.

Tabel Rasio-Keuangan / Table of Financial Ratio

	2017	2016
Margin laba bruto *Gross Profit Margin*	19,83%	12,16%
Margin EBITDA *EBITDA Margin*	18,18%	7,36%
Margin laba (rugi) usaha *Operating Profit (Loss) Margin*	8,73%	-1,37%
Margin laba (rugi) bersih *Net Profit (Loss) Margin*	1,86%	-6,56%
Imbal hasil atas aset *Return on Assets*	0,37%	-1,24%
Imbal hasil atas ekuitas *Return on Equity*	0,53%	-1,63%

Kemampuan Membayar Hutang

Tingkat kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi tercermin dari tingkat likuiditas yang dimiliki. Indikator yang digunakan oleh Perseroan untuk mengukur tingkat likuiditas adalah rasio lancar

Ability to Pay Debt

The Company's ability to meet the liabilities that must be met immediately is reflected in the level of liquidity owned. The indicator used by the Company to measure the liquidity level is the current ratio that compares its current assets to

yang membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar Perseroan. Meski mengalami penurunan, rasio lancar Perseroan pada 2017 masih terjaga di atas 100% pada tahun 2017. Rasio lancar Perseroan sebesar 116,14% pada tahun 2017 dari 221,85% setahun sebelumnya seiring dengan peningkatan utang jangka pendek.

Meski demikian, secara umum likuiditas Perseroan masih terjaga dengan baik.Perseroan secara konsisten mengelola risiko likuiditas melalui pengawasan proyeksi dan arus kas aktual yang diiringi dengan pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Risiko likuiditas Perseroan berkaitan erat dengan risiko kredit, dimana Perseroan memberikan kredit kepada pelanggan, piutang petani tebu rakyat dan penempatan rekening koran dan deposito pada bank. Terkait piutang usaha, Perseroan menerapkan kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Semua pelanggan yang melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

current liabilities. Despite having a decline, the Company's current ratio in 2017 remained well above 100% in 2017. The Company's current ratio of 116.14% in 2017 compared to 221.85% in previous year was in line with the increase in short-term loans.

However, in general, the Company's liquidity is still well maintained. The Company consistently manages liquidity risk through the supervision of projection and actual cash flows as well as the maturity date of financial assets and liabilities. The Company's liquidity risk is closely related to credit risk, whereby the Company provides credit to customers, sugarcane farmers receivables and placement of current accounts and time deposits with banks. With regard to trade receivables, the Company has implemented a policy to ensure that product sales is only made to reliable customers with good track record or credit history. All customers who make a purchase with credit shall go through credit verification procedure.

	2017	2016
Rasio lancar *Current ratio*	116,14%	221,85%
Rasio cepat *Quick ratio*	79,18%	144,78%
Rasio utang terhadap aset *Debt to asset ratio*	29,66%	34,24%
Rasio utang terhadap ekuitas *Debt to equity ratio*	42,16%	45,76%

Rasio-rasio Solvabilitas

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan membaik menjadi 42,16% pada tahun 2017 dibandingkan 45,76% setahun sebelumnya. Perbaikan ini sejalan dengan membaiknya ekuitas Perseroan terutama ditopang oleh penguatan saldo laba pada tahun 2017. Selain itu, rasio utang terhadap aset juga membaik ditandai dengan penurunan rasio ini menjadi 29,66% di tahun 2017 dari 34,24% setahun sebelumnya.

Kolektabilitas

Rata-rata hari penagihan piutang membaik menjadi 126 hari atau lebih epat dibandingkan dengan rata-rata hari penagihan piutang sebesar 153 hari di tahun 2016.

Solvency Ratios

In 2017, the Company's debt to equity ratio improved to 42.16% compared to 45.76% in previous year. This improvement was in line with the improvement in the Company's equity, mainly supported by the strengthening of retained earnings in 2017. In addition, the debt to asset ratio also improved, which was marked by the decline to 29.66% in 2017 from 34.24% in previous year.

Collectability

The average days of receivables collection has improved to 126 days or faster compared to the average days of receivables collection of 153 days in 2016.

	2017	2016
Rasio perputaran persediaan *Inventory turnover ratio*	2,89x	2,39x
Rasio perputaran piutang usaha *Account receivables turnover ratio*	6,39x	3,61x
Jumlah hari perputaran piutang usaha *Number of account receivables turnover day(s)*	126 hari	153 hari

STRUKTUR PERMODALAN

Ekuitas masih memiliki porsi dominan terhadap struktur permodalan Perseroan dengan porsi sebesar 69,25% di tahun 2017. Sementara itu liabilitas memiliki kontribusi sebesar 30,75% dengan porsi utang dari bank dan perusahaan pembiayaan mencapai 12,62% sedangkan pendanaan melalui penerbitan obligasi memiliki porsi 5,35%.

CAPITAL STRUCTURE

Equity still has a dominant portion of the Company's capital structure with a portion of 69.25% in 2017. Meanwhile, liabilities have a contribution of 30.75% with the debt portion of banks and finance companies reaching 12.62% while funding through the issuance of bonds has a portion 5.35%.

(Dalam jutaan Rupiah) (In IDR Million)

	2017	%	2016	%
Utang: *Payables:*				
Utang bank jangka pendek *Short-term bank loans*	475.713,71	3,64%	220.418,59	1,69%
Utang jangka panjang-jatuh tempo dalam satu tahun *Current portion of long-term loans*	159.352,72	1,22%	139.935,11	1,07%
Utang jangka panjang-jatuh tempo lebih dari satu tahun *Long term loans with maturity more than one year*	1.014.435,70	7,76%	1.256.966,46	9,62%
Obligasi *Bonds*	700.000,00	5,35%	700.001,00	5,36%
Total	2.349.502,13	17,97%	2.317.321,15	17,74%
Liabilitas jangka pendek *Current liabilities*	2.146.972,23	16,42%	1.303.876,90	9,98%
Liabilitas jangka panjang *Non-current liabilities*	1.872.602,59	14,32%	2.708.845,65	20,74%
Total Liabilitas *Total Liabilities*	4.019.574,83	30,75%	4.012.722,55	30,72%
Total Ekuitas *Total Equity*	9.054.266,37	69,25%	9.051.296,30	69,28%
Total liabilitas dan ekuitas *Total Liabilities and Equity*	13.073.841,19	100,00%	13.064.018,85	100,00%

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Perseroan memiliki kewajiban untuk mengelola permodalan dalam rangka melindungi kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan dan entitas anak. Selain karena sifat bisnis Perseroan yang wajib memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan juga nilai tambah serta manfaat bagi pemangku kepentingan yang lain, kelangsungan usaha Perseroan juga penting karena Perseroan juga menjalankan peran strategis nasional sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam merevitalisasi industri gula nasional.

Struktur permodalan Perseroan merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri, yaitu ekuitas Perseroan, dengan penggunaan modal eksternal, yaitu liabilitas Perseroan. Modal eksternal dapat berbentuk pinjaman/hutan bank, hutang usaha maupun jeniscpinjaman yang lain. Sementara itu ekuitas didapatkan dari penempatan modal, penghasilan komprehensif tahunan, dan dalam beberapa kondisi tertentu Penempatan Modal Negara (PMN). Pada tahun 2016, Perseroan mendapatkan setoran dari PMN sebesar Rp975,00 miliar.

Pada tahun 2017, rasio utang berbunga terhadap ekuitas masih dikelola dengan baik sebesar 42,16% dibandingkan 45,76% di tahun sebelumnya. Sementara itu rasio utang terhadap aset sebesar 29,66% di tahun 2017, lebih rendah dibandingkan rasio tahun sebelumnya sebesar 34,24%.

Dalam pengelolaan struktur permodalan, Perseroan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Menjaga perbandingan antara total pinjaman (hutang) berbunga dengan total ekuitas (*debt-to-equity ratio*) tidak lebih dari 2,5:1.
2. Menjaga perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1.
3. Memelihara perbandingan EBITDA dan beban bunga (*interest coverage ratio*) tidak kurang dari 2,5:1.

IKATAN MATERIAL TERKAIT INVESTASI BARANG MODAL

Sampai dengan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, Perseroan tidak memilki ikatan material terkait investasi barang modal sehingga Perseroan tidak menyajikan informasi terkait nama pihak yang melakukan ikatan; tujuan iakatan; sumber dana; mata uang transaksi; dan langkah perlindungan risiko mata uang.

THE MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The Company has an obligation to manage its capital in order to protect its ability to maintain its business continuity as well as its subsidiaries. In addition to the Company's business nature, which is required to provide returns for shareholders as well as added value and benefits for other stakeholders, its business continuity is also important because the Company also performs national strategic role as the Government's extension in revitalizing the national sugar industry.

The Company's capital structure is a balance between the use of its own capital, namely the Company's equity, with the use of external capital, namely the Company's liabilities. External capital may be in the form of bank loans, trade payables or other types of loans. Meanwhile, equity is derived from placement of capital, placements, annual comprehensive income, and under certain conditions from the State Equity Participation (PMN). In 2016 the Company received PMN funds of IDR975 billion.

In 2017, the interest-bearing debt to equity ratio was still properly managed by 42.16% compared to 45.76% in previous year. Meanwhile, the debt to asset ratio was 29.66% in 2017, lower than previous year's ratio of 34.24%.

In the its capital structure management, the Company applies the following policies:

1. Maintain a comparison between total interest-bearing debts with total equity (debt-to-equity ratio) of not more than 2.5: 1.
2. Maintain a comparison between current assets and current liabilities of not less than 1: 1.
3. Maintain a comparison of EBITDA and interest coverage ratio of not less than 2.5: 1.

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL EXPENDITURE

Until the period ended on December 31, 2017, the Company has not entered into any material commitment for capital expenditure, hence the Company does not provide information relating to the name of party having the material commitment; objective of commitment; source of funds; currency of transaction; and currency risk protection measures.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Perseroan membukukan investasi barang modal sebesar Rp300,51 miliar pada tahun 2017. Investasi barang modal ini dilakukan untuk menopang kegiatan operasional Perseroan dan ekspansi bisnis yang dilakukan di sepanjang tahun 2017. Jenis investasi barang modal dan nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku 2017 adalah sebagai berikut.

REALIZED CAPITAL EXPENDITURE IN THE LAST FISCAL YEAR

The Company recorded capital expenditure of IDR300.51 billion in 2017. The capital expenditure was conducted to support the Company's operational activities and business expansion throughout 2017. The type and value of capital expenditure incurred in 2017 fiscal year are as follows:

Tabel Nilai Investasi Barang Modal (RpMiliar)

Table of Capital Expenditure Value

Investasi Barang Modal *Capital Expenditure*	**2017**
Gedung & Penataran *Building &*	52,19
Mesin & Instalasi *Machinery & Installation*	167,33
Jalan & Jembatan *Roads Bridges*	0,52
Alat Pengangkutan *Transport Equipment*	3,13
Alat Pertanian *Farming Equipment*	4,08
Inventaris Kantor/Rumah *Office/House Inventory*	73,25
Total	300,51

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Pencapaian Target Tahun 2017

Kinerja Perseroan di tahun 2017 dipengaruhi oleh tantangan perekonomian Indonesia yang tumbuh terbatas karena dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tantangan lainnya berasal dari penurunan produksi gula Perseroan di tahun 2017 menjadi 342,42 ribu ton dibandingkan 380,40 ribu ton di tahun sebelumnya dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi Indonesia tersebut.

Ditengah tantangan yang dihadapi di sepanjang tahun 2017 tersebut, Perseroan mampu menekan beban pokok penjualan dibawah target yang ditetapkan sebesar Rp2,07 triliun. Namun demikian, pencapaian pendapatan usaha yang dibawah target yang mencapai Rp2,59 triliun mempengaruhi profitabilitas Perseroan seperti laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan lebih rendah daripada target yang telah ditetapkan sebelumnya masing-masing senilai Rp93,94 miliar dan Rp64,75 miliar. Secara kumulatif, pencapaian tahun 2017 lebih baik dibandingkan kinerja tahun 2016 dimana Perseroan membukukan rugi sebelum pajak dan rugi tahun berjalan.

COMPARISON OF TARGET VS. REALIZATION

2017 Target Achievement

The Company's performance in 2017 was influenced by the challenges of the Indonesian economy, which slightly grew due to the slow growth of household consumption. Other challenges derived from the decline of the Company's sugar production in 2017 to 342.42 thousand tons compared to 380.40 thousand tons in previous year as affected by the Indonesia's macro-economic condition.

In the midst of challenges faced throughout 2017, the Company was able to reduce cost of sales below the defined target of IDR2.07 trillion. Nevertheless, the achievement of operating revenues of which below the target amounted to IDR2.59 trillion has affected the Company's profitability, such as profit before tax and profit for the year, which were lower than the previously defined target of IDR93.94 billion and IDR64.75 billion, respectively. Cumulatively, the Company's achievement in 2017 was better compared to its performance in 2016 where the Company recorded loss before tax and loss for the year.

Sejalan dengan kinerja profitabilitas tersebut, aset dan liabilitas Perseroan juga tumbuh menjadi Rp13,07 triliun dan Rp4,02 triliun atau lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, Perseroan mampu membukukan ekuitas sebesar Rp9,05 triliun atau melebihi target yang ditetapkan senilai Rp8,94 triliun ditopang oleh peningkatan saldo laba Perseroan.

In line with such profitability performance, the Company's assets and liabilities also grew to IDR13.07 trillion and IDR4.02 trillion or lower than the defined target. Meanwhile, the Company was able to record equity of IDR9.05 trillion or exceeded the defined target of IDR8.94 trillion, which supported by the increase in the Company's retained earnings.

	2017	
	Target (Rp miliar) *Target (IDR billion)*	**Realisasi (Rp miliar)** *Realization (IDR billion)*
Pendapatan *Revenues*	3.279,14	2.593,94
Beban Pokok Penjualan *Cost of Sales*	2.606,65	2.066,66
Laba Sebelum Pajak *Profit Before Tax*	127,65	93,94
Laba Tahun Berjalan *Profit for the Year*	94,49	64,75
Jumlah Aset *Total Assets*	13.312,46	13.073,84
Jumlah Liabilitas *Total Liabilities*	4.367,67	4.019,57
Ekuitas *Equity*	8.944,79	9.054,27
Liabilitas + Ekuitas *Liabilities + Equity*	13.312,46	13.073,84

Proyeksi 2018

Perseroan menetapkan target tahun 2018 secara konservatif meski Pemerintah memperkirakan ekonomi tumbuh lebih baik oleh sebesar 5,4% di tahun 2018. Tantangan daya beli masyarakat dan proses transisi politik yang dimulai tahun ini menjadi pertimbangan Perseroan. Sejalan dengan proyeksi peningkatan produksi gula menjadi sekitar 397,34 ribu ton di tahun 2017, Perseroan memproyeksikan pertumbuhan aset menjadi Rp14,05 triliun yang diikuti dengan peningkatan liabilitas menjadi Rp4,78 triliun.

Sejalan dengan kenaikan aset ini, Perseroan memperkirakan pendapatan usaha tumbuh menjadi Rp2,99 triliun. Kenaikan pendapatan usaha ini diharapkan mampu mendorong pencapaian yang lebih baik atas laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan menjadi Rp140,26 miliar dan Rp104,62 miliar di tahun 2018.

2018 Projection

The Company sets a conservative target for 2018 even though the Government expects the economy to grow better by 5.4% in 2018. The challenge in public purchasing power as well as political transition process that started this year become the consideration of the Company. In line with the projected increase in sugar production to approximately 397.34 thousand tons in 2018, the Company projects asset growth to IDR14.05 trillion followed by the increase in liabilities to IDR4.78 trillion.

In line with the increase in assets, the Company expects revenues to grow to IDR2.99 trillion. The increase in operating revenues is expected to encourage better achievement of profit before tax and profit for the year to IDR140.26 billion and IDR104.62 billion respectively in 2018.

	Proyeksi 2018 (Rp miliar) *2018 Projection (IDR billion)*
Pendapatan *Revenues*	2.997,35
Beban Pokok Penjualan *Cost of Sales*	2.336,88
Laba Sebelum Pajak *Profit Before Tax*	140,26
Laba Tahun Berjalan *Profit for the Year*	104,62
Jumlah Aset *Total Assets*	14.049,58
Jumlah Liabilitas *Total Liabilities*	4.779,13
Ekuitas *Equity*	9.270,45
Liabilitas + Ekuitas *Liabilities + Equity*	14.049,58

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Pada tanggal 5 Februari 2018, Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Penggunaan Tambahan Dana PMN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku pemegang saham Perusahaan. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan kondisi, baik secara ekonomi maupun sosial yang menyebabkan program awal penggunaan dana PMN tidak layak untuk dilanjutkan.

Perusahaan telah memperoleh Laporan Studi Kelayakan Realokasi Penggunaan Dana PMN 2015 PTPN X dari GMPJ Consulting tanggal 13 Februari 2018, serta Laporan Hasil Reviu atas Rencana Realokasi Penggunaan Tambahan Dana PMN Tahun 2015 pada PT Perkebunan Nusantara X oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") Jawa Timur yang mendukung perubahan ini. Program kegiatan PMN setelah realokasi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas giling PG Gempolkrep (750 m)
2. Pemantapan kinerja pabrik Bioethanol di PG Gempolkrep
3. Pengembangan lahan perkebunan

Pada tanggal 27 Maret 2018, Menteri BUMN dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku pemegang saham Perusahaan telah menyetujui perubahan penggunaan tambahan dana PMN yang tertuang dalam Surat Persetujuan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara X No. S-172/MBU/03/2018.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTANT'S REPORTING DATE

On February 5, 2018, the Company submitted Application for Approval on the Amendment to the Use of Additional PMN Funds to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as the Company's shareholder. This was done due to the changes in economic and social conditions, which caused the initial program to use PMN funds was no longer feasible to proceed.

The Company has obtained the Feasibility Study Report of Reallocation of the Company's 2015 PMN from GMPJ Consulting on February 13, 2018, and Review Result Report of Reallocation Plan for the Company's 2015 Funds Utilization by the Financial and Development Supervisory Agency ("BPKP") East Java, which supported the changes. After reallocation, PMN activity programs are as follows:

1. Increase of milling capacity of PG Gempolkrep (750 m);
2. Stabilization of Bioethanol plant performance at PG Gempolkrep; and
3. Development of plantation areas.

On March 27, 2018, the Minister of SOEs and PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as the Company's shareholder has approved the Amendment to the Use of Additional PMN Funds as stated in the Letter of Approval of the Company's Shareholders No. S-172/MBU/03/2018.

Dampak Terhadap Kinerja dan Risiko Usaha

Persetujuan Menteri BUMN dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku pemegang saham terhadap perubahan penggunaan tambahan dana PMN ini diharapkan berdampak positif terhadap PTPN X karena akan mempercepat ekspansi bisnis Perseroan. Pengembangan lahan perkebunan tebu Perseroan dengan menggunakan dana PMN senilai Rp100,00 miliar diharapkan akan menambah lahan tebu. Sementara itu, pemantapan kinerja pabrik Bioethanol di PG Gempolkrep dengan anggaran senilai Rp125,00 miliar melalui diversifikasi produk baru sehingga mengurangi risiko konsentrasi terhadap produk tertentu. Yang terakhir terkait dengan peningkatan kapasitas giling PG Gempolkrep dengan belanja modal senilai Rp750,00 miliar berasal dari dana PMN diharapkan meningkatkan kapasitas produksi untuk mengantisipasi peningkatan produksi di masa mendatang yang sejalan dengan rencana Perseroan menambah lahan perkebunan tebu.

PROSPEK USAHA 2018

Proyeksi perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 sebesar 5,4% didukung oleh kontribusi konsumsi yang meningkat baik oleh rumah tangga maupun pemerintah. Perkiraan inflasi yang lebih terkendali diharapkan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,1%. Konsumsi gula sebagai salah satu produk pangan strategis yang digunakan untuk berbagai produk pangan maupun olahan diharapkan meningkat seiring dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2018.

Untuk menjamin ketersediaan gula diperlukan pasokan gula di pasar domestik yang memadai. Pasokan gula tersebut dapat dipenuhi melalui beberapa sumber yakni stok awal tahun, impor dan produksi gula. Stok awal gula nasional cenderung mengalami penuruanan dalam kurun waktu empat tahun terakhir dengan rata-rata stok awal gula sebesar 1.138,12 ribu ton. Kontribusi minimal berasal dari impor dengan rata-rata sebesar 59,76 ribu ton. Pasokan gula terbesar berasal dari total produksi meski juga mengalami kecenderungan penurunan selama periode 2014 hingga 2017 dengan rata-rata sebesar 5.352,25 ribu ton. Peningkatan kontribusi dari total produksi terutama gula yang diproduksi di dalam negeri sangat dibutuhkan untuk menopang ketersediaan gula sebagai salah satu bahan pangan strategis.

Impact on Business Performance and Risks

The approval of the Minister of SOEs and PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as the Company's shareholders to amend the use of additional PMN funds is expected to have a positive impact on the Company as it will accelerate its business expansion. The development of the Company's sugarcane plantation with PMN funds of IDR100.00 billion is expected to enlarge sugarcane plantations. Meanwhile, the stabilization of Bioethanol plant performance at PG Gempolkrep with a budget of IDR125.00 billion through diversification of new products thereby reducing the risk of concentration on certain products. The last one is related to the increase in the milling capacity of PG Gempolkrep with capital expenditure of IDR750.00 billion derived from PMN funds, which is expected to increase production capacity to anticipate future production increases in line with the Company's plan to enlarge sugarcane plantation areas.

2018 BUSINESS PROSPECTS

The projected improvement of Indonesia's economic growth in 2018 by 5.4% is supported by the increased contribution of consumption by both households and the government. Forecast on a more controlled inflation is expected to support growth in household consumption by 5.1%. Sugar consumption as one of the strategic food products used for various food products and processed products is expected to increase along with the growth of household consumption in 2018.

In order to ensure the availability of sugar, a sufficient supply of sugar in the domestic market is required. Supply of sugar can be fulfilled through several sources such as beginning of year stock, import and sugar production. The initial stock of national sugar tends to decline in the last four years with an average initial stock of sugar of 1,138.12 thousand tons. Minimum contribution comes from imports with an average of 59.76 thousand tons. The largest sugar supply comes from the total production although it has also experienced a declining trend during the period of 2014 to 2017 with an average of 5,352.25 thousand tons. Increased contribution of total production, particularly sugar produced domestically, is needed to sustain the availability of sugar as one of the strategic comestibles.

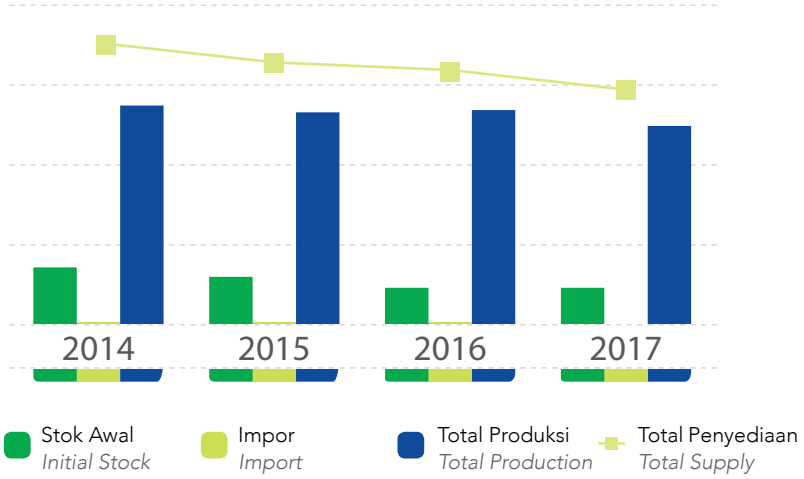

Sumber: Jurnal Gula Nasional, Des 2017

Source: National Sugar Journal, Dec 2017

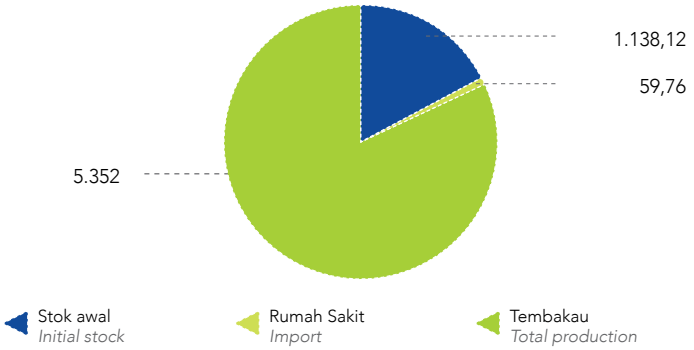

Sumber: Jurnal Gula Nasional, Des 2017

source: The Journal Sugar National, Dec 2017

Program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah sebagai implementasi program Nawa Cita yang mencakup peningkatan produksi gula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gula domestik. Pemerintah mentargetkan produksi gula sebesar 3,30 juta ton di tahun 2018, lebih tinggi dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar 3,00 juta ton (sumber: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018). Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut Pemerintah memiliki rencana mengembangkan tanaman tebu 15 ribu hektar dan menyediakan benih perkebunan 982 hektar. Kedua program tersebut dijalankan di 9 provinsi yang menjadi sentra produksi tebu.

Dengan demikian, Perseroan memandang program ketahanan pangan khususnya untuk produk gula yang dikombinasikan dengan penurunan produksi gula nasional di tahun 2017 dan potensi peningkatan konsumsi gula dimasa mendatang seiring dengan pertambahan penduduk menjadi faktor kunci untuk prospek pertumbuhan bisnis PTPN X di masa mendatang. Dari neraca gula nasional terlihat bahwa

The food security program promoted by the government as an implementation of Nawa Cita program, which includes the increasing of sugar production, aims to meet the domestic demand for sugar. The government aims to produce 3.30 million tons of sugar by 2018, higher than previous year's target of 3.00 million tons (Source: 2018 Government Work Plan (RKP)). Therefore, in order to achieve the target, the Government has a plan to develop 15 thousand hectares of sugarcane and provide seeds for 982 hectares of plantation area. Both programs are conducted in 9 provinces, which are the centers of sugarcane production.

Thus, the Company views the food security program, especially for sugar products, combined with the decline of national sugar production in 2017 and the potential of increased sugar consumption in the future as well as the population growth, become the key factors for the Company's prospect of business growth. From the national sugar account, it can be seen that the distribution level (or

tingkat distribusi (atau konsumsi) melebihi total produksi gula selama tahun 2014 hingga 2017. Rata-rata distribusi gula nasional mencapai 5.485,47 ribu ton selama 4 (empat) tahun terakhir dibandingkan rata-rata produksi sebesar 5.352,25 ribu ton. Sebagai catatan, dari rata-rata total produksi tersebut hanya sekitar 2.423,48 ribu ton diproduksi oleh pabrik gula di Indonesia sehingga hal ini menjadikan prospek usaha gula masih menjanjikan di masa mendatang.

consumption) exceeds the total sugar production during 2014 to 2017. The average national sugar distribution reached 5,485.47 thousand tons during the last 4 (four) years compared to the average production of 5,352.25 thousand tons. As a note, from the average total production, there is only about 2,423.48 thousand tons produced by sugar factories in Indonesia, which makes the prospect of sugar business is still promising in the future.

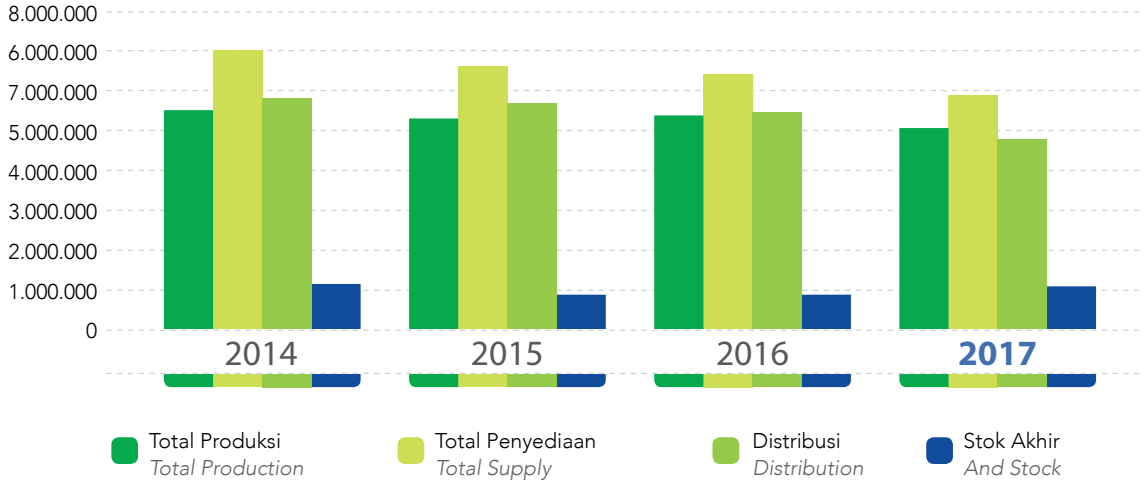

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Gula sebagai produk utama Perseroan adalah salah satu bahan pangan strategis nasional yang diatur oleh Pemerintah termasuk dalam hal pemasaran. Pemasaran produk gula Perseroan dilakukan di dalam negeri melalui penjualan ke BULOG berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Perum BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional, dimana gula menjadi salah satu komoditi pangan pokok sehingga seluruh gula produksi milik BUMN harus dijual melalui BULOG. Pada tanggal 19 September 2017, Perseroan dan BUMN produsen gula lainnya mengadakan kesepakatan dengan Perum BULOG dimana Perum BULOG setuju untuk melakukan *off-taker* gula milik BUMN produsen gula dengan harga dan kuantum tertentu.

Dengan ketentuan tersebut, apabila pembeli/distributor ingin membeli gula, maka pembeli tersebut harus menjadi mitra/rekanan BULOG. Dalam hal penetapan harga, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk menentukan patokan harga gula yang berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak peraturan tersebut.

MARKETING ASPECT

Marketing Strategy

Sugar as the Company's main product is one of the national strategic comestibles regulated by the Government, including in terms of marketing. The marketing of the Company's sugar products is carried out domestically through sales to BULOG based on the Presidential Regulation No. 48/2016 concerning the Assignment to Perum BULOG for national food security, in which sugar becomes one of the basic food commodities, hence all SOE-produced sugar had to be sold through BULOG. On September 19, 2017, the Company and other state-owned sugar producers entered into an agreement with Perum BULOG whereby Perum BULOG agreed to conduct off-taker of SOE-produced sugar at certain quantities and price.

With these conditions, if the buyer/distributor wants to purchase sugar, then the buyer must become a partner of BULOG. In terms of pricing, the Ministry of Trade issued Minister of Trade Regulation of the Republic of Indonesia to determine the benchmark of sugar price applicable for a period of 4 (four) months since the issuance of the regulation.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 27/M-DAG/PER/ 5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen menetapkan harga pembelian gula di tingkat petani sebesar Rp9.100,-/kg dan penjualan ke konsumen Rp12.500,-/kg ketentuan ini sampai Juli 2017 masih berlaku. Kemudian pemerintah menetapkan bahwa Bulog membeli gula petani dan PTPN seharga Rp 9.700,-/kg (hasil rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian pada bulan Agustus 2017).

Minister of Trade Regulation of the Republic of Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017 concerning the Determination of Reference Price for Purchase at Farmers and Reference Price for Sales to Customers, determined the purchase price of sugar at farmers level of IDR9,100/kg and sales to customers IDR12,500/kg. This requirement was still valid until July 2017. Then, the government determined that Bulog shall purchase sugar from farmers and the Company for IDR9,700/kg (result of coordination meeting at the Coordinating Minister for Economic Affairs office in August 2017).

Pangsa Pasar PTPN X di Industri Gula

Tabel-tabel berikut menjelaskan posisi PTPN X di industri nasional yang dapat dilihat dari beberapa cakupan:

The Company's Market Share in Sugar Industry

The following tables describe the Company's position in the national industry, which can be seen from several capacities:

Pangsa Pasar Perseroan terhadap Produksi Gula Nasional

Sejalan dengan penurunan produksi gula nasional di tahun 2017, pangsa pasar Perseroan terhadap produksi gula nasional mengalami pelemahan. Penurunan produksi nasional menjadi 2,12 juta ton gula di tahun 2017 dari 2,20 juta ton gula setahun sebelumnya menyebabkan pangsa pasar Perseroan melemah menjadi 16,20% di tahun 2017 dari 17,11% di tahun sebelumnya.

The Company's Market Share of National Sugar Production

In line with the decline in national sugar production in 2017, the Company's market share of national sugar production has declined. The decline in national production to 2.12 million tons of sugar in 2017 from 2.20 million tons of sugar in previous year has caused the Company's market share to decline to 16.20% in 2017 from 17.11% in previous year.

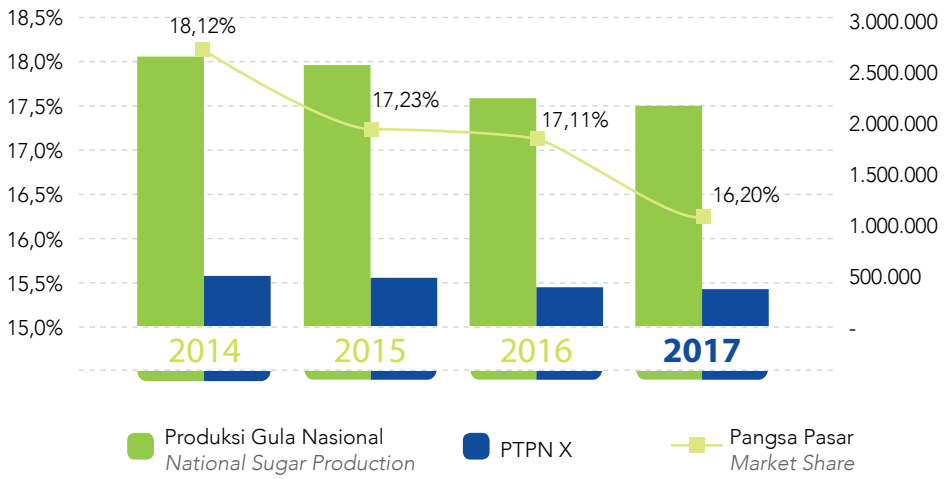

Pangsa Pasar Perseroan terhadap Produksi Gula BUMN

Pangsa pasar Perseroan terhadap gula yang dihasilkan BUMN sedikit melemah menjadi 30,23% di tahun 2017 dibandingkan pangsa pasar sebesar 30,84% di tahun 2016 saat produksi gula oleh BUMN turun menjadi 1,14 juta di tahun 2017 ton dari menjadi 1,22 juta ton di tahun 2016.

The Company's Market Share of SOE Sugar Production

In 2017, the Company's market share of SOE-produced sugar slightly declined to 30.23% compared to 30.84% market share in 2016 when SOE-produced sugar declined to 1.14 million in 2017 tons from 1.22 million ton in 2016.

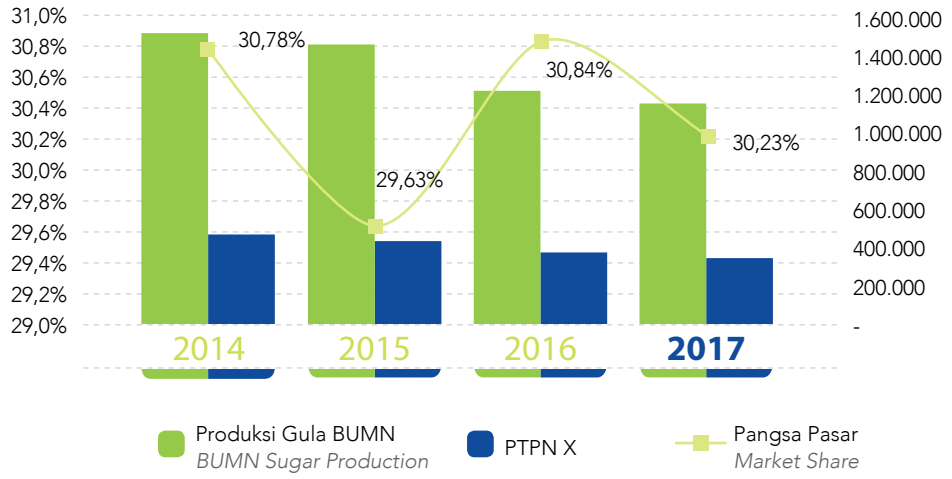

Pangsa Pasar Perseroan terhadap Produksi Gula di Pulau Jawa

Pangsa pasar Perseroan terhadap gula yang dihasilkan produsen gula di Pulau Jawa turun menjadi 26,64% di saat produksi gula di wilayah ini mengalami penurunan menjadi 1,29 juta ton di tahun 2017. Pada tahun 2016, pangsa pasar Perseroan sebesar 28,49% saat produksi gula di Jawa mencapai 1,32 juta ton.

The Company's Market Share of Sugar Production in Java Island

The Company's market share of sugar produced by sugar producers in Java declined to 26.64% as sugar production in this region declined to 1.29 million tons in 2017. In 2016, the Company's market share of sugar production in Java was 28.49%, which amounted to 1.32 million tons.

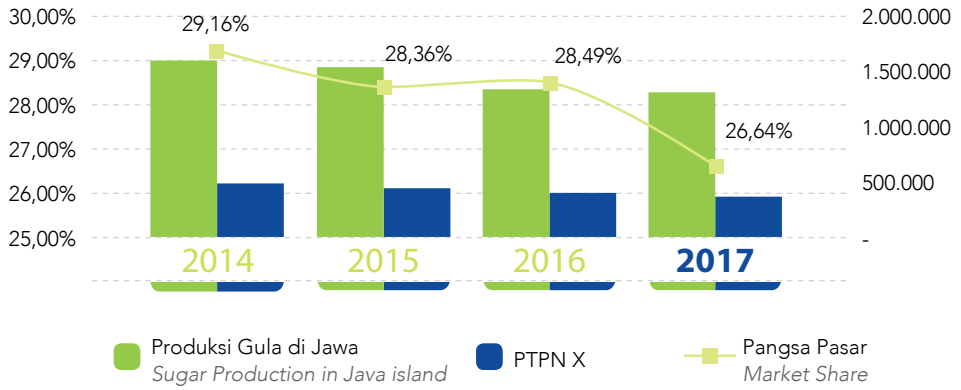

Posisi Jawa Timur sebagai Sentra Gula Nasional

Provinsi Jawa Timur sebagai sentra produksi gula di Indonesia juga mengalami penurunan tingkat produksi menjadi 1,02 juta di tahun 2017 dari 1,05 juta ton gula di tahun sebelumnya. Jumlah produksi ini setara dengan pangsa pasar produksi sebesar 48,16% dari total produksi gula nasional sebesar 2,12 juta ton gula di tahun 2017.

East Java Position as National Sugar Center

East Java province as the center of sugar production in Indonesia also experienced a decline its production level to 1.02 million in 2017 from 1.05 million tons of sugar in previous year. This production was equivalent to 48.16% of the total national sugar production of 2.12 million tons in 2017.

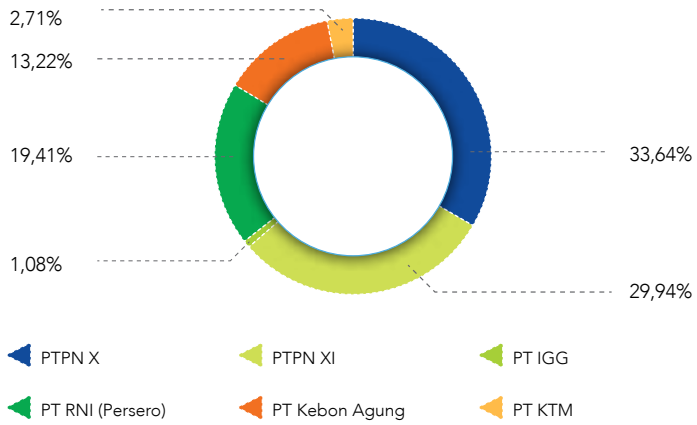

Dari sisi produksi tebu di Jawa Timur sebesar 1,02 juta ton gula tersebut, PTPN X adalah produsen terbesar tebu dengan produksi mencapai 344,18 ribu ton gula atau setara dengan 33,64% dari total gula yang diproduksi di Jawa Timur. Produsen lain dengan porsi yang dominan adalah PTPN XI yang mampu memproduksi 306,28 ribu ton gula di tahun 2017 dengan pangsa pasar sebesar 29,94%.

In terms of sugarcane production in East Java of 1.02 million tons of sugar, the Company was the largest producer of sugarcane with production amounted to 344.18 thousand tons of sugar or equivalent to 33.64% of total sugar produced in East Java. Another producer with a dominant portion was PTPN XI, which was capable of producing 306.28 thousand tons of sugar in 2017 with a market share of 29.94%.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jumlah dividen yang dibagikan berasal dari laba bersih yang besarnya ditetapkan dalam keputusan RUPS Tahunan menurut ketentuan dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016, Perseroan tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham. Berikut adalah ringkasan pembayaran dividen tahun buku 2016.

DIVIDEND POLICY

Based on the Company's Articles of Association, the amount of dividends distributed is derived from the net profit of which the amount is determined in the Annual General Meeting of Shareholders Resolution in accordance with the laws and legislations. Based on the Annual General Meeting of Shareholders Resolution on the Approval of the Annual Report and the Ratification of Financial Statements for 2016 Fiscal Year, the Company does not distribute cash dividends to the shareholders. Below is a summary of dividend payment for 2016 fiscal year.

Tahun Buku *Fiscal Year*	**Total Dividen yang** *Dibagikan (Miliar Rupiah) Total Dividend Distributed (IDR Billion)*	**Jumlah Dividen per** *Saham (Rupiah) Total Dividend per Share (IDR)*	**Pay out Ratio**	**Tanggal Pengumuman*** *Date of Announcement**	**Tanggal Pembayaran** *Dividen Date of Dividend Payment*
2014	4,62	4.625	20%	18 Mei 2015 *May 18, 2015*	-
2015	53,57	29.028	45%	14 Juni 2016 *June 14, 2016*	-
2016	-	-	-	-	-

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU PEGAWAI

Sampai tahun 2017, PT PTPN X (Persero) bukan merupakan perusahaan publik sehingga Perseroan tidak melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan (ESOP/MSOP). Dengan demikian, informasi jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; jangka waktu; persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan harga *exercise* tidak tersedia.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan pada tahun 2017 tidak melakukan penawaran umum kepada publik baik penawaran umum saham maupun obligasi. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait penawaran umum dalam hal total perolehan dana; rencana penggunaan dana; rincian penggunaan dana; saldo dana; dan tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Perseroan tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2017. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi tentang:

1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;
2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;
3. Alasan dilakukannya transaksi;
4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir;
5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme *review* atas transaksi; dan
6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.

MANAGEMENT AND/OR EMPLOYEE STOCK OPTIONS PROGRAM

Until 2017, the Company is not a public company, hence, it does not implement the management and/or employee stock options program (MSOP/ESOP). Therefore, there is no information available regarding the number of shares of ESOP/MSOP and its realization; time period; requirements for eligible employee and/or management; and exercise price.

REALIZATION ON THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

In 2017, the Company has not conducted public offering, both for shares and bonds. Therefore, the Company has no information related to public offering in terms of total funds obtained; plan for the use of funds; details on the use of funds; funds balance; and the date of approval of the RUPS/RUPO on the changes in the use of funds (if any).

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS WITH CONFLICT OF INTEREST

The Company has not conducted any material transactions with conflict of interest in 2017. Therefore, the Company has no information on:

1. Name of party having the transaction and the nature of affiliate relationship;
2. Description on the fairness of transaction;
3. The reason for the transaction;
4. Realization of transactions in the last fiscal year period;
5. Company policy related to review mechanism of transaction; and
6. Compliance with the relevant laws and regulations.

INFORMASI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan sifat hubungan dan jenis transaksi dijelaskan dalam tabel berikut. Transaksi Perseroan dengan pihak-pihak berelasi tersebut dijelaskan di catatan laporan keuangan audit tahun 2017 no. 3 dari laporan keuangan audit 2017 Induk Perusahaan yang merupakan bagian dari laporan tahunan ini.

Sifat Hubungan Berelasi

Sifat hubungan berelasi antara Perseroan dengan pihak berelasi lain adalah sebagaii berikut:

INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Company entered into transactions with related parties with nature of the relationship and type of transactions as described in the following table. The Company's transactions with related parties are described in the notes to the 2017 audited financial statements No. 3 of the Holding Company's 2017 financial statements 2017, which are part of this annual report.

Nature of Relationship with Related Parties

The nature of the relationship between the Company and related parties is as follows:

Pihak-pihak berelasi Related parties	Sifat hubungan Nature of relationship	Jenis transaksi Type of transaction
PT Perkebunan Nusantara I	Dikendalikan oleh *Controlled by:* PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara II	Dikendalikan oleh *Controlled by:* PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusnatara III (Persero)	Pemegang saham Perseroan Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara IV	Dikendalikan oleh *Controlled by:* PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara V	Dikendalikan oleh *Controlled by:* PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara VI	Dikendalikan oleh *Controlled by:* PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara VII	Dikendalikan oleh *Controlled by:* PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara VIII	Dikendalikan oleh *Controlled by:* PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara IX	Dikendalikan oleh *Controlled by:* PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*

Pihak-pihak berelasi Related parties	Sifat hubungan Nature of relationship	Jenis transaksi Type of transaction
PT Perkebunan Nusantara X	Dikendalikan oleh *Controlled by:* PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara XI	Dikendalikan oleh *Controlled by:* PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara XII	Dikendalikan oleh *Controlled by:* PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara XIII	Dikendalikan oleh *Controlled by:* PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara XIV	Dikendalikan oleh/Controlled by: *PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Investasi saham *Investment in shares*	Jasa pemasaran dan investasi saham *Marketing services and investment in shares*
PT Riset Perkebunan Nusantara	Investasi saham *Investment in shares*	-
Perantara Makelar Tembakau *Indonesia*	Entitas Asosiasi *Associates*	-
PT Enero	dikendalikan oleh PTPN X *controlled by PTPN X*	bahan baku *raw materials*
PT dasaplast	dikendalikan oleh PTPN X *controlled by PTPN X*	kebutuhan karung dan warring *need for sacks and warring*
PT NMU	dikendalikan oleh PTPN X *controlled by PTPN X*	pengobatan karyawan *employee's medicine*
PT M27	dikendalikan oleh PTPN X *controlled by PTPN X*	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, dan kredit ketahanan pangan dan energi *Placement of current accounts and deposits, interest on deposits, credit facilities for working capital and investment, and food security and energy credit*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, dan kredit ketahanan pangan dan energi *Placement of current accounts and deposits, interest on deposits, credit facilities for working capital and investment, and food security and energy credit*

Pihak-pihak berelasi Related parties	Sifat hubungan Nature of relationship	Jenis transaksi Type of transaction
PT Bank Negara Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, dan kredit ketahanan pangan dan energi *Placement of current accounts and deposits, interest on deposits, credit facilities for working capital and investment, and food security and energy credit*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi JawaTimur *Controlled by the Local Government of East Java Province*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, dan kredit ketahanan pangan dan energi *Placement of current accounts and deposits, interest on deposits, credit facilities for working capital and investment, and food security and energy credit*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Biaya pengobatan *Medical costs*
PT Asuransi Jiwa Tugu *Mandiri*	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Klaim asuransi kesehatan *Health insurance claim*
PT Perseroan Listrik Negara	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Biaya pengobatan *Medical costs*
PT Bank Syariah Mandiri	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Fasilitas kredit investasi *Investment credit facility*
PT Pupuk Kujang	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penjualan karung *Sales of plastic bags*
Program Kemitraan Bina *Lingkungan*	Unit Perseroan *The Company's Unit*	Penyaluran dana modal kerja ke petani tebu *Distribution of working capital to sugarcane farmers*
Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik ("Perum BULOG")	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik *Indonesia* *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Kerja sama importasi *raw sugar*, pengolahan *raw sugar*, distribusi dan penjualan gula *Cooperation in importation of raw sugar, processing of raw sugar, distribution and sale of sugar*
PT Taspen (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penyaluran dana modal kerja ke petani tebu *Distribution of working capital to sugarcane farmers*
PT Asuransi Jiwasraya	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penyaluran dana modal kerja ke petani tebu *Distribution of working capital to sugarcane farmers*

Pihak-pihak berelasi Related parties	Sifat hubungan Nature of relationship	Jenis transaksi Type of transaction
Dana Pensiun Perkebunan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Pengelola dana pensiun karyawan *Management of pensioun fund of the employees*
LPP (Lembaga Pendidikan *Perkebunan)*	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Pendidikan dan pelatihan *Education and training*
Badan Penyelenggara *Jaminan Sosial*	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan *Heath and social security program*
PT Perusahaan Perdagangan *Indonesia (Persero)*	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penjualan gula *Sale of sugar*

	Saldo *Balance*		Persentase terhadap total aset/liabilitas *Percentage of total assets/ liabilities*		
	31 Desember *December 31,*		31 Desember *December 31,*		
	2017	2016	2017	2016	
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	191.254.149.539	83.832.744.378	1,47%	0,64%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	38.905.954.472	63.114.552.232	0,30%	0,48%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	27.351.937.372	269.429.471	0,21%	0,00%	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.058.558.333	5.621.559.895	0,03%	0,04%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Mandiri	1.713.464.838	984.866.808	0,00%	0,01%	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	30.619.732	209.489.051	0,00%	0,00%	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia Syariah	4.885.118	-	0,01%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia Syariah*
Dolar Amerika Serikat					*United States Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.078.393.028	9.018.152.644	0,09%	0,07%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	437.905.094	3.428.790.345	0,00%	0,03%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*

	Saldo *Balance*		**Persentase terhadap total aset/liabilitas** *Percentage of total assets/ liabilities*		
	31 Desember *December 31,*		**31 Desember** *December 31,*		
	2017	**2016**	**2017**	**2016**	
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	11.918.582	12.142.516	0,00%	0,00%	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	19.654.046	0,00%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Euro					*Euro*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.873.824.862	22.960.575.742	0,21%	0,18%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Deposito berjangka					*Time deposits*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.000.000.000	-	0,04%	0,00%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	33.675.693.558	0,00%	0,26%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah kas dan setara kas	308.721.610.970	223.147.650.686	2,41%	1,75%	*Total cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 5)					*Restricted cash and cash equivalents (Note 5)*
Giro					*Current accounts*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.882.823.223	17.565.780.768	0,08%	0,13%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Deposito berjangka					*Time deposits*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	950.000.000.000	400.000.000.000	7,30%	3,06%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	550.000.000.000	0,00%	4,21%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	959.882.823.223	967.565.780.768	7,38%	7,41%	*Total restricted cash and cash equivalents*
Piutang usaha (Catatan 6)					*Trade receivables (Note 6)*
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	52.188.569.197	31.552.653.764	0,40%	0,24%	*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*
PT Industri Gula Glenmore	3.263.745.324	-	0,03%	0,00%	*PT Industri Gula Glenmore*
PT Perkebunan Nusantara XIV	280.126.000	647.909.128	0,02%	0,00%	*PT Perkebunan Nusantara XIV*
PT Petrokimia Gresik	3.016.973.850	-	0,02%	0,00%	*PT Petrokimia Gresik*
PT Pupuk Kalimantan Timur	2.805.517.000	-	0,02%	0,00%	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
PT Pupuk Kujang	1.499.286.800	1.158.300.000	0,01%	0,01%	*PT Pupuk Kujang*

	Saldo *Balance*		Persentase terhadap total aset/liabilitas *Percentage of total assets/ liabilities*		
	31 Desember *December 31,*		31 Desember *December 31,*		
	2017	2016	2017	2016	
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ("Perum BULOG")	-	6.815.531.600	0,00%	0,05%	*Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ("Perum BULOG")*
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	-	2.308.383.371	0,00%	0,02%	*PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	1.300.849.014	0,00%	0,01%	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	3.687.552.863	1.272.983.300	0,03%	0,01%	*Others (each below Rp500 million)*
Jumlah piutang usaha	66.741.771.034	45.056.610.177	0,53%	0,34%	*Total trade receivables*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(161.184.666)	(2.308.383.371)	(0,00%)	(0,02%)	*Allowance for impairment loss*
Piutang usaha, neto	66.580.586.368	42.748.226.806	0,53%	0,32%	*Trade receivables, net*

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Penjelasan lebih rinci terkait transaksi dengan pihak berelasi dapat dilihat di catatan laporan keuangan audit 2017 no. 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan Perseroan tahun 2017.

Transactions with Related Parties

More detailed description with related parties can be seen in the notes to 2017 audited financial statements No. 10, which is an integral part of the Company's 2017 annual report.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Pada tahun 2017 terdapat beberapa perubahan peraturan yang terkait dengan industri gula dan dampak atas perubahan peraturan tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

AMENDMENT TO THE LAWS AND REGULATIONS SIGNIFICANTLY AFFECTING THE COMPANY

In 2017, there have been several amendments to laws and regulations related to the sugar industry and the impact of the amendments as follows:

Nama Peraturan *Name of Regulation*	Tentang *Concerning*	Dampak Terhadap Perseroan *Impact to the Company*
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 *Minister of State-Owned Enterprises Regulation of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017*	Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, tingkat suku bunga pinjaman berubah menjadi 3% per tahun. *Partnership Program and Community Development Program, interest rate of loans changed to 3% per year.*	Dengan perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan perolehan lahan petani karena akan mempermudah Perseroan untuk mendapatkan mitra petani diperkuat dengan posisinya sebagai Avalis. *This amendment is expected to increase the acquisition of farmers land since it will make it easier for the Company to obtain farmers partners reinforced with its position as Avalis.*

Nama Peraturan *Name of Regulation*	**Tentang** *Concerning*	**Dampak Terhadap Perseroan** *Impact to the Company*
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 116 Tahun 2017 *Minister of Finance Regulation (PMK) No. 116/2017*	Barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN *Basic Necessities Exempted From Value Added Tax*	Perubahan peraturan ini diharapkan meningkatkan penjualan volume gula karena harga jual gula lebih terjangkau bagi konsumen. *This amendment is expected to increase the sale of sugar since the selling price of sugar is more affordable to customers.*
Permendag No. 47/M-DAG/PER/7/2017 *Minister of Trade Regulation No. 47/M-DAG/PER/7/2017*	Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen *Determination of Reference Price for Purchase at Farmers and Reference Price for Sales to Customers*	Peraturan baru in diharapkan lebih memberikan kepastian harga dan jaminan *margin* bagi Perseroan. *This new regulation is expected to provide more certainty on the price and margin guarantee for the Company.*

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BESERTA DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Terdapat perubahan kebijakan akuntasi yang dijelaskan dalam laporan audit Perseroan per 31 Desember 2017 yang diringkas dalam tabel berikut ini:

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND ITS IMPACT TO THE FINANCIAL STATEMENTS

There have been some changes in the Company's audited financial statements as of December 31, 2017 is summarized in the following table:

Kebijakan Akuntansi **Accounting Policies**	**Alasan Perubahan** **Reason for Changes**	**Dampak Terhadap Laporan Keuangan** **Impact to the Financial Statements**
PSAK No. 1 (Amandemen 2015): Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan, memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan *SFAS No. 1 (Amendments 2015): Presentation of Financial Statements on Disclosures Initiative, provides clarification related to the application of materiality, flexibility in the systematic sequence of the notes to the financial statements.*	Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan amandemen atau penyesuaian PSAK yang telah ditetapkan oleh Standard Akutansi Indonesia *The changes were made in order to adjust with the amendment or SFAS improvement as stipulated by the Indonesia Accounting Standard*	Perubahan kebijakan akutansi tersebut tidak menimbulkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian *The changes of policy did not create significant changes to the accounting policy for Business Group and material impact towards the consolidated financial statements.*
PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja, mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut. *SFAS No. 24 (Improvement 2016): Employee Benefits, which clarifies that the market of high quality corporate bonds is assessed based on the currency in which the obligation is denominated.*		
PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. *SFAS No. 58 (Improvement 2016): Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operation.*		

Kebijakan Akuntansi Accounting Policies	Alasan Perubahan Reason for Changes	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact to the Financial Statements
PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan - Pengungkapan, mengklarifikasi apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset. *SFAS No. 60 (Improvement 2016): Financial Instrument - Disclosure, clarifies whether the entity has a continuing involvement in financial assets.*		

KETAATAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

Perseroan memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak. Tabel berikut menjelaskan kontribusi kepada negara terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir. Secara kumulatif pembayaran pajak pada tahun 2017 mencapai Rp154,83 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya sebesar Rp340,79 miliar.

ADHERENCE AS TAXPAYER

The Company contributes to the State in the form of adherence to the Company's obligation as taxpayer and tax collector. The following table describes contribution to the state related to the fulfillment of tax liabilities in the last 2 (two) years. The cumulative tax payment in 2017 reached Rp154, 83 billion or lower compared with the previous year amounting to Rp340, 79 billion.

Keterangan *Description*	2016 Pembayaran Pajak (dalam jutaan Rp) *Tax payment (in IDR million)*	2017 Pembayaran Pajak (dalam jutaan Rp) *Tax payment (in IDR million)*
Pembayaran pajak secara kumulatif *Cumulative payment of tax*	340.793	154.834

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Produk gula dengan tebu sebagai tanaman asal dipengaruhi salah satunya oleh faktor cuaca. Dalam hal ini panen tebu dipengaruhi oleh cuaca terutama musim hujan yang panjang di wilayah perkebunan dan pabrik gula berada. Curah hujan yang cukup tinggi dan berlangsung lama berpotensi menurunkan kualitas tebu terutama rendemen, disamping menghambat budidaya tebu. Pengaruh terbesar adalah hal tersebut akan menghambat produksi gula nasional termasuk gula yang dihasilkan Perseroan karena tebu tidak dapat ditebang tepat waktu dan sulit melakukan perawatan selama musim penghujan sehingga juga berpengaruh pada produksi tebu di tahun berikutnya.

Perseroan dalam menjalankan usahanya selama tahun 2017 tak luput dari pengaruh eksternal. Faktor eksternal di sisi produksi, salah satunya adalah efek *La-Nina* yang terjadi pada tahun 2016 membawa dampak untuk tebu giling 2017, yakni mundurnya bulan tanam/kepras karena curah hujan

INFORMATION ON THE COMPANY'S BUSINESS CONTINUITY

Sugar products with sugarcane as the source of plants are affected by weather factors. In this case, sugarcane harvest is affected by the weather, in particular the long rainy season in the plantation area and the location of sugar factory. Heavy and long lasting rainfall has the potential to reduce the quality of sugarcane, especially yields, in addition to inhibiting sugarcane cultivation. The greatest impact is that it will hamper the national sugar production, including sugar produced by the Company since sugarcane cannot be cut on time and it is difficult to do maintenance during the rainy season, hence it also affects the production of sugarcane in the following year.

In running its business throughout 2017, the Company was also affected by external influences. One of the external factors in terms of production side was the La-Nina effect that occurred in 2016, which has impacted the milled sugarcane in 2017, namely the delay of planting month/kepras and

yang tinggi di tahun 2016 dan sebagian kebun mengalami keterlambatan kultivasi secara mekanis karena curah hujan yang tinggi. Karena curah hujan yang tinggi tersebut, juga mengakibatkan kebun mengalami kebanjiran sehingga pertumbuhan tanaman terganggu atau bahkan tanaman mati akibat banjir/genangan sehingga harus tanam ulang. Dampak-dampak tersebut menyebabkan protas tebu yang digiling di tahun 2017, menurun.

Disamping cuaca, kelangsungan usaha industri gula pada umumnya juga dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku yang berasal dari petani tebu. Dalam hal ini Perseroan tidak hanya sekedar membeli tebu petani tetapi memiliki peran lebih dalam membantu petani menyediakan kebutuhan terkait tanaman tebu. Penyediaan pinjaman, saprodi, bibit, traktor, dan ketersediaan pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani akan membantu menjaga kestabilan pasokan tebu sebagai bahan baku gula. Namun demikian, untuk melaksanakan peran tersebut diperlukan peran produsen gula sebagai *avalist* atau penjamin.

Perseroan berpendapat bahwa faktor cuaca adalah faktor eksternal di luar kendali Perseroan. Namun demikian, PTPN X menyikapi faktor cuaca tersebut dengan usaha maksimal meraih kemasakan tebu yang optimal melalui penataan *start* giling pabrik gula berdasarkan kesiapan Bahan Baku Tebu (BBT) dengan minimal umur 12 bulan. Sementara itu, dalam hal peningkatan rendemen tebu program kerja yang ditetapkan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan prasarana irigasi yang sudah ada untuk mengantisipasi kebutuhan air (drip irigasi, pompa irigasi, *sprinkle* irigasi dan sumur di lahan HGU)
2. Prediksi curah hujan efektif, evapotranspirasi dan kebutuhan air tanaman
3. Menyiapkan tebu layak tebang
4. Melaksanakan tebang angkut Manis, Bersih, Segar (MBS).
5. Penggunaan aplikasi *E-Farming* untuk memantau ketepatan jadwal tebang kebun
6. Penjadwalan tebang sesuai dengan kemasakan tebu.
7. Penyempurnaan manajemen tebang dan angkut dan pelaksanaan tebang mekanis dengan *choper Harvester*.

Ketiadaan peran sebagai *Avalist* yang pernah terjadi di tahun 2017 turut mempengaruhi pasokan tebu dari petani. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan usulan kepada pemegang saham untuk disetujui sebagai *Avalist*. Pemegang saham memberikan persetujuan atas usulan manajemen tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada bulan Januari 2018. Dalam hal

mechanical cultivation delay in some plantations due to heavy rainfall in 2016. The heavy rainfall has also caused plantations to be flooded, which disturbed the plants growth, some plants were even dead due to the flood; hence, re-planting had to be done. These impacts have caused milled sugarcane protas to decline in 2017.

In addition to the weather, the continuity of sugar industry in general is also influenced by the availability of raw materials derived from sugarcane farmers. In this case, the Company has not only purchased sugarcane from farmers, but has a deeper role in helping farmers to provide sugarcane-related needs. Provision of loans, production facilities, seeds, tractors, and the availability of fertilizer to meet the needs of farmers will help maintain the stability of sugarcane supply as raw material of sugar. However, to carry out the role, the role of sugar producer is required as an avalist or guarantor.

The Company perceives weather as external factor, which is beyond the Company's control. Nevertheless, the Company responded to this factor with maximum effort in order to achieve optimal maturity of sugarcane through the arrangement of starting time of sugar milling process based on the readiness of Sugar Cane Raw Material (BBT/seeds) with a minimum of 12 months. Meanwhile, in terms of increasing sugarcane yields, the Company established several work programs, such as:

1. Maximizing existing irrigation infrastructure to anticipate water demand (irrigation drip, irrigation pump, irrigation sprinkle and wells at lands with HGU (Rights of Business)
2. Predicting effective rainfall, evapotranspiration and water requirements for crops
3. Preparing ready-to-cut sugarcanes
4. Implementing Fresh, Sweet, Clean (SBM) cut transport.
5. Using E-Farming application to monitor the accuracy of plantation cutting
6. Scheduling cutting in accordance with the maturity of sugarcane.
7. Improvement of logging and transport management and the implementation of mechanical harvesting with Harvester choper.

The absence of an Avalist role that once occurred in 2017 has also affected the supply of sugarcane from farmers. Therefore, the Company submitted a proposal to the shareholders for approval as Avalist. The shareholders gave their approval to the management proposal in the General Meeting of Shareholders (GMS) held in January 2018. In this case, the Company obtained approval as Avalist of Primary

ini, Perseroan mendapatkan persetujuan sebagai *Avalist* Penarikan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) dan Pinjaman Dana Sinergi Program Kemitraan BUMN untuk Petani Tebu. Divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN X telah diberikan ijin untuk menyalurkan dana PKBL BUMN lain sebesar Rp425,00 miliar dan bertindak sebagai penjamin (*avalist*) atas pinjaman dana tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi ("KKPE") tebu rakyat dengan pola kemitraan, Perseroan mengadakan perjanjian dengan beberapa Bank dan PKBL BUMN dalam pemberian kredit kepada petani tebu selain dengan PTPN X bertindak sebagai penjamin (*avalist*). Beberapa institusi keuangan dari pihak berafiliasi yang bekerja sama dengan Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Taspen (Persero).

Penilaian Perseroan terhadap hal tersebut di atas berdasarkan asumsi bahwa pemanfaatan tebu sebagai tanaman perkebunan semusim harus dioptimalkan untuk menjamin pasokan tebu dalam rangka mencapai target produksi gula nasional sebesar 3,30 juta ton di tahun 2018. Sebagai produsen tebu yang yang berada dibawah kendali *holding* perkebunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Perseroan turut berperan aktif dalam mencapai ketahanan pangan mengingat peran penting gula sebagai salah satu bahan pangan strategis nasional. Kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan Perseroan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2018.

Cooperative Credit to Members (KKPA) and Loan for Synergy Fund of SOE Partnership Program for Sugarcane farmers. The Company's Partnership and Community Development (PKBL) Division has been authorized to distribute other SOE PKBL funds amounted to IDR425.00 billion and acted as a guarantor (avalist) for the loan.

In the framework of implementing the Food Security and Energy Credit ("KKPE") program in the form of partnership, the Company entered into agreements with several Banks and SOE PKBL in supplying credit for sugarcane farmers other than with the Company acting as guarantor (avalist). Several financial institutions from affiliates working with the Company include PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), and PT Taspen (Persero).

The Company's assessment on the above matter is based on the assumption that the use of sugarcane as annual crops should be optimized to ensure the supply of sugarcane in order to achieve the national sugar production target of 3.30 million tons in 2018. As a sugarcane producer, which is under the control of the holding company for plantation PT Perkebunan Nusantara III (Persero), the Company also plays an active role in achieving food security given the important role of sugar as one of the national strategic comestibles. The policies and strategies to be implemented by the Company are set forth in the Company's 2018 Work Plan and Budget.

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Supporting Functions

Hingga 31 Desember 2017, Perseroan mengaryakan 18.311 orang, meningkat 85,24%dibandingkan tahun 2016 yang sebanyak 9.885 orang.

As of December 31, 2017, the Company has 18,311 employees, an increase of 85.24% compared to 2016 of 9,885 employees.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Sebagai entitas usaha yang bergerak di bidang perkebunan, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting yang membutuhkan pengelolaan yang tepat. Perseroan memandang karyawan sebagai mitra strategis yang memiliki kemampuan pembelajaran dan peningkatan kompetensi secara mandiri. Dengan kemampuan seperti ini, pengelolaan kompetensi yang baik akan memberikan motivasi yang tinggi, yang kemudian akan mendorong peningkatkan produktivitas yang tinggi dan menciptakan kontribusi positif bagi operasional dan bisnis Perseroan.

As a business entity in the plantation sector, Human Resources constitute essential asset that requires a precise management. The Company considers its employees as strategic partners who have the ability to learn and build their own competencies. With such ability, a proper competency management will increase motivation and stimulate productivity and will also positively contribute to the Company's operations and business.

DEMOGRAFI DAN KOMPOSISI SDM

Hingga 31 Desember 2017, Perseroan mengaryakan 18.311 orang, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebanyak 9.885 orang. Adanya peningkatan yang signifikan ini disebabkan adanya pengalihan tenaga kerja tidak tetap kebun tembakau, yang pada tahun 2016 dibiayakan eksploitasi sekarang dimasukkan biaya nominasi/SDM.

HUMAN RESOURCES DEMOGRAPHY AND COMPOSITION

As of 31 December 2017, the Company had 18,311 employees, an increase compared to 9,885 employees in 2016. This significant increase was due to the transfer of contract based manpower of tobacco plantation, which in 2016 was financed by exploitation but now is included in nomination/HR expenses.

Perkembangan Jumlah Karyawan Tahun 2013-2017
(orang)

Growth of Total Employees in 2013-2017
(persons)

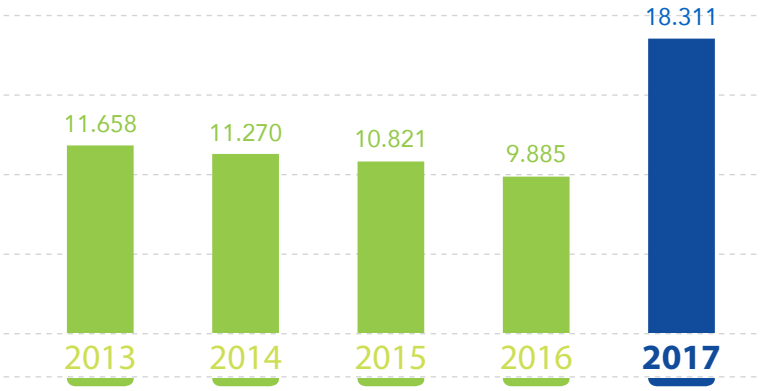

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Organisasi
(orang)

Employees Headcount by Organizational Level
(persons)

Jabatan	*Position*	2017			2016		
		L *M*	P *F*	Jumlah *Total*	L *M*	P *F*	Jumlah *Total*
Dewan Komisaris	*Board of Commissioners*	4	-	4	4	-	4
Direksi	*Board of Directors*	3	-	3	4	-	4
Pejabat Puncak	*Senior Executives*	28	1	29	29	1	30
Kaur KD/Kabag UUS	*Head of Section/Department*	104	3	107	109	3	112
Karyawan Tetap	*Permanent Employee*	2.622	230	2.852	2.836	246	3.082
Karyawan Tidak Tetap	*Contract Based Employee*	7.866	7.450	15.316	6.494	159	6.653
Jumlah	*Total*	10.627	7.684	18.311	9.476	409	9.885

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Pendidikan

Employees Headcount by Educational Level

(orang) *(persons)*

Pendidikan	*Education*	2017			2016		
		L *M*	P *F*	Jumlah *Total*	L *M*	P *F*	Jumlah *Total*
S3	*Doctorate Degree*	1	-	1	1	-	1
S2	*Master Degree*	42	9	51	51	11	62
S1	*Bachelor Degree*	612	101	713	804	124	928
Akademi (D3/D2/LPP)	*Diploma (D3/D2/LPP)*	86	15	101	106	24	130
SLTA	*Senior High School*	2.496	208	2.703	6.655	234	6.889
SLTP	*Junior High School*	6.652	5.227	11.879	1.322	8	1.330
SD	*Elementary School*	739	2.124	2.863	537	8	545
Jumlah	*Total*	10.627	7.684	18.311	9.476	409	9.885

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Employees Headcount by Employment Status

(orang) *(persons)*

Status Kepegawaian	*Employment Status*	2017			2016		
		L *M*	P *F*	Jumlah *Total*	L *M*	P *F*	Jumlah *Total*
Dewan Komisaris dan Direksi	*Board of Commissioners and Board of Directors*	7	-	7	8	-	8
Karyawan Tetap	*Permanent Employee*						
• *Grade* 8-1	• *Grade 8-1*	469	45	514	511	50	561
• *Grade* 16-9	• *Grade 16-9*	2.285	189	2.474	2.463	200	2.663
Karyawan Tidak Tetap	*Contract Based Employee*						
• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan *Outsource*	• *Specific Time Working Agreement (PKWT) and Outsource Employee*	7.866	7.450	15.316	6.494	159	6.653
Jumlah	*Total*	10.627	7.684	18.311	9.476	409	9.885

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Usia

Employees Headcount by Age

(orang) *(persons)*

Usia *Age*	2017			2016		
	L *M*	P *F*	Jumlah *Total*	L *M*	P *F*	Jumlah *Total*
≤ 30	1.127	1.086	2.213	1.450	77	1.527
31-40	3.159	2.658	5.817	3.430	108	3.538
41-50	4.853	2.966	7.819	3.351	150	3.501
51-55	1.488	974	2.462	1.245	74	1.319
Jumlah *Total*	10.627	7.684	18.311	9.476	409	9.885

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin
(dalam orang)

Employees Headcount by Gender
(persons)

Jenis Kelamin	Gender	2017	2016
Laki-laki	*Male*	10.627	9.476
Perempuan	*Female*	7.684	409
Jumlah	*Total*	18.311	9.885

PENGEMBANGAN SISTEM SDM DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan disusun dan direncanakan dengan tujuan untuk menunjang operasional organisasi terutama dari sisi kapasitas pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam pelaksanaan tugas. Program-program Pengembangan SDM dilaksanakan melalui seminar, *workshop*, *inhouse training* oleh Direksi dan unit usaha, program sertifikasi, studi banding, serta kursus jabatan. Setiap bagian dari lini operasional Perseroan melakukan analisa kebutuhan pelatihan, yang kemudian dikombinasikan dengan hasil *assessment* akan menentukan jenis dan frekuensi program pengembangan SDM yang akan dilakukan Perseroan.

Program pengembangan SDM melalui seminar diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan karyawan, sedangkan penyelenggaraan *workshop* umumnya dilakukan untuk memenuhi dan meningkatkan kompetensi baik dari sisi pengetahuan dan keterampilan, dimana kegiatan dalam *workshop* selalu disertai dengan praktek dan aplikasi materi. Diharapkan, usai pelatihan, peserta dapat langsung mengaplikasikan hasil pendidikannya. Selain itu, untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan khusus atau spesialisasi, karyawan diikutsertakan dalam program sertifikasi profesi khusus sehingga selain menjadi ahli atau spesialis, hal ini juga dapat menjadi bekal Perseroan untuk bersaing secara kualitas karyawan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Selain memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan kompetensi karyawan dalam bidang tugasnya, pengembangan SDM di Perseroan juga memiliki fungsi strategis, yaitu fungsi *succession planning* untuk menyiapkan suksesor atau kader-kader potensial yang akan menduduki suatu jabatan tertentu. Kader penerus setiap jabatan merupakan bentuk jaminan keberlangsungan proses organisasi dalam menghadapi persaingan bisnis. Proses pembentukan kader dilakukan dengan berbagai metode baik melalui seleksi dan rekrutmen, *assessment*, *project assignment*, maupun presentasi dan wawancara langsung dengan Direksi.

HUMAN RESOURCES SYSTEM DEVELOPMENT AND TRAINING

The Company's Human Resources (HR) development program is organized and planned with the objective to support the organization's operations especially in terms of knowledge capacity and skills of employees in conducting their tasks. HR development program is implemented through seminars, workshops, in-house training by Board of Directors and business units, certification programs, comparative study, as well as office courses. Each section of the Company's operational line conduct training need analysis, which is then combined with the assessment results to determine the types and frequencies of HR development program that should be carried out by the Company.

HR development program through seminars aimed at enhancing employees' knowledge; while workshops are generally conducted to develop and enhance the competencies both in terms of knowledge and skills by complementing the materials with practices. It is expected that, after the training, participants can directly apply the results of trainings. In addition, to ensure that employees have special skills or specialties, employees must participate in specific professional certification programs. This will not only make them expert or specialist, but also provide the Company with competitive advantage in terms of qualified employees with other similar companies.

The Company's HR management is responsible for not only improving employees' knowledge and competencies in their respective field of work, but also for taking on strategic functions, namely to make succession planning to prepare a successor or potential cadre to occupy a certain position. The successor candidate for every position is an assurance of the organization's sustainability in facing the business competition. The process of developing the successor candidate is carried out by various methods, such as through selection and recruitment, assessment, project assignment, as well as presentations and interviews with the Board of Directors.

Dengan target minimal tersedia 2 (dua) orang calon suksesor untuk tiap jabatan, Perseroan memiliki harapan besar agar proses regenerasi dan keberlangsungan Perseroan akan dapat terus terjaga dan mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis. Perseroan memiliki perhatian khusus dalam program Pengembangan SDM yang lebih intensif, sehingga di dalam *roadmap*-nya, Perseroan mencanangkan untuk dapat memiliki sebuah akademi yang nantinya akan diberi nama PTPN X *Academy*.

With a minimum target of 2 (two) potential successors for each position, the Company intends to sustain regeneration process and business operations, and to be able to face the stringent business competition. Having a special interest in more intensive HR development program, the Company has set a roadmap containing the Company's plan to build an academy named PTPN X Academy.

Dalam mencapai tujuan tersebut, tentu Perseroan akan berhadapan dengan berbagai rintangan dan kendala. Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan program-program pengembangan SDM adalah cukup banyaknya nama jabatan, jarak antar unit usaha yang cukup berjauhan, belum adanya standar baku dalam proses seleksi dan rekrutmen, bahkan proses pengadaan atau pengajuan program-program pengembangan terutama pelaksanaan *inhouse training*.

In achieving such goal, the Company will definitely face many obstacles and constraints. The obstacles faced by the Company in the course of preparing the HR development program are, among others: a reasonable number of positions, the distance between one business unit to another is quite far, there are no standards in the selection and recruitment process, even in the procurement process or submission of development programs, especially in-house training.

Solusi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut adalah dengan menyusun standar kompetensi dan kebutuhan kompetensi jabatan untuk semua nama jabatan yang ada di Perseroan, sehingga diharapkan ada keseragaman kompetensi antar unit usaha dan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan penjelasan melalui tatap muka. Selain itu untuk menjamin kualitas proses yang standar, sejak tahun 2014 beberapa proses di dalam urusan Pengembangan SDM dimasukkan dalam sistem ISO 9001 : 2008, sehingga setiap tahapan proses akan menjadi standar baku pelaksanaan kegiatan program-program pengembangan SDM di Perseroan.

The solutions to address these constraints is by setting up competency standards and job competency requirements for all existing positions in the Company, so that all business units share the same competencies without face to face explanation. Moreover, to assure the standard process quality, since year 2014 some of the processes in HR development have been included in the ISO 9001: 2008 System, so that each stage of process will be the basic standard for implementing HR development programs in the Company.

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan
Tahun 2017

Competency development based on position level
in 2017

Level Jabatan *Position Level*	**Jenis Pelatihan** *Type of Training*	**Tujuan Pelatihan** *Training Purpose*
Level Karyawan Pimpinan *Team Leader Level*	Pelatihan Kompetensi *Competency Training*	Mengembangkan seseorang mencapai kompetensi *Develop a person to achieve required competencies*
	Pelatihan Manajerial *Managerial Training*	Mempersiapkan seseorang untuk satu level diatasnya *Prepare a person for upper position level*
Seluruh Level Karyawan tergantung Sertifikasi yang diikuti *All Employment Levels depending on the Certification*	Pelatihan Sertifikasi *Certification Training*	Mengembangkan kemampuan khusus seseorang *Develop a person's special ability*

Kepesertaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2017 dan Perbandingannya dengan Tahun 2016

Participant of Competency Development in 2017 and Comparison with 2016

Jenis Pengembangan Kompetensi	*Type of Competency Development*	**Jumlah Kepesertaan** *Number of Participants 2017*	**Jumlah Kepesertaan** *Number of Participants 2016*
Seminar dan *Workshop*	*Seminar and Workshop*	345	327
In-house Training	*In-house Training*	2.674	3515
Sertifikasi	*Certification*	12	32
Studi Banding	*Comparative study*	64	198
Kursus Jabatan	*Office Course*	32	31
Diklat Dewan Komisaris dan Direksi	*Education and Training of Board of Commissioners and Board of Directors*	7	3
Assessment	*Assessment*	-	169
Program Luar Negeri	*Overseas Program*	11	34
Jumlah	*Total*	3.145	4.309

Perbandingan Jumlah Jam Pelatihan 2016-2017

Comparison of Training Hours 2016 – 2017

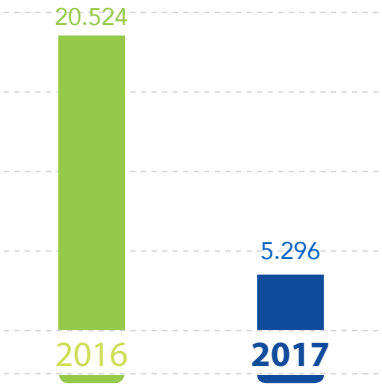

Perbandingan Rata-rata Jumlah Jam Pelatihan per Karyawan

Comparison of Average Training Hours per Employee

Realisasi 2016: **7 jam / orang** *2016 realization: 7 hours / employee*	**Target 2017:** **2 jam/orang** *2017 target: 2 hours / employee*	**Realisasi 2017:** **1,6 jam/orang** *2017 realization: 1.6 hours / employee*

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk mengembangkan kompetensi SDM, Perseroan memberikan investasi biaya di tahun 2017 sebesar Rp5.487.868.722 Jumlah ini menurun dari investasi biaya pengembangan kompetensi tahun 2016 yang sebesar Rp13,17 miliar. Berikut disampaikan detail biaya pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Perseroan.

COMPETENCY DEVELOPMENT COST

To develop HR competencies, the Company incurred investment cost amounting to IDR5,487,868,722 in 2017. This amount decreased from the investment cost for competency development in 2016 amounting to IDR13.17 billion. The following is details of the competency development cost incurred by the Company.

Investasi PTPN X atas Pengembangan Kompetensi
Tahun 2017

PTPN X Investment for Competency Development
in 2017

Uraian	*Description*	Jumlah *Amount* (Rp)
Diklat Sertifikasi	*Certification Training*	373.302.849
Diklat Kompetensi	*Competency Training*	3.441.125.256
Studi Banding Luar Negeri	*Overseas Comparative Study*	574.221.810
Studi Banding Dalam Negeri	*Domestic Comparative Study*	150.916.390
Inhouse Training	*Inhouse Training*	948.302.418
Jumlah	*Total*	5.487.868.722

Perbandingan Investasi PTPN X atas Pengembangan Kompetensi
Tahun 2016-2017

Comparison of PTPN X Competency Development Investment
In 2016-2017

	2017 *(Rp)*	2016 *(Rp)*	Kenaikan (Penurunan) *Increase (Decrease)* %
Biaya Pengembangan Kompetensi *Competency Development Cost*	5.487.868.722	13.171.687.465	(41,66)%

Teknologi Informasi
Information Technology

Teknologi Informasi (TI) merupakan *enabler* bisnis Perseroan dan berperan penting dalam mengintegrasikan proses operasional dan keuangan ke dalam sebuah sistem yang memiliki nilai akuntabilitas. Penerapan sistem TI dalam proses bisnis membantu Perseroan menempatkan setiap langkah proses yang terdokumentasi secara sistemik, yang kemudian akan memberikan rekomendasi kepada manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

Information Technology (IT) is enabler business of the Company and plays an important role in integrating the operational and financial processes into a system that has accountability value. The implementation of IT system in business processes supports the Company in organizing every step of process that are systematically documented, which will then provide the Management with recommendations for decision-making processes.

VISI DAN MISI TEKNOLOGI INFORMASI PERSEROAN

Penerapan dan pengembangan TI Perseroan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

THE COMPANY'S IT VISION AND MISSION

Vision and Mission of IT Application and Development in the Company are as follows:

Visi
Vision

Menjadikan teknologi informasi sebagai komponen utama dalam mendukung strategi bisnis dan transformasi perusahaan guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Perusahaan AgroIndustri Yang Terkemuka dan Berwawasan Lingkungan.

Making information technology as a key component to supporting the Company's business strategy and transformation in order to support the achievement of the Company's Vision and Mission to become a leading agro-industrial company that environmentally sound.

Misi
Vision

Menyediakan Sistem Teknologi Informasi yang mendukung bisnis dan efisiensi perusahaan secara langsung. Memberikan layanan teknologi informasi dengan *tag line* "PASTI BISA", yaitu:

*Provide Information Technology System that provide direct supports to the Company's business and efficiency. Provide information technology services with the tag line "**PASTI BISA**", namely:*

P	Proven	Memberikan layanan sesuai *Best Practice* Dunia yang telah teruji *Delivering services in accordance with the International Best Practice*
A	Accountable	Memberikan layanan yang memiliki akuntabilitas dan mendukung akuntabilitas perusahaan *Providing accountable services that supports the Company's accountability*
S	Simplify	Menyederhanakan proses bisnis demi peningkatan kinerja dan efisiensi perusahaan *Simplifying business processes in order to improve the Company's performance and efficiency*
T	Transparant	Mendukung proses bisnis yang transparan *Supporting transparent business processes*
I	Informative	Selalu berinovasi dalam mendukung perkembangan perusahaan *Providing technology services that can be easily understood and operated by users*
B	Best	Memberikan pelayanan prima dan terbaik dalam penyajian dan kualitas produk TI *Providing the best and excellent service in the presentation and quality of IT products*
I	Innovation	Selalu berinovasi dalam mendukung perkembangan perusahaan *Always innovating to support the Company's development*
S	Sustainable	Menyediakan layanan Teknologi Informasi yang berkelanjutan *Providing ongoing information technology services*
A	Accelerating	Mendukung percepatan proses bisnis dan transformasi perusahaan *Supporting the acceleration of the Company's business processes and transformation*

Menyediakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang menjamin kelancaran pengguna sistem TI dan kemudahan pengguna. Terlibat secara aktif dalam lingkup nasional dalam hal peningkatan produktivitas Industri Gula dan Tembakau.

Provide Information Technology Facility and Infrastructure that ensure the ease of IT system users. Actively involve in the national scope in increasing the productivity of the Tobacco and Sugar Industry.

IMPLEMENTASI SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI

Di tahun 2014, Perseroan mengembangkan TI melalui Sistem Pengelolaan Sumber Daya Perusahaan Terintegrasi atau yang lebih dikenal dengan istilah *Enterprise Resource Planning* (ERP). Kebutuhan tersebut muncul karena realitas terhadap perkembangan dan tantangan bisnis serta semangat peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan yang telah menjadi fokus utama dalam bisnis Perseroan.

Perseroan menegaskan langkah tersebut dengan melakukan *Kick Off* Implementasi ERP SAP yang dilakukan pada 12 Juni 2014, dimana Perseroan mengimplementasikan 9 (Sembilan) modul SAP, yaitu *Finance*, *Controlling*, *Material Management*, *Human Capital Management*, *Sales and Distribution*, *Project System*, *Plantation Estate Management System*, *Production Planning*, dan *Plant Maintenance*. ERP SAP dipilih sebagai *core technology* ERP Perseroan karena *Best Practices* dan *Proven Technology* yang telah diakui oleh pelaku bisnis global.

THE IMPLEMENTATION OF INTREGRATED INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM

In 2014, the Company developed the IT through an Integrated Enterprise Resources Management System, or better known as the Enterprise Resource Planning (ERP). The requirement was appeared because the business development and challenges as well as the spirit to enhance services for stakeholders have become the main focus in the Company's business.

The Company was highlighting this phase by conducting a Kick Off of the ERP SAP Implementation on June 12, 2014, when the Company implemented 9 (Nine) SAP modules, consist of Finance, Controlling, Material Management, Human Capital Management, Sales and Distribution, Project System, Plantation Estate Management System, Production Planning, and Plant Maintenance. The ERP SAP was selected as the Company's ERP core technology since its Best Practices and Proven Technology were acknowledged by global business players.

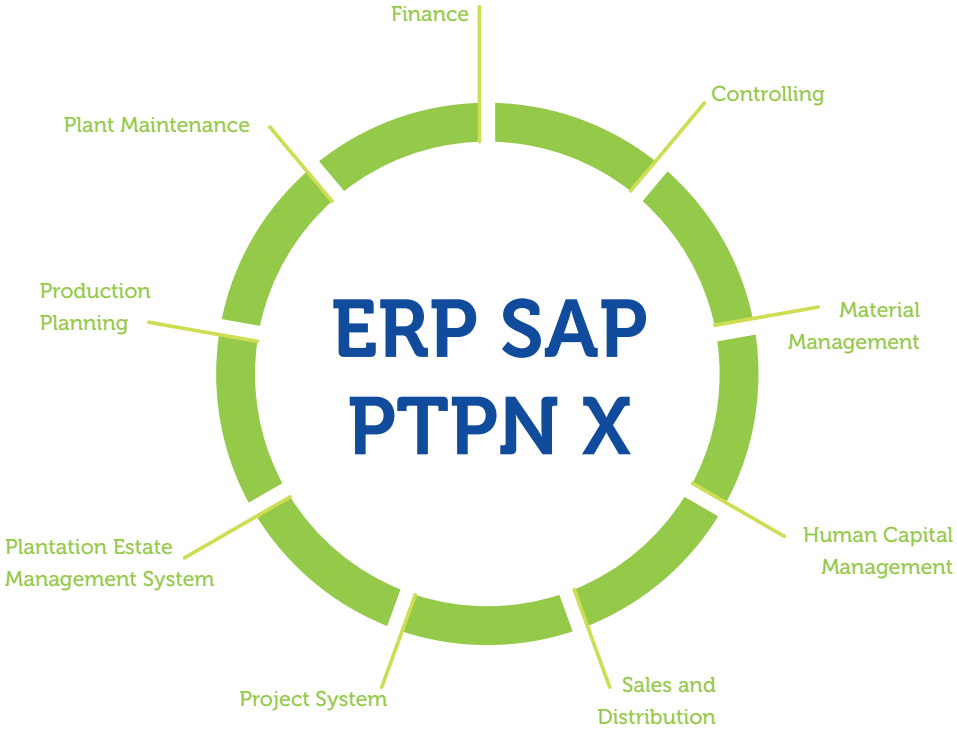

Strategi implementasi ERP SAP yang dipilih Perseroan menggunakan pendekatan 2 (dua) fase *Roll Out*, yaitu Implementasi SAP Modul *Basic* untuk *Finance*, *Controlling*, *Material Management*, *Human Capital Management*, *Sales and Distribution*, dan *Project System* pada awal Februari 2015 untuk Unit Usaha Gula dan Unit Usaha Tembakau, serta fase 2 untuk SAP Modul Produksi *Plantation Estate Management System*, *Production Planning*, dan *Plant Maintenance* pada pertengahan Mei 2015 untuk seluruh Unit Usaha Gula.

Pengembangan TI terintegrasi tidak hanya terbatas pada ERP SAP. Pada giling di tahun 2015 Perseroan mencanangkan penggunaan sistem Narada, yaitu sistem pengawasan bahan baku tebu dari lahan hingga ke Pabrik Gula. Sistem Narada ini memanfaatkan teknologi *Mobile* dan *Geographical Information System* (GIS) secara tepat guna untuk memecahkan permasalahan Perseroan pada sisi pengamanan bahan baku tebu.

Penguatan teknologi di sisi *Off-Farm* juga terus dikembangkan oleh Perseroan, ditandai dengan evolusi aplikasi Sistem Informasi Kebun (SIMBUN) menjadi *e-farming* demi tujuan peningkatan layanan terhadap petani dan menyederhanakan proses administrasi. Pendaftaran areal kebun yang dulu hanya dapat dilakukan oleh petugas, kini dengan adanya *e-farming* dapat dilakukan oleh petani dari telepon pintar mereka. Selain itu melalui sistem yang diluncurkan Mei 2016, mitra Perseroan terutama petani dapat memantau *progress* pengajuan areal lahan serta menjadi jembatan penghubung antara petugas dan petani. Di sisi lain, Perseroan mendapatkan kemudahan dalam validasi lahan dan penyajian data lahan dengan berbagai informasi *geospatial* yang ditawarkan di dalam *e-farming.* Kehadiran *e-farming* menjadi penguatan teknologi *Geographical Information System* (GIS) yang dapat bersinergi dan terhubung dengan SAP khususnya modul *Plantation Estate Management System.*

Pengembangan *e-farming* pada tahun 2017 tetap dilakukan oleh Perseroan. Integrasi *e-farming* dengan SAP modul HCM khususnya dalam implementasi SK Areal, menghasilkan keluaran *Key Performance Index* (KPI) petugas kebun yang menjadikan efektifitas dan kinerja petugas kebun dapat diukur dan dikuantifikasi. Pengembangan berikutnya yaitu pada pendaftaran areal bibitan dan areal TRM-LL serta pengembangan pada fitur *mobile application* untuk membantu petugas kebun mengetahui informasi mengenai kebun terdekat (*Near Me*) dan *Routing* yaitu fitur untuk menunjukkan arah menuju lokasi lahan.

The Company's ERP SAP implementation strategy uses two Roll-Out phases approach, which consist of the implementation of SAP Basic Module for Finance, Controlling, Material Management, Human Capital Management, Sales and Distribution, and Project System in early February 2015 for the Sugar and Tobacco Business Unit, followed by the phase 2 (two) for the implementation of SAP Production Module for Plantation Estate Management System, Production Planning, and Plant Maintenance in the middle of May 2015 for all Sugar Business Units.

The development of integrated IT is not solely in ERP SAP. In the 2015 milling season, the Company launched the Narada system, a monitoring system of sugarcane raw materials from the field to be manufactured in the factory. This Narada system utilizes the Mobile and Geographical Information system (GIS) appropriately to solve the problems encountered by the Company in sugar cane raw materials.

The Company also continues to strengthen off-farming technology, which was marked with the evolution of Sistem Informasi Kebun (Field Information System or "SIMBUN"), into e-farming system for the purpose of enhancing service quality to farmers and simplify the administration process. The registration of field area that was previously could only be done by the designated officers, now by using e-farming, farmers can easily register with their smartphones. By using the system that was launched in May 2016, the Company's partners especially farmers can monitor the progress of their land area proposal. The system can also serve as a link between the designated officers and farmers. In addition, it also enables the Company to do land validation and data presentation with various geospatial information available in the e-farming system. E-farming will enhance the Geographical Information System (GIS) which can work in synergy with SAP, especially the Plantation Estate Management System module.

In 2017, e-farming development continued to be done by the Company. The output of e-farming integration with SAP HCM module, especially in the implementation of SK Areal is Key Performance Index (KPI) of garden officers, making their effectiveness and performance can be measured and quantified. The next development is registration of seedling area and TRM-LL area as well as the development of mobile application feature to help the garden officer in getting information about nearby garden (Near Me) and Routing, a feature to show the direction to land location.

Perseroan juga tetap fokus dalam pengembangan ERP SAP, pada tahun 2017 telah dilakukan banyak pengembangan dan *improvement* baik *major* maupun *minor*. Pada modul *Sales and Distribution*, telah dilakukan pengembangan pada proses bisnis gula dengan penambahan layanan kepada *customer* yaitu Debit Memo Kredit Tetes dan *Retur Order* Penjualan Gula. Untuk lini bisnis Tembakau, terjadi penambahan fitur *Down Payment* pada penjualan tembakau. Pada modul *Production Planning*, dilakukan *improvement* dan perubahan proses bisnis dalam alur pemakaian bahan pembantu proses menggunakan konsep *Staging Area* sehingga pemakaian bahan pembantu proses dapat dipantau dan dikontrol secara efisien dan dapat berkontribusi nyata dalam menekan komponen Harga Pokok Produksi. Pada modul PEMS memberikan kontribusi solusi terhadap perubahan proses bisnis dalam Implementasi *Core Sampler*.

The Company also stays focused on SAP ERP development, where in 2017 a number of major and minor development and improvement have been carried out. In Sales and Distribution module, the sugar business process has been developed with the addition of customer service, namely Debit Memo Drop Loan and Sugar Sales Return Order. For Tobacco line of business, there is addition of Down Payment feature on tobacco sales. In Production Planning module, improvement and business process changes in the flow of process auxiliary materials usage by using the concept of Staging Area, so that the process auxiliary materials usage can be monitored and controlled efficiently and can contribute significantly in suppressing the Cost of Production component. The PEMS module contributes by providing solutions to business process changes in Core Sampler Implementation.

PENGHARGAAN DI TAHUN 2017

Urusan Teknologi Informasi telah melalui *Assesment* dan Audit IT yang dilakukan oleh PT Sinergi Nusantara Bersatu sebagai Konsultan IT Master Plan dan IT *Governance Holding* Perkebunan. Dengan hasil *assessment* sebagai berikut:

1. IT Governance : mendapatkan nilai maturity sebesar 3.03 (*Established*).
2. IT Organization : mendapatkan level *Partner*.

AWARDS IN 2017

Information Technology has been through IT Assessment and Audit conducted by PT Sinergi Nusantara Bersatu as IT Consultant of Master Plan and IT Governance Plantation Holding. With the assessment results as follows:

1. IT Governance: obtained maturity score of 3.03 (Established).
2. IT Organization: obtained Partner level.

BIAYA INVESTASI DAN PROYEKSI TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan telah melakukan investasi TI di tahun 2017 sebesar Rp1.398.488.130, turun 63,12% dibandingkan investasi tahun 2016 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp3,79 miliar. Adanya penurunan tersebut disebabkan karena tidak terealisasinya beberapa investasi TI.

IT INVESTMENT COST AND PROJECTION

The Company has made IT investments in 2016 totaled IDR1,398,488,130, down by 63.12% than the 2016 IT investment of IDR3.79 billion. The decline was due to the unrealization of several IT investments.

Investasi	*Investment*	2017 *(Rp)/(IDR)*	2016 *(Rp)/(IDR)*
Co-Sourching Implementasi Sistem Integrasi ERP SAP	*Co-Sourcing ERP SAP system integration implementation*	139.350.000	216.500.000
Penyusunan & Implementasi Masterplan TI	*IT Masterplan development and Implementation*	-	-
Pengembangan Aplikasi & Training TI	*IT Application development and Training*	26.930.000	317.465.624
Pengembangan Infrastruktur & Jaringan	*Infrastructure & Network Development*	-	633.670.981
Pengadaan Laptop, Printer, Scanner, UPS dll	*Procurement of Laptops, Printers, Scanners, UPS, and others.*	76.974.000	284.844.544
Annual Maintenance ERP SAP	*Annual Maintenance ERP SAP*	160.122.750	501.286.968
Cloud Computing & ISP	*Cloud Computing & ISP*	813.377.448	1.776.152.667
Software Original	*Original Licensed Software*	62.139.000	412.384.565
Pemeliharaan Jaringan & Hardware	*Network & Hardware Maintenance*	119.594.932	63.000.000
Jumlah	*Total*	1.398.488.130	3.792.920.784

Proyeksi investasi di tahun 2018 dapat disampaikan sebagai berikut:

Projection of IT Investments in 2018 can be presented as follows:

Proyeksi Investasi Tahun 2018 *Investment in 2018*	**Harga** *Cost* **(Rp)/(IDR)**
Optimalisasi & Stabilisasi ERP SAP *Optimization & Stabilization of SAP ERP*	270.000.000
Pengembangan program strategis Non-SAP dan Training TI *Development of Non-SAP strategic program and IT Training*	2.500.000.000
Pengembangan Infrastruktur dan Jaringan Teknologi Informasi *Development of Information Technology Infrastructure and Network*	800.000.000
Pengadaan Laptop, Printer, Scanner, UPS dll *Procurement of Laptops, Printers, Scanners, UPS etc.*	803.000.000
Optimalisasi Kontribusi TI terhadap proses bisnis ,IT Governance & IT Security *Optimization of IT contribution to business processes, IT Governance & IT Security*	1.000.000.000
Software Original *Original Software*	549.500.000
SAP *Annual Maintenance*	3.203.500.000
Cloud Computing dan ISP *Cloud Computing and ISP*	3.625.180.000
Perawatan dan Pemeliharaan Prasarana IT *Maintenance of IT Infrastructure*	430.000.000
Jumlah *Total*	13.181.180.000

ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengembangan TI Perseroan memperhatikan beberapa unsur strategis yaitu:

1. Pengembangan Kebijakan
   Fungsi dan tujuan komponen *roadmap* ini adalah untuk mendukung kebijakan strategi bisnis yang selaras dengan visi dan misi pada Perseroan, guna mendukung strategi bisnis di lingkungan Perseroan dan *Holding* Perkebunan.
2. Sistem dan Aplikasi
   Setiap aplikasi yang ada di Perseroan akan dikelola dan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan internal dan eksternal dalam pengelolaan data dan informasi untuk menunjang keterbukaan informasi serta pencapaian kinerja yang handal.
3. Infrastruktur
   Peningkatan kualitas layanan data berupa kecepatan konektifitas, layanan data setiap tahun terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu pada komponen *roadmap* ini menintikberatkan pada peningkatan kualitas layanan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta kualitas layanan yang diberikan.

IT DEVELOPMENT ROADMAP

The Company's IT Development pays attention to several strategic elements:

1. Policy Improvement
   The purpose of this roadmap is to support the strategic business policies in the Company that are associated with the Company's vision and mission and Holding Perkebunan.
2. System and Application
   Every application applied in the Company will be managed and developed to assist in meeting internal and external needs in data and information management as a support of information disclosure and reliable performance.
3. Infrastructure
   Quality of connectivity in data services will be enhanced every year. Therefore, this roadmap is focused on improving of the service quality with due regard to budget availability and service quality.

4. SDM dan informasi
   Peningkatan kualitas SDM melalui sosialisasi dan bimbingan teknis sehingga komponen khususnya yang terkait dengan Teknologi Informasi dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang terkait dengan TI serta untuk meningkatkan kualitas SDM agar tercipta efektifitas kerja di lingkungan Perseroan.

Pengembangan Kebijakan

Inventarisasi Kebijakan Teknologi Informasi

Tahap ini merupakan awalan dari penyusunan sebuah kebijakan Teknologi Informasi.

Tujuan dari Inventarisasi ini adalah:
1. Terpetakannya seluruh informasi kebijakan Teknologi Informasi baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dapat dilaksanakan.
2. Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya peraturan di bidang Teknologi Informasi dalam melakukan pelaksanaan tugas di dalam perusahaan.
3. Penyusunan data dan informasi terkait kebijakan Teknologi Informasi.

Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi

Salah satu landasan dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi adalah penyusunan sebuah perencanaan pengembangan Teknologi Informasi untuk beberapa tahun ke depan yang tertuang dalam *Master Plan* Teknologi Informasi. Penyusunan *Master Plan* Teknologi Informasi tidak hanya melibatkan pihak internal,namun juga melibatkan pihak eksternal dan *shareholder*. Perihal tersebut, penyusunan Master Plan Teknologi Informasi perseroan akan bersinergi dan menjadi *derivative* dari *Master Plan* Teknologi Informasi Holding Perkebunan. Sehingga Perseroan khususnya dalam pengembangan Teknologi Informasi dapat berperan serta dalam mendukung visi, misi, dan strategi bisnis *Holding* Perkebunan.

Sistem dan Aplikasi

Inventarisasi Sistem dan Aplikasi

Oleh karena itu perlu diadakannya inventarisasi terhadap setiap aplikasi yang telah dikembangkan di lingkungan Perseroan, dengan tujuan sebagai berikut:
1. Terpetakannya seluruh informasi terkait fungsi serta manajemen aplikasi Teknologi Informasi baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dapat dilaksanakan.
2. Informasi mengenai detail arsitektur aplikasi seperti operating sistem, *database*, *library* maupun hal-hal teknis yang terkait lainnya.
3. Penyusunan rencana pengembangan peningkatan kualitas aplikasi baik.

4. Human Resources and information
   HR quality improvement is carried out through supervision and technical mentoring so that the components most notably those related to IT will have knowledge and understanding on the matters related to IT as well as will improve HR quality so as to create work efficiency in the Company.

Policy Development

Inventory of Information Technology Policies

This Phase is a beginning of Information Technology policy arrangement.

The inventory aims to:
1. Make a mapping of all information regarding Information Technology policies, both the policies that are already applied and not yet applied.
2. Instill an awareness of the importance of Information Technology rules in performing tasks in the Company.
3. Data and information management related to Information Technology policies.

Information Technology Master Plan Development

One of the foundations in implementing Information Technology is the preparation of Information Technology development plan for the next few years as outlined in the Information Technology Master Plan. The preparation of the Information Technology Master Plan involves not only internal parties, but also external parties and shareholders. To that matters, the preparation of the Company's Information Technology Master Plan will synergize and become derivative from the Information Technology Master Plan of Plantation Holding. Thus the Company especially in the development of Information Technology can participate in supporting the vision, mission, and business strategy of Plantation Holding.

System and Application

Inventory of System and Application

There is a necessity to make inventory of all applications that have been developed in the Company for the following purposes:
1. The mapping of all information regarding functions and management of Information Technology applications that have been applied and/or not yet applicable.
2. Information regarding details of application architecture such as operating system, database, library, and other related technical matters.
3. Preparation of the plan for IT application quality enhancement.

Standarisasi Data, Informasi Dan Layanan

Penerapan standar data, informasi dan layanan Perseroan harus memiliki kebenaran dan sumber yang mengikat sehingga dapat menjadi rujukan dalam pengelolaan data dan informasi. Melalui penerapan kebijakan manajemen diharapkan pelaksanaan standarisasi data, informasi dan layanan dapat dilaksanakan dengan berkesinambungan karena akan memudahkan pengelolaan perencanaan dan pencapaian dari setiap kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan dari *roadmap* ini yaitu melalukan peningkatan efektivitas dan efisiensi penerapan Teknologi Informasi.

Infrastruktur

Inventarisasi Manajemen Jaringan

Tahap ini merupakan tahap awal dari penyusunan peningkatan kualitas manajamen jaringan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memetakan hasil dan capaian untuk setiap kemajuan manajemen di Perseroan. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Terpetakannya seluruh informasi terkait manajemen jaringan Perseroan baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dapat dilaksanakan.
2. Terbentuknya dapat seluruh seluruh infrastruktur beserta seluruh laporan yang telah diimplementasikan.
3. Penyusunan rencana kegiatan terkait peningkatan kualitas manajemen.

Audit Infrastruktur

Hasil dari inventarisasi infrastruktur akan menjadi salah satu modal utama untuk melakukan audit infrastruktur. Audit infrastruktur menjadi sangat penting karena melalui hal ini akan memungkinkan pemetaan pencapaian dari setiap kebijakan yang telah dilakukan di bidang infrastruktur.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Inventarisasi capaian serta permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang infrastruktur.
2. Solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan setiap permasalahan yang ada serta laporan audit infrastruktur yang menjelaskan kondisi terkini serta hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas jaringan di Perseroan.

SDM dan Informasi

Inventarisasi Kualitas Data dan SDM

Kemajuan sebuah kementerian mengenai Teknologi Informasi tidak hanya tergantung pada kebijakan, infrastruktur maupun ketersediaan aplikasi. Salah satu faktor pendorong dari kemajuan Teknologi Informasi adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengelolaan informasi.

Standardization of Data, Information, and Services

Standardization of data, information and services of the Company must be accurate and have sources of reference in data and information management. By applying management policy, it is expected that standardization of data, information and services can be continuously implemented to facilitate management of planning and accomplishing all activities so as to conform with to the purpose of this roadmap, which is to improve effectiveness and efficiency of Information Technology implementation.

Infrastructure

Inventory of Network Management

This phase is the beginning of the plan to improve network management quality. This activity aims to make a mapping of results and accomplishment of the Company's management. This activity has the following purposes:

1. Realize the mapping of information regarding the Company's network management, both already applied and/or not yet applied.
2. Establish all infrastructures with all reports that have been implemented.
3. Arrange activity plans related to management quality enhancement.

Infrastructure Audit

Results of infrastructure inventory will become one of the main instruments to perform infrastructure audit. This will allow mapping of every infrastructure policies that has undertaken.

The activity has the following purposes:

1. Inventory of results and problems occurring in the infrastructure
2. Solutions that can be undertaken to solve all obstacles and audit report regarding the infrastructure which describes the current condition and other matters that are necessary to improve the Company's network quality.

HR and Information

Inventory of Data and HR Quality

One of the factors that encourage Information Technology improvement is the availability of Human resources (HR) and information management. The existence of these two elements will ensure that Information Technology management can run properly. Therefore, there is a need

Melalui unsur inilah maka dapat dipastikan pengelolaan Teknologi Informasi akan dapat berjalan dengan baik. Untuk mendukung hal inilah maka dilakukan proses inventarisasi mengenai pengelolaan data untuk mengetahui kualitas data dan informasi serta juga melakukan analisa ketersediaan SDM di PTPN X. Inventarisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Kualitas data dan informasi yang tersedia di Perseroan.
2. Struktur layanan data dan informasi yang diterapkan di setiap unit.
3. Kualitas dan ketersediaan SDM untuk mendukung peningkatan Teknologi Informasi Perseroan.

Sertifikasi SDM Teknologi Informasi dan Layanan Informasi

Kemampuan SDM Teknologi Informasi dapat diketahui dengan adanya kualifikasi untuk setiap SDM. Sebuah kualifikasi dapat terlihat melalui pelaksanaan sertifikasi terkait pelaksanaan tupoksi masing-masing bagian. Oleh karena itu menjadi penting diterapkan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan yang telah memiki sertifikasi untuk berbagai macam pengelolaan Teknologi Informasi dan layanan informasi. Melalui sertifikasi ini diharapkan maka kemampuan dan pengetahuan setiap SDM yang mengelola layanan informasi menjadi lebih baik lagi. Peningkatan layanan yang diberikan juga dapat ditunjukkan dengan melalui sertifikasi dari beberapa badan standarisasi. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana level pelayanan yang telah diberikan maka dapat diberlakukan sebuah kajian atau sebuah audit untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Kualifikasi dapat dilakukan audit untuk mengetahui standar organisasi dan pelayanan seperti SNI atau ISO.

Dari 4 (empat) unsur strategis roadmap TI di atas, yaitu Perencanaan, Pengembangan dan Layanan TI kepada Perseroan yang diwujudkan dengan *tagline* "PASTI BISA", Teknologi Informasi pada Perseroan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *business enabler* sesuai dengan Visi dan Misi yang diembannya.

to make inventory of data management to find out the quality of data and information as well as analyze the availability of Human Resources in PTPN X. This inventory has been conducted with the aim to have knowledge of:

1. Quality of data and information available in the Company.
2. Structure of data and information services that can be applied in all units
3. HR quality and availability to support the Company's Information Technology enhancement.

Information Technology HR Certification and Information Services

The capability of Information Technology human resources can be seen from the qualifications of each IT personnel. Qualification can be indicated with certifications related to the main functions of each division. Therefore, it is necessary to perform Information Technology improvements through IT certification training programs. With this certification, it is expected that capability and knowledge of all IT personnel will improve. Enhanced service can also be seen through certifications from several standardization agencies. Therefore, to determine to which extent the services have been delivered, a review or an audit is performed to find out customers' satisfaction on the service provided. This qualification can be provided through an audit to find out standards of the organization and services standards, such as SNI and ISO.

From the above 4 (four) strategic elements of IT roadmap, IT Planning, Development and Services embodied with "PASTI BISA" tagline, the Company's Information Technology can perform its task and function as business enabler in accordance with its Vision and Mission.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Perseroan berhasil menerapkan prinsip GCG secara baik, yang terlihat dari hasil Self Assessment tahun 2017 dengan meraih skor 82,80 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 80,04.

The Company managed to properly implement GCG principles, as seen from the results of Self Assessment in 2017 with a score of 82.80, an increase compared to the previous year of 80.04.

Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik

General Principles of Good Corporate Governance

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi kebutuhan dunia usaha di seluruh dunia, termasuk Indonesia. GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang memiliki etika. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, atau *sustainability development*, GCG menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga masa-masa mendatang.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices has become a worldwide business requirement, including Indonesia. GCG are principles for the Company's management processes and mechanisms based on regulatory compliance and reflection of an ethical business world. In the concept of sustainable development, GCG becomes one of the main pillars that are expected to create the foundation of a healthy investment climate. In the future, GCG has become one of the fundamental factors for investors in assessing the Company's performance.

Pendekatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance Approach

Regulator bersama-sama dengan berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap perkembangan GCG di Indonesia memberikan penegasan yang kuat atas pentingnya hubungan yang harmonis antara entitas usaha dan pemangku kepentingan. Melalui hubungan yang harmonis ini, diharapkan akan terbentuk dunia usaha yang menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat, dan justru mampu berkontribusi bagi dimensi sosial dan lingkungan di sekitarnya.

The regulators together with various parties concerned with the development of GCG encourage a strong affirmation on the importance of harmonious relationship between business entities and stakeholders. This harmonious relationship is expected to create a business world that avoids instant profit gain, but able to contribute to the surrounding social and environmental.

Harmonisasi Entitas Usaha dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Harmonization of Business Entity with Shareholders and Stakeholders

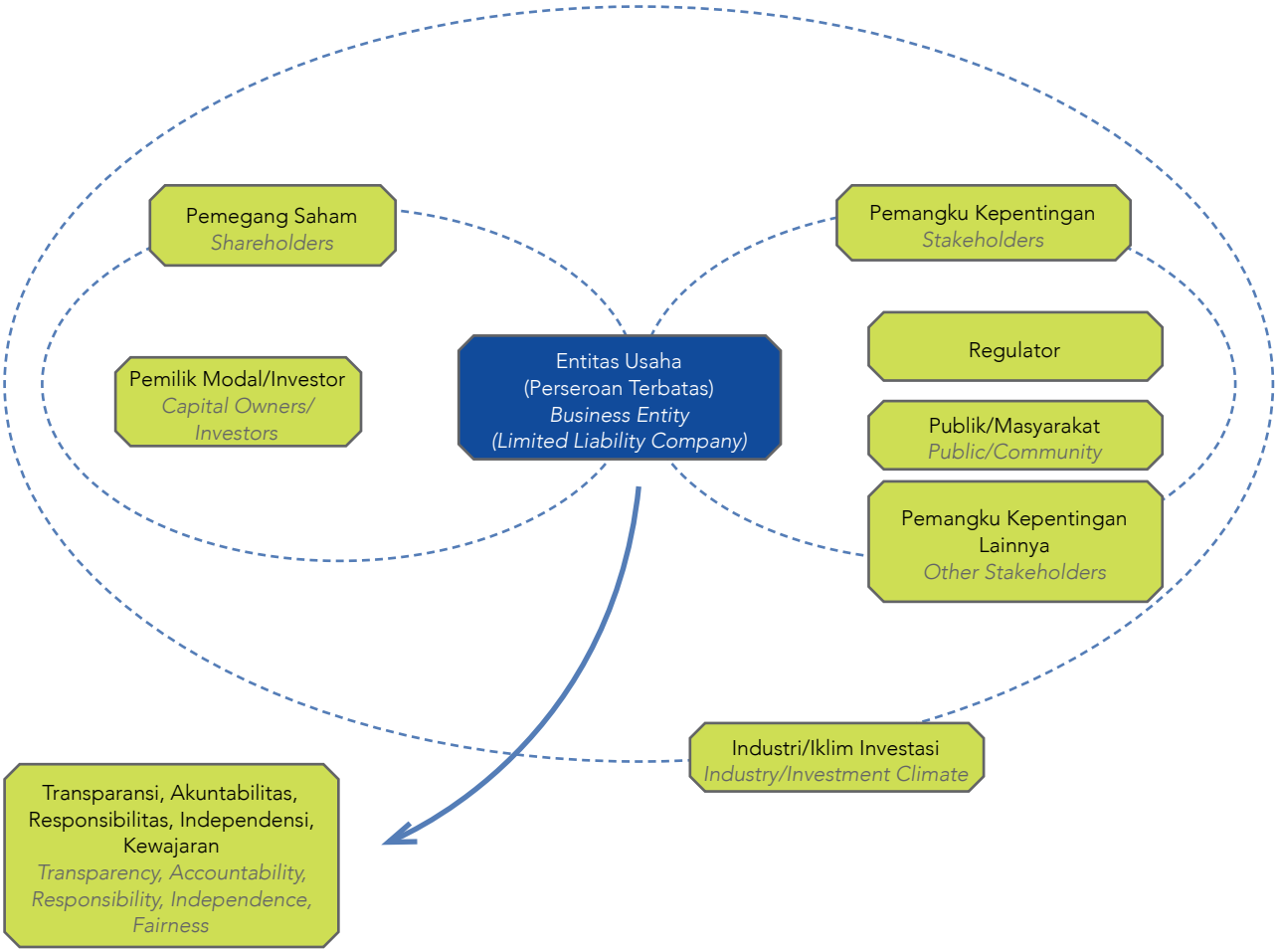

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup PTPN X

Development of Good Corporate Governance Implementation in PTPN X

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Prinsip Dasar dan Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, Perseroan mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau yang biasa dikenal dengan sebutan UUPT. Undang-undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi; mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, hingga hubungan Perseroan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dimana aspek-aspek tersebut juga diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Sebagai eks-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Negara masih memiliki saham Perseroan sebesar 10%, penerapan GCG di lingkup Perseroan juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 yang kemudian diubah dengan No. PER-09/MBU/2012, dimana disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha Perseroan. Selain itu penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan para pemangku kepentingan dan membawa Perseroan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tersebut, tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.
3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

IMPLEMENTATION BASIS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Basic Principle and Purposes of Good Governance Implementation

In implementing GCG, the Company refers to several laws and regulations, primarily Law No 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, or usually referred to as UUPT. This Law gives a complete coverage to organization management aspects; from rights and obligations of shareholders, duties and authorities of Board of Directors and Board of Commissioners, up to the Company's relation with internal and external stakeholders, in which such aspects are also regulated in the Company's Articles of Association.

As an ex State-Owned Enterprise (SOE) where the State still owns 10% shares in the Company, GCG implementation in the Company also refers to the regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 which was amended by No. PER-09/MBU/2012, reads that GCG is the principles that underlays a process and mechanism of company's management based on laws and regulations and business ethics. The implementation of GCG which covers transparency, accountability, responsibility, independence and fairness is a strong practice for the sustainability of Company's business activities. Aside from that, GCG implementation that refers to the best practice shall improve the shareholders and stakeholders trust and bring the Company to a significant and sustainable improvement.

Based on the Regulation of Minister of SOE, the purposes of GCG principles implementation are:

1. To optimize SOE value so that the Company will have strong competitive advantages, either nationally or internationally.
2. To encourage SOE professional, efficient and effective management and to empower the function so that it will improve the independence of Company's organs.
3. To encourage the Company's organs in making decision and to carry out their actions in a good moral and compliance against laws and regulations and with awareness of SOE social responsibilities against the stakeholders and surrounding environment.
4. To improve SOE contribution in the national economy
5. To improve a conducive climate for the development of national investment

Prinsip implementasi GCG yang digunakan Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 serta Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui azas-azas GCG yang umum dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness* atau Kewajaran.

GCG principles implementation applied by the Company refers to the Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 and GCG General Code from the National Committee of Governance Policy (KNKG) through GCG principles widely known as TARIF, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.

Azas-azas Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Principles of Good Corporate Governance

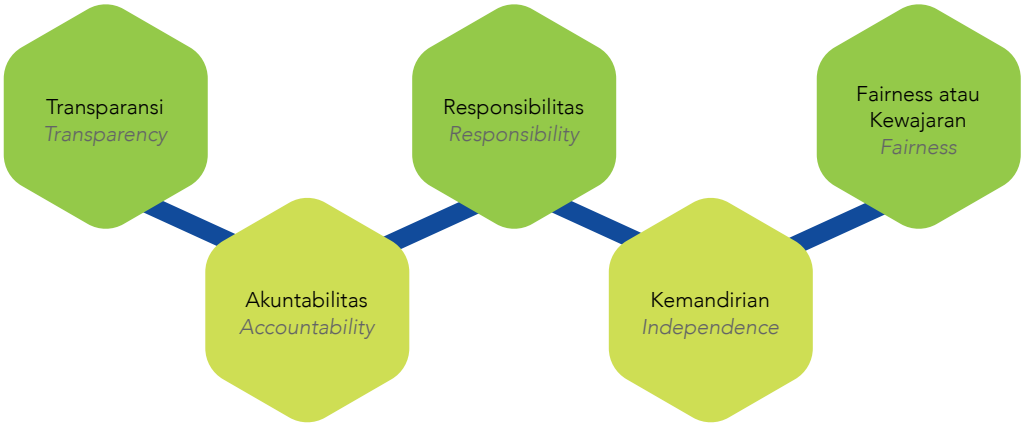

Penerapan kelima azas tersebut di lingkup Perseroan adalah sebagai berikut:

The implementation of those five principles in the Company is as follows:

5 Azas GCG *5 GCG Principles*	**Penjelasan** *Explanation*	**Penerapan di PTPN X** *Implementation in PTPN X*
Transparansi *Transparency*	Perseroan mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. *The Company defines transparency as an openness in the process of decision making and openness in disclosing material and relevant information regarding the Company.*	• Perseroan sudah menggunakan system e-proc dalam melakukan pengadaan barang dan jasa • Laporan tahunan berkala yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen, baik bulanan, triwulan, dan tahunan; • Penyusunan dan penjelasan rencana Kerja dan anggaran perusahaan tahunan; • Penerbitan Laporan tahunan; • Pemanfaatan *website* untuk menyampaikan informasi kepada *stakeholders* dan *shareholders* • Perusahaan telah mengikuti Annual Report Award (ARA) • *The Company has used e-proc system for procurement of goods and services* • *Periodic annual reports covering financial statements and management report, whether monthly, quarterly, and yearly;* • *Preparation and explanation of Corporate annual work plan and budget;* • *Annual Report issuance;* • *Utilization of website to deliver information to stakeholders and shareholders* • *The Company has participated in the Annual Report Award (ARA)*

5 Azas GCG *5 GCG Principles*	**Penjelasan** *Explanation*	**Penerapan di PTPN X** *Implementation in PTPN X*
Akuntabilitas *Accountability*	Perseroan mendefinisikan akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan Perseroan dapat berlangsung secara efektif. *The Company defines accountability as a clear function, implementation and responsibility of the Organs so that the Company management may become effective.*	• Pembagian tugas yang jelas antar organ perseroan, termasuk dengan merinci tugas dan wewenang rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan Komisaris, direksi dan ukuran kinerjanya; • Memiliki ukuran kinerja yang jelas berdasarkan ukuran yang disepakati, konsisten terhadap nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem *reward* dan *punishment* • *Clear division of tasks between the Company's organs, including detailing the duties and authorities of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Board of Directors and Performance Indicator;* • *Has a clear performance indicator based on agreed measurement, consistent to corporate values, business goals and corporate strategy, and has a reward and punishment system*
Responsibilitas *Responsibility*	Perseroan mendefinisikan responsibilitas atau tanggung jawab sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *The Company defines responsibilities as compatibility in Company's management against laws and regulations and healthy corporation principles.*	• Mematuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), baik program kemitraan (petani) maupun bina lingkungan; • Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan otoritas jasa Keuangan dan Bursa efek indonesia. • Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu; • *Comply with the provisions of Articles of Association and prevailing laws and regulations* • *Carry out Corporate Social Responsibility, both partnership program (farmers) and community development program* • *Carry out the information disclosure obligation in accordance with regulations of Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange* • *Fulfill tax obligations properly and on time*
Independensi *Independence*	Perseroan mendefinisikan kemandirian sebagai keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang sehat.	• Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab diantara organ Perseroan; • Dewan Komisaris, direksi dan seluruh pengawas senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan dengan menandatangani pakta integritas; • Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan seperti dalam kebijakan kepegawaian, pengadaan, pemasaran serta keuangan. • *Mutual respect for rights, obligations, duties, authorities and responsibilities among organs of the Company* • *Board of Commissioners, Board of Directors and all supervisors seek to avoid any conflict of interest in decision-making by signing an integrity pact* • *The implementation of policies and systems that minimize the occurrence of conflict of interest such as in employment, procurement, marketing and finance policies*
Fairness, atau Kewajaran *Fairness*	Perseroan mendefinisikan *fairness* atau kewajaran sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. *The company defines fairness as justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders which arises based on agreements and laws and regulations.*	• Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam rups sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan; • Perseroan melaporkan seluruh rekanan secara adil dan transparan melalui sistem *e-proc*; • Perseroan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi seluruh pegawai sesuai dengan kemampuan perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku • *Shareholders are entitled to attend and vote in the GMS, pursuant to the applicable regulations and the Company's articles of association* • *The Company submit reports regarding all partners in a fair and transparent manner through the e-proc system* • *The Company provides good and safe working condition for all employees in accordance with its capability and prevailing laws and regulations*

Sebagai entitas usaha berstatus Emiten yang memperdagangkan obligasi di pasar modal indonesia, Perseroan memiliki kewajiban untuk menerapkan peraturan terkait pasar modal serta peraturan turunannya. Selain itu, *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang telah diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal tahun 2014 serta beberapa peraturan yang menyertainya menjadi acuan bagi Perseroan untuk dapat terus menyempurnakan penerapan GCG di lingkup Perseroan. Salah satunya adalah Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Penyesuaian langkah ini diharapkan dapat memberikan fondasi pelaksanaan GCG Perseroan, khususnya bagi akuntabilitas Perseroan sebagai Emiten.

As a business entity with issuer status that trades bond in Indonesia capital market, the Company has obligation to implement regulation related to capital market and all of its derivative regulations. Aside from that, the Roadmap of Indonesian Corporate Governance which was launched by the Financial Services Authority (OJK) at the early of 2014 and several other following regulations has become references for the Company to continuously refining GCG implementation in the Company. Among others is OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 regarding Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 regarding Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies. This adjustment is expected to give a foundation to the Company's GCG implementation, especially for the Company's accountability as an Issuer.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Sebagai entitas usaha, Perseroan menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang menjadi kaidah hubungan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pemegang saham sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam Perseroan memiliki hak yang diatur dalam Undang-undang. Perseroan memiliki Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berfungsi sebagai forum bagi seluruh pemegang saham untuk menggunakan haknya.

Disamping itu, prinsip penerapan GCG di lingkup Perseroan juga dilakukan dengan mengakui hak dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, baik yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan maupun melalui kesepakatan bersama untuk mendorong kerja sama yang aktif dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan kesinambungan Perseroan. Pemangku kepentingan secara umum terbagi menjadi dua: internal mencakup karyawan serta pemegang saham; dan pemangku kepentingan eksternal mencakup regulator, pelanggan, kreditur, mitra kerja/rekanan/pemasok/vendor, organisasi profesi dan publik masyarakat pada umumnya.

Shareholders and Stakeholders

As a business entity, the Company implements Good Corporate Governance which become the relationship rules with shareholders and stakeholders. Shareholders as one of stakeholders in the Company have rights as regulated in the Law. The Company has General Meeting of Shareholders (GMS) which functions as forum for all shareholders to exercise their rights.

Besides that, the implementation of GCG principles in the Company is also carried by acknowledging the rights and building relationship with Stakeholders , either as governed by the laws and regulations or through a joint agreement to encourage active cooperation in creating welfare, work opportunity, and Company's sustainability. Stakeholders are generally distributed into two: Internal Stakeholders which include employees and shareholders and external shareholders which include regulator, customers, clients, partners/suppliers/vendors, professional organization and public in general.

Landasan Hukum

Penerapan GCG di lingkungan Perseroan mengacu kepada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Legal Ground

GCG implementation in the Company refers to several prevailing regulations/laws in Indonesia, such as:

1. Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company
2. Law of Republic of Indonesia No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises (SOE)
3. Law of Republic of Indonesia No. 8 of 1995 regarding Capital Market

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003.
7. Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
8. Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
10. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
11. Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
12. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
13. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.

Beberapa peraturan terkait regulasi pasar modal dari OJK diantaranya adalah:

1. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003, Peraturan No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

2. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-40/PM/2003, Peraturan Bapepam No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

3. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-431/BL/2012, Peraturan No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

4. Law of Republic of Indonesia No. 20 of 2001 regarding Amendment of Constitutional of Republic of Indonesia No. 31 of 1999 regarding Corruption Eradication

5. Law of Republic of Indonesia No. 28 of 1999 regarding State Officials who are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism.
6. Law of Republic of Indonesia No. 15 of 2002 regarding Money Laundering Criminal Act as amended by Law of Republic of Indonesia No. 25 of 2003.

7. Law of Republic of Indonesia No. 14 of 2008 regarding Information Disclosure
8. Law of Republic of Indonesia No.11 of 2008 regarding Electronic Information and Transaction
9. Law or Republic of Indonesia No. 38 regarding Amendment to Government Regulation No. 6 of 2006 regarding Management of State/Regional Owned Property
10. Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 and its amendment No. PER-09/MBU/2012 regarding Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

11. Decision of Secretary of State Minister of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 regarding Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation on State-Owned Enterprises.
12. Regulation of Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 regarding Guidelines on Determination of Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
13. Regulation of Minister of SOE No. PER-02/MBU/2013 dated 18 February 2013 regarding Guidelines on State-Owned Enterprise Information Technology Management.

Several regulations related to capital market from OJK are:

1. Decision of Chairman of Capital Market Supervisory Agency No. Kep-36/PM/2003 dated September 30, 2003, Regulation No. No. X.K.2 regarding Obligation to Submit Periodical Financial Statements
2. Decision of Chairman of Capital Market Supervisory Agency No. Kep-40/PM/2003, Regulation of Capital Market Supervisory Agency No. VIII.G.11 regarding Responsibility of Board of Directors on Financial Statements
3. Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-431/BL/2012, Regulation No. X.K.6 regarding Obligation to Submit Annual Report for Issuers of Public Companies.

4. Lampiran Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perubahan Publik.

5. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

6. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

7. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

8. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

9. Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran OJK No. 30/Seojk.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
11. Peraturan OJK No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
12. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
13. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
14. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
15. Peraturan OJK No. 55 /POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

4. Annex to Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-179/BL/2008 dated 14 May 2008, Regulation No. IX.J.1 regarding Principals of Company's Articles of Association which conduct Public Offering for Equity Stock Exchange and Public Amendment.
5. Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-413/BL/2009 dated 25 November 2009, Regulation of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No.IX.E.2 regarding Material Transaction and Amendment to Main Business Activity.
6. Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-412/BL/2009 dated November 25, 2009, Regulation of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No.IX.E.1 regarding Affiliated Transaction and Conflict Interest on Certain Transactions.
7. Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-554/BL/2010 dated December 30, 2010 regarding Amendment to Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-06/PM/2000 dated March 13, 2000 regarding Amendment of Regulation of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. VIII.G.7 regarding Guidelines on Financial Statement Reporting.
8. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 regarding Guidelines of Corporate Governance Implementation in Public Company, and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 regarding Guidelines of Corporate Governance in Public Company.
9. OJK Regulation No. 29/POJK.04/2016 regarding Annual Report of Issuer and Public Company, and OJK Circular Letter No. 30/SEOJK.04/2016 regarding Format and Content of Annual Report of Issuer and Public Company.
10. OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 regarding Realization Report of Public Offering Fund Utilization
11. OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company
12. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer and Public Company.
13. OJK Regulation No. 34/POJK.04.2014 dated December 8, 2014 regarding Nomination and Remuneration Committee of Issuer and Public Company.
14. OJK Regulation No 35/POJK.04/2015 dated December 8, 2014 regarding Corporate Secretary of Issuer and Public Company.
15. OJK Regulation No 55.POJK.04/2015 dated December 23, 2015 regarding Formation and Working Guidelines of Audit Committee.

INFRASTRUKTUR DAN SOFTSTRUCTURE TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Infrastruktur GCG PTPN X dan Kesesuaian Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang Berlaku

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), infrastruktur keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan pemegang saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya untuk mengelola; serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan PT menganut model 2 (dua) badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

Perseroan telah memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

Infrastruktur GCG Perseroan juga mengikutsertakan beberapa aspek penting yang berperan untuk mendukung penguatan kontrol dan pengelolaan terhadap Perseroan, terdiri dari organ pendukung yang meliputi Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal serta komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Struktur tersebut telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Softstructure: Perangkat Kebijakan GCG

Softstructure atau perangkat kebijakan berguna untuk memberikan kerangka acuan dan standarisasi pelaksanaan tugas dari setiap organ GCG yang dimiliki Perseroan serta seluruh insan PTPN X. Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh peraturan dan perundang-undangan terkait sebagai dasar perangkat kebijakan dalam melaksanakan kepatuhan serta penerapan prinsip-prinsip korporasi yang sehat di lingkup Perseroan.

Disamping peraturan/perundangan yang berlaku, Perseroan memiliki beberapa dasar peraturan internal yang mengatur Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perseroan, antara lain:

1. Anggaran Dasar Perseroan, dengan perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Nanda Fau Iwan, SH, M.Kn No. 11 tanggal 14 Maret 2016 dan disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0036411

INFRASTRUCTURE AND SOFTSTRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

GCG Infrastructure of PTPN X and Conformity to Applicable Laws and Regulations

Based on Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (UU PT), the organizational infrastructure of a Limited Liability Company covers the interests of shareholders as cascaded in the General Meeting of Shareholders (GMS); Board of Directors with duties to manage; and Board of Commissioners that performs supervisory function. The management system of Limited Liability Company adheres to the two tier system model, where Board of Commissioners and Board of Directors has clear authority and responsibility according to its respective function as mandated in laws and regulations.

The Company already has the three main organs, namely GMS, Board of Commissioners and Board of Directors. Board of Commissioners and Board of Directors are responsible to maintain the Company's sustainability in the long run. Therefore, Board of Commissioners and Board of Directors must have a common perception on the Company's vision, mission and values.

The Company's GCG Infrastructure also incorporates several important aspects contributing to strengthen the control and management of the Company, comprising of supporting organs including Internal Audit Unit, Corporate Secretary, Risk Management, Internal Control System as well as committees under Board of Commissioners. Such structure is in compliance with prevailing regulations in Indonesia.

Softstructure: GCG Policy Instrument

Softstructure or policy instrument is useful to provide a frame of reference and standardization on duties execution of each GCG organ owned by the Company and all personnel of PTPN X. The Company is committed to apply all relevant regulations and legislations as the basis of policy instruments in implementing compliance and application of healthy corporate principles in the Company.

Aside from the prevailing laws and regulations, the Company owns several basis internal rules that regulate Good Corporate Governance in the Company, such as:

1. Company's Articles of Association, with last amendment according to Notarial Deed Nanda Fau Iwan, SH. M.Kn No. 11 dated March 14, 2016 as legalized by the Decision of Minister of Justice and Human Rights No. AHU-

tanggal 1 April 2016.

2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan, atau *Code of Corporate Governance*, yang telah diperbaharui dan disahkan Direksi pada 19 Agustus 2016.
3. Pedoman Perilaku, atau *Code of Conduct*, yang telah diperbaharui serta disahkan Direksi pada 19 Agustus 2016.
4. *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi, yang telah diperbaharui serta disahkan Direksi pada 19 Agustus 2016.
5. Piagam atau *Charter* Audit Internal, yang telah disahkan Direksi pada 28 Februari 2013.
6. Pedoman Manajemen Risiko, yang telah disahkan Direksi pada 5 Mei 2010.
7. Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang telah disahkan Direksi pada 29 Februari 2012.

AH.01.03-0036411 dated 1 April 2016.

2. Code of Corporate Governance, which has been renewed and approved by Board of Directors on August 19, 2016.
3. Code of Conduct as renewed and approved by Board of Directors on August 19, 2016.
4. Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors as renewed and approved by Board of Directors on August 19, 2016
5. Audit Internal Charter as approved by Board of Directors on February 28, 2013
6. Code of Risk Management, as approved by Board of Directors on May 5, 2010.
7. Code of Procurement as approved by Board of Directors on February 29, 2012.

Landasan Hukum Penerapan GCG PTPN X

Legal Ground of PTPN X GCG Implementation

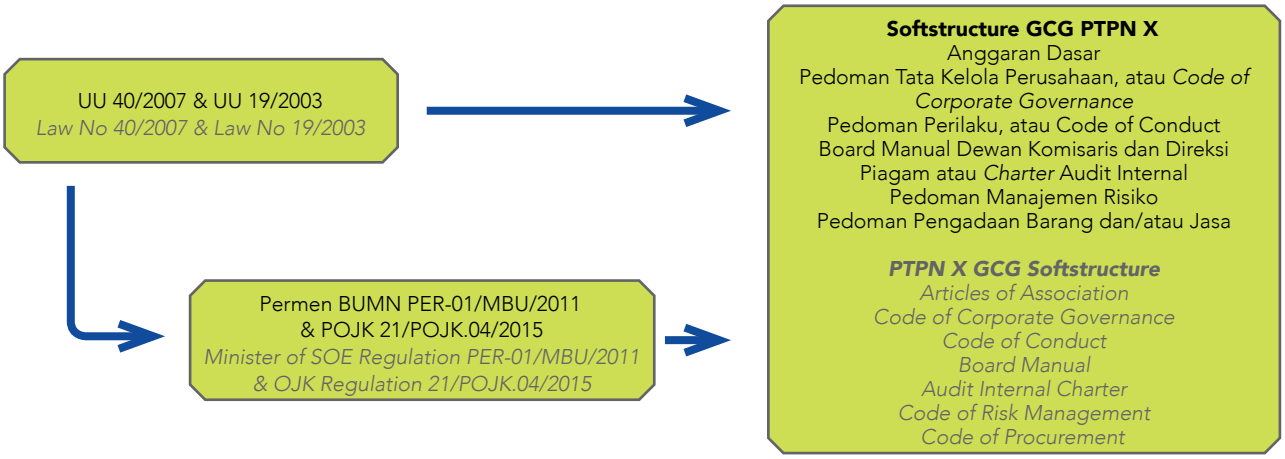

SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai entitas anak BUMN yang memegang azas keterbukaan dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip GCG, Perseroan melakukan sosialisasi terkait praktik-pratik GCG di lingkungan Perseroan. Salah satunya adalah sosialisasi terkait peraturan tentang Larangan Menerima Gratifikasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No. 8.1341/01-13/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi, Perseroan mensosialisasikan atau menyampaikan kepada seluruh jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan terkait surat himbauan yang dikeluarkan oleh *Holding* Perkebunan Nusantara Group No. 3.00/PTPN/414/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Penyampaian Surat Komisi Pemberantasan

SOCIALIZATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY

As a subsidiary of an SOE that holds the transparency principle in order to improve the implementation of GCG principles, the Company conducts socialization related to GCG practices in the Company. One of them is the socialization related to the rules on Prohibition of Receiving Gratification.

Based on Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law No. 31 of 1999 on the Corruption Eradication and Corruption Eradication Commission Letter No. 8.1341/01-13/2017 dated March 15, 2017 on Guidelines and Restrictions on Gratification, the Company socialized or submitted to the entire Board of Directors, Board of Commissioners and employees related to the appeal letter issued by Perkebunan Nusantara Group Holding No. 3.00/PTPN/414/2017 dated March 30, 2017 on the Submission of Letter of Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia

Korupsi Republik Indonesia Mengenai Pedoman dan Batasan Gratifikasi. Selain itu, Perseroan juga melakukan sosialisasi kepada seluruh manajemen dan karyawan terkait surat edaran No. 3.00/X/778/2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal Larangan Menerima Gratifikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1438 H.

PERKEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI TAHUN 2017

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. XX-SURKP/18.003-10/1 bahwa tim telah melakukan *Self Assesment* penerapan GCG di lingkup Perseroan untuk tahun 2017, dengan perolehan skor 82,80 dari skor maksimum 100. Terdapat peningkatan dari tahun 2016 dengan skor 80,04 dari skor maksimum 100.

PENILAIAN: EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Agar penerapan GCG di lingkup Perseroan dapat terukur dengan baik, Perseroan melakukan pemantauan melalui penilaian terhadap seluruh proses dan organ maupun perangkat yang berjalan. Penilaian dilakukan secara berkala di setiap tahunnya, yang akan memberikan rekomendasi peningkatan penerapan prinsip GCG di tahun berikutnya.

Perseroan juga menerapkan penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang memberikan alat bagi Perseroan untuk dapat menilai keseluruhan proses yang dilakukan organisasi dan orientasi hasil yang dicapai. Penilaian ini dapat memberikan masukan kepada Perseroan, khususnya terkait pengelolaan organisasi yang efektif dan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat.

Assessment Penerapan GCG

Metode Assessment

Kementerian BUMN selaku regulator telah mendorong seluruh BUMN dan kelompok usahanya untuk melakukan *assessment* atau penilaian penerapan GCG, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Sebagai bentuk kepatuhan, sekaligus meningkatkan penerapan prinsip GCG secara berkelanjutan, Perseroan telah melakukan penilaian secara periodik. Tujuan *assessment* penerapan GCG di lingkup Perseroan adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di Perseroan, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG-nya.

Regarding the Guidelines and Restrictions on Gratification. In addition, the Company also socialized to all management and employees relating to circular letter No. 3.00/X/778/2017 dated June 21, 2017 on the Prohibition of Receiving Gratification in Eid Al-Fitr 1438 H.

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN 2017

In accordance with Board of Directors Decree No. XX-SURKP/18.003-10/1 that the Team has conducted self assessment on GCG implementation in the Company for 2017 and obtained a score of 82.80 out of maximum score of 100. There is an improvement compared to 2016 with a score of 80.04 out of maximum score of 100.

ASSESSMENT: EVALUATION, MONITORING, AND IMPROVEMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

In order to properly measure GCG implementation in the Company, the Company executes monitoring through assessment on all processes and organs and as well as instruments. Assessment is conducted periodically each year, which will provide improvement recommendations for the implementation of GCG principles in the following year.

The Company also applies the Excellent Performance Appraisal Criteria (KPKU) assessment, which provides a tool for the Company to assess overall process undertaken by the organization and the orientation of achieved results. This assessment can provide input for the Company, particularly regarding effective organizational management in accordance with the healthy corporate principles.

GCG Assessment

Assessment Method

The Ministry of SOE as the regulator has encouraged all SOEs and their business groups to conduct assessment or appraisal on GCG implementation, as stipulated in the Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and its amendment No. PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. As a form of compliance, while continuously improving the implementation of GCG principles, the Company has conducted periodic assessments. The objectives of GCG assessment in the Company are:

1. To measure the quality of GCG implementation through evaluation on fulfillment level of GCG criteria with real condition being implemented in the Company, by giving score/grade on GCG implementation and category of GCG implementation quality.

2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG.
3. Memantau konsistensi penerapan GCG di Perseroan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Perseroan.
4. Memantau pelaksanaan rencana tindak atas rekomendasi hasil evaluasi GCG tahun sebelumnya.

Metode penilaian penerapan GCG mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tertanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Ruang lingkup penilaian penerapan GCG meliputi 43 indikator, 153 parameter, dan 568 sub parameter yang dikelompokkan dalam 6 (enam) faktor/aspek penerapan GCG, yaitu Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan; aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal; aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; aspek Direksi; Pengungkapan Informasi dan Transparansi; serta Aspek Lainnya.

2. To identify the strength and weaknesses of GCG implementation and to suggest for improvement recommendation that will reduce the gap between GCG critera and GCG implementation.
3. To moniter GCG implementation consistency in the Company and to obtain inputs to refine and develop the policy of Corporate Governance in the Company's environment.
4. To monitor the implementation of action plan based on recommendation of the preceding year's GCG evaluation result.

GCG assessment method refers to the Decree of Secretary of Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises. The scope of GCG assessment includes 43 indicators, 153 parameters, and 568 sub parameters that are grouped into 6 (six) factors/aspects of GCG implementation, i.e. Commitment to Sustainable Corporate Governance Implementation; Shareholders and GMS/Capital Owners; Board of Commissioners/Supervisory Board; Board of Directors; Disclosure of Information and Transparency; and Other Aspect.

6 Aspek Assessment GCG
(Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)

6 Aspects of GCG Assessment
(Decree of Secretary of Minister of SOE No. SK-16/S.MBU/2012)

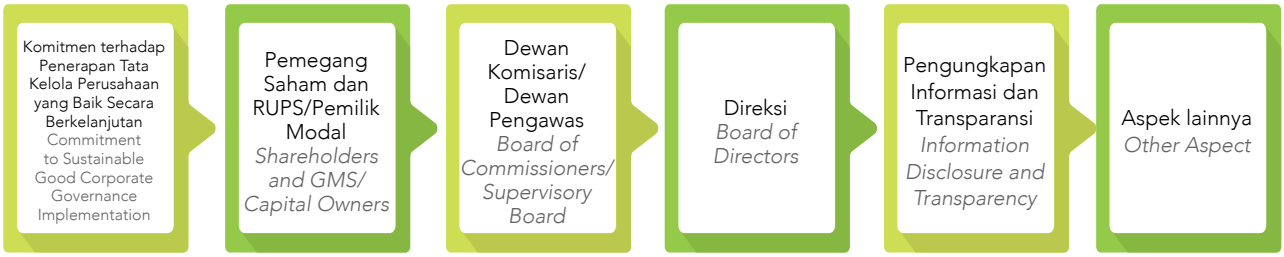

Sesuai Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tertanggal 6 Juni 2012, pemberian skor mengacu kepada indikator skor dan predikat di bawah ini:

In accordance with the Decree of Secretary of Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, scoring refers to the following score indicator and predicate:

Tingkat *Level*	**Rentang Skor Capaian Aktual Tingkat Pemenuhan** *Score Range of Actual Achievement of Fulfillment Level*	**Predikat** *Predicate*
1	Nilai di atas 85 *Score above 85*	"Sangat Baik" *"Excellent"*
2	75 < Skor ≤ 85 *75 < Score ≤ 85*	"Baik" *"Good"*
3	60 < Skor ≤ 75 *60 < Score ≤ 75*	"Cukup Baik" *"Fair"*
4	50 < Skor ≤ 60 *50 < Score ≤ 60*	"Kurang Baik" *"Poor"*
5	Skor ≤ 50 *Score ≤ 50*	"Tidak Baik" *"Very Poor"*

Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2016 dan Tindak Lanjutnya di Tahun Buku 2017

Assessment penerapan GCG di lingkup Perseroan untuk tahun ukur 2016 dilakukan melalui metode *assessment* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

GCG Assessment in Measurement Year 2016 and its Follow-up in Fiscal Year 2017

The assessment of GCG implementation in the Company for 2016 was conducted with assessment method by East Java Finance and Development Supervisory Board (BPKP).

Jenis Penilaian *Type of Evaluation*	:	*Assessment*
Assessor/Penilai *Assessor*	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur *East Java Finance and Development Supervisory Board (BPKP).*
Tahun Buku Penerapan *Implementation Period*	:	1 Januari 2016 - 31 Desember 2016 *Januari 1, 2016 – December 31, 2016*
Periode Pengukuran *Measurement Period*	:	7 – 20 Maret 2017 *March 7-20, 2017*

Berdasarkan *Assessment* yang dilakukan untuk tahun ukur 2016, diperoleh skor penilaian sebagai berikut:

Based on the Assessment conducted for measurement year 2016, the following scores were obtained:

No.	Aspek Governance *Governance Aspect*	Bobot *Weight*	Capaian Perseroan *Company's Achievement*	Persentase *Percentage (%)*	Predikat *Predicate*
I.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation*	7,00	6,14	87,71%	"Sangat Baik" *"Excellent"*
II.	Pemegang Saham dan RUPS *Shareholders and GMS*	9,00	7,82	86,89%	"Sangat Baik" *"Excellent"*
III.	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	35,00	27,55	78,71%	"Baik" *"Good"*
IV.	Direksi *Board of Directors*	35,00	31,11	88,89%	"Sangat Baik" *"Excellent"*
V.	Pengungkapan Informasi dan transparansi *Information Disclosure and Transparency*	9,00	7,42	82,44%	"Baik" *"Good"*
	Sub total	95,00	80,04	84,25%	"Baik" *"Good"*
VI.	Aspek lainnya *Other Aspect*	5,00	-	-	
	Jumlah *Total*	100,00	80,04	80,04%	"Baik" *"Good"*

Keterangan:
0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Note:
0-50: Very Poor| 50-60: Poor| 60-75: Fair| 75-85: Good | 85-100: Excellent

Pelaksanaan *Assessment* untuk tahun ukur 2016 meraih skor 80,04 dengan kategori predikat "Baik".Hasil dari *self assessment* ini berupa rekomendasi-rekomendasi terhadap *Area of Improvement* yang dapat menjadi rujukan untuk aksi perbaikan/

The Assessment for measurement year 2016 obtained score of 80.04 with "Good" predicate. The results of this self assessment were in the form of recommendations on Area of Improvement that can be a reference for improvement/

penyempurnaan yang mengarah kepada *best practices* Tata Kelola Perusahaan yang Baik; yang kemudian disusul dengan laporan rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan GCG tahun 2017 kepada entitas induk/pemegang saham.

Berikut disampaikan *Area of Improvement* untuk tahun ukur 2016 dan pelaksanaan tindak lanjutnya hingga akhir tahun 2017.

refinement measures leading to the best practices of Corporate Governance Good; which is followed by a follow-up plan report on GCG implementation in 2017 to the parent entity/shareholders.

The following is Area of Improvement for measurement year 2016 and its follow-up until the end of 2017.

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2016 *Recommendations of 2016 GCG Assessment*	Tindak Lanjut di Tahun 2017 *Follow Up in 2017*		
		Status *Status*	Periode Tindak Lanjut *Follow Up Period*	Bentuk Tindak Lanjut *Form of Follow Up*
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation*			
1	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik belum menjadi salah satu unsur *key performance indicator* (KPI) yang dituangkan dalam kontrak manajemen *Good Corporate Governance Implementation has not yet become one of key performance indicator (KPI) elements set forth in the management contract*	V	2017	Membuat kontrak manajemen antara Direksi dengan General Manager *Prepare contract management between Board of Directors and General Manager*
2	Kebijakan pengendalian gratifikasi belum memuat fungsi yang ditugaskan untuk mengevaluasi grativikasi dan pemantauan pelaksanaannya. *Gratification control policy has not yet contained the function assigned to evaluate gratification and monitor its implementation.*	V	2017	Reviu kebijakan gratifikasi masih berupa draft *Review on gratification control is still in the form of draft*
II	**Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal** *Shareholders and GMS/Capital Owners*			
1	RUPS/Pemilik Modal belum mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris dan menetapkan secara eksplisit jabatan-jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *GMS/Capital Owners have not yet set and stipulated the maximum number of concurrent positions of Board of Commissioners that a member of Board of Commissioners may hold and explicitly stipulated the positions leading to conflict of interest, in accordance with applicable laws and regulations*	x	-	Menjadi hak dan wewenang pemegang saham *Shall be right and authority of shareholders*
2	Pemegang Saham belum melakukan proses pembahasan/ pengkajian dan pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau revisi RJPP secara tepat waktu *Shareholders have not yet properly discussed and reviewed/ approved RJPP draft or RJPP revision in time*	x	2017-2018	Di tahun 2017 RJPP telah mulai disusun, dan diharapkan dapat disahkan pada tahun 2018 *In 2017, RJPP has begun to be drafted, and is expected to be ratified by 2018*

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2016 *Recommendations of 2016 GCG Assessment*	Tindak Lanjut di Tahun 2017 *Follow Up in 2017*		
		Status *Status*	Periode Tindak Lanjut *Follow Up Period*	Bentuk Tindak Lanjut *Form of Follow Up*
3	RUPS/pemilik modal belum memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan target kinerja secara indvidual karena belum ada kontrak manajemen yang memuat target kinerja Direksi secara individual. *GMS/Capital Owners have not conducted Board of Directors performance appraisal based on individual performance targets as there is no management contract containing the individual performance targets of Board of Directors.*	x	-	Penilaian kinerja Direksi masih melekat pada evaluasi kinerja korporat dan belum diterapkan per Direktorat *Board of Directors performance appraisal is still attached to the corporate performance evaluation and has not been applied per Directorate*
III	**Dewan Komisaris/Dewan Pengawas** *Board of Commissioners/Supervisory Board*			
1	Dewan Komisaris belum melakukan kegiatan terkait proses persetujuan RJPP yang meliputi membuat rencana kerja terkait proses persetujuan atas rancangan RJPP, melakukan telaah atas rancangan RPJJ dengan mengoptimalkan peran Komite Audit dan menyampaikan tanggapan, pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP kepada Direksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan *Board of Commissioners has not yet conducted activities related to RJPP approval process, which includes prepare a work plan related to the approval process of RJPP draft, review RJPP draft by optimizing the role of audit committee and convery responses, opinions and suggestions on RJPP draft to Board of Directors on a predetermined schedule*	x	2017-2018	Di tahun 2017 RJPP telah mulai disusun, dan diharapkan dapat disahkan pada tahun 2018 *In 2017, RJPP has begun to be drafted, and is expected to be ratified by 2018*
2	Dewan Komisaris belum melakukan telaah secara menyeluruh dan menyampaikan arahan berdasar hasil telaah atas sistem pengendalian intern Perusahaan, yang mencakup kebijakan/ rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, hasil evaluasi atas efektifitas pengendalian intern pada tingkat entitas, *internal control report* *Board of Commissioners has not yet undertaken a thorough review and submitted directives based on the results of company's internal control system review, which includes the policy/draft and implementation of internal control system, evaluation of internal control effectiveness at entity level, internal control report*	x	-	Belum diterapkan *Not yet implemented*
3	Dewan Komisaris belum melakukan telaah dan menyampaikan arahan atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan (termasuk rencana kerja unitmanajemen risiko) hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, dan laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh Direksi *Board of Commissioners has not reviewed and conveyed directives on the policy and implementation of company's risk management (including the work plan of risk management unit) results of risk analysis on RKAP draft and its mitigation strategy, and periodic risk management*	x	-	Belum diterapkan *Not yet implemented*

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2016 *Recommendations of 2016 GCG Assessment*	Tindak Lanjut di Tahun 2017 *Follow Up in 2017*		
		Status *Status*	Periode Tindak Lanjut *Follow Up Period*	Bentuk Tindak Lanjut *Form of Follow Up*
4	Pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup Kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS ada yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Selain itu dalam proses telaah belum sepenuhnya mengoptimalkan peran Komite Audit *There are authorization or recommendation by Board of Commissioners on the transactions or actions of Board of Directors within the authority of Board of Directors or GMS that over a 30 day period from the receipt of proposal or complete document by Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association. In addition, the review process has not fully optimized the role of audit committee*	v	2017	Pemberian rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas tindakan Direksi tidak melebihi jangka waktu 30 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris *Board of Commissioners' recommendation on the actions of Board of Directors shall not exceed 30 days period from the proposal or complete documents received by Board of Commissioners*
5	Dewan Komisaris tidak melakukan penilaian kinerja direksi berdasarkan telaah kreteria, target dan indikator kinerja utama dengan realisasi pencapaian masing-masing Direksi secara individu *Board of Commissioners did not conduct Board of Directors performance appraisal based on review on criteria, targets and key performance indicators with the realization of individual achievements of Board of Directors*	x	-	Penilaian kinerja Direksi masih melekat pada evaluasi kinerja korporat dan belum diterapkan per Direktorat *Board of Directors performance appraisal is still attached to the corporate performance evaluation and has not been applied per Directorate*
6	Dalam pelaksanaan kebijakan benturan kepentingan, Dewan Komisaris belum seluruhnya membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan diperbaharui setiap tahun, belum membuat pakta integritas yang dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal, belum melaporkan tentang kepemilikan saham pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain oleh anggota Komisaris dan anggota keluarganya dalam daftar khusus; *In the implementation of conflict of interest policy, Board of Commissioners has not yet made a statement of not having any conflict of interest that is renewed annually, has not mad an integrity pact attached to the proposed actions of Board of Directors requiring recommendation from Board of Commissioners and approval from GMS/Capital Owners, has not yet reported share ownership of the Company or other companies by members of Board of Commissioners and their families on a special register;*	V	2017	Sudah ada pakta integritas, namun laporan tentang kepemilikan saham belum dilakukan. *Integrity pact has already been made, but report on shareownership has not been made.*
7	Setiap rapat Komite Audit belum dilengkapi dengan risalah rapat seperti kegiatan rapat/diskusi intern komite audit, pertemuan komite dengan SPI, pertemuan Komite Audit dengan manajemen; *Each Audit Committee meeting has not been completed with minutes of meetings such as internal audit committee meetings/discussions, committee meetings with SPI, audit committee meetings with management;*	x	-	Akan di terapkan di tahun 2017 *Will be implemented in 2017*

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2016 *Recommendations of 2016 GCG Assessment*	Tindak Lanjut di Tahun 2017 *Follow Up in 2017*		
		Status *Status*	Periode Tindak Lanjut *Follow Up Period*	Bentuk Tindak Lanjut *Form of Follow Up*
8	Belum ada laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya *There are no quarterly and annual reports of committees to Board of Commissioners, at least containing a comparison of realization of activities with the annual work program as well as the substance of results of its activities and recommendations*	x	-	Akan di terapkan di tahun 2017 *Will be implemented in 2017*
IV	Direksi *Board of Directors*			
1	Direksi belum memiliki Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal; *Board of Directors did not have the Company's Long Term Plan (RJPP) legalized by the GMS/Capital Owners;*	x	2017-2018	Di tahun 2017 RJPP telah mulai disusun, dan diharapkan dapat disahkan pada tahun 2018 *In 2017, RJPP has begun to be drafted, and is expected to be ratified by 2018*
2	Target kinerja Direksi tahun 2016 tidak tercapai, penyampaian laporan pencapaian target kinerja Direksi triwulan I mengalami keterlambatan dan tidak ada penyampaian laporan pencapaian kinerja anggota Direksi (individu) karena tidak ada target kinerja Direksi secara individu; *Board of Directors' performance targets for 2016 were not achieved, the report on performance targets achievement of Board of Directors in the first quarter was delayed and there was no report on the individual performance of Board of Directors members because there was no individual performance targets;*	v	Januari – Desember 2017 *January – December 2017*	Penerapan strategi & kebijakan untuk operasional dan keuangan *Implementation of strategy and policy for operations and finance*
3	Direksi belum menyampaikan kepemilikan saham pada Perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat *Board of Directors has not submitted their shareownership of the Company and other companies to the Company (corporate secretary) to be registered*	v	2017	Sudah ada pakta integritas, namun laporan tentang kepemilikan saham belum dilakukan. *Integrity pact has already been made, but report on shareownership has not been made.*
4	Direksi belum melakukan evaluasi (pemantauan progres) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya maupun pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai dilakukan pembahasan tindaklanjutnya dalam setiap rapat Direksi dan dituangkan dalam risalah rapat; *Board of Directors has not yet conducted any evaluation (progress monitoring) on the execution of previous meeting's decision nor the execution of previous meeting's decision whose follow-up is still not finished in every Board of Directors meeting and recorderd in the minutes of meeting;*	v	2017	Sudah dilakukan dalam rapat internal yang dihadiri hanya oleh Direksi dan Sekretaris Perusahaan *Has been conducted in internal meetings attended only by Board of Directors and Corporate Secretary*

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2016 *Recommendations of 2016 GCG Assessment*	Tindak Lanjut di Tahun 2017 *Follow Up in 2017*		
		Status *Status*	Periode Tindak Lanjut *Follow Up Period*	Bentuk Tindak Lanjut *Form of Follow Up*
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Information Disclosure and Transparency*			
1	Perusahaan telah mengikuti *Annual Report Award* (ARA) namun belum menang; *The Company has participated in the Annual Report Award (ARA) but not yet win;*	v	2017	Perusahaan telah mengikuti ajang ARA dan akan terus berusaha agar berhasil menjadi salah satu juara pada ajang tersebut *The Company has participated in ARA event and will keep trying to become one of the winners*
2	Dalam tahun 2016 sampai dengan 2017 perusahaan tidak berpartisipasi dalam perolehan penghargaan dalam CSR (*Sustainability Reporting Award)* dan sejenisnya. *In 2016 until 2017, the Company did not participate in CSR (Sustainability Reporting Award) and the like.*	x	-	Belum berpartisipasi dalam *Sustainability Reporting Award* *Not yet participated in Sustainability Reporting Award*
VI	Aspek Lainnya *Other Aspect*			
1	Hasil penilaian atas aspek lainnya menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara X tidak memperoleh apresiasi penambahan nilai karena tidak menjadi *benchmark* bagi perusahaan lainnya serta tidak memperoleh pengurangan nilai karena tidak melakukan praktik yang menyimpang dari prinsip GCG secara signifikan. *The results of assessment on other aspects showed that PT Perkebunan Nusantara X did not get appreciation of score addition since it has not yet become a benchmark for other companies as well as does not get score reduction since it did not conducted any deviant practice from GCG principle significantly.*	x	-	Belum menjadi rujukan benchmark, tetapi tetap tidak melakukan praktik yang menyimpang dari prinsip GCG *Not yet been a benchmark, but keep on doing practices that conform with GCG principles*

v = telah ditindaklajuti | x = belum ditindaklanjuti

v = has been followed-up | x = not yet followed-up

Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2017 dan Rencana Tindak Lanjut

Assessment penerapan GCG di lingkup Perseroan untuk tahun ukur 2017 dilakukan oleh tim internal sendiri (Biro Hukum dan Manajemen Risiko & Kepatuhan PTPN X).

GCG Assessment for Measurement Year 2017 and Follow-up Plan

GCG assessment in the Company for measurement year 2017 was conducted by PTPN X Legal and Risk Management & Compliance Bureau

Jenis Penilaian *Type of Evaluation*	:	*Self Asesmen* Penerapan GCG *Self Assessment of GCG Implementation*
Assessor/Penilai *Assessor*	:	TIM *Self Asessmen* GCG *GCG Self Assessment Team*
Tahun Buku Penerapan *Implementation Period*	:	1 Januari - 31 Desember 2017 *January 1, 2017 – December 31, 2017*
Periode Pengukuran *Measurement Period*	:	22 Januari – 23 Februari 2018 *January 22 – February 23, 2018*

Berdasarkan *Self Assessment* yang dilakukan untuk tahun ukur 2017, diperoleh skor penilaian sebagai berikut:

Based on Self Assessment in 2017, the following scores are obtained:

No.	Aspek Governance *Governance Aspect*	Bobot *Weight*	Capaian Perseroan *Company's Achievement*		Predikat *Predicate*
			Skor	(%)	
I.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation*	7,00	6,17	88,14%	"Sangat Baik" *"Excellent"*
II.	Pemegang Saham dan RUPS *Shareholders and GMS*	9,00	7,86	87,33%	"Sangat Baik" *"Excellent"*
III.	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	35,00	29,01	82,89%	"Baik" *"Good"*
IV.	Direksi *Board of Directors*	35,00	32,44	92,69%	"Sangat Baik" *"Excellent"*
V.	Pengungkapan Informasi dan transparansi *Information Disclosure and Transparency*	9,00	7,32	81,33%	"Baik" *"Good"*
	Sub total	95,00	82,80	86,48%	"Sangat Baik" *"Excellent"*
VI.	Aspek lainnya *Other Aspect*	5,00	-	-	"Tidak Baik" *"Very Poor"*
	Jumlah	100,00	82,80	82,80%	"Baik" *"Good"*

Keterangan:
0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Note:
0-50: Very Poor| 50-60: Poor| 60-75: Fair| 75-85: Good | 85-100: Excellent

Pelaksanaan *Self Assessment* untuk tahun ukur 2017 meraih skor 82,80 dengan kategori predikat "Baik".Hasil dari *self assessment* ini berupa rekomendasi-rekomendasi terhadap *Area of Improvement* yang dapat menjadi rujukan untuk aksi perbaikan/penyempurnaan yang mengarah kepada *best practices* Tata Kelola Perusahaan yang Baik; yang kemudian disusul dengan laporan rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan GCG tahun 2017 kepada entitas induk/pemegang saham.

Self Assessment for measurement year 2017 obtained score of 82.80 with "Good" predicate. The results of this self assessment were in the form of recommendations on Area of Improvement that can be a reference for improvement/refinement measures leading to the best practices of Corporate Governance Good; which is followed by a follow-up plan report on GCG implementation in 2017 to the parent entity/shareholders.

Hasil *assessment* di atas memberikan 21 butir rekomendasi yang menjadi *Area of Improvement* penerapan GCG di Perseroan. Berikut disampaikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Perseroan.

Results of the above assessment provided 21 recommendation items as Area of Improvement of GCG implementation in the Company. The recommendations and follow-up plans that will be undertaken by the Company are as follow.

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2017 *Recommendation of 2017 GCG Assessment*	Status *Status*	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut *Follow Up/Follow Up Plan*
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation		
1	Menjadikan hasil penilaian penerapan GCG sebagai salah satu unsur KPI yang dituangkan dalam kontrak manajemen. *Made the assessment results of GCG implementation as one of KPI elements set forth in the management contract.*	x	Penentuan KPI menjadi hak dan wewenang pemegang saham *KPI determination shall be the right and authority of shareholders*
2	Menambahkan materi fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi dan pemantauan pelaksanannya, dalam kebijakan pengendalian gratifikasi. *Added functional material assigned to manage gratuities and monitoring of its implementation, in the gratification control policy.*	x	Belum diterapkan *Not yet implemented*
3	Melaksanakan kegiatan pengelolaan gratifikasi diantaranya berupa : membuat rencana kerja pengendalian gratifikasi dan pelaksanaannya serta melakukan kegiatan peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung. *Carry out gratification management activities such as: preparing gratification control work plan and its implementation as well as conducting periodic review and perfection of supporting instruments.*	x	Belum diterapkan *Not yet implemented*
4	Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan *whistle blowing system* secara berkala. *Evaluate and report the implementation of whistleblowing system policy regularly.*	x	Belum diterapkan *Not yet implemented*
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal *Shareholders and GMS/Capital Owners*		
1	RUPS/Pemilik Modal belum mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris dan menetapkan secara eksplisit jabatan-jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *The GMS/Capital Owners have not set and stipulated the maximum number of Commissioner position that a member of the Board of Commissioners may hold concurrently and explicitly stipulated the positions containing conflict of interest, in accordance with applicable laws and regulations*	x	Menjadi hak dan wewenang pemegang saham *Shall be the right and authority of shareholders*
2	Pemegang Saham belum melakukan proses pembahasan/ pengkajian dan pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau revisi RJPP secara tepat waktu *Shareholders have not yet processed and reviewed/approved RJPP draft or revised RJPP on time*	v	Di tahun 2017 RJPP telah mulai disusun, dan diharapkan dapat disahkan pada tahun 2018 *In 2017, RJPP has begun to be drafted, and is expected to be ratified by 2018*
3	RUPS/Pemilik Modal belum memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan target kinerja secara indvidual karena belum ada kontrak manajemen yang memuat target kinerja Direksi secara individual. *The GMS/Capital Owners have not yet conducted Board of Directors performance appraisal based on individual performance targets, since there was no management contract containing the individual performance targets of Board of Directors.*	x	Penilaian kinerja Direksi masih melekat pada evaluasi kinerja korporat dan belum diterapkan per Direktorat *Board of Directors performance appraisal is still attached to the corporate performance evaluation and has not been applied per Directorate*

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2017 *Recommendation of 2017 GCG Assessment*	Status *Status*	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut *Follow Up/Follow Up Plan*
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *Board of Commissioners/Supervisory Board*		
1	Dewan Komisaris belum melakukan kegiatan terkait proses persetujuan RJPP yang meliputi membuat rencana kerja terkait proses persetujuan atas rancangan RJPP, melakukan telaah atas rancangan RPJJ dengan mengoptimalkan peran Komite Audit dan menyampaikan tanggapan, pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP kepada Direksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan *Board of Commissioners has not yet conducted activities related to RJPP approval process, which includes prepare a work plan related to the approval process of RJPP draft, review RJPP draft by optimizing the role of audit committee and convery responses, opinions and suggestions on RJPP draft to Board of Directors on a predetermined schedule*	v	Di tahun 2017 RJPP telah mulai disusun, dan diharapkan dapat disahkan pada tahun 2018 *In 2017, RJPP has begun to be drafted, and is expected to be ratified by 2018*
2	Dewan Komisaris belum melakukan telaah secara menyeluruh dan menyampaikan arahan berdasar hasil telaah atas sistem pengendalian intern Perusahaan, yang mencakup kebijakan/ rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, hasil evaluasi atas efektifitas pengendalian intern pada tingkat entitas, *internal control report* *Board of Commissioners has not yet undertaken a thorough review and submitted directives based on the results of company's internal control system review, which includes the policy/draft and implementation of internal control system, evaluation of internal control effectiveness at entity level, internal control report*	v	Tahun 2018, telah dilakukan telaah terhadap sistem pengendalian intern Perusahaan dengan pemeriksaan dilakukan berbasis risiko *In 2018, review on Company's internal control system has been conducted by risk-based examination*
3	Pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS ada yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Selain itu dalam proses telaah belum sepenuhnya mengoptimalkan peran Komite Audit *There are authorization or recommendation by Board of Commissioners on the transactions or actions of Board of Directors within the authority of Board of Directors or GMS that over a 30 day period from the receipt of proposal or complete document by Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association. In addition, the review process has not fully optimized the role of audit committee*	v	Pemberian rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas tindakan Direksi tidak melebihi jangka waktu 30 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris *Board of Commissioners' recommendation on the actions of Board of Directors shall not exceed 30 days period from the proposal or complete documents received by Board of Commissioners*
4	Dewan Komisaris tidak melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaah kriteria, target dan indikator kinerja utama dengan realisasi pencapaian masing-masing direksi secara individu *Board of Commissioners did not conduct Board of Directors performance appraisal based on review on criteria, targets and key performance indicators with the realization of individual achievements of Board of Directors*	x	Penilaian kinerja Direksi masih melekat pada evaluasi kinerja korporat dan belum diterapkan per Direktorat *Board of Directors performance appraisal is still attached to the corporate performance evaluation and has not been applied per Directorate*
5	Dewan Komisaris belum menyampaikan arahan mengenai peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko terutama risiko yang berasal dari eksternal *Board of Commissioners has not yet submitted any guidance to improve the quality of policies and implementation of Risk Management, especially external risks*	v	Tahun 2018, Telaah manajemen risiko telah di tanggapi oleh Dewan Komisaris *Board of Commissioners has been provided responses on risk management review*

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2017 *Recommendation of 2017 GCG Assessment*	Status *Status*	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut *Follow Up/Follow Up Plan*
6	Diperlukan adanya rencana kerja Dewan Komisaris yang dituangkan dalam RKT Dewan Komisaris, meliputi: sistem teknologi informasi Perusahaan, pengembangan karir, mutu dan pelayanan serta pengawasan terhadap Direksi atas implementasi kepatuhan Direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga *There is a need for Board of Commissioners' work plan as set forth in Board of Commissioners' RKS, including: the Company's information technology system, career development, quality and service and supervision upon Board of Directors on the implementation of Board of Directors' compliance with the law and agreements with third parties*	v	Tahun 2018, sistem teknologi informasi Perusahaan, pengembangan karir, mutu dan pelayanan serta pengawasan terhadap Direksi atas implementasi kepatuhan Direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga, sudah tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Dewan Komisaris tahun 2018 *In 2018, the Company's information technology systems, career development, quality and service as well as supervision upon Board of Directors on the implementation of Board of Directors' compliance with the law and agreements with third parties, have beem set forth in the Board of Commissioners' 2018 Work Pland and Budget*
IV	Direksi *Board of Directors*		
1	Menjadikan hasil penilaian penerapan GCG sebagai salah satu unsur KPI yang dituangkan dalam kontrak manajemen *Made the assessment results of GCG implementation as one of KPI elements set forth in the management contract*	x	Penentuan KPI menjadi hak dan wewenang pemegang saham *KPI determination shall be the right and authority of shareholders*
2	Menambahkan materi fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi dalam kebijakan pengendalian gratifikasi serta melakukan peninjauan terhadap perangkat pendukungnya *Added functional material assigned to manage gratuities and monitoring of its implementation, in the gratification control policy*	x	Belum dijalankan *Not yet executed*
3	Membuat rancangan RJPP, menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan/pendapat atas rancangan RJPP dan memintakan pengesahan atas rancangan RJPP tersebut kepada RUPS/Pemegang Saham sesuai jadwal yang ditentukan serta melakukan sosialisasi atas RJPP yang telah disahkan tersebut kepada karyawan Perusahaan *Prepare the draft of RJPP, submit to Board of Commissioners to get response on the draft and to request approval of the draft of RJPP to the GMS/Shareholders according to the specified schedule and to socialize the approved RJPP to the Company's employees*	v	PTPN X sudah proses menyusun RJPP, Namun RJPP dimaksud belum disahkan. *PTPN has been in the process of preparing RJPP, but the RJPP has not yet approved.*
4	Menyampaikan laporan pencapaian target kinerja Direksi secara tepat waktu dan menyusun target kinerja Direksi secara individu dan menyampaikan capaian kinerja direksi (individu) kepada Dewan Komisaris *Submit report on the achievement of performance targets of Board of Directors in a timely manner and prepare individual performance targets of Board of Directors and submit the achievement of individual performance of Board of directors to Board of Commissioner*	x	Penilaian kinerja Direksi masih melekat pada evaluasi kinerja korporat dan belum diterapkan per Direktorat *Board of Directors performance appraisal is still attached to the corporate performance evaluation and has not been applied per Directorate*
5	Menuangkan dalam risalah rapat terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya (pemantauan progres) maupun pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya *Outlined in minutes of meetings on the execution of previous meeting's decisions (progress monitoring) as well as the execution of current meeting's decisions*	v	Sudah dilakukan dalam rapat internal yang dihadiri hanya oleh Direksi dan Sekretaris Perusahaan *Has been conducted in internal meetings attended only by Board of Directors and Corporate Secretary*

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2017 *Recommendation of 2017 GCG Assessment*	Status *Status*	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut *Follow Up/Follow Up Plan*
6	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan yang mencakup capaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan *Evaluate Corporate Secretary's duties implementation, which includes the achievement of work program of Corporate Secretary*	v	Sudah dilakukan penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan melalui KPI individual *Assessment of the Corporate Secretary's duties implementation has been conducted through individual KPIs*
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Information Disclosure and Transparency*		
1	Menyusun Laporan Tahunan (*Annual Report*) sesuai ketentuan dalam ARA. *Prepare the Annual Report in accordance with ARA's provisions.*	v	Sudah dilakukan sesuai kriteria ARA, walaupun terdapat beberapa hal yang tidak diungkapkan *Has been done according to ARA criteria, although there are some things that has not yet disclosed*
2	Untuk tahun-tahun mendatang, Perusahaan supaya berpartisipasi dalam kegiatan perolehan penghargaan (*Sustainability Reporting Award*). *For years to come, the Company will participate in the Sustainability Reporting Award.*	x	Sedang diusulkan kepada Direksi *Being proposed to Board of Directors*
VI	Aspek Lainnya *Other Aspect*		
Dalam *self assesment* penerapan GCG PT Perkebunan Nusantara X Tahun 2017 tidak dilakukan penilaian atas praktik Tata Kelola Perusahaan yang dapat menjadi contoh dan/atau *benchmark* bagi perusahaan lainnya karena total capaian ke-5 aspek penerapan GCG lainnya sebagaimana diuraikan di atas belum mencapai skor 85. *In the self assessment of GCG implementation of PT Perkebunan Nusantara X of 2017, Corporate Governance practices that can be an example and/or benchmark for other companies has not been assessed, because the total achievement of 5 other aspects of GCG implementation as described above has not reached the score of 85.*			

v = telah ditindaklajuti | x = belum ditindaklanjuti

v = has been followed-up | x = not yet followed-up

Perkembangan Assessment Penerapan GCG Perseroan

Komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip GCG dan melakukan evaluasi terhadap penerapan tersebut ditunjukkan melalui tren peningkatan skor *assessment* GCG. Melalui *assessment*, Perseroan mendapatkan rekomendasi secara berkala, yang memungkinkan bagi Perseroan untuk terus melakukan pembenahan baik dari infrastruktur atau perangkat GCG, hingga *softstructure* GCG yang dimiliki. Tren skor *assessment* GCG 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Development of the Company's GCG Assessment

The Company's commitment to implement GCG principles and to evaluate the implementation is demonstrated through the increasing trend of GCG assessment score. Through the assessment, the Company receives periodic recommendations, which allow the Company to continue improvement efforts, from GCG infrastructure or instrument to GCG softstructure. The trend of GCG assessment score in the last 5 (five) years are as follows:

Tren Skor Assessment GCG 2013-2017

GCG Assessment Score Trend 2013-2017

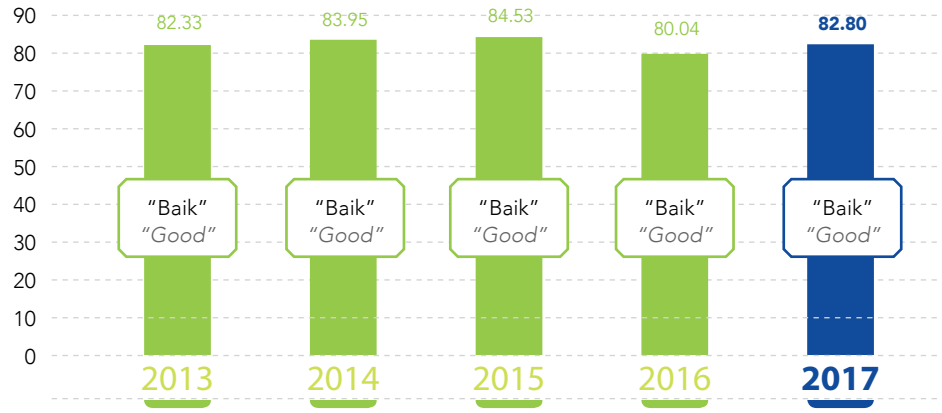

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

Sekilas Tentang KPKU

Perseroan melakukan penilaian implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang bertujuan untuk membantu Perseroan dalam menilai upaya perbaikan, mendiagnosa sistem manajemen kinerja secara keseluruhan, dan mengidentifikasi kekuatan serta peluang-peluang untuk melakukan perbaikan.

KPKU merupakan salah satu perangkat penilaian kinerja dan pengelolaan keseluruhan aspek organisasi dari Kementerian BUMN, dimana pada tahun 2016 Kementerian BUMN telah memperbaharui perangkat penilaian KPKU melalui Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-445/D7.MBU/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan *Assessment* Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN 2016. Dalam surat ini disebutkan bahwa evaluasi menggunakan kriteria KPKU versi Tahun 2015, yaitu mengacu pada dokumen KPKU sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-445/D7.MBU/10//2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang mengadopsi dan mengadaptasi "*Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence*".

Penyelenggaraan *Malcolm Baldrige National Quality Award* (MBNQA) bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah perusahaan yang dapat dijadikan *role model* bagi perusahaan lain. Selain itu, Perseroan juga menerapkan kriteria Malcolm Baldrige untuk menguatkan daya saing melalui upaya:

EXCELLENT PERFORMANCE APPRAISAL CRITERIA (KPKU)

About KPKU

The Company conducts the Excellent Performance Appraisal Criteria (KPKU) assessment with the purpose of assisting the Company in evaluating the improvement efforts, diagnosing overall performance management system, and identifying strengths and opportunities for improvement.

KPKU is one of the appraisal tools of performance and management of all aspects of an organization from the Ministry of SOE, where in 2016 the Ministry of SOE has updated the KPKU assessment tool through Letter of Secretary of the Ministry of SOE No. S-445/D7.MBU/10/2016 dated October 14, 2016 on Implementation of Assessment of Excellent Performance Rating Criteria (KPKU) SOE 2016. This letter stated that the evaluation is using the KPKU criteria of 2015 version, which refers to the KPKU documents as stipulated by the Ministry SOE through letter of Secretary of the Ministry of SOE No. S-445/D7.MBU/10/2016 dated October 14, 2016 which adopted and adapted "Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence".

The organization of Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) aims to identify a company that can be a role model for other companies. In addition, the Company also applies Malcolm Baldrige's criteria to strengthen competitiveness through efforts to:

1. Meningkatkan praktik kinerja organisasi, kemampuan dan hasil.
2. Memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi tentang praktik terbaik di antara perusahaan-perusahaan dari semua jenis industri.
3. Menyediakan sebuah alat untuk memahami dan mengelola kinerja Perseroan, juga sebagai alat untuk membimbing perencanaan dan meningkatkan pembelajaran.

Proses penerapan KPKU dilakukan melalui 2 (dua) tahapan besar, yaitu tahap "*Ondesk Review*" yaitu penilaian diatas kertas berbasis pada respon KPKU pada tahun sebelumnya dan informasi pendukung Metode/Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI; serta tahapan "*Site Visit*" ke Perseroan untuk wawancara dan klarifikasi atas respon KPKU terhadap Direksi serta *Senior Leader* lainnya yang ditunjuk oleh Perseroan serta verifikasi berbagai data dan informasi.

Evaluasi kinerja KPKU didasarkan pada 2 (dua) dimensi penilaian, yaitu proses dan hasil. Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah ADLI. Sementara faktor yang digunakan untuk mengevakuasi hasil-hasil Perseroan adalah *Level, Trend, Comparison* dan *Integration* (LeTCI).

Kedua dimensi evaluasi, yaitu Dimensi Proses dan Dimensi Hasil sangat penting bagi evaluasi dan umpan balik. Suatu pertimbangan yang kritikal dalam evaluasi dan umpan balik adalah unsur penting atau derajat pentingnya proses dan hasil yang dilaporkan bagi faktor-faktor bisnis utama. Bidang-bidang yang paling penting harus diidentifikasi dalam Profil Perusahaan dan dalam subkategori persyaratan pelanggan utama, lingkungan kompetitif, kebutuhan tenaga kerja, tujuan strategis utama dan program kerja sangatlah penting.

Berdasarkan kedua tahapan di atas kemudian disusun laporan yang berisi Skor dan Umpan Balik yang berisikan *Opportunity for Improvements* (OFI) dan Kekuatan (*Strengths*) Perseroan untuk dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam melakukan perbaikan, baik proses maupun peningkatan hasil-hasil bisnis.

Hasil skor atas penilaian penerapan KPKU dan kategorinya adalah sebagai berikut:

1. Improve organizational performance, capabilities and outcomes.
2. Facilitate communication and information sharing on best practices among companies of all types of industries.
3. Provide a tool for understanding and managing company's performance, as well as a tool for guiding planning and improving learning.

The process of KPKU deployment is conducted through two major stages, namely "Ondesk Review" stage, which is a paper-based assessment based on KPKU response in the previous year and supporting information of Approach, Deployment, Learning, and Integration, or abbreviated as ADLI; and "Site Visit" stage to the company for interviews and clarifications on KPKU's response to Board of Directors and other Senior Leaders appointed by the company as well as verification of various data and information.

KPKU performance evaluation is based on 2 (two) assessment dimensions, namely process and outcome. The factors used to assess the process are ADLI. While the factors used to evacuate the Company's outcomes are Level, Trend, Comparison and Integration (LeTCI).

The two evaluation dimensions, which are the Process Dimension and the Outcome Dimension are very important for evaluation and feedback. A critical consideration in evaluation and feedback is an important element of the process and outcome reported for key business factors. The most important areas should be identified in the Company Profile and in sub-categories of key customer requirements, competitive environment, labor requirements, key strategic objectives and work programs are very essential.

Based on the above two stages, a report containing the Score and Feedback on the Company's Opportunity for Improvements (OFI) and Strengths can be used as a basis to improve the business process and outcomes.

The score results of KPKU assessment and its category are as follows:

Skala Skor *Score Scale*	**Kategori** *Category*
876 - 1.000	World Class Leader
776 - 875	Benchmark Leader
676 - 775	Industry Leader
576 - 675	Emerging Industry Leader
476 - 575	Good Performance
376 - 475	Early Improvement
276 - 375	Early Result
0 - 275	Early Development

Penilaian KPKU Tahun Ukur 2016 dan Tindak Lanjut di Tahun 2017

Hasil penilaian KPKU untuk tahun ukur 2016 adalah sebagai berikut:

KPKU Assessment in Measurement Year 2016 and its Follow-up in 2017

The results of KPKU assessment for measurement year 2016 are as follows:

Kategori	Category	Maksimal Skor *Score Maximum*	Persentase *Percentage* (%)	Skor *Score* (nominal)
		(1)	(2)	(3 = 1x2)
Kategori 1: Kepemimpinan	*Category 1: Leadership*			
1.1. Kepemimpinan Senior	*1.1. Senior Leadership*	70	45 %	31,50
1.2. Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan	*1.2. Corporate Governance and Social Responsibility*	50	50 %	25,00
Kategori 2: Perencanaan Strategis	*Category 2: Strategic Planning*			
2.1. Pengembangan Strategi	*2.1. Strategy Development*	40	45 %	18,00
2.2. Implementasi Strategi	*2.2. Strategy Implementation*	45	45 %	20,25
Kategori 3: Fokus Pelanggan	*Category 3: Customer Focus*			
3.1. Suara Pelanggan	*3.1. Customer Voice*	45	45 %	20,25
3.2. Keterikatan (Engagement) Pelanggan	*3.2. Customer Engagement*	40	45 %	18,00
Kategori 4: Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan	*Category 4: Measurement, Analysis and Knowledge Management*			
4.1. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan	*4.1. Measurement, Analysis and Improvement of Company Performance*	45	45 %	20,25
4.2. Manajemen Pengetahuan, Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi	*4.2. Knowledge Management, Information Management and Information Technology*	45	55 %	24,75
Kategori 5: Fokus Tenaga Kerja	*Category 5: Labor Focus*			
5.1. Lingkungan Tenaga Kerja	*5.1. Labor Environment*	40	45 %	18,00
5.2. Keterikatan (Engagement) Tenaga Kerja	*5.2. Labor Engagement*	45	40 %	18,00
Kategori 6: Fokus Operasi	*Category 6: Operation Focus*			
6.1. Proses Kerja	*6.1. Work Process*	45	50 %	22,50
6.2. Efektivitas Operasional	*6.2. Operational Effectiveness*	40	40 %	16,00
Kategori 7: Dimensi Hasil	*Category 7: Outcomes Dimension*			
7.1. Hasil/Kinerja Produk dan Proses	*7.1. Outcomes/Performance of Product and Processes*	110	40 %	44,00
7.2. Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan	*7.2. Outcomes/Performance of Customer Focus*	85	30 %	25,50
7.3. Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja	*7.3. Outcomes/Performance of Labor Focus*	85	35 %	29,75
7.4. Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola	*7.4. Outcomes/Performance of Leadership and Governance*	80	35 %	28,00
7.5. Hasil/Kinerja Finansial dan Pasar	*7.5. Outcomes/Performance of Financial and Market*	90	40 %	36,00
Jumlah	*Total*	1.000		415,75
Kategori	*Category*	"EARLY IMPROVEMENT"		

Opportunity of improvement dari hasil penilaian KPKU tahun ukur 2016 dan tindak lanjut yang telah dilakukan Perseroan di sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Opportunity of improvement from the results of 2016 KPKU assessment and the follow-up actions undertaken by the Company throughout 2017 are as follows:

No	Opportunity for Improvement	Status *Status*	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2017 *Follow Up Until the End of 2017*
Dimensi Proses *Process Dimension*			
1	Walaupun PTPN X telah menerapkan metode untuk menetapkan visi dan tata nilai perusahaan dengan cara : Melakukan pengumpulan data-data, Melakukan analisa data kondisi internal dan eksternal, Melakukan pembahasan antara Pimpinan senior, Kepala Divisi, GM, perwakilan karyawan, dan konsultan untuk merumuskan visi, misi, dan tata nilai perusahaan serta Penetapan visi, misi, dan tata nilai perusahaan oleh Direktur Utama Sesuai Surat Keputusan Direksi NO: SK Direksi No. XX-SURKP/13.074.1 tanggal 22 Juli 2013 tentang perubahan visi, misi, nilai dan budaya organisasi perusahaan PTPN X. Namun, mekanisme belum sistematis hal ini dibuktikan belum dilakukan pengukuran pencapaian visi (terkemuka dan berwawasan lingkungan) dan Corporate Culture Index (CCI) untuk tata nilai (ProVISI) sehingga apabila hal tersebut tidak dilakukan akan menyulitkan Pimpinan Senior PTPN X untuk dapat mendorong kinerja seluruh karyawan PTPN X untuk mencapai Visi tersebut di masa yang akan datang dan menumbuhkan *organizational consciousness* (kesadaran diri terhadap organisasi) *Although PTPN X has implemented methods to define corporate vision and values by: Collecting data, Conducting analysis on internal and external condition data, Holding discussion between Senior Leaders, Division Heads, GM, employee representatives, and consultant to formulate corporate vision, mission, and values and the stipulation of corporate vision, mission, and values by the President Director In accordance with Board of Directors Decree No. XX-SURKP/13.074.1 dated July 22, 2013 on changes of corporate vision, mission, values and organization culture of PTPN X.* *However, this mechanism has not been done systematically, as proven by the absence of measurement of vision achievement (leading and environmentally friendly) and Corporate Culture Index (CCI) for the value system (ProVISI). If this has not been done, it will be difficult for Senior Leaders of PTPN X to encourage the employees of PTPN X to perform and achieve this vision in the future as well as to grow organizational consciousness (self awareness to the organization)*	x	Belum diterapkan *Not yet implemented*
2	PTPN X belum mempunyai metode menyusun strategi terkait dengan ketidaktahuan atau terbatasnya jangkauan penglihatan (*Potensial Blind Spot*) dalam proses perencanan strategis dan dalam memperoleh informasi penting bagi perusahaan sehingga dengan demikian PTPN X berpotensi mengalami kesulitan untuk menciptakan struktur organisasi manajemen risiko yang sistematis dan terintegrasi dalam proses normal organisasi dan berdampak kepada keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. *PTPN X has not yet have a method in strategy development related to ignorance or limited range of vision (Potential Blind Spot) in the strategic planning process and in obtaining important information for the Company, so that PTPN X has the potential to have difficulty in creating a systematic and integrated risk management organization structure in the normal process of organization and impact on the Company's long-term sustainability.*	x	Di tahun 2017 RJPP telah mulai disusun, dan diharapkan dapat disahkan pada tahun 2018 *In 2017, RJPP has begun to be drafted, and is expected to be ratified by 2018*

No	Opportunity for Improvement	Status *Status*	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2017 *Follow Up Until the End of 2017*
3	Walaupun PTPN X telah menggunakan metode yang sistematis dalam memperoleh informasi mengenai kepuasan pelanggan relatif melalui survey kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap tahunnya sesuai dengan yang tertuang dalam RKAP Bagian Pemasara n setiap tahunnya dan prosedur pemasaran No Dok: KD/PR/PMS/01 dan KD/PR/TBK/02 dengan memasukkan salah satu pertanyaan di dalam kuisioner yang menanyakan pendapat responden terhadap posisi PTPN X dibandingkan dengan pesaing apakah lebih baik, sama atau lebih buruk. Namun metode tersebut belum dibandingkan dengan kepuasan pelanggan pesaing. Terbukti hasil kinerja fokus pada pelanggan belum ada yang dibandingkan dengan kinerja pesaing. Hal ini akan menyulitkan PTPN X dalam mengetahui posisinya dibandingkan dengan perusahaan pesaing untuk meningkatkan daya saingnya dipasar terkait dengan bertambahnya pesaing yang memasuki pasar yang sama dengan PTPN X. *Although PTPN X has used a systematic method to obtain information on relative customer satisfaction through customer satisfaction survey conducted annually in accordance with RKAP of Marketing Department each year and marketing procedure No Doc: KD/PR/PMS/01 and KD/PR/TBK/02 by entering one question in the questionnaire asking about respondent's opinion on PTPN X's position of compared to competitors, whether better, the same or worse.* *But the method has not been compared with customer satisfaction of competitors, as evident by the performance result of customer focus has not been compared with the performance of competitors. This will make it difficult for PTPN X to acknowledge its position compared to its competitors to increase its market competitiveness with due regard to the increase of competitors entering the same market with PTPN X.*	x	Pada tahun 2017, PTPN X hanya melakukan penjualan gula ke BULOG *In 2017, PTPN X only sold sugar to BULOG*
4	Walaupun PTPN X dalam mempertemukan perbedaan antara proyeksi kinerja kedepan perusahaan yang ditemukenali diatas dengan proyeksi kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam program kerja mengacu kepada RKAP, RKO, Laporan Manajemen (LM). Namun dalam pelaksanaannya belum ditemukan prosedur adanya data evaluasi laporan manajemen bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan dibandingkan dengan proyeksi kinerja pesaing sehingga dengan kondisi demikian akan menyulitkan PTPN X untuk menentukan posisi persaingannya di pasar menghadapi tantangan strategis dengan menggunakan keunggulan strategisnya untuk mencapai sasaran strategis yang berdampak kepada upaya mewujudkan visi dan misi perusahaan. *Although PTPN X in bridging the differences between its future performance projection as identified above with the predefined performance projection in the work program referring to RKAP, RKO, Management Report (LM).* *However, in practice there is no procedure of data evaluation of monthly, quarterly, semiannual and annual management reports compared to the projected performance of competitors, hence it will be difficult for PTPN X to determine its competitive position in the market to face strategic challenges by using its strategic advantages to achieve the strategic targets, which affect the efforts of realizing the company's vision and mission.*	x	Belum diterapkan *Not yet implemented*

No	Opportunity for Improvement	Status *Status*	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2017 *Follow Up Until the End of 2017*
5	Meskipun PTPN X memiliki metode dalam menilai kebutuhan akan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja melalui: 1) penetapan standar kebutuhan tenaga kerja; 2) melaksanakan pemetaan kompetensi karyawan pimpinan melalui asesmen; 3) sistem diklat baik yang besifat pelatihan manajerial maupun kompetensi dan melakukan pengukuran kinerja karyawan dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Karyawan, namun dalam pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka PTPN X perlu mengukur *Competency* Indeks Karyawan (CLI), sehingga tercipta lingkungan organisasi yang produktif, dan kinerja karyawan dapat terukur dan terintegrasi dengan KPI perusahaan melalui penerapan Sistem Manajemen Kinerja dan mempersiapkan tenaga kerja untuk perubahan bisnis perusahaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan belum dapat memastikan keberhasilan dalam upaya mewujudkan visi perusahaan dan keberlanjutan usaha dimasa mendatang. *Although PTPN X has methods in assessing the need for manpower capability and capacity through: 1) determination of manpower requirements standards; 2) carry out competency mapping of leaders through assessment; 3) education and training system, both managerial and competency training, and perform the measurement of employee performance by Employee Achievement Appraisal System, but in competency based-human resource management, PTPN X needs to measure Employee Competency Index (CLI), so as to create productive organization environment, and employee performance can be measured and integrated with Corporate KPI through the implementation of Performance Management System and preparing the manpower for changes in the Company's business. This resulted in the Company has not been able to ensure success in the efforts of realizing the Company's vision and business sustainability in the future.*	v	Kompetensi indeks karyawan sudah tertuang dalam system SAP modul HCM *Employee Competency Index has been outlined in the HCM Module of SAP system*
6	Meskipun PTPN X telah menerapkan metode mengelola rantai pasokan dengan cara melakukan pengelolaan suplay chain dengan mengacu kepada Proses Bisnis ,menentukan syarat utama kepada pemasok (petani dan *suplayer*) dan target program mekanisasi supplier pasok namun metode pengelolaan rantai pasokan tidak efektif terbukti ketersediaan dan kualitas bahan baku tebu tidak terpenuhi, Taksasi 424.632 Ton Realisasi tebu digiling 296.141 Ton (55%) di PG Mojo Panggung, umur tebu ditebang kurang dari 10 bulan 0,49 % dari tebu digiling,umur tebu ditebang 10 s/d 12 bulan 7,92 % dari tebu tergiling, standar umur tebu digiling 12 bulan yang berdampak tehadap tidak tercapainyanya tercapainya target perusahaan *Although PTPN X has implemented the method of supply chain management by referring to the Business Process, determining the main terms to suppliers (farmers and suppliers) and target of supplier mechanization program but the supply chain management method is not effective, as proven by the unfulfilled availability and quality of sugar cane raw materials, Taxation 424,632 Tons of Realization of milled sugar cane 296,141 Tons (55%) in PG Mojo Panggung, the age of cut down sugar cane less than 10 months 0.49% of milled sugarcane, the age of cut down sugarcane 10 until 12 months 7.92% of milled sugar cane, standard age of milled sugar cane 12 months, which impacted the failure to achieve the Company's targets*	v	Di tahun 2017, proses dimulainya musim giling didasarkan pada kesiapan bahan baku tebu dari masing-masing pabrik gula, sehingga start giling pabrik gula dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan) *In 2017, the beginning of milling season was based on the readiness of sugarcane raw materials from each sugar mill, so that the beginning of millling was done gradually (not simultaneously)*

No	Opportunity for Improvement	Status *Status*	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2017 *Follow Up Until the End of 2017*
Dimensi Hasil *Outcome Dimension*			
1	Walaupun PTPN X telah mengukur indikator Kinerja Hasil-Hasil Produk dan Proses, Kinerja Hasil Fokus Pelanggan, Kinerja hasil Fokus Tenaga Kerja, Kinerja hasil Kepemimpinan dan Tata Kelola; Kinerja hasil Keuangan dan Pasar sebanyak 75,74 % (231 data) dari yang seharusnya 305 data, namun beberapa indikator menunjukkan hasil sebagai berikut: • 27,87% indikator (85 data) Levelnya menurun (*Poor*) dibanding tahun sebelumnya • 1,31% indikator (4 data) Level-nya tidak bermakna, karena menampilkan data yang kurang dari 2 periode (*No Level*) • 8,85% indikator (27 data) cenderung memburuk trend-nya dalam 3 tahun terakhir (*Adverse*) dan 19,02 % (58 data) adalah (*Unfavorable*) • 1,31% indikator (4 data) *Trend*-nya tidak bermakna, karena menampilkan data yang kurang dari 3 periode (*No Trend*) • 7,87% indikator (24 data) masih dibawah kinerja pesaing atau pembanding sejenis (*Lagging*) • 56,72% indikator (173 data), belum di bandingkan dengan pesaing atau perusahaan sejenis (*No Comparison*) • 68,20 % indikator (208 data) belum diproyeksikan sampai dengan tahun 2016 • 62,60% indikator (191 data) belum tersegmentasikan sesuai keterkaitannya • 24,26% indikator (74 data) yang belum dilaporkan hasil kinerjanya (kekurangan indikator/data) *Although PTPN X has measured the indicators of Product and Process Performance Outcome, Customer Focus Performance Outcome, Labor Focus Outcome, Leadership and Governance Performance Outcome; Financial and Market Performance Outcome for 75.74% (231 data) of supposed 305 data, but some indicators show the following results:* • *the level of 27.87% indicators (85 data) decreased (Poor) compared to the previous year* • *the level of 1.31% indicators (4 data) are not meaningful, because display data less than 2 periods (No Level)* • *8.85% indicators (27 data) tend to deteriorate its trend in the last 3 years (Adverse) and 19.02% (58 data) are (Unfavorable)* • *the trend of 1.31% indicators (4 data) are not significant, because display data less than 3 periods (No Trend)* • *7.87% indicators (24 data) are still below the performance of competitors or similar comparators (Lagging)* • *56.72% indicators (173 data) are not yet compared with competitors or similar companies (No Comparison)* • *68.20% indicators (208 data) have not been projected until 2016* • *62.60% indicators (191 data) have not been segmented accordingly* • *the performance results of 24.26% indicators (74 data) have not yet reported (lack of indicators / data)*	v	PTPN X telah mengoptimalkan produksi dan penjualan ditahun 2017 terbukti dengan peningkatan laba tahun berjalan sebesar 142,44%, dari rugi Rp152,56 miliar di tahun 2016 menjadi laba Rp64,75 miliar di tahun 2017 *PTPN X has optimized production and sales in 2017 as evidenced by 142.44% increase in profit for the year, from loss of Rp152.56 billion in 2016 to profit of Rp64.75 billion in 2017*

No	Opprotunity For Improvement
Dimensi Proses *Process Dimension*	
1	Walaupun PTPN X telah menerapkan metode untuk menetapkan visi dan tata nilai perusahaan dengan cara : Melakukan pengumpulan data-data, Melakukan analisa data kondisi internal dan eksternal, Melakukan pembahasan antara Pimpinan senior, Kepala Divisi, GM, perwakilan karyawan, dan konsultan untuk merumuskan visi, misi, dan tata nilai perusahaan serta Penetapan visi, misi, dan tata nilai perusahaan oleh Direktur Utama Sesuai Surat Keputusan Direksi NO: SK Direksi No. XX-SURKP/13.074.1 tanggal 22 Juli 2013 tentang perubahan visi, misi, nilai dan budaya organisasi perusahaan PTPN X. Namun mekanisme belum sistematis hal ini dibuktikan belum dilakukan pengukuran pencapaian visi (terkemuka dan berwawasan lingkungan) dan Corporate Culture Index (CCI) untuk tata nilai (ProVISI) sehingga apabila hal tersebut tidak dilakukan akan menyulitkan Pimpinan Senior PTPN X untuk dapat mendorong kinerja seluruh karyawan PTPN X untuk mencapai Visi tersebut di masa yang akan datang dan menumbuhkan organizational consciousness (kesadaran diri terhadap organisasi) *Although PTPN X has implemented methods to define corporate vision and values by: Collecting data, Conducting analysis on internal and external condition data, Holding discussion between Senior Leaders, Division Heads, GM, employee representatives, and consultant to formulate corporate vision, mission, and values and the stipulation of corporate vision, mission, and values by the President Director In accordance with Board of Directors Decree No. XX-SURKP/13.074.1 dated July 22, 2013 on changes of corporate vision, mission, values and organization culture of PTPN X.* *However, this mechanism has not been done systematically, as proven by the absence of measurement of vision achievement (leading and environmentally friendly) and Corporate Culture Index (CCI) for the value system (ProVISI). If this has not been done, it will be difficult for Senior Leaders of PTPN X to encourage the employees of PTPN X to perform and achieve this vision in the future as well as to grow organizational consciousness (self awareness to the organization)*
2	PTPN X belum mempunyai metode menyusun strategi terkait dengan ketidaktahuan atau terbatasnya jangkauan penglihatan (Potensial Blind Spot) dalam proses perencanan strategis dan dalam memperoleh informasi penting bagi perusahaan sehingga dengan demikian PTPN X berpotensi mengalami kesulitan untuk menciptakan struktur organisasi manajemen risiko yang sistematis dan terintegrasi dalam proses normal organisasi dan berdampak kepada keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. *PTPN X has not yet have a method in strategy development related to ignorance or limited range of vision (Potential Blind Spot) in the strategic planning process and in obtaining important information for the Company, so that PTPN X has the potential to have difficulty in creating a systematic and integrated risk management organization structure in the normal process of organization and impact on the Company's long-term sustainability.*
	Walaupun PTPN X telah menggunakan metode yang sistematis dalam memperoleh informasi mengenai kepuasan pelanggan relatif melalui survey kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap tahunnya sesuai dengan yang tertuang dalam RKAP Bagian Pemasara n setiap tahunnya dan prosedur pemasaran No Dok: KD/PR/PMS/01 dan KD/PR/TBK/02 dengan memasukkan salah satu pertanyaan di dalam kuisioner yang menanyakan pendapat responden terhadap posisi PTPN X dibandingkan dengan pesaing apakah lebih baik, sama atau lebih buruk. Namun metode tersebut belum dibandingkan dengan kepuasan pelanggan pesaing. Terbukti hasil kinerja fokus pada pelanggan belum ada yang dibandingkan dengan kinerja pesaing. Hal ini akan menyulitkan PTPN X dalam mengetahui posisinya dibandingkan dengan perusahaan pesaing untuk meningkatkan daya saingnya dipasar terkait dengan bertambahnya pesaing yang memasuki pasar yang sama dengan PTPN X. *Although PTPN X has used a systematic method to obtain information on relative customer satisfaction through customer satisfaction survey conducted annually in accordance with RKAP of Marketing Department each year and marketing procedure No Doc: KD/PR/PMS/01 and KD/PR/TBK/02 by entering one question in the questionnaire asking about respondent's opinion on PTPN X's position of compared to competitors, whether better, the same or worse.* *But the method has not been compared with customer satisfaction of competitors, as evident by the performance result of customer focus has not been compared with the performance of competitors. This will make it difficult for PTPN X to acknowledge its position compared to its competitors to increase its market competitiveness with due regard to the increase of competitors entering the same market with PTPN X.*
	Walaupun PTPN X dalam mempertemukan perbedaan antara proyeksi kinerja kedepan perusahaan yang ditemukenali diatas dengan proyeksi kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam program kerja mengacu kepada RKAP, RKO, Laporan Manajemen (LM). Namun dalam pelaksanaannya belum ditemukan prosedur adanya data evaluasi laporan manajemen bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan dibandingkan dengan proyeksi kinerja pesaing sehingga dengan kondisi demikian akan menyulitkan PTPN X untuk menentukan posisi persaingannya di pasar menghadapi tantangan strategis dengan menggunakan keunggulan strategisnya untuk mencapai sasaran strategis yang berdampak kepada upaya mewujudkan visi dan misi perusahaan. *Although PTPN X in bridging the differences between its future performance projection as identified above with the predefined performance projection in the work program referring to RKAP, RKO, Management Report (LM).* *However, in practice there is no procedure of data evaluation of monthly, quarterly, semiannual and annual management reports compared to the projected performance of competitors, hence it will be difficult for PTPN X to determine its competitive position in the market to face strategic challenges by using its strategic advantages to achieve the strategic targets, which affect the efforts of realizing the company's vision and mission.*

No	Opprotunity For Improvement
	Meskipun PTPN X memiliki metode dalam menilai kebutuhan akan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja melalui: 1) penetapan standar kebutuhan tenaga kerja; 2) melaksanakan pemetaan kompetensi karyawan pimpinan melalui asesmen; 3) sistem diklat baik yang besifat pelatihan manajerial maupun kompetensi dan melakukan pengukuran kinerja karyawan dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Karyawan, namun dalam pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka PTPN X perlu mengukur Competency Indeks Karyawan (CLI), sehingga tercipta lingkungan organisasi yang produktif, dan kinerja karyawan dapat terukur dan terintegrasi dengan KPI perusahaan melalui penerapan Sistem Manajemen Kinerja dan mempersiapkan tenaga kerja untuk perubahan bisnis perusahaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan belum dapat memastikan keberhasilan dalam upaya mewujudkan visi perusahaan dan keberlanjutan usaha dimasa mendatang.
	Meskipun PTPN X telah menerapkan metode mengelola rantai pasokan dengan cara melakukan pengelolaan suplay chain dengan mengacu kepada Proses Bisnis ,menentukan syarat utama kepada pemasok (petani dan suplayer) dan target program mekanisasi supplier pasok namun metode pengelolaan rantai pasokan tidak efektif terbukti ketersediaan dan kualitas bahan baku tebu tidak terpenuhi, Taksasi 424.632 Ton Realisasi tebu digiling 296.141 Ton (55%) di PG Mojo Panggung, umur tebu ditebang kurang dari 10 bulan 0,49 % dari tebu digiling,umur tebu ditebang 10 s/d 12 bulan 7,92 % dari tebu tergiling, standar umur tebu digiling 12 bulan yang berdampak tehadap tidak tercapainyanya target perusahaan *Although PTPN X has methods in assessing the need for manpower capability and capacity through: 1) determination of manpower requirements standards; 2) carry out competency mapping of leaders through assessment; 3) education and training system, both managerial and competency training, and perform the measurement of employee performance by Employee Achievement Appraisal System, but in competency based-human resource management, PTPN X needs to measure Employee Competency Index (CLI), so as to create productive organization environment, and employee performance can be measured and integrated with Corporate KPI through the implementation of Performance Management System and preparing the manpower for changes in the Company's business. This resulted in the Company has not been able to ensure success in the efforts of realizing the Company's vision and business sustainability in the future.*
Dimensi Hasil *Outcome Dimension*	
1	Walaupun PTPN X telah mengukur indikator Kinerja Hasil-Hasil Produk dan Proses, Kinerja Hasil Fokus Pelanggan, Kinerja hasil Fokus Tenaga Kerja, Kinerja hasil Kepemimpinan dan Tata Kelola; Kinerja hasil Keuangan dan Pasar sebanyak 75,74 % (231 data) dari yang seharusnya 305 data, namun beberapa indikator menunjukkan hasil sebagai berikut: • 27,87 % indikator (85 data) Levelnya menurun (Poor) dibanding tahun sebelumnya • 1,31 % indikator (4 data) Level-nya tidak bermakna, karena menampilkan data yang kurang dari 2 periode (No Level), • 8,85 % indikator (27 data) cenderung memburuk trend-nya dalam 3 tahun terakhir (Adverse) dan 19,02 % (58 data) adalah (Unfavorable), • 1,31 % indikator (4 data) Trend-nya tidak bermakna, karena menampilkan data yang kurang dari 3 periode (No Trend), • 7,87 % indikator (24 data) masih dibawah kinerja pesaing atau pembanding sejenis (Lagging), • 56,72 % indikator (173 data), belum di bandingkan dengan pesaing atau perusahaan sejenis (No Comparison), • 68,20 % indikator (208 data) belum diproyeksikan sampai dengan tahun 2016 • 62,60 % indikator (191 data) belum tersegmentasikan sesuai keterkaitannya • 24,26 % indikator (74 data) yang belum dilaporkan hasil kinerjanya (kekurangan indikator/data) *Although PTPN X has measured the indicators of Product and Process Performance Outcome, Customer Focus Performance Outcome, Labor Focus Outcome, Leadership and Governance Performance Outcome; Financial and Market Performance Outcome for 75.74% (231 data) of supposed 305 data, but some indicators show the following results:* • *the level of 27.87% indicators (85 data) decreased (Poor) compared to the previous year* • *the level of 1.31% indicators (4 data) are not meaningful, because display data less than 2 periods (No Level)* • *8.85% indicators (27 data) tend to deteriorate its trend in the last 3 years (Adverse) and 19.02% (58 data) are (Unfavorable)* • *the trend of 1.31% indicators (4 data) are not significant, because display data less than 3 periods (No Trend)* • *7.87% indicators (24 data) are still below the performance of competitors or similar comparators (Lagging)* • *56.72% indicators (173 data) are not yet compared with competitors or similar companies (No Comparison)* • *68.20% indicators (208 data) have not been projected until 2016* • *62.60% indicators (191 data) have not been segmented accordingly* • *the performance results of 24.26% indicators (74 data) have not yet reported (lack of indicators / data)*

v = telah ditindaklajuti | x = belum ditindaklanjuti

Perkembangan Penerapan KPKU di Lingkup PTPN X

Melalui penerapan KPKU, Perseroan memiliki perangkat untuk dapat melakukan evaluasi yang meliputi "Proses" dan "Hasil", dimana kedua faktor ini mempengaruhi seluruh aspek baik kinerja maupun penerapan GCG yang berlandaskan kepatuhan.

Penilaian KPKU dilakukan Perseroan sejak 2012. Tren skor *assessment* GCG periode 2012-2016 adalah sebagai berikut:

KPKU Development in PTPN X

Through KPKU implementation, the Company has a tool to evaluate the "Process" and "Outcome", in which both of these factors affect all aspects of performance and GCG implementation based on compliance.

KPKU assessment has been conducted by the Company since 2012. GCG assessment score trend for the period of 2012-2016 is as follows:

Perkembangan Skor Penerapan KPKU periode 2012-2016

Development of KPKU Score for the period of 2014-2016

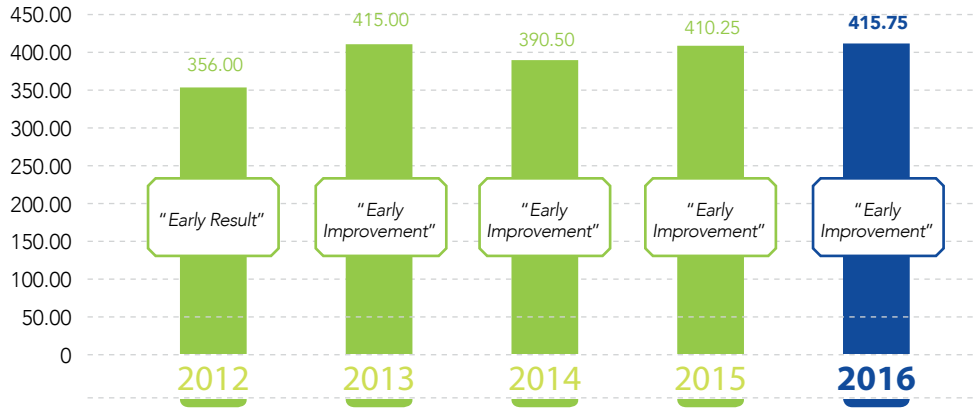

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organs of Corporate Governance

MEKANISME HUBUNGAN ANTAR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan perubahannya, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sistem Tata Kelola Perusahaan di Indonesia untuk jenis badan usaha berbentuk PT merujuk pada sistem *two board* yang terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris, dimana mekanisme *check and balance* di antara kedua organ ini harus diterapkan untuk menghindari potensi benturan kepentingan serta memastikan bahwa keputusan yang dibuat adalah untuk kepentingan perusahaan. Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas pengurusan perusahaan oleh Direksi, sementara Direksi berperan mengelola kegiatan operasional perusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan perusahaan.

Demikian pula pertanggungjawaban Manajemen kepada Pemegang Saham dan keseluruhan tata kelola organisasi. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berlandaskan pada hubungan fidusia *(fiduciary relationship)* dengan masa jabatan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Direksi berkewajiban menyusun pedoman GCG sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan usaha, dimana Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan sesuai pedoman yang telah disusun oleh Direksi. Kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan dalam tahun buku yang telah lampau dalam forum RUPS.

Struktur organ Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini,

MECHANISM OF RELATIONSHIP AMONG CORPORATE GOVERNANCE ORGANS

Pursuant to Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (PT), Law No.19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises, Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 regarding Good Corporate Governance on State-Owned Enterprises and its amendment and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Boardof Commissioners of Issuer or Public Company, the system of Corporate Governance in Indonesia consists of Board of Directors and Board of Commissioners, where the mechanism of check and balance between both organs must be applied to prevent potential conflict interest and also to ensure that the decisions made are for the interest of the Company. Board of Commissioners' role is to supervise and give advices on company's management by Board of Directors, meanwhile Board of Directors' role is to manage the company's operational activities with due observance to the company's best interest.

Likewise, the responsibility of Management to Shareholders and all the organization governance. Board of Directros and Board of Commissioners are appointed by Resolution of General Meeting of Shareholders (GMS) based on fiduciary relationship with specific service period as determined in the General Meeting of Shareholders. Board of Directors has the obligation to formulate GCG code as the foundation of business activities execution, where Board of Commissioners will monitor and ensure that GCG principles has been implemented effectively and continuously according to the code formulated by Board of Directors. To the shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors have the obligation to submit report of their supervision carried in the previous fiscal year in the General Meeting of Shareholders forum.

Structure of Corporate Governance Organs owned by the Company can be seen in the following chart.

Struktur Organ GCG PTPN X

Structure of PTPN X GCG Organs

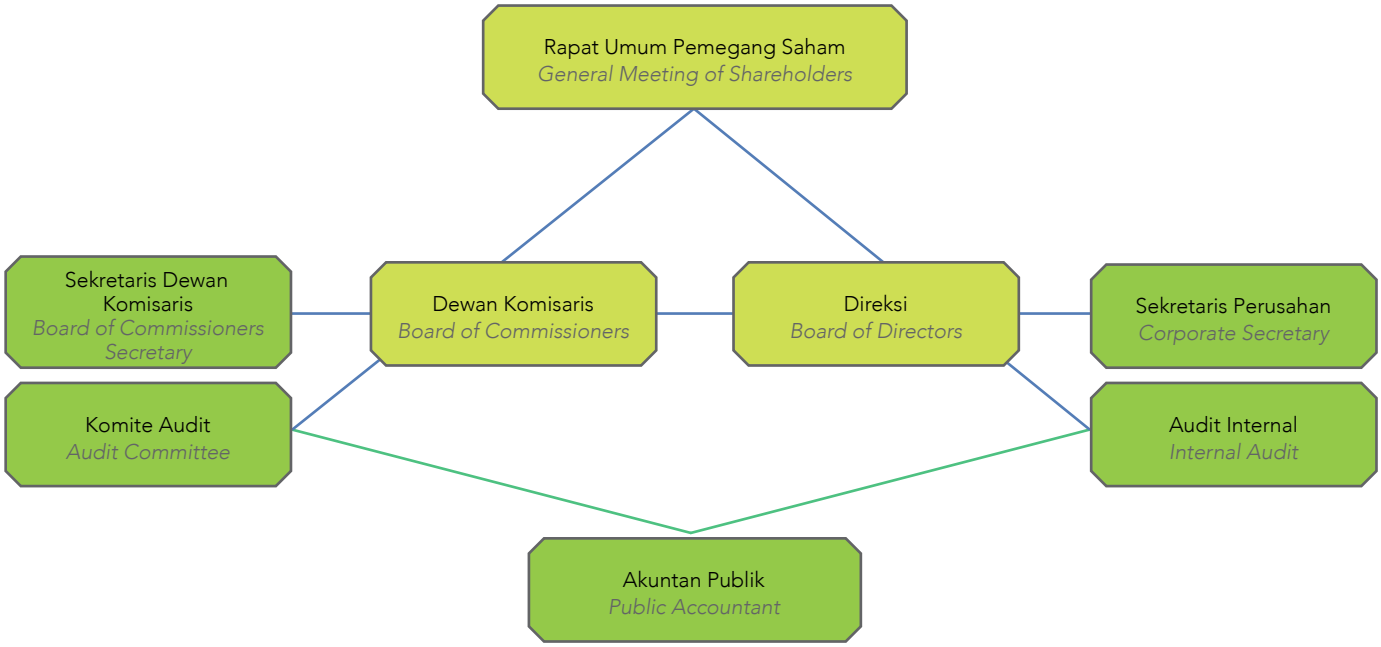

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Saham dan Pemegang Saham

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan dari perusahaan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan definisi yang jelas terkait peran, fungsi, hak dan kewajiban dari pemegang saham sebagai pihak yang menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan; dimana hal ini diatur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebagai salah satu organ Perseroan, RUPS memiliki fungsi sentral dalam mengambil keputusan strategis. Disamping itu, RUPS merupakan wadah perlindungan dan perlakuan kesetaraan bagi seluruh Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Perseroan. Melalui forum RUPS, Pemegang Saham dapat menyalurkan haknya untuk menciptakan nilai optimal bagi Perseroan, dimana hak tersebut berlaku secara adil dan proporsional berdasarkan prinsip *one share, one vote*.

SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Shares and Shareholders

Share is a unit value or a record in various financial instruments that refers to the ownership of the Company. Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company has given a clear definition in relation to role, function, rights and obligations of the shareholders as the party that take part in the company's ownership, where such condition is regulated through the General Meeting of Shareholders (GMS).

As one of the Company's organs, GMS has the central function to take strategic decision. In addition, the GMS is an equal protection and treatment vessel for all Shareholders which held by the company. Through the GMS forum, Shareholders may render their rights to create optimum value for the Company, whereby such rights shall prevail equally and proportionally based on one share, one vote principle.

Perseroan merupakan eks-BUMN yang kepemilikan sahamnya mayoritas berada di bawah *Holding* BUMN sektor Perkebunan, PT Perkebunan Nusantara III (Persero); sementara Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN turut memiliki saham Perseroan.

The Company is an ex-State-Owned Enterprise which majority shares ownership is under a State-Owned Enterprise Holding Company in Plantation Sector, PT Perkebunan Nusantara III (Persero); meanwhile the Republic of Indonesia through the Government of Republic of Indonesia/Ministry of State-Owned Enterprises co-own the shares in the Company.

Komposisi Pemegang Saham PTPN X
per 31 Desember 2017

Composition of PTPN X Shareholders
as of December 31, 2016

Pemegang Saham *Shareholders*	**Jumlah Saham** *(lembar) Number of Shares (shares)*	**Nominal** *Nominal (Rp)/(IDR)*	**Persentase Kepemilikan** *Ownership Percentage (%)*
Saham Seri A *Series A Shares*			
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1	1.000.000	0,00%
Saham Seri B *Series B Shares*			
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1.661.035	1.661.035.000.000	90,00%
Negara Republik Indonesia *The Republic of Indonesia*	184.560	184.560.000.000	10,00%
Jumlah *Total*	1.845.596	1.845.596.000.000	100,00%

Komposisi Kepemilikan Saham PTPN X

Composition of PTPN X Shares Ownership

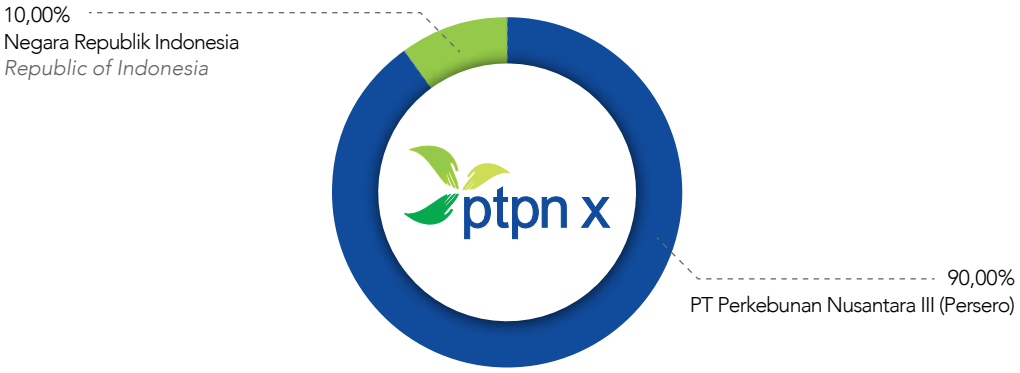

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah pada tahun 2016, Pasal 5 menyebutkan adanya Pemegang Saham Seri A dan Seri B, dimana Perseroan hanya menerbitkan 1 (satu) Saham Seri A, yakni saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lain sebagaimana akan ditetapkan dalam anggaran dasar. Perbedaan wewenang antara Pemegang Saham Seri A dan Seri B dapat dilihat di bawah ini,

Based on Company 's Articles of Association which was last amended in 2016, Article No 5 mentioned that there are holders of Series A and Series B shares, where the Company only issue 1 (one) Series A Share, which gives the holder special rights which is not owned by other shareholders as stipulated in the articles of association. The difference of authorities between Series A and Series B shareholders can be seen as below.

Wewenang *Authority*		
Pemegang Saham Seri A *Series A Shareholder*		**Pemegang Saham Seri B** *Series B Shareholder*
1. Mengusulkan calon Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Mengusulkan perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal; 3. Mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran; 4. Meminta laporan dan penjelasan mengenal hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan; 5. Mengusulkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; 6. Menetapkan kebijakan umum terhadap Perseroan dalam bidang sebagai berikut: a. Bidang Produksi • Harmonisasi bidang produksi, energi, persediaan dan sumber daya perusahaan untuk mengoptimalkan jumlah produksi; dengan biaya yang efisien; • *Health, Safety and Environment* (HSE) dengan target *zero accident*: • Pengelolaan Aset Produksi dan fasilitas pendukung. b. Bidang Pemasaran Kegiatan perdagangan produksi Barang dan Jasa untuk pasar ekspor maupun dalam negeri; c. Bidang Keuangan, Akuntansi dan Perbendaharaan • Akuntansi mengenai standarisasi Biaya Operasional (OPEX) dan Biaya Modal (CAPEX), kebijakan Akuntansi dan komponen laporan keuangan Interim dan tahunan sesuai dengan Pedoman Akutansi BUMN Perkebunan berbasis International Financial Reporting Standard (IFRS); • Keuangan dan perbendaharaan mencakup struktur modal ekuitas dan keuangan; perbankan atas penempatan dana; manajemen risiko; pendanaan proyek investasi; modal kerja; dan pengelolaan kas/ Bank dan treasury dalam tata kelola valuta asing; • Modal kerja; • Pinjaman dana dari pihak luar dan melakukan kerja sama dengan pihak perbankan atau pihak lainnya terkait pinjaman dana, penerbitan obligasi atau instrumen-instrumen pasar modal lalnnya;	*1. Propose Board of Commissioners and Board of Directors candidate* *2. Suggest amendment to articles of association including capital amendment* *3. Suggest for merger, consolidation, take over and separation of the Company, request for Company's bankruptcy to be filed, and dissolution of the Company;* *4. Request for report and explanation regarding specific matters to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners subject to prevailing laws and regulations;* *5. Suggest for Board of Directors and Board of Commissioners remuneration;* *6. Determine Company's general regulations in the following sector:* *a. Production sector* • *Harmonization in the Company's production, energy, supply and resources to optimize production amount; with efficient cost;* • *Health, Safety and Environment (HSE with zero accident target;* • *Management of production assets and supporting facilities* *b. Marketing Sector* *Goods and Services production trade activities for export or domestic market;* *c. Financial, Accounting and Treasury Sector* • *Accounting regarding Operational Expense (OPEX) and Capital Expenditure (CAPEX) standardization, Accounting Policy and interim and annual financial statements component according to accounting code of State-Owned Enterprises Plantation with International Financial Reporting Standard (IRFS) based;* • *Financial and treasury includes capital structure of equity and financual; banking and fund deposit; risk management; investment project funding; working capital; and cash management/Bank and treasury in the foreign exchange governance;* • *Working Capital;* • *Loan from external party in doing cooperation with banking or other related party in relation to loan, bond or other stock market instruments issuance;*	Pemegang saham biasa yang mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku *General shareholders that owns the authority according to the prevailing laws and regulations.*

Wewenang *Authority*	
Pemegang Saham Seri A *Series A Shareholder*	**Pemegang Saham Seri B** *Series B Shareholder*
d. Bidang Pengadaan • Impor Barang dan/jasa yang bersifat strategis; • Pengadaan bersama atas barang atau *material supporting* produksi yang jenisnya sama dan tertentu; e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan • Pengembangan perusahaan sesuai dengan ketersediaan sumber daya, teknologi, dan peluang pasar; • Aktivitas penelitian agar tujuan penelitian fokus kepada aktivitas dengan nilai tambah yang tinggi; f. Bidang Teknologi Informasi Pengadaan dan Pengembangan Teknologi Informasi; g. Bidang Sumber Daya Manusia • Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis Kompetensi secara terintegrasi, yang terdiri dari: » Sistem rekrutmen dan seleksl; » Sistem pengembangan SDM (Sumber Daya Manusla); » Sistem manajemen pengetahuan; » Sistem manajemen kinerja; » Sistem karir dan suksesi berdasarkan *talent management*; » Sistem retensi; » Sistem remunerasi. • *Talent management* (*acceleration pool*) untuk mempersiapkan Pemimpin Strategis; • Hubungan Industrial; • Fungsi Pengembangan dan Perubahan Organisasi; • Pengembangan sistem informasi.	*d. Procurement Sector* • *Goods and/or service Import with strategic nature;* • *Joint procurement of goods or production material supporting with the same and specific kind;* *e. Planning and Development Sector* • *Company's Development according to the availability of resources, technology and market opoortunity;* • *Research activity so that the intention of the research can be focused on activities with high added value;* *f. Technology Information Sector* *Procurement and Development of Technology Information* *g. Human Resource Sector* • *Implementation of integrated Competency based-Human Resource Management, consist of:* » *Recruitment and selection system;* » *Human Resource development system;* » *Knowldege management system;* » *Career and succession system based on talent management;* » *Retention system;* » *Remuneration system;* • *Talent management (acceleration pool) to prepare Strategic Leader;* • *Industrial relations;* • *Development and Amendment of Organization function;* • *Development of Information System*	

Informasi tentang Pemegang Saham Utama

Pemegang saham utama dari Perseroan adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero), atau PTPN III (Persero). PTPN III (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN memiliki seluruh saham atau 100% dari saham PTPN III. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia menjadi entitas induk akhir dari Perseroan.

Information on Major Shareholders

Major shareholder of the Company is PT Perkebunan Nusantara III (Persero), or PTPN III. PTPN III itself is a State-Owned Enterprise (SOE) where the Republic of Indonesia through Government of the Republic of Indonesia/Ministry of State-Owned Enterprises owns all of the shares, or 100% of PTPN III shares. As such, the Republic of Indonesia is the final holding entity of the Company.

Di bawah ini disajikan informasi dalam grafis tentang PTPN III sebagai pemegang saham utama Perseroan.

Below is graphic information regarding PTPN III as the Company's major shareholder.

Struktur Pemegang Saham Utama PTPN X

Structure of PTPN X Major Shareholder

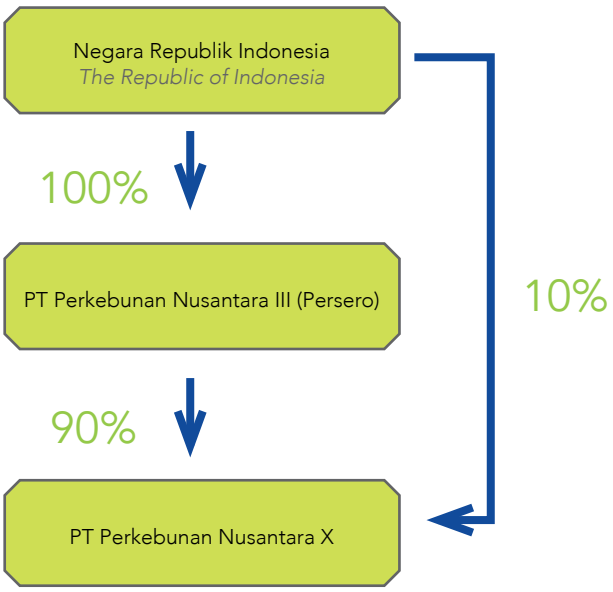

Komposisi Kepemilikan Saham PTPN III (Persero) Sebagai Pemegang Saham Utama PTPN X

Share Ownership Composition of PTPN III (Persero) as Major Shareholder of PTPN X

Hak dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki Perseroan, hak RUPS adalah:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Perseroan, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.
2. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu, terukur, dan teratur.
3. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya.
4. Meminta penyelenggaran RUPS dalam hal Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan.
5. Memperoleh penjelasan lengkap mengenai informasi keuangan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Perseroan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG di lingkup Perseroan.

Wewenang RUPS adalah:

1. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS,
2. Memberikan persetujuan mengenai:
   a. Perubahan jumlah modal
   b. Perubahan anggaran dasar
   c. Rencana penggunaan laba
   d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Perseroan
   e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang
   f. Kerja sama Perseroan
   g. Pembentukan entitas anak atau penyertaan
   h. Pengalihan aktiva
3. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris.
4. Mengangkat dan memberhentikan Direksi.
5. Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Menetapkan auditor eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris.
7. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
8. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Jenis, Peran, Fungsi dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan,

Rights and Authorities of General Meeting of Shareholders

Based on Code of Corporate Governance owned by the Company, the rights of GMS are:

1. To attend and vote in a GMS, exclusively for the Company's shareholders, under provision that one shares shall give one voting right to the holder.
2. To obtain information regarding the Company in a timely, measurable, and orderly manner.
3. To receive the Company's profit shares which were reserved for Shareholders/Capital Owners in the form of dividend, and the remaining proceeds of liquidation, in proportion to the number of shares/equity owned.
4. To request for GMS to be convened in the event Board of Directors are negligent in convening the Annual GMS.
5. To obtain a comprehensive explanation on financial information or other matters related to the Company as contained in the Annual Report and Financial Statements.
6. To obtain explanation regarding implementation of GCG in the Company.

The authority of GMS are:

1. To give authorization with substitution rights to an individual or legal entity to represent it in the GMS,
2. To give approval on:
   a. Capital amendment
   b. Amendment of articles of association
   c. Profit utlilization plan
   d. Merger, consolidation, take over and separation including dissolution of the Company
   e. Investment and long term financing
   f. Company's joint cooperation
   g. Establishment of subsidiary or equity participation
   h. Transfer of assets
3. To appoint and discharge the Board of Dirrectors.
4. To appoint and discharge the Board of Directors.
5. To evaluate the performance of Board of Commissioners and Board of Directors.
6. To appoint external auditor based on poposal received from Board of Commissioners
7. To approve Company's Long Term Plan (RJPP) and Work and Budget Plan
8. To determine the remuneration for Board of Commisisoners and Board of Directors.

Type, Role, Function and Authorization of General Meeting of Shareholders

GMS as the Company's organ is a vessel for Shareholders to make important decision in relation to the capital investment made in the Company, with due observance to

dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Perseroan memiliki 2 (dua) jenis RUPS, yaitu RUPS Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan secara reguler di setiap tahunnya, dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. RUPST diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPST ditetapkan terkait pertanggungjawaban laporan tahunan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, perhitungan tahunan, dan/atau pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2016 dan Tindak Lanjut serta Realisasi oleh Manajemen di Sepanjang Tahun 2017

Pada tahun 2016, Perseroan menyelenggarakan RUPS sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

1. RUPS Tahunan tanggal 14 Juni 2016
2. RUPSLB 15 Juli 2016
3. RUPSLB 1 September 2016
4. RUPS 3 November 2016 (Sirkuler)

Hasil keputusan dan realisasi serta tindak lanjut yang dilakukan di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

provisions of articles of association and prevailing laws and regulations. Pursuant to Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, GMS is the Company's organs that owns authority that is not given to Board of Directors or Board of Commissioners according to limitation as governed in such Law and/or Company's Articles of Association. Decisions made in the GMS must be for the best interest for the Company in long term.

GMS and/or Shareholders may not interfere with the duty, function and authority of Board of Directors and Board of Commissioners without prejudice to the authority of GMS to exercise its rights according to the Company's Articles of Association and laws and regulations, including to proceed with replacement or discharge of member of Board of Commissioners and Board of Directors.

The Company has 2 type of GMS, which are Annual GMS (AGMS) which is convened regulary each year, and Extraordinary GMS (EGMS) which can be convened at any given time if deemed necessary by Board of Directors and/or Board of Commissioners and/or Shareholders. AGMS is convened every year at least 6 (six) months after the end of Company's accounting period. The accountability of annual report by Board of Commissioners and Board of Directors, annual calculation, and/or approval of Company's Work Plan and Pudget are determined during the AGMS.

GMS Resolutions in 2016, Follow-Ups and Realization by Management in 2017

In 2016, the Company convened 4 (four) GMS:

1. Annual GMS on June 14, 2016
2. Extraordinary GMS on July 15, 2016
3. Extraordinary GMS on September 1, 2016
4. Circular GMS on November 3, 2016

The resolutions, realization and follow-up undertaken in 2016 are as follows:

Hasil Keputusan RUPS 14 Juni 2016 *Resolution of GMS on June 14, 2016*	**Realisasi dan Tindak Lanjut** *Realization and Follow Up*
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 *Approval of Company's Annual Report on the condition and progress of the Company during Fiscal Year 2015, including Board of Commissioners Supervisory Report of Fiscal Year 2015*	Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 sudah disahkan *The Company's Annual Report for Fiscal Year 2015, and Board of Commissioners Supervisory Report for Fiscal Year 2015 have been ratified*

Hasil Keputusan RUPS 14 Juni 2016 *Resolution of GMS on June 14, 2016*	**Realisasi dan Tindak Lanjut** *Realization and Follow Up*
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, serta pengesahan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan Tahun Buku 2014 dan 2013. *Ratification of Company's Financial Statements for Fiscal Year 2015 as well as granting of full discharge and release (volledig acquit et de charge) to Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management action of the Company undertaken during Fiscal Year 2015 and ratification of the restatement of financial statements for fiscal year 2014 and 2013.*	Direksi dan Komisaris sudah mendapatkan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) dalam menjalankan Perseroan selama tahun 2015 *Board of Directors and Commissioners have received full discharge and release (volledig acquit et de charge) in running the Company during 2015*
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2015, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015 *Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2015, as well as Granting full discharge and relesae (volledig acquit et de charge) to Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management action of the Partnership and Community Development Program undertaken during Fiscal Year 2015*	Direksi dan Komisaris sudah mendapatkan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) dalam menjalankan PKBL Perseroan selama tahun 2015 *Board of Directors and Board of Commissioners have received full discharge and release (volledig acquit et de charge) in running the Company's PKBL during 2015*
Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2015 *Approval of the Company's Profit Usage for Fiscal Year 2015*	Penggunaan laba bersih sebesar Rp119.053.128.201 ditetapkan 45% untuk dividen dan 55% sebagai cadangan umum. Pelaksanaan pembayaran dividen dilakukan pada 2 Agustus 2016 dan 25 Agustus 2016 *The use of net profit amounting to IDR119,053,128,201 was determined 45% as dividend and 55% as general reserve. The dividend payment was conducted on August 2, 2016 and August 25, 2016*
Persetujuan penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2016 *Approval of the determination of Board of Directors and Board of Commissioners tantiem for 2015, Board of Directors salary and Board of Commissioners honorarium, and allowances and facilities for Board of Directors and Board of Commissioners for 2016*	Penetapan tantiem Direksi dan Komisaris beserta remunerasi sesuai Surat Keputusan 3.00/SKPTS/28/2016, SK-28/S-MBU/06/2016, S-51/D1-MBU/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 *The determination of Board of Directors and Board of Commissioners tantiem and remuneration in accordance with Decree 3.00/SKPTS/28/2016, SK-28/S-MBU/06/2016, S-51/D1-MBU/06/2016 dated June 30, 2016*
Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 *Approval of the assignment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit Company's Financial Statements and Annual Report of the Partnership and Community Development Program for Fiscal Year ending on December 31, 2016*	KAP yang mengaudit tahun buku 2016 adalah Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) *KAP to audit fiscal year 2016 is Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)*
Pengesahan penggunaan dana PMN tahun 2015 *Ratification of the use of PMN funds in 2015*	Penggunaan dana PMN sudah disahkan sesuai ketentuan yang berlaku pada per-11/MBU/09/2015 *The use of PMN funds has been ratified in accordance with the provisions applicable in per-11/MBU/09/2015*

Hasil Keputusan RUPSLB 15 Juli 2016 *Resolution of EGMS on July 15, 2016*	**Realisasi dan Tindak Lanjut** *Realization and Follow Up*
Memberhentikan dengan hormat Sdr Moch Sulton sebagai anggota dewan direksi *Honorably discharged Moch Sultan as member of Board of Directors*	Perubahan Susunan Direksi dari sebelumnya 5 Direksi menjadi 4 Direksi *A change in the structure of the Board of Directors from 5 to 4 members of the Board of Directors*

Hasil Keputusan RUPSLB 1 September 2016 *Resolution of EGMS on September 1, 2016*	**Realisasi dan Tindak Lanjut** *Realization and Follow Up*
Memberhentikan dengan hormat Sdr Heru Sudibyo, Sdr Susanto Darus dan Sdr Djoko Moeljono sebagai anggota dewan komisaris dan mengangkat Sdr Arvan Rivaldy Rebion Siregar dan Sdr Y.B. Priyatmo Hadi sebagai anggota dewan komisaris *Honorably discharged Heru Sudibyo, Susanto Darus, and Djoko Moeljono as member of Board of Commissioners and appointed Arvan Rivaldy Rebion Siregar and Y.B. Priyatmo Hadi as member of Board of Commissioners*	Perubahan Susunan Komisaris dari sebelumnya 5 Komisaris menjadi 4 Komisaris *A change in the structure of the Board of Commissioner from 5 to 4 members of the Board of Commissioner*

Hasil Keputusan RUPS 3 November 2016 (Sirkuler) *Resolution of (Circular) GMS on November 3, 2016*	**Realisasi dan Tindak Lanjut** *Realization and Follow Up*
Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara X *Approval of 2016 Revised Work Plan & Budget (RKAP-P) of PT Perkebunan Nusantara X*	Pengesahan RKAPP 2016 sebagai dasar pelaksanaan operasional Perseroan *Ratification of 2016 RKAPP as the basis of Company's operational implementation*
Persetujuan kepada Direksi untuk melakukan impor *raw sugar* dan mengolah *raw sugar* *Approval to Board of Directors to import and process raw sugar*	Perseroan telah melakukan impor raw sugar sebesar 40.127 ton yang akan diolah Dalam Masa Giling dan Luar Masa Giling *The Company has imported raw sugar amounting to 40,127 tons to be processed in the Milling Period and Outside Milling Period*
Persetujuan penjualan gula melalui Perum Bulog (*off taker*) dalam rangka stabilisasi harga *Approval of sugar sales through Perum Bulog (off taker) in order to stabilize the price*	Realisasi Penjualan ke Perum Bulog sebesar Rp666 miliar dengan kuanta sebesar 60.576 ton *Sales Realization to Bulog amounting to IDR666 billion with a quanta of 60,576 tons*
Persetujuan lain yang tercantum di dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2016 (Risalah No. RIS-005/XX-K.BUMN/2015) dinyatakan tetap berlaku, kecuali keputusan yang telah diubah dalam Surat Persetujuan ini atau KeputusanlPersetujuan lainnya dari Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara X *Other Agreements contained in the Minutes of General Meeting of Shareholders (GMS) on the Approval of Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the 2016 Work Plan and Budget of Partnership and Community Development (RKA-PKBL) (Minutes No. RIS-005/XX-K.BUMN/2015) shall be declared to remain in force, unless the decision has been changed in this Agreement or other Decision/Approval of Shareholders of PT Perkebunan Nusantara X*	Keputusan RUPS sesuai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2016 (Risalah No. RIS-005/XX-. BUMN/2015) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku *GMS resolutions pursuant to Minutes of General Meeting of Shareholders (GMS) concerning Approval of Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Work Plan and Budget of Partnership and Environment Development Program (RKA-PKBL) for 2016 (Minutes No. RIS-005/XX.BUMN/2015) shall be carried out in accordance with applicable regulations*
Dengan adanya persetujuan RKAP-P 2016 ini, maka angka-angka KPI berubah tanpa perubahan komponen *With the approval of 2016 RKAP-P, numbers in KPI changed without changes in the component*	Target KPI direksi yang diaudit oleh KAP mengikuti angka Revisi RKAPP 2016 *The audited KPI targets of Board of Directors by KAP followed the numbers in 2016 Revised RKAPP*

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2017

Di sepanjang tahun 2017, Perseroan menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. RUPS Tahunan tanggal 6 Januari 2017, tentang pengesahan RKAP tahun 2017.
2. RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2017, tentang pertanggungjawaban tahun 2016.

Hasil keputusan dan tindak lanjut yang telah dilakukan di tahun 2017 serta rencana tindak lanjut di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

GMS in 2017

Throughout 2017, the Company convened 2 (two) GMS, namely:

1. AGMS on January 6, 2017, concerning 2017 RKAP approval.
2. AGMS on May 17, 2017, concerning 2016 accountability.

The resolutions and follow-up undertaken in 2017 and follow-up plan in 2018 are as follows:

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 6 Januari 2017 *Resolution of Annual GMS on January 6, 2017*	**Realisasi/Tindak Lanjut dan Rencana Tindak Lanjut** *Realization/Follow Up and Follow Up Plan*
Menyetujui rencana kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 *Approved the Company's 2017 work plan and budget (RKAP)*	Perseroan menggunakan RKAP yang telah disahkan pada RUPS Tahunan ini sebagai target pencapaian diakhir tahun 2017 *The Company used the RKAP that has been ratified in this Annual GMS as the target of achievement by the end of 2017*
Menyetujui rencana kerja dan anggaran program kemitraan dan bina lingkungan (RKA PKBL) tahun 2017 *Approved the 2017 work plan and budget of partnership and community development program (RKA PKBL)*	
Menyetujui secara prinsip program penataan ulang Pabrik Gula PT Perkebunan Nusantara X yang saat ini sedang dilakukan kajian oleh konsultan independen. Dalam hal hasil kajian oleh konsultan independen tersebut berbeda dengan yang diusulkan, maka hasil kajian tersebut akan menjadi dasar untuk dilakukannya revisi atas program penataan ulang Pabrik Gula dimaksud. *In principle approved the rearrangement program of Sugar Mills of PT Perkebunan Nusantara X, which are currently being reviewed by an independent consultant. In case the results by the independent consultant's review is different from the one proposed, those results will be the basis for the Sugar Mills rearrangement program.*	Program ini telah dilaksanakan yang terlihat dari tidak beroperasinya PG Toelangan, Sidoarjo sebagai dampak dari kurangnya ketersediaan bahan baku tebu. Namun demikian, bahan baku yang ada didistribusikan ke PG sesaudara. *This program has been executed as seen from the non-operation of PG Toelangan, Sidoarjo as the impact of the lack of availability of sugarcane raw materials. However, existing raw materials are distributed to PG sesaudara.*
Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2017 *Establish the Operational Aspect Indicators for the Company's Health Level Assessment in 2017*	Perseroan menggunakan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan yang telah disahkan pada RUPS Tahunan ini sebagai target pencapaian diakhir tahun 2017 *The Company used the Operational Aspect Indicators for the Company's Health Level Assessment that has been ratified in this Annual GMS as the target of achievement by the end of 2017*

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 6 Januari 2017 *Resolution of Annual GMS on January 6, 2017*	**Realisasi/Tindak Lanjut dan Rencana Tindak Lanjut** *Realization/Follow Up and Follow Up Plan*
Menetapkan dan mengesahkan kontrak manajemen (*Key Performance Indicator*) Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2017 *Established and authorized the 2017 management contract (Key Performance Indicator) of Board of Directors and Board of Commissioners*	Kontrak manajemen digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. *Kontrak manajemen Dewan Komisaris disahkan melalui surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham No. DK.PTPN-X/16.1043 tanggal 10 Oktober 2016. Untuk kontrak manajemen Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham.* *The management contract is used to measure the performance of Board of Commissioners and Board of Directors.* *The management contract of Board of Commissioners is authorized by letter of Board of Commissioners to Shareholders no. DK.PTPN-X/16.1043 dated October 10, 2016. For management contract of Board of Directors is determined by Shareholders.*
Menetapkan dan mengesahkan kontrak kinerja (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham tahun 2017 *Established and authorized the 2017 performance contract (Key Performance Indicator) of Board of Commissioners with Shareholders*	
Menyetujui penjualan produksi gula Kristal putih kepada Perum Bulog *Approve the sale of white crystal sugar production to Perum Bulog*	Di sepanjang tahun 2017 Perseroan melakukan penjualan gula Kristal putih kepada Perum Bulog sebanyak 50.000 ton dengan penjualan langsung kepada Bulog sebesar 11.500 ton dan sisanya kepada mitra Bulog *Throughout 2017, the Company sold 50,000 tons of white crystal sugar to Perum Bulog, in which 11,500 tons were sold directly to Bulog and the rest to Bulog's partners*
Menyetujui pengagunan aset milik PT Perkebunan Nusantara X berupa 179 sertifikat HGU/HGB/ HP seluas 4.105,13 Ha dengan total nilai Rp3,10 triliun dalam rangka penarikan kredit investasi dan modal kerja termasuk plafond LC impor sebesar Rp 3,00 triliun. Dalam hal dilakukan penilaian (*appraisal*) ulang aset agunan tersebut, maka nilai yang dipergunakan adalah nilai appraisal ulang tersebut. *Approved the use of assets owned by PT Perkebunan Nusantara X as collateral in the form of 179 HGU/HGB/HP certificates covering an area of 4,105.13 Ha with a total value of Rp3.10 trillion in order to withdraw investment and working capital credit including import LC of Rp 3.00 trillion. If the collateral assets are re-appraised, the re-appraisal value will be used.*	Sudah dilaksanakan di tahun 2017 *Has been implemented in 2017*
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar akun investasi niaksimal 10% dari plafon RKAP akun terkait dengan tidak mengubah jumlah total anggaran investasi dan dipertanggung jawabkan dalam RUPS. *Granted authorization to Board of Commissioners, to approve if there are any actions that result in budget shifting among investment accounts for maximum 10% of RKAP ceiling of the related account by not altering the total amount of investment budget and shall be held accountable in the GMS.*	Dalam pelaksanaan investasi berdasar pada skala prioritas, sehingga tidak terjadi pelampauan anggaran investasi baik dari antar akun maupun total anggarannya *Investments were based on the priority scale, so there is no excess of budget investment from either among accounts or total budget*

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 17 Mei 2017 *Resolution of Annual GMS on May 17, 2017*	**Realisasi/Tindak Lanjut dan Rencana Tindak Lanjut** *Realization/Follow Up and Follow Up Plan*
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016. *Approved the Company's Annual Report on the condition and progress of the Company during Fiscal Year 2016, including the Board of Commissioners Supervisory Report of Fiscal Year 2016.*	
Mengesahkan laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan laporannya Nomor RPC-3406/PSS/2017 tanggal 28 Februari 2017 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" , sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*voiledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016 serta mengesahkan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan tahun buku 2015 dan 2014, dengan ketentuan: 1. Sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku; 2. Tindakan tersebut tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan konsolidasian tahun buku 2016 termasuk penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2015 dan 2014. *Ratified the Company's financial statements for Fiscal Year 2016 that has been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja in accordance with its report no. RPC-3406/PSS/2017 dated February 28, 2017 with the opinion "Fairly in all material respects" as well as granted full release and discharge of responsibility (voiledig acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners on the management and supervision of the Company during Fiscal Year 2016 and authorized the restatement of the financial statements for fiscal year 2015 and 2014, provided that:* *1. Insofar as such actions are not criminal offense or not violating prevailing legal provisions and procedures;* *2. Such actions are recorded and reported in the 2016 Annual Report and Consolidated Financial Statements including the restatement of consolidated financial statements for fiscal year 2015 and 2014.*	Sudah dibebaskan dan dilunaskan tanggung jawab sepenuhnya (*voiledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris. *Has been granted full release and discharge (voiledig acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners.*
Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan laporannya Nomor : RPC-3209/PSS/2017 tanggal 28 Februari 2017 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material 9\ sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah dilakukan selama tahun buku 2016, *Approved the Annual Report of Company's Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2016 and ratified the Financial Statements of Company's Partnership and Community Development Program that has been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja in accordance with its report no: RPC-3209/PSS/2017 dated February 28, 2017 with the opinion of "Fairly in all material respects" and at the same time granted full release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) to Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of PKBL during fiscal year 2016,*	

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 17 Mei 2017 *Resolution of Annual GMS on May 17, 2017*	**Realisasi/Tindak Lanjut dan Rencana Tindak Lanjut** *Realization/Follow Up and Follow Up Plan*
Menyetujui insentif Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2017 untuk ditetapkan secara tersendiri. *Approved the incentives of Board of Directors and Board of Commissioners for 2016, Board of Directors' salary and Board of Commissioners' honorarium, and allowances and benefits for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for 2017 to be stipulated separately.*	Penetapan Penghasilan untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2017 telah ditetapkan melalui surat holding Perkebunan Nusantara No. 3.06/N.X/1232/2017 tanggal 19 September 2017. *Income for Board of Directors and Board of Commissioners in 2017 has been determined through the letter of holding Perkebunan Nusantara no. 3.06/N.X/1232/2017 dated September 19, 2017.*
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. b. Menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dimaksud karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. *1. Approved the appointment of Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Partnership and Community Development Program Report (PKBL) of Fiscal Year 2017.* *2. Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners to:* *c. Determine the amount of fee for audit services and other requirements for the Public Accounting Firm.* *d. Establish a replacement Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and Partnership and Community Development Program Report (PKBL) for Fiscal Year 2017, including the determination of honorarium and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.*	Telah dituangkan dalam Surat Perikatan Kontrak No. 0175/PSS/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017. Imbalan jasa audit yang diberikan sebesar Rp758.854.272 *Has been set forth in Contract Agreement No. 0175/PSS/10/2017 dated October 9, 2017. The audit services fee amounting to Rp758,854,272*
Mengesahkan penggunaan dana PMN tahun 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp7.408.030.000,00 sesuai dengan PER-08/MBU/06/2015 Tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. *Ratified the use of PMN funds from 2015 to December 31, 2016 amounting to Rp7,408,030,000.00 in accordance with PER-08/MBU/06/2015 concerning the Reporting Guidelines of the Realization of the Use of State Equity Participation Additional Funds to State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies.*	Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana PMN sampai dengan 31 Desember 2016. *As a form of accountability on the use of PMN funds until December 31, 2016.*
Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. *Confirmed the Enactment of Minister of SOE Regulation no. Per-03/MBU/12/2016 regarding the Amendment of Minister of SOE Regulation no. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.*	Sebagai pedoman untuk pelaksanaan selanjutnya. *As a guidance for further implementation.*

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memegang peran sebagai organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas tindakan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kualifikasi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS harus memenuhi kualifikasi dan kriteria yang sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007, Undang-undang No. 19 tahun 2003, Permen BUMN PER-01/MBU/2011, POJK 33/POJK.04/2014, dan Anggaran Dasar Perseroan. *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perseroan telah mengatur kualifikasi dan kriteria dalam pembahasan terkait ketentuan umum jabatan anggota Dewan Komisaris.

Selain berintegritas dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, individu yang dinominasikan dan ditetapkan sebagai Dewan Komisaris tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan sebuah perusahaan dinyatakan pailit; dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Kriteria pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perseroan juga melarang anggota Dewan Komisaris memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN lain, BUMD, badan usaha milik swasta; serta jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk meminimalisir adanya potensi benturan kepentingan.

Nominasi, Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perseroan telah mengatur nominasi, pengangkatan dan masa jabatan Direksi, sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners holds a role as Company's organ in charge of supervision and providing advice on Board of Directors' actions in carrying out the Company's management, and to ensure that the Company is in compliance to Good Corporate Governance Principles.

Qualification and Criteria of Board of Commissioners Members

Each member of Board of Commissioners as stipulated based on GMS shall have to fulfill the qualification and criteria in accordance with Law No. 40 of 20117, Law No. 19 of 2003, Regulation of Minister of SOE PER-01/MBU/2011, POJK 33/POJK.04/2014, and Company's Articles of Association. Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors owned by the Company has regulated the qualification and criteria related to the general provision of the position of Board of Commissioners member.

Aside form having integrity and competent in carrying out legal acts, the individual nominated and appointed as Board of Commissioners may not be member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners who has been found guilty of causing bankrupty in a company; and has never been sentenced due to any criminal acts causing losses to the state's financial and/or related to any financial sector.

The criteria of Board of Commissioner appointment shall be made in consideration of integrity, dedication and understanding upon the Company's management issues related to one of the managerial function, sufficient knowledge regarding the Company's business sector and ability to provide sufficient time to carry his/her responsibility and other requirements based on laws and regulations.

The Company also forbid member of Board of Commissioners to hold concurrent positions as Board of Directors in other State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, private business; and other position according to laws and regulations, board of political party and/or legislative candidate/member. This policy constitutes part of Company's commitment to minize the potential of conflict of interest.

Nomination, Appointment, and Tenure of Board of Commissioners

Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors owned by the Company has regulated the nomination, appointment and tenure of Board of Directors as follows:

1. Pengangkatan anggota Dewan komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
2. Anggota Dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
3. Anggota Dewan komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang saham Seri A dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
4. Masa Jabatan anggota Dewan komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

1. The appointment of Board of Commissioners member shall not be at the same time of the appointment of Board of Directors member.
2. Board of Commissioners member will be appointed and discharged by the GMS
3. Board of Commissioners member is appointed from candidates proposed by Series A shareholder and such candidacy is binding to the GMS.
4. Tenure of Board of Commissioners member is stipulated at 5 (five) years and thereafter may be reappointed for another 1(one) service period.

Susunan dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Tahun 2017

Di sepanjang tahun 2017 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2017 adalah sama, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Composition and Basis of Appointment of Board of Commissioners in 2017

In 2017, there was no change in Board of Commissioners composition. As such, the composition of Board of Commissioners as of December 31, 2016 and as of December 31, 2017 are the same, which can be seen in the table below.

Susunan Dewan Komisaris PTPN X
Tahun 2017

Composition of PTPN X Board of Commissioners
In 2017

Nama *Name*	**Jabatan** *Position*	**Dasar Pengangkatan** *Basis of Appointment*	**Awal Jabatan** *Beginning of Service*	**Masa Akhir Jabatan** *End of Service*	**Periode Jabatan** *Service Period*
Rudi Wibowo	Komisaris Utama *President Commissioner*	Keputusan Menteri BUMN No. SK-390/MBU/2013 tanggal 21 November 2013 *Decree of Minister of SOE No. SK-390/MBU/2013 dated November 21, 2013*	21 November 2013 *November 21, 2013*	RUPS 2018 *2018 GMS*	Ke-2 (kedua). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris periode (2008-2012) *2nd (Second). Previously served as Commissioner in 2018-2012*
Sukardi Rinakit	Komisaris *Commissioner*	Keputusan Menteri BUMN No. SK-73/MBU/2016 tanggal 31 Maret 2016 *Decree of Minister of SOE No. SK-73/MBU/2016 dated March 31, 2016*	31 Maret 2016 *March 31, 2016*	RUPS 2021 *2021 GMS*	Ke-1 (pertama) *1st (first)*
Y.B. Priyatmo Hadi	Komisaris *Commissioner*	Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/2016 tanggal 1 September 2016 *Decree of Minister of SOE No. SK-207/MBU/2016 dated September 1, 2016*	1 September 2016 *September 1, 2016*	RUPS 2021 *2021 GMS*	Ke-1 (pertama) *1st (first)*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/2016 tanggal 1 September 2016 *Decree of Minister of SOE No. SK-207/MBU/2016 dated September 1, 2016*	1 September 2016 *September 1, 2016*	RUPS 2021 *2021 GMS*	Ke-1 (pertama) *1st (first)*

*Profil singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam Laporan Dewan Komisaris.

* Brief profile of each member of Board of Commissioners can be seen in Board of Commissioners Profile section, in Board of Commissioners Report

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Dewan Komisaris Perseroan memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diperbaharui serta disahkan melalui Surat Keputusan Direksi

Board of Commissioners Working Guidelines

In carrying out its function and role, Board of Commissioners has Working Guidelines as set out in the Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors as renewed and legalized through Board of Directors Decree No. No.

No. XX-SURKP/16.067 tanggal 19 Agustus 2016. *Board Manual* ini antara lain mengatur Dewan Komisaris tentang:

1. Prinsip dasar hubungan kerja Dewan Komisaris & Direksi
2. Ketentuan umum jabatan anggota Dewan Komisaris
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris
4. Pengisian jabatan Dewan Komisaris yang lowong
5. Keadaan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Dewan Komisaris
6. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
7. Rangkap jabatan
8. Fungsi Dewan Komisaris
9. Program pengenalan Perseroan
10. Program Pembelajaran Berkelanjutan anggota Dewan Komisaris
11. Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dewan Komisaris
12. Rapat Dewan Komisaris
13. Benturan kepentingan
14. Tanggung jawab hukum
15. Penilaian Dewan Komisaris
16. Organ pendukung

XX-SURKP/16.067 dated August 19, 2016. This Board Manual among others regulates the Board of Commissioners regarding:

1. Basic principles of working relation between Board of Commissioners and Board of Directors
2. General provisions of member of Board of Commissioners position
3. Appointment and Dismissal of member of Board of Commissioners
4. Fulfillment of vacant position in Board of Commissioners
5. The state of Company that do not have any member of Board of Commissioners
6. Resignation of member of Board of Commissioners
7. Concurrent positions
8. Board of Commissioners function
9. Company's Induction Program
10. Sustainable Learning Program for member of Board Commissioners
11. Duty, authority, right and obligation of Board of Commissioners
12. Board of Commissioners meeting
13. Conflict of interest
14. Legal Responsibility
15. Board of Commissioners assessment
16. Supporting Organ

Ketentuan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2 (Dua) Tingkatan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Terms of Board of Commissioners Supervisory Function

Board of Commissioners is responsible and authorized to supervise the management policy, general management activity, either regarding Company or Company's business carried by Board of Directors, as well as to provide advice to Board of Directors, including supervision on Company's Long Term Plan, Company's Work Plan and Budget, provisions of Articles of Association and GMS resolutions, according to the prevailing lawsvand regulations, for the interest of the Company and invaccordance with the Company's objective and purpose.

2 (Two) Function Level of Board of Commissioners Supervisory

Level Performance *Performance Level*	:	Fungsi pengawasan dimana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada RUPS. *Supervisory function where Board of Commissioners will give guidance and direction to Board of Directors as well as give advice to GMS.*
Level Conformance *Conformance Level*	:	Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku. *The execution of supervisory activity for the next stage shall be to to ensure that the advices are carried out and that the provisions of laws and regulations and Company's Articles of Association have been met.*

Beberapa pedoman umum fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris adalah:

1. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak atas nama Dewan dan tidak dapat bertindak sebagai individu.
2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan; pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.
3. Pengawasan dilaksanakan pada keputusan-keputusan yang sudah diambil (*ex post facto*) maupun keputusan-keputusan yang akan diambil (*preventive basis*).
4. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan atas informasi dari Direksi dan RUPS, tetapi juga dapat berdasarkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis dan aspek operasional Perseroan.

Pembagian Tugas dan Wewenang Antar Anggota Dewan Komisaris

Agar tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing Komisaris dapat dilaksanakan secara optimal dan bersinergi, maka dilakukan pembagian kerja dan tugas para Komisaris sebagai berikut:

1. Komisaris Utama, Rudi Wibowo, membidangi tugas-tugas yang berkaitan dengan:
   a. Koordinasi di lingkup Dewan Komisaris.
   b. Tata kelola, pengembangan Perseroan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
   c. Manajemen keuangan dan investasi.
2. Komisaris, Sukardi Rinakit, membidangi tugas-tugas yang berkaitan dengan:
   a. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia Perseroan.
   b. Manajemen risiko.
   c. Pengawasan atas pengelolaan entitias anak, PT Energi Agro Nusantara.
   d. Hubungan organisasi, kelembagaan dan lingkungan.
3. Komisaris, Y.B. Priyatmo Hadi, membidangi tugas-tugas yang berkaitan dengan:
   a. Teknologi produksi komoditas di lingkup Perseroan.
   b. Teknologi pengolahan komoditas di lingkup Perseroan.

Several general guidelines of supervision function carried out by Board of Commissioners are:

1. To conduct supervision, Board of Commissioners shall act on behalf of the Board and may not act individually.
2. To conduct supervision, Board of Commisisoners may not interfere in the operational decision making. Board of Commissioner may make decision on matters determined in Articles of Association or laws and regulations; such decision making shall be done in its function as supervisor, so that the decision of operational activities shall remain as responsibility of Board of Directors.
3. Supervision shall be done on decisions made (ex post facto) or decisions to be made (preventive basis)
4. Supervision executed is not only based on information from the Board of Directors and GMS, but also based on information obtained from other sources which can be accounted for.
5. Supervision is not carried out only to approve or disapprove actions requiring approval of Board of Commissioners, instead supervision is carried out thoroughly covering all business and operation aspects.

Division of Duties and Authorities Among Board of Commissioners Members

In order for the duties, authorities and obligations of respective Commissioners can be carried out optimally and with synergy, work and duties of Commissioners are divided as follows:

1. President Commissioner, Rudi Wibowo, will be in charge of duties related to:
   a. Coordination in the scope of Board of Commissioner
   b. Governance, development of Company and Corporate Social Responsibility
   c. Financial Management and investment.
2. Commissioner, Sukardi Rinakit, will be in charge of duties related to:
   a. Management and development of human resources of the Company.
   b. Risk management
   c. Supervision on the management of subsidiary, PT Energi Agro Nusantara.
   d. Organizational, institutional and environmental relations.
3. Commissioner, Y.B. Priyatmo Hadi, will be in charge of duties related to:
   a. Technology of commodity production in the Company.
   b. Technology of commodity management in the Company.

c. Manajemen produksi Perseroan.
d. Pengawasan atas pengelolaan entitas anak, PT Nusantara Medika Utama dan PT Dasaplast Nusantara.

4. Komisaris, Arvan Rivaldy Rebion Siregar, membidangi tugas-tugas yang berkaitan dengan:
   a. Sistem Informasi Manajemen Perusahaan.
   b. Metode perencanaan dan alokasi sumber daya.
   c. Pemasaran hasil produksi dan pengembangan industri hilir.
   d. Pengelolaan aset Perseroan.
   e. Pengawasan atas pengelolaan entitas anak, PT Mitra Tani Dua Tujuh.
   f. Membidangi Komite Audit.

Program Pengenalan Perseroan

Dengan beragamnya latar belakang anggota Dewan Komisaris dimungkinkan belum mengenal Perseroan secara mendetail. Oleh karena itu program pengenalan mengenai Perseroan sangat penting untuk dilaksanakan dengan tujuan bahwa anggota Dewan Komisaris dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja Perseroan.

Program Pengenalan meliputi pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG oleh Perseroan; gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit. Program Pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada di Sekretaris Perusahaan.

Di tahun 2017, Perseroan tidak memiliki Komisaris yang baru, dengan demikian Perseroan tidak melaksanakan program pengenalan kepada Dewan Komisaris.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2017

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2017 sesuai dengan rencana kerja adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Rutin
   a. Rapat Internal Dewan Komisaris
      Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali. Selain risalah rapat, hasil dari rapat

c. Company's production management.
d. Supervision on the management of subsidiary, PT Nusantara Medika Utama and PT Dasaplast Nusantara.

4. Commissioner, Arvan Rivaldy Rebion Siregar, will be in charge of duties related to:
   a. Company's Information Management System.
   b. Method of resources planning and allocation,
   c. Marketing of production output and development of downstream industry
   d. Management of Company's asssets
   e. Supervisision on the management of subsidiary, PT Mitra Tani Dua Tujuh.
   f. To be in charge of Audit Committee

Company's Induction Program

Due to Board of Commissioners' various background, it is possible that member of Board of Commissioner has not yet acknowledged the Company in detail. Therefore the Company's Induction program is very important to be conducted so that member of Board of Commissioners will be able to give his/her contribution to the Company's performance immediately.

The Induction Program covering GCG Principles implementation by the Company; illustration regarding the Company related to the objective, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short term and long term work plan, competitivenes position, risk and other strategic issues; internal and external audit, system and policy of internal control, including Audit Committee. Company's Induction Program can be in the form of presentation, meeting, visit to the Company and document studies or other program deemed suitable by the Company where such program is implemented. The responsibility to hold such Induction program will be on the Corporate Secretary.

In 2017, the Company did not have new Commissioner, therefore no Induction program was held for Board of Commissioners.

Brief Report on Board of Commissioners Duty and Responsibility Implementation in 2017

The implementation of activities and budget for 2017 according to the work plan is as follows:

1. Routine activities
   a. Board of Commissioners Internal Meeting
      In 2017, Board of Commissioners held Board of Commissioners internal meeting for 12 times. Besides minutes of meeting, the meeting also resulted in

Dewan Komisaris juga memberikan penetapan: surat persetujuan, rekomendasi, saran dan laporan.

b. Pertemuan Rutin Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi, dimana selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 13 kali. Dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, Dewan Komisaris memberikan masukan atau saran-saran mengenai pengelolaan operasional Perseroan serta lain-lain yang dianggap perlu.

c. Kunjungan Kerja/lapangan ke Unit Usaha
Kegiatan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke unit usaha selama tahun 2017 dilakukan secara bersama-sama juga dilakukan dengan pembagian tugas agar efektif dan efisien. Kegiatan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke berbagai unit usaha Perseroan, yaitu Unit Usaha Gula dan Tembakau.

d. Di tahun 2017 Dewan Komisaris telah menyampaikan hasil analisa dan klarifikasi atas laporan perkembangan operasional Perseroan serta tanggapan dan saran atas laporan dimaksud kepada Pemegang Saham yang dituangkan dalam Tanggapan, Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I, II, III dan Tahunan.

e. Pada tahun 2017, Dewan Komisaris telah menghadiri RUPS tentang Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan PTPN X Tahun Buku 2016 dan Pengesahan RKAP Tahun 2017.

2. Kegiatan Non Rutin (Khusus)
Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapabilitas untuk menunjang tugas fungsi dan kewajiban Dewan Komisaris, selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah mengikuti/menghadiri Kegiatan-kegiatan akademis praktis dan undangan dan mengadakan pertemuan/rapat khusus dengan beberapa Direksi untuk membahas hal-hal yang cukup strategis.

stipulation of: approval letters, recommendation, suggestions and reports.

b. Regular Joint Meeting between Board of Commissioners and Board of Directors, in which in 2017 were held by Board of Commissioners for 13 times. In joint meeting Board of Commissioners by Board of Directors, the Board of Commissioners provide feedback or suggestions on the management of the company and other operational which are deemed necessary.

c. Work/Field Visit to the Business Unit
The work visit activities of Board of Commissioners to the business units in 2017 were conducted jointly and with the division of tasks for the sake of effectiveness and efficiency. Board of Commissioners visited various business units of the Company, namely Sugar and Tobacco Business Unit.

d. In 2017, Board of Commissioners had delivered the results of analysis and clarification on the progress report of Company's operations as well as responses and suggestions of the said reports to the shareholders of PTPN X as outlined in the Response, Opinion, and Suggestions of Board of Commissioners on 1st, 2nd, and 3rd Quarter Management Report and Annual Report.

e. In 2017, Board of Commissioners attended the GMS on the ratification and approval of PTPN X's Financial Statements for 2016 Fiscal Year and the ratification of 2017 RKAP.

2. Non-routine activities (special)
In developing and improving the capability to support Board of Commissioners functions and obligations, in 2017 PTPN X's Board of Commissioners has attended practical academic activities and invitations as well as holding meetings/special meetings with a few members of Board of Directors to discuss strategic matters.

Penilaian Kinerja Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 1 (satu) komite, yaitu Komite Audit. Komite ini telah bekerja dengan sangat baik. Sesuai dengan tugasnya, Komite Audit setiap bulan melaporkan tugas-tugas auditnya pada seluruh unit bisnis di lingkungan Perseroan, dan setiap 3 (tiga) bulan dilakukan pembahasan laporan Komite Audit pada rapat internal Dewan Komisaris. Bahan tersebut menjadi referensi bagi Dewan Komisaris dalam rapat gabungan dengan Direksi pada setiap bulannya.

Performance Appraisal of Committee under Board of Commissioners

In carrying out its supervisory function, Board of Commissioners is assisted by 1 (one) committee, namely Audit Committee. This committee has worked very well. In accordance with its duties, every month Audit Committee reports audit activities to all business units within the Company, and every 3 (three) months those reports are discussed at Board of Commissioners internal meeting. The discussion results become a reference for Board of Commissioners in monthly joint meetings with Board of Directors.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen memiliki peran obyektifikasi dalam pengambilan keputusan di tubuh Dewan Komisaris. Faktor independensi dari Komisaris Independen diharapkan dapat mengurangi benturan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen Perseroan, utamanya karena fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui pendapat yang independen. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 secara khusus telah mengatur keberadaan Komisaris Independen dalam Perseroan.

Kriteria Komisaris Independen

Adapun kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan di atas diantaranya:

1. Berasal dari luar Perseroan.
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
3. Tidak memiliki saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen yang telah memenuhi seluruh kriteria di atas, yaitu Arvan Rivaldy Rebion Siregar yang telah diangkat pada RUPS Tahun 2016 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/2016 tanggal 1 September 2016.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Independent Commissioner has objective role in decision making within Board of Commissioners. The indenpendency factor of inedpendent commissioner is expected to reduce any conflict interest between shareholders and Company's management, mainly because the supervisory function may be carried through independent opinion. The Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 have specifically regulate the existence of Independent Commissioner in the Company.

Criteria of Independent Commissioner

The criteria of Independent Commissioner as regulated in the regulations are among others as follows:

1. Comes form outside of the Company;
2. Not a person working or having authority and responsibilty to plan, lead, control or supervise activities in the Company for the last 6 (six) months, except for the re-appointment as the Company's Independent Commissioner for the next period;
3. Does not own shares in the Company, either directly or indirectly;
4. Does not have any affiliation with the Company, Board of Commissioners, Board of Directors, or Company's shareholdrs; and
5. Does not have any business relation directly or indirectly related to the Company's business .

The Company has 1 (one) Independent Commissioner whom has fulfilled all above criteria, Arvan Rivaldy Rebion Siregar which has been appointed by the Annual GMS of 2016 and has been legalized through Decree of Minister of SOE No. SK-207/MBU/2016 dated 1 September 2016.

Komisaris Independen *Independent Commissioner*	**Tanggal Pengangkatan** *Date of Appointment*	**Periode Menjabat** *Service Period*	**Riwayat Menjabat Sebagai Dewan Komisaris PTPN X** *Appointment History as Board of Commissioners of PTPN X*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar	1 September 2016 *September 1, 2016*	Ke-1 *1st*	Belum pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris PTPN X *Has never served as Board of Commissiones of PTPN X*

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang berfungsi untuk memimpin dan mengelola usaha demi tercapainya tujuan Perseroan. Di bawah pengawasan Dewan Komisaris, Direksi bertanggung jawab untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan meningkatkan pencapaian kinerja Perseroan pada tahun berjalan.

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is organ of the Company that serves to lead and manage the business in order to achieve the Company's objectives. Under the supervision of Board of Commissioners, Board of Directors is responsible for maintaining the performance achieved and improving the performance of the Company in the current year.

Kualifikasi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi

Setiap anggota Direksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS harus memenuhi kualifikasi dan kriteria yang sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007, Undang-undang No. 19 tahun 2003, Permen BUMN PER-01/MBU/2011, POJK 33/POJK.04/2014, dan Anggaran Dasar Perseroan. *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perseroan telah mengatur kualifikasi dan kriteria dalam pembahasan terkait etika jabatan anggota Dewan Komisaris.

Selain akhlak, moral, dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum, individu yang dinominasikan dan ditetapkan sebagai Direksi tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi diwajibkan untuk senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan di atas kepentingan lainnya, dan harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta memperhatikan batasan yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Agar tidak menimbulkan benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, baik sebagai anggota Direksi pada BUMN lain, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik swasta; jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Qualification, Criteria, and Independence of Board of Directors Members

Each member of Board of Directors appointed based on the GMS resolution must fulfill the qualifications and criteria which has been set according to Law No. 40 Year 2007, Law No. 19 Year 2003, Minister of SOE Regulation PER-01/MBU/2011, POJK 33/POJK.04/2014, and the Company's Articles of Association. The Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors regulates the qualifications and criteria in the discussion on work ethics of members of Board of Commissioners.

Aside from a good virtue, moral, and integrity as well as competency in legal matters, the individual nominated and appointed as Board of Directors should never declared bankruptcy, has never been a member of Board of Directors and/or a member of Board of Commissioners found guilty of causing bankruptcy to the company, and has never been convicted of a crime that causes a loss for the state and/or in relation to the financial sector.

In implementing its tasks and authorities, Board of Directors is obligated to prioritize the interest of the Company, to act according to the purposes and objectives of the Company, and to take account of the limitations set by the applicable rules and regulations. To avoid conflict of interest, members of Board of Directors are forbidden from holding concurrent positions, either as member of Board of Directors in other State-Owned Enterprise, Regional-Owned Enterprise, or Privately-Owned Enterprise; other structural and functional positions in a central and regional government institution; board member of a political party and/or member of legislative bodies; and/or other positions which can cause conflict of interest according to the applicable rules and regulations.

Nominasi, Pengangkatan dan Masa Jabatan Direksi

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perseroan telah mengatur nominasi, pengangkatan dan masa jabatan Direksi, sebagai berikut:

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
2. Anggota Direksi diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang saham Seri A dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
3. Masa Jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Board of Directors Nomination, Appointment and Tenure

The Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors regulates the nomination, appointment, and tenure of Board of Directors, as follows:

1. Members of Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS.
2. Members of Board of Directors are chosen from the candidates nominated by Series A Shareholders and such nomination is legally binding for the GMS.
3. Tenure for member of Board of Directors is set at 5 (five) years period and can be re-appointed for 1 (one) more term.

Susunan dan Dasar Pengangkatan Direksi Tahun 2017

Pada awal tahun 2017, pemegang saham Perseroan melalui RUPS memutuskan untuk melakukan pergantian nomenklatur dan operasional Direktorat, dimana dari 4 (empat) Direktorat menjadi 3 (tiga) Direktorat. Surat Kementerian BUMN No. SK-35/MBU/02/2017 tanggal 24 Februari 2017 dan Surat *Holding* PTPN III No. 3.06/SKPTS/R/18/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang mengesahkan perubahan nomenklatur tersebut sekaligus mengesahkan pergantian susunan Direksi sebagai berikut:

1. Direktur Utama, Subiyono diberhentikan dengan hormat, untuk kemudian digantikan oleh Dwi Satriyo Annurogo.
2. Direktur Operasional, Tarsisius Sutaryanto diberhentikan dengan hormat, untuk kemudian digantikan oleh Mustaqim.
3. Direktur Komersil, Muhammad Hanugroho tetap menjabat.
4. Direktur Sumber Daya Manusia & Umum, Djoko Santoso diberhentikan dengan hormat. Direktorat ini kemudian dilebur ke dalam Direktorat lainnya.

Kronologi susunan dan komposisi Direksi di sepanjang tahun 2017 dan susunan Direksi per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Composition and Basis of Appoinment of Board of Directors in 2017

In early 2017, the Company's shareholders through the GMS decided to change the Directorate's nomenclature and operations, from 4 (four) Directorates to 3 (three) Directorates. Decree of Ministry of SOE No. SK-35/MBU/02/2017 dated February 24, 2017 and Decree of Holding PTPN III No. 3.06/SKPTS/R/18/2017 dated February 20, 2017 which validated the change of nomenclature as well as validated the change of Board of Directors as follows:

1. President Director, Subiyono was honorably dismissed and replaced by Dwi Satriyo Annurogo.
2. Operational Director, Tarsisius Sutaryanto honorably dismissed and replaced by Mustaqim.
3. Commercial Director, Muhammad Hanugroho remained in office.
4. Human Resources & General Affairs Director, Djoko Santoso was honorably dismissed. The Directorate is then merged into other Directorates.

The chronology of Board of Directors composition throughout 2017 and Board of Directors composition as of December 31, 2017 are as follows:

Kronologi Susunan dan Komposisi Direksi di Sepanjang Tahun 2017

Chronology of Board of Directors Composition throughout 2017

1 Januari - 23 Februari 2017 *January 1 – February 23, 2017*	**24 Februari - 28 September 2017** *February 24 – September 28, 2017*	**29 September - 10 Desember 2017** *September 29 – December 10, 2017*	**11 - 31 Desember 2017** *December 11 – 31, 2017*	**Keterangan** *Remark*
Subiyono (Direktur Utama) *(President Director)*				Subiyono efektif tidak lagi menjabat Direktur Utama sejak 24 Februari 2017 *Surbiyono was no longer served as President Director since February 24, 2017*
Tarsisius Sutaryanto (Direktur Operasional) *(Operational Director)*				Tarsisius Sutaryanto efektif tidak lagi menjabat Direktur Operasional sejak 24 Februari 2017 *Tarisisius Sutaryanto was no longer served as Operational Director since February 24, 2017*
Muhammad Hanugroho (Direktur Komersil) *(Commercial Director)*	Muhammad Hanugroho (Direktur Komersil) *(Commercial Director)*			Muhammad Hanugroho efektif tidak lagi menjabat Direktur Komersil sejak 28 September 2017 *Muhammad Hanugroho was no longer served as Commercial Director since September 28, 2017*

1 Januari - 23 Februari 2017 *January 1 – February 23, 2017*	**24 Februari - 28 September 2017** *February 24 – September 28, 2017*	**29 September - 10 Desember 2017** *September 29 – December 10, 2017*	**11 - 31 Desember 2017** *December 11 – 31, 2017*	**Keterangan** *Remark*
Djoko Santoso (Direktur Sumber Daya Manusia & Umum) *(Human Resources & General Affairs Director)*				Djoko Santoso efektif tidak lagi menjabat Direktur SDM & Umum sejak 24 Februari 2017 *Djoko Santoso was no longer served as HR & General Affairs Director since February 24, 2017*
	Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	Dwi Satriyo Annurogo efektif menjabat Direktur Utama sejak 24 Februari 2017 *Dwi Satriyo served as President Director since February 24, 2017*
	Mustaqim (Direktur Operasional) *(Operational Director)*	Mustaqim (Direktur Operasional) *(Operational Director)*	Mustaqim (Direktur Operasional) *(Operational Director)*	Mustaqim efektif menjabat Direktur Operasional sejak 24 Februari 2017 *Mustaqim served as Operational Director since February 24, 2017*
			Slamet Djumantoro (Direktur Komersil) *(Commercial Director)*	Slamet Djumantoro efektif menjabat Direktur Komersil sejak 11 Desember 2017 *Slamet Djumantoro served as Commercial Director since December 11, 2017*

Susunan Direksi PTPN X Per 31 Desember 2017

PTPN X Board of Directors Composition as of December 31, 2017

Nama *Name*	**Jabatan** *Position*	**Dasar Pengangkatan** *Basis of Appointment*	**Awal Jabatan** *Beginning of Service*	**Masa Akhir Jabatan** *End of Service*	**Periode Jabatan** *Service Period*
Dwi Satriyo Annurogo	Direktur Utama *President Director*	Keputusan Menteri BUMN No. SK-35/ MBU/02/2017 tanggal 24 Februari 2017 dan Surat *Holding* PTPN III (Persero) No. 3.06/ SKPTS/R/18/2017 tanggal 20 Februari 2017 *Minister of SOE Decree No. SK-35/MBU/02/2017 dated February 24, 2017 dan Holding PTPN III (Persero) Decree No. 3.06/SKPTS/R/18/2017 dated February 20, 2017*	24 Februari 2017 *February 24, 2017*	RUPS 2022 *2022 GMS*	Ke-1 (pertama) *1st*
Mustaqim	Direktur Operasional *Operational Director*		24 Februari 2017 *February 24, 2017*	RUPS 2022 *2022 GMS*	Ke-1 (pertama) *1st*
Slamet Djumantoro	Direktur Komersil *Commercial Director*	Keputusan Menteri BUMN No. SK-271/ MBU/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 dan Surat *Holding* PTPN III (Persero) No. 3.06/ SKPTS/R/136/2017 tanggal 11 Desember 2017	11 Desember 2017 *December 11, 2017*	RUPS 2022 *2022 GMS*	Ke-1 (pertama) *1st*

**Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi, dalam Laporan Direksi*

* Brief profile of each member of Board of Directors can be seen in Board of Directors Profile, in Board of Directors Report

Pedoman Kerja Direksi

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Direksi Perseroan memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diperbaharui serta disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. XX-SURKP/16.067 tanggal 19 Agustus 2016. *Board Manual* ini antara lain mengatur Direksi tentang:

1. Ketentuan Umum Jabatan Direksi
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
3. Persyaratan Pengangkatan Anggota Direksi
4. Etika Jabatan
5. Pengisian Jabatan Direksi yang Lowong
6. Pengunduran Diri dan Masa Jabatan
7. Penetapan Penghasilan Direksi
8. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang dan Kewajiban Direksi
9. Penetapan Kebijakan Direksi
10. Pendelegasian Wewenang
11. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi
12. Program Pengenalan Perseroan
13. Program Pendidikan Berkelanjutan
14. Rapat Direksi
15. Benturan Kepentingan
16. Kewajiban Direksi yang Berkaitan dengan RUPS
17. Kewajiban Terkait Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
18. Kewajiban Terkait Penyelenggaraan Laporan-Laporan dan Laporan Tahunan
19. Kewajiban Terkait Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Intern, Fungsi Sekretaris Perusahaan, dan Tatakelola Teknologi Informasi
20. Kewajiban Terkait Ketentuan Cuti Direksi dan Ijin Keluar Negeri Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga memuat komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan GCG di lingkup Perseroan, dimana komitmen ini menjadi bagian dari keseluruhan pengembangan organ GCG Perseroan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-

Board of Directors Working Guidelines

In carrying out its functions and roles, the Company's Board of Directors follows the guideline stated in the Board Manual of Board of the Commissioners and Board of Directors which has been updated and stipulated through the Decree of Board of Directors No. XX-SURKP/16.067 dated 19 August 2016. The Board Manual regulates among which:

1. General provision of Board of Directors' position
2. Appointment and dismissal of Board of Directors
3. Requirements for the appointment of members of Board of Directors
4. Work ethics
5. Filling out the vacancy in Board of Directors
6. Resignation and tenure
7. Determination of Board of Directors' salary
8. Roles, responsibilities, authorities, and obligations of Board of Directors
9. Determination of Board of Directors' policies
10. Delegating authorities
11. Division of roles and responsibilities of members of Board of Directors
12. Company's Induction program
13. Sustainable education program
14. Board of Directors meeting
15. Conflict of interest
16. Obligation of Board of Directors pertaining to General Meeting of Shareholders
17. Obligation pertaining to the Company's Long Term Plan and the Company's Work and Budget Plan.
18. Obligation pertaining to the preparation of reports and annual reports.
19. Obligation pertaining to Risk Management, Internal Control System, Internal Audit, the functions of Corporate Secretary, and information Technology Management.
20. Obligation pertaining to the leave of absence for Board of Directors and overseas assignment for Board of Directorsand Board of Commissioners.

The Board Manual for Board of Commissioners and Board of Directors of the Company also includes the commitments of Board of Commissionersand Board of Directors in implementing GCG within the Company and such commitment is a part of the whole development of the Company's GCG organs according to the applicable rules and regulations.

Board of Directors Duty and Responsibility

Board of Directors is responsible for carrying out all actions related to the management of the Company according to the objectives and purposes of the Company, and also for representing the Company in or outside of the court on all matters and all occasions with certain limitations as regulated

pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkup Perseroan.

in the Articles of Association and the applicable laws and regulations. Board of Directors shall execute its duties with good intentions for the interest of the Company according to the Company's objectives and purposes, and shall ensure that the Company implements its social responsibilities and takes into account the interests of various stakeholders. One of members of Board of Directors shall be appointed by Board of Directors Meeting as the person-in-charge of the implementation and monitoring of Good Corporate Governance (GCG) in the Company.

Pembagian Lingkup Kerja dan Tanggung Jawab Antar Direksi

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan, Direksi membagi lingkup tugas dan wewenangnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. XX-SURKP/17.055 tanggal 2 Maret 2017, pembagian tugas pokok dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Division of Scope of Work and Responsibility Among Board of Directors

In running the Company's business activities, Board of Directors divides its scope of work and authorities based on Board of Directors Decree No. XX-SURKP/17.055 dated March 2, 2017. The division of main duties and responsibilities for Board of Directorsis as follows:

Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	
• Menetapkan kebijakan Perseroan dalam mengelola Pabrik Gula dan Kebun Tembakau. • Mengkoordinir tugas Direktur Operasional dan Direktur Komersil. • Membidangi Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, dan Biro Hukum & MRK.	• *To determine the Company's policies in managing the Sugar Mills and the Tobacco Plantation.* • *To coordinate the duties of Operational Director and Commercial Director.* • *To lead the Internal Audit Unit, Corporate Secretary, and Legal & MRK Bureau.*
Mustaqim (Direktur Operasional) *(Operational Director)*	
• Melaksanakan kebijakan Perseroan di Bidang Produksi. • Membidangi Divisi Budidaya, Divisi Teknik, Divisi Pengolahan, Divisi *Quality Assurance* (QA), Divisi Sarpram, Divisi Tembakau, dan Divisi Perencanaan & Pengembangan.	• *To implement Company's policies in the field of Operation/ Production.* • *To lead the Area and Culture Division, Engineering Division, Processing Division, Quality Assurance (QA) Division, Facilities, Infrastructure, and Mechanism Division, Tobacco Division, Planning & Development Division.*
Slamet Djumantoro (Direktur Komersil) *(Commercial Director)*	
• Melaksanakan kebijakan Perseroan di Bidang Keuangan. • Membidangi Divisi Keuangan, Divisi Akuntansi, Divisi Pemasaran, Divisi Pengadaan Barang & Jasa, Divisi SDM & HI, Divisi Umum, dan Divisi PKBL.	• *To implement Company's policies in the field of Finance.* • *To lead the Finance Division, Accounting Division, Marketing Division, Procurement Division, HR & IR Division, General Affairs Division, and PKBL Division*
Board of Director **(BOD)**	
• BOD membina dan mengoordinir tugas-tugas sebagai berikut: • Kantor Kuasa Direksi PTPN X Makassar • Pabrik Gula dan Kebun Tembakau	• *BOD supervises and coordinates the following:* • *PTPN X Board of Directors' Proxy Office in Makassar* • *Sugar Mills and Tobacco Plantation*

Program Pengenalan Perseroan

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan, dengan Sekretaris Perusahaan sebagai penanggung jawab program pengenalan tersebut. Program Pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelagasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program Pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan.

Di tahun 2017, Perseroan melaksanakan program pengenalan kepada Direksi baru, yaitu kepada Direktur Utama Dwi Satriyo Annurogo dan Direktur Operasional Mustaqim pada tanggal 24 Februari 2017. Sementara untuk Direktur Komersil Slamet Djumantoro, program pengenalan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2017.

Company's Induction Program

Board of Directors members appointed for the first term are obligated to attend the Company's Induction Program with the Corporate Secretary as the person-incharge of the program. The induction program covers:

1. The implementation of GCG principles by the Company;
2. An overview of the Company related to the objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short and long-term business plan, competitive position, risks and other strategic issues;
3. Explanation related to the delegated authorities, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Explanation related to duties and responsibilities of Board of Directors and all prohibited matters.

The Company's induction program can be in the form of presentation, meeting, visit to the Company, and document reviews, or other program duly suitable for the Company where the program is implemented.

In 2017, the Company conducted induction program to the new Director, namely President Director Dwi Satriyo Annurogo and Operational Director Mustaqim on Februari 24, 2017. As for Commercial Director Slamet Djumantoro, the Induction program was conducted on December 14, 2017.

TRANSPARANSI INFORMASI TERKAIT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja antara Dewan komisaris dan Direksi dilakukan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan saling menghormati. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Perseroan. Demikian pula Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan.

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat bersifat formal ataupun informal. Hubungan kerja yang bersifat formal dilakukan dalam rangka tugas dan tanggung jawab masing-masing; sementara hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan tetapi tidak dapat digunakan sebagai prosedur formal sebelum diputuskan dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dari Direksi adalah untuk kepentingan Perseroan dan atas sepengetahuan Komisaris Utama. Selain rapat rutin yang dilakukan secara berkala di setiap bulannya, rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat dilakukan sesuai kepentingan yang mendesak.

Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

Salah satu tugas terpenting dari Direksi adalah penyusunan dan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang diusulkan oleh Direksi dan ditandatangani bersama-sama dengan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Pemegang Saham melalui RUPS. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja yang memuat RKAP Perseroan sebagai penjabaran tahunan dari RJPP kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. Rencana Kerja harus disampaikan paling lambat 60 hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang sekurang-kurangnya memuat:

TRANSPARENCY OF INFORMATION RELATED TO BOARD OR COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Board of Commissioners and Board of Directors Working Relationship

Board of Commissioners and Board of Directors Working Relationship

Board of Commissioners and Board of Directors working relationship are carried according to the principle of transparency and mutual respect. Board of Commissioners shall respect the responsibility and authority of Board of Directors in managing the Company. Likewise, Board of Directors shall respect the responsibility and authority of Board of Commissioners in conducting supervisory and advisory on Company's management policy.

Working relation between Board of Commissioners and Board of Directors can be either formal or informal. The formal relation will be taken in the course of carrying their respective duties and responsibilities; while informal working relation may be taken but cannot be used as formal procedure before decided by a joint meeting between Board of Commissioners and Board of Directors.

Information needed by Board of Commissioners and Board of Directors shall be for the interest of the Company and under the knowledge of President Commissioner. In addition to regular periodic meeting held monthly, meeting between Board of Commissioners and Board of Directors can be held according to any urgent need.

Determination of the Company's Work and Budget Plan (RKAP) and the Company's Long Term Plan (RJPP)

One of the most important tasks of Board of Directors is to prepare and to propose the Company's Work and Budget Plan and the Company's Long Term Plan. Signed together with Board of Commissioners, these two documents are later proposed to the Shareholders through the General Meeting of Shareholders. Board of Directors is obligated to deliver the work plan which includes the Company's Work and Budget Plan as the annual breakdown of the Company's Long Term Plan to Board of Commissioners for approval before a fiscal year begins. The Work Plan has to be submitted in 60 calendar days at the least before the next fiscal year.

The Company's Long Term Plan is a strategic plan which includes targets and objectives to be achieved for the period of 5 (five) years, and contains at least:

1. Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya.
2. Posisi Perseroan saat RJPP disusun.
3. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP.
4. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang.

1. Evaluation of the implementation of the Company's previous RJPP.
2. The Company's position at the time the Long-Term Plan is prepared.
3. Assumptions used in the preparation of the Company's Long Term Plan.
4. Determination of mission, targets, strategies, policies, and long-term work plan.

Assessment Penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai organ utama, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perseroan. *Assessment* atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perseroan merupakan entitas anak BUMN dan adanya kepemilikan negara sebesar 10% yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di awal bab ini, *assessment* terhadap penerapan GCG mengacu kepada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan di atas.

Sejalan dengan *assessment* yang bertujuan memberikan evaluasi dan rekomendasi, Manajemen Perseroan diharapkan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang muncul dari proses *assessment*. Untuk *assessment* penerapan GCG tahun ukur 2016, hasil *assessment* memberikan predikat "Baik", dengan nilai mencapai 80,04%. Khusus untuk aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, masing-masing meraih nilai perolehan 78,71% dan 88,89%, masing-masing dengan predikat "Baik" dan "Sangat Baik".

GCG Assessment for Board of Commissioners and Board of Directors Aspect

As main organs, Board of Commissioners and the Board of Directors have a central role in Company's growth. Assessment of these two organs is a must, especially since the Company is a subsidiary of an SOE and there is 10% state ownership, which is directed to implement GCG principles on SOE standards as well as assessment of the implementation.

As mentioned earlier in this chapter, the assessment of GCG implementation refers to the Copy of Secretary of Ministry of State-Owned Enterprises Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on the Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOEs. The method of assessment and evaluation is using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with the specified weight as set forth in the above Copy of Decree.

In line with the assessment aimed at providing evaluation and recommendations, the Company Management is expected to follow-up on recommendations arising from the assessment process. For 2016 GCG assessment, the results were "Good" predicate, with a score of 80.04%. Specifically for the aspects of Board of Commissioners/Supervisory Board and Board of Directors, each obtained 78.71% and 88.89%, , with "Good" and "Excellent".

Skor *assessment* penerapan prinsip GCG tahun buku 2016 untuk aspek Dewan Komisaris mendapatkan skor 78,71% (kategori "Baik") dan aspek Direksi 88,89% (kategori "Sangat Baik").
The score of GCG assessment of fiscal year 2016 for Board of Commissioners aspect was 78,71% ("Good" category) and Board of Directors aspect was 88,89% ("Excellent" category).

Jenis Penilaian *Type of Assessment*	:	Assessment
Assessor/Penilai *Assessor*	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur *East Java Finance and Development Supervisory Board (BPKP)*
Tahun Buku Penerapan *Implementation Period*	:	1 Januari 2016 - 31 Desember 2016 *January 1, 2016 – December 31, 2016*
Periode Pengukuran *Measurement Period*	:	7 - 20 Maret 2017 *March 7-20, 2017*

Hasil *Assessment* Penerapan GCG Aspek Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2016
(Metode Penilaian Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)

Results of GCG Assessment for Board of Commissioners and Board of Directors Aspects of Fiscal Year 2016
(Assessment Method Based on Copy of Secretary of Ministry of SOE Decree No. SK-16/S.MBU/2012)

Aspek Pengujian *Assessment Aspect*	**Bobot** *Weight*	**Pencapaian Tahun Buku 2016** *Achievement of Fiscal Year 2016*		
		Nilai *Score*	**Pencapaian (%)** *Achievement (%)*	**Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG** *Qualification of GCG Implementation Quality*
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *Board of Commissioners/Supervisory Board*	35,00	27,55	78,71%	"Baik" *"Good"*
Direksi *Board of Directors*	35,00	31,11	88,89%	"Sangat Baik" *"Excellent"*

Keterangan:
0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Remark:
0-50: Very Poor| 50-60: Poor| 60-75: Fair| 75-85: Good | 85-100: Excellent

Rekomendasi hasil *assessment* penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi tahun ukur 2016 dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Recommendation of GCG assessment for Board of Commissioners and Board of Directors aspect in 2016 and follow up undertaken by the Company are as follows:

No.	**Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2016** *Recommendation of GCG Assessment for Fiscal Year 2016*	**Tindak Lanjut di Tahun 2017** *Follow Up in 2017*		
		Status *Status*	**Periode Tindak Lanjut** *Follow Up Period*	**Tindakan** *Action*
Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *Board of Commissioners/Supervisory Board Aspect*				
1	Dewan Komisaris belum melakukan kegiatan terkait proses persetujuan RJPP yang meliputi membuat rencana kerja terkait proses persetujuan atas rancangan RJPP, melakukan telaah atas rancangan RPJJ dengan mengoptimalkan peran Komite Audit dan menyampaikan tanggapan, pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP kepada Direksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan *Board of Commissioners has not yet conducted activities related to RJPP approval process, which includes prepare a work plan related to the approval process of RJPP draft, review RJPP draft by optimizing the role of audit committee and convery responses, opinions and suggestions on RJPP draft to Board of Directors on a predetermined schedule*	x	2017-2018	Di tahun 2017 RJPP telah mulai disusun, dan diharapkan dapat disahkan pada tahun 2018 *In 2017, RJPP has begun to be drafted, and is expected to be ratified by 2018*

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2016 *Recommendation of GCG Assessment for Fiscal Year 2016*	Tindak Lanjut di Tahun 2017 *Follow Up in 2017*		
		Status *Status*	Periode Tindak Lanjut *Follow Up Period*	Tindakan *Action*
2	Dewan Komisaris belum melakukan telaah secara menyeluruh dan menyampaikan arahan berdasar hasil telaah atas sistem pengendalian intern Perusahaan, yang mencakup kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, hasil evaluasi atas efektifitas pengendalian intern pada tingkat entitas, internal control report *Board of Commissioners has not yet undertaken a thorough review and submitted directives based on the results of company's internal control system review, which includes the policy/draft and implementation of internal control system, evaluation of internal control effectiveness at entity level, internal control report*	x	-	Belum diterapkan *Not yet implemented*
3	Dewan Komisaris belum melakukan telaah dan menyampaikan arahan atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan (termasuk rencana kerja unitmanajemen risiko) hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, dan laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh Direksi *Board of Commissioners has not reviewed and conveyed directives on the policy and implementation of company's risk management (including the work plan of risk management unit) results of risk analysis on RKAP draft and its mitigation strategy, and periodic risk management implementation report submitted by Board of Directors*	x	-	Belum diterapkan *Not yet implemented*
4	Pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup Kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS ada yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Selain itu dalam proses telaah belum sepenuhnya mengoptimalkan peran Komite Audit *There are authorization or recommendation by Board of Commissioners on the transactions or actions of Board of Directors within the authority of Board of Directors or GMS that over a 30 day period from the receipt of proposal or complete document by Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association. In addition, the review process has not fully optimized the role of audit committee*	v	2017	Pemberian rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas tindakan Direksi tidak melebihi jangka waktu 30 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris *Board of Commissioners' recommendation on the actions of Board of Directors shall not exceed 30 days period from the proposal or complete documents received by Board of Commissioners*

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2016 *Recommendation of GCG Assessment for Fiscal Year 2016*	Tindak Lanjut di Tahun 2017 *Follow Up in 2017*		
		Status *Status*	Periode Tindak Lanjut *Follow Up Period*	Tindakan *Action*
5	Dewan Komisaris tidak melakukan penilaian kinerja direksi berdasarkan telaah kreteria, target dan indikator kinerja utama dengan realisasi pencapaian masing-masing Direksi secara individu *Board of Commissioners did not conduct Board of Directors performance appraisal based on review on criteria, targets and key performance indicators with the realization of individual achievements of Board of Directors*	x	-	Penilaian kinerja Direksi masih melekat pada evaluasi kinerja korporat dan belum diterapkan per Direktorat *Board of Directors performance appraisal is still attached to the corporate performance evaluation and has not been applied per Directorate*
6	Dalam pelaksanaan kebijakan benturan kepentingan, Dewan Komisaris belum seluruhnya membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan diperbaharui setiap tahun, belum membuat pakta integritas yang dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal, belum melaporkan tentang kepemilikan saham pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain oleh anggota Komisaris dan anggota keluarganya dalam daftar khusus; *In the implementation of conflict of interest policy, Board of Commissioners has not yet made a statement of not having any conflict of interest that is renewed annually, has not mad an integrity pact attached to the proposed actions of Board of Directors requiring recommendation from Board of Commissioners and approval from GMS/ Capital Owners, has not yet reported share ownership of the Company or other companies by members of Board of Commissioners and their families on a special register;*	V	2017	Sudah ada pakta integritas, namun laporan tentang kepemilikan saham belum dilakukan. *Integrity pact has already been made, but report on shareownership has not been made.*
7	Setiap rapat Komite Audit belum dilengkapi dengan risalah rapat seperti kegiatan rapat/ diskusi intern komite audit, pertemuan komite dengan SPI, pertemuan Komite Audit dengan manajemen; *Each Audit Committee meeting has not been completed with minutes of meetings such as internal audit committee meetings/ discussions, committee meetings with SPI, audit committee meetings with management;*	v	2017	sudah ada risalah rapat komite audit ke dekom terkait pengawasan komisaris *There have been a minutes of Audit Committee meetings to Board of Commissioners related to Board of Commissioners' supervision*

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2016 *Recommendation of GCG Assessment for Fiscal Year 2016*	Tindak Lanjut di Tahun 2017 *Follow Up in 2017*		
		Status *Status*	Periode Tindak Lanjut *Follow Up Period*	Tindakan *Action*
8	Belum ada laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya *There are no quarterly and annual reports of committees to Board of Commissioners, at least containing a comparison of realization of activities with the annual work program as well as the substance of results of its activities and recommendations*	v	2017	Sudah ada laporan triwulan *There have been a quarterly report*
Aspek Direksi *Board of Directors Aspect*				
1	Direksi belum memiliki Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal; *Board of Directors did not have the Company's Long Term Plan (RJPP) legalized by the GMS/Capital Owners;*	x	2017-2018	Di tahun 2017 RJPP telah mulai disusun, dan diharapkan dapat disahkan pada tahun 2018 *In 2017, RJPP has begun to be drafted, and is expected to be ratified by 2018*
2	Target kinerja Direksi tahun 2016 tidak tercapai, penyampaian laporan pencapaian target kinerja Direksi triwulan I mengalami keterlambatan dan tidak ada penyampaian laporan pencapaian kinerja anggota Direksi (individu) karena tidak ada target kinerja Direksi secara individu; *Board of Directors' performance targets for 2016 were not achieved, the report on performance targets achievement of Board of Directors in the first quarter was delayed and there was no report on the individual performance of Board of Directors members because there was no individual performance targets;*	v	Januari – Desember 2017 *January – December 2017*	Penerapan strategi & kebijakan untuk operasional dan keuangan *Implementation of strategies & policies for operations and finance*
3	Direksi belum menyampaikan kepemilikan saham pada Perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat *Board of Directors has not submitted their shareownership of the Company and other companies to the Company (Corporate Secretary) to be registered*	v	2017	Sudah ada pakta integritas, namun laporan tentang kepemilikan saham belum dilakukan. *Integrity pact has already been made, but report on shareownership has not been made.*

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2016 *Recommendation of GCG Assessment for Fiscal Year 2016*	Tindak Lanjut di Tahun 2017 *Follow Up in 2017*		
		Status *Status*	Periode Tindak Lanjut *Follow Up Period*	Tindakan *Action*
4	Direksi belum melakukan evaluasi (pemantauan progres) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya maupun pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai dilakukan pembahasan tindaklanjutnya dalam setiap rapat Direksi dan dituangkan dalam risalah rapat; *Board of Directors has not yet conducted any evaluation (progress monitoring) on the execution of previous meeting's decision nor the execution of previous meeting's decision whose follow-up is still not finished in every Board of Directors meeting and recorderd in the minutes of meeting;*	v	2017	Sudah dilakukan dalam rapat internal yang dihadiri hanya oleh Direksi dan Sekretaris Perusahaan *Has been conducted in internal meetings attended only by Board of Directors and Corporate Secretary*

v = telah ditindaklajuti | x = belum ditindaklanjuti

v = has been followed-up | x = not yet followed-up

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Evaluasi dan Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Board Manual Charter Dewan Komisaris secara khusus mengatur evaluasi dan penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris, dimana Indikator Pencapaian Kinerja atau *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris. KPI merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi KPI kepada Pemegang Saham.

Alur Evaluasi dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners and Board of Directors Performance Appraisal

Evaluation and Assessment on Board of Commissioners Performance

The Board Manual Charter of Board of Commissioners specifically regulates performance evaluation and appraisal of Board of Commissioners, where the Board of Commissioners' Key Performance Indicator (KPI) is determined through the GMS based on proposal from Board of Commissioners. KPI is an assessment measure of successful implementation of supervisory and advisory duty responsibility by Board of Commissioners. Board of Commissioners shall submit quarterly report on progress of KPI realization to Shareholders.

Flow of Performance Evaluation and Assessment of Board of Commissioners

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris didasarkan pada target kinerja secara kolektif yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan target kinerja perorangan yang ditetapkan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris setiap tahun. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris merupakan sarana bagi peningkatan efektivitas peran Dewan Komisaris dan kontribusi masing-masing anggota Dewan Komisaris kepada Perseroan. Disamping itu, hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk penunjukkan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.

Untuk KPI Dewan Komisaris tahun 2017 mengacu kepada surat Dewan Komisaris No. DK.PTPN-X/16.1043 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Permohonan Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara X Tahun 2017. Berikut disampaikan aspek indikator penilaian KPI Dewan Komisaris tahun 2017.

Board of Commissioners performance evaluation is based on collective performance targets set by Board of Commissioners and individual performance targets set by each member of Board of Commissioners annually. Results of Board of Commissioners performance evaluation is a means to increase the effectiveness of role and contribution of Board of Commissioners members to the Company. In addition, the performance evaluation results of Board of Commissioners members are one of the considerations for Shareholders for reappointment as Board of Commissioners member.

Board of Commissioners' KPI for year 2017 refers to Board of Commissioners letter No. DK.PTPN-X/16.1043 dated October 10, 2016 regarding the Application to Determine the 2017 Key Performance Indicators (KPI) for Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara X. The following are indicator aspects of Board of Commissioners' KPI assessment for 2017.

Indikator Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2017		Indicators of Board of Commissioners Performance Appraisal for 2017
Aspek Pengawasan dan Pengarahan *Supervisory and Advisory Aspect*	1. Jumlah Pelaksanaan Rapat a. Rapat Internal b. Rapat Gabungan 2. Tingkat Kehadiran dalam Rapat 3. Memberi Nasehat/saran kepada Direksi 4. Monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal	*1. Number of Meeting Held* *a. Internal Meeting* *b. Joint Meeting* *2. Attendance Level in Meeting* *3. Providing advice/suggestions to Board of Directors* *4. Monitoring the follow up of internal/external audit results/findings*
Aspek Pelaporan *Reporting Aspect*	1. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan 2. Menyampaikan laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham 3. Menyampaikan laporan tugas pengawasan	*1. Prepare and submit annual work program* *2. Submit reports/opinions/suggestions to Shareholders* *3. Submit the supervisory duty report*
Aspek Dinamis *Dynamic Aspect*	Peningkatan kompetensi	Competency development

Evaluasi dan Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Perseroan menetapkan KPI sebagai ukuran kinerja yang harus dicapai oleh manajemen. Untuk memastikan bahwa KPI yang ditetapkan selaras dengan pencapaian visi dan misi Perseroan senantiasa dilakukan sosialisasi kepada seluruh level jabatan agar tercipta kesamaan visi dalam upaya tercapainya sasaran strategi.

Pelaksanaan kebijakan manajemen kinerja ini secara keseluruhan menggunakan tools Balanced Scorecard yang meliputi pengukuran berdasarkan perspektif keuangan, *customer, internal business process,* dan *learning and growth*. Salah satu bentuk implementasinya, progres pencapaian KPI dan program optimalisasi kinerja korporasi dibahas secara rutin, dengan periode setiap triwulanan dan tahunan dalam Rapat Direksi dan didiskusikan bersama Dewan Komisaris. Selain itu, penilaian kinerja Direksi didasarkan pada keberhasilan pelaksanaan Program Kemitraan, khususnya pada efektivitas penyaluran serta kolektabilitas Pinjaman Kemitraan.

Penilaian kinerja Direksi diusulkan oleh pemegang saham dan ditetapkan melalui RUPS.

Board of Directors Performance Evaluation and Assessment

The Company determines KPI as the performance measurement that has to be achieved by the management. To ensure that the predetermined KPI are in line with the achievement of Company's vision and mission, KPI are constantly socialized to all levels of position to ensure the creation of the same vision in the pursuit of achieving the goals of strategies.

The overall implementation of the performance management is using Balanced Scorecard tool which covers the measurement based on financial, customer, internal business process, and learning and growth perspective. One forms of its implementation, the progress of KPI achievement and the corporate performance optimization are discussed regularly in a quarter and annual period during Board of Directors Meeting and the results are discussed together with Board of Commissioners. In addition, Board of Directors performance appraisal is based on the successful implementation of the Partnership Program, in particular on the effectiveness of Partnership Loans distribution and collectability.

The assessment of Directors proposed by shareholders and is determined by GMS.

Alur Evaluasi dan Penilaian Kinerja Direksi

Flow of Performance Evaluation and Assessment of Board of Directors

Berikut disampaikan indikator KPI yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja Direksi di tahun 2017

The following are KPI indicators used for Board of Directors' performance appraisal in 2017

Indikator Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2017		Indicators of Performance Appraisal of Board of Directors in
Aspek Finansial *Financial Aspect*	1. Profitability Ratios a. EBITDA to Sales Ratio b. Net Profit to Total Assets Ratio c. Net Profit Margin d. Earning Quality 2. Coverage Ratios a. Adjusted OCF to Current Liabilites Ratio b. EBITDA to Interest Ratio 3. Corporate Size Growth Ratios a. Revenue Growth b. Assets Growth 4. Cash-Generating Ratios: a. Adjusted Cash Flow to Assets Ratio b. Adjusted Cash Flow to Sales Ratio	*1. Profitability Ratios* *a. EBITDA to Sales Ratio* *b. Net Profit to Total Assets Ratio* *c. Net Profit Margin* *d. Earning Quality* *2. Coverage Ratios* *a. Adjusted OCF to Current Liabilites Ratio* *b. EBITDA to Interest Ratio* *3. Corporate Size Growth Ratios* *a. Revenue Growth* *b. Assets Growth* *4. Cash-Generating Ratios:* *a. Adjusted Cash Flow to Assets Ratio* *b. Adjusted Cash Flow to Sales Ratio*
Aspek Operasional *Operational Aspect*	1. Production Growth - On Farm Level a. Tandan Buah Segar (TBS) Sawit b. Karet c. Teh Basah d. Tebu 2. Production Growth - Ending Product a. Crude Palm Oil (CPO) b. Karet c. Teh kering d. Gula Kristal Putih (GKP) 3. Crop Fertilizing (Ton Pupuk TM+TBM) a. Kelapa sawit b. Tebu c. Karet d. Teh 4. Plant Utilization Rate a. PKS b. Rubber factory c. Tea Factory d. Sugar Mills	*1. Production Growth - On Farm Level* *a. Fresh Palm Fruit Bunches* *b. Rubber* *c. Wet tea* *d. Sugar Cane* *2. Production Growth - Ending Product* *a. Crude Palm Oil (CPO)* *b. Rubber* *c. Dry tea* *d. White Crystal Sugar* *3. Crop Fertilizing (Ton Pupuk TM+TBM)* *a. Palm oil* *b. Sugar Cane* *c. Rubber* *d. Tea* *4. Plant Utilization Rate* *a. PKS* *b. Rubber factory* *c. Tea Factory* *d. Sugar Mills*
Aspek Administrasi *Administrative Aspect*	1. Ketepatan Penyampaian Laporan a. Laporan Manajemen Audited 2016 b. RKAP 2017 c. Laporan Lain (PMN) 2. Efektivitas Penyaluran Pinjaman Kemitraan 3. Kolektabilitas Pinjaman Kemitraan	*1. Timeliness of Report Submission* *a. Audited 2016 Management Report* *b. 2017 RKAP* *c. Other Report (PMN)* *2. Effectiveness of Partnership Loan Distribution* *3. Collectability of Partnership Loan*

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi merupakan imbal jasa yang diberikan Perseroan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja yang telah ditunjukkan. Dasar hukum remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

Remuneration is a compensation given by the Company for Board of Commissioners and Board of Directors for the performance achieved. The legal ground for Board of Commissioners and Board of Directors remuneration is the Company's Articles of Associationand the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 regarding the Guidelines to Determine Income for Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprise.

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Procedure of Proposal until Determination of Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

"Sesuai Pasal 5 Anggaran Dasar PTPN X, remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A, dengan mekanisme penetapan dan pengesahan melalui RUPS."
"According to Article 5 in PTPN X's Articles of Association, remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors is proposed by Series A Shareholders, with the mechanism for determination and stipulation through the GMS."

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh RUPS serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh pemegang saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan. Besarnya gaji/honorarium bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS setiap tahun dengan daya laku selama 1 (satu) tahun buku Perseroan terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

Prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Remuneration for members of Board of Commissioners and Board of Directors shall be based on a formula set by the GMS and has been reviewed by Board of Commissioners through an in-depth review by shareholders. The decision on Board of Commissioners and Board of Directors remuneration is stipulated through the Annual GMS. The amount of salary/honorarium for Board of Commissioners and Board of Directors shall be determined by the GMS every year and valid for 1 (one) fiscal year of the Company since January of the current year.

The procedures to determine Board of Commissioners and Board of Directors remuneration can be seen in the chart below.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Procedure to Determine Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

Dewan Komisaris ***Board of Commissioners***		**RUPS** ***GMS***
• Melakukan kajian penetapan remunerasi • Mengusulkan kepada RUPS • *Conduct review on remuneration* • *Propose to GMS*	→	• Mempelajari usulan remunerasi • Memberikan persetujuan remunerasi • *Study the remuneration proposal* • *Approve remuneration*

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Structure of Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dalam bentuk gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas

The remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors is given in the form of salary/honorarium and

termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Pemberian penghasilan juga mengacu kepada penghasilan profesional di bidang/industri yang sama untuk memberikan penghargaan yang seimbang dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, guna meningkatkan kinerja Perseroan agar mampu bersaing dengan entitas usaha lain di bidang/industri yang sama.

allowance/benefits includes post-employment benefit, which type and amount is determined by the GMS. The salary also refers to the professional salary normally given in the same field/industry as a financial reward for the responsibilities taken by Board of Commissioners and Board of Directors, to improve the Company's performance in order to compete with other business entities in the same field/industry.

Penetapan remunerasi mengacu pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/06/2016 Jo. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut, prinsip penetapan penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dimana komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Gaji/ Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas
4. Tantiem/Insentif Kinerja

The determination of remuneration refers to the provisions as contained in the Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/06/2016 Jo. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines to Determine Income of Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of SOEs. Based on this Minister of SOE Regulation, the principle in determining the income of Board of Commissioners is stipulated by the GMS, in which the components of Board of Commissioners' income are as follows:

1. Salary/Honorarium
2. Allowances
3. Benefits
4. Tantiem/Performance Incentives

Dalam menentukan besaran gaji/honorarium bagi Dewan Komisaris dan Direksi, perhitungan didasarkan sebagai berikut:

1. Gaji Direktur Utama menjadi acuan dengan porsi 100%.
2. Gaji Direktur 90% dari nilai gaji Direktur Utama.
3. Honorarium Komisaris Utama 45% dari nilai gaji Direktur Utama.
4. Honorarium Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama.

In determining the amount of salary/honorarium for Board of Commissioners and Board of Directors, the calculation is based as follows:

1. Salary of President Director as reference with 100% portion.
2. Salary of Director is 90% of President Director's salary.
3. Honorarium of President Commissioner is 45% of President Director's salary
4. Honorarium of Commissioner is 90% of President Commissioner's honorarium.

Struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

The following is the structure of remuneration and its components for Board of Commissioners and Board of Directors:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	Struktur Remunerasi Direksi
Honorarium Dewan Komisaris • Perhitungan honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama* • Perhitungan honorarium Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama* • Pajak atas honorarium ditanggung dan menjadi beban Perseroan *Board of Commissioners Honorarium* • *Calculation of President Commissioner's Honorarium is 45% of President Director's salary** • *Calculation of Commissioner's honorarium is 90% of President Commissioner's salary** • *Tax on honorarium is on Company's expense*	Gaji Direksi • Gaji Direktur Utama sebagai acuan utama* • Perhitungan gaji anggota Direksi ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebesar 90% dari gaji Direktur Utama* • Besarnya gaji anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS setiap tahun selama tahun buku sejak bulan Januari tahun berjalan • Pajak atas gaji ditanggung dan menjadi beban Perseroan *Board of Directors Salary* • *President Director's salary as main reference** • *Calculation of Board of Commissioner member's salary is determined with position factor composition of 90% of President Director's salary** • *The amount of Board of Directors member's salary is stipulated by the GMS every year for the fiscal year since January of current year* • *Tax on salary is on Company's expense*

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	Struktur Remunerasi Direksi
Tunjangan Dewan Komisaris • Tunjangan Hari Raya, dengan besaran 1 (satu) kali honorarium. • Tunjangan Transportasi. • Tunjangan Komunikasi. *Board of Commissioners Allowances* • *Religious Holiday Allowance, amounted to 1 (one) time honorarium* • *Transportaion Allowance* • *Communication Allowance*	Tunjangan Direksi • Tunjangan Hari Raya, dengan besaran 1 (satu) kali gaji. • Tunjangan Perumahan. • Tunjangan Komunikasi. *Board of Directors Allowances* • *Religious Holiday Allowance, amounted to 1 (one) time honorarium* • *Housing Allowance* • *Communication Allowance*
Asuransi Purna Jabatan yang dibayarkan 1 (satu) kali dalam setahun. *Post-employment insurance paid 1 (one) time in a year*	Asuransi Purna Jabatan yang dibayarkan 1 (satu) kali dalam setahun. *Post-employment insurance paid 1 (one) time in a year*
Fasilitas Dewan Komisaris *Board of Commissioners Benefits*	Fasilitas Direksi *Board of Directors Benefits*
Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi • Perseroan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahaan Laporan Tahunan. *Board of Commissioners and Board of Directors Tantiem* • *The Company may give Tantiem to members of Board of Directors and Board of Commissioners based on the GMS resolution in the ratification of Annual Report.*	
Tidak ada komponen lainnya (komponen lainnya, seperti bonus non kinerja dan opsi saham, dll) *No other components (other components, such as non performance bonuses and stock options, etc.)*	
*) Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/06/2016	*) Referring to the Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/06/2016

Indikator untuk Penetapan Remunerasi dan Pengesahannya

Penetapan remunerasi yang berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor di bawah ini:

1. Pendapatan Perseroan.
2. Aktiva Perseroan.
3. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan.
4. Tingkat inflasi.
5. Faktor-faktor lain yang relevan, termasuk diantaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Untuk penetapan remunerasi yang berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

1. Pencapaian target.
2. Tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perseroan.
3. Faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*), termasuk diantaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Berdasarkan Keputusan Rups Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2017, yang kemudian diperkuat melalui Surat Holding Perkebunan Nusantara No. 3.06/N.X/1232/2017 tanggal 19 September 2017, gaji Direktur Utama tidak mengalami perubahan dibandingkan

Indicators to Determine Remuneration and its Validation

The permanent remuneration in the form of salary/honorarium, allowances and benefits are determined by taking into account the following factors:

1. The Company's revenue
2. The Company's assets
3. The Company's financial condition and capabilitu
4. The inflation rate
5. Other relevant factors, includes common remuneration rate in the same industry.

The variable remuneration in the form of allowance and tantiem is determined by considering the following factors:

1. Target achievement
2. The Company's financial health level and capability
3. Other relevant factors (the merit system), which include, among others, common remuneration rate in the same industry

Based on the resolution of Annual GMS held on May 17, 2017, which was later strengthened through the Letter of Perkebunan Nusantara Holding no. 3.06/N.X/1232/2017 dated September 19, 2017, the salary of President Director remained the same as 2016, amounted to Rp102,300,000.

tahun 2016, yang ditetapkan sebesar Rp102.300.000. Surat Holding Perkebunan Nusantara tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi tidak mendapatkan tantiem untuk kinerja tahun buku 2016. Besaran gaji Direktur Utama menjadi dasar perhitungan bagi honorarium untuk Dewan Komisaris dan gaji untuk Direksi lainnya.

In the Letter of Perkebunan Nusantara Holding, Board of Commissioners and Board of Directors did not receive any tantiem for the performance of fiscal year 2016. The salary of President Director is the basis for calculating the honorarium for Board of Commissioners and the salary for other Directors.

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2017

Total Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors in 2017

Transparansi mengenai remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2017 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Transparency pertaining the remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2017 can be seen in the table below

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2017

Board of Commissioners Remuneration in 2017

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Periode Menjabat *Service Period*	Perhitungan per Bulan *Monthly Calculation*			Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan *Total Honorarium and Allowance in 1 Month*	Jumlah Honorarium dan Tunjangan Selama 1 Tahun *Total Honorarium and Allowance in 1 Year*	Tunjangan Hari Raya *Religious Holiday Allowance*	Tantiem *Tantiem*	Jumlah Remunerasi Tahun 2017 *Total Remuneration in 2017*
		Honorarium	Tunjangan Transport *Transportation Allowance*	Tunjangan Komunikasi *Communication Allowance*					
		(Rp)/(IDR)	(Rp)/(IDR)	(Rp)/(IDR)	(Rp)/(IDR)	(Rp)/(IDR)	(Rp)/(IDR)	(Rp)/(IDR)	(Rp)/(IDR)
Rudi Wibowo (Komisaris Utama) *(President Commissioner)*	1 tahun penuh *1 year full*	46.035.000	9.207.000	2.301.750	57.543.750	690.525.000	57.543.750	-	748.068.750
Sukardi Rinakit (Komisaris) *(Commissioner)*	1 tahun penuh *1 year full*	41.431.500	8.286.300	2.071.575	51.789.375	621.472.500	51.789.375	-	673.261.875
Y.B. Priyatmo Hadi (Komisaris) *(Commissioner)*	1 tahun penuh *1 year full*	41.431.500	8.286.300	2.071.575	51.789.375	621.472.500	51.789.375	-	673.261.875
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen) *(Independent Commissioner)*	1 tahun penuh *1 year full*	41.431.500	8.286.300	2.071.575	51.789.375	621.472.500	51.789.375	-	673.261.875
Jumlah (Rp) *Total*									2.767.854.375

Tunjangan Purna Jabatan bagi anggota Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk Asuransi Purna Jabatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014 yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam 1 (satu) tahun yang termasuk didalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian yang diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).

Post-Employment Allowance for members of Board of Commissioners is given in the form of Post-Employment Insurance as stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/2014 amounting to 25% (twenty five percent) of Annual Salary, includes premium for accident and death insurance provided during the term of office (from appointment until dismissal).

Remunerasi Direksi Tahun 2017

Board of Directors Remuneration in 2017

Direksi *Board of Directors*	**Periode Menjabat** *Service Period*	**Perhitungan per Bulan** *Monthly Calculation*			**Jumlah Gaji dan Tunjangan per Bulan** *Total Salary and Allowance in 1 Month*	**Jumlah Gaji dan Tunjangan Selama 1 Tahun** *Total Salary and Allowance in 1 Year*	**Tunjangan Hari Raya** *Religious Holiday Allowance*	**Tantiem** *Tantiem*	**Jumlah Remunerasi Tahun 2017** *Total Remuneration in 2017*
		Gaji *Salary*	**Tunjangan Perumahan** *Housing Allowance*	**Tunjangan Komunikasi** *Communication Allowance*					
		(Rp)/(IDR)	**(Rp)/(IDR)**	**(Rp)/(IDR)**	**(Rp)/(IDR)**	**(Rp)/(IDR)**	**(Rp)/(IDR)**	**(Rp)/(IDR)**	**(Rp)/(IDR)**
Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama)* *(President Director)**	Maret – Desember *March-December*	102.300.000	25.000.000	5.115.000	132.415.000	1.324.150.000	102.300.000	-	1.426.450.000
Mustaqim (Direktur Operasional) *(Operational Director)*	Maret – Desember *March-December*	92.070.000	25.000.000	4.603.500	121.673.500	1.216.735.000	92.070.000	-	1.308.805.000
Slamet Djumantoro (Direktur Komersil) *(Commercial Director)*	Desember *December*	92.070.000	25.000.000	4.603.500	121.673.500	121.673.500	-	-	121.673.500
Subiyono (Direktur Utama-digantikan) *(President Director-replaced)*	Januari – Februari *January-February*	102.300.000	-	5.115.000	107.415.000	214.830.000	-	-	214.830.000
Tarsisius Sutaryanto (Direktur Operasional-digantikan) *(Operational Director-replaced)*	Januari – Februari *January-February*	92.070.000	25.000.000	4.603.500	121.673.500	243.347.000	-	-	243.347.000
Muhammad Hanugroho (Direktur Komersil-digantikan) *(Commercial Director-replaced)*	Januari – September *January-September*	92.070.000	25.000.000	4.603.500	121.673.500	1.095.061.500	92.070.000	-	1.187.131.500
Djoko Santoso (Direktur SDM & Umum-diberhentikan) *(HR & General Affairs Director-dismissed)*	Januari – Februari *January-February*	92.070.000	25.000.000	4.603.500	121.673.500	243.347.000	-	-	243.347.000
Jumlah (Rp) *Total*									4.745.584.000

*) *Direktur Utama menempati rumah dinas.*

*) President Director occupies an official house.

Tunjangan Purna Jabatan bagi anggota Direksi diberikan dalam bentuk Asuransi Purna Jabatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014 yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun yang termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian yang diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).

Post-Employment Allowance for members of Board of Directors is given in the form of Post-Employment Insurance as stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/2014 amounting to 25% (twenty five percent) of Annual Salary, includes premium for accident and death insurance provided during the term of office (from appointment until dismissal).

Jumlah remunerasi yang dibayarkan Perseroan kepada Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Total remuneration paid by the Company to Board of Commissioners and Board of Directors in 2017 is as follows:

Uraian *Description*	**2017** **(Rp)/(IDR)**	**2016** **(Rp)/(IDR)**	**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (Decrease)*	
			Selisih *Difference* **(Rp)/(IDR)**	**Persen** *Percent* **(%)**
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris *Total Remuneration of Board of Commissioners*	2.767.854.375	4.209.965.770	(1.442.111.395)	-34,25%
Jumlah Remunerasi Direksi *Total Remuneration of Board of Directors*	4.745.584.000	9.053.304.010	(4.307.720.010)	-47,58%
Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi *Total Remuneration Paid to Board of Commissioners and Board of Directors*	7.563.438.375	13.263.269.780	(5.699.831.405)	-42,97%

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:

Information on salary ratio of Board of Commissioners, Board of Directors and employees of the Company is as follows:

Perihal *Subject*	**2017**	**2016**
Direktur terhadap Direktur Utama *Director to President Director*	0,9 : 1	0,9 : 1
Anggota Dewan Komisaris terhadap Komisaris Utama Board of Commissioners Member to President Commissioner	0,9 : 1	0,9 : 1
Komisaris Utama terhadap Direktur Utama *President Commissioner to President Director*	0,45 : 1	0,45 : 1
Karyawan tertinggi terhadap Direktur Utama *Highest employee to President Director*	0,3 : 1	0,3 : 1
Karyawan terendah terhadap Direktur Utama *Lowest employee to President Director*	0,03 : 1	0,03 : 1
Karyawan Terendah terhadap Karyawan Tertinggi *Lowest Employee to Highest Employee*	0,1 : 1	0,1 : 1
UMP terhadap Karyawan Terendah *UMP to Lowest Employee*	1 : 1	1 : 1

Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah karyawan Grade 1, sementara karyawan terendah adalah karyawan Grade 16.

The highest employee in the table above is Grade 1 employee while the lowest employee is Grade 16 employee.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau berdasarkan kebutuhan. Dalam menyelenggarakan rapat yang sesuai dengan hal-hal yang akan dibicarakan, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.

Di sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris menyelenggarakan 25 kali rapat, dimana 12 kali rapat merupakan Rapat Internal Dewan Komisaris, dan 13 rapat lainnya merupakan Rapat Gabungan yang mengundang Direksi. Berikut risalah Rapat Dewan Komisaris dan kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat.

Board of Commissioners and Board of Directors Meeting

Board of Commissioners Meeting

Board of Commissioners meeting is convened periodically, at least once a month or based on needs. In convening the meeting according to the issues to be discussed, Board of Commissioners will may hold Board of Commissioners meeting with Board of Directors and ask Directors and/or other staffs under Board of Directors with acknowledgement of Board of Directors, to attend such Board of Commissioners Meeting.

During 2017, Board of Commisioners had convened 25 meeting, in which 12 times of them were Board of Commissioners Internal Meeting, and 13 other meetings were joint meeting where Board of Directors are invited. Below is the summary of Board of Commissoners Meetings and their attendance in the meetings.

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris / **Minutes of Board of Commissioners Internal Meeting**

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Commissioner, and Reason of Absence*
27 Januari 2017 *January 27, 2017*	Yogyakarta	• Membahas Progres Pelaksanaan Pekerjaan dan Perkembangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN); • Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Bulan Desember 2016 (pending issues); • Membahas Rencana Kegiatan Dewan Komisaris kedepan • Lain-lain • *Discussing Progress on Work Implementation and Development of State Capital Participation Fund (PMN);* • *Follow-Up on Conclusion of Internal Meeting in December 2016 (pending issues);* • *Discussing Future Activity Plan of Board of Commissioners;* • *Others*	Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit) Komisaris Independen / *Independent Commissioner* (Arvan R.R Siregar)	-
24 Februari 2017 *February 24, 2017*	Jakarta	• Membahas Laporan Keuangan PT Perkebunan Nusantara X Tahun Buku 2016; • Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Bulan Desember 2016 (pending issues); • Membahas Rencana Kegiatan Dewan Komisaris kedepan • Lain-lain • *Discussing Financial Statements of PT Perkebunan Nusantara X for Fiscal Year 2016;* • *Follow-Up on Conclusion of Internal Meeting in December 2016 (pending issues);* • *Discussing Future Activity Plan of Board of Commissioners;* • *Others*	Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris Independen / *Independent Commissioner* (Arvan R.R Siregar)	Komisaris Sukardi Rinakit tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Commissioner Sukardi Rinakit was absent due to an official matter*

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Commissioner, and Reason of Absence*
10 Maret 2017 *March 10, 2017*	Surabaya	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Bulan Februari 2017 (pending issues); • Membahas Isu-isu strategis terkait dengan unit bisnis PT Perkebunan Nusantara X; • Lain-lain • *Follow-Up on Conclusion of Internal Meeting in February 2017 (pending issues);* • *Discussing strategic issues related to business units of PT Perkebunan Nusantara X;* • *Others*	Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit) Komisaris Independen / *Independent Commissioner* (Arvan R.R Siregar)	-
7 April 2017 *April 7, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Bulan Maret 2017 (pending issues); • Membahas Kinerja Unit Usaha Tembakau; • Membahas Isu-isu strategis terkait dengan unit bisnis PT Perkebunan Nusantara X; • Lain-lain • *Follow-Up on Conclusion of Internal Meeting in March 2017 (pending issues);* • *Discussing the Performance of Tobacco Business Unit;* • *Discussing strategic issues related to business units of PT Perkebunan Nusantara X;* • *Others*	Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit)	Komisaris Independen Arvan R.R Siregar tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Independent Commissioner Arvan R.R Siregar was absent due to an official matter*
19 Mei 2017 *May 19, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Bulan April 2017 (pending issues); • Membahas Keputusan dan Arahan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan TB 2016; • Membahas Isu-isu strategis terkait dengan unit bisnis PT Perkebunan Nusantara X; • Lain-lain • *Follow-Up on Conclusion of Internal Meeting in April 2017 (pending issues);* • *Discussing Resolutions and Directives of GMS on Approval of 2016 Financial Statements* • *Discussing strategic issues related to business units of PT Perkebunan Nusantara X;* • *Others*	Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit)	Komisaris Priyatmo Hadi dan Komisaris Independen Arvan R.R Siregar tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Commissioner Priyatmo Hadi and Independent Commissioner Arvan R.R Siregar was absent due to an official matter*
16 Juni 2017 *June 16, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Bulan Mei 2017 (pending issues); • Membahas Hasil Kunjungan Lapang ke Pabrik Gula di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara X dalam rangka awal giling 2017; • Membahas Usulan Perubahan Lingkup dan Distribusi Alokasi Dana PMN; • Lain-lain • *Follow-Up on Conclusion of Internal Meeting in May 2017 (pending issues);* • *Discussing Field Visit to Sugar Mills in PT Perkebunan Nusantara X in starting the milling 2017;* • *Discussing Proposed Changes in the Scope and Distribution of PMN Fund Allocations;* • *Others*	Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris Independen / *Independent Commissioner* (Arvan R.R Siregar)	Komisaris Sukardi Rinakit tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Commissioner Sukardi Rinakit was absent due to an official matter*

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Commissioner, and Reason of Absence*
21 Juli 2017 *July 21, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Bulan Juni 2017 (pending issues); • Membahas Isu-isu strategis terkait dengan unit bisnis PT Perkebunan Nusantara X; • Lain-lain • *Follow-Up on Conclusion of Internal Meeting in June 2017 (pending issues);* • *Discussing strategic issues related to business units of PT Perkebunan Nusantara X;* • *Others*	Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit) Komisaris Independen / *Independent Commissioner* (Arvan R.R Siregar)	-
4 Agustus 2017 *August 4, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Bulan Juli 2017 (pending issues); • Membahas Rekomendasi Dewan Komisaris atas Usul Perubahan Lingkup dan Distribusi Alokasi Dana PMN; • Membahas Rencana Kegiatan Dewan Komisaris kedepan; • Lain-lain • *Follow-Up on Conclusion of Internal Meeting in July 2017 (pending issues);* • *Discussing Board of Commissioners' recommendations on Proposed Changes in the Scope and Distribution of PMN Fund Allocations;* • *Discussing the Future Activities of Board of Commissioners;* • *Others*	Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit)	Komisaris Independen Arvan R.R Siregar tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Independent Commissioner Arvan R.R Siregar was absent due to an official matter*
29 September 2017 *September 29, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Bulan Agustus 2017 (pending issues); • Membahas Rekomendasi Dewan Komisaris atas Usulan Pelelangan Barang Impor; • Membahas Kinerja Operasional dan Keuangan PTPN X sd Bulan Agustus 2017; • Membahas Rencana Kegiatan Dewan Komisaris kedepan; • Lain-lain • *Follow-Up on Conclusion of Internal Meeting in August 2017 (pending issues);* • *Discussing Board of Commissioners' recommendations on the Proposed Bid of Imported Goods;* • *Discussing PTPN X's Operational and Financial Performance up to August 2017;* • *Discussing the Future Activities of Board of Commissioners;* • *Others*	Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit) Komisaris Independen / *Independent Commissioner* (Arvan R.R Siregar)	-

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Commissioner, and Reason of Absence*
27 Oktober 2017 *October 27, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Bulan September 2017 (pending issues); • Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2018; • Membahas Usulan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2018; • Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018; • Lain-lain • *Follow-Up on Conclusion of Internal Meeting in September 2017 (pending issues);* • *Discussing the Board of Commissioners 2018 Work Plan and Budget;* • *Discussing the Proposed Key Performance Indicators (KPI) of Board of Commissioners of 2018;* • *Discussing the 2018 Corporate Work Plan and Budget (RKAP);* • *Others*	Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit)	Komisaris Independen Arvan R.R Siregar tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Independent Commissioner Arvan R.R Siregar was absent due to an official matter*
24 November 2017 *November 24, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Bulan Oktober 2017 (pending issues); • Membahas Kinerja Operasi dan Keuangan Perusahaan sampai dengan bulan Oktober 2017; • Lain-lain • *Follow-Up on Conclusion of Internal Meeting in October 2017 (pending issues);* • *Discussing the Company's Operational and Financial Performance up to October 2017;* • *Others*	Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit) Komisaris Independen / *Independent Commissioner* (Arvan R.R Siregar)	-
15 Desember 2017 *December 15, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Bulan November 2017 (pending issues); • Membahas Kinerja Operasi dan Keuangan Perusahaan sampai dengan bulan November 2017; • Lain-lain • *Follow-Up on Conclusion of Internal Meeting in November 2017 (pending issues);* • *Discussing the Company's Operational and Financial Performance up to November 2017;* • *Others*	Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit) Komisaris Independen / *Independent Commissioner* (Arvan R.R Siregar)	-

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Minutes of Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Commissioner, and Reason of Absence*
6 Januari 2017 *January 6, 2017*	Jakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Bulan Desember 2016. • Persiapan RUPS RKAP Tahun 2017. • Lain-lain. • *Follow-up on Conclusion of Joint Meeting in December 2016.* • *Preparation of 2017 GMS RKAP.* • *Others.*	Direktur Utama / *President Director* (Subiyono) Direktur Operasional / *Operational Director* (T. Sutaryanto) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho) Direktur SDM & Umum / *HR & General Affairs* Director (Djoko Santoso) Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit) Komisaris Independen / *Independent Commissioner* (Arvan R.R Siregar)	-
24 Februari 2017 *February 24, 2017*	Jakarta	• Company Profile (program pengenalan kepada Direksi baru). • Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Bulan Januari 2017. • Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016. • Laporan Kinerja Perseroan Bulan Januari 2017. • Progres Pelaksanaan Pekerjaan dan Perkembangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN). • Lain-lain (Alternatif pendanaan). • *Company Profile (induction program to the new Board of Directors).* • *Follow-up on Conclusion of Joint Meeting in January 2017.* • *Company's Financial Statements of Fiscal Year 2016.* • *Company's Performance Report of January 2017.* • *Progress of Implementation of Work Development of Use of PMN Funds.* • *Others (Alternative funding).*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho) Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit)	Komisaris Priyatmo Hadi dan Komisaris Independen Arvan R.R Siregar tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Commissioner Priyatmo Hadi and Independent Commissioner Arvan R.R Siregar was absent due to an official matter*

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Commissioner, and Reason of Absence*
10 Maret 2017 *March 10, 2017*	Surabaya	• Membahas Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Bulan Februari 2017; • Membahas Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Februari 2017; • Membahas Perubahan Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara X; • Membahas Progres Pelaksanaan Pekerjaan dan Perkembangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN); • Lain-lain (Alternatif Pendanaan PTPN X) • *Discussing Follow-up on Conclusion of Joint Meeting in January 2017.* • *Company's Financial Statements of Fiscal Year 2016.* • *Company's Performance Report of January 2017.* • *Progress of Implementation of Work Development of Use of PMN Funds.* • *Others (Alternative funding).*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho) Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit) Komisaris Independen / Independent *Commissioner* (Arvan R.R Siregar)	-
31 Maret 2017 *March 31, 2017*	Surabaya	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan sebelumnya. • Kesiapan Unit-unit Usaha dalam rangka proses produksi Tahun 2017. • Laporan Kinerja Entitas Anak. • Progres Pelaksanaan Pekerjaan dan Perkembangan Penggunaan Dana PMN. • Lain-lain (Simulasi Laba Rugi, Progres Audit 2016 dan Timeline Fit & Proper calon Direksi Entitas Anak). • *Follow-up on Conclusion of previous Joint Meeting.* • *Readiness of Business Units for production process of 2017.* • *Subsidiaries' Performance Report.* • *Progress of Implementation of Work Development of Use of PMN Funds.* • *Others (Profit Loss Simulation, 2016 Audit Progress and Timeline of Fit & Proper for candidate of Board of Directors of Subsidiaries).*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho) Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit)	Komisaris Priyatmo Hadi dan Komisaris Independen Arvan R.R Siregar tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Commissioner Priyatmo Hadi and Independent Commissioner Arvan R.R Siregar was absent due to an official matter*

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Commissioner, and Reason of Absence*
27 April 2017 *April 27, 2017*	Jakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Bulan Maret 2017. • Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016. • Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2017. • Lain-lain. • *Follow-up on Conclusion of Joint Meeting in March 2017.* • *Preparation of GMS for Approval of Financial Statements of Fiscal Year 2016.* • *1st Quarter of 2017 Management Report.* • *Others.*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho) Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi)	Komisaris Sukardi Rinakit dan Komisaris Independen Arvan R.R Siregar tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Commissioner Sukardi Rinakit and Independent Commissioner Arvan R.R Siregar was absent due to an official matter*
16 Mei 2017 *May 16, 2017*	Jakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Bulan April 2017 (Perihal Peserko). • Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016. • Laporan Manajemen Bulan April 2017. • Lain-lain • *Follow-up on Conclusion of Joint Meeting in April 2017 (related to Peserko).* • *Preparation of GMS for Approval of Financial Statements of Fiscal Year 2016.* • *April 2017 Management Report.* • *Others.*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil (M. Hanugroho) Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris Independen / *Independent Commissioner* (Arvan R.R SIregar)	Komisaris Sukardi Rinakit dan Komisaris Priyatmo Hadi tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Commissioner Sukardi Rinakit and Commissioner Priyatmo Hadi was absent due to an official matter*
22 Juni 2017 *June 22, 2017*	Surabaya	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Bulan Mei 2017. • Laporan Kinerja sampai dengan Bulan Mei 2017. • Rencana Penjualan Gula Kristal Putih ke Pihak Lain Selain BULOG. • Rencana Perubahan Ruang Lingkup dan Distribusi Alokasi Dana PMN. • Lain-lain. • *Follow-up on Conclusion of Joint Meeting in May 2017.* • *Performance Report until May 2017.* • *Plan of White Crystal Sugar Sales to other parties besides BULOG.* • *Plan of Changes of Scope and Disctribution of PMN Funds Allocation.* • *Others.*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho) Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit) Komisaris Independen / *Independent Commissioner* (Arvan R.R Siregar)	-

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Commissioner, and Reason of Absence*
4 Agustus 2017 *August 4, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Bulan Juni 2017. • Rencana Perubahan Ruang Lingkup dan Distribusi Alokasi Dana PMN. • Cashflow, Situasi Unit Usaha Gula dan Unit Tembakau. • Harga Gula, Penjualan Gula ke BULOG dan PPN Jasa Giling. • Laporan Manajemen Triwulan II (Semester I) Tahun 2017. • Lain-lain. • *Follow-up on Conclusion of Joint Meeting in October 2017.* • *Plan of Changes of Scope and Disctribution of PMN Funds Allocation.* • *Cashflow, Situation of Sugar Business Unit and Tobacco Business Unit.* • *Sugar Price, Sugar Sales to BULOG and VAT Milling Service.* • *2nd Quarter (1st Semester) of 2017 Management Report.* • *Others.*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho) Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit)	Komisaris Independen Arvan R.R Siregar tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Independent Commissioner Arvan R.R Siregar was absent due to an official matter*
31 Agustus 2017 *August 31, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Bulan Juli 2017. • Kinerja Operasional dan Keuangan sampai dengan Bulan Juli 2017. • Rencana Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) ke Bank Swasta. • Progres Pelaksanaan Pekerjaan PMN. • Lain-lain. • *Follow-up on Conclusion of Joint Meeting in July 2017.* • *Operational and Financial Performance until July 2017.* • *Plan of Working Capital Loan (KMK) to Private Banks.* • *Progress of Implementation of PMN Work.* • *Others.*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho) Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit) Komisaris Independen / *Independent Commissioner* (Arvan R.R Siregar)	-

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Commissioner, and Reason of Absence*
29 September 2017 *September 29, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Bulan Agustus 2017. • Kinerja Operasional dan Keuangan sampai dengan Bulan Agustus 2017. • Isu-isu Strategis tentang Unit Usaha dan Entitas Anak. • Progres Pelaksanaan Pekerjaan PMN. • Lain-lain. • *Follow-up on Conclusion of Joint Meeting in August 2017.* • *Operational and Financial Performance until August 2017.* • *Strategic Issues on Business Units and Subsidiaries* • *Progress of Implementation of PMN Work.* • *Others.*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit) Komisaris Independen / *Independent Commissioner* (Arvan R.R Siregar)	-
27 Oktober 2017 *October 27, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Bulan September 2017. • Kinerja Operasional dan Keuangan sampai dengan Bulan September 2017 (Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2017). • RKAP Tahun 2018. • Progres Pelaksanaan Pekerjaan PMN. • Lain-lain • *Follow-up on Conclusion of Joint Meeting in September 2017.* • *Operational and Financial Performance until September 2017 (3rd Quarter of 2017 Management Report).* • *2018 RKAP.* • *Progress of Implementation of PMN Work.* • *Others.*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit)	Komisaris Independen Arvan R.R Siregar tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Independent Commissioner Arvan R.R Siregar was absent due to an official matter*
24 November 2017 *November 24, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Bulan Oktober 2017. • Kinerja Operasional dan Keuangan sampai dengan Bulan Oktober 2017. • Progres Pelaksanaan Pekerjaan PMN. • Lain-lain • *Follow-up on Conclusion of Joint Meeting in October 2017.* • *Operational and Financial Performance until October 2017.* • *Progress of Implementation of PMN Work.* • *Others.*	Direktur Utama / President Director (Dwi Satriyo A.) Komisaris Utama / President Commissioner (Rudi Wibowo) Komisaris / Commissioner (Priyatmo Hadi) Komisaris / Commissioner (Sukardi Rinakit) Komisaris Independen / Independent Commissioner (Arvan R.R Siregar)	-

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Commissioner, and Reason of Absence*
15 Desember 2017 *December 15, 2017*	Yogyakarta	• Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Bulan November 2017. • Kinerja Operasional dan Keuangan sampai dengan Bulan November 2017. • Progres Pelaksanaan Pekerjaan PMN. • Surat Permohonan Persetujuan atas Percepatan Perjanjian Kerja sama Bangun Serah Guna (BOT) PLT Biogas di Mojokerto • Lain-lain. • *Follow-up on Conclusion of Joint Meeting in November 2017.* • *Operational and Financial Performance until November 2017.* • *Progress of Implementation of PMN Work.* • *Application Letter for Approval on Acceleration of Cooperation Agreement of (BOT) PLT Biogas Development in Mojokerto* • *Others.*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho) Komisaris Utama / *President Commissioner* (Rudi Wibowo) Komisaris / *Commissioner* (Priyatmo Hadi) Komisaris / *Commissioner* (Sukardi Rinakit) Komisaris Independen / *Independent Commissioner* (Arvan R.R Siregar)	-

Rekapitulasi Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat

Recapitulation of Board of Commissioners Attendance in Meeting

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	**Jumlah Wajib Rapat** *Number of Mandatory Meeting*	**Jumlah Kehadiran** *Number of Attendance*	**% Kehadiran** *% Attendance*
Rudi Wibowo (Komisaris Utama) *(President Commissioner)*	25	25	100,00%
Sukardi Rinakit (Komisaris) *(Commissioner)*		21	84,00%
Y.B. Priyatmo Hadi (Komisaris) *(Commissioner)*		21	84,00%
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen) *(Independent Commissioner)*		16	64,00%
Rata-rata *Average*			83,00%

Rapat Direksi

Rapat Direksi dapat dilaksanakan setiap waktu apabila dipandang perlu baik oleh anggota Direksi, atas permintaan Dewan Komisaris, maupun atas permintaan Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi, Sekretaris Perusahaan sebagai notulis Rapat, dan pihak-pihak lain yang perlu hadir untuk pembahasan materi. Risalah rapat harus mermuat hal-hal yang dibicarakan termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Direksi dan hal-hal yang diputuskan.

Board of Directors Meeting

Board of Directors Meeting can be held at any time when considered necessary by members of Board of Directors, on the request of Board of Commissioners or the Shareholders. The meeting is attended by members of Board of Directors, Corporate Secretary as the notetaker of Minutes of Meeting, and other parties deemed necessary to attend to discuss the matter at hands - which include the dissenting opinion of members of Board of Directors – and other matters decided.

Di sepanjang tahun 2017, Direksi mengadakan 32 kali rapat, dimana 19 kali rapat Direksi dan 13 kali Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris. Berikut agenda Rapat Direksi dan kehadiran Direksi dalam rapat.

Throughout 2017, Board of Directors held 32 meetings, where 19 times the Board of Directors meeting and times 13 joint meetings with Board of Commissioners. The following is the agenda and attendance of Board of Director in the Meeting.

Risalah Rapat Direksi — *Minutes of Board of Directors Meeting*

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Director, and Reason of Absence*
19 Januari 2017 *January 19, 2017*	Surabaya	Pembiayaan Pengadaan *Core Sampler* Mobil PTPN X Tahun 2017 *Financing of Procurement of Car Core Sampler of PTPN X in 2017*	Direktur Utama / *President Director* (Subiyono) Direktur Operasional / *Operational Director* (T. Sutaryanto) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho) Direktur SDM & Umum / *HR & General Affairs Director* (Djoko Santoso)	-
10 Februari 2017 *February 10, 2017*	Surabaya	Evaluasi Kinerja Operasional & Keuangan *Operational & Financial Performance Evaluation*	Direktur Utama / *President Director* (Subiyono) Direktur Operasional / *Operational Director* (T. Sutaryanto) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho) Direktur SDM & Umum / *HR & General Affairs Director* (Djoko Santoso)	-
22 Februari 2017 *February 22, 2017*	Surabaya	Perkembangan PMN *PMN Development*	Direktur Utama / *President Director* (Subiyono) Direktur Operasional / *Operational Director* (T. Sutaryanto) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho) Direktur SDM & Umum / *HR & General Affairs Director* (Djoko Santoso)	-

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Director, and Reason of Absence*
1 Maret 2017 *March 1, 2017*	Surabaya	1. Penetapan Keputusan Direksi 2. Paparan DirOps - Penyiapan BBT Untuk Giling Tahun 2017 - Core Sampler - PMN - Bahan Bakar - Pinjam Pakai TA PG WT ke PTPN IX - Pemasangan Gas Burner di PG GK 3. Paparan DirKom - 110 Karyawan PG WT - Keuangan Perusahaan - Rencana Pinjam Pakai Aset oleh Holding - Laporan Audit Tahun 2016 4. Lain-lain - Konsultan Nonstruktural *1. Board of Directors Decree* *2. Operational Director Exposure* *- Preparation of BBT For Milling Year 2017* *- Core Sampler* *- PMN* *- Fuel* *- Borrow and Use of TA PG WT to PTPN IX* *- Installation of Gas Burner in PG GK* *3. Commercial Director Presentation* *- 110 Employees of PG WT* *- Corporate Finance* *- Asset Lending Plan by Holding* *- 2016 Audit Report* *4. Others* *- Non-structural Consultant*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-
24 Maret 2017 *March 24, 2017*	Surabaya	1. Fasilitas Direksi 2. Perubahan Nama RS Gatoel 3. Fit & Proper BoD & BoC anak perusahaan 4. Hasil investigasi SPI 5. Hasil Rapat dengan Deputi Industri Agro & Farmasi KBUMN 6. Status PKWT 7. Program pengembangan produk - Pabrik gula merah di Madura - Gula Kalori Rendah - Produk Turunan Tetes - Pengembangan lahan di Jember *1. Facilities of Board of Directors* *2. Change of Gatoel Hospital Name* *3. Fit & Proper of BoD & BoC of subsidiary* *4. Results of SPI investigation* *5. Meeting Result with Agro & Pharmaceutical Industry Deputy of KBUMN* *6. Status of PKWT* *7. Product development program* *- Red sugar mill in Madura* *- Low Calorie Sugar* *- Molasses Product* *- Land development in Jember*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Director, and Reason of Absence*
7 April 2017 *April 7, 2017*	Surabaya	Hasil Temuan SPI *SPI Findings*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-
17 April 2017 *April 17, 2017*	Surabaya	1. Bahan Rapat Pra-RUPS 2. Pending Item RUPS Anak Perusahaan 3. Bongkar Ratoon dana APBN 4. Tindak Lanjut PMN 5. Antisipasi BCT 6. Menjawab surat BULOG 7. Penertiban SOP Pembelian BBT 8. Roadmap PTPN X Tahun 2018-2022 9. Rapat Kinerja Triwulan I tahun 2017 10. Promosi/Mutasi *1. Pre-GMS Meeting Materials* *2. Pending Item of GMS of Subsidiaries* *3. Unloading Ratoon of APBN funds* *4. Follow up of PMN* *5. Anticipation of BCT* *6. Answering BULOG letter* *7. Control of SOP of BBT Purchase* *8. PTPN X Roadmap of 2018-2022* *9. Meeting of First Quarter Performance in 2017* *10. Promotion/Mutation*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-
14 Mei 2017 *May 14, 2017*	Surabaya	1. Materi RUPS 2. Koordinasi Harga Jual Gula ke BULOG 3. Koordinasi Pengolahan di BCT 4. Strategi Persiapan Musim Giling 2017 5. Lain-lain (Undangan Buka Giling, Tindak Lanjut PT Sakapatria, Tindak Lanjut SPI) *1. GMS Materials* *2. Coordination of Sugar Price to BULOG* *3. Coordination of Processing in BCT* *4. 2017Milling Preparation Strategy* *5. Others (Open Mill Invitation, Follow Up Actions of PT Sakapatria, SPI Follow Up)*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-
14 Mei 2017 *May 14, 2017*	Surabaya	Penyertaan Modal Negara (PMN) *State Equity Participation (PMN)*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Director, and Reason of Absence*
31 Mei 2017 *May 31, 2017*	PG Gempolkrep - Mojokerto	1. Tindak Lanjut Rapat di Kementerian BUMN 2. Skema penjualan gula ke BULOG 3. Acara Ramadhan 4. Rencana kunjungan Menteri BUMN ke PG-PG 5. Penyampaian bahan untuk presentasi persiapan giling kepada Menteri BUMN 6. Audiensi SP dengan manajemen PTPN X *1. Follow up of meeting at the Ministry of SOEs* *2. Sugar sales scheme to BULOG* *3. Ramadan event* *4. Plan of Minister of SOE visit to PGs* *5. Submission of materials for presentation on milling preparation to the Minister of SOE* *6. SP Audience with PTPN X management*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-
8 Juni 2017 *June 8, 2017*	Surabaya	1. Cost Strucuture Tebu dan Tembakau 2. E-Catalog untuk Pengadaan Barang 3. Fast Moving Inventori 4. Tindak Lanjut Sistem Tumpang Sari Tebu-Kedelai 5. PG BCT 6. SDM 7. RJPP 8. Bahan Rapat 9 Juni 2017 9. Peluang bisnis ikan air tawar 10. Strategi Giling 11. Training SDM untuk Perluasan Lahan 12. Penjualan Tetes & Gula (Inventory Moving) 13. Laporan Keuangan Laba Rugi Perusahaan *1. Cost Strucuture of Sugar Cane and Tobacco* *2. E-Catalog for Procurement of Goods* *3. Fast Moving Inventory* *4. Follow-up of Sugar Cane-Soybean System* *5. PG BCT* *6. HR* *7. RJPP* *8. Meeting Materials on June 9, 2017* *9. Freshwater fish business opportunities* *10. Milling Strategy* *11. HR Training for Land Expansion* *12. Sales of Molassses & Sugar (Inventory Moving)* *13. Company's Profit and Loss Statement*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-
22 Juni 2017 *June 22, 2017*	Surabaya	1. Cost structure 2. Aset Anak Perusahaan *1. Cost Structure* *2. Assets of Subsidiaries*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Director, and Reason of Absence*
18 Juli 2017 *July 18, 2017*	Surabaya	Pendanaan Perusahaan *Company Funding*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-
23 Agustus 2017 *August 23, 2017*	Surabaya	1. Mutu Gula 2. BULOG 3. Penyertaan Saham Petramedika di NMU 4. Bahan Rapat Gabungan 5. Pertemuan Periodeik Serikta Pekerja 6. Invetsasi RKAP & Peningkatan Mutu 7. Likuidasi dan Aset GMBH 8. PG Baru dan RJPP 9. Lain-lain *1. Sugar Quality* *2. BULOG* *3. Participation of Petramedika's Shares in NMU* *4. Joint Meeting Materials* *5. Labor Union Periodic Meeting* *6. RKAP Investment & Quality Improvement* *7. Liquidation and Assets of GMBH* *8. New PG and RJPP* *9. Others*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-
12 September 2017 *September 12, 2017*	Surabaya	1. RKAP Tahun 2018 2. Lain-lain *1. 2018 RKAP* *2. Others*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-
13 September 2017 *September 13, 2017*	Surabaya	1. IHC 2. Rencana Kunjungan DPRD 3. Kunjungan Wantannas 4. Rencana Demo Petani PG Kremboong 5. Lain-lain *1. IHC* *2. Plan of DPRD Visit* *3. Wantannas Visit* *4. Demonstration Plan of Farmers of PG Kremboong* *5. Others*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Director, and Reason of Absence*
20 September 2017 *September 20, 2017*	Surabaya	1. RKAP Tahun 2018 2. PMN 3. BCT 4. Pengembangan Lahan Madura 5. Bahan Rapat Gabungan 6. Lain-lain *1. 2018 RKAP* *2. PMN* *3. BCT* *4. Madura Land Development* *5. Joint Meeting Materials* *6. Others*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-
24 November 2017 *November 24, 2017*	Yogyakarta	Pembahasan materi Rapat Gabungan 24 November 2017 *Discussion on Materials of Joint Meeting of November 24, 2017*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-
27 Desember 2017 *December 27, 2017*	Surabaya	1. Cash Flow 2. Avalist 3. Joint Borrower 4. KMK 2018 5. KAP 6. Pemasaran 7. Optimalisasi Aset 8. Divisi : PKBL, PBJ, SDM, Teknik, Pengolahan, Areal Budidaya, Renbang, Sarpram, Tembakau, QA 9. Lain-lain *1. Cash Flow* *2. Avalist* *3. Joint Borrower* *4. KMK 2018* *5. KAP* *6. Marketing* *7. Assets Optimization* *8. Division: PKBL, PBJ, HR, Engineering, Processing, Cultivation Area, R & D, Facilities Infrastructure Mechanism, Tobacco, QA* *9. Others*	Direktur Utama / *President Director* (Dwi Satriyo A.) Direktur Operasional / *Operational Director* (Mustaqim) Direktur Komersil / *Commercial Director* (M. Hanugroho)	-

Daftar Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris

List of Board of Directors Attendance in Joint Meeting with Board of Commissioners

Tanggal *Date*	**Direksi** *Board of Directors*							**Alasan Ketidakhadiran** *Reason of Absence*
	Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	**Mustaqim (Direktur Operasional)** *(Operational Director)*	**Slamet Djumantoro (Direktur Komersil)** *(Commercial Director)*	**Subiyono (Direktur Utama)** *(President Director)*	**Tarsisius Sutaryanto (Direktur Operasional)** *(Operational Director)*	**Muhammad Hanugroho (Direktur Komersil)** *(Commercial Director)*	**Djoko Santoso (Direktur SDM & Umum)** *(HR & General Affairs Director)*	
6 Januari 2017 *January 6, 2017*				v	v	v	v	-
24 Februari 2017 *February 24, 2017*	v	v				v		-
10 Maret 2017 *March 10, 2017*	v	v				v		-
31 Maret 2017 *March 31, 2017*	v	v				v		-
27 April 2017 *April 27, 2017*	v	v				v		-
16 Mei 2017 *May 16, 2017*	v	v				v		-
22 Juni 2017 *June 22, 2017*	v	v				v		-
4 Agustus 2017 *August 4, 2017*	v	x				v		Direktur Operasional Mustaqim tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Mustaqim Operational Director was absent due to an official matter.*
31 Agustus 2017 *August 31, 2017*	v	v				v		-
29 September 2017 *September 29, 2017*	v	v						-
27 Oktober 2017 *October 27, 2017*	v	x						Direktur Operasional Mustaqim tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Mustaqim Operational Director was absent due to an official matter.*
24 November 2017 *November 24, 2017*	v	x						Direktur Operasional Mustaqim tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Mustaqim Operational Director was absent due to an official matter.*

Tanggal *Date*	Direksi *Board of Directors*							Alasan Ketidakhadiran *Reason of Absence*
	Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	Mustaqim (Direktur Operasional) *(Operational Director)*	Slamet Djumantoro (Direktur Komersil) *(Commercial Director)*	Subiyono (Direktur Utama) *(President Director)*	Tarsisius Sutaryanto (Direktur Operasional) *(Operational Director)*	Muhammad Hanugroho (Direktur Komersil) *(Commercial Director)*	Djoko Santoso (Direktur SDM & Umum) *(HR & General Affairs Director)*	
15 Desember 2017 *December 15, 2017*	v	x	v					Direktur Operasional Mustaqim tidak hadir karena adanya keperluan dinas *Mustaqim Operational Director was absent due to an official matter.*

Tidak menjabat
Not in office

v = hadir / x = berhalangan hadir
v = present / x = absent

Rekapitulasi Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat

Direksi *Board of Directors*	Jumlah Wajib Rapat *Number of Mandatory Meeting*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	% Kehadiran *% Attendance*
Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama)* *(President Director)**	28	28	100,00%
Mustaqim (Direktur Operasional)* *(Operational Director)**		24	85,71%
Slamet Djumantoro (Direktur Komersil)*** *(Commercial Director)****	2	2	100,00%
Subiyono (Direktur Utama)* *(President Director)**	4	4	100,00%
Tarsisius Sutaryanto (Direktur Operasional)* *(Operational Director)**		4	100,00%
Djoko Santoso (Direktur SDM & Umum)* *(HR & General Affairs Director)**		4	100,00%
Muhammad Hanugroho (Direktur Komersil)** *(Commercial Director)***	27	26	96,30%
Rata-rata *Average*			97,43%

*) Subiyono, Tarsisius Sutaryanto, dan Djoko Santoso efektif tidak lagi menjabat pada jajaran Direksi sejak 24 Februari 2017. Posisi Subiyono sebagai Direktur Utama digantikan oleh Dwi Satriyo Annurogo, Direktur Operasional dari Tarsisius Sutaryanto digantikan oleh Mustaqim, dan Djoko Santoso diberhentikan dengan Direktorat SDM & Umum dilebur ke direktorat lainnya.
**) Muhammad Hanugroho efektif tidak lagi menjabat Direktur Komersil sejak 28 September 2017.
***) Slamet Djumantoro efektif menjabat Direktur Komersil sejak 11 Desember 2017.
* Subiyono, Tarsisius Sutaryanto and Djoko Santoso were no longer served in Board of Directors since February 24, 2017. Subiyono's position as President Director was replaced by Dwi Satriyo Annurogo, Operational Director Tarsisius Sutaryanto replaced by Mustaqim and Djoko Santoso was dismissed by the merger of HR & General Affairs Directorate into other directorate.
**) Muhammad Hanugroho was no longer served as Commercial Director since September 28, 2017.
***) Slamet Djumantoro served as Commercial Director since December 11, 2017.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi

Program peningkatan kompetensi, atau yang dikenal di lingkup Perseroan sebagai Program Pembelajaran Berkelanjutan diberikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas. Program Pembelajaran Berkelanjutan Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners and Board of Directors Training and Competency Development

Competency development program, or known in the scope of the Company as Sustainable Learning Program is provided to each member of Board of Commissioners and Board of Directors in order to be able to keep up with and update information on latest developments of the Company's business activities and other knowledge related to their duties execution. Sustainable Learning Program of Board of Commissioners and Directors throughout 2017 is as follows

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Type of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Material of Education and Training*	**Tempat/Tanggal** *Venue/Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Direksi *Board of Directors*				
Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	Seminar	National Sugar Summit 2017	Jakarta, 24-25 Agustus 2017 *Jakarta, August 24-25, 2017*	Asosiasi Gula Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Ahli Gula Indonesia dan LPP
		Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penguatan Pabrik Gula Berbasis Tebu dalam Perlindungan Konsumen dan Peningkatan Kesejahteraan Petani" *Focus Group Discussion (FGD) with the theme "Strengthening Sugar Cane-Based Sugar Mills in Consumer Protection and Farmers Welfare Improvement"*	Yogyakarta, 9 September 2017 *Yogyakarta, September 9, 2017*	LPP
		World Plantation Conferences & Exhibition (WPLACE) 2017 dengan tema "Plantation in the Current and Future Challenges" *World Plantation Conferences & Exhibition (WPLACE) 2017 with the theme "Plantation in the Current and Future Challenges"*	Jakarta, 17-20 Oktober 2017 *Jakarta, October 17-20, 2017*	PT Riset Perkebunan Nusantara
		Business Forum/ Talkshow tentang "Peluang Kerjasama di Tiga Sektor Industri yaitu Ekonomi Maritim, Bio Farmasi dan Gula" serta kunjungan ke Pabrik Gula dan Koperasi Petani Tebu di India *Business Forum/Talkshow on "Opportunities for Cooperation in Three Industry Sectors, namely Maritime Economy, Bio Pharmaceuticals and Sugar" and visits to Sugar Mills and Sugarcane Farmers Cooperative in India*	India, 13-18 November 2017 *India, November 13-18, 2017*	Kedutaan Besar Indonesia

Nama dan Jabatan *Name and Position*	Jenis Pendidikan dan Pelatihan *Type of Education and Training*	Materi Pendidikan dan Pelatihan *Material of Education and Training*	Tempat/Tanggal *Venue/Date*	Penyelenggara *Organizer*
		National Sugar Summit 2017	Jakarta, 24-25 Agustus 2017 *Jakarta, August 24-25, 2017*	Asosiasi Gula Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Ahli Gula Indonesia dan LPP
Mustaqim (Direktur Operasional) *(Director of Operations)*	Seminar	Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penguatan Pabrik Gula Berbasis Tebu dalam Perlindungan Konsumen dan Peningkatan Kesejahteraan Petani" *Focus Group Discussion (FGD) with the theme "Strengthening Sugar Cane-Based Sugar Mills in Consumer Protection and Farmers Welfare Improvement"*	Yogyakarta, 9 September 2017 *Yogyakarta, September 9, 2017*	LPP
		World Plantation Conferences & Exhibition (WPLACE) 2017 dengan tema "Plantation in the Current and Future Challenges" *World Plantation Conferences & Exhibition (WPLACE) 2017 with the theme "Plantation in the Current and Future Challenges"*	Jakarta, 17-20 Oktober 2017 *Jakarta, October 17-20, 2017*	PT Riset Perkebunan Nusantara

Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Informasi tentang Pemegang Saham Utama

Pemegang saham utama dari Perseroan adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero), atau PTPN III (Persero). PTPN III (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN memiliki seluruh saham atau 100% dari saham PTPN III. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia menjadi entitas induk akhir dari Perseroan.

Transparansi Hubungan Usaha dan Hubungan Afiliasi Antar Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama

Di bawah ini disajikan hubungan hubungan afiliasi antar Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama Perseroan. Bentuk hubungan termasuk hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsbnya.

Disclosure of Affiliation Between Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/or Controlling Shareholders

Information on Major Shareholder

Major shareholder of the Company is PT Perkebunan Nusantara III (Persero), or PTPN III. PTPN III is a State-Owned Enterprise (SOE), where the Republic of Indonesia through the Government of Republic of Indonesia/Ministry of SOW owns all shares, or 100% of PTPN III shares. As such, the Republic of Indonesia is the final holding entity of the Company.

Transparency of Business Relation and Affiliation between Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major Shareholder

The following is the affiliation between Board of Commissioners, Board of Directors, or with Shareholders of the Company. Forms of relationship include special relationship, primarily due to blood relationships such as spouses/children/parents/siblings/in-laws, etc.

	Hubungan Afiliasi Dengan *Affiliation With*		
	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	**Direksi** *Board of Directors*	**Pemegang Saham Utama** *Major Shareholder*
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*			
Rudi Wibowo (Komisaris Utama) *(President Commissioner)*	x	x	x
Sukardi Rinakit (Komisaris) *(Commissioner)*	x	x	x
Y.B. Priyatmo Hadi (Komisaris) *(Commissioner)*	x	x	x
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen) *(Independent Commissioner)*	x	x	x
Direksi *Board of Directors*			
Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	x	x	x
Mustaqim (Direktur Operasional) *(Operational Director)*	x	x	x
Slamet Djumantoro (Direktur Komersil) *(Commercial Director)*	x	x	x

v = ada / x = tidak ada

v = yes | x = no

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kepengurusan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain di luar Perseroan periode tahun 2017 sebagai berikut,

Disclosure of Board of Commissioners and Board of Directors Concurrent Positions

The management relationship of members of Board of Commissioners and Board of Directors in companies for 2017 period is as follows,

Nama *Name*	Kepengurusan pada Perusahaan Lain *Management at Other Company*	
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris *As Member of Board of Commissioners*	**Sebagai Anggota Direksi** *As Member of Board of Directors*
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		
Rudi Wibowo (Komisaris Utama) *(President Commissioner)*	x	x
Sukardi Rinakit (Komisaris) *(Commissioner)*	x	x
Y.B. Priyatmo Hadi (Komisaris) *(Commissioner)*	x	x
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen) *(Independent Commissioner)*	v	v

Nama *Name*	Kepengurusan pada Perusahaan Lain *Management at Other Company*	
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris *As Member of Board of Commissioners*	Sebagai Anggota Direksi *As Member of Board of Directors*
Direksi *Board of Directors*		
Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	x	x
Mustaqim (Direktur Operasional) *(Operational Director)*	x	x
Slamet Djumantoro (Direktur Komersil) *(Commercial Director)*	x	x

v = ada / x = tidak ada

v = yes | x = no

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi di luar Perseroan adalah sebagai berikut:

Concurrent positions of Board of Commissioners and Board of Directors outside the Company are as follows:

Nama *Name*	Jabatan pada Perusahaan Lain *Position at Other Company*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar	Direktur PT Ingria Pratama Capitalindo (2015-sekarang); Komisaris PT Puri Amerta Sanjiwani (2009-sekarang) *Director of PT Ingria Pratama Capitalindo (2015-present); Commissioner of PT Puri Amerta Sanjiwani (2009-present)*

Disamping itu, Dewan Komisaris memiliki jabatan fungsional dan/atau struktural pada institusi lain, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

In addition, Board of Commissioners has functional and/or structural positions at other institutions, as shown in the table below.

Nama *Name*	Jabatan pada Institusi *Position at Other Institution*
Rudi Wibowo	Deputi Badan Eksekutif GAPPERINDO bidang SDM/Teknologi (2003-sekarang) *Deputy Executive Board of GAPPERINDO in HR/Technology (2003-present)*
Sukardi Rinakit	Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (2015-sekarang) *Special Staff of President of the Republic of Indonesia (2015-present)*
Y.B. Priyatmo Hadi	Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana, Prasarana Perhubungan 1b, Kementerian BUMN (2015-sekarang) *Head of Construction and Facilities Business, Transportation Infrastructure 1b, Ministry of SOE (2015-present)*

Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Di bawah ini disajikan kepemilikan saham 5% atau lebih oleh Dewan Komisaris dan Direksi, baik kepemilikan saham di perusahaan publik lain maupun kepemilikan saham Perseroan. Transparansi kepemilikan saham 5% atau lebih oleh Dewan Komisaris dan Direksi ini menjadi bagian dari upaya Perseroan untuk memberikan informasi terkait potensi benturan kepentingan.

Disclosure of Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership

Below is 5% or more shares ownership by Board of Commissioners and Board of Directors, whether shares in other public companies or shares in the Company. The transparency of 5% or more share ownership by Board of Commissioners and Board of Directors is part of the Company's effort to provide information on potential conflict of interest.

	Saham PTPN X *Share of PTPN X*		Saham BUMN (di atas 5%) *Share of other SOE (more than 5%)*		Saham Perusahaan Swasta (di atas 5%) *Share of Private Company (more than 5%)*	
	Nilai *Value*	**Persen** *Percent*	**Nilai** *Value*	**Persen** *Percent*	**Nilai** *Value*	**Persen** *Percent*
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*						
Rudi Wibowo (Komisaris Utama) *(President Commissioner)*	Nihil *Null*		Nihil *Null*			
Sukardi Rinakit (Komisaris) *(Commissioner)*			Nihil *Null*			
Y.B. Priyatmo Hadi (Komisaris) *(Commissioner)*			Nihil *Null*			
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen) *(Independent Commissioner)*			Nihil *Null*			
Direksi *Board of Directors*						
Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	Nihil *Null*		Nihil *Null*			
Mustaqim (Direktur Operasional) *(Operational Director)*			Nihil *Null*			
Slamet Djumantoro (Direktur Komersil) *(Commercial Director)*			Nihil *Null*			

Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait kepemilikan saham oleh Manajemen.

The Company does not have any policy regarding share ownership by the Management.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang pejabat Sekretaris Dewan Komisaris.

Kriteria Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang pejabat Sekretaris Dewan Komisaris yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN.
2. Memiliki integritas yang baik.
3. Memahami fungsi kesekretariatan.
4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

SUPPORTING ORGANS OF BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners Secretariat

In order to support for its duties implementation, Board of Commissioners is assisted by Board of Commissioners Secretariat serving as a liaison between Board of Commissioners with other parties. The Board of Commissioners Secretariat is chaired by an Official of Board of Commissioners Secretary.

Criteria of Board of Commissioners Secretary

Board of Commissioners Secretariat is chaired by an official of Board of Commissioners Secretary who must meet the following criteria:

1. Understand SOE management, supervision, and guidance system.
2. Have good integrity.
3. Have good understanding of secretarial function.
4. Have the ability to communicate and coordinate well.

Masa Jabatan

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Tenure

The tenure of Secretary and Staff of the Secretariat of Board of Commissioners shall be determined by Board of Commissioners for a maximum of 3 (three) years and may be re-appointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss at any time.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Pada tahun 2017 terdapat pergantian pejabat Sekretaris Dewan Komisaris, dari Diah Triana yang telah menjabat sejak tahun 2013 digantikan oleh Roslyn Sitohang. Pengangkatan Roslyn Sitohang melalui Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SR-172/S.MBU/09/2017 tanggal 29 September 2017.

Official of Board of Commissioners Secretary

In 2017, the official of Board of Commissioners Secretary was changed, from Diah Triana who has served since 2013 replaced by Roslyn Sitohang. The appointment of Roslyn Sitohang was by virtue Secretary of Ministry of State Decree No. SR-172/S.MBU/09/2017 dated September 29, 2017.

Roslyn Sitohang
Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners Secretary
Periode Jabatan: 31 Oktober 2017 - 30 Oktober 2020
Service Period: October 31, 2017 - October 30, 2020

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 54 tahun
Kelahiran Tapanuli Utara, 16 Desember 1963

Domisili
Jakarta, Indonesia, Provinsi, Indonesia

Riwayat Pendidikan
Sarjana STIA Mandala Indonesia, Jakarta (2006)

Riwayat Profesi
Staf Dewan Komisaris PT Indofarma (Persero) Tbk (2008-2012), Staf Dewan Komisaris PT Kimia Farma (Persero) Tbk (2011-2012), Sekretaris Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) (2012-2017).

Personal Data
Indonesian Citizen
54 years old
Born in Tapanuli, December 16, 1963

Domicile
Jakarta, Indonesia, Provinsi, Indonesia

Educational Background
Bachelor from STIA Mandala Indonesia, Jakarta (2006)

Professional History
Staff of Board of Commissioners of PT Indofarma (Persero) Tbk (2008-2012), Staff of Board of Commissioners of PT Kimia Farma (Persero) Tbk (2011-2012), Secretary of Board of Commissioners of PT Bio Farma (Persero) (2012-2017).

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris dibantu oleh seorang staf, yang dipercayakan kepada Hasanah.

In performing its duties, the Board of Commissioners Secretary is assisted by a staff, entrusted to Hasanah.

Tugas

Berdasarkan *Board Manual* Dewan Komisaris yang mengatur keberadaan Sekretaris Dewan Komisaris, tugas dari Sekretaris Dewan Komisaris adalah:

Duty

Based on the Board Manual of Board of Commissioners governing the existence of Board of Commissioners Secretary, the duties of Board of Commissioners Secretary are as follows:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat untuk Dewan Komisaris.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun Rancangan Laporan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan, Sekretariat Dewan Komisaris berkewajiban untuk memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan di atas tersimpan dengan baik di Perseroan.

Selain melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Dewan Komisaris memiliki tugas untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG. Sekretariat Dewan Komisaris juga wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, serta mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.

Remunerasi

Sekretaris Dewan Komisaris diberikan honorarium yang ditetapkan sebesar 15% dari gaji Direktur Utama. Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris juga diberikan tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja.

1. Preparing meetings, including meeting materials for the Board of Commissioners.
2. Making minutes of Board of Commissioners meetings in accordance with the Company's Articles of Association.
3. Administering documents of Board of Commissioners, whether incoming mails, outgoing mails, minutes of meetings or other documents.
4. Drafting the Work Plan and Budget of Board of Commissioners.
5. Preparing the Draft of Board of Commissioners' Report.
6. Carrying out other duties from Board of Commissioners.

To maintain a good administration and implementation of corporate governance, the Board of Commissioners Secretariat is obliged to ensure that the above documents are properly stored in the Company.

In addition to performing the above duties, Board of Commissioners Secretariat has the duty to ensure that Board of Commissioners complies with laws and regulations and implements GCG principles. Board of Commissioners Secretariat should also provide information required by Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time if requested, and coordinate members of the Committees if necessary in order to expedite the duties of the Board of Commissioners.

Remuneration

Board of Commissioners Secretary is given honorarium ampunted to 15% of President Director's salary. In addition, Board of Commissioners Secretary is also provided with allowances and benefits as well as tantiem/performance incentive.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris
Tahun 2017

Remuneration of Board of Commissioners Secretary
In 2017

Nama *Name*	**Periode Menjabat** *Service Period*	**Honorarium per Bulan** *Monthly Honorarium*	**Tunjangan** *Transportasi & Komunikasi Transportation & Communication Allowance*	**Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan** *Total Honorarium and Allowance in 1 Month*	**Jumlah Honorarium dan Tunjangan 1 Tahun Total Honorarium and Allowance in 1 Year**	**Tantiem** *Tantiem*	**Jumlah Remunerasi Tahun 2017** *Total Remuneration in 2017*
		(Rp)/(IDR)	(Rp)/(IDR)		(Rp)/(IDR)	(Rp)/(IDR)	(Rp)/(IDR)
Diah Triana	Januari – Oktober *January-October*	15.345.000	3.836.250	19.181.250	191.812.500	-	191.812.500
Roslyn Sitohang	November – Desember *November-December*	15.345.000	3.836.250	19.181.250	38.362.500	-	38.362.500

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2017

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2017 sesuai dengan rencana kerja adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Rutin
   a. Rapat Internal Dewan Komisaris
      Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali. *Output* dari rapat Dewan Komisaris selain risalah juga penetapan : surat persetujuan, rekomendasi, saran dan laporan.
   b. Pertemuan Rutin Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi, selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 13 kali. Dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, Dewan Komisaris memberikan masukan atau saran-saran mengenai pengelolaan operasional Perseroan serta lain-lain yang dianggap perlu.
   c. Kunjungan Kerja/lapangan ke Unit Usaha
      Kegiatan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke unit usaha selama tahun 2017 dilakukan secara bersama-sama juga dilakukan dengan pembagian tugas agar efektif dan efisien. Kegiatan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke berbagai unit usaha Perseroan yaitu Unit Usaha Gula, Tembakau.
   d. Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah menyampaikan hasil analisa dan klarifikasi atas laporan perkembangan operasional Perseroan serta tanggapan dan saran atas laporan dimaksud kepada pemegang saham yang dituangkan dalam tanggapan, pendapat dan saran Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I, II, III dan Tahunan.
   e. Dalam tahun 2017, Dewan Komisaris telah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan PTPN X Tahun Buku 2016 dan Pengesahan RKAP Tahun 2017.

2. Kegiatan Non Rutin (Khusus)
   Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapabilitas untuk menunjang tugas fungsi dan kewajiban Dewan Komisaris, selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah mengikuti/menghadiri kegiatan-kegiatan akademik pragmatis dan undangan dan mengadakan pertemuan/rapat khusus dengan beberapa Direksi untuk membahas hal-hal yang cukup strategis.

Report on Duty Implementation in 2017

The implementation of activities and budget for 2017 according to the work plan is as follows:

1. Routine activities
   a. Board of Commissioners Internal Meeting
      In 2017, Board of Commissioners held Board of Commissioners internal meeting for 12 times. Besides minutes of meeting, the meeting also resulted in stipulation of: approval letters, recommendation, suggestions and reports.
   b. Regular Joint Meeting between Board of Commissioners and Board of Directors, in which in 2017 were held by Board of Commissioners for 13 times. In joint meeting Board of Commissioners by Board of Directors, the Board of Commissioners provide feedback or suggestions on the management of the company and other operational which are deemed necessary.
   c. Work/Field Visit to the Business Unit
      The work visit activities of Board of Commissioners to the business units in 2017 were conducted jointly and with the division of tasks for the sake of effectiveness and efficiency. Board of Commissioners visited various business units of the Company, namely Sugar and Tobacco Business Unit.
   d. In 2017, Board of Commissioners had delivered the results of analysis and clarification on the progress report of Company's operations as well as responses and suggestions of the said reports to the shareholders of PTPN X as outlined in the Response, Opinion, and Suggestions of Board of Commissioners on 1st, 2nd, and 3rd Quarter Management Report and Annual Report.
   e. In 2017, Board of Commissioners attended the GMS on the ratification and approval of PTPN X's Financial Statements for 2016 Fiscal Year and the ratification of 2017 RKAP.

2. Non-routine activities (special)
   In developing and improving the capability to support Board of Commissioners functions and obligations, in 2017 PTPN X's Board of Commissioners has attended practical academic activities and invitations as well as holding meetings/special meetings with a few members of Board of Directors to discuss strategic matters.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris oleh Dewan Komisaris

Atas pelaksanaan tugas yang dilakukan, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan fungsi dan perannya terkait mempersiapkan rapat dan membuat risalah bagi Rapat Dewan Komisaris, termasuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran bagi Dewan Komisaris tahun 2017.

Komite Audit

Guna membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan, Perseroan membentuk Komite Audit yang memberikan opini profesional dan independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Tugas komite ini termasuk memeriksa laporan dari fungsi Audit Internal dan memberikan argumen mendasar terkait pengendalian internal yang dijalankan di seluruh unit Perseroan. Komitmen Komite Audit dijalankan dengan fokus pada efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risks assessment*, dan pengelolaan Perseroan secara keseluruhan.

Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, dimana keberadaan komite ini sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya; Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan OJK No. 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Kriteria Keanggotaan dan Independensi Komite Audit

Kriteria penunjukan Komite Audit didasarkan pada integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman masing-masing anggota. Salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Komite Audit Perseroan bersifat independen, bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, dan bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Board of Commissioners Secretary Performance Evaluation and Appraisal by Board of Commissioners

On conducted duties, Board of Commissioners would like to express gratitude to Board of Commissioners Secretary. The Board of Commissioners Secretary has performed its functions and roles related to preparing meetings and making minutes for Board of Commissioners Meeting, including preparing the Work Plan and Budget for Board of Commissioners in 2017.

Audit Committee

In order to assist Board of Commissioners in conducting supervisory duties, the Company has established Audit Committee which provides professional and independent opinion to Board of Commissioners regarding reports or other matters submitted by Board of Directors to Board of Commissioners. The duties of this Committee include reviewing reports of the Internal Audit function and providing fundamental arguments regarding internal controls carried out throughout the Company's units. The Commitment of Audit Committee is conducted with a focus on the effectiveness of corporate governance, internal control, risk assessment, and overall management of the Company.

Audit Committee is directly responsible to Board of Commissioners, where the existence of this committee is in accordance with Law No. 19 Year 2003 on SOEs; Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company; Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and its amendments; OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Working Guidelines of the Audit Committee.

Audit Committee Membership Criteria and Independence

Criteria for the appointment of Audit Committee are based on the integrity, ability, knowledge and experience of each member. One member of the Audit Committee shall have a background on accounting or finance education. The Company's Audit Committee is independent and not a person in a public accounting firm, legal consulting office, or other parties who provides audit service or non-audit services and other consulting services to Company within six (6) months prior to be appointed by Board of Commissioners, and not a person having authority and responsibility for planning, directing or controlling the activities of the Company within 6 (six) months.

Anggota Komite Audit juga tidak diperkenankan memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perseroan. Anggota Komite Audit tidak diijinkan memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Audit Committee members are also not allowed to own shares of the Company, either directly or indirectly. In addition, Audit Committee members are not affiliated with members of Board of Commissioners, Board of Directors or major shareholder of the Company. Audit Committee members are not permitted to have business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business activities.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Tenure

The tenure of Audit Committee member who is not a member of Board of Commissioners shall be no longer than 3 (three) years and may be reappointed once for 2 (two) years of tenure, without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss at any time.

Susunan Keanggotaan dan Profil Anggota Komite Audit

Sesuai Peraturan OJK No. 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, struktur dan keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan, dengan Komisaris Independen sebagai ketua.

Di tahun 2017 terdapat pergantian keanggotaan Komite Audit. Kronologi pergantian keanggotaan Komite Audit di sepanjang tahun 2017 dan susunan Komite Audit per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut,

Audit Committee Membership Composition and Profile

Pursuant to OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Working Guidelines of Audit Committee and Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, composition and membership of the Audit Committee consist of at least the Independent Commissioners and external parties, with Independent Commissioner as Chairman.

In 2017, there has been changes to the membership of Audit Committee. The chronology of membership changes of Audit Committee throughout 2017 as of December 31, 2017 is as follows:

Kronologi Susunan dan Komposisi Komite Audit di Sepanjang Tahun 2017

Chronology of Structure and Composition of Audit Committee Throughout 2017

1 Januari - 31 Agustus 2017 *January 1 – August 31, 2017*	**1 September - 31 Desember 2017** *September 1 – December 31, 2017*	**Keterangan** *Remarks*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Ketua Komite Audit/Komisaris Independen) *(Head of Audit Committee/ Independent Commissioner)*	Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Ketua Komite Audit/Komisaris Independen) *(Head of Audit Committee/ Independent Commissioner)*	-
Wisnu Pudjiatmoko (Anggota Komite Audit) *(Member of Audit Committee)*	Wisnu Pudjiatmoko (Anggota Komite Audit) *(Member of Audit Committee)*	-
Adi Rahardjo (Anggota Komite Audit) *(Member of Audit Committee)*		Adi Rahardjo efektif tidak lagi menjabat anggota Komite Audit sejak 1 September 2017 *Adi Rahardjo has no longer served the Company as member of Audit Committee effectively since September 1, 2017*
	Iljas Achmadi (Anggota Komite Audit) *(Member of Audit Committee)*	Iljas Achmadi efektif menjabat anggota Komite Audit sejak 1 September 2017 *Iljas Achmadi started serving the Company as member of Audit Committee effectively since September 1, 2017*

Susunan Komite Audit
per 31 Desember 2017

Audit Committee Composition
as December 31, 2017

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Masa Jabatan *Tenure*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen) *(Independent Commissioner)*	Ketua *Head*	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK-SURKP.16.04 tanggal 16 September 2016 *Board of Commissioners Decree No. DK-SURKP.16.04 dated September 16, 2016*	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris *Following tenure as Board of Commissioners*
Wisnu Pudjiatmoko	Anggota *Member*	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK-SURKP.16.03 tanggal 31 Maret 2016 *Board of Commissioners Decree No. DK-SURKP.16.03 dated March 31, 2016*	31 Maret 2016 - 30 Maret 2019 *March 31, 2016 – March 30, 2019*
Iljas Achmadi	Anggota *Member*	Surat Direktur Utama No. IB-PERSE/17.150 tanggal 31 Agustus 2017 *Decree of the President Director No. IB-PERSE/17.150 dated August 31, 2017*	1 September 2017 - 31 Maret 2019 *September 1, 2017 - March 31, 2019*

* Profil Ketua Komite Audit, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

* Head of Audit Committee Profile, can be seen at Board of Commissioners Profile section of the Company Profile chapter in this Annual Report.

Profil anggota Komite Audit dapat dilihat di bawah ini.

The following is the profile of Members of Audit Committee.

Wisnu Pudjiatmoko
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee
Periode Jabatan: 31 Maret 2016 - 30 Maret 2019
Service Period: March 31, 2016 – March 30, 2019

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 62 tahun
Kelahiran Kebumen, 27 Desember 1955

Personal Data
Indonesian Citizen
62 years old
Born in Kebumen, December 27, 1955

Domisili
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Domicile
Surabaya, East Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1982)

Ecucational Background
Bachelor of Economics majoring in Accounting from Gajah Mada University, Yogyakarta (1982)

Riwayat Profesi
Merupakan pensiunan PTPN X. Karir beliau di Perseroan diantaranya Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Bahan (2008-2011); Kepala Biro SPI (2004-2008); dan Kepala Urusan Pengawasan & Evaluasi Keuangan Biro SPI (1999-2002). Mulai bergabung di Perseroan sejak tahun 1983.

Professional History
Has retired from PTPN X. His career in the Company among others as Head of Goods and Materials Procurement (2008-2011); Head of SPI Bureau (2004-2008); and Head of Financial Supervision & Evaluation of SPI Bureau (1999-2002). Joined the Company since 1983.

Iljas Achmadi
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee
Periode Jabatan: 31 September 2017 - 31 Agustus 2019
Service Period: September 1, 2017 - March 31, 2019

Data Pribadi
Warganegara Indonesia
Usia 63 tahun
Kelahiran Lumajang, 14 Mei 1954

Domisili
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Riwayat Pendidikan
Sarjana Pertanian jurusan Sosial Ekonomi dari Universitas Tulungagung, Jawa Timur (1996).

Riwayat Profesi
Beliau memiliki karir di Perseroan sejak Agustus 1973 hingga pensiunnya di Januari 2012. Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah: Kepala Tanaman PG Watoetoelis dan PG Krian, Sidoarjo (1998-2000), Administratur PG. Watoetoelis dan PG Krian, Sidoarjo (2000-2002), Administratur PG Tjoekir, Jombang (2003-2007), Administratur PG Gempolkrep, Mojokerto (2007-2009), dan terakhir menjabat Kuasa Direksi PTPN 10 di Makassar (2009-2012). Beliau mendapatkan penghargaan sebagai Pembina Petani Tebu Terbaik dari Presiden RI dalam Hari Ketahanan Pangan Nasional di Istana Negara tahun 2007.

Personal Data
Indonesian Citizen
63 years old
Born in Lumajang, May 14, 1954

Domicile
Surabaya, East Java, Indonesia

Educational Background
Bachelor's Degree in Agriculture majoring in Social Economics from Tulungagung University, East Java (1996).

Professional History
He started his career in the Company since August 1973 until his retirement in January 2012. He has held several positions, such as: Head of Plants at PG Watoetoelis and PG Krian, Sidoarjo (1998-2000), Administrator at PG Watoetoelis and PG Krian, Sidoarjo (2000-2002), Administrator at PG Tjoekir, Jombang (2003-2007), Administrator at PG Gempolkrep, Mojokerto (2007-2009), and the latest became the Power of Attorney of the Company's Board of Directors in Makassar (2009-2012). He has been awarded as the Best Coach of Sugarcane Farmers from the President of the Republic of Indonesia in the celebration of National Food Security Data at the State Palace in 2007.

Pedoman Kerja Komite Audit

Selain peraturan-peraturan di atas, dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit Perseroan berpegang pada pedoman kerja yang diatur dalam *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Tugas Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas pokok Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terutama pada tingkat strategi, meliputi:

1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) maupun auditor eksternal, meliputi:
   a. Penilaian pelaksanaan kegiatan serta hasil audit oleh SPI meliputi hal-hal yang mempengaruhi keandalan hasil audit.
   b. Kualitas Auditor Eksternal dipengaruhi oleh Ketentuan dan Syarat (KAK), aturan Kementerian BUMN dan Instruksi Dasar Pengadaan Perseroan.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya meliputi:

Audit Commitee Working Guidelines

In addition to the above rules, in performing its functions, the Company's Audit Committee refers to the work guidelines set forth in the Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Audit Commitee Main Duties, Authorities, and Responsibilities

Audit Committee main duties are assisting Board of Commissioners in conducting supervision, especially at the strategic level, including:

1. Assessing the activity implementation and results of audit conducted by Internal Audit Unit (SPI) and external auditors, which covers:
   a. Assessment of activity implementation and results of audit by SPI including matters affecting the reliability of audit results.
   b. Quality of External Auditor, which is influenced by Terms and Conditions (KAK), rules of the Ministry of SOE and Basic Instruction of the Company's Procurement.
2. Providing recommendations on the improvement of management control system and its implementation, which covers:

a. Proses yang dijalankan oleh manajemen untuk memperoleh keyakinan yang memadai akan tercapainya tujuan Perseroan berdasarkan:
   i. Kegiatan operasional yang efektif dan efisien
   ii. Informasi yang layak dipercaya
   iii. Pemberdayaan sumber daya Perseroan
   iv. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Keandalan pengendalian manajemen tersebut dipengaruhi oleh:
   i. Lingkungan pengendalian, yaitu atmosfir yang mempengaruhi kegiatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya
   ii. Penilaian terhadap risiko
   iii. Aktivitas pengendalian
   iv. Sistem informasi dan komunikasi
   v. *Monitoring*
c. Memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, Komite Audit melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur pengendalian dikaitkan dengan pencapaian tujuan.

3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
4. Mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris:
   a. Hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris meliputi hal-hal yang mempunyai pengaruh material terhadap pencapaian tujuan Perseroan, terutama yang terkait dengan pencapaian CBP dan RJP, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
   b. Informasi tersebut dapat diperoleh dari manajemen atau dari pihak luar yang relevan.
5. Melakukan seleksi dan memberikan rekomendasi atas penunjukan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan dalam RUPS.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Kewenangan Komite Audit adalah:

1. Sebagai Organ Dewan Komisaris, Komite Audit menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berwenang mananyakan dan meminta penjelasan tentang hal yang relevan dengan tugas kepada Direksi, dimana Direksi wajib memberikan penjelasan.
3. Jika dianggap perlu atas persetujuan Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.

a. The processes undertaken by management to obtain reasonable assurance on the achievement of Company's objectives based on:
   i. Effective and efficient operational activities
   ii. Reliable information
   iii. Empowerment of Company's resources
   iv. Compliance with applicable laws and regulations.
b. The reliability of such management control is influenced by:
   i. Control environment, ie the atmosphere that affects employees' activities in carrying out their work
   ii. Risk Assessment
   iii. Control activities
   iv. Information and communication systems
   v. Monitoring
c. Providing recommendations to improve the management control system and its implementation, Audit Committee evaluates the control elements with due regard to the achievement of objectives.

3. Ensure that there is a satisfactory review procedure for information issued by the Company, including brochures, periodic financial reports, projections/forecasts and other financial information submitted to Board of Commissioners and Shareholders.
4. Identifying matters that require the attention of Board of Commissioners:
   a. Matters that require the attention of Board of Commissioners include matters that have a material effect on the achievement of Company's objectives, particularly those related to the achievement of CBP and RJP, as well as compliance with laws and regulations.
   b. Such information may be obtained from the management or from relevant external parties.
5. Selecting and making recommendations on the appointment of External Auditor to Board of Commissioners to be submitted in the GMS.
6. Carrying out other duties granted by Board of Commissioners as long as the duties are within the scope of duties and obligations of Board of Commissioners under the terms of applicable laws and regulations.

Audit Committee authorities are:

1. As an Organ of Board of Commissioners, Audit Committee exercises the authority possessed by Board of Commissioners in accordance with the Company's Articles of Association.
2. In performing its duties, Audit Committee is authorized to question and ask for clarification on matters relevant to Board of Directors duties, whereby Board of Directors shall provide an explanation.
3. If deemed necessary upon approval Board of Commissioners, may request the assistance of experts in performing their duties for a limited period of time at the expenses of the Company.

4. Sesuai lingkup penugasannya, komite audit dapat melakukan komunikasi langsung dengan Kepala SPI atau stafnya atau meminta data dan laporan hasil audit baik yang bersifat rutin maupun laporan audit khusus dari Kepala SPI untuk memastikan:
   a. Laporan yang disampaikan kepada Pemegang Saham telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
   b. Perseroan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Manajemen menjamin Auditor Eksternal dan Intern dapat bekerja sesuai standar *auditing* yang berlaku.
   d. Manajemen telah menjalankan usaha Perseroan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
   e. Manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi hasil-hasil audit.

Komite Audit bertanggung jawab atas:
1. Pelaksanaan tugas pokoknya secara independen sesuai kompetensinya.
2. Pendapat serta rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

4. Subject to the scope of its assignment, Audit Committee may communicate directly with Head of SPI or his/her staffs or request for data and reports of both routine and special audit reports from Head of SPI to ensure that:
   a. Reports submitted to Shareholders have been done correctly and on time.
   b. The Company is in compliance with prevailing laws and regulations.
   c. The Management ensures External and Internal Auditors can work according to applicable auditing standards.
   d. The Management has been running the Company's business in accordance with sound corporate management principles.
   e. The Management has followed up the recommendations of audit results.

Audit Committee is responsible for:
1. Implementing its main duty independently according to owned competencies.
2. Opinions and recommendations submitted to Board of Commissioners.

Transparansi Independensi Anggota Komite Audit

Di bawah ini disajikan tabel transparansi independesi anggota Komite Audit, termasuk diantaranya keterlibatan anggota Komite Audit di Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir, kepemilikan saham, maupun informasi terkait hubungan usaha dan hubungan afiliasi anggota Komite Audit.

Transparency on Audit Commitee Independence

Below is a table of transparency on the indepence of audit committee members, including the involvement of members of Audit Committee of the Company within the last six (6) months, share ownership, as well as information related to the business relation and affiliation of members of Audit Committee.

Keterlibatan Anggota Komite Audit dalam Perseroan

Involvement of Members of Audit Committee in the Company

Nama *Name*	**Orang dalam di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir** *A Person in Public Accounting firm, law firm, or other party that provides audit service or non-audit service and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months*	**Memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir** *Has the authority and responsibility for planning, directing or controlling the Company's activities within the last 6 (six) months*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Ketua/Komisaris Independen) *(Head/Independent Commissioner)*	x	-
Wisnu Pudjiatmoko (Anggota) *(Member)*	x	x
Iljas Achmadi* (Anggota) *(Member)*	x	x

*) Adi Rahardjo Efektif tdiak lagi menjabat sebagai Komite Audit sejak 1 September 2017 dan digantikan oleh Iljas Achmadi — v = ada / x = tidak ada

*) Adi Rahardjo was no longer served as Audit Committee since September 1, 2017 and replaced by Iljas Achmadi — v = yes | x = no

Hubungan Afiliasi Antar Sesama Anggota Komite Audit, dengan Direksi dan Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama

Affiliation Among Members of Audit Committee, with Board of Directors and Board of Commissioners, or Major Shareholders

	Hubungan Afiliasi dengan *Affiliation with*			
	Komite Audit *Audit Committee*	**Dewan Komisaris** *Board of Commissioners*	**Direksi** *Board of Directors*	**Pemegang Saham Utama** *Major Shareholders*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Ketua/Komisaris Independen) *(Head/Independent Commissioner)*	x	x	x	x
Wisnu Pudjiatmoko (Anggota) *(Member)*	x	x	x	x
Iljas Achmadi (Anggota) *(Member)*	x	x	x	x

*) Hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya.

v = ada / x = tidak ada

*) Affiliation include special relationships primarily blood-related relationships such as spouses/children/ parents/siblings/in-laws, and others

v = yes | x = no

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi, atau yang dikenal di lingkup Perusahaan sebagai Program Pembelajaran Berkelanjutan dilakukan oleh Komite Audit agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit.

Di sepanjang tahun 2017 Komite Audit tidak mengikuti program peningkatan kompetensi.

Competency Development Program

Competency development program, or known in the scope of the Company as Sustainable Learning Program is conducted by Audit Committee in order to be able to keep up with and update information on latest developments of the Company's business activities and other knowledge related to the execution of Audit Committee's duties.

Throughout 2017, the Audit Committee did not participate in any competency development program.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau Auditor Publik untuk hadir dalam rapat dan memberikan informasi yang dianggap perlu bagi Komite Audit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan rapat Komite Audit sebanyak 7 (tujuh) kali. Berikut risalah rapat dan absensi serta rekapitulasi kehadiran Komite Audit di sepanjang tahun 2017.

Audit Commitee Meeting

Audit Committee meetings may invite Board of Commissioners, Board of Directors, Internal Audit Unit (SPI) or Public Auditor to attend the meeting and provide information that is considered necessary for Audit Committee to carry out its duties and responsibilities.

In 2017, Audit Committee has held 7 (seven) meetings. The following is minutes of meetings and attendance recapitulation of Audit Committe throughout 2017.

Risalah Rapat Komite Audit

Minutes of Audit Committee Meeting

Tanggal *Date*	**Tempat** *Venue*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Participants*	**Komite Audit yang Tidak Menghadiri Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absent Audit Committee, and Reason of Absence*
31 Maret 2017 *March 31, 2017*	Surabaya	• Program kerja Komite Audit untuk tahun 2017 • Rencana Kunjungan Kerja Ke UUS Tembakau • Laporan Hasil Kunjungan Ke UUS Pabrik Gula tanggal 6-22 Februari 2017 • *Audit Committee work program for 2017* • *Field Visit Plan to Tobacco Business Units* • *Report of Field Visit to Sugar Mill Business Units on February 6 – 22, 2017*	Arvan R.R Siregar Wisnu Pudjiatmoko Adi Rahardjo	-
16 Juni 2017 *June 16, 2017*	Yogyakarta	• Hasil Kunjungan Kerja Ke UUS Tembakau April 2017 • Hasil Kunjungan Kerja Ke UUS Gula Mei 2017 • *Results of Field Visit to Tobacco Business Units in April 2017* • *Results of Field Visit to Tobacco Business Units in May 2017*	Arvan R.R Siregar Wisnu Pudjiatmoko Adi Rahardjo	-
21 Juli 2017 *July 21, 2017*	Yogyakarta	• Laporan Tugas Khusus Dari Dewan Komisaris • Rencana Kunjungan Kerja Rutin Ke UUS Bulan Juli & Agustus 2017-07-20 • *Report of Special Assignment from Board of Commissioners* • *Routine Field Visit Plan to Business Units in July & August 2017*	Arvan R.R Siregar Wisnu Pudjiatmoko Adi Rahardjo	-
31 Agustus 2017 *August 31, 2017*	Yogyakarta	• Hasil Kunjungan Kerja Rutin Ke UUS Tembakau Bulan September 2017 • Hal-hal lain atau perkembangan terbaru terkait dengan kegiatan/operasional perusahaan • *Results of Routine Field Visit to Tobacco Business Units in September 2017* • *Other issues or recent developments related to Company's activities/operations*	Arvan R.R Siregar Wisnu Pudjiatmoko Adi Rahardjo	-
29 September 2017 *September 29, 2017*	Yogyakarta	• Hasil Kunjungan Kerja Rutin Ke UUS Tembakau Bulan September 2017 • Hal-hal lain atau perkembangan terbaru terkait dengan kegiatan/operasional perusahaan • *Results of Routine Field Visit to Tobacco Business Units in September 2017* • *Other issues or recent developments related to Company's activities/operations*	Arvan R.R Siregar Wisnu Pudjiatmoko Iljas Achmadi	-
27 Oktober 2017 *October 27, 2017*	Yogyakarta	• Hasil Kunjungan Kerja Ke Uus Gula • Evaluasi Prognosa Ptpn X (Induk) Dan Anak Perusahaan Per 30 September 2017 • *Results of Field Visit to Sugar Business Units* • *Evaluation of Prognosis Ptpn X (Parent Company) And Subsidiaries As of September 30, 2017*	Arvan R.R Siregar Wisnu Pudjiatmoko Iljas Achmadi	-
15 Desember 2017 *December 15, 2017*	Yogyakarta	• Hasil Kunjungan Kerja Ke Uus Tembakau Bulan Desember 2017 • Evaluasi Prognosa Per 30 November 2017 • Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Spi Triwulan Iii • Hal-Hal Lain Atau Perkembangan Terbaru Terkait Dengan Kegiatan/Operasional Perusahaan • *Results of Field Visit to Tobacco Business Units in December 2017* • *Evaluation of Prognosis As of November 30, 2017* • *Evaluation of SPI 3rd Quarter Audit Report* • *Other issues or recent developments related to Company's activities/operations*	Arvan R.R Siregar Wisnu Pudjiatmoko Iljas Achmadi	-

ekapitulasi Kehadiran Rapat Komite Audit — Attendance Recapitulation of Audit Committee Meetings

Komite Audit *Audit Committee*	**Jumlah Wajib Rapat** *Number of Mandatory Meeting*	**Jumlah Kehadiran** *Number of Attendance*	**% Kehadiran** *Attendance*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Ketua/Komisaris Independen) *(Head/Independent Commissioner)*	7	7	100,00%
Wisnu Pudjiatmoko (Anggota) *(Member)*	7	7	100,00%
Adi Rahardjo (Anggota)* *(Member)*	4	4	100,00%
Iljas Achmadi (Anggota)* *(Member)*	3	3	100,00%
Rata-rata *Average*			100,00%

*) Adi Rahardjo efektif tidak lagi menjabat sebagai Komite Audit sejak 1 September 2017 dan digantikan oleh Iljas Achmadi.

*) Adi Rahardjo was no longer served as Audit Committee since September 1, 2017 and replaced by Iljas Achmadi.

Kebijakan Remunerasi

Remunerasi anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan, dengan besaran maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris. Kepada anggota Komite Audit yang bukan merupakan Dewan Komisaris, Perseroan memberikan kebijakan remunerasi sebagai berikut,

Remuneration Policy

Audit Committee remuneration is determined by Board of Commissioners by taking into account the Company's capability, with a maximum amount of 20% of President Director's salary. Member of Board of Commissioners concurrently serves as Head/member of Audit Committee is not given additional income other than income from office as member of Board Commissioner. To member of Audit Committee who does not serve in Board of Commissioners, the Company provides policy remuneration as follows,

Remunerasi Komite Audit — Audit Committee Remuneration

Nama *Name*	**Periode Menjabat** *Service Period*	**Honorarium per Bulan** *Monthly Honorarium*	**Honorarium 1 Tahun** *Annual Honorarium*
		(Rp)/(IDR)	*(Rp)/(IDR)*
Wisnu Pudjiatmoko (Anggota) *(Member)*	1 tahun penuh *1 year full*	12.500.000	150.000.000
Adi Rahardjo (Anggota)* *(Member)*	Januari-Agustus 2017 *January-August 2017*	12.500.000	100.000.000
Iljas Achmadi (Anggota)* *(Member)*	September-Desember 2017 *September-December 2017*	12.500.000	50.000.000
Jumlah *Total*			300.000.000

*) Adi Rahardjo efektif tidak lagi menjabat sebagai Komite Audit sejak 1 September 2017 dan digantikan oleh Iljas Achmadi.

*) Adi Rahardjo was no longer served as Audit Committee since September 1, 2017 and replaced by Iljas Achmadi.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2017

Pelaksanaan tugas Komite Audit di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kegiatan SPI.
2. Evaluasi Pemeriksaan KAP 2017.

Report on Duties Implementation in 2017

Audit Committee duties implementation in 2017 is as follows:

1. Evaluation of SPI's activities
2. Evaluation on KAP's audit in 2017

Telah diadakan pertemuan dengan KAP dengan obyek Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan *Manajemen Letter*.

3. *Review* Laporan Manajemen dan Prognosa 2017.
4. Evaluasi atas Laporan Tahunan Perusahaan 2016 dan RKAP 2018.
5. Kunjungan Komite Audit ke UUS Gula dan UUS Tembakau.

Pelaksanaan tugas di atas telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan rujukan bagi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan operasional dan bisnis oleh Direksi.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Komite Audit oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh Komite Audit. Peran strategis Komite Audit untuk menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik, dimana evaluasi yang dilakukan Komite Audit meliputi *review* atas kegiatan SPI, KAP, serta kunjungan Komite Audit ke lapangan.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Hingga akhir tahun 2017, Perseroan belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Fungsi nominasi dan remunerasi yang berlaku di Perseroan dilakukan melalui usulan dari Pemegang Saham Seri A yang kemudian akan ditetapkan oleh RUPS.

Meeting with KAP has been held with objects of Regulatory Compliance and Management Letter.

3. Review on 2017 Management Report and Prognosis.
4. Evaluation on the Company's 2016 Annual Report and 2018 RKAP.
5. Audit Committee's visit to UUS Sugar and UUS Tobacco.

The implementation of the above duties has been reported to Board of Commissioners as a reference material for Board of Commissioners in conducting its supervisory function on the operational and business management by Board of Directors.

Audit Committee Performance Evaluation and Appraisal by Board of Commissioners

Board of Commissioners would like to express an appreciation and gratitude for the performance that has been shown by Audit Committee. The strategic role of Audit Committee in executing Board of Commissioners' supervisory function has been well implemented, in which the evaluation was done by Audit Committee through review on the activities of SPI, KAP, and Audit Committee's visit to the field.

Nomination and remuneration function

Until the end of 2017, the Company has not had a Nomination and Remuneration Committee. The Function of nomination and remuneration prevailed in the Company is carried through the proposal of Series A Shareholders, which will then be set by the General Meeting of Shareholders.

"Sesuai Anggaran Dasar PTPN X, nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A, dengan mekanisme penetapan dan pengesahan melalui RUPS."
"In accordance with PTPN X's Articles of Association, nomination and remuneration of Board ofCommissioners and Board of Directors is proposed by Series A Shareholders, with a mechanism for setting and ratification by the General Meeting of Shareholders. "

Kebijakan Suksesi Direksi

Pergantian Direksi Perseroan tunduk dan patuh berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan telah mengikuti

Board of Directors Succession Policy

The replacement of Board of Directors is subject and obedient based on the mechanisms established by laws and regulations, including Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. In order to realize a process and mechanism of the election and replacement of members of Board of Directors that is transparent, accountable and may accounted for, the Company has followed the requirements

persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 mengenai Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Sekretaris Perusahaan

Sebagaimana ditegaskan dalam peraturan OJK No. 35 / POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Pedoman Tata Kelola Perusahaan dari Perseroan, dan *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perseroan, fungsi Sekretaris Perusahaan memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG; memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta; sebagai penghubung *(liaison officer)* dengan pihak-pihak pemegang kepentingan di luar Perseroan seperti para pemegang saham, lembaga otoritas pasar modal dan keuangan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan; dan menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengenalan Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; keterbukaan informasi terhadap publik termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan sebagaimana diatur dalam *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perseroan.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan Perseroan diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan OJK No. 35 /POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Pejabat Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

and procedures stipulated by Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/2012 dated March 29, 2012 regarding Guidelines to Appoint Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners of Subsidiary of State-Owned Enterprises.

SUPPORTING ORGANS OF BOARD OF DIRECTORS

Corporate Secretary

As defined by OJK regulation No. 35 /POJK.04/2014 about Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, Code of Corporate Governance of the Company, Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors owned by the Company, the Corporate Secretary function has an important role in ensuring that the Company complies with the disclosure requirements in line with the implementation of corporate governance principles; providing information required by Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested; as a liaison officer with parties outside the Company's stakeholders such as the shareholders, capital market institutions and financial authorities and other parties concerned; administer and store Company's documents, including but not limited to the Shareholder Register, Special Register and the minutes of Board of Directors meetings, Board of Directors meetings and the General Meeting of Shareholders.

Corporate Secretary is also responsible for the implementation of Company's induction program for Board of Directors and/or Board of Commissioners; disclosure of information to the public, including the availability of information on the Company's website as set out in the Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

The existence of Company's Corporate Secretary is regulated in Law No. 19 of 2003 on SOEs and OJK Regulation No. 35 /POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies. Corporate Secretary is directly responsible to the President Director.

Party In Charge of Appointing and Dismissing Corporate Secretary

Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on internal mechanism of the Company with Board of Commissioners' approval.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. XX-SURKP/15.010 tanggal 18 Februari 2015, Direksi menetapkan Adi Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan dan mempercayakan pelaksanaan tugas serta fungsi Sekretaris Perusahaan untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan.

Corporate Secretary Official

Based on Board of Directors Decree No. XX- SURKP/15.010 dated February 18, 2015, Board of Directors appointed Adi Santoso as Corporate Secretary and entrusted the implementation of Corporate Secretary's duties and functions.

Adi Santoso
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
Menjabat sejak: 18 Februari 2015
Served since: February 18, 2015

Data Pribadi
Warganegara Indonesia
Usia 53 tahun
Kelahiran Bondowoso, 9 Januari 1964

Domisili
Sidoarjo, Jawa Timur Indonesia

Riwayat Pendidikan
Insinyur dari Institut Teknologi Bandung (1987), ST Inten Bandung (1992) dan Magister Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya (1999)

Riwayat Profesi
Bergabung di Perseroan sejak 1993, beliau sempat dipercaya menjadi Kepala Bidang Pengadaan Bahan & Barang (2012-2015). Adi Santoso dipercaya untuk melaksanakan tugas Sekretaris Perusahaan sejak Februari 2015.

Personal Data
Indonesian Citizen
53 years old
Born in Bondowoso, January 9, 1964

Domicile
Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Educational Background
Engineer from Bandung Institute of Technology (1987), ST Inten Bandung (1992) and Master of Management from Airlangga University, Surabaya (1999)

Professional History
Joined the Company since 1993, he had ever served as Head of Procurement of Goods & Materials (2012-2015). Adi Santoso was entrusted as Corporate Secretary since February 2015.

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dari Perseroan memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki Perseroan, tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan secara jelas telah diuraikan.

Corporate Secretary Working Guidelines

The Company's Corporate Secretary has working guidelines listed in the Guidelines of Corporate Governance as well as the Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors. In the Guidelines of Corporate Governance of the Company, duties and functions of the Corporate Secretary are clearly described.

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dari Perseroan, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah:

1. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bila diminta.
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*).

Corporate Secretary Function and Duties

Based on the Guidelines of Corporate Governance of the Company, Corporate Secretary functions are:

1. Ensuring that the Company complies with the disclosure requirements in line with the implementation of good corporate governance principles.
2. Provide the information needed by Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested.
3. As a liaison (liaison officer).

4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Tugas Sekretaris Perusahaan yaitu:
1. Dalam kaitannya dengan rapat Direksi serta rapat Dewan Komisaris dan Direksi:
   a. Mengkoordinasikan rapat.
   b. Menyiapkan undangan, jadwal rapat, agenda, dan materi rapat.
   c. Membuat, mendokumentasikan, dan mengirimkan risalah rapat tersebut kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Dalam kaitannya dengan Pemegang Saham:
   a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pra-RUPS.
   b. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan RUPS, baik yang bersifat tahunan maupun yang bersifat luar biasa atau pertemuan lainnya dengan Pemegang Saham.
   c. Membuat dan mendokumentasikan risalah rapat.
   d. Mendokumentasikan surat-menyurat antara Direksi dan pemegang saham.
3. Dalam kaitannya dengan Dewan Komisaris:
   a. Mengkoordinasikan arus informasi (laporan manajemen dan laporan lainnya) kepada Dewan Komisaris.
   b. Mendokumentasikan surat menyurat antara Direksi dan Dewan Komisaris.
   c. Mengkoordinasikan implementasi saran/nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi.
4. Dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang usaha Perseroan, termasuk yang berkaitan dengan GCG, dan menganalisis dampaknya terhadap Perseroan.
5. Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan masukan/informasi kepada Direksi untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan GCG dan etika korporasi, serta memberikan masukan tentang peraturan perundang-undangan yang baru.
   a. Memberikan pendapat hukum terhadap setiap rancangan produk yang memiliki kekuatan hukum di lingkungan Perseroan.
   b. Mengkoordinasikan pembuatan buku laporan tahunan, profil Perseroan, brosur mengenai Perseroan, dan media lainnya.

4. Administer and store documents of the Company, including but not limited to the shareholder register, special register and minutes of Board of Directors meetings, Board of Commissioners meetings and the GMS.
5. Implementation of the Company's induction program for Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Corporate Secretary duties are:
1. In relation to Board of Directors meeting as well as Board of Commissioners and Board of Directors meeting:
   a. Coordinate meetings.
   b. Prepare meeting invitations, schedules, agendas and materials.
   c. Make, document, and send the minutes of meeting to members of Board of Directors and Board of Commissioners.
2. In relation to Shareholders:
   a. Coordinate the implementation of Pre-GMS.
   b. Coordinate the planning and implementation of GMS, both annual and extraordinary or other meetings with shareholders.
   c. Make and document the minutes of meeting.
   d. Document the correspondence between the Board of Directors and shareholders.
3. In relation to Board of Commissioners:
   a. Coordinate the flow of information (management report and other reports) to Board of Commissioners.
   b. Document the correspondence between Board of Directors and Board of Commissioners.
   c. Coordinate the implementation of suggestions/advice from Board of Commissioners to Board of Directors.
4. In relation to compliance with the legislation in the field of Company's business of the Company, including related to GCG, and analyze the impact on the Company.
5. Corporate Secretary shall maintain confidentiality of documents, data and confidential information except in order to fulfill obligations under the legislation.
6. Provide feedback/information to Board of Directors to comply with all laws and regulations related with good corporate governance and corporate ethics, as well as provide input on new legislation.
   a. Provide a legal opinion on any product design that has the power of law in the vicinity of the Company.
   b. Coordinate the making of annual report book, company profile, brochures about the company, and other media.

7. Dalam kaitannya dengan Pemangku Kepentingan:
   a. Menjadi penghubung antara Perseroan dan masyarakat atau badan-badan yang menjalin hubungan dengan Perseroan.
   b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan Perseroan.
   c. Membantu manajemen dalam menjalin hubungan baik dengan instansi yang terkait dengan Perseroan (pemerintah, parlemen, dan lain-lain).

7. In relations with stakeholders:
   a. Become a liaison between the Company and the people or entities who have a relationship with the Company.
   b. Provide the public with any information needed relating with the Company.
   c. Assist the management in establishing good relationships with relevant agencies (such as the Government, Parliament, etc.).

Struktur Organ Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan ditunjuk langsung oleh Direktur Utama. Fungsi/urusan di bawah Sekretaris Perusahaan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Analisa Data dan Kesekretariatan, Komunikasi Perusahaan, dan Teknologi Informasi.

Di bawah ini disajikan struktur organ dan pembagian fungsi/urusan di bawah Sekretaris Perusahaan.

Corporate Secretary Organization Structure

The corporate secretary is directly appointed by President Director. Functions/affairs under the Corporate Secretary are divided into 3 (three), that are Data Analysis and Secretariat, Corporate Communications and Information Technology.

Below is the organizational structure and division of functions/affairs under the Corporate Secretary.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Organization Structure of Corporate Secretary

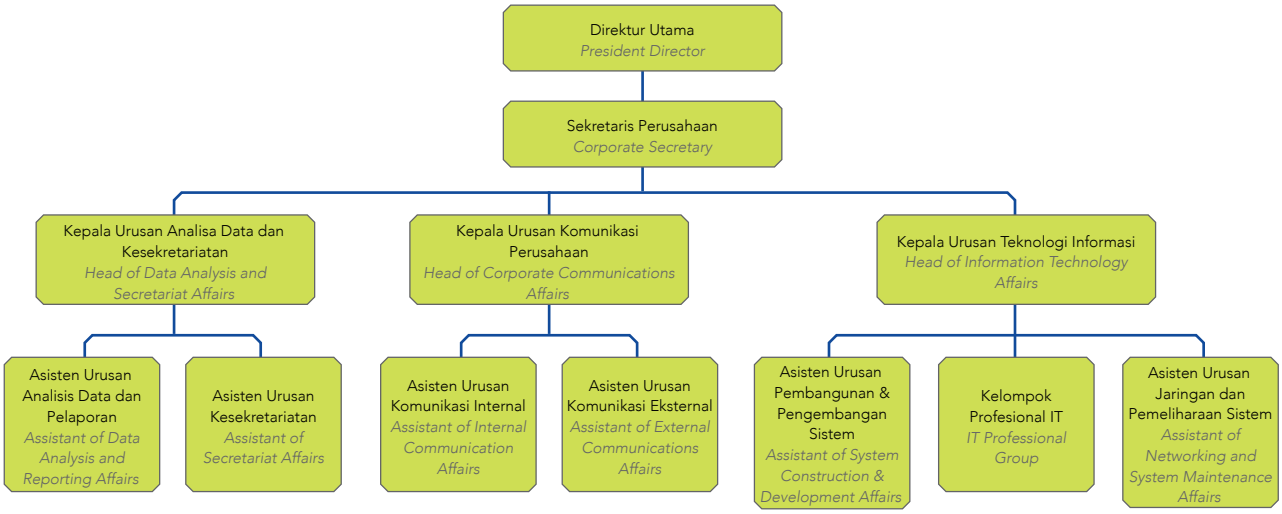

Per 31 Desember 2017, jumlah karyawan yang bertugas di Divisi Sekretaris Perusahaan sebanyak 25 orang.

As of December 31, 2017, the number of employees assigned to the Corporate Secretary Division was 25 employees.

Program Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan kompetensi merupakan bagian dari upaya Sekretaris Perusahaan untuk dapat mengikuti perkembangan industri perkebunan. Berikut disampaikan kegiatan pengembangan kompetensi dari Sekretaris Perusahaan.

Competency Development Program

Competency development program is part of the Corporate Secretary's efforts to keep abreast of the plantation industry. The following are the competency development activities of Corporate Secretary.

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Type of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Material of Education and Training*	**Tempat/Tanggal** *Venue/Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Adi Santoso (Sekretaris Perusahaan) *(Corporate Secretary)*	Seminar/Konferensi *Seminar/Conference*	Plantation Executive Development Program (PEDP) Batch V	4-16 September 2017 *September 4-16, 2017*	LPP
		World Plantation Conferences and Exhibition (WPLACE) 2017	Jakarta, 17-20 Oktober 2017 *Jakarta, October 17-20, 2017*	PT Riset Perkebunan Nusantara
	Sharing Session/Seminar	Peran Corsec dan Media Handling	Jawa Barat, 9-10 November 2017	Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)
Soetono Effendi Budi Utomo (Ka. Urs. Komunikasi Perusahaan) *(Head of Corporate Communications Affairs)*	Seminar/Konferensi *Seminar/Conference*	World Plantation Conferences and Exhibition (WPLACE) 2017	Jakarta, 17-20 Oktober 2017 *Jakarta, October 17-20, 2017*	PT Riset Perkebunan Nusantara
Cindhy Psiche Larashati (Asisten Urusan Komunikasi Internal) *(Assistant of Internal Communications Affairs)*	Seminar/Workshop	Leardership Training For Supervisor	Surabaya, 13-15 Februari 2017 *Surabaya, February 13-15, 2017*	Dale Carnegie
	Sharing Session/Seminar	Peran Corsec dan Media Handling	Jawa Barat, 9-10 November 2017	Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)
Danang Satriyo W. (Ass. Urusan Pemb. & Pengemb. Jaringan) *(Assistant of Network Building & Development Affairs)*	Seminar/Workshop	Kunjungan ke Workshop PT Teknik Bina Usaha *Visit to Workshop of PT Teknik Bina Usaha*	Cikarang, 20 April 2017 *Cikarang, April 20, 2017*	PT United Tractors Pandu Engineering
Ikhwan Krisnadi (Ass. Urusan Pemb. & Pengemb. Jaringan) *(Assistant of Network Building & Development Affairs)*	Seminar/Workshop	Kunjungan ke Workshop PT Teknik Bina Usaha *Visit to Workshop of PT Teknik Bina Usaha*	Cikarang, 20 April 2017 *Cikarang, April 20, 2017*	PT United Tractors Pandu Engineering
Veronica Kristi Wijayani (Asisten Urusan Analis Data & Pelaporan) *(Assistant of Data Analyst & Reporting Affairs)*	Seminar/Workshop	Pelatihan Interpretasi KPKU BUMN *Training on Interpretation of KPKU BUMN*	Bandung, 18-20 September 2017 *Bandung, September 18-20, 2017*	Forum Ekselen BUMN
M. Syaiful Rizal (Ass. Urs. Pemb. & Pengemb. Jaringan) *(Assistant of Network Building & Development Affairs)*	Seminar/Konferensi *Seminar/Conference*	World Plantation Conferences and Exhibition (WPLACE) 2017	Jakarta, 17-20 Oktober 2017 *Jakarta, October 17-20, 2017*	PT Riset Perkebunan Nusantara
Daudana Dwi Purina (Ass. Urs. Pemb. & Pengemb. Jaringan) *(Assistant of Network Building & Development Affairs)*	Seminar/Konferensi *Seminar/Conference*	World Plantation Conferences and Exhibition (WPLACE) 2017	Jakarta, 17-20 Oktober 2017 *Jakarta, October 17-20, 2017*	PT Riset Perkebunan Nusantara

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Type of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Material of Education and Training*	**Tempat/Tanggal** *Venue/Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Ilham Al An'aam (Ass. Muda Jaringan & Pemeliharan) *(Junior Assistant of Network & Maintenance)*	Seminar/Konferensi *Seminar/Conference*	In House Training Interpretasi KPKU *Inhouse Training on Interpretation of KPKU*	9-11 Oktober 2017 *October 9-11, 2017*	Holding Perkebunan Nusantara
Daudana Dwi Purina (Ass. Urs. Pembangunan & Pengemb. Jaringan) *(Assistant of Network Building & Development Affairs)*	Sharing Session	Sharing Informasi dan Teknologi ke PTPN XI untuk Pendaftaran Lahan dan Kontrak Petani dengan Menggunakan Aplikasi E-Farming *Information and Technology Sharing to PTPN XI for Land Registration and Farmers Contract by Using E-Farming Application*	9 Oktober 2017 *October 9, 2017*	PTPN XI
M. Syaiful Rizal (Ass. Urs. Pembangunan & Pengemb. Jaringan) *(Assistant of Network Building & Development Affairs)*	Sharing Session	Membantu PT Perkebunan Nusantara XI dalam Implementasi Aplikasi E-Farming *Assist PT Perkebunan Nusantara XI in the Implementation of E-Farming Application*	9 Oktober 2017 *October 9, 2017*	PTPN XI

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan Tahun 2017

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang dilakukan di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan Analisa Data & Kesekretariatan meliputi:
   a. Menyiapkan Laporan Manajemen triwulan I, II dan III tahun 2017, *unaudited* 2016 dan *audited* tahun 2016; Laporan manajemen bulan Januari, Februari, Mei, Juli, Agustus, Oktober dan November 2017.
   b. Menyiapkan data statistik yang menyangkut permintaan data dari pemegang saham (Kementerian BUMN & PTPN III (Persero)) dan *stakeholders*.
   c. Menyiapkan bahan rapat rapat pembahasan teknis, Pra RUPS dan RUPS RKAP 2017 dan Tutup Buku Tahun 2016.
   d. Menyiapkan bahan rapat gabungan Direksi dan Komisaris, sampai dengan bulan Desember 2017 sudah dilaksanakan sebanyak 13 kali.

Brief Report on Corporate Secretary Duties and Responsibilities Implementation in 2017

Duties and responsibilities of Corporate Secretary conducted in 2017 are as follows:

1. Progress report of Data Analysis & Secretariat, include:
   a. Prepared Company's Management Report of 1st, 2nd and 3rd quarter in 2017, unaudited 2016 and audited 2016; Company's management report of January, February, May, July, August, October and November 2017.
   b. Prepared statistical data concerning the data requests from shareholders (Ministry of SOE & PTPN III (Persero)) and stakeholders.
   c. Prepared meeting materials on technical discussion meetings, Pre-GMS and GMS of 2017 RKAP and Book Closing of 2016.
   d. Prepared Board of Directors and Board of Commissioners joint meeting materials, until December 2017 have been held for 13 times.

e. Menyiapkan materi presentasi untuk Direksi dalam rangka kegiatan *Hearing* dengan Gubernur Jatim untuk kesiapan giling tahun 2017, kunjungan Komisi VI DPR RI, kunjungan DPD RI, Acara WPLACE 2017, dan laporan ke DPR ke Pemegang Saham & dari perusahaan lain.

2. Laporan kemajuan Komunikasi Perseroan meliputi:
   a. Mengunggah berita, artikel, dan informasi bagi *stakeholder* di website www.ptpn10.co.id dan portal BUMN di www.publik.bumn.go.id/ptpn10 secara berkala. Jumlah unggahan hingga akhir 2017 adalah 108 berita, artikel, dan informasi lainnya.
   b. Mendokumentasi (*media monitoring*) berita yang terkait *core business* Perseroan dan entitas anak di media cetak dan *online*.
   c. Penerbitan Majalah Internal Triwulanan tahun 2017 (I-IV) PTPN-X Magz Tahun VI edisi 23-26.
   d. Penyelenggaraan *event* internal dan eksternal sebanyak 90 kali.
   e. Kunjungan media sebanyak 6 (enam) kali.
   f. Penerbitan siaran pers sebanyak 4 (empat) kali.
   g. Posting Video Blog sebanyak 10 kali
   h. Pemberitaan di media televisi sebanyak 2 (dua) kali
3. Perkembangan laporan kemajuan kegiatan Teknologi Informasi tahun 2017.

Audit internal/Satuan Pengawasan Intern

Kegiatan Audit Internal adalah bagian dari suatu fungsi pengendalian internal yang mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen mengenai keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, peraturan dan ketentuan, sistem pencatatan dan pelaporan, serta sistem pembinaan sumber daya manusia yang telah ditetapkan. Sesuai dengan struktur organisasi Perseroan dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 67, bahwa di setiap BUMN wajib dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan aparat pengawasan internal Perseroan.

Keberadaan Unit SPI Perseroan diatur dan diperkuat melalui peraturan Bapepam LK No. IX.I.7 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dan Piagam SPI yang telah dimiliki Perseroan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

e. Preparing presentation materials for Board of Directors in Hearing with the Governor of East Java for milling readiness in 2017, visit of Commission VI of DPR RI, visit of DPD RI, 2017 WPLACE Event, and reports to DPR to Shareholders & from other companies.

2. Progress report of Corporate Communications, include:
   a. Uploaded news, articles, and information for stakeholders in www.ptpn10.co.id website and SOE portal www.publik.bumn.go.id/ptpn10 periodically. Total uploads until the end of 2017 were 108 news, articles, and other information.
   b. Documented (media monitoring) news related to the core business of the company and its subsidiaries in the printed media and online.
   c. Internal Magazine Publishing Quarterly in 2017 (I-IV) PTPN X Magz Year VI edition of 23-26.
   d. Organized internal and external events for 90 times.
   e. Media visit for 6 (six) times
   f. Press Releases for 4 (four) times.
   g. Posting Blog Video for 10 times.
   h. News coverage in television as much as 2 (two) times.
3. Progress of information technology progress report for 2017.

Internal Audit Unit

Internal Audit activity is a part of an internal control function that identify and quantify objectively and independently regarding the alignment between the execution of activities with the plans, policies, rules and regulations, recording and reporting system, as well as human resource development system that has been set. In accordance with the Company's organizational structure and Law No. 19 of 2003 on the State Owned Enterprises Article 67, that in each SOE, Internal Audit Unit (IAU) shall be established as the Company's internal control official.

The existence of the Company's SPI Unit is regulated and affirmed through Bapepam LK Regulation No. IX.I.7 2008 on Establishment and Guidelines for Internal Audit Charter, and the SPI Charter that has been owned by the Company.

Party In Charge of Appointing and Dismissing Head of Internal Audit Unit

Head of is appointed and dismissed by President Director and reported to Board of Commissioners.

Pejabat Satuan Pengawasan Intern dan Dasar Pengangkatan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. XX-SURKP/17.077 tanggal 1 Mei 2017, Direksi mengangkat Syahrial Koto sebagai Pjs. Kepala Satuan Pengawasan Intern.

Internal Audit Unit Official and Basis of Appointment

Based on the Board of Directors Decree No. XX-SURKP/17.077 dated May 1, 2017, Board of Directors appointed Syahrial Koto as Acting Head of Internal Audit Unit.

Syahrial Koto
Pjs. Kepala Satuan Pengawasan Intern
Acting Head of Internal Audit Unit
Menjabat sejak: 1 Mei 2017
Served Since: May 1, 2017

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 52 tahun
Kelahiran Probolinggo, 11 November 1965

Domisili
Jombang, Jawa Timur, Indonesia

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Pertanian Institut Pertanian Bogor, Yogyakarta (1988).

Riwayat Profesi
Bergabung di PTPN X sejak tahun 1991, beliau menempati berbagai posisi di Pabrik Gula (PG) dan Kantor Pusat. Beberapa jabatan yang pernah dijabat adalah: Kepala Bagian Tanaman, PG Bone (2011), Kaur Tanaman - Kantor Kudir Ptpn X di Makasar (2011), Kaur Perencanaan. & Pemetaan Bidang Perencanaan Produksi - KD (2011-2012), Pjs. Kepala Bidang Qc & Pengembangan Lahan - Kd (2012-2013), Pjs. Kepala Divisi Qc & Pl Kd (2013-2014), Kepala Divisi Qc & Pl (2014-2015), dan Kepala Pusat Penelitian Gula Jengkol (2015-2017) sebelumnya akhirnya dipercaya menjadi Pjs. Kepala SPI.

Sertifikasi Profesi
Sertifikasi Diklat Khusus Kepala Satuan Pengawasan Intern (2017).

Personal Data
Indonesian Citizen
52 years old
Born in Probolinggo, November 11, 1965

Domicile
Jombang, East Java, Indonesia

Educational Background
Bachelor of Agricultural Engineering from Bogor Agricultural University, Yogyakarta (1988).

Professional History
Joined PTPN X since 1991, he has held various positions at Sugar Mills (PG) and Head Office, among others Head of Plant Section, PG Bone (2011), Head of Plant Affairs – PTPN X Board of Directors Proxy Office in Makassar (2011), Head of Planning & Production Planning Mapping Affairs - KD (2011-2012), Acting Head of QC & Land Development Department - KD (2012-2013), Acting Head QC & PL Division - KD (2013-2014), Head of QC & PL Division (2014-2015), and Head of Jengkol Sugar Research Center (2015-2017), and then entrusted to be Acting Head of SPI.

Professional Certification
Certification of Head of Internal Audit Unit Special Training (2017).

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan fungsi Audit Internal, Satuan Pengawasan Intern Perseroan berpedoman pada Internal Audit *Charter* atau Piagam Audit Internal Perseroan yang telah disahkan Direksi pada 28 Februari 2013. Piagam ini memuat antara lain:

1. Kedudukan Audit Internal.
2. Ruang lingkup, hak dan kewajiban.
3. Kewenangan dan tanggung jawab.
4. Tanggung jawab profesi.
5. Struktur dan Kedudukan SPI.
6. Metode kerja.
7. Pelaporan.
8. Kode etik.

Internal Audit Charter

In carrying out the functions of Internal Audit, the Company's Internal Audit Unit was guided by the Internal Audit Charter which was approved by Board of Directors on February 28, 2013. This Charter contains among others:

1. Internal Audit position.
2. Scope, rights and obligations.
3. Authority and responsibility.
4. Profession responsibility .
5. Structure and Position of SPI.
6. Working methods.
7. Reporting.
8. Code of Ethics.

Fungsi, Tugas dan Wewenang

Fungsi Satuan Pengawasan Intern adalah:
1. Membantu organisasi mencapai tujuannya.
2. Memonitor risiko dan memastikan bahwa terdapat pengendalian yang memadai untuk memitigasi risiko tersebut
3. Meningkatkan GCG.

Tugas Satuan Pengawasan Intern adalah:
1. Melakukan audit terhadap semua kegiatan operasional unit kerja dalam organisasi Perseroan.
2. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen unit kerja
3. Memberikan rekomendasi, konsultasi dan fasilitasi kepada unit kerja atau manajemen untuk meningkatkan pengendalian manajemen, sistem dan prosedur, kinerja dan pengelolaan risiko serta mendorong pelaksanaan GCG.
4. Memberikan saran untuk efisiensi dan efektifitas biaya serta peningkatan pendapatan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya SPI memiliki wewenang untuk:
1. Melakukan audit terhadap semua kegiatan unit kerja dalam organisasi Perseroan dan badan-badan afiliasi dimana Perseroan mempunyai penyertaan sekurang-kurangnya 50% modal perusahaan.
2. Melakukan audit terhadap badan usaha afiliasi lain ataupun badan lainnya dengan persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3. Melakukan penyelidikan terhadap semua kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan, baik berupa penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, pembongkaran, perampokan, atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi Perseroan.

Tanggung Jawab SPI dan Ruang Lingkup Audit

Tanggung jawab SPI adalah memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa yang dilakukan sesuai dengan standar audit dan standar perilaku profesional yang dituntut kode etik. Tanggung jawab ini meliputi juga koordinasi pelaksanaan audit dengan auditor eksternal sehingga tujuan audit semua pihak tercapai. Satuan Pengawasan Intern berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Ruang lingkup audit mencakup pemeriksaan, pengkajian, dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas dari Sistem Pengendalian Internal Perseroan dan mutu kinerja dari pelaksanaan tanggung jawab yang ditetapkan serta pemeriksaan terhadap pengelolaan resiko, yaitu:

Function, Duties, and Authorities

Functions of Internal Audit unit are:
1. Assist the organization to achieve its objectives.
2. Monitor the risks and ensure that there are adequate controls to mitigate such risks
3. Improve the corporate governance.

Duties of Internal Audit Unit are:
1. Conduct audit of all operational activities of work units within the Company's organization.
2. Identify matters requiring the attention of the management of work unit
3. Provide recommendations, consultation and facilitation to the work unit or management to improve management controls, systems and procedures, performance and risk management as well as encouraging the implementation of GCG.
4. Provide advice on cost efficiency and effectiveness as well as revenue increment.

In carrying out its duties and responsibilities SPI has the authority to:
1. Conduct audit of all activities of work units within the Company's organization and affiliated entities in which the Company has at least 50% ownership of the Company's capital.
2. Conduct audit of other affiliated business entities or other entities with the approval of President Director and Board of Commissioners.
3. Conduct investigation of all cases/issues in every aspect and element of activity, either fraud, forgery, embezzlement, theft, burglary, robbery, or other things that can incur material and immaterial losses for the Company.

SPI Responsibilities and Scope of Audit

SPI responsibility is to provide analysis, assessment, recommendation, consultation and information about activities that are audited, which is conducted in accordance with the auditing standards and the professional behavior standards that demanded code of ethics. This responsibility also includes the coordination of audit with the external auditors soa s the audit purposes of all the parties can be reached. Internal Audit Unit is responsible directly to the President Director.

The scope of audit includes the examination, assessment, and evaluation on the adequacy and effectiveness of the Company's Internal Control System and performance quality of the implementation of assigned responsibilities and examination of risk management, namely:

1. Mendampingi (*counter part*) pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
2. Peningkatan pengetahuan kemampuan/ketrampilan petugas dan kualitas hasil pemeriksaan.

1. Assist (counter part) examination conducted by the Supreme Audit Agency (BPK) on management and financial responsibility of the State.
2. Improve knowledge of ability/skill of personnel and the quality of audit results.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern

SPI berada di bawah Direksi. Struktur organisasi internal SPI dapat dilihat di bawah ini.

Internal Audit Unit Organization Structure and Position

SPI is under the Board of Directors. SPI internal organizational structure can be seen below.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern Perseroan

Organizational Structure of Company's Internal Audit Unit

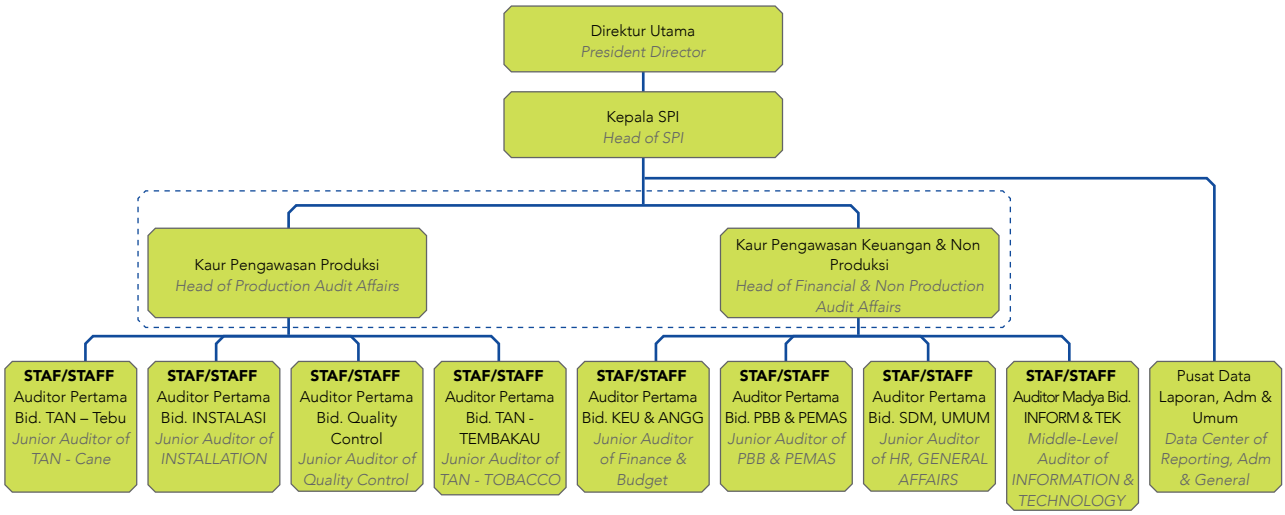

Jumlah karyawan SPI Perseroan di tahun 2017 sebanyak 13 orang dengan pembagian fungsi sebagai berikut:
1. 1 orang Penanggungjawab (Kepala SPI)
2. 2 orang Pengawas (Kepala Urusan)
3. 10 orang Pemeriksa, terdiri dari:
   a. Tanaman (Tebu dan Tembakau): 2 orang
   b. Teknik: 2 orang
   c. Keuangan: 3 orang
   d. QA (*Quality Assurance*): 1 orang
   e. IT (Informasi dan Teknologi): 1 orang
   f. Kesekretariatan: 1 orang

The number of employees of Company's SPI in 2017 was 13 employees, with the following division of functions:
1. 1 person in charge (Head of SPI)
2. 2 person as Supervisor (Head of Affairs)
3. 10 as Auditr, , consisting of:
   a. Plants (Cane and Tobacco): 2 persons
   b. Engineering: 2 persons
   c. Finance: 3 persons
   d. QA (Quality Assurance): 1 persons
   e. IT (Information and Technology): 1 persons
   f. Secretariat: 1 persons

Kriteria dan Kode Etik Satuan Pengawasan Intern

Perseroan menetapkan persyaratan karyawan SPI dengan kriteria berintegritas, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit, berpengetahuan tentang peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya, dan memahami prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko.

Internal Audit Unit Criteria and Code of Ethics

The Company establishes requirements for SPI employees with criteria such as, integrity, having knowledge and technical experience concerning audit, knowledgeable about the laws and regulations in the field of market regulatory capital and other relevant legislation, and understand the principles of good corporate governance and management

Karyawan SPI Perseroan diwajibkan mematuhi Standar Profesi Auditor Internal dan Kode Etik Auditor Internal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal, serta wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

Kualifikasi Auditor Internal

Hingga 31 Desember 2017, kualifikasi auditor internal dari SPI Perusahaan adalah:

1. Dasar-dasar Audit: 12 orang
2. Audit Operasional: 10 orang
3. Komunikasi Psikologi Audit: 9 orang
4. Audit Kecurangan: 6 orang
5. Pengelolaan Tugas-tugas Audit: 3 orang
6. Professional Internal Auditor (PIA): 2 orang

Program Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan kompetensi yang diikuti Kepala dan karyawan SPI di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

risk. Company's employees are required to adhere SPI Professional Standards and Code of Ethics of Internal Auditors issued by the Association of Internal Auditors, and shall maintain the confidentiality of Company's information and/or data related to the implementation of duties and responsibilities of Internal Audit except as required by regulations or verdict/decision of the court.

Internal Auditor Qualification

Until December 31, 2017, the internal auditor qualification of Company's SPI are:

1. Basic Audit: 12 persons
2. Operational Audit: 10 persons
3. Communication of Audit Psychology: 9 persons
4. Fraud Audit: 6 persons
5. Audit Task Management: 3 persons
6. Professional Internal Audit (PIA): 2 persons

Competency Development Program

Competency development program attended by the Head and employees of SPI in 2017 are as follows:

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Type of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Material of Education and Training*	**Tempat/Tanggal** *Venue/Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Iwan Mahendra (Kepala Urusan Pengawasan Non Produksi) *(Head of Non-Production Audit Affairs)*	Seminar	Diklat Dasar-dasar Audit *Basic Audit Training*	17-27 Juni 2017 *June 17-27, 2017*	PPA & K
Tatok Pranoto (Auditor Pertama) *(Junior Auditor)*	Seminar/ Workshop	Audit Kecurangan	4-14 September 2017 *September 4-14, 2017*	PPA & K
Wellem Stefanus Ndoen (Auditor Madya) *(Middle-Level Auditor)*	Seminar	Diklat Audit Operasional *Operational Audit Training*	16 - 26 Mei 2017 *May 16 - 26, 2017*	PPA & K

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SPI Tahun 2017

SPI telah melakukan pemeriksaan pada 10 Unit Usaha PG di Jawa dan 3 Unit PG di Makassar, 2 Pengembangan Lahan (Madura dan Bojonegoro), 1 Penelitian Gula, 2 Penelitian Tembakau dan 3 Kebun Tembakau, 3 Divisi Kantor Pusat dan PMN dan telah diterbitkan 56 LHP dan 6 Management Letter atau 109% terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 (57 LHP), sebagai berikut ini

Brief Report on SPI Duties and Responsibilities Implementation in 2017

SPI has conducted audit on 10 Sugar Mill Business Unit in Java and 3 Sugar Mill Units in Makassar, 2 Land Development (Madura and Bojonegoro), 1 Sugar Research, 2 Tobacco Research and 3 Tobacco Fields, 3 Head Office Divisions and PMN and has issued 56 LHP and 6 Management Letter or 109% of the Annual Work Program (PKPT) of 2017 (57 LHP), as follows

NO	UNIT USAHA BUSINESS UNIT	RENCANA PLAN	REALISASI REALIZATION
1	PG WATOETOELIS *WATOETOELIS SUGAR MILL*	3	2
2	PG KREMBOONG *KREMBOONG SUGAR MILL*	3	2
3	PG GEMPOLKREP *GEMPOLKREP SUGAR MILL*	3	2
4	PG TJOEKIR *TJOEKIR SUGAR MILL*	3	2
5	PG DJOMBANG BARU *DJOMBANG BARU SUGAR MILL*	3	2
6	PG LESTARI *LESTARI SUGAR MILL*	3	2
7	PG MERITJAN *MERITJAN SUGAR MILL*	3	2
8	PG PESANTREN BARU *PESANTREN BARU SUGAR MILL*	3	3
9	PG NGADIREDJO *NGADIREDJO SUGAR MILL*	3	3
10	PG MODJOPANGGOONG *MODJOPANGGOONG SUGAR MILL*	3	3
11	PG BONE *BONE SUGAR MILL*	3	2
12	PG CAMMING *CAMMING SUGAR MILL*	3	2
13	PG TAKALAR *TAKALAR SUGAR MILL*	3	2
14	KEBUN WEDIBIRIT *WEDIBIRIT FIELD*	2	3
15	KEBUN AJONG GAYASAN *AJONG GAYASAN FIELD*	2	3
16	KEBUN KERTOSARI *KERTOSARI FIELD*	2	3
17	WIL PENGEMBANGAN *DEVELOPMENT AREA*	4	3
18	KANTOR PUSAT (DIVISI & PMN) *HEAD OFFICE (DIVISION & PMN)*	4	10
19	PUSLIT *RESEARCH CENTER*	2	6
20	INSIDENTIL *INCIDENTAL*	2	5
	TOTAL	57	62

Temuan hasil pemeriksaaan tahun 2017 didominasi kelemahan internal control (79%) yang terjadi di semua aspek kegiatan, kelemahan administratif (19%) dan sisanya indikasi kecurangan (fraud) sebesar 2% sebagaimana diagram di bawah ini:

The findings of audit results in 2017 were dominated by weakness in internal control (79%) which occurred in entire aspects of activity, weakness in administrative (19%) and the remaining is fraud indication by 2% as shown by diagram below:

Summary Klasifikasi

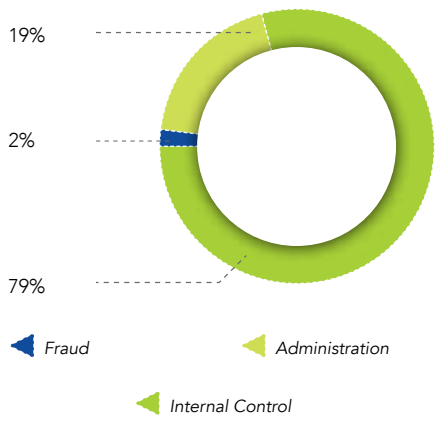

Summary Subyek

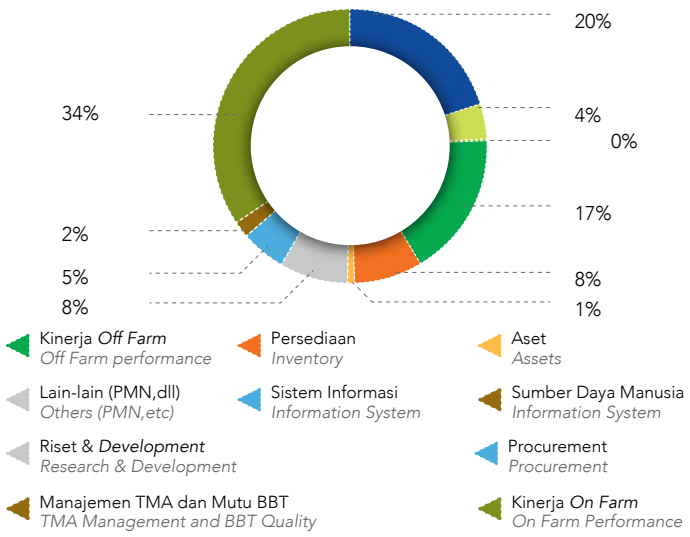

Berdasarkan evaluasi hingga 31 Desember 2017 TL atas LHP sebanyak 46 dari 56 yang sudah masuk atau sebesar 82,14%. Adapun sisanya masih dalam proses di masing-masing unit usaha.

Beberapa hasil pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

1. Aset
   a. Perlu diminimalisir terjadinya lahan-lahan yang tidak produktif (kosong/tidak ditanami)
   b. Perlu pengetatan sistem pengamanan aset tanah maupun hasil panen dari aset yang ditanami secara terpadu.

2. Persediaan
   a. Perlunya direviu kembali jumlah *iron stock/* minimum stock yang lebih tepat sesuai karakteristik masing-masing (tebu dipanen 12 bulan dan tembakau dipanen umur 40 hari)
   b. Stock gula milik Bulog yang masih ada di gudang PG perlu dikoordinasikan lebih intens agar dapat segera dikeluarkan

Based on evaluation until December 31, 2017, follow up LHP as many as 46 from 56, which have entered or equal to 82.14%. The remaining was still in the process in each business unit.

Several audit results that need to be attended to are as follows:

1. Assets
   a. Unproductive lands (empty/not planted) need to be minimized.
   b. Need to tighten the security system of land assets and crops from integrated cultivated assets.

2. Inventory
   a. Need to review more exact iron stock/minimum stock matching according to each characteristics (sugarcane is harvested at 12 months and tobacco is harvested at 40 days)
   b. Bulog's existing sugar stock in PG warehouse needs more intense coordination for immediate release

c. Perlunya sinkronisasi antara LOI dan rencana tembakau yang akan ditanam guna meminimalisir nilai persediaan yang tinggi.

3. Procurement
   a. Perlunya sosialisasi dan memastikan bahwa semua peraturan/ ketentuan pengadaan barang dan jasa benar-2 dipahami oleh semua Unit untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan karena ketidaktahuan.
   b. Perlunya mengkaji pupuk KS alternatif domestik untuk mereduksi ketergantungan impor. Pupuk KS berpengaruh signifikan terhadap pencapaian mutu NW.

4. Kinerja *Off Farm*
   a. Perlunya *monitoring* progress penyelesaian yang lebih intens guna meminimalisir risiko keterlambatan pekerjaan persiapan giling di Pabrik Gula
   b. Losses dalam Pabrik rata-rata masih tinggi (> 2 %)
   c. Kinerja *Core Sampler* guna mendorong perbaikan mutu BBT belum optimal

5. Kinerja *On Farm*
   a. Perlu lebih selektif dan memastikan kualitasnya dalam pemilihan lahan yang akan disewa oleh unit usaha.
   b. Pencapaian BBT MG 2017 jauh di bawah RKAP perlu diidentifikasi lebih teliti faktor-2 penyebabnya, antara lain yang menonjol adalah kelancaran penyediaan biaya garap dan pencairan DO gula.
   c. Perlu kajian intensif kepada petani atas *output* yang dicapai (misalnya : progress pendaftaran lahan, protas) dalam bentuk sefleksibel mungkin
   d. Perlu perbaikan manajemen air guna antisipasi dampak perubahan iklim , terutama *waterlogging* dan stagnasi.
   e. Taksasi ulang (data lebih lebih detail – *exact location*) dengan interval waktu lebih pendek
   f. Perlu strategi korporasi dikoordinir oleh Tim *Task Force* untuk meminimalisir tebu lari dan risiko *high cost* antar PG sesaudara pada situasi jumlah BBT terbatas
   g. Mendatangkan BBT dari TRM-LL dengan pertimbangan perolehan margin contribution lebih tinggi
   h. Perlu data empiris dari perlakukan pembatasan jumlah lembar daun yang dipetik (18 – 22 lembar) di lahan Training Farm Tembakau dalam upaya mendongkrak komposisi *wrapper* (NW eksisting 17 % s.d 27,5 % masih di bawah potensi ± 40 %), mereduksi biaya secara signifikan

c. Synchronization between LOI and tobacco plans to be planted is needed in order to minimize high inventory value.

3. Procurement
   a. Need to socialize and ensure that all procurement rules and regulations are properly understood by all Units to anticipate the occurrence of irregularities due to ignorance.
   b. Need to study domestic alternative KS fertilizer to reduce dependency on import. KS fertilizer has a significant effect on the achievement of NW quality.

4. Off Farm performance
   a. More intensive monitoring progress is needed to minimize the risk of late milling preparation at Sugar Mills
   b. Average losses in the mills is still high (> 2%)
   c. Core Sampler performance in order to boost quality improvement of BBT has not yet optimal

5. On Farm Performance
   a. Need to be more selective and ensure quality in the selection of land to be leased by business unit.
   b. Factors causing the achievement of BBT MG in 2017 to be far below the RKAP needs to be more closely identified, among which is the smoothness of cost provision for work on land and disbursement of DO sugar.
   c. Intensive review on farmer's outputs needs to be done (eg: land registration progress, protas) in the most flexible form possible.
   d. Need to improve water management to anticipate the impacts of climate change, especially waterlogging and stagnation.
   e. Re-assessment (more details data - exact location) with shorter time intervals
   f. Need a corporate strategy coordinated by the Task Force Team to minimize running sugar cane and high cost risk among Sugar Mills on situation of limited BBT amount
   g. Bring BBT from TRM-LL with consideration of higher contribution margin
   h. Need empirical data from the treatment of limiting number of leaves picked (18-22 leaves) in the Tobacco Farm Training land in an effort to boost the wrapper composition (existing NW of 17% to 27.5% is still below the potential ± 40%), to reduce costs significantly

6. Keuangan
   a. Kesulitan *cash flow* mengikuti jadwal kebutuhan *on farm*
   b. Terdapat Piutang PKBL kepada mitra binaan untuk penyaluran tahun 2011 yang belum lunas
   c. Terjadi *double* pembayaran terhadap rekanan PG
   d. Tunggakan piutang KKP (mulai bibit sampai dengan tebang angkut) Eks PKBL di beberapa Unit Usaha MT 2015/2016 dan MT sebelumnya belum lunas

7. Teknologi Informasi
   a. Implementasi Sistem ERP – SAP belum optimal
   b. Sistem informasi pengawalan BBT, sebagaian masih belum optimal.

Untuk tindak lanjut terhadap temuan BPK, progress penyelesaian TL hasil pemeriksaan external auditor BPK periode 2010-2014 dimana perkembangan terakhir dari hasil klarifikasi Tim BPK dengan Tim SPI bersama Divisi terkait dalam kunjungannya ke PTPN X tanggal 27 Oktober 2017, telah disampaikan beberapa tambahan *evidence* dan sambil menunggu surat resmi dari BPK, diharapkan 5 items bisa di close sehingga tersisa 3 items (denda keterlambatan PT SPP, klaim penggantian alat dan *commissioning*, realisasi pembentukan *New* Co di BCT) dari 8 items yang disampaikan BPK sesuai surat No 226/S/XX/07/2017 tanggal 28 Juli 2017.

Di tahun 2017, dalam rangka memperkuat fungsi SPI sebagai mitra (konsultasi, evaluator dan katalis) dengan mengedepankan pendekatan preventif atau *Early Warning System* (EWS) telah dilakukan langkah-langkah sbb:

1. Pembaharuan SPI *Charter* telah dilakukan dan ditetapkan oleh Direktur Utama PTPN X dan Komisaris Utama PTPN X pada tanggal 20 Juni 2017
2. Pembuatan Aplikasi berbasis web (*on line*) Sistem Pemantauan Informasi Tindak Lanjut atau disingkat SIPTL bekerjasama dengan Sekper (cq IT), telah di *launching* dan disosialisasikan 12 Desember 2017 dengan tujuan/manfaat sbb :
   a. Progress penyelesaian Tindak Lanjut (TL) dapat dipantau dan diakses cepat, dan *real time* dimanapun oleh petugas yang memiliki otoritas yaitu : 1 Kaur & 1 karyawan pimpinan (karpim) Kantor Pusat, Mankeu & Sekum di Unit Usaha, Kapuslit & 1 karpim, dan Mantan Pengembangan Lahan & 1 karpim
   b. Mempercepat penyelesaian TL hasil pemeriksaan.
   c. Menghemat sumberdaya (tempat, waktu, tenaga dan biaya)
   d. Sumber *database* hasil audit (*multi years*)
3. Penyusunan RJPP internal SPI (2018 – 2022).

6. Finance
   a. Difficulty in cash flow following the on-farm demand schedule
   b. There are PKBL receivables to fostered partners for disbursement in 2011 that have not been paid off
   c. Double payments to PG partners
   d. KKP receivables arrears (from seed to haulage) of Ex-PKBL in some MT Business Unit 2015/2016 and previous MT is not yet paid off

7. Information Technology
   a. Implementation of ERP System - SAP is not yet optimal
   b. BBT controlling information system, some of which are still not optimal.

To follow up on BPK findings, the progress of follow up on the audit results of external auditor, BPK, for 2010-2014 period where the latest developments from the clarification of BPK Team and SPI Team together with relevant Divisions during their visit to PTPN X on October 27, 2017, some additional evidences have been submitted and waiting for official letter from BPK, it is expected that 5 items can be closed so that remaining 3 items (fines of PT SPP delay, equipment replacement claim and commissioning, realization of New Co formation in BCT) of 8 items submitted by BPK according to letter No. 226/S/XX/07/2017 dated July 28, 2017.

In 2017, in order to strengthen SPI's function of as partner (consultation, evaluator and catalyst) by prioritizing the preventive approach or Early Warning System (EWS), the following measures have been taken:

1. SPI Charter renewal has been made and stipulated by President Director of PTPN X and President Commissioner of PTPN X on June 20, 2017
2. Web-based Application Development (on line) for Follow Up Information Monitoring System (SIPTL) in cooperation with Corporate Secretary (cq IT), has been launched and socialized on December 12, 2017 with objectives/benefits as follows:
   a. Follow-up (TL) Progress can be monitored and accessed quickly, and real time anywhere by authorized officers that are: 1 Head of Affairs & 1 Leader at Head Office, Finance Manager & Secretary in Business Unit, Head of Research Center & 1 Leader, and Former Land Development & 1 Leader
   b. Accelerate the settlement of follow up.
   c. Save resources (place, time, effort and cost)
   d. As source database of audit results (multi years)
3. Preparation of SPI's Internal RJPP (2018 - 2022).

AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik, atau proses audit yang dilakukan pihak eksternal melakukan audit finansial untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatazasan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Auditor Publik harus terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perseroan, serta Perseroan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam proses audit eksternal sehingga memungkinkan Auditor Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Penunjukan Auditor Publik mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik; dan usulan Dewan Komisaris yang disahkan dalam RUPS. Berdasarkan PP 20/2015 tersebut, Auditor Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dimana Auditor Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.

Berdasarkan keputusan RUPS tahun 2017, forum RUPS menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017. Sementara akuntan yang akan melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 adalah Muhammad Kurniawan. Baik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja maupun akuntan Muhammad Kurniawan. telah menangani audit atas Laporan Keuangan Perseroan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, Perseroan memberikan biaya jasa untuk melakukan audit umum Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 sebesar Rp758.854.272. Hasil audit menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 Perseroan adalah "Wajar tanpa pengecualian".

Selain audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja melakukan audit sebagai berikut:

1. *Management Letter*
2. Audit Kepatuhan
3. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
4. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
5. Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern

PUBLIC ACCOUNTANT

Public accountant, or the financial audit process conducted by external party to provide independent and objective opinion on the fairness, consistency and uitability of Company's financial statements with Indonesia Financial Accounting Standards (SAK) of and prevailing laws and regulations.

Public auditor should be free from the influence of Board of Commissioners, Board of Directors and parties concerned in the Company, and the Company is obligated to provide all accounting records and supporting data needed in external audit process so as to allow the public auditor to provide opinion on the fairness, consistency and appropriateness of the Company's financial statements with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Public Auditor designation refers to the Government Regulation No. 20 Year 2015 on Public Accounting Practice; and the proposal of Board of Commissioners validated at the AGM. Based on PP 20/2015, the Public Auditor is limited for maximum five (5) consecutive fiscal year, which the Public Auditor can provide audit service again after two (2) consecutive fiscal year of not providing such service to the same company.

Based on the 2017 GMS resolution, the GMS approved the appointment of Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja to carry out general audit of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2017. While accountants who will carry out independent audit of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2017 is Muhammad Kurniawan. Both KAP Purwantono, Sungkoro & Surja or accountant Muhammad Kurniawan has handled the audit of the Company's Financial Statements for 3 (three) consecutive years.

To KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, the Company gave service fee to conduct general audit of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2017 amounted Rp758,854,272. The audit resuls stated that the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2017 is "Unqualified"

In addition to the audit the Financial Statements for fiscal year 2017, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja Conducted the following audits:

1. Management Letter
2. Compliance Audit
3. Performance Evaluation Report
4. Report on Partnership Program and Community Development (PKBL)
5. Report on Compliance with Legislation and Internal Control

Akuntan Publik Tahun 2017

Public Accountant for 2017

Kantor Akuntan Publik *Public Accounting Firm*	:	Purwantono, Sungkoro & Surja
Akuntan *Accountant*	:	Muhammad Kurniawan
Tahun Audit *Audit Year*	:	Tahun Buku 2017 *Fiscal Year 2017*
Periode Penugasan *Assignment Period*	:	2017
Jasa *Service*	:	Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun 2017
Jasa Lainnya *Other Services*	:	• Management Letter • Audit Kepatuhan • Laporan Hasil Evaluasi Kinerja • Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) • Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern • *Management Letter* • *Compliance Audit* • *Performance Evaluation Report* • *Report on Partnership Program and Community* • *Development (PKBL)* • *5. Report on Compliance with Legislation and Internal Control*
Biaya *Fee*	:	Rp758.854.272

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Auditor Publik Laporan Keuangan Perseroan 6 (enam) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2012 hingga 2017 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

In the interests of transparency, the following are the Public Auditor for the Company's Financial Statements for 6 (six) consecutive years, for fiscal year 2012 to 2017 as can be seen in the table below:

Tahun Buku *Fiscal Year*	**Akuntan** *Accountant*	**Kantor Akuntan Publik** *Public Accounting Firm*	**Opini** *Opinion*
2017	Muhammad Kurniawan	Purwantono, Sungkoro & Surja	Wajar tanpa pengecualian *Unqualified*
2016	Muhammad Kurniawan	Purwantono, Sungkoro & Surja	Wajar tanpa pengecualian *Unqualified*
2015	Muhammad Kurniawan	Purwantono, Sungkoro & Surja	Wajar tanpa pengecualian *Unqualified*
2014	Indra Soesetiawan	Djoko Sidik Indra	Wajar tanpa pengecualian *Unqualified*
2013	Bambang Herwanto	Bambang Sutjipto Ngumar	Wajar tanpa pengecualian *Unqualified*
2012	Parwoto Wignjohartojo	Hadori Sugiarto Adi	Wajar tanpa pengecualian *Unqualified*

Manajemen Risiko
Risk Management

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menghambat atau menghalangi pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan ini Tim *assessment* melakukan pengukuran terhadap risiko setelah pengendalian, bukan terhadap risiko absolut maupun risiko setelah perlakuan *(after treatment).*

Risk is defined as the likelihood of an event that may inhibit or impede the achievement of company's goals or objectives that have been set. In this activity, the assessment team conduct measurement of risk after controlling and not against the absolute risk or risk after treatment.

Pengukuran risiko setelah perlakuan bersifat perkiraan, artinya mengukur posisi risiko setelah diterapkannya rencana perlakuan. Pengukuran risiko setelah perlakuan dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perlakuan tersebut terhadap perubahan level atau tingkat risiko tersebut setelah dilaksanakan perlakuan. Dengan diukurnya tingkatan risiko setelah pengendalian dan risiko setelah perlakuan, maka perusahaan akan mengetahui perbandingan tingkat risiko sebelum dan setelah perlakuan.

Measurement of risk after treatment is an estimate, meaning that measuring the risk positions after the implementation of treatment plan. Measurement of risk after treatment is carried out to determine how much influence the treatment to changes in the level or degree of that risk after treatment is carried out. With the measurement of level of risk after risk control and after treatment, the company will know comparison of the level of risk before and after treatment.

Manfaat lain dari pengukuran risiko setelah perlakuan adalah untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat jika suatu rencana (opsi) perlakuan yang diusulkan, artinya perusahaan dapat mempertimbangkan apakah dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan akan sebanding dengan manfaat yang akan diterima atau berapa besar kemungkinan kerugian yang dapat diminimalkan.

Another benefit of risk assessment after treatment is to weigh the cost and benefit if a plan (option) of the proposed treatment, which means that the company may consider whether to the amount of cost incurrred will be outweighed by the benefits to be received or how likely these losses can be minimized.

Hasil *risk assessment* atas kegiatan Perseroan teridentifikasi terdapat 20 (dua puluh) risiko korporat yang dapat berdampak pada pencapaian sasaran Perseroan. Dari 20 risiko korporat yang teridentifikasi, terdapat 2 risiko yang termasuk dalam kategori ekstrim, 14 risiko kategori tinggi dan 4 risiko kategori sedang. Risiko korporat yang termasuk dalam sepuluh besar risiko Perseroan *(top ten risk).*

The results of risk assessment on the activities of PTPN X, identified that 20 (twenty) corporate risk can impact on the achievement of Company's goals. Of the 20 corporate risks identified, there are two risks included in the extreme-risk category, 14 high-risk category and 4 medium-risk category. Corporate risk includes in the corporate top ten risk.

Assessment dilakukan dengan menggunakan kriteria risiko untuk unit kerja dan kriteria risiko korporat yang telah ditetapkan dalam Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Perseroan. Oleh karena itu, dalam melakukan evaluasi risiko, risiko yang telah dianalisis/diukur diurutkan berdasarkan tingkat risiko untuk menentukan prioritas pengelolaannya. Risiko yang teridentifikasi tersebut seluruhnya akan dikelola Perseroan dengan mempertimbangkan rencana perlakuan yang sesuai. Setelah diterapkannya rencana perlakuan, diharapkan tingkat risiko Perseroan akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelum dilakukan perlakuan.

Assessment is done by using risk criteria for work unit and corporate risk criteria set out in the Policy and Risk Management Guidelines of the Company. Therefore, in evaluating risk, the risk that has been analyzed/measured is sorted by risk level to determine priority management. The identified risks will be entirely managed by the Company by considering appropriate treatment plan. After the implementation of treatment plan, the level of corporate risk is expected to be lower than before the treatment.

Dari 20 (dua puluh) risiko korporat, dapat dilihat bahwa terdapat dua risiko yang berada dalam level ekstrim dengan tingkat risiko di atas 16,00 yaitu risiko gula milik Perseroan tidak tercapai dan Risiko kehilangan gula dalam proses produksi. Sedangkan risiko yang termasuk dalam kategori tinggi sebanyak 14 (empat belas) risiko, terutama yang berkaitan kapasitas giling, penyediaan

Of the 20 (twenty) corporate risks, it can be seen that there are two risks that are in extreme level with the risk level above 16.00, that is the risk of Company's sugar is not achieved and the risk of losing sugar in production process. While the risks that are included in the high category are 14 (fourteen) risks, especially related to milling capacity, provision of seeds/fertilizers, yield

bibit/pupuk, rendemen tebu, legalitas tanah, harga gula, rendemen, penyediaan bibit, dan harga), tembakau (penjualan, produktivitas, dan komposisi kualitas), dan risiko di luar proses bisnis utama seperti legalitas lahan dan rasio keuangan.

Keenam belas risiko korporat yang termasuk dalam level ekstrim dan tinggi tersebut harus mendapat perhatian serius dari manajemen karena dapat mengganggu pencapaian tujuan Perseroan. Perlakuan risiko tersebut dapat dilakukan oleh Direksi atau didelegasikan kepada unit kerja yang berkaitan.

Hasil *assessment* terhadap risiko yang teridentifikasi menunjukkan bahwa masih banyak risiko setelah pengendalian yang ada masih relatif tinggi. Untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima diperlukan upaya peningkatan pengendalian yang ada atau alternatif perlakuan risiko yang lain. Berikut adalah beberapa rencana perlakuan risiko *(action plan)* yang dipertimbangkan untuk mengurangi dan meminimalisir tingkat risiko terhadap risiko level tinggi.

1. Risiko Gula Milik Perusahaan Tidak Tercapai: kemungkinan terjadinya penurunan porsi produksi gula yang menjadi milik Perseroan (pabrik gula) sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

   Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
   a. Mempermudah pelayan pendaftaran areal,
   b. Perbaikan pengelolaan bahan baku,
   c. Menjaga teknik pengolahan gula,
   d. Menekan jam berhenti produksi,
   e. Menerapkan standar bagi hasil ke petani secara normatif.
2. Risiko Kehilangan Gula dalam Proses Produksi: kemungkinan makin tingginya kehilangan gula dalam proses pengolahan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

   Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
   a. Perbaikan kinerja mesin
   b. Training sumber daya manusia,
   c. Perbaikan proses pengolahan gula.
3. Risiko Menurunnya Penjualan Tembakau: kemungkinan terjadinya penurunan penjualan tembakau baik karena kuantitas maupun harga sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

of sugarcane, legality of land, sugar price, yield, seed supply, and price), tobacco (sales, productivity, and quality of the composition), and the risks outside the main business process such as the legality of land and financial ratios.

Sixteenth corporate risks included in the extrement and high level should receive serious attention by the management because such risks can interfere with the achievement of Company's objectives. The treatment of these risks can be conducted by Board of Directors or delegated to related work units.

Assessment of the identified risks indicates that there are still many relatively high risks after mitigation. To reduce the risk to an acceptable level, efforts are needed to improve the existing mitigation or other alternative risk treatment. The following is some risk treatment plan (action plan) considered to mitigate and minimize the risk level to high risk level.

1. Risk of Company's Sugar is not achieved: the possibility of a decline in sugar production portion which belongs to the Company (sugar mills) and therefore influences the achievement of Company's targets.

   Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:

   a. Ease the service for registration area,
   b. Improve the management of raw materials,
   c. Preserve the sugar processing techniques,
   d. Press the stop-production hours,
   e. Apply normative standards for sharing profit to farmers.
2. Risk of Losing Sugar in Production Process: the higher possibility of losing sugar in processing and therefore influences the achievement of Company's targets.

   Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:

   a. Engine performance improvements
   b. Human resources trainings
   c. Sugar processing process improvement.
3. Risk of Decreased Tobacco Sales: the likelihood of tobacco sales decline due to the quantity or the price and therefore influences the achievement of Company's targets.

Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

a. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menyiapkan barang,
b. Meningkatkan penjualan melalui upaya '*Treatment*' pada tembakau
c. Memastikan barang yang disajikan sesuai dengan contoh yang dikirim,
d. Negosiasi harga dengan pembeli,
e. Penyesuaian proses produksi,
f. Mengoptimalkan pertumbuhan tanaman,
g. Pengawasan ketertiban panen,
h. Melakukan penyempurnaan fermentasi dan sortasi,

4. Risiko Kapasitas Giling Rendah: kemungkinan terjadinya penurunan kapasitas giling dibanding kapasitas yang paling efisien sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

   Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

   a. Perbaikan dan pemeliharaan mesin,
   b. Pengolahan sesuai standar,
   c. Peningkatan kualitas bahan baku.

5. Risiko Penyediaan bibit, pupuk, dan alat mekanis budidaya tebu tidak sesuai kebutuhan: kemungkinan terjadinya hambatan dalam penyediaan bibit tebu, pupuk, dan alat mekanis budidaya tebu yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

   Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

   a. *Monitoring* pemasukan areal bibit dan kesesuaian varietas,
   b. Koordinasi lebih awal dengan penyedia jasa irigasi
   c. Permintaan pengadaan pupuk dan obat,
   d. *Monitoring* kepastian jumlah areal dan penyiapan lebih awal kebun.

6. Risiko Rendemen Tebu Rendah: kemungkinan terjadinya capaian rendemen tebu yang rendah dibanding tingkat keekonomian dan target yang ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

   Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

   a. Perbaikan proses di kebun/ kualitas bahan baku.
   b. Perbaikan proses di pabrik sesuai standar.

7. Risiko Produktivitas Tembakau Rendah: kemungkinan terjadinya capaian produktivitas tembakau di bawah target yang ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:

a. Increase the speed and accuracy in preparing the goods,
b. Increase sales through the efforts of 'Treatment' on tobacco
c. Make sure the goods presented are in accordance with the sample sent,
d. Price negotiations with buyers,
e. Adjustment of the production process,
f. Optimize plant growth,
g. Supervision on harvest,
h. Perfecting the fermentation and sorting,

4. Risk of Low Milling Capacity: the possibility of a decline in milling capacity than the most efficient capacity and therefore influences the achievement of Company's targets.

   Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:

   a. Repair and maintenance of machinery,
   b. Processing according to the standards,
   c. Improving the quality of raw materials.

5. Risk of Supply of seeds, fertilizers, tools and mechanical tools of sugarcane cultivation is not as needed: possibility of bottlenecks in the supply of sugarcane seed, fertilizer, and mechanical tools of sugarcane cultivation and therefore influences the achievement of Company's targets.

   Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:

   a. Monitoring the supply of seed acreage and suitability of varieties,
   b. Early coordination with irrigation service providers
   c. Request for procurement of fertilizer and insecticides,
   d. Monitoring certainty the amount of acreage and early preparation of the garden.

6. Risk of Low Yield of Sugarcane: the likelihood of a low yield of sugarcane achievement compared to the economic level and the target, and therefore influences the achievement of Company's targets.

   Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:

   a. Repair process in the garden/quality of raw materials.
   b. Repair process in the mills according to the standard.

7. Risk of Low Tobacco Productivity: the likelihood of tobacco productivity achievement below the target set and therefore influences the achievement of Company's targets.

Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

a. Meningkatkan pengendalian vektor virus dengan satgas khusus,
b. Meningkatkan frekuensi kunjungan ke lapangan dan gudang pengolah (fungsi *monitoring*),
c. Mekanisasi alat pertanian semaksimal mungkin,

8. Risiko Harga Gula Tidak Ekonomis: kemungkinan terjadinya harga jual gula yang berada di bawah tingkat keekonomisan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

   Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dengan melakukan pendekatan kepada para pengambil kebijakan dalam tata kelola gula baik di pemerintahan maupun legislatif.

9. Risiko Legalitas Tanah: kemungkinan terjadinya kelambatan dalam pengurusan legalitas tanah milik Perseroan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

   Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

   a. Melengkapi data pemetaan obyek tanah,
   b. Pengurusan sertifikat tanah melalui biro/ jasa/ notaris,
   c. Menyelesaiakan permasalahan aset-aset,
   d. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat,
   e. Koordinasi dengan unit usaha untuk pengamanan aset,
   f. Menyiapkan dokumen pendukung perpanjangan,
   g. Koordinasi dengan pengelola administrasi aset di unit usaha.

10. Risiko Komposisi Kualitas Ekspor Tembakau: kemungkinan terjadinya komposisi kualitas ekspor tembakau yang tidak sesuai target sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

    a. Tembakau dipetik saat tepat tua,
    b. Tembakau dirompos saat masak curing (pengeringan),
    c. Ketepatan masak fermentasi (stapel A,B,C,D) sebelum diproses sortasi.

11. Risiko Rasio Keuangan Tidak Ideal: kemungkinan terjadinya rasio-rasio keuangan yang tidak ideal sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:

a. Increase the virus vector control with special task force,
b. Increase the frequency of visits to the field and warehouse processing (function monitoring),
c. Maximum mechanization of agricultural equipment,

8. Risk of Un-Economical Sugar Price: the possibility of selling price of sugar below the economic level and therefore influences the achievement of Company's targets.

   Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level by approaching decision-makers in the sugar governance both in the government or legislative bodies.

9. Risk of Land Legality: the possibility of delays in the administration of the legality of land owned by the Company and influences the achievement of Company's targets.

   Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:

   a. Completing the ground object mapping data,
   b. Processing land ceritifcation through agency/services/ notary,
   c. Resolving the asset problems,
   d. Coordination with the local Land Office,
   e. Coordination with the business units to safeguard assets,
   f. Prepare documents supporting the extension,
   g. Coordination with the manager of asset administration in the business units.

10. Risk of Composition of Export Quality of Tobacco: the likelihood of the composition of export quality of tobacco does not match the target and therefore influences the achievement of Company's targets.

    Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:

    a. Tobacco is picked the right time,
    b. Tobacco is being rompos when being curing ripe (drying),
    c. Accuracy of fermentation ripe (Stapling A, B, C, D) before sorting process.

11. Risk of Un-Ideal Financial Ratios: the likelihood of financial ratios that are not ideal and therefore influences the achievement of Company's targets.

Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

a. peningkatan volume penjualan dan pendapatan,
b. maintenance rasio-rasio keuangan,
c. pengendalian biaya,
d. memaksimalkan pendapatan lain-lain melalui pemanfaatan aset,
e. manajemen pendanaan yang baik (komposisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang),
f. manajemen piutang customer yang baik,
g. manajemen pengadaan bahan/barang yang baik (minimalisir *stock*),
h. manajemen pendanaan yang baik (komposisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang),

12. Risiko Manajemen Gudang Tembakau: kemungkinan terjadinya tingkat persediaan tembakau di luar target yang ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

    a. Meningkatkan koordinasi dengan Divisi Tembakau untuk mencari pasar alternatif
    b. Tembakau akan keluar dari persediaan apabila *invoice* dari pembeli sudah diterima oleh bagian pemasaran divisi tembakau,
    c. Perbaikan kualitas dengan penyempurnaan fermentasi dan sortasi
    d. Mengoptimalkan potensi karyawan sesuai kompetensinya,
    e. Menawarkan kembali *stock* tembakau lama kepada pembeli yang masih membutuhkan.

13. Risiko HPP Gula Tidak Efisien: kemungkinan terjadinya kenaikan harga pokok produksi gula yang berada di atas target sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

    a. Perbaikan dalam proses perolehan bahan baku
    b. Efisiensi biaya SDM,
    c. Perbaikan proses pengolahan
    d. Pengendalian biaya lainnya.

14. Risiko Keterlambatan Mulai Giling: kemungkinan terjadinya keterlambatan masa giling dibanding jadwal yang ditetapkan sehingga sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:

a. increasing sales volumes and revenues,
b. maintenance of financial ratios,
c. cost control,
d. maximizing other revenues through the utilization of assets,
e. good management of funding (the composition of short-term debt and long-term debt),
f. good management of customer receivables,
g. good management of goods/materials procurement (stock minimizing),
h. good management of funding (the composition of short-term debt and long-term debt),

12. Risk of Tobacco Warehouse Management: the likelihood of tobacco inventory levels is not as targeted and therefore influences the achievement of Company's targets.

    Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:

    a. Improve coordination with the Tobacco Division to seek alternative markets
    b. Tobacco will be out of stock when the invoice of purchasers has been accepted by marketing of tobacco division,
    c. Quality improvement by refining fermentation and sorting
    d. Optimizing the employee's potential according to their competencies,
    e. Re-offering stock of old tobacco to buyers who are still in need.

13. Risk of Insufficient Sugar HPP: the possibility of increase in the cost of production of sugar above the target and therefore influences the achievement of Company's targets.

    Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:

    a. Improvement in the process of obtaining raw materials
    b. Human resources cost efficiency,
    c. Repair in the processing
    d. Other cost control.

14. Risk of Delay to Start Milling: the possibility of delays in the milling period compared to the set schedule and therefore influences the achievement of Company's targets.

Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

a. Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara cepat dan efisien serta perencanaan dana yang mantap,
b. Pengadaan tebu dari luar daerah.

15. Risiko Pasokan Bahan Baku Tebu Tidak Memadai: kemungkinan terjadinya penurunan pasokan bahan baku tebu di bawah perhitungan keekonomian sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.
Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
    a. Membangun kepercayaan (*trust*), mempermudah pelayan, pendekatan pada Petani,
    b. Perbaikan proses Tebang.
16. Risiko Kualitas Tebu di Bawah Standar: kemungkinan terjadinya penurunan kualitas bahan baku tebu sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
    a. Penyiapan bibit KBD yang optimal,
    b. Pemberian biaya garap tepat sasaran,
    c. Gerakan mekanisasi untuk pemeliharaan kebun,
    d. Perbaikan Pemupukan,
    e. Perbaikan proses tebang.
17. Risiko Produk Sampingan (Tetes): kemungkinan terjadinya target persediaan dan penjualan produk sampingan (tetes) yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima berupa revisi alokasi, pelayanan tahun depan, stock opname rutin, penambahan tangki tetes, dan analisa secara rutin.
18. Risiko Biaya SDM Tidak Efisien: kemungkinan terjadinya realisasi biaya SDM melebihi target sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima berupa mengefektifkan jam kerja, tidak mengganti karyawan yang sudah pensiun, pengendalian lembur (maksimal 3 jam).
19. Risiko Pengembangan Usaha: kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pengembangan usaha atau keterlambatan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:

a. Application of quick and efficient procurement system as well as firm funding planning,
b. Procurement of cane from outside the area.

15. Risk of Inadequate Supply of Sugarcane Raw Materials: the possibility of a decline in the supply of sugarcane raw materials below economic calculation and therefore influences the achievement of Company's targets.
Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:
    a. Building trust, simplify the service, approach to Farmers,
    b. Cutting process improvement.
16. Risk of Below Standard Sugarcane Quality: the possibility of a decline in the quality of raw materials of sugar cane and therefore influences the achievement of Company's targets.

    Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:
    a. Optimum preparation of KBD seedling,
    b. Provision of expense on right on target working,
    c. Movement of mechanization for the garden maintenance,
    d. Fertilization repair,
    e. Cutting process improvement.
17. Risk of Byproducts (molasses): the possibility of inventory and sales targets of byproducts (molasses) and therefore influences the achievement of Company's targets.

    Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level is by allocation revisions, next year service, routine stock opname, addition of tank molasses, and routine analysis
18. Risk of Inefficient HR Cost: the possibility of realization of human resource cost exceeds the target and therefore influences the achievement of Company's targets.

    Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level is in the form of create effective working hours, not replacing employees who have retired, controlling overtime (maximum of 3 hours).
19. Risk of Business Development: the likelihood of failure in business development or delays and therefore influences the achievement of Company's targets.

Rencana perlakuan yang dipertimbangkan Perseroan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

a. Sosialisasi program dan pendampingan aplikasi dan peningkatan kompetensi SDM,
b. *Setting* dan pemasangan melibatkan vendor dan *technical consultant*,
c. Perbaikan proses penerimaan barang:
d. Mematuhi standar *Maintenance Prosedure* dan *Standard Operasional Prosedure* untuk tiap peralatan maupun sistem terintegrasinya
e. Memberikan sosialisasi terhadap petani dengan praktek di kebun demoplot, menggandeng tokoh-tokoh setempat.

20. Risiko Pencemaran Lingkungan: kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan yang berpengaruh terhadap citra Perseroan atau sasaran perusahaan lainnya.

Treatment plan being considered by the Company to reduce risk to an acceptable level:

a. Socialization on programs and application mentoring as well as improving the competencies of human resources,
b. Setting and installation involving vendors and technical consultants,
c. Goods receipt process improvement:
d. Adheres to the standards of Maintenance Procedure and Standard Operational Procedure for each equipment and integrated system
e. Provide farmers with socialization of the practice in the demplot garden, approach the local leaders.

20. Risk of Environmental Pollution: the likelihood of environmental pollution that may affect the Company's corporate image or other corporate goals.

PENGELOLAAN RISIKO TAHUN 2017

Pabrik Gula

Kompilasi Level Risiko Rata-Rata Pabrik Gula 2017

Berikut adalah hasil kompilasi rata-rata Level Risiko mulai triwulan I, triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV:

RISK MANAGEMENT IN 2017

Sugar Mill

Compilation of Sugar Mill's Average Risk Level in 2017

The following is the compilation of average Risk Level from the 1st Quarter, 2nd Quarter, 3rd Quarter and 4th Quarter

No.	Nama Risiko *Risk Name*	Triwulan I *1st Quarter*			Triwulan II *2nd Quarter*			Triwulan III *3rd Quarter*			Triwulan IV *4th Quarter*			Risk Residual
		L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (5-14)
1	Risiko Areal Tebu Berkurang (Ha) *Risk of reduced sugarcane area (Ha)*	2.75	4.13	11.34	2.50	3.60	9.00	2.60	3.80	10.20	2.60	4.20	10.92	0.42
2	Risiko Produktivitas Tebu di Bawah Standart (ton /Ha) *Risk of Below Standard Sugar Cane Productivity (ton / Ha)*	2.88	3.88	11.14	2.90	3.70	10.73	2.90	3.80	11.00	2.90	3.70	10.73	0.41
3	Risiko Produktivitas Tebu TR di Bawah Standar (ton /Ha) *Risk of Below Standard TR Sugar Cane Productivity (ton / Ha)*	3.00	3.75	11.25	3.00	3.70	11.10	2.90	3.60	10.50	2.90	3.60	10.44	0.81
4	Risiko Produktivitas Tebu TS di Bawah Standar (ton /Ha) *Risk of Below Standard TS Sugar Cane Productivity (ton / Ha)*	3.00	4.38	13.13	3.00	4.90	14.70	3.00	4.50	14.00	3.00	4.90	14.70	-0.38

No.	Nama Risiko *Risk Name*	Triwulan I *1st Quarter*			Triwulan II *2nd Quarter*			Triwulan III *3rd Quarter*			Triwulan IV *4th Quarter*			Risk Residual
		L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR	
5	Risiko Pasokan Tebu Tidak Memadai (ton) *Risk of Insufficient Sugar Cane Supply (ton)*	3.25	4.75	15.44	3.20	4.50	14.40	3.20	4.40	14.20	3.30	4.60	15.18	0.26
6	Risiko Pasokan Tebu TR Tidak Memadai (ton) *Risk of Insufficient TR Sugar Cane Supply (ton)*	3.13	4.88	15.23	2.80	4.50	12.60	3.20	4.60	14.80	3.20	4.70	15.04	0.19
7	Risiko Pasokan Tebu TS Tidak Memadai (ton) *Risk of Insufficient TS Sugar Cane Supply (ton)*	2.38	4.38	10.39	2.50	4.80	12.00	2.50	4.30	11.00	2.70	4.40	11.88	-1.49
8	Risiko Rendemen Tebu di Bawah Standar (%) *Risk of Below Standard Sugar Cane Yields (%)*	3.13	3.75	11.72	3.20	3.90	12.48	3.30	3.80	12.70	3.50	3.90	13.65	-1.93
9	Risiko Rendemen tebu TR di Bawah Standar (%) *Risk of Below Standard TR Sugar Cane Yields (%)*	3.25	3.75	12.19	3.40	3.80	12.92	3.30	3.70	12.30	3.30	3.80	12.54	-0.35
10	Risiko Rendemen tebu TS di Bawah Standar (%) *Risk of Below Standard TS Sugar Cane Yields (%)*	2.50	2.88	7.19	2.50	3.90	9.75	2.40	2.90	7.50	2.40	3.10	7.44	-0.25
11	Risiko Kapasitas Giling Inklusif Rendah *Risk of Low Capacity of Inclusing Milling*	2.88	3.13	8.98	3.20	3.70	11.84	3.60	3.60	12.90	3.60	3.70	13.32	-4.34
12	Risiko Biaya Produksi Gula Tidak Efisien (Rp jutaan) *Risk of Inefficient Sugar Production Cost (Rp millions)*	2.00	1.88	3.75	1.70	1.80	3.06	1.80	1.80	3.50	1.80	1.80	3.24	0.51
13	Risiko Gula Milik PG Rendah (ton) *Risk of Low PG's Sugar (ton)*	3.63	5.00	18.13	3.70	5.00	18.50	3.70	5.00	18.50	3.70	5.00	18.50	-0.38
14	Risiko Pencemaran Lingkungan (Limbah) COD Outlet IPAL *Risk of Environmental Pollution (Waste) COD Outlet WWTP*	1.50	2.00	3.00	1.50	2.20	3.30	1.50	2.20	4.70	1.50	2.20	3.30	-0.30
15	Risiko OVERALL RECOVERY *Risk of OVERALL RECOVERY*	3.13	2.63	8.20	3.30	2.80	9.24	3.10	2.50	7.80	3.10	2.50	7.75	0.45
16	Risiko Harga Pokok Penjualan Tinggi *Risk of High Cost of Goods Sold*	3.00	4.13	12.38	2.90	4.10	11.89	3.00	4.20	12.70	3.00	4.20	12.60	-0.23

No.	Nama Risiko *Risk Name*	Triwulan I *1st Quarter*			Triwulan II *2nd Quarter*			Triwulan III *3rd Quarter*			Triwulan IV *4th Quarter*			Risk Residual
		L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR	
17	Risiko Biaya SDM Tidak Efisien (Rp) *Risk of Inefficient HR costs (Rp)*	2.00	1.88	3.75	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	-0.25
18	Risiko Kehilangan Gula dalam Proses Produksi (Total Losses) *Risk of Losing Sugar in Production Process (Total Losses)*	3.25	4.13	13.41	3.00	4.10	12.30	3.00	4.10	12.30	3.00	4.10	12.30	1.11
19	Risiko Poll Tebu *Risk of Sugar Cane Poll*	2.63	2.75	7.22	2.70	3.00	8.10	2.80	2.80	7.90	2.80	2.90	8.12	-0.90
20	Risiko KKP-E (Rp) *Risk of KKP-E (Rp)*	1.50	1.63	2.44	1.60	2.00	3.20	1.80	1.70	3.50	1.90	1.60	3.60	-1.16
21	Risiko Produktivtas Karyawan *Risk of Employee Productivity*	3.00	5.00	15.00	3.50	5.00	17.50	3.50	5.00	17.50	3.50	5.00	17.50	-2.50

Secara kompilasi menyeluruh bahwa risk profile pada Triwulan IV, terdapat beberapa risk register yang naik level risikonya, hal ini ditunjukkan oleh *risk residual* yang minus antara awal tahun s.d. Triwulan IV yaitu Pasokan Tebu TS (-2,77), Kapasitas Giling rendah (-2,34), Risiko KKP-E (-1,27), Risiko Pencemaran Lingkungan (-0,3) dan Risiko Produktivitas Karyawan.

Berdasarkan perkembangan 21 jenis risiko yang diidentifikasi pada 10 Pabrik Gula menunjukkan bahwa:

1. Level Risiko Luas Areal menurun pada Triwulan II namun cenderung meningkat pada Triwulan III dan Triwulan IV karena realisasi rata2 pencapaian PG dibawah RKAP kecuali PG GK.
2. Risiko Produktivitas Tebu, utamanya Tebu TS level risikonya cenderung meningkat pada Triwulan III dan TW IV.
3. Risiko Pasokan Tebu, utamanya Tebu TS Level Risiko meningkat mulai Triwulan I s.d. Triwulan IV yang artinya bahwa mitigasi yang telah dilakukan oleh PG (yang memiliki TS) belum optimal karena belum semua mitigasi dilaksanakan.
4. Risiko Rendemen Tebu baik TR dan TS Level Risikonya pada Triwulan IV justru meningkat jika dibandingkan periode-periode sebelumnya, yang artinya bahwa rata-rata pencapaian Rendemen masih dibawah RKAP.
5. Risiko Kapasitas Giling (*Inclusive*) cenderung meningkat dari Triwulan I (risiko sedang : 8,89), menjadi risiko Tinggi pada Triwulan II (11,84) dan meningkat lagi pada Triwulan III (12,9) dan Triwulan IV (13,84), sehingga risk residual

In overall compilation of risk profile in the 4th Quarter, there are some risk registers whose risk level were rising, indicated by minus residual risk between the beginning of the year until the 4th Quarter, namely TS Sugar Cane kSupply (-2.77), Low Milling Capacity (-2.34), KKP-E Risk (-1.27), Environmental Pollution Risk (-0.3) and Employee Productivity Risk.

The development of 21 types of risks identified in 10 Sugar Mills shows that:

1. Area Risk Level decreased in the 2nd Quarter but tended to increase in the 3rd and 4th Quarter due to average realization of PG achievement was under RKAP except PG GK.
2. Sugar Cane Productivity Risk, especially TS Sugarcane risk level tended to increase in the 3rd and 4th Quarter.
3. Sugar Cane Supply Risk, especially TS Sugarcane Risk Level increased starting from the 1st until 4th Quarter, which means that the mitigation that has been done by PG (which own TS) not yet optimal because not all mitigations were implemented.
4. Sugar Cane Yields Risk Level, both TR and TS, in the 4th Quarter increased when compared to previous periods, which means that average yields achievement was still below RKAP.
5. Inclusive Milling Capacity tended to rise from the 1st Quarter (moderate risk: 8.89) to High risk in the 2nd Quarter (11.84), and rose again in the 3rd Quarter (12.9) and Quarter IV (13.84), hence the risk residual was

minus (-4,34). Artinya bahwa realisasi pencapaian giling masih jauh dibawah sasaran yang ditetapkan dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Pabrik Gula belum menunjukkan hasil sesuai yang direncanakan.

6. Level Risiko Biaya Produksi tidak Efisien, cenderung menurun namun bukan dikarenakan efektivitas biaya. Akan tetapi penurunan pasokan jumlah bahan baku tebu yang digiling.
7. Risiko Jumlah Gula MPG levelnya relatif tetap ekstrim, belum dapat diturunkan.
8. Level Risiko Harga Pokok Penjualan (Rp/Kg) cenderung tetap (risiko tinggi) dan belum dapat diturunkan menjadi level sedang. Hal tsb. karena jumlah pasokan tebu belum dapat mengimbangi *fixed cost* Pabrik Gula.
9. Risiko Biaya SDM level risikonya cenderung tetap (rendah), namun secara corporate Harga Pokok Penjualan masih cenderung tinggi karena salah satunya adalah biaya SDM yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
10. Risiko Kehilangan Gula (*Total Losses*) dari periode Triwulan I cenderung menurun s.d. Triwulan IV, artinya bahwa langkah mitigasi yang dilakukan oleh Pabrik Gula sudah optimal dan tepat sasaran.
11. Risiko KKP-E level risikonya rendah namun cenderung meningkat dari Triwulan I s.d. Triwulan IV. Sampai akhir giling kredit belum dapat dilunasi oleh petani karena ada beberapa DO yang belum cair, namun diperkirakan apabila DO sudah cair semua maka saldo KKP-E akan nihil.
12. Risiko Produktivitas Karyawan, level risikonya meningkat dari risiko tinggi Triwulan I (15) menjadi risiko ekstrim (17,5) pada Triwulan IV karena pengukuran risiko ini menggunakan produksi MPG dibagi dengan jumlah karyawan (Tetap dan tidak tetap), sedangkan jumlah MPG tidak pernah mencapai RKAP selama 5 tahun terakhir.

Breakdown berdasarkan Level Risiko sesuai Pedoman Manajemen Risiko:

1. Risiko Ekstrim/Merah (16 s.d. 25); PIC untuk mitigasi adalah General Manager
   a. Risiko Pasokan Tebu, khususnya Tebu TR (15,18)
   b. Risiko MPG (Level Risiko 18,5)
   c. Risiko Produktivitas SDM (LR = 17,5 atau naik 2,5 dibandingkan triwulan I)
2. Risiko Tinggi/Coklat (10 s.d. 15); PIC untuk Mitigasi adalah Manager Bagian
   a. Risiko Luas Areal Tebu (LR = 10,92)
   b. Risiko Produktivitas Tebu (LR = 10,73) naik dibandingkan TW II
   c. Risiko Produktivitas Tebu TR & TS (LR = 10,5 ; 14,7)
   d. Risiko Pasokan Tebu (LR = 15,18)
   e. Risiko Pasokan Tebu TR & TS (LR = 15,04 ; 11,88)

minus (-4.34). This means that the realization of milling achievement was still far below the set target and the mitigation measures undertaken by the Sugar Mills have not shown the results as planned.

6. Inefficient Production Cost Risk Level tended to decrease, but due to a decline in the supply amount of sugarcane milled raw materials instead derived from cost effectiveness.
7. The amount of MPG Sugar Risk Level is relatively extreme and can not be lowered yet.
8. Cost of Goods Sold Risk level (Rp/Kg) was likely to remain high and can not yet be lowered to moderate level, because the amount of sugar cane supply has not been able to offset the fixed cost of Sugar Mills.
9. HR cost Risk level tended to remain low, but corporate's cost of goods sold was still high because one of the causing factors was the increasing tendency of HR costs from year to year.
10. Risk of losing sugar (total losses) from the 1st Quarter tended to decrease until the 4th Quarter, means that the mitigation measures undertaken by Sugar Factory is optimal and right on target.
11. KKP-E risk level was low but tended to rise from the 1st until 4th Quarter. Until the end of milling, loans can not be paid by the farmers because there are some pending DOs, but it is estimated if all DOs have been disbursed then KKP-E balance will be nil.
12. Employee Productivity Risk, the risk level increased from high risk at the 1st Quarter (15) to extreme risk (17.5) in the 4th Quarter because the measurement of this risk is using MPG production divided by number of employees (Permanent and non permanent), while the amount of MPG never reached RKAP for the last 5 years.

Breakdown based on Risk Level according to Risk Management Guideline:

1. Extreme Risk/Red (16 to 25); PIC for mitigation is General Manager
   a. Sugar Cane Supply Risk, especially TR Sugarcane (15.18)
   b. MPG Risk (Risk Level 18.5)
   c. HR Productivity Risk (LR = 17.5 or up 2.5 compared to the 1st quarter)
2. High Risk/Brown (10 to 15); PIC for Mitigation is Section Manager
   a. Sugar Cane Area Risk (LR = 10.92)
   b. Sugar Cane Productivity Risk (LR = 10.73) increase compared to the 2nd Quarter
   c. TR & TS Sugarcane Productivity Risk (LR = 10.5; 14.7)
   d. Sugar Cane Supply Risk (LR = 15.18)
   e. TR & TS Sugarcane Supply Risk (LR = 15.04; 11.88)

f. Risiko Rendemen Tebu (LR= 13,65)
g. Risiko Rendemen Tebu TR & TS (LR = 12,9 ; 10)
h. Risiko Kapasitas Giling (LR = 13,84)
i. Risiko Overall Recovery (LR = 10)
j. Risiko HPP (LR = 12,56)
k. Risiko Kehilangan Gula dalam proses (LR = 12,3)

3. Risiko Sedang/Kuning (6 s.d. 9) PIC untuk mitigasi adalah Asisten Manager
   a. Risiko Rendemen TS
   b. Risiko Poll Tebu (LR = 8,12)
   c. Risiko Overall Recovery (LR = 14,4)
4. Risiko Rendah/Hijau (1 s.d. 5) PIC untuk mitigasi Asisten Muda/Mandor
   a. Risiko Pencemaran Lingkungan (LR = 3,3)
   b. Risiko Biaya SDM (LR = 4,0)
   c. Risiko KKP-E (LR = 3,2)

f. Sugarcane Yields Risk (LR = 13.65)
g. TR & TS Sugarcane Yields Risk (LR = 12.9; 10)
h. Milling Capacity Risk (LR = 13.84)
i. Overall Recovery Risk (LR = 10)
j. COGS risk (LR = 12.56)
k. Risk of Sugar Loss in Process (LR = 12.3)

3. Medium Risk/Yellow (6 to 9); PIC for mitigation is Assistant Manager
   a. TS Yields Risk
   b. Sugar Cane Poll Risk (LR = 8.12)
   c. Overall Recovery Risk (LR = 14.4)
4. Low Risk/Green (1 to 5); PIC for mitigation is Junior Assistant/Foreman
   a. Environmental Pollution Risk (LR = 3.3)
   b. HR costs Risk (LR = 4.0)
   c. KKP-E risk (LR = 3.2)

Perkembangan Level Risiko rerata 10 Pabrik Gula dapat dilihat digram Pie dibawah ini:

The development of average Risk Level of 10 Sugar Mills can be seen in the below Pie Chart:

Risiko *Risk*	**Triwulan I** *1st Quarter*	%	**Triwulan II** *2nd Quarter*	%	**Triwulan III** *3rd Quarter*	%	**Triwulan IV** *4th Quarter*	%
	Jml Risiko *Total Risks*		**Jml Risiko** *Total Risks*		**Jml Risiko** *Total Risks*		**Jml Risiko** *Total Risks*	
Ekstrim *Extreme*	3	14%	2	10%	2	10%	3	14%
Tinggi *High*	10	48%	12	57%	12	57%	11	52%
Sedang *Moderate*	4	19%	3	14%	4	19%	3	14%
Rendah *Low*	4	19%	4	19%	3	14%	4	19%
Jumlah risiko *Total Risk*	21		21		21		21	

Triwulan I
1st Quarter

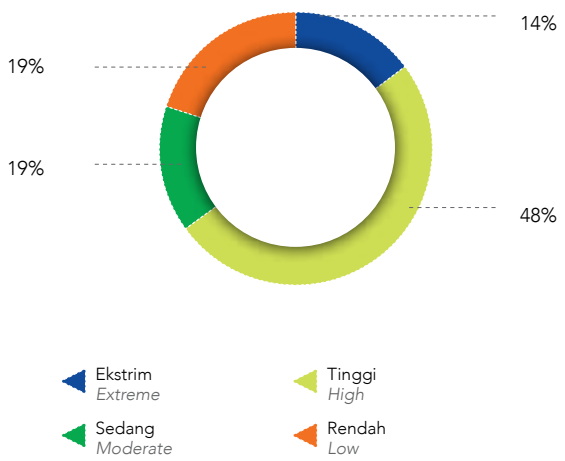

Triwulan II
2nd Quarter

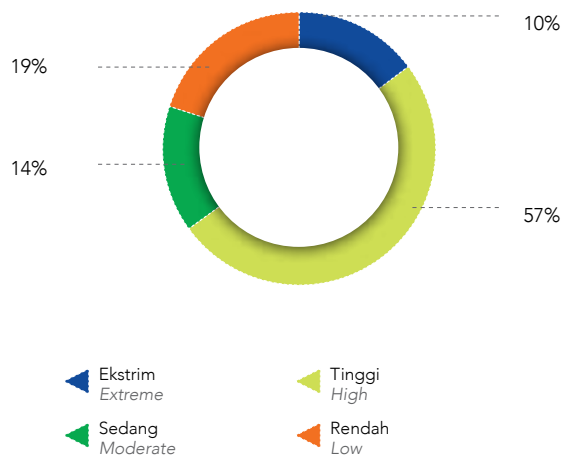

Triwulan III
1st Quarter

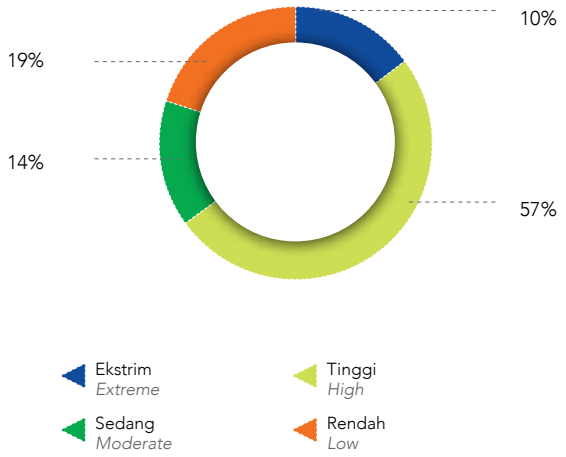

Triwulan IV
1st Quarter

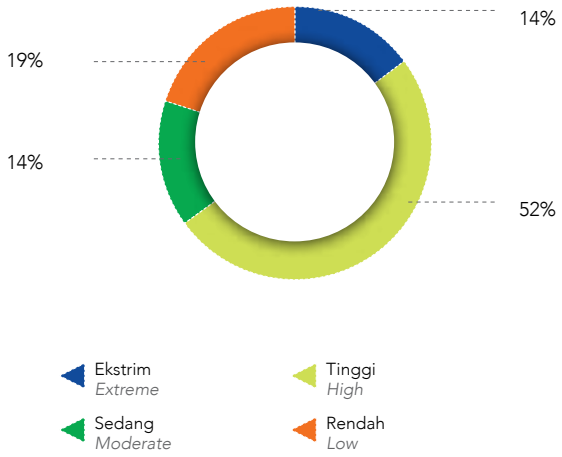

Kesimpulan :

1. Kondisi 10 Pabrik Gula pada Triwulan IV cenderung meningkat Level Risikonya jika dibandingkan periode-periode sebelumnya, Hal ini disebabkan ada mayoritas PG dibebankan tidak tercapai targetnya.
2. Berdasarkan persentase 21 jenis risiko, nampak bahwa 67% lebih risiko-risiko tsb. diatas masuk kategori Tinggi cenderung Ekstrim dan sisanya masuk kategori Sedang cenderung rendah (Lihat diagram Pie Hal. 8) sehingga hal tsb. dapat membahayakan proses bisnis Perusahaan untuk mencapai sasaran RKAP kedepannya, untuk itu Pabrik Gula harus melakukan mitigasi risiko yang komprehensif dan konsisten guna me-*reduce* Level Risiko yang ada saat ini.
3. Level Risiko rendah namun berpotensi meningkat:
   a. Risiko Biaya Produksi tidak efisien (Risiko No. 11)
   Rata-rata di Pabrik Gula, Risiko Biaya Produksi terkategorikan sebagai Risiko rendah (hijau) namun hal itu bukan disebabkan oleh optimalnya pengendalian biaya, lebih diakibatkan oleh pasokan tebu yang rata-rata tidak pernah tercapai sehingga mengurangi biaya produksi mengolah tebu. Hal ini nampak pada Risiko Harga Pokok Penjualan (Risiko No. 16) yang cenderung Tinggi atau ekstrim (Lihat contoh Profil Risk PG Watutulis, PG Gempolkrep, dan PG lainnya).
   b. Risiko Biaya SDM tidak Efisien (Risiko No. 17)
   Risiko ini rata-rata Level Risiko hanya "4" atau rendah (hijau), hal ini karena realisasinya cenderung hampir tidak pernah melampaui RKAP-nya selama beberapa tahun, akan tetapi jika melihat Risiko Produktifitas SDM (Risiko No. 21) justru sebaliknya,

Conclusion:

1. The risk level of 10 sugar mills in the 4th Quarter tended to increase compared to previous periods. This was due to the fact that majority of PGs were not able to reach their targets.
2. Based on the percentage of 21 types of risk, it appears that more than 67% of the above risks are in High to Extreme category and the rest in Moderate to Low category (See Pie Chart Pg. 8), hence may jeopardize the Company's business processes to achieve its RKAP objectives in the future, therefore Sugar Mills must perform a comprehensive and consistent risk mitigation to reduce the current Risk Level.

3. Low but potentially rising risk level:
   a. Inefficient Production Cost Risk (Risk No. 11)
   in average in Sugar Mills, Production Cost Risk is categorized as low risk (green) but that was not derived from optimum cost control, more caused by the average sugarcane supply has never reached thereby reducing the production cost of sugarcane processing. This is evident in Cost of Goods Sold Risk (Risk No. 16) that was High or Extreme (See example of Risk Profile of PG Watutulis, PG Gempolkrep, and other PG).

   b. Inefficient HR costs Risk (Risk No. 17)
   This risk's average risk level is only "4" or low (green), due to its realization tended to almost never exceed the RKAP for several years, but the opposite seen in HR Productivity Risk (Risks No. 21), in which this risk tended to be extreme because the output or MPG

Risiko ini cenderung esktrim karena *output* atau Gula MPG yang dihasilkan belum mampu menunjukkan produktivitas SDM yang ada.

Sugar produced has not been able to show existing HR productivity.

Kebun Tembakau

Laporan *monitoring* dan evaluasi Triwulan IV tahun 2017 untuk kebun tembakau tidak dapat dikompilasi karena karakteristik Kebun di jember dan Klaten tidak sama, sehingga akan disajikan perkebun:

Tobacco Fields

The monitoring and evaluation report of the 4th Quarter of 2017 for tobacco fields can not be compiled because the characteristics of field in Jember and Klaten are not the same, hence the description is by field:

Kebun Kertosari

Berikut disajikan perkembangan Level Risiko dari Awal tahun s.d. Triwulan IV tahun 2017 untuk Kebun Kertosari:

Kertosari field

Below is the development of Risk Level from the Beginning of the year until the 4th Quarter of 2017 for Kertosari Field:

No.	Nama Risiko *Risk Name*	Triwulan I *1st Quarter*			Triwulan II *2nd Quarter*			Triwulan III *3rd Quarter*			Triwulan IV *4th Quarter*		
		L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR
1	Pencapaian Luas Areal TBN (Ha) dibawah Target *Below Target TBN Area Achievement (Ha)*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Pencapaian Luas areal Tanaman BESNO/FIK (Ha) dibawah Target *Below Target BESNO/FIK Plants Area Achievement (Ha)*												
3	Produktivitas Ekspor (Kg/Ha) TBN / VBN dibawah Target *Below Target TBN/VBN Export Productivity (Kg/Ha)*	2	4	8	2	4	8	2	4	8	3	4	12
4	Produktivitas Ekspor (Kg/Ha) BESNO / FIK dibawah Target *Below Target BESNO/FIK Export Productivity (Kg/Ha)*												
5	Komposisi Kualitas Ekspor TBN/ VBN (NW) dibawah Target *Below Target TBN/VBN Export Quality Composition (NW)*	3	5	15	3	5	15	3	5	15	3	5	15
6	Komposisi Kualitas Ekspor BESNO (D/O) dibawah Target *Below Target BESON Export Quality Composition (D/o)*												
7	Total Biaya (Rp) diatas Anggaran *Above Budget Total Cost (Rp)*	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4
8	Total Biaya Produksi VBN/TBN (Rp) diatas Anggaran *Above Budget Total VBN/TBN Production Cost (Rp)*	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4
9	Total Biaya Produksi BESNO (Rp) diatas *Above Budget Total BESNO Production Cost (Rp)*	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4

No.	Nama Risiko *Risk Name*	Triwulan I *1st Quarter*			Triwulan II *2nd Quarter*			Triwulan III *3rd Quarter*			Triwulan IV *4th Quarter*		
		L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR
10	Nilai Penjualan VBN/TBN (Rp) dibawah Target *Below Target VBN/TBN Sales Value (Rp)*	2	4	8	2	1	2	2	1	2	3	4	12
11	Nilai Penjualan BESNO (Rp) dibawah Target *Below Target BESNO Sales Value (Rp)*	3	5	15	2	2	4	2	2	4	3	5	15
12	Nilai Persediaan VBN/TBN (Rp) diatas Target *Above Target VBN/TBN Inventory Value (Rp)*	3	5	15	3	1	3	3	1	3	3	5	15
13	Nilai Persediaan BESNO (Rp) diatas Target *Above Target BESNO Inventory Value (Rp)*	3	3	9	3	5	15	3	5	15	3	3	9
14	Biaya SDM (Rp) diatas Anggaran *Above Budget HR costs (Rp)*	2	1	2	3	3	9	3	3	9	2	1	2

Hasil identifikasi *monitoring* dan evaluasi s.d. Triwulan IV menunjukkan bahwa terdapat tambahan 1 risiko masuk kategori Tinggi dari sebelumnya risiko Sedang yaitu Produktivitas Eksport TBN sedangkan risiko yang lain cenderung tetap. Berikut rinciannya:

1. 5 risiko Ekstrim yaitu Produktivitas Eksport TBN NW, Komposisi kualitas Eksport TBN, Nilai penjualan TBN dan NO, dan Nilai Persediaan TBN.
2. 1 risiko Sedang (Nilai Persediaan NO) dan 5 risiko Rendah

The identification results of monitoring and evaluation until the 4th Quarter indicates that there is an additional 1 High risk from previously Moderate risks, namely TBN Export Productivity, while other risks tend to persist. Here are the details:

1. 5 Extreme Risks, that are TBN NW Export Productivity, TBN Export Quality composition, TBN and NO Sales Value, and TBN Inventory Value.
2. 1 Medium Risk (NO Inventory Value) and 5 Low Risks

Kebun Ajong Gayasan

No.	Nama Risiko *Risk Name*	Triwulan I *1st Quarter*			Triwulan II *2nd Quarter*			Triwulan III *3rd Quarter*			Triwulan IV *4th Quarter*		
		L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR
1	2	3	4	5	7	8	9						
1	Risiko Luas areal TBN (Ha) *Risk of TBN area (Ha)*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Risiko Ketidaktercapaian Luas Areal NO *Risk of Unachieved NO Area*												
3	Risiko Produktivitas Eksport TBN (Kg/Ha) *Risk of TBN Export Productivity (Kg/Ha)*	2	4	8	3	4	12	2	4	8	3	4	12
4	Risiko Produktivitas Ekpspor NO (Kg/Ha) *Risk of NO Export Productivity (Kg/Ha)*												
5	Risiko Komposisi Kualitas Ekpor TBN (NW) *Risk of TBN Export Quality Composition (NW)*	2	5	10	2	5	10	2	5	10	2	5	10
6	Risiko Komposisi Kualitas Ekpspor NO (D/O) *Risk of NO Export Quality Composition (D/O)*												

No.	Nama Risiko *Risk Name*	Triwulan I *1st Quarter*			Triwulan II *2nd Quarter*			Triwulan III *3rd Quarter*			Triwulan IV *4th Quarter*		
		L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR
7	Risiko Total Biaya (Rp) *Risk of Total Costs (Rp)*	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4
8	Risiko Total Biaya Produksi TBN *Risk of Total TBN Production Costs*	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4
9	Risiko Total Biaya Produksi NO *Risk of Total NO Production Costs*	2	4	8	2	4	8	2	4	8	2	4	8
10	Risiko Nilai Penjualan TBN *Risk of TBN Sales Value*	3	3	9	3	3	9	3	1	3	3	3	9
11	Risiko Nilai Penjualan NO *Risk of NO Sales Value*	2	1	2	3	1	3	3	1	3	3	1	3
12	Risiko Nilai Persediaan TBN *Risk of TBN Inventory Value*	3	5	15	3	5	15	3	5	15	3	5	15
13	Risiko Nilai Persediaan NO *Risk of NO Inventory Value*	3	4	12	3	4	12	3	4	12	3	4	12
14	Risiko Biaya SDM *Risk of HR Cost*	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2

Hasil identifikasi dan *monitoring* menunjukkan bahwa meski tidak terdapat level risiko yang ekstrim pada kebun Ajong Gayasan namun pada Triwulan IV terdapat 1 risiko yaitu Produktivitas Eksport TBN yang meningkat risikonya dari Level Sedang (8) menajdi Level Tinggi (12), sedangkan risiko yang lain cenderung tetap.

The identification and monitoring results show that although there is no extreme risk level in Ajong Gayasan Field but in the 4th Quarter there was 1 risk, i.e. TBN Export Productivity, which rose from Moderate Level (8) to High Level (12), while other risks tend to persist.

Kebun Klaten

No.	Nama Risiko *Risk Name*	Triwulan I *1st Quarter*			Triwulan II *2nd Quarter*			Triwulan III *3rd Quarter*			Triwulan IV *4th Quarter*		
		L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR
1	2	3	4	5	7	8	9						
1	Risiko Pencapaian Luas areal VBN (Ha) diatas Target *Risk of Above Target VBN Area Achievement (Ha)*	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4
2	Risiko Produksi export (Kg/Ha) VBN dibawah Target *Risk of Below Target VBN Export Procuction (Kg/Ha)*	3	5	15	3	5	15	3	5	15	3	5	15
3	Risiko Komposisi Kualitas VBN (NW) dibawah Target *Risk of Below Target VBN Quality Composition (NW)*	3	5	15	3	5	15	3	5	15	3	5	15
4	Risiko Total Biaya (Rp) dibawah Anggaran *Risk of Below Budget Total Costs (Rp)*	1	1	1	4	1	4	4	1	4	1	1	1
5	Risiko Total Biaya Produksi VBN (Rp) diatas Anggaran *Risk of Above Budget Total VBN Production Costs (Rp)*	2	2	4	3	2	6	3	2	6	2	2	4

No.	Nama Risiko *Risk Name*	Triwulan I *1st Quarter*			Triwulan II *2nd Quarter*			Triwulan III *3rd Quarter*			Triwulan IV *4th Quarter*		
		L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR	L	K	LR
7	Risiko Pendapatan Rp FIK (Rp) *Risk FIK Revenue (Rp)*	4	3	12	4	3	12	4	1	4	4	5	20
9	Risiko Nilai Persediaan VBN (Rp) diatas Target *Risk of Above Target VBN Inventory Value (Rp)*	3	5	15	3	5	15	2	2	4	3	5	15
10	Risiko Biaya SDM (Rp) diatas Anggaran *Risk of Above Budget HR Costs (Rp)*	2	2	4	2	1	2	3	1	3	2	2	4

Hasil identifikasi *monitoring* dan evalausi s.d Trwulan IV menunjukkan bahwa terdapat 1 risiko yang meningkat drastis (naik 8 poin) yaitu risiko Nilai penjualan VBN yang sebelumnya Tinggi (12) menjadi level Ekstrim. Hal tersebut disebabkan realisasi nilai penjualan VBN hanya Rp45.346 (dalam miliar) atau hanya 39% dari target Rp118.764 (dalam miliar).

Beberapa langkah mitigasi yang dllakukan oleh Kebun misalnya melakukan fermentasi dan sortasi ulang ataupun mengirimkan kembali contoh tembakau kepada pembeli, ternyata belum dapat optimal.

Dengan demikian, hingga Triwulan IV 2017, ketiga kebun tembakau, hanya Kebun Klaten yang mempunyai Level Risiko Ekstrim yang dapat menghambat sasaran RKAP secara signifikan yaitu Nilai Penjualan VBN, meski terdapat peningkatan level risiko pada beberapa risk register yang ada.

The identfication results of monitoring and evalution until the 4th Quarter shows that there was 1 risk which increased drastically (up 8 points) i.e. the risk of VBN Sales from previously High (12) to Extreme level. This was due to the realization of VBN sales value of only Rp. 45,346 (in Billion) or 39% of target of Rp. 118,764 (in Billion).

Some mitigation measures done by the Field for example fermentation and re-sorting or sending back tobacco samples to the buyer are apparently not yet optimal.

To conclude, until the 4th Quarter of 2017, of the three tobacco fields, only the Klaten Field that has Extreme Risk Level that can significantly impede RKAP targets, i.e. VBN Sales Value, although there is an increased risk level in some risk registers.

PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO

Perseroan telah melakukan *risk assessmen,* dan untuk meningkatkan manfaat manajemen risiko direkomendasikan agar:

1. Mengintegrasikan penerapan manajemen risiko dengan sistem manajemen yang lain, seperti: sistem penganggaran, manajemen kinerja Perseroan (KPI), sistem pengadaan barang/jasa, dan audit internal.
2. Melakukan reviu *risk register* secara berkala,
3. Evaluasi kelayakan *action plan* dengan mempertimbangkan analisa biaya dan manfaat.

EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi penerapan manajemen risiko dilakukan dengan tujuan untuk menilai tingkat kematangan *(maturity level)* penerapan manajemen risiko. Perseroan masih memulai pelaksanaan manajemen risiko dengan melakukan *risk assessment. U*ntuk meningkatkan manfaat manajemen risiko, beberapa rekomendasi adalah:

1. Menetapkan target kinerja pelaksanaan manajemen risiko baik di tingkat korporat maupun unit kerja.
2. Melakukan evaluasi secara periodik untuk menilai tingkat kematangan pelaksanaan manajemen risiko.

PENGEMBANGAN KE ARAH RISK BASE INTERNAL AUDIT (RBIA)

Risk asssessment yang telah dilakukan dapat dijadikan pijakan untuk melakukan pengembangan manajemen risiko dan perlu diintegrasikan dengan Bidang SPI dalam melakukan audit internal, atau dikenal dengan Audit Berbasis Risiko *(Risk Base Audit/RBA).*

Saat ini unit yang bertugas dalam pengelolaan manajemen risiko adalah Sekretaris Perusahaan.

DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF RISK MANAGEMENT

PTPN X had conducted the risk assessment, and to increase the benefits of risk management, it is recommended to:

1. Integrate risk management with other management systems, such as: budgeting system, corporate performance management (KPI), goods/services procurement system, and internal audit.
2. Conduct risk register review periodically,
3. Evaluate the feasibility of action plan by taking into account the cost and benefit analysis.

EVALUATION ON THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

Evaluation of risk management was conducted in order to assess the maturity level of risk management implementation. PTPN X still began to implement the risk management by conducting risk assessment, but to increase the benefits of risk management, its is recommended to:

1. Set performance targets of risk management at both the corporate and business unit level,
2. Conduct periodic evaluation to assess the maturity level of risk management.

DEVELOPMENT TOWARD RISK BASE INTERNAL AUDIT (RBIA)

Risk assessment that has been conducted can be made as the cornerstone to develop risk management and should be integrated with the SPI in conducting internal audit, known as Risk Base Audit (RBA).

Currently, the unit in charge of risk management is the Corporate Secretary.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan Perseroan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan Perseroan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program Perseroan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun Direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan Perseroan yang lebih efektif pula.

Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai pengatur sumber daya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian (*gains*) yang maksimal pula dengan pendekatan perancangan yang menggunakan asas *Cost-Benefit*.

Tujuan penerapan SPI dalam Perseroan adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dari prosedur, laporan keuangan yang dihasilkan Perseroan dapat dipercaya dan kegiatan Perseroan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan berusaha untuk menghindari risiko dari penerapan sistem.

Elemen Sistem Pengendalian Internal

1. Lingkungan Pengendalian
   Lingkungan Pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian.
2. Sistem Akuntansi
   Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen.
3. Prosedur Pengendalian
   Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai.

   Secara umum prosedur pengendalian yang baik terdiri dari:
   a. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi.
      Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.

      Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi

Internal Control System is a business system business or social system conducted by the Company consisting of organizational structure, methods and measures to maintain and direct the Company's path to progress in accordance with the Company's objectives and programs and to encourage efficiency and compliance with management policies.

A reliable and effective Internal Control System can provide the right information for both managers and Board of Directors to make the right decisions and policies to achieve the Company's objectives more effectively.

Internal Control System serves as a regulator of existing resources to be functioned optimally in order to obtain maximum gains with design approach using Cost-Benefit principle.

The purpose of SPI implementation in the Company is to avoid any deviations from procedures, financial statements generated by the Company to be trusted and the Company's activities to be in line with applicable laws and regulations. This indicates that the Company seeks to avoid risks from system implementation.

Elements of Internal Control System

1. Control Environment
   Control Environment of an organization emphasizes a variety of factors simultaneously affecting control policies and procedures

2. Accounting System
   Accounting system is not only used to generate financial statements but also result in management control.

3. Control Procedures
   Control procedures are policies and rules regarding employee's behavior that are created to ensure that management control objectives can be achieved.

   In general good control procedures consist of:

   a. Proper use of authority to perform an activity or transaction.
      Within the organization, each transaction only takes place on the basis of authorization from an official who has the authority to approve the transaction.

      Therefore, the system that regulates the division of authority to authorize the implementation of

atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan audit trail, karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain.

b. Pembagian tugas.
Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan). Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

Dengan pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan, catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.

c. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi.(biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara tepat).

d. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan.
Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan Perseroan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data/informasi Perseroan.

e. Pengecekan independen terhadap kinerja.
Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan (dicek) secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekkan inni harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen (selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi dan unit fungsi pencatatan) untuk menjaga objektivitas pemeriksaan.

4. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)
Semua organisasi memiliki risiko, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis.

each transaction must be made in the organization. The division of authority will ease the audit trail, as the authorization limits the transaction activity to only selected people. Authorization prevents the misappropriation of transactions to others.

b. Division of tasks.
Division of tasks separates operation and storage functions from accounting function (recording). And a function should not perform all stages of a transaction.

With the separation of operation and storage functions from the recording function, the prepared accounting records may reflect actual transactions taking place in the operation and storage functions. If all functions are unified, they will open up the possibility of recording transactions that are not actually occurring, so the resulting accounting information is untrustworthy, and as a result the organization's wealth is not guaranteed to be secure.

c. Preparation and use of adequate documents and records.
Procedures shall include design and use of adequate documents and records to help ensure adequate recording of transactions and events. Subsequently adequate documents and records will provide accurate and reliable information about the organization's wealth, debt, income and expenses (usually accompanied by appropriate use of authority).

d. Adequate security on assets and records.
Adequate security includes restrictions on access to depositary of Company's assets and records to avoid the occurrence of theft of Company's assets and data/information.

e. Independent checking on performance.
All records of existing assets must be periodically checked against existing physical assets. These checking shall be performed by an independent organizational unit (other than the storage function unit, operating function unit and recording function unit) to maintain the objectivity of the checking.

4. Risk Assessment
All organizations have risks, under whatever circumstances the risk must exist in an activity, whether business-related activities (profit and nonprofit) or non-business.

Suatu risiko yang telah di identifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya.

5. Informasi dan komunikasi
   Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern Perseroan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan *monitoring* diperlukan oleh manajemen Winnebago pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Perseroan.

   Informasi juga diperlukan dari pihak luar Perseroan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

An identifiable risk can be analyzed and evaluated so as to estimate the intensity and actions that can minimize it.

5. Information and communication
   Information and communication are important elements of the Company's internal control. Information on the control environment, risk assessment, control and monitoring procedures are required by the Winnebago management operating guidelines and ensuring compliance with legal reporting and regulations applicable to the Company.

   Information is also required from parties outside the Company. Management can use this type of information to assess external standards. Laws, events and conditions affecting external decision-making and reporting.

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perseroan dalam menjalin hubungan dengan Pemangku Kepentingan, baik dari internal seperti karyawan maupun dari eksternal seperti konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perseroan membaginya ke dalam 4 (empat) aspek.

Corporate Social Responsibility (CSR) becomes a platform for the Company in establishing relationship with stakeholders, both from internal such as employees as well as from external such as consumers. With regard to CSR implementation, the Company divides it into 4 (four) aspects.

corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup *Corporate Social Responsibility related to environment*	*corporate social responsibility* yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja *Corporate Social Responsibility related to employment, occupational health and safety*	*corporate social responsibility* yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan *Corporate Social Responsibility related to social and community development*	*corporate social responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen *Corporate Social Responsibility related to responsibility to product/consumer*

Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perseroan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

More about the implementation of CSR by the Company can be seen in the chapter of Corporate Social Responsibility in this Annual Report.

Perkara Penting
Important Issues

Permasalahan Hukum

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perseroan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut,

Litigation

Legal problems and/or issues faced by the Company, its subsidiaries and members of Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2017 are as follows,

Permasalahan Hukum *Litigation*	2017		2016	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap *Settled and has permanent legal force*	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian *In process*	8	-	6	-
Jumlah *Total*	8	-	6	-

Berikut disampaikan permasalahan hukum yang terdapat di tahun 2017, termasuk risiko dan pengaruhnya terhadap kondisi Perseroan, serta tindak lanjut yang diambil Perseroan.

The following are legal issues occurred in 2017, including risks and impacts on the Company's condition, as well as the follow-up actions taken by the Company.

Pihak yang Berperkara *Parties Involved*	Pokok Perkara *Case Profile*	Status Perkara *Case Status*
Perseroan (tergugat) dan PT Saraswati Anugerah Makmur (penggugat) *The Company (defendant) and PT Saraswati Anugerah Makmur (plaintiff)*	Perkara Perdata No. 128/Pdt G/2014/PN, Mks gugatan intervensi PTPN X atas gugatan PT Saraswati Anugerah Makmur kepada PTPN XIV berkaitan dengan tagihan tunggakan pembayaran pupuk. *Civil Case No. 128/Pdt G/2014/PN, Mks PTPN X's intervention lawsuit on PT Saraswati Anugerah Makmur's lawsuit to PTPN XIV regarding the arrears of fertilizer payment.*	Dalam Putusan PN Kepentingan PTPN X dalam permohonan intervensi telah terpenuhi dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar yaitu PTPN X tidak ikut serta mengganti atau mengcover hutang senilai Rp27.671.123.704,- tersebut dan tidak dilakukannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Pabrik Gula Bone, Camming, dan Takalar. Saat ini sedang proses banding. *In the PN Verdict, the interest of PTPN X in the request for intervention has been fulfilled in the decision of the Makassar District Court that PTPN X did not participate in replacing or covering the debt of Rp.27,671,123,704 and the absence of confiscation (conservatoir beslag) of Bone, Camming, and Takalar Sugar Mills. Currently in in the appealing process.*
Perseroan (tergugat) dan PT Attadipa Elektro (penggugat) *The Company (defendant) and PT Attadipa Elektro (plaintiff)*	Perkata Perdata No. 45/Pdt.G/2015/PN.Mks yaitu gugatan wanprestasi dari PT Attadipa Elektro kepada PTPN XIV (Tergugat I), PT RNI (Tergugat II), dan PTPN X (Tergugat III) atas perjanjian antara PT Attadipa Elektro dengan PTPN XIV PG Takalar. *Civil Case No. 45/Pdt.G/2015/PN.Mks, infringement lawsuit from PT Attadipa Elektro to PTPN XIV (Defendant I), PT RNI (Defendant II) and PTPN X (Defendant III) on an agreement between PT Attadipa Elektro and PTPN XIV PG Takalar.*	Putusan Pengadilan Negeri Makassar menyatakan Tergugat I, I, dan III untuk membayar hutang pokok sejumlah Rp. 343.530.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah). Saat ini PTPN X mengajukan banding. *Makassar District Court Verdict declared that Defendant I, I, and III to repay the principal amount of Rp. 343.530.000, - (three hundred forty three million five hundred thirty thousand Rupiah). Currently PTPN X appealed.*

Pihak yang Berperkara *Parties Involved*	**Pokok Perkara** *Case Profile*	**Status Perkara** *Case Status*
Perseroan (tergugat) dan H. Miskan dan Isticharah (penggugat) *The Company (defendant) and H. Miskan and Isticharah (plaintiff)*	Perkara Perdata yaitu gugatan wanprestasi dari PTPN X kepada petani bernama H. Miskan dan Isticharah atas tunggakan kredit KKP-E No. Perkara 56/Pdt.G/2014/JMB melawan PTPN X. *Civil Case, infringement lawsuit from PTPN X to farmer named H. Miskan and Isticharah on KKP-E loan arrears, Case No. 56/Pdt.G/2014/JMB against PTPN X.*	Putusan Pengadilan Negeri PTPN X menang. Pihak H Miskan mengajukan banding dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 650/PDT/2015/PT.SBY Tanggal 17 Mei 2016 menyatakan menguatkan putusan PN Jombang. Saat ini sedang proses kasasi. *PTPN X has won in the District Court. H Miskan appealed and East Java High Court Verdict No. 650/PDT/2015/PT.SBY dated May 17, 2016 strengthened PN Jombang Verdict. Currently is in cassation process.*
Perseroan (penggugat) dan Rosid Pak Amria, dkk (tergugat) *The Company (defendant) and Rosid Pak Amria, et al (plaintiff)*	Perkara Perdata Pengadilan tingkat pertama No. 41/Pdt.G/2014/PN.Jr, gugatan PTPN X atas tanah aset di Dusun Langsepan, Desa Rowo Indah, Kec. Ajong, Kab. Jember kepada Rosid Pak Amria, dkk (Tergugat). Yayuk Puji Rahayuningsih mengajukan gugatan intervensi yang menyatakan bahwa ia berhak atas Tanah Sengketa. *First Class Civil Case No. 41/Pdt.G/2014/PN.Jr, PTPN X lawsuit over land assets in Langsepan, Rowo Indah Village, Ajong District, Jember Regency, to Rosid Pak Amria, et al (Defendant). Yayuk Puji Rahayuningsih filed an intervention suit stating that she was entitled to the Land of Dispute.*	Putusan Pengadilan Negeri Jember menyatakan gugatan PTPN X dinyatakan tidak dapat diterima atau Putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO). PTPN X mengajukan banding dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 25/PDT/2015/PT.SBY tanggal 10 Maret 2015 menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Putusan Kasasi Nomor 1477 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2017 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. *Jember District Court declared that PTPN X's lawsuit was unacceptable or Verdict niet ontvankelijke verklaard (NO). PTPN X filed an appeal and Surabaya High Court Verdict No. 25/PDT/2015/PT.SBY dated March 10, 2015 corroborated the district court verdict. The Cassation Verdict No. 1477 K/Pdt/2016 dated August 16, 2017 corroborated Surabaya High Court Verdict.*
Perseroan (tergugat) dan Sarideh (penggugat) *The Company (defendant) and Sarideh (plaintiff)*	Perkara perdata Pengadilan Tingkat Pertama No. Reg.N.71/Pdt.G/2017/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya, gugatan dengan obyek sengketa aset PTPN X Jalan Rajawali No. 29, Surabaya oleh warga bernama Sarideh (Penggugat). *First Class Civil Case No. Reg.N.71/Pdt.G/2017/PN.Sby in Surabaya District Court, lawsuit with PTPN X asset at Jalan Rajawali No. 29, Surabaya as object of dispute by a resident named Sarideh (Plaintiff).*	Putusan Pengadilan Negeri tanggal 7 Desember 2017 menyatakan PTPN X menang, hingga saat ini belum ada upaya hukum dari pihak lawan. *District Court Verdict dated December 7, 2017 stated that PTPN X won, until now there has been no legal action from the opponent.*
Perseroan (tergugat) dan Detty Pesik, dkk (rekanan PTPN XIV) (penggugat) *The Company (defendant) and Detty Pesik, et al (partner of PTPN XIV) (plaintiff)*	Perkara perdata Pengadilan Tingkat Pertama No. 38/Pdt.G/2017/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar, gugatan dengan pihak antara Detty Pesik, dkk (rekanan PTPN XIV) sebagai Penggugat melawan PTPN XIV (Tergugat I), PTPN X (Tergugat II). Gugatan adalah perkara penagihan utang oleh rekanan PTPN XIV kepada PTPN XIV PG Takalar. *First Class Civil Case No. 38/Pdt.G/2017/PN.Mks in Makassar District Court, a lawsuit with Detty Pesik, et al (partner of PTPN XIV) as Plaintiff against PTPN XIV (Defendant I), PTPN X (Defendant II). The lawsuit is a debt collection case by PTPN XIV partner to PTPN XIV PG Takalar.*	Saat ini sedang proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar. *Currently, the trial process is ongoing in Makassar District Court.*

Pihak yang Berperkara *Parties Involved*	Pokok Perkara *Case Profile*	Status Perkara *Case Status*
Perseroan (tergugat) dan Adi Baroto, dkk (penggugat) *The Company (defendant) and Adi Baroto, et al (plaintiff)*	Perkara No. 220/Pdt.G/2017/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya dengan pihak Adi Baroto, dkk (Ahli Waris Adi Juwono) sebagai Penggugat melawan PTPN X sebagai Tergugat. Isi gugatan adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan penyerahan santunan hari tua orang tua Penggugat (Adi Juwono B.Sc) dan pemberian kepastian pembelian rumah dinas Jl Joyoboyo No. 29 Surabaya. *Case No. 220/Pdt.G/2017/PN.Sby at Surabaya District Court with Adi Baroto, et al (Heir of Adi Juwono) as Plaintiff against PTPN X as Defendant. The content of the lawsuit is about an act against the law with the demands of surrendering the pension allowance of the Plaintiff (Adi Juwono B.Sc) and the assurance of the purchase of official residence at Jl. Joyoboyo no. 29 Surabaya.*	Putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan tidak berwenang mengadili. Saat ini Ahli Waris Adi Juwono mengajukan banding. *Decision by the Surabaya District Court declared of having no authority to hear. Currently Heir of Adi Juwono is filing an appeal.*
Perseroan (penggugat) dan Adi Baroto, dkk (tergugat) *The Company (defendant) and Adi Baroto, et al (plaintiff)*	Perkara Perdata Tingkat Pertama No. 300/Pdt.G/2017/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya dengan pihak PTPN X sebagai Penggugat dan pihak Adi Baroto, dkk sebagai Tergugat. Isi gugatan adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum Para Tergugat karena telah menempati rumah dinas Perusahaan tanpa alas hak yang sah. *First Class Civil Case No. 300/Pdt.G/2017/PN.Sby in Surabaya District Court with PTPN X as Plaintiff and Adi Baroto, et al as Defendant. The content of the lawsuit is about an act againts the law of the Defendants for occupying the Company's official house without a legal basis.*	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 November 2017 menyatakan PTPN X menang, hingga saat ini belum ada upaya hukum dari pihak lawan. *Surabaya District Court Decision dated November 29, 2017 stated that PTPN X won, until now there has been no legal action from the opponent.*

Sanksi Administratif

Perseroan tidak mendapatkan adanya sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait pada tahun 2017.

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Tidak terdapat laporan di tahun 2017 atas aktivitas Perseroan yang mencemari lingkungan.

Administrative Sanction

The Company did not find any administrative sanctions imposed on the Company, its subsidiaries, members of Board of Commissioners and Board of Directors, by the relevant authorities in 2017.

Report on Company's Activities Polutting the Environment

There was no report in 2017 on Company's activities polluting the environment.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Company's Data and Information Access

Sesuai asas transparansi dalam penerapan GCG dan *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), transparansi dan tata kelola keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar bagi Emiten seperti Perseroan untuk menginformasikan data dan informasi yang layak bagi pemegang saham, publik dan pemangku kepentingan. Selain bagian dari pedoman pelaksanaan GCG, transparansi dan tata kelola keterbukaan informasi akan mengirimkan pesan atas data dan informasi yang akurat atas perkembangan aktivitas operasional dan proses usaha Perseroan; yang kemudian akan berimbas pada profil saham Perseroan di pasar modal serta citra Perseroan di masyarakat luas.

Korespondensi dan Laporan Berkala

Informasi keuangan dan non keuangan dari Perseroan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perseroan. Informasi dipaparkan melalui laporan berupa:

1. Laporan Manajemen triwulan I, II dan III tahun 2017, *Unaudited* 2016 dan *audited* tahun 2016.
2. Laporan Manajemen Perseroan bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober dan November 2017.
3. Pelaporan kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Keterbukaan informasi terkait *corporate action* dan *public expose* melalui *website*, majalah eksternal.
5. Laporan Tahunan 2017.

Di bawah ini disajikan korespondensi Perseroan selama tahun 2017.

In accordance with the principle of transparency in GCG implementation and the Roadmap of Indonesian Corporate Governance released by Financial Services Authority (OJK), transparency and information disclosure governance become one of the pillars for Issuers such as the Company to inform appropriate data and information for shareholders, public and stakeholders. In addition to be parts of GCG implementation guidelines, transparency and information disclosure governance will send messages on accurate data and information on the development of the Company's operational activities and business processes; which will then affect the Company's stock profile in the capital market as well as the Company's image in the community.

Correspondence and Periodic Reports

The financial and non-financial information of the Company have been prepared and reported in a transparent manner to the shareholders, stakeholders and other institutions required. Information is reported on time target, presented completely and accurately, up-to-date, fully and adequately in accordance with the procedures, types and scopes as stipulated in the provisions on Transparency of Company's Financial Condition. Information presented through the report is in the form of:

1. Management Reports of quarter I, II and III in 2017, Unaudited in 2016 and audited in 2016.
2. Corporate Management Reports for January, February, April, May, July August, October and November 2017.
3. Reporting to the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority.
4. Disclosure of information related to corporate action and public expose through website, external magazines.
5. 2017 Annual Report.

Below is the Company's correspondence during 2017.

Korespondensi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia *Correspondence with Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange*
OJK 6 surat dan BEI 1 surat *OJK 6 letters and BEI 1 a letter*
Korespondensi dengan Kementerian BUMN *Correspondence with Ministry of SOE*
25 surat *25 letters*
Korespondensi dengan Holding Perkebunan *Correspondence with Plantation Holding*
115 surat *115 letters*

Situs Web Perseroan

Sesuai peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik yang baru dirilis, keberadaan situs web memiliki peran yang signifikan atas tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perseroan akan memberikan manfaat kepada pemegang saham, publik dan pemangku kepentingan, dimana hal ini akan memungkinkan penyampaian informasi tidak terbatas yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah dan membantu para pemegang saham dan pemangku kepentingan serta pihak lain sebelum mengambil keputusan.

Perseroan telah memiliki situs web elektronik resmi dengan alamat www.ptpn10.com. Situs web ini menyediakan konten seputar informasi Perseroan yang komprehensif dan berguna bagi akses informasi dari pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Company Website

In accordance with OJK regulation No. 8/POJK.04/2015 on the Website of Issuer Public Company that was newly released, the existence of website has a significant role in information disclosure governance. Disclosure and availability of information on the Company's website will provide benefits to shareholders, public and stakeholders, which will enable the delivery of unlimited information that can be done quickly, precisely, inexpensively and assist shareholders, stakeholders and other parties before making decisions.

The Company already has an official electronic website at www.ptpn10.com. The website provides content about Company's information that are comprehensive and useful to be accessed by shareholders and stakeholders.

Majalah PTPN X Magz

Perseroan memiliki majalah digital dengan nama "PTPN X Magz" yang terbit berkala setiap 3 (tiga) bulannya. PTPN X Magz berisi informasi terkini atas kegiatan Perseroan per triwulan, dengan pengelolaan konten majalah sesuai dengan standar jurnalistik yang dapat meraih pembaca yang lebih luas. Pelaksanaan PTPN X Magz di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

PTPN X Magz Magazine

The Company has digital magazines under the name of "PTPN X Magz" that is published periodically every 3 (three) months. PTPN X Magz contains up-todate information on the Company's activities quarterly, with magazine content management in accordance with journalistic standards that can reach a wider audience. PTPN X Magz in 2017 is as follows:

Edisi *Edition*	**Judul Edisi** *Edition Title*
Vol. 023	Semangat Baru Tiga PG Dari Timur
Vol. 024	Strategi Baru Musim Giling 2017
Vol. 025	Upaya Capai 200 Ton Per Hektar
Vol. 026	Gebrakan Anak Perusahaan di 2018

Event Internal dan Eksternal

Perseroan melakukan *event* internal dan eksternal dalam rangka membina hubungan dengan pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan eksternal terkait industri perkebunan, industri gula dan industri tembakau, maupun pemangku kepentingan internal seperti karyawan. Gelaran *event* ini menjadi penting, mengingat industri yang dijalankan Perseroan erat kaitannya dengan kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat luas. Sebanyak 90 kegiatan event internal dan eksternal yang dilakukan di sepanjang tahun 2017, diantaranya hearing dengan Gubernur Jatim tentang kesiapan giling tahun 2017, kunjungan PT Gendhis

Internal and External Event

The Company conducts internal and external events in order to foster relationships with stakeholders, including external stakeholders related to the plantation, sugar and tobacco industries, as well as internal stakeholders such as employees. These events become important, considering that the industry run by the Company is closely related to the interests of the government and the interests of wider community. A total of 90 internal and external event events were held throughout 2017, including hearing with the Governor of East Java on milling readiness in 2017, visit of PT Gendhis Multi Manis, socialization of core sampler to farmers

Multi Manis, sosialisasi *core sampler* kepada petani dan karyawan, pelatihan PROPER, kunjungan Dewan Ketahanan Nasional ke PG Watoetoelis, PG Gempolkrep, PG Pesantren Baru, PG Ngadirejo, dan PT Enero, dan kegiatan lainnya.

Hubungan Media

Perseroan membangun hubungan dengan media dengan harapan dapat menyampaikan informasi yang komprehensif terkait kemajuan pengelolaan operasi dan bisnis Perseroan kepada khalayak yang lebih luas. Hubungan media yang dilakukan di tahun 2017 mencakup konferensi pers, kunjungan media, dan siaran pers, seperti yang terlihat di bawah ini.

and employees, PROPER training, National Security Council visit to PG Watoetoelis, PG Gempolkrep, PG Pesantren Baru, PG Ngadirejo, and PT Enero, and other activities.

Media Relations

The Company builds relationships with the media in the hope of delivering comprehensive information on the progress of operational and business management of the Company to a wider audience. Media relations conducted in 2017 include press conference, media visit and press release, as seen below.

Siaran Pers Tahun 2017 / 2017 Press Conference

Tanggal Terbit *Date of Release*	Judul *Title*	Media
27 Juli 2017 *July 27, 2017*	PTPN X Fokus Tingkatkan Produktivitas Lahan *PTPN X Is Focused to Improve Land Productivity*	Radar Kediri www.beritajatim.com www.kanalindonesia www.rri.co.id
31 Agustus 2017 *August 31, 2017*	PTPN X Tak Lakukan Pungli *There Are No Illegal Charges in PTPN X*	Jawa Pos
20 Oktober 2017 *October 20, 2017*	PTPN X Jalin Kerjasama dengan NEC *PTPN X Entered Into Cooperation with NEC*	Surya Bisnis Indonesia Wartaekonomi.com Bisniskini.com Beritajatim.com Tribunnews.com
04 Desember 2017 *December 4, 2017*	PTPN X Peduli Bencana Bali dan Pacitan *PTPN X Cares for Natural Disasters in Bali and Pacitan*	Beritajatim.com Sindonews.com Tribunnews.com Bumntoday.com Antaranews.com

Kunjungan Media Tahun 2017 / 2017 Media Visit

Tanggal *Date*	Media
6 Februari 2017 *February 6, 2017*	Koran Sindo
17 Februari 2017 *February 17, 2017*	Lensa Indonesia
23 Februari 2017 *February 23, 2017*	www.kabarbisnis.com
24 Februari 2017 *February 24, 2017*	Radar Surabaya
10 November 2017 *November 10, 2017*	Surya
13 Desember 2017 *December 13, 2017*	Antara

Akses Publik, Konsumen dan Hubungan Investor

Kepada publik dan konsumen, Perseroan memberikan keterbukaan akses melalui jalur informasi yang telah disediakan seperti yang tertera di bawah ini.

Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara X
Jl. Jembatan Merah No. 3 – 11
Surabaya 60175
Jawa Timur, Indonesia
Tel: +62 31 3523143 (hunting)
Situs Web: www.ptpn10.com
E-mail: contact@ptpn10.co.id

Public Access, Consumer and Investor Relations

To the public and consumers, the Company provides access disclosure through the information channels provided below.

Head Office of PT Perkebunan Nusantara X
Jl. Jembatan Merah No. 3 – 11
Surabaya 60175
East Java, Indonesia
Tel: +62 31 3523143 (hunting)
Website: www.ptpn10.com
E-mail: contact@ptpn10.co.id

Kode Etik: Pedoman Perilaku Perusahaan

Code of Ethics: Company's Code of Conduct

Keberadaan Kode Etik Sebagai Pedoman Perilaku

Salah satu aset yang sangat berharga yang dimiliki Perseroan adalah Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas yang tinggi. Agar insan Perseroan dapat memiliki integritas yang tinggi dan mencerminkan Nilai-nilai korporasi yang dimiliki Perseroan, Perseroan mengeluarkan Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* yang telah disahkan dan diperbaharui melalui Surat Keputusan Direksi No. XX-SURKP/16.068 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Perkebunan Nusantara X. Penetapan Pedoman Perilaku ini menjadi sebuah pernyataan umum tertulis yang menggambarkan standar etika usaha Perseroan yang harus dilaksanakan oleh seluruh insan Perseroan dalam menjalin hubungan dengan sesama insan Perseroan, pelanggan, pemasok, pemegang saham,pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Perilaku tersebut berlaku bagi seluruh insan Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Pedoman Perilaku dikembangkan berdasarkan filosofi bisnis dan budaya kerja Perseroan , peraturan perundang-undangan, praktik umum (*common practices*) dalam dunia usaha serta peraturan internal Perseroan yang terkait, termasuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi dan Serikat Pekerja serta pedoman tata tertib kerja karyawan.

Pedoman Perilaku tidak dimaksudkan untuk mengganti Pedoman tata tertib kerja karyawan ataupun peraturan/ pedoman sejenis lainnya, tetapi lebih ditujukan untuk menyempurnakan atau bersifat saling melengkapi antara satu dan lainnya. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku tetap mengacu pada pedoman tata tertib kerja karyawan serta berdasarkan kebijakan Direksi.

Existence of Code of Ethics as Code of Conduct

One of the most valuable assets of the Company is Human Resources with high integrity. In order for the Company's personnel to have high integrity and reflect the Company's corporate values, the Company issued Code of Conduct that has been ratified and updated through Board of Directors Decree No. XX-SURKP/16.068 dated August 19, 2016 on Code of Conduct and Code of Corporate Governance of PT Perkebunan Nusantara X. The stipulation of the Code of Conduct is a written statement describing the Company's business ethics standards that must be implemented by all of the Company's personnel in establishing relationships with other Company's personnel, customers, suppliers, shareholders, government, communities and other stakeholders.

The Code of Conduct applies to all of the Company's personnel from Board of Commissioners, Board of Directors to all employees. The Code of Conduct is developed based on the Company's business philosophy and work culture, laws and regulations, common practices in the business world as well as the related internal regulations of the Company, including the Collective Labor Agreement (PKB) between Board of Directors and Labor Union and employee's working guidelines.

The Code of Conduct is not meant to replace employes' working guidelines nor any similar regulations, but it is aimed to refine or to complete existing regulations. The rule regarding sanctions due to violation of code of conduct still refers to the employees' working guidelines and based on Board of Directors' ruling.

Visi, Misi, Filosofi Bisnis dan Budaya Kerja Sebagai Landasan Utama

Vision, Mission, Business Philosophy and Work Culture as Main Platform

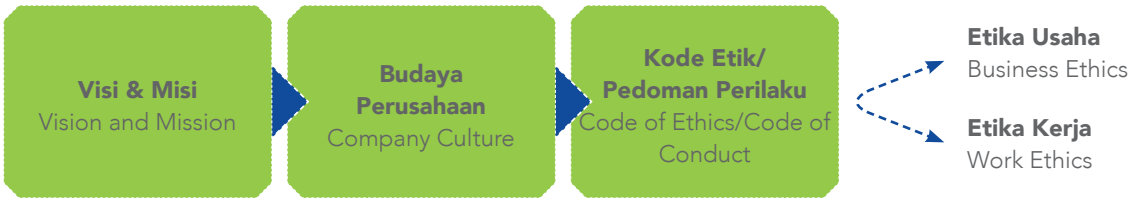

Perseroan menetapkan Visi, Misi, Filosofi Bisnis dan Budaya Kerja sebagai sebuah gambaran tujuan besar perjalanan Perseroan ke depan, dan upaya yang akan dilakukan Perseroan untuk dapat mencapai tujuan besar tersebut. Visi, Misi, Filosofi Bisnis dan Budaya Kerja Perseroan menjadi tuntunan yang berfungsi sebagai koridor dan batasan sekaligus pendorong bagi insan Perseroan untuk melakukannya dengan penuh integritas, sehingga apabila tuntunan ini dilakukan oleh seluruh insan Perseroan, akan dapat membawa pencapaian visi Perseroan.

The Company establishes Vision, Mission, Business Philosophy and Work Culture as an overview of the great goals of the Company's future journey and the efforts that will be undertaken to achieve such great goals. The Company's Vision, Mission, Business Philosophy and Work Culture become guidance that serves as a corridor and limitation as well as a driving force for the Company's personnel to do so with integrity so that if the guidance is performed by all the Company's personnel, it will be able to bring the achievement of the Company's vision.

Visi
Vission

Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka yang berwawasan lingkungan

To become a leading environmentally sound agro-industry company.

Misi
Mission

Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tebu dan tembakau berdaya saing tinggi di pasar domestik dan internasional, yang berwawasan lingkungan.
Committed to produce highly competitive and environmentally sound products of sugar cane and tobacco for domestic and international market.

Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui optimalisasi dan efisiensi di segala bidang.
Committed to keep the growth and continuity of the business by doing optimalization and efficiency in every aspects.

Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan pemangku kepentingan melalui kepemimpinan, inovasi dan kerjasama tim serta organisasi yang profesional.
Dedicated to always improve corporate values for the satisfaction of stakeholders through leadership, innovation teamwork, and professional organization.

ProViSI

Profesionalisme
Professionalism

Senantiasa bekerja dengan dedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Always work with high dedication and full responsibility based on elevated competencies to pursue the best performance.

Visioner
Visionary

Senantiasa memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat peluang kedepan serta dapat berpikir diluar kebiasaan.

Always have a broad perspective and able to see future opportunities and to think outside of the box.

Integritas
Integrity

Senantiasa bertindak obyektif, adil dan konsisten sesuai dengan pedoman perilaku dan pedoman tata kelola perusahaan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Always act in an objective, fair and consistent manner in accordance with code of conduct and code of governance by upholding honesty and commitment.

Sinergi
Synergy

Senantiasa berkolaborasi secara produktif dan berkualitas dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Always conduct high quality collaboration productively with all internal and external stakeholders.

Budaya kerja yang dianut adalah "Profesional, Produktif dan Pembelajar (3P)".

The corporate culture is "Professional, Productive and Learner (3P)".

3P

PROFESIONAL — Professional

PRODUKTIF — Productive

PEMBELAJAR — Learner

Isi Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku atau Kode Etik Perseroan menjelaskan kebijakan berperilaku di Perseroan, jenis-jenis pelanggaran, mekanisme pengaduan pelanggaran maupun sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Kebijakan dalam Pedoman Perilaku mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perseroan, individu jajaran Perseroan maupun pihak lain yang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan.

Isi materi Pedoman Perilaku terdiri dari 2 (dua) elemen penting, yaitu Etika Kerja dan Etika Usaha. Etika Kerja menjelaskan sikap dan perilaku antar insan Perseroan, baik sebagai atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Sedangkan Etika Usaha menjelaskan bagaimana insan Perseroan beretika, bersikap dan bertindak dalam menjalin hubungan usaha dan interaksi dengan pemangku kepentingan.
Dalam Etika Kerja diatur mengenai:
1. Penerapan filosofi bisnis dan budaya kerja
2. Loyalitas kepada Perseroan
3. Penggunaan kewenangan dan jabatan
4. Benturan kepentingan (*conflict of interest*)
5. Gratifikasi dan suap
6. Jamuan bisnis
7. Biaya manajemen (*management expenses*)
8. Pemeliharaan lingkungan Perseroan
9. Penghargaan terhadap keberagaman pribadi
10. Perlindungan aset dan informasi
11. Pengawasan internal
12. Integritas pelaporan
13. Kesadaran terhadap biaya
14. Aktivitas politik
15. Pemeliharaan nama baik Perseroan.

Sedangkan dalam Etika Usaha diatur tentang:
1. Penerapan *Good Corporate Governance*
2. Hubungan dengan karyawan
3. Hubungan dengan petani (Asosiasi Petani Tebu Rakyat/ APTR)
4. Hubungan dengan pemegang saham
5. Hubungan dengan pelanggan
6. Hubungan dengan pemasok
7. Hubungan dengan mitra usaha/investor
8. Hubungan dengan kreditur
9. Hubungan dengan aparatur pemerintah
10. Hubungan dengan masyarakat
11. Hubungan dengan media massa

Content of Code of Conduct

The Company's Code of Conduct explains the behavior policy inside the Company, types of violation, reporting mechanism for violation as well as sanctions for the violation. The policy within the Code of Conduct regulates matters that are the responsibilities of the Company, individuals of the Company's echelon or other parties conducting business with the Company.

The content of Code of Conduct consists of two core elements, which are Work Ethics and Business Ethics. Work Ethics explains about the attitude and behavior between each Company's personnel, as superiors, workmates or subordinates. Business Ethics explains the ethics and how each Company's personnel behaves and acts in commencing every business relations and interactions with stakeholders.
Work Ethics regulates in regards of:
1. Application of business philosophy and work culture
2. Loyalty to the Company
3. Use of authority and position
4. Conflict of interests
5. Gratifications and bribes
6. Business treats
7. Management expenses
8. Maintenance of Company's environments
9. Appreciation towards personal diversity
10. Protection of assets and information
11. Internal supervision
12. Integrity of reporting
13. Cost awareness
14. Political activity
15. Safeguarding of Company's reputation

While Business Ethics regulates:
1. Good Corporate Governance Implementation
2. Relations with employees
3. Relations with farmers (Sugar Cane Farmers Association/ APTR)
4. Relations with shareholders
5. Relations with customers
6. Relations with suppliers
7. Relations with business partner/investor
8. Relations with creditors
9. Relations with government officials
10. Relations with the public
11. Relations with the media

Penyebaran Pedoman Perilaku Kepada Karyawan

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh atas Pedoman Perilaku yang dimiliki, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialiasi Pedoman Perilaku kepada seluruh jajaran Perseroan, Pelanggan dan mitra kerja secara berkala melalui pendistribusian buku *Code of Conduct* kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan.
2. Sosialisasi Pedoman Perilaku kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan, bekerja sama dengan konsultan independen serta melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman kepada jajaran Perseroan, baik pada masa orientasi maupun masa bekerja.

Upaya Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku

1. Seluruh karyawan Perseroan, apapun tingkatannya diwajibkan menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku untuk diterapkan secara konsisten dan penuh tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pernyataan kepatuhan tersebut setiap tahun diperbarui dan dijadikan sebagai salah satu persyaratan kelanjutan hubungan kerja di Perseroan.
2. Manajemen memberikan contoh keteladanan kepada bawahan dan sesama rekan kerja tentang bagaimana harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pedoman Perilaku.
3. Mengenakan sanksi secara tegas dan konsisten atas terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku.

Lampiran Draf Form Surat Pernyataan Kepatuhan oleh Karyawan dalam Kode Etik PTPN X

Dissemination of Code of Conduct to Employees

The Company is committed to implement effective and thorough socialization of the Code of Conduct owned, with the following steps:

1. Socialize the Code of Conduct to all levels in the Company, customers and work partners routinely through the dissemination of Code of Conduct book to all levels of management and employees.

2. Socialization of Code of Conduct to all levels of management and employees, cooperating with independent consultants and evaluating the achievement or understanding to all levels of the Company, both during orientation period or during the working period.

Code of Conduct Implementation and Enforcement

1. Every employee, regardless of level, is obliged to sign a letter of statement asserting their obedience to the Code of Conduct to be applied consistently and responsibly in every duty given. The statement will be annually renewed and will be used as one of the conditions for continous employment.

2. Management will act as a role model to show its subordinates and co-workers on how to behave and act according to the Code of Conduct.

3. Deliver strict and consistent sanctions on every violation of the Code of Conduct.

Supplement of Statement of Compliance Form by Employees in Code of Ethics of PTPN X

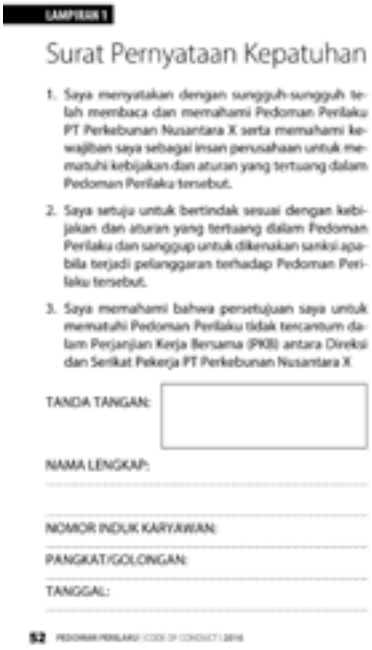

LAMPIRAN 1

Surat Pernyataan Kepatuhan

1. Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh telah membaca dan memahami Pedoman Perilaku PT Perkebunan Nusantara X serta memahami kewajiban saya sebagai insan perusahaan untuk mematuhi kebijakan dan aturan yang tertuang dalam Pedoman Perilaku tersebut.
2. Saya setuju untuk bertindak sesuai dengan kebijakan dan aturan yang tertuang dalam Pedoman Perilaku dan sanggup untuk dikenakan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku tersebut.
3. Saya memahami bahwa persetujuan saya untuk mematuhi Pedoman Perilaku tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi dan Serikat Pekerja PT Perkebunan Nusantara X.

TANDA TANGAN:

NAMA LENGKAP:

NOMOR INDUK KARYAWAN:

PANGKAT/GOLONGAN:

TANGGAL:

52 PEDOMAN PERILAKU | CODE OF CONDUCT | 2016

Sebagai realisasi penegakan Pedoman Perilaku, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Pedoman Perilaku selama 3 (tiga) tahun terakhir:

As a realization of the Company's Code of Conduct enforcement, the following are details of sanctions imposed related to the enforcement of Code of Conduct for the past 3 (three) years:

Jenis Sanksi *Type of Sanction*	**2017**	**2016**	**2015**
Teguran *Reprimand*	0	5	32
Peringatan 1 *1st Warning*	2	19	47
Peringatan 2 *2nd Warning*	1	5	8
Peringatan 3 *3nd Warning*	1	9	9
Pengunduran Diri *Resignation*	3	21	23
Pemecatan *Termination*	0	10	5

Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Anti Corruption Policy and Gratification Control

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2); menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3); kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11); kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10); delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12); delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7); hingga delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C). Perseroan menekankan pentingnya anti korupsi sebagai upaya mendasar dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan Perseroan terhadap anti korupsi tertuang dalam Etika Usaha dan Tata Perilaku serta Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimiliki Perseroan.

Secara khusus, pengendalian gratifikasi merupakan upaya Perseroan untuk melindungi insan Perseroan terhindar dari kemungkinan dijatuhkannya tuduhan tindak pidana suap sebagaimana diatur pada Pasal 12 B ayat (1) UU 31/1999 Jo. UU 20/2011 yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dengan demikian, Perseroan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penegakan anti korupsi, baik dalam pengelolaan operasional dan bisnis Perseroan, maupun dalam penggunaan jabatan terkait masing-masing insan Perseroan.

Law No. 31 Year 1999 Jo. Law No. 20 Year 2001 on Corruption Eradication states that the definition of corruption includes unlawful acts, enriching persons/other bodies that are detrimental to the state's finances/economy (article 2); Misusing authority due to positions that could be detrimental to state's finances/positions that could be detrimental to the state's finances/economy (article 3); Groups of bribery offenses (articles 5, 6 and 11); Groups of offenses of embezzlement in office (articles 8, 9, and 10); Offenses of extortion in office (article 12); Offenses related to the exemption (article 7); to the gratification offenses (articles 12B and 12C). The Company emphasizes the importance of anti-corruption as a fundamental effort of applying the principles of Good Corporate Governance. The Company's policy on anti-corruption is contained in the Code of Business Conduct and Code of Conduct and the Guidelines for Gratification Control and Guidelines for the State Official Wealth Report (LHKPN) owned by the Company.

Specifically, gratification control is the Company's effort to protect the Company's personnel in order to avoid allegations of bribery as stipulated in Article 12 B paragraph (1) of Law 31/1999 Jo. Law 20/2011 which states that any gratification to a civil servant or state official is considered to be a bribe, in respect of his or her position and which is contrary to his or her obligations or duties. As such, the Company has a high commitment to anti-corruption enforcement, both in operational and business management of the Company, as well as in the use of positions related to each of Company's personnel.

Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Information on Political Activity Funding

Perseroan memiliki kebijakan bahwa dana atau sumber daya Perseroan tidak diperkenankan untuk menyumbang kandidat partai atau non partai politik di mana pun di seluruh dunia. Kebijakan Perseroan tidak mengijinkan penggunaan fasilitas ataupun sumber daya apa pun oleh Insan Perseroan untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Keputusan yang diambil oleh seorang Insan Perseroan untuk mengkontribusikan waktu, uang atau sumber daya personalnya bagi kampanye atau aktivitas politik harus benar-benar merupakan pilihan Insan Perseroan itu sendiri.

The Company has a policy that its funds or resources are not allowed to be used as contribution to party or non-political party candidates anywhere in the world. Such policy does not permit the use of any facilities or resources by personnel of the Company for the purpose of political campaigns, political fundraising or political participation. The decision taken by a Company's personnel to contribute his or her time, money or personal resources to a political campaign or activity should really be an option made by the Company's personnel themselves.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

State Official Wealth Report

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai eks-BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, Perseroan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum

Basic Principles of State Official Wealth Report

As an-ex SOE which is owned by the State through the Government of Indonesia, the Company is obliged to comply with binding legislation. One form of legislation based on the spirit of eradication of corruption and internal irregulareties is the obligation of State Official Wealth Report (LHKPN).

LHKPN is a list of the entire Wealth owned by a State Official, which is described in LHKPN form stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in KPK Decision No. KEP 07/KPK/02/2005 on the Procedure for Registration, Inspection and Announcement of State Official Wealth Report. Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission confirms the authority of KPK to implement measures or efforts to prevent corruption, among others through registration and examination of LHKPN. In addition, Law No. 28 of 1999 on the Implementation of Clean State Official that is Free from Corruption, Collusion and Nepotism, stipulates that every official shall report and announce his/her assets before and after taking office and willingly to be examined in terms of assets before and after taking office. Law No. 29 of 1999 Article 2 (7) and its

dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Dasar Hukum dan Peraturan Dalam Menerapkan LHKPN di Perseroan

Dalam menerapkan LHKPN, Perseroan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perseroan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya.
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

Pelaksanaan LHKPN Perseroan

Penyelenggara Negara di lingkungan Perseroan dilakukan untuk Pejabat 2 (dua) level di bawah Direksi (Pejabat Puncak dan Manajer/Kepala Urusan) yang wajib membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN dengan penjelasan sebagai berikut:

elucidation, describes that other officials with strategic functions in relation to state officials including Board of Commissioners, Board of Directors and other structural officials in State-Owned Enterprises (SOE) and Regional Owned Enterprises (ROE) .

The examination of LHKPN submitted to KPK aims at realizing the State Official who adheres to the general principles of state officials free from corruption, collusion and nepotism practices, and other disgraceful acts. Each State Official is required to report his/her wealth through the LHKPN form provided by KPK to be filled honestly, correctly and completely, so that KPK can analyze, evaluate and assess total amount, type, and value of reported assets in a correct, prompt, accurate, and responsible manner.

Legal Ground of LHKPN Implementation in the Company

In applying LHKPN, the Company considers several legal and regulatory ground as the foundation for LHKPN implementation in the Company. The legal ground are:

1. Law Number 28 of 1999 regarding Clean State Officials and Free From Corruption, Collusion and Nepotism.
2. Law Number 30 of 2002 regarding Corruption Erradication Commission;
3. Minister of SOE Regulation Number PER-01/BUMN/2011 on Good Corporate Government Implementation in SOE, and its amendment.
4. Minister of SOE Secretary Decree Number SK-16/S.MBU/2012 regarding Indicators/Parameters of GCG Assessment and Evaluation.

LHKPN in the Company

The State Officials in the Company are Officials of 2 (two) levels below Board of Directors (Top Officials and Managers/Heads of Affairs) who are required to prepare State Official Wealth Report (LHKPN) in accordance with KPK Regulation no. 7 of 2016 on Procedures for Registration, Announcement and Inspection of LHKPN with the following explanation:

1. Waktu Penyampaian LHKPN
   a. Pejabat yang baru pertama kali menjabat.
   b. Berakhirnya masa jabatan/pensiun.
   c. Periodik setahun sekali.
   d. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan/pensiun.
2. Jangka Waktu Penyampaian LHKPN
   a. Penyampaian LHKPN berdasarkan Periode Perubahan Jabatan (Pelaporan Khusus)
      i. Penyampaian LHKPN pada saat pertama kali menjabat atau pensiun.
      ii. Batas waktu penyapaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun .
   b. Penyampaian LHKPN berdasarkan Periode Berkala (Pelaporan Periodik)
      i. Penyampaian LHKPN setiap setahun sekali.
      ii. Batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya.
3. Pelaporan LHKPN di lakukan melalui formulir e-LHKPN.

1. LHKPN Submisson Time
   a. First term Official
   b. End of term/retirement
   c. Once a year period
   d. Re-appointment as State Official after termination/ retirement
2. LHKPN Submission Period
   a. Submission of LHKPN based on Period of Position Change (Special Reporting)
      i. Submission of LHKPN at the time of first term or retirement
      ii. Deadline for submission is no later than 3 (three) months after taking office or retiring
   b. Submission of LHKPN based on Periodic Reporting
      i. Submission of LHKPN every year
      ii. Deadline for submission is no later than March 31 of the following year
3. LHKPN reporting is conducted through e-LHKPN form

Transparansi LHKPN Pejabat Perseroan Tahun 2017

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perseroan di tahun 2017.

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat PTPN X Tahun 2017

LHKPN Transparency of Company's Officials in 2017

Below is the LHKPN submission transparency of Company's officials in 2017.

Disclosure of LHKPN Submission of PTPN X Officials in 2017

Pejabat *Official*	**Jumlah Wajib Lapor** *Number of Mandatory Reports*	**Jumlah yang Telah Melaporkan** *Number of Report Submitted*	
		Jumlah *Total*	**%**
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	4	4	100,00%
Direksi *Board of Directors*	3	3	100,00%
Organ Pendukung Dewan Komisaris *Supporting Organs of Board of Commissioners*	-	-	-
1 Tingkat di Bawah Direksi (Kepala Divisi/Biro/ SPI/Sekretaris Perusahaan/GM Unit Usaha) dan 2 Tingkat di Bawah Direksi (Kepala Urusan/Manajer) *1 Level Below Board of Directors (Head of Division/Bureau/SPI/Corporate Secretary/GM Business Unit) and 2 Level Below Board of Directors (Head of Affairs/Manager)*	152	150	98,68%
Jumlah *Total*	159	157	98,74%

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement Policy

Salah satu bagian dalam proses bisnis yang memilki potensi korupsi dan benturan kepentingan adalah proses pengadaan barang dan jasa. Agar proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan penerapan praktik korporasi yang sehat, Perseroan memiliki kebijakan pengadaan barang dan jasa yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. XX-IDKD/12.000 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pt Perkebunan Nusantara X.

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Perseroan yang pembiayaannya berasal dari anggaran Perseroan atau anggaran pihak lain termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah. Peraturan pengadaan barang/jasa disusun dengan tujuan:

1. Meningkatkan efisiensi.
2. Mendukung penciptaan nilai tambah bagi Perseroan.
3. Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme.
5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
6. Meningkatkan sinergi antar BUMN dan/atau Entitas Anak.

Pengadaan barang/jasa di Perseroan wajib menerapkan prinsip-prinsip:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Kompetitif, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

One part of the business process with high potential for corruption and conflict of interest is the process of procurement of goods and services. In order for the procurement process to comply with the application of healthy corporate practices, the Company has a procurement policy which has been ratified by Board of Directors Regulation No. XX-IDKD/12.000 dated February 29, 2012 on Guidelines for Procurement of Goods/Services of PT Perkebunan Nusantara X.

This regulation aims to regulate the procurement of goods/services conducted by the Company and financed by whether the Company's budget or other party's budget including those financed from foreign loans/grants (PHLN), both guaranteed and not guaranteed by the Government. The procurement regulation is prepared for the purpose of:

1. Increasing efficiency.
2. Supporting the creation of added value for the Company.
3. Simplifying and speeding up the decision-making process.
4. Improving independence, responsibility, and professionalism.
5. Increasing the use of domestic production.
6. Increasing synergy between SOE and/or Subsidiaries.

The procurement of goods/services in the Company shall apply the following principles:

1. Efficient, means that the procurement should be sought to obtain optimal and best results in a short period of time by using reasonably minimum funds and capabilities and not just based on the lowest price.
2. Effective, means that the procurement must be in accordance with the requirements that have been set and can provide maximum benefits in accordance with the predetermined targets.
3. Competitive, means that the procurement shall be open to qualified suppliers through fair competition among suppliers that are similar and meet certain terms/criteria according to clear and transparent terms and procedures.

4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat.
5. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama (adil) bagi semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat.

4. Transparent, means all provisions and information on the procurement, including technical requirements of procurement administration, evaluation procedures, evaluation results, determination of suppliers, are open to interested suppliers.
5. Fair and square, means providing equal (fair) treatment to all qualified suppliers.

"Di samping menjunjung tinggi etika pengadaan yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, salah satu kebijakan umum pengadaan barang/jasa di lingkup PTPN X adalah memperhatikan standarisasi, mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan."

"In addition to upholding the procurement ethics in accordance with transparency and accountability principles, one of the general policies of procurement in PTPN X is to pay attention to standardization, prioritize the use of domestic production, national design and engineering, and expand opportunities for small businesses, as long as quality, price, and objective can be accounted for. "

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Pedoman Pengaduan Pelanggaran

Perseroan memiliki ketentuan mengenai pengaduan pelanggaran yakni Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Dalam ketentuan ini diatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran. Selain itu, diatur juga mengenai tahap penerimaan laporan, tahap penyelidikan sampai kepada tahap pemberian keputusan dan sanksi yang akan diberikan apabila pelanggaran yang dilaporkan terbukti.

Bagi Perseroan, keberadaan WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Keberadaan WBS bagi Perseroan diharapkan menjadi sistem yang efektif dalam mengungkap terjadinya berbagai bentuk kecurangan dan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat.

Tim Pengelola WBS dan Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran Serta Penanganan Pengaduan

Unit pengelola Tim WBS harus merupakan fungsi atau unit yang independen dari operasi Perseroan sehari-hari setidak-tidaknya bisa merekrut ahli dari eksternal dan mempunyai akses kepada pimpinan tertinggi Perseroan. Unsur dari unit Tim WBS terdiri dari 2 (dua) elemen yakni:

1. Sub unit penerima laporan dan pelindungan pelapor
   Menerima dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut oleh sub unit investigasi tanpa membuka identitas pelapor bertanggung jawab atas pelaksanaan pelaporan. Selain menyelenggarakan administrasi pelaporan pelanggaran yang masuk, dalam proses dan telah selesai ditindaklanjuti juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah dicanangkan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor (SDM).
2. Sub unit investigasi
   Bertugas untuk melakukan investigasi dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa memang terjadi pelanggaraan. Apabila terdapat bukti-bukti yang memadai maka rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan diberikan kepada Direksi untuk memutuskan. Namun jika tidak menemukan bukti-bukti yang mencukupi, maka proses investigasi dihentikan dan laporan pelanggaran tidak dilanjutkan (Biro Hukum, SPI dan Bidang terkait).

Guidelines of Violation Reporting

The Company has provisions regarding the violation reporting, which is Whistleblowing System (WBS). In this provision, the mechanism of violation reports is regulated. Aside from it, there are regulations on the reports receiving stage, investigation stage up until the verdict and sanction stage, which will be carried out when the violation is proven to be true.

For the Company, the existence of WBS is a part of internal control system to prevent deviation of practices. In other words, the existence of WBS is expected to become an effective system in revealing various deceits and able to solve them as soon as possible.

WBS Management Team and Mechanism of Violation Reporting and Complaint Handling

WBS management team must be an independent function or unit of the Company's daily operation or at least recruiting external experts and have access to the highest position of the Company. The WBS Team consist of two elements, which are:

1. Report receiving and whistleblower protection sub unit
   Accepting and selecting violation reports for further processing by the investigation sub unit without revealing the whistleblower's identity and is responsible for the said reporting. Aside from managing the administrational aspect of the report, the team is also responsible to protect the whistleblower in accordance to the prevailing regulations, especially the aspect of secrecy and security of the whistleblower (HC).
2. Investigation sub unit
   Mandated to investigate and collect evidence required to ensure that there are violations being committed. Should there be evidence corroborating the existence of a violation, a recommendation regarding sanction is given to Board of Directors for further rulings. If there isn't enough evidence, the investigation will be stopped and no further actions are conducted (Legal Bureau, SPI, and related sections).

Mekanisme dan Tahapan Pelaporan Serta Penanganan Pengaduan

Mechanism and Stages of Violation Reporting and Complaint Handlingv

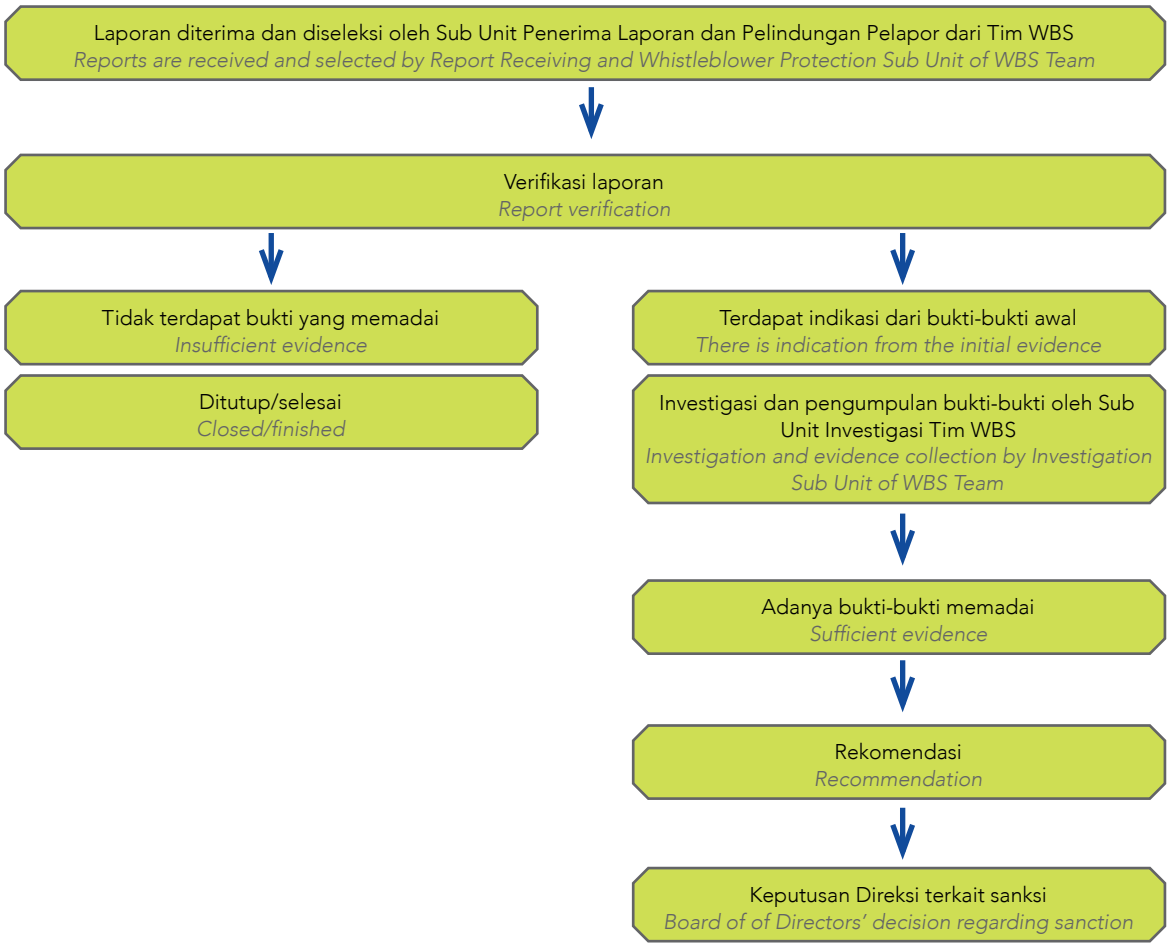

Saluran Pelaporan

Sarana Pelaporan Pelangggaran antara lain melalui saluran di bawah ini:

Reporting Channel

Reporting can be done among others through:

Email: wbs.ptpn10@ptpn10.co.id
Fax: +62 31 352316
Telp: +62 31 3523143 pswt (110, 190)
Kotak Surat: Tim Whistleblowing System
PT Perkebunan Nusantara X
Jalan Jembatan Merah 3-11
Surabaya 60175

Perlindungan Bagi Pelapor

Guna mendorong keberanian untuk melaporkan adanya tindak pelanggaran, maka Perseroan menetapkan prosedur yang mampu menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta memberikan perlindungan bagi pelapor. Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan Perseroan akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS.

Seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari:
1. Pemecatan yang tidak adil.
2. Penurunan jabatan atau pangkat.
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya.
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya.

Perseroan melindungi Pelapor yang beretika baik, melalui:
1. Tersedianya fasilitas saluran pelaporan.
2. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor apabila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
3. Jaminan keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari terlapor.

Selain kerahasiaan dan keamanan pelapor dilindungi, pelapor sebaliknya juga bisa dikenai sanksi apabila pelaporan merupakan fitnah atau pelaporan palsu.

Jumlah Laporan yang Masuk dan Penanganan Pengaduan Tahun 2017

Di sepanjang tahun 2017 tidak terdapat laporan yang masuk melalui mekanisme WBS yang diterapkan oleh Perseroan.

Protection for Whistleblower

To encourage reports on violations, the Company has established a procedure to ensure the secrecy of the whistleblower's identity as well as providing protection. The Company is committed to protect the whistleblower whom has good intention and the Company will obey all related regulations and legislations as well as best practices that are in effect in the implementation of WBS.

A whistleblower will receive protection from:

1. Unfair termination
2. Demotion
3. Harassmment or any form of discrimination
4. Harmful notes within his/her personal records

The Company protects whistleblower with good intention through:
1. Existence of reporting channels.
2. Assurance of secrecy should the whistleblower provides personal and contact information.
3. Assurance of information safety and any reprocussions from the reported party.

Aside from said secrecy and protections, the whistleblower can also be given sanctions if the reports are proven to be slanderous or fake.

Incoming Reports and Follow-Up in 2017

Throughout 2017, there was no incoming report through WBS mechanism applied by the Company.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Composition Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perseroan. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perseroan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perseroan.

Perseroan belum memiliki kebijakan secara spesifik terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Belum adanya kebijakan ini terutama disebabkan proses nominasi dan remunerasi sepenuhnya berada di Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan selaku pemegang saham. Namun, Perseroan telah memiliki *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur komposisi dan kualifikasi keanggotaan memiliki latar belakang yang dapat mendukung kinerja operasional dan bisnis Perseroan.

Di bawah ini disajikan tabel keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2017.

Composition diversity of Board of Commissioners and Board of Directors is part of the Company's efforts to encourage a more objective, comprehensive, optimal and decision-making process that has a positive impact on the supervision and management of the Company. This diversity is expected to enrich the point of view and interest in decision-making processes in both Board of Commissioners and Board of Directors, thereby providing added value to the operational and business aspects of the Company, as well as the implementation of Corporate Governance within the Company.

The Company does not have specific policies regarding the composition diversity of Board of Commissioners and Board of Directors. The absence of this policy is mainly due to the nomination and remuneration processes is fully in the Ministry of SOE and Plantation Holding as the shareholders. However, the Company has a Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors which regulates the composition and qualification of membership having background that can support the operational and business performance of the Company.

Below is a table of composition diversity of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in 2017.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PTPN X

Nama *Name*	**Kewarganegaraan** *Nationality*	**Latar Belakang Pendidikan** *Educational Background*
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		
Rudi Wibowo (Komisaris Utama) *(President Commissioner)*	Indonesia	Profesor, Doktor bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan, Magister Sains Ekonomi Pertanian, Sarjana Pertanian jurusan Sosial Ekonomi *Professor, Doctor of Rural Development Planning, Master of Science in Agricultural Economics, Bachelor of Agriculture majoring in Social Economics*
Sukardi Rinakit (Komisaris) *(Commissioner)*	Indonesia	Ph.D, Departement of Political Science; M.A., Departement of Southeast Asian Studies; Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. *Phd, Department of Political Science; M.A., Department of Southeast Asian Studies; Bachelor of Social and Political Science.*
Y.B. Priyatmo Hadi (Komisaris) *(Commissioner)*	Indonesia	Magister Ekonomi, dan Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. *Master of Economics, and Bachelor of Social and Political Science*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen) *(Independent Commissioner)*	Indonesia	Bachelor Comm, Specializing in Finance *Specializing in Finance*

Table of Composition Diversity of PTPN X's Board of Commissioners and Board of Directors

	Pengalaman Kerja *Work Experience*	Usia *Age*	Gender
	Deputi Badan Eksekutif GAPPERINDO bidang SDM/Teknologi (2003-sekarang); Ketua Majelis Penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) (2011-2014); Sekretaris Jenderal PERHEPI (2004-2007); Sekditjen Tanaman Pangan dan Hortikultura Departemen Pertanian (1998-2000); Kepala Biro Tata Usaha BUMN (1997); Sekretaris Badan Agribisnis Departemen Pertanian (1994-1997). *Deputy Executive Board of GAPPERINDO in HR/Technology (2003-present); Chairman of Advisory Council of Indonesian Agricultural Economy (PERHEPI) (2011-2014); Secretary General of PERHEPI (2004-2007); Secretary General of Food Crops and Horticulture of Ministry of Agriculture (1998-2000); Head of Bureau of SOE Administration (1997); Secretary of Agribusiness Agency of Ministry of Agriculture (1994-1997).*	65	Laki-laki *Male*
	Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (2015-sekarang); Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) (2015-sekarang); Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (2001-2014); Dosen Tamu di Lemhanas dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2001-2014); Staf Peneliti *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) (1989-1998). *Special Staff of President of the Republic of Indonesia (2015-present); Member of Indonesian Political Science Association (AIPI) (2015-present); Executive Director of Soegeng Sarjadi Syndicate (2001-2014); Guest Lecturer at Lemhanas and Postgraduate Program of University of Indonesia (2001-2014); Research Staff of Center for Strategic and International Studies (CSIS) (1989-1998).*	54	Laki-laki *Male*
	Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana, Prasarana Perhubungan 1b, Kementerian BUMN (2015-sekarang); Komisaris PT Reasuransi International Indonesia (2014-2016); Kepala Bidang Usaha Perbankan & Asuransi I, Kementerian BUMN (2014-2015); Komisaris PT Jalantol Lingkar Luar Jakarta (2014); Staf Sekretaris Komisaris PT Bank Mandiri (2011-2014); Kepala Sub Bidang Jasa 1 A2, Kementerian BUMN (2010-2014); Sekretaris Dewan Komisaris PTPN XI (2008-2011); Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kinerja Usaha Perkebunan II A Kementerian BUMN (2008-2010); Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kinerja Usaha Perkebunan II A, Kementerian BUMN (2006-2008); Sekretaris Dewan Komisaris PTPN IX (2006-2008); Sekretaris Dewan Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (2002-2006); Pelaksana pada Sub Bidang Perencanaan Usaha Bidang Sarana Perhubungan, Kementerian Keuangan/Kementerian Pembinaan BUMN (1999-2006); Staf Sekreatris Dewan Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (2000-2002). *Head of Construction and Facilities Business, Transportation Infrastructure 1b, Ministry of SOE (2015-present); Commissioner of PT Reasuransi International Indonesia (2014-2016); Head of Banking & Insurance Business I, Ministry of SOE (2014-2015); Commissioner of PT Jalantol Lingkar Luar Jakarta (2014); Staff Secretary of Commissioner of PT Bank Mandiri (2011-2014); Head of Service Sub Division 1 A2, Ministry of SOE (2010-2014); Secretary of Board of Commissioners of PTPN XI (2008-2011); Head of Plantation Planning and Performance Sub-Division II of Ministry of SOE (2008-2010); Acting Head of Plantation Planning and Performance Sub-Division II of Ministry of SOE (2006-2008); Secretary of Board of Commissioners of PTPN IX (2006-2008); Secretary of Board of Commissioners of PT Merpati Nusantara Airlines (2002-2006); Implementer in Business Planning Sub-Division in Transportation Facilities Division, Ministry of Finance/Ministry of SOE (1999-2006); Staff Secretary of Board of Commissioners of PT Merpati Nusantara Airlines (2000-*	45	Laki-laki *Male*
	Direktur PT Ingria Pratama Capitalindo (2015-sekarang); Komisaris PT Puri Amerta Sanjiwani (2009-sekarang); Direktur PT Petrobas Indonesia (2006-20090); Direktur PT Megah Tama Berjangka (2007-2008); *Assistant to Senior Vice President Coordinating Executive* PT Freeport Indonesia (2003-2005). *Director of PT Ingria Pratama Capitalindo (2015-present); Commissioner of PT Puri Amerta Sanjiwani (2009-present); Director of PT Petrobas Indonesia (2006-2009); Director of PT Megah Tama Berjangka (2007-2008); Assistant to Senior Vice President Coordinating Executive of PT Freeport Indonesia (2003-2005) .*	37	Laki-laki *Male*

Nama *Name*	**Kewarganegaraan** *Nationality*	**Latar Belakang Pendidikan** *Educational Background*
Direksi *Board of Directors*		
Dwi Satriyo Annurogo (Direktur Utama) *(President Director)*	Indonesia	Magister dan Sarjana Teknik Kimia *Master and Bachelor of Chemical Engineering*
Mustaqim (Direktur Operasional) *(Operational Director)*	Indonesia	Sarjana Teknik Elektro *Bachelor of Electrical Engineering*
Slamet Djumantoro (Direktur Komersil) *(Commercial Director)*	Indonesia	Magister Manajemen Pemasaran dan Sarjana Hukum *Master of Marketing Management and Bachelor of Law*

	Pengalaman Kerja *Work Experience*	Usia *Age*	Gender
	Berkarir di PT Petrokimia Gresik sejak 1992 hingga 2015, dengan jabatan terakhir sebagai General Manager Pabrik III.	50	Laki-laki *Male*
	Mulai berkarier di PT Perkebunan Nusantara X unit kerja PG Ngadiredjo sebagai Pembantu Masinis pada tahun 2004. Pada 2012 menjadi Manajer Instalasi PG Watoetoelis, tahun 2014 berpindah ke PG Lestari dan tahun 2015 di PG Gempolkrep. Kemudian pada tahun 2016 menjadi Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan di Kantor Direksi.	39	Laki-laki *Male*
	Lama menapaki karir di PT Bank Negara Indonesia (Persero) (Tbk), pada tahun 2010 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Usaha Kecil. Selanjutnya pada tahun 2012 menjadi Pemimpin Divisi *Procurement & Fixed Assets*, dan pada tahun 2014 sebagai Pemimpin Divisi Kredit Khusus. Di tahun 2015 menjadi Pemimpin Kanwil BNI Makassar, dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Pemimpin Kanwil BNI Surabaya.	54	Laki-laki *Male*

Transparansi Praktik Bad Governance

Transparency on Bad Governance Practice

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Perseroan tidak menemukan adanya laporan dari manapun terkait aktivitas Perseroan yang mencemari lingkungan.

Report on Company's Activity Polluting the Environment

The Company did not find any report related to Company's activities polluting the environment.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait perpajakan. Perseoan memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak. Berikut adalah tabel kontribusi kepada negara terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir

Disclosure of Tax Obligation Fulfillment

The Company is committed to comply with all prevailing laws and regulations, particularly with regard to taxation. The Company provide contribution to the State in the form of fulfillment of obligations as taxpayer and as a tax cutter/ withdrawal. Below is the table of contributions to the state related to the fulfillment of tax obligations in the last 2 (two) years

	2017 (Rp juta) *(IDR million)*	2016 (Rp juta) *(IDR million)*
Pembayaran pajak secara kumulatif *Cumulative tax payments*	154.834	340.793

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntasi Keuangan (Sak)

Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Perseroan sesuai dengan standar akuntasi keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"). Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 oleh Perseroan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan dan Peraturan-peraturan serta Pedoman, Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Non-Conformity of Annual Reports and Financial Statements Presentation with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

The accounting and financial reporting policies adopted by the Company conform to the Indonesian financial accounting standards, which are based on Indonesian Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK"). The accounting policies were applied consistently in the preparation of the consolidated financial statements as of December 31, 2017 and 2016 by the Company.

The consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and the Accounting Guidance for State-Owned Enterprises of Plantations Companies and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority ("OJK").

Kasus Terkait dengan Buruh dan Karyawan

Tidak terdapat kasus terkait buruh dan karyawan yang terjadi di lingkungan PTPN X.

Cases Related to Workers and Employees

There were no labor and employee-related cases occurring within PTPN X.

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Perseroan telah menerapkan Segmen Operasi, seperti yang tertuang dalam informasi segmen pada Catatan 42 laporan keuangan tahun 2017. 5 (lima) segmen operasi Perseroan mencakup: Gula, Tetes, Tembakau, Rumah Sakit, dan Lain-lain

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Laporan Tahunan digital Perseroan baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perseroan.

Disclosure on Operating Segment in Financial Statements

The Company has implemented the Operating Segment, as contained in the segment information in Note 42 of the 2017 financial statements. The 5 (five) operating segments of the Company include: Sugar, Molasses, Tobacco, Hospitals, and Others.

Conformity of Annual Report Book and Digital Annual Report

The Company's Digital Annual Report submitted to shareholders, stakeholders, or uploaded on the Company's official website is in accordance with the Annual Report Book which is printed and published by the Company.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Perseroan tidak hanya mengemban misi ekonomi bagi pemegang saham, tetapi Perseroan juga berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan pelestarian lingkungan.

The Company does not only undertake an economic mission for shareholders, but is also committed to take an active role in addressing the needs of stakeholders and environmental preservation.

Prinsip Umum dan Kebijakan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

General Principles and Implementation Policy of Corporate Social Responsibility

DASAR PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sustainability Development, atau Pembangunan Berkelanjutan yang telah dikembangkan di berbagai negara muncul sebagai bagian dari keinginan berbagai pihak tentang keseimbangan antara pelaku usaha (entitas usaha bersama-sama dengan pemegang saham/pemilik modal), pemangku kepentingan, serta *regulator*. Harmonisasi ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan.

Di Indonesia, *54* telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibilty* (CSR), yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION BASIS

Sustainability Development that has been developed in a number of countries emerges as part of the desire of various parties on the balance between business playar (business entities together with shareholders/owners of capital), stakeholders, and regulators. This harmonization can only be realized through strong commitment from all parties, especially business entities that can not be denied relying on profit orientation and tend to ignore the long-term impact on the activities undertaken.

In Indonesia, regulators have encouraged this harmonization effort through Corporate Social Responsibility (CSR), which requires business entities to have policies and programs related to their commitment to building sustainable relationships with stakeholders.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 74 ayat (1):

"Perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran".

Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company

Article 74 paragraph (1):

"Companies engaged in natural resources shall be obliged to carry out Social and Environmental Responsibility, which is budgeted and calculated as the cost of the company whose implementation is carried out with due attention to the propriety and reasonableness".

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 15 (b):

"Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat".

Law No. 25 Year 2007 on Investment

Article 15 (b):

"Every investor is obliged to carry out corporate social responsibility. What is meant by "corporate social responsibility" is the responsibility inherent in every investment company to keep creating a harmonious, balanced, and compatible relationship with the environment, values, norms and culture of the local community".

Pada lingkup pelaporan tahunan, perihal CSR dibagi ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu: aspek lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; pengembangan sosial dan kemasyarakatan; serta tanggung jawab barang dan/atau jasa.

In the scope of annual reporting, CSR is divided into 4 (four) aspects, namely: environmental aspect; labor, occupational health and safety practices; social and community development; as well as responsibility to goods and/or services.

Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility Aspects

Lingkungan Hidup *Environment*	**Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja** *Employment, Occupational Health and Safety Practices*	**Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan** *Social and Community Development*	**Tanggung Jawab Barang dan/atau Jasa** *Responsibility to Goods and/or Services*

MEMBANGUN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Perseroan menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam rangka membentuk korporasi sebagai sebuah bagian integral dari masyarakat. Perseroan tidak hanya mengemban misi ekonomi bagi pemegang saham, tetapi juga wajib mengambil peran aktif dalam memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan Perseroan.

BUILDING RELATIONSHIPS WITH STAKEHOLDERS

The Company carries out the Corporate Social Responsibility in order to establish a corporation as an integral part of the society. The Company does not only bear the economic mission for the shareholders, but is also obligated to take an active role in caring for the needs of the Company's stakeholders.

Perseroan tidak dapat berhenti pada usaha-usaha pengembangan bisnis semata. Untuk meraih pertumbuhan yang berkesinambungan, Perseroan wajib memperhatikan pemangku kepentingan internal, dalam hal ini karyawan Perseroan, dan pemangku kepentingan eksternal, dalam hal ini masyarakat di sekitar area operasional Perseroan. Program-program CSR yang dilakukan oleh Perseroan bertujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

The Company can not stop at performing business development efforts alone. To achieve sustainable growth, the Company must pay attention to the internal stakeholders, in this case the Company's employees and external stakeholders, in this case the communities surrounding the Company's operational area. The CSR programs conducted by the Company are aimed to provide sustainable added values for stakeholders.

Keseimbangan dalam Pembangunan Berkelanjutan

The Balance in Sustainable Development

LANDASAN HUKUM

Dasar pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berlandaskan pada beberapa aspek hukum, diantaranya:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN:
   a. Pasal 2 mengemukakan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
   b. Pasal 88 mengemukakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (pasal 15 (b)) yang berisi, "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat".
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

LEGAL BASIS

The basis of implementation of Corporate Social Responsibility program is based on several legal aspects, including:

1. Law No. 19 Year 2003 on State-owned Enterprises:
   a. Article 2 states that one of the purposes and objectives of the establishment of SOE is actively involved providing guidance and assistance to low economy groups of enterpreneur, cooperatives, and community.
   b. Article 88 states that SOEs can set aside part of the net income for the purposes of fostering small business /cooperatives and community development around the SOE.
2. Law No. 32 Year 1998 on the Fostering and Development of Small Business.
3. Law No. 20 Year 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises.
4. Law No. 25 Year 2007 on Investment (Article 15 (b)) which reads: "Every investor is obliged to implement corporate social responsibility. What is meant by "Corporate social responsibility" is the responsibility inherent in each investment firm to keep creating harmonious, balanced, and compatible relations with the environment, values, norms and local culture".
5. Law No. 1 Year 1970 on Work Safety.

6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
8. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
11. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana terakhir diubah dengan PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
13. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
14. ISO 26000
    Telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada 2012, dengan 7 (tujuh) subyek inti yaitu:
    a. Tata kelola organisasi yang baik
    b. Penegakan hak asasi manusia
    c. Praktek ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan
    d. Dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan
    e. Prosedur operasi yang wajar
    f. Tanggung jawab terhadap konsumen
    g. Pelibatan dalam pengembangan masyarakat

Di samping itu, sebagai anak usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Perseroan mengimplementasikan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini menjadi komitmen Perseroan untuk turut mewujudkan entitas usaha yang berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat Indonesia.

6. Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection.
7. Law No. 13 Year 2003 on Manpower.
8. Law No. 28 Year 1999 on State Officials that are Clen and Free from Corruption, Collusion and Nepotism.
9. Law of the Republic of Indonesia No. 20 Year 2001 on Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 Year 1999 on Corruption Eradication.
10. Government Regulation No. 50 Year 2012 on the Implementation of Management system on Occupational Health and Safety.
11. Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 and its amendments No. PER- 09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance at the State-Owned Enterprises.
12. Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 regarding SOE Partnership Program with Small Business and Community Development Program, as amended by PER-03/MBU/12/2016 on the Amendment of the Regulation of Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
13. Circular Letter of the Minister of SOE No. SE-02/MBU/Wk/2012 dated February 23, 2012 regarding the Stipulation of Accounting Guidelines of Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
14. ISO 26000
    Has been ratified by the Government in 2010 and made the National Standard (SNI) in 2012, with 7 (Seven) core subjects, such as:
    a. Good corporate governance
    b. Enforcement of human rights
    c. Humane and fair labor practices
    d. Impact of corporate activities on the environment
    e. Reasonable operating procedures
    f. Responsibility to customers
    g. Involvement in community development

In addition, as a subsidiary of a State-Owned Enterprise (SOE) PT Perkebunan Nusantara III (Persero), the Company implements the Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises. This Partnership and Community Development Program (PKBL) is a commitment of the Company to help realize business entities that contribute to the development of Indonesian society.

PENGELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI LINGKUP PTPN X

Berikut disampaikan gambaran tentang keterlibatan organisasi dalam melaksanakan program CSR secara berkelanjutan.

MANAGER OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN PTPN X

The following describes the involvement of organization in implementing CSR programs in a sustainable manner.

		Aspek CSR *CSR Aspects*		**Penanggung Jawab di Lingkup Perusahaan** *Units in Charge in the Company*
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate social responsibility*	→	Lingkungan *Environment*	→	Divisi Pengolahan *Processing Division*
	→	Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja *Employment, Occupational Health and Safety Practices*	→	Divisi SDM & HI dan Divisi Teknik *GA & HI Division and Engineering Division*
	→	Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan *Social and Community Development*	→	Divisi PKBL *PKBL Division*
	→	Tanggung Jawab Konsumen serta Barang dan/atau Jasa *Responsibility to Customers and Goods and/or Services*	→	Divisi Pemasaran dan Divisi Pengadaan Barang dan Jasa *Marketing Division and Procurement of Goods and Services Division*

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Corporate Social Responsibility on Environment

KEBIJAKAN

Perseroan menaruh perhatian terhadap pengelolaan lingkungan hidup khususnya di sekitar lokasi Pabrik Gula dan perkebunan yang dikelola Perseroan. Tanggung jawab Perseroan terhadap lingkungan hidup dilakukan melalui pelestarian lingkungan di sekitar lokasi Pabrik Gula dan perkebunan yang dikelola. Hal ini penting, mengingat pengelolaan kawasan menjadi sebuah kunci bagi keberlangsungan dunia usaha bersama pemangku kepentingan untuk dapat tumbuh bersama-sama.

PTPN X merupakan salah satu perusahaan BUMN di bidang industri gula yang di dalam menjalankan aktifitas produksinya tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Wujud hubungan baik itu bisa dilaksanakan dengan tetap menjaga keberlangsungan usaha terkait Lingkungan Hidup di sekitar perusahaan berdiri. Di mana pengelolaan lingkungan hidup adalah wujud tanggung jawab dan menjadi prioritas utama yang selalu diupayakan oleh semua pabrik gula (PG) di lingkungan PTPN X.

POLICY

The Company is concerned about environmental management, especially around the location of Sugar Mills and plantations managed by the Company. The Company's responsibility on the environment is done through environmental conservation around the location of its Sugar Mills and plantations. This is important, as area management becomes a key for the sustainability of the business world with stakeholders to grow together.

PTPN X is one of SOEs in the field of sugar industry that seeks to maintaining good relations with the surrounding community in carrying out its production activities. Being a good relationship that can be implemented while maintaining the continuity of business related to the environment around the company stands. Where environmental management is a form of responsibility and a top priority always strived by all sugar mills (PG) in the environment PTPN X.

RENCANA DAN TARGET KEGIATAN TAHUN2017

Pada tahun 2016, PG Gempolkrep Mojokerto telah dapat meraih Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam bidang Lingkungan hidup (PROPER) dari Biru menjadi Hijau, dan pada tahun 2018 di targetkan PG Ngadiredjo Kediri juga bisa menaikkan peringkat Propernya menjadi Hijau. Dan meskipun pada tahun 2017 ini, dua pabrik gula PTPN X, yaitu PG Lestari & PG Mojopanggoong belum bisa meraih Sertifikat Industri Hijau (SIH), pada tahun 2018 diharapkan bisa mengikuti pabrik gula lainnya dalam mendapatkan sertifikat tersebut.

Untuk mencapai predikat tertinggi dalam mengelola lingkungan hidup maka seluruh karyawan PTPN X berkomitmen:

1. Menghasilkan Gula Kristal Putih (GKP) sesuai *Standard* Nasional Indonesia (SNI) yang ramah lingkungan, ber*label* halal dan selalu memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
2. Selalu taat pada undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan produksi bersih dan dampak kegiatan produksi serta pendukung lainnya yaitu peraturan pengelolaan limbah cair, emisi udara, limbah Berbahaya dan Beracun (B-3), limbah padat non B-3 serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3)
3. Mengutamakan prinsip-prinsip pencegahan pencemaran dan timbulnya dampak lingkungan dengan melakukan swapantau, analisis, evaluasi dan perbaikan serta berkesinambungan

ACTIVITY PLAN AND TARGET IN 2017

In 2016, PG Gempolkrep Mojokerto has successfully achieved the Performance Rating Assessment Program (PROPER) in the Environment field from Blue to Green, and in 2018 PG Ngadiredjo Kediri is targeted to raise its PROPER rating to Green. And although in 2017, two sugar mills of PTPN X, namely PG Lestari & PG Mojopanggoong have not yet able to achieve the Green Industry Certificate (SIH), in 2018 they are expected to follow other sugar mills in obtaining the certificate.

To achieve the highest predicate in managing the environment, all employees of PTPN X is committed to:

1. Produce White Crystal Sugar (GKP) in accordance with the National Standard Indonesia (SNI) that is environmentally friendly, labeled halal and always pay attention to Occupational Health and Safety (K3)
2. Always comply with laws, regulations relating to clean production and the impacts of production and other supporting activities such as regulations on waste management, air emissions, hazardous and toxic waste (B-3), non-B-3 solid waste and Health and Safety (K-3)
3. Prioritize the principles of pollution prevention and the occurrence of environmental impact by conducting self-monitoring, analysis, evaluation and improvement as well as sustainable

4. Meningkatkan kinerja pengolahan lingkungan hidup, selalu memperhatikan konservasi tanah, air dan keaneka ragaman hayati secara berkesinambungan.
5. Mengoptimalkan sumber daya untuk mengembangkan potensi dalam penghematan *energy*, air dan produksi yang ramah lingkungan dengan prinsip *Reduse, Reuse* dan *Recycle* serta menurunkan emisi gas rumah kaca dalam kegiatan industri
6. Berperan aktif dalam program peduli lingkungan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Sementara itu, Perseroan juga menerapkan kebijakan energi yang dijalankan, meliputi:
1. Menetapkan dan meninjau secara berkelanjutan program konservasi energi, dengan cara mengoptimalkan peralatan yang hemat energi dan pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.
2. Melakukan efisiensi energi terhadap pemakaian uap, listrik, air, dan penuruan CO2 yang dihasilkan.

Untuk mendukung kebijakan itu, PTPN X mempunyai strategi perusahaan, yaitu dengan mendorong terwujudnya efisiensi, diversifikasi dan optimalisasi dalam upaya meningkatkan daya saing dan *sustainability* dengan tetap mengedepankan keseimbangan lingkungan. Efisiensi yaitu, mengurangi konsumsi bahan bakar dan energi, mengatasi berbagai hambatan permesinan, mengurangi biaya pemeliharaan pabrik. Diversifikasi diimplementasikan dalam *beyond sugar* transformasi menjadi industri berbasis tebu (*sugarance based industry*) terintegrasi dari hulu ke hilir. Sedangkan Optimalisasi, yaitu memacu *rendemen* dengan menekan *sugar losses* melalui peningkatan kinerja ekstraksi gilingan dan efisiensi permesinan

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Pelestarian Lingkungan Hayati

Seluruh pabrik gula dilingkungan sekitar lokasi perusahaan berkomitmen untuk menjaga pelestarian lingkungan hayati, yaitu dengan menanam tanaman dalam rangka penghijauan yang dilakukan hampir setiap tahunnya. Seperti yang dilakukan PG Ngadiredjo pada tahun 2017,yang telah menanam 100 pohon. Dimasa-masa mendatang, hampir setiap PG sudah membuat rencana penghijauan dan lebih diarahkan pada kekonservasi tanaman langka seperti tanaman Mojopahit (*icon* Mojokerto) dan tanaman Dewandaru.

Sementara PG Pesantren Baru, untuk kedapannyajuga merencanakan penanaman pohon di desa Truning kabupaten Kediri yang merupakan sumber mata air untuk sungai Kresek,

4. Improve the performance of environmental processing, always pay attention to conservation of land, water and biodiversity on an ongoing basis.

5. Optimize resources to develop the potential for saving energy, water and environmentally friendly production under the Reduse, Reuse and Recycle principles and reducing greenhouse gas emissions in industrial activities
6. Take an active role in environmental care programs as a form of corporate social responsibility to the surrounding community.

In the meantime, the Company also implements energy policies, including:
1. Establish and continuously review energy conservation programs, by optimizing energy-efficient equipment and utilizing renewable energy sources.
2. Perform energy efficiency on steam, electricity, water and CO2 generation.

To support the policy, PTPN X has a corporate strategy, namely by encouraging the realization of efficiency, diversification and optimization in an effort to improve competitiveness and sustainability by maintaining environmental balance. Efficiency is, reducing fuel and energy consumption, overcoming various engineering barriers, reducing factory maintenance costs. Diversification is implemented in the beyond sugar transformation into an integrated sugarcane based industry from upstream to downstream. While Optimalization, is accelerating rendemen by pressing sugar losses through the improvement of milling extraction performance and machining efficiency.

PROGRAMS AND ACTIVITIES UNDERTAKEN

Biodiversity Conservation

All sugar mills around the Company are committed to preserving the biological environment by planting crops in the framework of afforestation done almost every year. As PG Ngadiredjo did in 2017, which has planted 100 trees. In the future, almost every PG has made a greening plan and more directed to the conservation of rare plants such as Mojopahit (icon of Mojokerto) and Dewandaru plants.

While PG Pesantren Baru, for the future is also planning the planting of trees in Truning Kediri Village of Kediri Regency, which is the source of the spring for Kresek river, where in the

dimana dalam musim giling, sungai tersebut berperan sebagai air buangan injeksi kondensor.

Pengelolaan Limbah

Terkait dengan pengelolaan limbah, Perseroan telah memiliki beberapa program penanganan limbah, sebagai berikut:

1. Penanganan Limbah Cair
   Penanganan air limbah yang berasal dari sisa bekas air sekrapan (*juice heater, evaporator*), bocoran nira, gula, *stroop*, air buangan ketel (*blowdown*) dan air pendingin gilingan sebelum dibuang ke badan sungai diolah menuju IPAL. Sedangkan air limbah yang berasal dari bekas pendingin kondensor *evaporator, vacuum pan,*dan *rotary vacuum filter* yang dinamakan air jatuhan, sebagian di*recycling*. Kemudian untuk menurunkan suhunya, digunakan *spray pond* yang selanjutnya digunakan kembali sebagai air injeksi dicampur dengan air sungai Brantas.

2. Penanganan Limbah Udara
   a. Pemeliharaan secara terus menerus terhadap *dust collector* dan peralatan penunjang lainnya, sehingga *dust collector* dapat bekerja lebih baik dan efektif, agar debu dapat tertangkap lebih sempurna.
   b. Mengupayakan pembakaran yang sempurna pada ketel, dengan:
      i. Meningkatkan kadar kering ampas tebu minimal 50% sebelum ampas tersebut masuk ke dalam dapur ketel.
      ii. Pengaturan pengisian ampas ke dalam dapur ketel secara teratur.
      iii. Pemberian oksigen secara teratur melalui *off fan*
      iv. Pembersihan abu secara kontinyu
      v. Pemakaian *full* bahan bakar ampas tanpa residu.
   c. Memasang *waring*/jaring penutup pada *conveyor* ampas dan samping *bagasse house* untuk mengurangi pencemaran ampas halus.
   d. Penanaman tanaman keras di sekeliling *emplasement* pabrik sehingga pencemaran debu dari pabrik gula (ampas tebu, abu ketel dan angkutan tebu) dapat ditekan seminimal mungkin dan tidak menyebar ke daerah/lingkungan sekitarnya. Penanaman tanaman tersebut sekaligus dimaksudkan untuk memberikan keindahan dan kesejukan di daerah pabrik gula.

3. Penanganan Limbah Padat
   Untuk pencegahan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh limbah padat, maka dilakukan penanganan pada masing-masing jenis limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik gula, sebagaimana penjelasan berikut ini:

milling season, the river acts as a condensor injection water.

Waste Management

In relation to waste management, the Company already has several waste management programs, as follows:

1. Liquid Waste Management
   Handling of wastewater from the residual water scrap (juice heater, evaporator), leakage of sap, sugar, stroop, blowdown water and milled cooling water before being disposed to the river processed to WWTP. While the wastewater from the former cooler condenser evaporator, vacuum pan, and rotary vacuum filter called water fall, some portion are being recycled. Afterward to lower the temperature, spray pond is used and then reused as injection water mixed with Brantas river water.

2. Air Waste Management
   a. Continuous maintenance of the dust collector and other supporting equipment, so that the dust collector can work better and more effectively in order to catch the dust more perfectly.
   b. Seeking perfect combustion on the kettle, by:
      i. Increase the dryness of dregs at least 50% before going into the boiler kitchen.
      ii. Filling the dregs into the boiler kitchen regularly.
      iii. Providing oxygen regularly through off fan
      iv. Continuous cleaning of ash
      v. Using dregs fuel fully without residue.
   c. Installing waring/covering net on dregs and side conveyor bagasse house to reduce contamination of fine pulp.
   d. Planting hard plants around the emplasement of the mill, so that dust contamination from the sugar mill (dregs, ash kettle and sugar cane transport) can be minimized and not spread to the surrounding area/environment. Planting these plants at once is intended to provide beauty and coolness in the sugar mill area.

3. Solid Waste Management
   To prevent the occurrence of pollution caused by solid waste, the handling of each type of solid waste produced by the sugar mill, as explained below:

a. Blotong dan Abu Ketel
Blotong sebanyak ± 3,5 % tebu dan abu ketel sebanyak ± 2,5 % tebu banyak mengandung zat organik yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan kompos sebagai contoh di PG Ngadiredjo di areal HGU Sumberlumbu, Onggoboyo dan Galuhan. Penanganan di dalam pabrik diupayakan jumlahnya sekecil mungkin, cepat keluar dari *emplasement* dan tidak mencemari lingkungan. Apabila ada kendala alat transportasi, blotong dan abu sementara ditempatkan di tempat yang telah disediakan di *emplasement*, yang selanjutnya akan diangkut kembali ke areal HGU. Dalam perjalanan ke tempat penimbunan, diupayakan menghindari adanya ceceran, dengan jalan memberikan penutup pada alat pengangkutan.

b. Ampas
Ampas yang dihasilkan dari Stasiun Gilingan, yakni kurang lebih 30% tebu, dimanfaatkan sebagai bahan bakar ketel. Kelebihan ampas disimpan dalam gudang ampas untuk persiapan masa giling tahun berikutnya.

4. Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Limbah B3 yang dihasilkan PG Ngadiredjo berupa oli bekas, *accu* bekas, *cartridge* bekas, majun bekas, *electrical waste*, dan lampu neon bekas.Oli bekas berasal dari oli pendingin gilingan, *turbine alternator* dan kendaraan bermotor. *Accu* bekas berasal dari kendaraan bermotor dan diesel. Untuk pengelolaan limbah B3 di pabrik gula adalah sebagai berikut:
   a. Oli bekas ditampung dalam *drum*, disimpan sementara di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3. Oli bekas diserahkan kepada pihak ketiga dengan bukti berupa *Hazardous Waste Manifest*.
   b. *Accu* bekas disimpan sementara di TPS B3 (dalam jumlah kecil), selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga dengan bukti berupa *Hazardous Waste Manifest*.
   c. Lampu neon bekas dikumpulkan di TPS B3 selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga dengan bukti berupa *Hazardous Waste Manifest*.
   d. *Cartridge* bekas, majun bekas dan *electrical waste* dikumpulkan di TPS B3 (dalam jumlah kecil).

5. Penanganan Kebisingan
   a. Memberikan alat *ear plug* kepada para pekerja di bagian yang rawan terhadap kebisingan.
   b. Penanaman tanaman keras di sekitar lingkungan pabrik yang berguna untuk *buffer*/tanaman penyangga tingkat kebisingan yang keluar daerah PG.

a. Blotong and Ash Kettle
Blotong as much as ± 3.5% of sugarcane and ash kettle as much as ± 2.5% of sugarcane contain many organic substances that are used as the basic composting, for example in PG Ngadiredjo in HGU Sumberlumbu, Onggoboyo and Galuhan area. The handling inside the mill is kept as small as possible, quickly out of the emplasement and does not pollute the environment. If there are any constraints of transportation, blotong and ash are temporarily placed in the space provided in the emplacement, which will then be transported back to the HGU area. On the way to the landfill, attempts are made to avoiding spills by placing a cover on the transport tool.

b. Dregs
The waste generated from the Milliong Station, which is approximately 30% of sugar cane, is used as a boiler fuel. Excess dregs are stored in the dregs warehouse for the preparation of the following milling period.

4. Hazardous and Toxic Waste (B3) Management
B3 waste generated by PG Ngadiredjo in the form of used oil, used batteries, used cartridges, used plums, electrical waste, and used fluorescent lamps. Used oils derived from oil cooling mill, turbine alternator and motor vehicle. Used batteries came from motor vehicles and diesel. The management of B3 waste in sugar mill are as follows:
   a. Used oils are stored in drum, temporarily stored in B3 Temporary Storage Area (TPS). Used oil is delivered to a third party with evidence of Hazardous Waste Manifest.
   b. Used batteries are temporarily stored in TPS B3 (in small quantities), then being forwarded to a third party with evidence of Hazardous Waste Manifest.
   c. Used fluorescent lamps are collected at TPS B3 are then handed over to a third party with evidence of Hazardous Waste Manifest.
   d. Used cartridge, used plaster and electrical waste are collected at TPS B3 (in small quantities).

5. Noise Management
   a. Provide ear plug tools to workers in noise-prone areas.
   b. Planting of hard plants around the mill environment which is useful for buffer/plants of noise level out of PG area.

Skema IPAL

IPAL Scheme

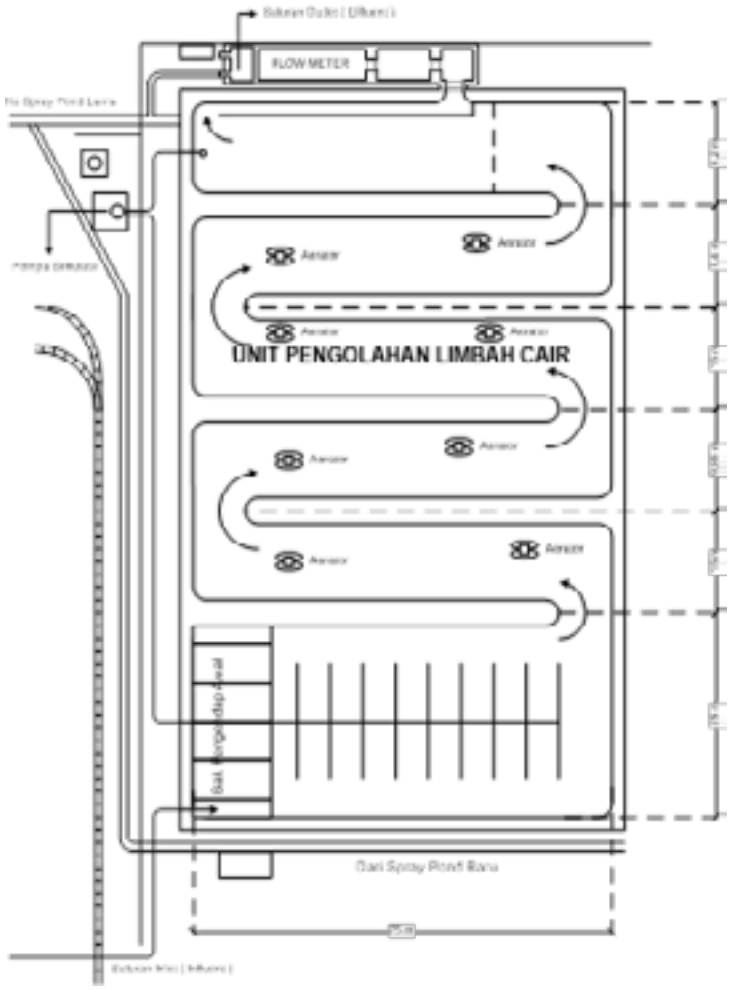

AMDAL, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL)

Adanya Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) dari setiap Pabrik Gula menunjukkan kepatuhan Perseroan kepada peraturan yang berlaku, sekaligus memberikan dasar bagi pengelolaan produksi Perseroan yang berbasiskan bisnis ramah lingkungan. Dalam RKL/RPL tersebut mencakup kewajiban titik operasi Perseroan untuk melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur; seperti pengukuran polusi air dan udara, pembuangan limbah, hingga tingkat kebisingan yang dapat muncul sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan Perseroan.

AMDAL, and Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan (RKL/RPL)

The existence of Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan (RKL/RPL) of each Sugar Factory demonstrates the Company's compliance with applicable regulations, while providing the basis for managing the Company's production based on environmentally friendly business. The RKL/RPL covers the obligation of the operating points of the Company to conduct environmental monitoring in accordance with the mandate of the Provincial Government of East Java; such as the measurement of air and water pollution, waste disposal, to the level of noise that

Pelaksanaan PROPER oleh kementerian Lingkungan Hidup dilaksanakan setahun sekali, tentunya untuk memenuhi warna minimum Biru, yang harus dilakukan adalah salah satunya dengan penaatan mengenai perijinan-perijinan. Berbagai perijinan yang paling mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

may arise as a result of the Company's production process. PROPER by the Ministry of Environment is implemented once a year, and one of the efforts need to be done to meet the minimum color of Blue is compliance with licenses. The most noticeable licenses are as follows:

				KETERANGAN *DESCRIPTION*
1	Pemenuhan ijin dan kesesuaian dengan peraturan perundangan *Fulfillment of license and conformity with laws and regulations*			
	a.	Ijin pembuangan limbah cair *Liquid waste disposal license*	Yang mengeluarkan *Issued by*	: Ijin dari Bupati / Walikota kepala daerah *License from the Regent/Mayor of regional head*
			Waktu berakhir *End time*	: 5 tahun sekali *5 years*
			Acuan standar *Standard Reference*	: SK Gubernur Jatim 52 tahun 2014. *Decree of East Java Governor 52 of 2014.*
			Keterangan *Remark*	: PG harus mengajukan perpanjangan IPLC 3 bulan sebelum berakhir *PG must submit an extension of IPLC 3 months before expiration*
	b.	Ijin pembuangan limbah kondensor *Condenser waste disposal license*	Yang mengeluarkan *Issued by*	: Ijin dari Bupati / walikota kepala daerah *License from the Regent/Mayor of regional head*
			Waktu berakhir *End time*	: 5 tahun sekali . *5 years*
			Acuan standar *Standard Reference*	: SK Gubernur Jatim 52 tahun 2014 *Decree of East Java Governor 52 of 2014.*

	c.	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 *Temporary storage permit for B3 waste*	Yang mengeluarkan *Issued by*	: SK dari Bupati/ walikota setempat. *Decree of local Regent/Mayor.*
			Waktu berakhir *End time*	: 5 tahun sekali *5 years*
			Jenis Limbah B3 *Type of B3 waste*	: Oli bekas, majun sarung tangan terkontaminasi, lampu bekas, aki bekas, *cartridge* bekas dan *electrical waste* *Used oil, contaminated gloves, used lamps, used batteries, used cartridge and electrical waste*
			Masa simpan *Storage Period*	: 180 hari. (aki bekas) 265 hari (non aki bekas) *180 days. (used batteries)* *265 days (non used batteries)*
			Keterangan *Remark*	:
	d.	Rekomendasi kelayakan lingkungan *Recommendation on environmental feasibility*	Nama dokumen *Document name*	: *Review* Dokumen Amdal/ RPL – UKL *Amdal/RPL - UKL Document Review*
			Kapasitas *Capacity*	: -
			Matriks K/P *K/P Matrix*	: Ada *Yes*
2		Sistem Manajemen Lingkungan *Environmental Management System*	Waktu sert. *Certification time*	: ISO 14001 : 2004, yang terbaru tahun 2015 *SO 14001: 2004, the latest of 2015*
			Lembaga sert. *Certification body*	: Terakreditasi KAN *Accredited KAN*
			Audit *Audit*	: Melakukan audit.tiap tahun *Conducting audit every year*
3		Program pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutannya *Community empowerment program and its sustainability*	Dapat dituangkan dalam program CSR *Can be included in the CSR program*	
4		Data laporan pemetaan sosial (*social mapping*) *Social mapping data report*	*Mapping* bisa via vendor *Mapping can be done via vendor*	

5	Keunggulan Pengelolaan lingkungan untuk menurunkan dampak akibat kegiatan perusahaan dan menurunkan pemakaian sumber daya alam *Excellent Environmental management to reduce the impact of corporate activities and reduce the use of natural resources*	Ada beberapa keunggulan dalam pengelolaan lingkungan yang bisa dijadikan acuan, antara lain seperti: • Pengadaan unit *system Automation* • Pengadaan unit alat dengan kapasitas motor (KW) yang lebih rendah dan dapat menggantikan mesin peralatan lain yang mempunyai kapasitas motor lebih besar. • Pengadaan unit close loop system pada IPAL dan jatuhan Kondensor *There are several advantages in environmental management that can be used as a reference, such as:* • *Procurement of Automation unit system* • *Procurement of appliance units with a lower capacity motor (KW) and can replace other machine equipment that has larger motor capacity.* • *Procurement of closed loop system unit on WWTP and condenser fall*
6	Data analisa limbah cair *Data analysis of liquid waste*	• Pengukuran dilakukan selama dalam giling setiap bulan. • Hasil analisa yang dikeluarkan oleh laboratorium jasa tirta menggunakan baku mutu Peraturan Gubernur Jatim 52 tahun 2014. • Semua nilai parameter ukur jika direlevansikan dengan SK Gub Jatim 52 tahun 2014 masih di bawah baku mutu atau taat. • *Measurements are made during the milling every month.* • *The analysis results issued by the laboratory services tirta using quality standards of East Java Governor Regulation 52 of 2014.* • *All parameters if measured by the Decree of East Java Governor 52 of 2014 is still below the standard or comply.*
7	Pengambilan *sample* kualitas air lebih dari yang dipersyaratkan (ABT/ABA) *Water quality sampling more than required (ABT/ABA)*	• Pengambilan contoh uji air badan air penerima yaitu saluran *upstream* dan *downstream* Sungai Brantas biasanya oleh Laboratorium PJT. • Pengambilan contoh uji air bawah tanah dilakukan oleh Laboratorium ESDM. • *Water sampling of recipient water body i.e upstream and downstream channels of Brantas River usually by PJT Laboratory.* • *Testing of underground water sampling conducted by ESDM Laboratory.*
8	Data debit dan limbah cair 5 tahun terakhir (parameter COD/BOD/TSS) beserta *trend graphic* *Data of debit and wastewater for the last 5 years (COD/BOD/TSS parameter) along with trend graphic*	Data debit limbah cair 5 tahun terakhir tercantum pada pemantauan harian debit dan pH harian *Liquid waste discharge data for the last 5 years are listed on debit daily monitoring and daily pH*
9	Perhitungan beban pencemaran air *Water pollution load calculation*	Perhitungan data beban pencemaran dihitung *The calculation of pollution load data is calculated*
10	Laboratorium uji kualitas air *Laboratory of water quality test*	Laboratorium : Lab. Kualitas Air Perum Jasa Tirta *Laboratory* *Perum Jasa Tirta Water Quality Laboratory* Sert. Akreditasi : - *Accreditation Certificate*

11	Data swapantau limbah cair (parameter minimal : debit/pH/COD) *Data of self-monitoring wastewater (minimum parameter: debit/pH/COD)*	Tiap PG melakukan swa pantau dengan parameter suhu, pH, Debit, dan COD. Rekap dalam bentuk format excel sdh dibuat. *Each PG performs self-monitoring on temperature, pH, debit, and COD parameters. Recap in the excel format has been created.*
12	Peta *layout* saluran *influent* dan saluran air hujan *Map of influent and rain channels layout*	• Peta saluran *influent* digambar • Peta saluran air hujan disiapkan • *Map of influent channel is drawn* • *Map of rain water channel is prepared*
13	Data mengenai neraca air *Data on water balance*	Disediakan *Provided*
14	Data analisa kualitas emisi/udara ambien tahun 2014 (termasuk pengukuran di genset) *Ambient air/emission quality data analysis of 2014 (including genset measurements)*	• Pengambilan sample ambien ada 2 titik desa , namun untuk PG GK dengan 3 titik desa • Pengambilan sample emisi gas buang dilakukan pada boiler masing masing PG dan genset • Pada pengukuran kualitas udara cerobong dan ambien parameter sesuai Gubernur Jatim 10 tahun 2009. • *Ambient sampling is taking in 2 villages, but for PG GK is 3 villages* • *Sampling of exhaust emissions is done on the boiler of each PG and genset* • *The measurement of air quality of chimney and ambient parameters is according to Governor of East Java 10 of 2009.*

Penggunaan Material dan Energi yang Ramah Lingkungan

PTPN X telah melakukan pengelolaan material input dengan optimal, hal ini terlihat dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Storage*/Penyimpanan
   Penyimpanan bahan baku tebu di gudang penerimaan sudah sesuai dengan standarkualitas penyimpanan tebu dilengkapi dengan SOP.
2. Bahan Baku Tebu diletakkan di Emplasement sebelum masuk ke Stasiun Gilingan
   Bahan Pembantu Proses diletakkan di Gudang Material,
3. Uji Kualitas / Sortir
   Setiap truk material tebu yang masuk ke area gudang sebelumnya dilakukan uji kualitas kadar tebu di area Penerimaan, hasilnya dicatat dipembukuan gudang dan dicatat di Form D/O yang dibawa oleh supir *truck*, dilengkapi dengan SOP
4. Prinsip FIFO
   Bahan baku tebu diletakkan di *Emplasement* sebelum masuk ke stasiun gilingan, dan sudah menerapkan prinsip FIFO dengan cara penomoran lori yang berfungsi sebagai alat angkut menuju statsiun giling, sedangkan bahan pembantu proses diletakkan di gudang material, dan pengeluaran material menggunakan sistem FIFO. Monitoring dan evaluasi FIFO terinput di SAP sesuai dengan kode material barang. Untuk FIFO tebu

Use of Environmentally Friendly Materials and Energy

PTPN X has been managing the input material optimally, as seen in the following stages:

1. Storage
   Storage of sugarcane raw materials in the reception warehouse is in accordance with the standard quality of sugarcane storage equipped with SOP.
2. Raw Material of Sugar Cane is placed in the Emplasement before entering to Milling Station
   Process Supporting Materials placed in Material Warehouse,
3. Quality Test/Sort
   Each sugar cane truck that entered the warehouse area beforehand was tested on the quality of sugar cane level in the Reception area, the result was recorded in the warehouse and recorded in Form D/O brought by the truck driver, equipped with SOP
4. FIFO Principle
   Sugarcane raw material is placed in the Emplasement before entering the milling station, and has applied the FIFO principle by way of lorry numbering that serves as a means of transport to milling statsiun, while the process supporting materials are placed in material warehouse, and material expenditure using FIFO system. FIFO monitoring and evaluation is inputted in SAP in accordance with goods material code. For FIFO sugar

termonitor lori nomor berapa, berat tebu dan waktu kedatangan/giling. Untuk bahan pembantu dibeli pada saat masa giling dan pada saat tutup giling tidak dilakukan pembelian.

Efisiensi Kegiatan Operasional Berbasis Sumber Daya Alam

PTPN X telah mengoptimalkan penggunaan bahan bakar biomass dari ampas tebu sebagai sumber energi terbarukan (ramah lingkungan). Energi digunakan dalam proses produksi khususnya sebagai *power plan* produksi dan *boiler* untuk menghasilkan uap panas penggerak. Selain itu telah pula dilakukan upaya konversi energi hampir secara keseluruhan, menggantikan sumber energi yang berasal dari PLN dan dari solar dengan menggunakan sumber energi biomas dari ampas tebu sebagai *power plan* dan *boiler*.

Penggunaan energi dari sumber biomas ini menghasilkan hampir 100% *supply* energi untuk *power plan* dan *boiler*. Listrik PLN dan *genset* secara garis besar hanya digunakan untuk penerangan pabrik dan kebutuhan kantor (penerangan dan peralatan kantor) walaupun sebagian kecil digunakan sebagai *supporting* proses produksi.

cane the lorry number, weight of cane and arrival/milling time are monitored. For process supporting materials are purchased during the milling period and there are no purchase at the closing of the milling

Efficiency of Operational Activities Based on Natural Resources

PTPN X has optimized the use of biomass fuel from dregs as a source of renewable energy (environmentally friendly). Energy is used in the production process especially as a production power plant and boiler to produce steam driving heat. In addition, energy conversion efforts have been carried out almost entirely, replacing the sources of energy derived from PLN and from diesel by using biomass energy sources from dregs as power plant and boiler.

The use of energy from these biomass sources produces nearly 100% energy supply for power plant and boiler. PLN electricity and genset are only used for the mill's lighting and office needs (lighting and office equipment) although a small part is used as supporting of production process.

Perbandingan pemakaian listrik dan air tahun 2016-2017

Comparison of Electricity and Water Consumption in 2016-2017

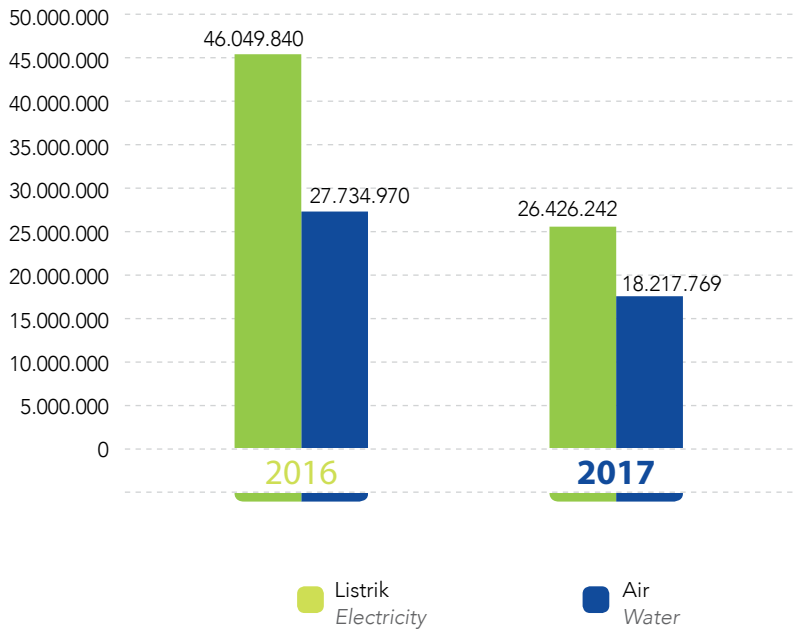

Perbandingan pemakaian solar tahun 2016-2017

Comparison of diesel usage in 2016-2017

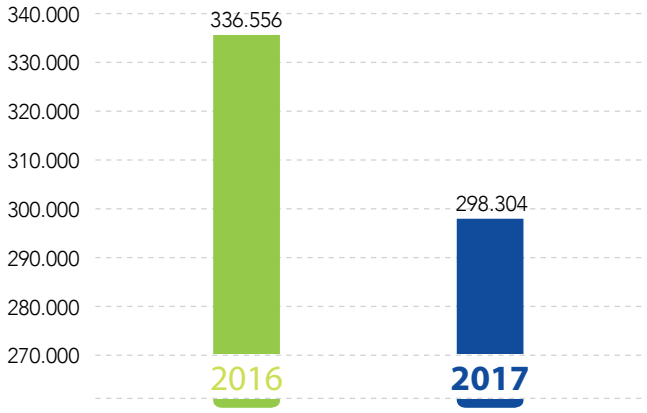

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

CERTIFICATION IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR

Sertifikasi Bidang Lingkungan Hidup yang Berlaku di Tahun 2017

Valid Environmental Certification in 2017

No	PG	Jenis Sertifikat *Certificate Type*	No Sertifikat *Certificate number*	Tangal Dikeluarkan *Date Issued*	Masa Berlaku *Validity Period*	Dikeluarkan Oleh *Issued by*
1	KB	ISO 14001:2015	EA 170432	19 Desember 2017 *December 19, 2017*	18 Desember 2020 *December 18, 2020*	EQA
		PROPER BIRU *BLUE PROPER*	-	2016	2017	Kementerian LH & Kehutanan *Ministry of Environment & Forestry*
		INDUSTRI HIJAU *GREEN INDUSTRY*	-	Desember 2017 *December 2017*	2018	Kementerian Perindustrian *Ministry of Industry*
2	GK	ISO 14001:2015	QA-D/ IDN/ *14001/1051*	20 Desember 2016 *December 20, 2016*	19 Desember 2019 *December 19, 2019*	QA Technic
		INDUSTRI HIJAU *GREEN INDUSTRY*	-	6 September 2016 *September 6, 2016*	2017	Kementerian LH & Kehutanan *Ministry of Environment & Forestry*
		INDUSTRI HIJAU *GREEN INDUSTRY*	-	Desember 2017 *December 2017*	2018	Kementerian Perindustrian *Ministry of Industry*

No	PG	Jenis Sertifikat *Certificate Type*	No Sertifikat *Certificate number*	Tangal Dikeluarkan *Date Issued*	Masa Berlaku *Validity Period*	Dikeluarkan Oleh *Issued by*
3	TK	ISO 14001:2015	EA 170433	19 Desember 2017 *December 19, 2017*	18 Desember 2020 *December 18, 2020*	EQA
		PROPER BIRU *BLUE PROPER*	-	2016	2017	Kementerian LH & Kehutanan *Ministry of Environment & Forestry*
		INDUSTRI HIJAU *GREEN INDUSTRY*	-	Desember 2017 *December 2017*	2018	Kementerian Perindustrian *Ministry of Industry*
4	DB	ISO 14001:2015	EA 170430	19 Desember 2017 *December 19, 2017*	18 Desember 2020 *December 18, 2020*	EQA
		PROPER BIRU *BLUE PROPER*	-	2016	2017	Kementerian LH & Kehutanan *Ministry of Environment & Forestry*
		INDUSTRI HIJAU *GREEN INDUSTRY*	-	Desember 2017 *December2017*	2018	Kementerian Perindustrian *Ministry of Industry*
5	LS	ISO 14001:2004	2013-0591	21 Desember 2016 *December 21, 2016*	14 September 2018 *September 14, 2018*	TUV SUD PSB
		PROPER BIRU *BLUE PROPER*	-	2016	2018	Kementerian LH & Kehutanan *Ministry of Environment & Forestry*
6	MR	ISO 14001:2004	71535/A/0001/ UK/En	20 Oktober 2015 *October 20, 2015*	14 September 2018 *September 14, 2018*	URS
		PROPER BIRU *BLUE PROPER*	-	2016	2017	Kementerian LH & Kehutanan *Ministry of Environment & Forestry*
		INDUSTRI HIJAU *GREEN INDUSTRY*	-	Desember 2017 *December 2017*	2018	Kementerian Perindustrian *Ministry of Industry*

No	PG	Jenis Sertifikat *Certificate Type*	No Sertifikat *Certificate number*	Tangal Dikeluarkan *Date Issued*	Masa Berlaku *Validity Period*	Dikeluarkan Oleh *Issued by*
7	PSB	ISO 14001:2004	2015-0659	23 Oktober 2015 *October 23, 2015*	14 September 2018 *September 14, 2018*	TUV SUD PSB
		PROPER BIRU *BLUE PROPER*	-	2016	2017	Kementerian LH & Kehutanan *Ministry of Environment & Forestry*
		INDUSTRI HIJAU *GREEN INDUSTRY*	-	Desember 2017 *December 2017*	2018	Kementerian Perindustrian *Ministry of Industry*
8	NGA	ISO 14001:2004	56576/b/001/ UK/En	14 Oktober 2013 *October 14, 2013*	14 September 2018 *September 14, 2018*	URS
		PROPER BIRU *BLUE PROPER*	-	2016	2017	Kementerian LH & Kehutanan *Ministry of Environment & Forestry*
		INDUSTRI HIJAU *GREEN INDUSTRY*	-	Desember 2017 *December 2017*	2018	Kementerian Perindustrian *Ministry of Industry*
9	MP	ISO 14001:2015	56216/b/0001/ UK/En	14 Desember 2016 *December 14, 2016*	9 Oktober 2019	URS
		PROPER BIRU *BLUE PROPER*	-	2016	2017 *October 9, 2019*	Kementerian LH & Kehutanan *Ministry of Environment & Forestry*

PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Di tahun 2017, hampir semua PG rata-rata bisa dikatakan tidak ada pengaduan dari masyarakat terkait lingkungan, hanya sebagian kecil saja di PG Pesantren Baru yang mengeluhkan abu yang beterbangan di desa Ketami dan Ngletih. Pengaduan biasanya di tujukan ke bagian Humas/ Sekum bisa melalui telepon maupun tertulis.

Dari setiap keluhan yang melalui telepon langsung di respon dengan menelpon bagian terkait, misal dalam hal ini RC Bagian *Boiler* maupun masinis jaganya. Keluhan warga

COMPLAINTS ON ENVIRONMENTAL PROBLEMS

By 2017, for all PG, there were no complaints from the community related to the environment on average. Small complaints were only received in PG Pesantren Baru about the ashes that fly in Ketami and Ngletih village. Complaints are usually addressed to the Public Relations, either by phone or in writing.

Every incoming complaint through the phone is directly responded by relevant parties, for example in this case RC of Boiler and the engineer. The slightest complaint from

sekecil apapun tidak pernah di anggap remeh, semua akan masuk dalam agenda rapat pagi (*coffee morning*) untuk di cari solusinya agar keluhan akan cepat terselesaikan dan tidak akan timbul lagi keluhan yang sama.

communities is never underestimated, all will be included in morning meeting agenda (coffee morning) and being discussed to find a quick resolution and prevention for re-occurence..

Biaya dan/atau Investasi Tanggung Jawab Sosial Aspek Lingkungan Hidup

Cost and/or Investment of Social Responsibility on Environmental Aspects

Perihal	2017 (Rp)/(IDR)	2016 (Rp)/(IDR)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah (Rp)/(IDR)	Persentase (%)
Biaya/investasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup: • Perbaikan IPAL & *Spraypond* • Perabatan Lantai IHK yang rusak • Perbaikan peralatan2 lain seperti di stasiun ketel dan lain-lain	8.298.423.757	9.759.632.607	(1.461.208.850)	-14,97%

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Corporate Social Responsibility on Employment, Occupational Health and Safety

KEBIJAKAN

PT Perkebunan Nusantara X meyakini bahwa Karyawan sebagai capital/ aset yang sangat berharga bagi Perseroan, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan sumber daya manusia yang ada, PTPN X berkomitmen menjadi perusahaan Agroindustri terkemuka yang berwawasan lingkungan.

PT Perkebunan Nusantara X berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di lingkungan pabrik gula dan bisnis tembakau. Kualitas pengelolaan K3 akan sangat menentukan keselamatan dan kenyamanan Karyawan dalam bekerja sehingga bertambah tingkat produktivitasnya.

Upaya-upaya meningkatkan kualitas K3 dilakukan secara berkelanjutan dengan terus mempertahankan dan meningkatkan pencapaian sertifikat SMK3 bagi Unit Usaha secara berkala termasuk antara lain dengan implementasi green industry, pengelolaan limbah berwawasan lingkungan, dan upaya zero accident. Penerapan K3 menuntut adanya sistem yang terintegrasi di lingkungan bisnis yang bisa menciptakan suasana terbaik bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Aspek fisiologis dan psikologis diperhatikan, sehingga para tenaga kerja nyaman dan sehat dalam menunaikan tugasnya untuk mencapai produktivitas yang optimal

POLICY

PT Perkebunan Nusantara X believes that employee is a very valuable capital/asset for the Company, therefore the Company is committed to improving occupational health and safety. With the existing human resources, PTPN X is committed to become a leading environmentally sound agro-industry company.

PT Perkebunan Nusantara X seeks to improve the quality of employment, occupational health and safety (K3) management in the sugar mills and tobacco business. K3 management quality will greatly determine the safety and comfort of employees in carrying out their work to increase their productivity level.

Efforts to improve the K3 quality are carried out continuously by maintaining and improving the achievement of SMK3 certificate for Business Units periodically including the implementation of green industry, environmental sound waste management, and zero accident. The implementation of K3 requires an integrated system in the business environment that can create the best atmosphere for all parties involved in it. Physiological and psychological aspects are considered, so that the workers are comfortable and healthy in fulfilling their duties to achieve optimal productivity.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Human Capital Maturity Level

Perseroan terus melakukan upaya dalam mengelola tenaga kerja sebagai *capital*/aset Perseroan. Berdasarkan hasil *assessment* dari GML Jakarta, pada tahun 2017 *scor Human Capital Maturity Level* PTPN X mendapatkan nilai 2,65 atau berada pada *ranking* 4 di *Holding Group* Perkebunan Nusantara. Dimasa mendatang, Perseroan terus berupaya dan merancang program-program dalam pengelolaan ketenagakerjaan yang lebih profesional.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Perseroan memberikan kesempatan kerja yang sama, tidak membeda-bedakan *gender*, suku, agama, ras, dan golongan. Dalam rangka menjamin kesetaraan *gender*, Perseroan memberikan cuti hamil bagi karyawan perempuan sesuai dengan PKB dan peraturan perundangan yang berlaku, menyediakan ruang laktasi, dan memberikan kesempatan yang sama untuk berkarir dan memberikan kontribusi bagi Perseroan.

PROGRAMS AND ACTIVITIES UNDERTAKEN

Human Capital Maturity Level

The Company continues to manage its employee as capital/ asset for the Company. Based on the assessment by GML Jakarta, in 2017 the Human Capital Maturity Level score of PTPN X was 2.65 or ranked 4th in the Perkebunan Nusantara Holding Group. In the future, the Company continues to work on and design programs in a more professional employee management.

Gender Equality and Job Opportunities

The Company provides equal employment opportunities, not discriminating against gender, ethnicity, religion, race, and class. In order to ensure gender equality, the Company grants maternity leave for female employees in accordance with PKB and prevailing laws and regulations, provides lactation space, and gives equal opportunities for a career and contribution to the Company.

Sarana dan Keselamatan Kerja

Dalam upaya memberikan perlindungan karyawan dalam bekerja, Perusahaan menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memadai sehingga diharapkan tenaga kerja nyaman dan sehat dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya.

Tingkat Turnover Karyawan

Turnover merupakan sebuah proses yang akan dialami oleh semua karyawan, karena regenerasi organisasi diperlukan agar tetap *sustainable* dan berdaya saing.

Work Safety Equipment

In an effort to provide employee protection in their works, the Company provides adequate personal protective equipment (PPE) so that the employees are expected to be comfortable and healthy in carrying out their tasks according to their responsibilities.

Employee Turnover

Turnover is a process that will be experienced by all employees, because organizational regeneration is needed to remain sustainable and competitive.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility on Social and Community Empowerment

KEBIJAKAN

Kehadiran Perseroan harus memberikan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya yang berada di sekitar lokasi usaha. Dengan mengemban misi sebagai "Agen Perubahan", Perseroan berupaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan hubungan yang mutual dan harmonis dengan masyarakat.

Di samping itu, misi "Agen Perubahan" juga diimplementasikan melalui komitmen Perseroan untuk mewujudkan korporasi yang anti korupsi. Semangat anti korupsi juga harus ditularkan kepada pemangku kepentingan, dengan tujuan agar pengelolaan korporasi yang sehat akan berdampak positif terhadap etika dan kualitas kehidupan di sekitar lokasi usaha.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sebagai eks-BUMN dengan Negara Republik Indonesia sebagai entitas induk akhir, Perseroan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program Pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah disahkan melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana terakhir diubah dengan PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program ini memiliki 2 (dua) aspek besar yang patut menjadi sorotan, yaitu Program Kemitraan dengan bentuk pinjaman modal kepada mitra binaan; dan Program Bina Lingkungan yang berbentuk bantuan langsung kepada masyarakat. Sumber dana program ini disisihkan 4% dari laba setelah pajak BUMN.

Dengan kemitraan usaha yang telah terjalin selama bertahun-tahun, pelaksanaan PKBL Perseroan menyasar kepada petani-petani mitra binaan Perseroan, dengan tujuan membantu permodalan yang dibutuhkan, sekaligus memberikan bantuan langsung dalam bentuk pembinaan kemitraan, pendidikan, pembangunan sarana ibadah dan fasilitas umum, serta beberapa bentuk lainnya. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Perseroan untuk dapat tumbuh bersama petani sebagai bagian dari *platform* BUMN yang berperan menjadi Agen Pembangunan.

POLICY

The Company's presence should have a positive impact on the community, especially those located around the business location. With the mission as "Agent of Change", the Company seeks to realize sustainable development through the development of mutual and harmonious relationships with the community.

In addition, the "Agent of Change" mission is also implemented through the Company's commitment to realize an anti corruption corporation. The spirit of anti-corruption should also be transmitted to stakeholders, with the aim that sound corporate governance will have a positive impact on the ethics and quality of life around the business location.

Partnership and Community Development Program

As an ex-SOE with the Republic of Indonesia as the ultimate parent entity, the Company has an obligation to implement the Government program in an effort to improve the level of community welfare. One of them is through Partnership and Community Development Program (PKBL) which has been legalized through the Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Enterprises and Community Development Program, as recently amended by PER-03/MBU/12/2016 on Amendment to Regulation of Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises.

This program has 2 (two) major aspects that should be highlighted, namely Partnership Program in the form of loan capital to the fostered partners; and Community Development Program in the form of direct assistance to the community. The fund source of the program is by allocating 4% of the SOE's after-tax profit.

With the business partnerships that have been established for many years, the implementation of the Company's PKBL is targeted to the farmers of the Company's fostered partners, with the aim of assisting the required capital, as well as providing direct assistance in the form of coaching, education, construction of religious facilities and public facilities, and other forms. This is also in line with the Company's commitment to grow with the farmers as part of the SOE platform as the Development Agent.

Besaran penyaluran PKBL dapat dilihat pada bagan dan tabel di bawah ini.

The amount of PKBL distribution can be seen in the chart and the table below.

Jumlah Penyaluran PKBL Tahun 2016 dan 2017
(dalam jutaan Rupiah)

Total Distribution of PKBL in 2016 and 2017
(in million rupiah)

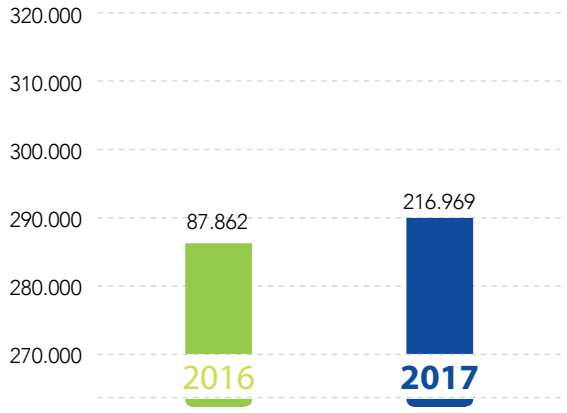

Program Kemitraan
Partnership Program

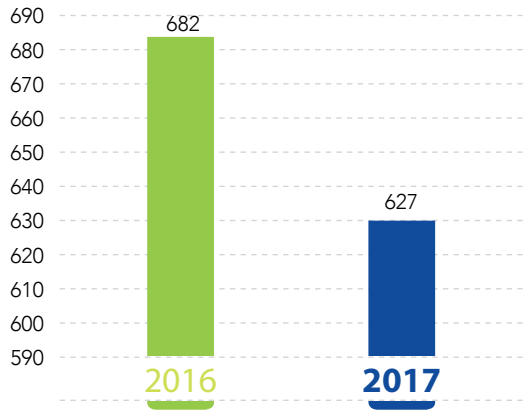

Program Bina Lingkungan
Community Development Program

Jumlah Penyaluran Program Kemitraan Tahun 2016 dan 2017

Total Distribution of Partnership Program in 2016 and 2017

Sektor Usaha *Business Sector*	**2017**		**2016**	
	Unit	**Jumlah** *(Rp-ribu)/ Total (IDR-thousand)*	**Unit**	**Jumlah** *(Rp-ribu)/ Total (IDR-thousand)*
Industri *Industry*	-	-	5	205.000
Perdagangan *Trading*	15	730.000	12	208.000
Pertanian *Agriculture*	1	60.000	1	10.000
Peternakan *Farms*	4	450.000	4	285.000
Perkebunan *Plantation*	1.769	132.550.000	857	64.254.656
Perikanan *Fishery*	1	75.000	-	-
Jasa *Services*	4	162.500	4	215.000
Dana Pemb. Kemitraan *Fostering Partnerships Fund*	-	-	-	-
Lainnya *Others*	-	-	-	-
Jumlah *Total*	1.794	134.027.500	883	65.177.656

Jumlah Penyaluran Program Bina Lingkungan Tahun 2016 dan 2017

Total Distribution of Community Development Program 2016 and 2017

Sektor *Sector*	**2017** *(Rp-ribu)/ (IDR-thousand)*	**2016** *(Rp-ribu)/ (IDR-thousand)*
Pendidikan dan Pelatihan *Education and Training*	107.100	92.500
Korban Bencana Alam *Victims of natural disasters*	87.406	-
Peningkatan kesehatan *Health improvement*	-	5.000
Peningkatan Prasarana & Sarana Umum *Improvement of Public Infrastructure and Facilities*	127.500	-
Sarana Ibadah *Place of worship*	199.817	5.000
Pelestarian Alam *Natural Conservation*	7.500	-
Sosial Kemasyarakatan *Social Community*	97.268	389.500
Peningkatan Kapasitas Mitra Binaan *Capacity enhancement of fostered partners*	-	893
CSR	915.150	-
Jumlah *Total*	1.541.741	492.893

Selain penyaluran dari PKBL yang dikelola sendiri, Perseroan melakukan sinergi antar BUMN untuk dapat menyalurkan PKBL BUMN lainnya kepada petani mitra binaan Perseroan. Hal ini memungkinkan, mengingat Perseroan memiliki target dan sasaran PKBL yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

In addition to the channeling of its own managed PKBL, the Company synergizes among SOEs to to distribute other SOE PKBL to the Company's fostered partner farmers. This is possible considering that the Company has valid and accountable PKBL target and goals.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Terhadap Produk/Jasa serta Konsumen

Corporate Social Responsibility on Responsibility to Product/Services and Customers

KEBIJAKAN

Sebagai perusahaan manufaktur yang mengolah dan memproduksi hasil bumi, Perseroan memberikan perhatian yang besar terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Proses pengolahan dengan standarisasi yang telah ditetapkan juga menjadi fokus dan perhatian Perseroan untuk dapat memenuhi standar produk yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Sertifikasi dan Standarisasi

Dalam pelaksanaan CSR Perseroan di bidang tanggung jawab terhadap konsumen, rencana yang telah ditetapkan Perseroan adalah mempertahankan/memperbaharui beberapa sertifikasi dan standarisasi, meliputi:

1. Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk semua gula di seluruh Pabrik Gula Perseroan.
2. Sertifikasi halal untuk produk gula.
3. ISO 9001 : 2008 tentang Sistem Manajemen Mutu
4. Nomor Registrasi Produk (NRP)

Wajib SNI dan sertifikasi halal untuk produk gula serta sertifikasi ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu telah diterapkan di seluruh Pabrik Gula yang dioperasikan oleh Perseroan. Melalui penerapan wajib SNI, sertifikasi halal dan ISO 9001, Perseroan mendorong setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan memenuhi standar keamanan pangan.

Informasi Produk

Agar produk Perseroan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan khususnya para pelanggan, Perseroan menggunakan berbagai macam bentuk media yang dikelola secara internal. Beberapa media penyampaian tersebut seperti situs web yang mudah di akses, telepon *hunting* serta email. Selain itu, untuk menginformasikan bahwa produk gula aman untuk dikonsumsi, Perseroan mencantumkan SNI, logo halal, NRP dan juga ISO 9001 di kemasan gula 50 kg.

PENGADUAN KONSUMEN

Dalam hal menangani pengaduan dari pelanggan, Perseroan memiliki *direct line* telepon yang langsung dikelola oleh Divisi Pemasaran. Perseroan membuka pengaduan dan penanggulangan terhadap seluruh keluhan pelanggan, baik itu pelanggan langsung (distributor besar) maupun

POLICY

As a manufacturing company that processes and produces crops, the Company gives attention greatly to the quality of its products. The processing with the standardization that has been set also became the focus and attention of the Company to be able to meet the standards of products in accordance with the applicable regulations.

PROGRAMS AND ACTIVITIES UNDERTAKEN

Certification and Standardization

In the implementation of the Company's CSR on responsibility to customers, the plan that has been established by the Company is maintaining/updating several certification and standardization, includes:

1. Mandatory of Indonesian National Standard (SNI) for Sugar in all Company's Sugar Mills.
2. Halal certification for sugar products.
3. ISO 9001: 2008 on Quality Management Systems
4. Product Registration Number (NRP)

Mandatory SNI and halal certification for sugar products and the certification of ISO 9001 Quality Management System has been applied across the sugar mills operated by the Company. Through the application of SNI, the halal certification and ISO 9001, the Company encourages output of the Company's products to be high quality and meet the standards of food safety.

Product Information

In order for the Company's products to be understood by the stakeholders, especially customers, the Company uses various forms of media which are managed internally. Some of the delivery medium such as a website that is easy to access, hunting phone and email. In addition, to inform that its sugar products are safe for consumption, the Company include the SNI, the halal logo, NRP and also ISO 9001 at 50 kg sugar packaging.

CUSTOMER COMPLAINT

In terms of dealing with complaints from customers, the Company has a direct telephone line directly managed by the Marketing Division. The Company opens a complaint and response to all customers' complaints, either direct customers (large distributors) or end-customer. To the regular

konsumen akhir. Kepada pelanggan tetap atau rekanan, Perseroan memberikan *Person in Charge (PIC)* langsung yang menangani keluhan pelanggan di masing-masing Pabrik Gula.

customers or partners, the Company places a Person-in-Charge (PIC) directly to handle customers' complaints in their respective sugar factory.

Lampiran
Attachment

PT Perkebunan Nusantara X
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of December 31, 2017
and for the year then ended
with independent auditors' report

PT Perkebunan Nusantara X
Jalan Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya 60175
Telepon : (031) 3523143 (Hunting) Fax : (031) 3523167
Homepage : http//www.ptpn10.co.id
E-mail : contact@ptpn10.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

DIRECTORS STATEMENT REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAK/ *AND SUBSIDIARIES*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini / *We, the undersigned :*

1. Nama	Ir. Dwi Satriyo Annurogo, MT	*Name 1.*
Alamat Kantor	Jl Jembatan Merah No.3 – 11, Surabaya 60175	*Office address*
Alamat Rumah	Jl Keningar No.1 RT.006/RW.003 Gresik - 61118	*Home address*
Nomor Telepon	031-3522846	*Telephone Number*
Jabatan	Direktur Utama / *President Director*	*Position*
2. Nama	Slamet Djumantoro, SH, MM	*Name 2.*
Alamat Kantor	Jl Jembatan Merah No.3 – 11, Surabaya 60175	*Office address*
Alamat Rumah	Griya BNI Simpang No. 109 RT.002/RW.002, Grogol Selatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan - 12240	*Home address*
Nomor Telepon	031-3522847	*Telephone Number*
Jabatan	Direktur Komersil / *Commercial Director*	*Position*

Menyatakan bahwa : / *Declare that :*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perkebunan Nusantara X dan Entitas anak ; / *We are responsible for the preparation and presentation of PT Perkebunan Nusantara X and Subsidiaries's consolidated financial statements; 1.*
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. / *The Company and Subsidiaries's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards; 2.*
3. a. Semua Informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; / *All information has been fully and correctly disclosed in the company's consolidated financial statements; a. 3.*
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; / *The company's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts b.*
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan dan Entitas anak. / *We are responsible for PT Perkebunan Nusantara X and Subsidiaries's internal control systems 4.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This is our declaration, which has been made truthfully*

Surabaya, 4 Mei/ *May 2018*

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

Direktur Utama/ *President Director*	Direktur Komersil/ *Commercial Director*
Ir. DWI SATRIYO ANNUROGO, MT	**SLAMET DJUMANTORO, SH, MM**
Direktur Utama/ *President Director*	Direktur Komersil/ *Commercial Director*

METERAI TEMPEL 6000

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi | ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian ……..	1 - 3	…... *Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	*Consolidated Statement of Profit or Loss and* ……...*Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	..… *Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	7 - 8	…….. *Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian....	9 - 136	.. *Notes to the Consolidated Financial Statements*
Laporan Keuangan Tersendiri ……..	i - viii	……..*The Separate Financial Statements*

****

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-6934/PSS/2018

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Perkebunan Nusantara X

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara X ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Laporan No. RPC-6934/PSS/2018

The Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors
PT Perkebunan Nusantara X

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Perkebunan Nusantara X (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2017, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-6934/PSS/2018 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara X dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan satu hal

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2016/31 Desember 2015, untuk mengkoreksi perhitungan liabilitas imbalan kerja, penyajian penghasilan komprehensif lain dan akun terkait lainnya. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-6934/PSS/2018 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Perkebunan Nusantara X and its subsidiaries as of December 31, 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

As disclosed in Note 45 to the accompanying consolidated financial statements, the Company restated the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2016 and for the year then ended, and consolidated statement of financial position as of January 1, 2016/December 31, 2015, to correct calculation of employee benefit liability, presentation of other comprehensive income and other related accounts. Our opinion is not modified in respect of such matter.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-6934/PSS/2018 (lanjutan)

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2017, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Perkebunan Nusantara X (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi obyek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-6934/PSS/2018 (continued)

Other matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2017 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Perkebunan Nusantara X (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2017, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-6934/PSS/2018 (lanjutan)

Hal lain (lanjutan)

Menurut opini kami, informasi Keuangan Entitas Induk tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-6934/PSS/2018 (continued)

Other matter (continued)

In our opinion, the Parent Entity Financial Information as of December 31, 2017, and for the year ended is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements as of December 31, 2017 and for the year then ended taken as a whole.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Muhammad Kurniawan
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0240/*Public Accountant Registration No. AP.0240*

4 Mei 2018/*May 4, 2018*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31, 2017*	Disajikan kembali (Catatan 45)/ *As restated (Note 45)* 31 Desember/ *December 31, 2016*	1 Januari 2016/ 31 Desember 2015/ *January 1, 2016/ December 31, 2015*	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2g,2h, 2k,4,10	319.687.905.713	235.427.132.592	395.885.957.341	*Cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	2g,2k,5,10	959.882.823.223	967.565.780.768	975.000.000.000	*Restricted cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	2i,2k	250.000.000	5.000.000.000	-	*Short-term investment*
Piutang usaha, neto	2k,6				*Trade receivables, net*
Pihak berelasi, neto	2g,10	66.580.586.368	42.748.226.806	36.850.983.327	*Related parties, net*
Pihak ketiga, neto		109.237.835.243	107.735.229.188	146.539.133.921	*Third parties, net*
Piutang petani tebu rakyat, neto	2k,7	40.140.262.891	176.862.782.224	178.490.052.924	*Sugarcane farmers receivables, net*
Piutang lain-lain, neto	2k,8				*Other receivables, net*
Pihak berelasi	2g,10	6.873.438.211	9.542.861.985	6.731.200.378	*Related parties*
Pihak ketiga, neto		38.973.777.933	34.576.004.177	47.007.858.692	*Third parties, net*
Persediaan, neto	2j,11	738.995.126.389	905.980.683.474	595.597.261.033	*Inventories, net*
Pajak dibayar di muka	2t,19a	50.693.540.111	41.477.856.407	30.953.493.650	*Prepaid taxes*
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2l,9	11.690.441.425	7.279.932.454	2.772.926.117	*Advances and prepaid expenses*
Aset lancar lainnya		11.148.533.130	23.570.636.544	20.990.756.484	*Other current assets*
JUMLAH ASET LANCAR		**2.354.154.270.637**	**2.557.767.126.619**	**2.436.819.623.867**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang pihak berelasi jangka panjang	2g,2k, 10,12	1.424.945.314.253	1.216.017.167.331	889.417.682.345	*Long-term receivables from related parties*
Investasi saham	2e,10,13	13.190.600.380	13.190.600.380	15.209.971.476	*Investment in shares*
Aset pajak tangguhan, neto	2t,19e	294.452.996.440	282.365.171.295	207.846.082.814	*Deferred tax assets, net*
Tanaman perkebunan	2m,14				*Plantations*
Tanaman semusim		26.887.571.451	31.165.987.537	26.498.072.837	*Annual crops*
Tanaman menghasilkan		8.703.023	19.820.575	30.067.521	*Mature plantations*
Aset tetap, neto	2n,15	8.810.040.771.707	8.824.200.775.267	8.679.922.966.926	*Fixed assets, net*
Aset tetap - aset pengampunan pajak, neto	2n,15	1.973.576.064	2.650.230.711	-	*Fixed assets - tax amnesty assets, net*
Aset takberwujud, neto	2p,16	53.915.490.386	56.482.355.323	50.334.586.327	*Intangible assets, net*
Estimasi tagihan pajak	2t,19f	55.638.222.987	49.659.745.449	15.795.821.437	*Estimated claims for tax refund*
Uang muka pembelian aset tetap		26.720.727.556	22.835.938.272	5.180.869.824	*Advance payments on purchase of fixed assets*
Aset tidak lancar lainnya	2o,2r	11.912.452.197	7.663.432.304	836.068.906	*Other non-current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**10.719.686.426.444**	**10.506.251.224.444**	**9.891.072.190.413**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**13.073.840.697.081**	**13.064.018.351.063**	**12.327.891.814.280**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31, 2017*	Disajikan kembali (Catatan 45)/ *As restated (Note 45)* 31 Desember/ *December 31, 2016*	1 Januari 2016/ 31 Desember 2015/ *January 1, 2016/ December 31, 2015*	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	2k,17				*Trade payables*
Pihak berelasi	2g,10	-	311.162.730.750	-	*Related parties*
Pihak ketiga		186.634.757.466	155.513.366.190	62.470.235.567	*Third parties*
Beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2k,18	92.894.016.466	50.287.042.376	96.692.127.588	*Accrued expenses and short-term employee benefits liabilities*
Utang pajak	2t,19b	16.016.576.453	26.280.902.682	135.407.324.053	*Taxes payable*
Utang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi ("KKPE")	2g,2k, 10,20	174.662.945.262	242.547.956.959	205.831.736.897	*Food security and energy credit ("KKPE") payables*
Pinjaman jangka pendek	2g,2k, 10,21	475.713.711.590	220.418.586.533	139.152.180.431	*Short-term loans*
Utang lain-lain	2k,22				*Other payables*
Pihak berelasi	2g,10	4.974.858.079	6.366.721.640	2.574.040.524	*Related parties*
Pihak ketiga		273.331.054.528	129.891.115.374	86.641.750.068	*Third parties*
Uang muka pelanggan		63.214.228.224	20.129.771.509	9.458.682.421	*Advances from customers*
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2g,2k,10				*Current portion of long-term loans*
Pinjaman bank dan lainnya	23	153.006.253.591	137.444.633.957	204.062.606.237	*Bank and other loans*
Pinjaman sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	24	6.346.462.322	2.490.474.168	1.087.979.332	*Obligations under lease and consumer financing loans*
Bagian liabilitas pengampunan pajak yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	15	177.370.417	1.343.600.000	-	*Current portion of tax amnesty liability*
Bagian utang obligasi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2k,25	700.000.000.000	-	-	*Current portion of bonds payable*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**2.146.972.234.398**	**1.303.876.902.138**	**943.378.663.118**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2g,2k,10				*Long-term loans, net of current portion*
Pinjaman bank dan lainnya	23	994.472.205.887	1.247.910.613.028	661.461.183.232	*Bank and other loans*
Pinjaman sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	24	19.963.497.060	9.055.842.360	3.599.216.464	*Obligations under lease and consumer financing loans*
Liabilitas pengampunan pajak, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	15	661.920.056	762.831.862	-	*Tax amnesty liability, net of current portion*
Utang obligasi	2k,25	-	700.000.000.000	700.000.000.000	*Bonds payable*
Liabilitas imbalan kerja	2u,26	857.504.967.640	751.116.359.815	733.059.753.685	*Employee benefits liability*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**1.872.602.590.643**	**2.708.845.647.065**	**2.098.120.153.381**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		**4.019.574.825.041**	**4.012.722.549.203**	**3.041.498.816.499**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

			Disajikan kembali (Catatan 45)/ *As restated (Note 45)*		
	Catatan/ *Notes*	**31 Desember/ *December 31, 2017***	**31 Desember/ *December 31, 2016***	**1 Januari 2016/ 31 Desember 2015/ *January 1, 2016/ December 31, 2015***	
EKUITAS					***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk					***Equity attributable to the owners of the Parent Entity***
Modal saham					*Share capital*
Nilai nominal Rp1.000.000 per saham					*Par value Rp1,000,000 per share*
Modal dasar - 7.300.000 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 7.299.999 saham Seri B pada tahun 2017 dan 2016; 3.400.000 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 3.399.999 saham Seri B pada tahun 2015					*Authorized capital - 7,300,000 shares which consist of 1 Series A share and 7,299,999 Series B shares in 2017 and 2016; 3,400,000 shares which consist of 1 Series A share and 3,399,999 Series B shares in 2015*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.845.596 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 1.845.595 saham Seri B pada tahun 2017 dan 2016; 870.596 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 870.595 saham Seri B pada tahun 2015	27	1.845.596.000.000	1.845.596.000.000	870.596.000.000	*Issued and fully paid - 1,845,596 shares which consist of 1 Series A share and 1,845,595 Series B shares in 2017 and 2016; 870,596 shares which consist of 1 Series A share and 870,595 Series B shares in 2015*
Modal sumbangan	28	10.061.504.138	10.061.504.138	10.061.504.138	*Donated capital*
Komponen ekuitas lainnya	29	488.870.432	488.870.432	975.000.000.000	*Other component of equity*
Penghasilan komprehensif lain	2n,2u	7.101.139.627.500	7.101.139.627.500	7.126.062.047.189	*Other comprehensive income*
Saldo laba (akumulasi rugi)	2w				*Retained earnings (accumulation losses)*
Ditentukan penggunaannya		613.102.848.116	613.102.848.116	547.623.627.605	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		(561.899.225.207)	(558.378.792.261)	(278.406.571.212)	*Unappropriated*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		**9.008.489.624.979**	**9.012.010.057.925**	**9.250.936.607.720**	***Equity attributable to owners of the Parent Entity***
Kepentingan nonpengendali	2d,30a	45.776.247.061	39.285.743.935	35.456.390.061	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**9.054.265.872.040**	**9.051.295.801.860**	**9.286.392.997.781**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**13.073.840.697.081**	**13.064.018.351.063**	**12.327.891.814.280**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Year ended
December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*			
	2017	**Catatan/ *Notes***	**Disajikan kembali (Catatan 45)/ *As restated (Note 45)* 2016**	
PENDAPATAN	2.593.942.226.436	2w,31	2.260.373.519.789	***REVENUE***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.066.660.767.361)	2w,32	(2.009.574.938.291)	***COST OF SALES***
LABA KOTOR	**527.281.459.075**		**250.798.581.498**	***GROSS PROFIT***
Beban penjualan	(19.898.584.113)	2w,33	(19.548.917.789)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(328.740.296.897)	2w,33	(297.385.162.424)	*General and administrative expenses*
Beban operasi lain	(39.695.411.798)	2w,35	(137.705.389.636)	*Other operating expenses*
Pendapatan operasi lain	42.877.662.436	2w,35	50.202.581.530	*Other operating income*
LABA (RUGI) USAHA	**181.824.828.703**		**(153.638.306.821)**	***OPERATING PROFIT (LOSS)***
Pendapatan keuangan	65.198.621.516	2w	72.013.863.872	*Finance income*
Pajak final	(13.039.724.303)	2t	(14.384.364.235)	*Final tax*
Beban keuangan	(140.039.207.812)	2k,2w,34	(111.545.739.910)	*Finance expenses*
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK	**93.944.518.104**		**(207.554.547.094)**	***PROFIT (LOSS) BEFORE TAX BENEFIT (EXPENSE)***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(29.198.707.528)	2t,19c	54.998.433.249	***TAX BENEFIT (EXPENSE)***
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**64.745.810.576**		**(152.556.113.845)**	***PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya:				***Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent years:***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(81.593.875.792)	2u	3.425.631.207	*Re-measurement on employee benefits liability*
Pajak tangguhan terkait	20.398.468.949	2u,2t,19e	(856.407.801)	*Deferred tax effect*
Pendapatan komprehensif lain, neto	**(61.195.406.843)**		**2.569.223.406**	***Other comprehensive income, net***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**3.550.403.733**		**(149.986.890.439)**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
Year ended
December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*			
	2017	**Catatan/ *Notes***	**Disajikan kembali (Catatan 45)/ *As restated (Note 45)* 2016**	
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Profit (loss) for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk	56.327.592.760		(158.125.789.700)	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	8.418.217.816		5.569.675.855	*Non-controlling interests*
Jumlah	**64.745.810.576**		**(152.556.113.845)**	***Total***
Total laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Total comprehensive income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk	(4.007.921.075)		(155.234.907.545)	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	7.558.324.808	30b	5.248.017.106	*Non-controlling interests*
Jumlah	**3.550.403.733**		**(149.986.890.439)**	***Total***
Laba (rugi) per saham dasar	**30.520**	2y,37	**(96.273)**	***Basic income (loss) per share***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Year ended
December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Attributable to the owners of the parent entity*									
			Saldo laba (defisit)/ *Retained earnings (deficit)*								
	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Authorized issued and fully paid*	Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Modal sumbangan/ *Donated capital*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other component of equity*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan Non pengendali/ *Non-controlling Interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo 31 Desember 2015 (sebelum disajikan kembali)		**870.596.000.000**	**547.623.627.605**	**18.387.240.193**	**6.799.992.877.349**	**10.061.504.138**	**985.137.116.356**	**9.231.798.365.641**	**35.456.390.061**	**9.267.254.755.702**	***Balance as of December 31, 2015 (before restated)***
Dampak penyajian kembali	45	-	-	(296.793.811.405)	326.069.169.840	-	(10.137.116.356)	19.138.242.079	-	19.138.242.079	*Effects of restatements*
Saldo 31 Desember 2015 (disajikan kembali)		**870.596.000.000**	**547.623.627.605**	**(278.406.571.212)**	**7.126.062.047.189**	**10.061.504.138**	**975.000.000.000**	**9.250.936.607.720**	**35.456.390.061**	**9.286.392.997.781**	***Balance as of December 31, 2015 (as restated)***
Laba (rugi) tahun berjalan		-	-	(158.125.789.700)	-	-	-	(158.125.789.700)	5.569.675.855	(152.556.113.845)	*Profit (loss) for the year*
Penambahan modal saham	27	975.000.000.000	-	-	-	-	(975.000.000.000)	-	-	-	*Additional of share capital*
Pembayaran dividen tunai	36	-	-	(53.573.907.690)	-	-	-	(53.573.907.690)	-	(53.573.907.690)	*Cash dividend payment*
Cadangan umum	27	-	65.479.220.511	(65.479.220.511)	-	-	-	-	-	-	*General reserve*
Pajak atas revaluasi aset tetap	19i	-	-	-	(30.119.116.863)	-	-	(30.119.116.863)	-	(30.119.116.863)	*Tax on revaluation of fixed assets*
Reklasifikasi		-	-	(5.196.697.174)	5.196.697.174	-	-	-	-	-	*Reclassification*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		-	-	2.890.882.155	-	-	-	2.890.882.155	(321.658.749)	2.569.223.406	*Re-measurement on employee benefits liability*
Tantiem		-	-	(487.488.129)	-	-	-	(487.488.129)	(262.511.871)	(750.000.000)	*Tantiem*
Pembagian dividen tunai oleh Entitas Anak untuk kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	-	(1.419.407.600)	(1.419.407.600)	*Cash dividend paid by Subsidiaries to non-controlling interests*
Tambahan modal disetor dari pengajuan pengampunan pajak	29	-	-	-	-	-	488.870.432	488.870.432	263.256.239	752.126.671	*Additional paid in capital from tax amnesty filling*
Saldo 31 Desember 2016 (disajikan kembali)		**1.845.596.000.000**	**613.102.848.116**	**(558.378.792.261)**	**7.101.139.627.500**	**10.061.504.138**	**488.870.432**	**9.012.010.057.925**	**39.285.743.935**	**9.051.295.801.860**	***Balance as of December 31, 2016 (as restated)***
Laba tahun berjalan		-	-	56.327.592.760	-	-	-	56.327.592.760	8.418.217.816	64.745.810.576	*Profit for the year*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan imbalan kerja		-	-	(60.335.513.835)	-	-	-	(60.335.513.835)	(859.893.008)	(61.195.406.843)	*Re-measurement on employee benefits liability*
Koreksi tantiem		-	-	487.488.129	-	-	-	487.488.129	262.511.871	750.000.000	*Tantiem correction*
Pembagian dividen tunai oleh Entitas Anak untuk kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	-	(1.330.333.553)	(1.330.333.553)	*Cash dividend paid by Subsidiaries to non-controlling interests*
Saldo 31 Desember 2017		**1.845.596.000.000**	**613.102.848.116**	**(561.899.225.207)**	**7.101.139.627.500**	**10.061.504.138**	**488.870.432**	**9.008.489.624.979**	**45.776.247.061**	**9.054.265.872.040**	***Balance as of December 31, 2017***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
Year ended
December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	Catatan/ *Notes*	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	2.477.148.714.273		2.653.025.388.357	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok	(1.443.331.597.066)		(2.498.643.790.927)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran ke Direksi dan karyawan	(773.570.377.633)		(828.286.657.847)	*Cash paid to Directors and employees*
Kas yang digunakan untuk operasi	260.246.739.574		(673.905.060.417)	*Cash used in operations*
Pembayaran pajak	(53.826.274.696)		(101.647.267.520)	*Tax payment*
Pembayaran bunga atas pinjaman	(239.419.876.854)		(204.432.629.236)	*Interest payments on loans*
Penerimaan dari piutang Bone, Camming dan Takalar	365.356.904.339		163.469.225.735	*Proceeds from receivables of Bone, Camming and Takalar*
Pembayaran atas operasional Bone, Camming dan Takalar	(346.259.239.412)		(388.920.733.014)	*Payment for the operational of Bone, Camming and Takalar*
Penyaluran ke petani tebu rakyat	(294.350.335.916)		(319.014.369.508)	*Distribution to sugarcane farmers*
Pengembalian dari petani tebu rakyat	369.287.308.380		318.513.551.066	*Repayments from sugarcane farmers*
Lain-lain	145.454.360.872		856.660.998.796	*Others*
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**206.489.586.287**		**(349.276.284.098)**	***Net cash flows provided by (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian aset tetap	(108.217.801.788)		(377.752.527.485)	*Purchase of fixed assets*
Penempatan investasi jangka pendek	(250.000.000)		(5.000.000.000)	*Placement in short-term investment*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(108.467.801.788)**		**(382.752.527.485)**	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman bank	773.058.287.804		1.591.542.107.126	*Proceeds from bank loans*
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	450.000.000.000		-	*Proceeds from related parties*
Penerimaan pinjaman KKPE	283.452.505.144		573.893.468.892	*Proceeds from KKPE payables*
Pembayaran dividen	-	36	(53.573.907.690)	*Cash dividend payment*
Pembayaran dividen dari Entitas Anak kepada kepentingan nonpengendali	(1.253.402.955)		(1.400.000.000)	*Cash dividend payment from Subsidiaries to non-controlling interests*
Pembayaran angsuran atas pinjaman bank dan lainnya	(1.208.981.291.050)		(990.215.373.621)	*Installment payments on bank loans and others*
Pembayaran angsuran pinjaman KKPE	(310.037.110.321)		(548.676.307.873)	*Installment payments on KKPE payables*
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(13.761.011.378)**		**571.569.986.834**	***Net cash flows provided by (used in) financing activities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
Year ended
December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	Catatan/ *Notes*	2016	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**84.260.773.121**		**(160.458.824.749)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**235.427.132.592**	**4**	**395.885.957.341**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**319.687.905.713**	**4**	**235.427.132.592**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara X ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Akta No. 43 yang dibuat oleh Harun Kamil, S.H., notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8338.HT.01.01.TH96 tanggal 8 Agustus 1996, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 020/BH.13.01/Sept/1996 tanggal 18 September 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996 Tambahan No. 8681.

Akta Pendirian Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan Akta No. 11 tanggal 14 Maret 2016 oleh Nanda Faux Iwan, S.H., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh (Catatan 27) dan perubahan beberapa ayat dalam Anggaran Dasar. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0006223.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 April 2016.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah dengan Akta No. 1 tanggal 8 Januari 2018 oleh Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., mengenai pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0013960 tanggal 13 Januari 2018.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain melakukan budidaya tanaman, produksi hasil tanaman, perdagangan dan pemasaran, pengembangan usaha bidang perkebunan serta usaha lain yang menunjang usaha pokok Perusahaan.

Perusahaan berkedudukan di Jalan Jembatan Merah No. 3 - 11, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1996.

1. GENERAL

a. The Company's establishment and general information

PT Perkebunan Nusantara X (the "Company") was established on March 11, 1996 through Deed No. 43 of Harun Kamil, S.H., notary in Jakarta, and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by its Decision Letter No. C2-8338.HT.01.01.TH96 dated August 8, 1996, and registered on the Company List No. 020/BH.13.01/Sept/1996 dated September 18, 1996, as announced on State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated October 8, 1996, Supplement No. 8681.

The Company's Articles of Association has been amended several times, among other by Deed No. 11 dated March 14, 2016 of Nanda Faux Iwan, S.H., notary in Jakarta, related to the increase in authorized capital, additional issued and fully paid capital (Note 27) and change in several Articles of Association. The amendment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0006223.AH.01.02.Year 2016 dated April 1, 2016.

The latest amendment of Articles of Association by Deed No. 1 dated January 8, 2018 of Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., related to dismissal and appointment of the director of the Company. The amendment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0013960 dated January 13, 2018.

Based on Article 3 of the Articles of Association, the scope of activities of the Company comprises of the cultivation of crop, crop production, trading and marketing, plantation business development and other businesses that support the Company's main operations.

The Company is domiciled in Jembatan Merah Street No. 3 - 11, Surabaya, East Java. The Company started its commercial operations in 1996.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum

Melalui surat No. XX-PESWA/13/026 tanggal 19 April 2013, Perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam rangka Emisi Obligasi Perusahaan tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% dan nominal sebesar Rp700.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun melalui Bursa Efek Indonesia. Pernyataan pendaftaran tersebut dinyatakan efektif berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-198/D.04.2013 tertanggal 27 Juni 2013.

c. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak

Entitas anak yang dimiliki Perusahaan, secara langsung maupun tidak langsung, adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Public offering

Based on letter No. XX-PESWA/13/026 dated April 19, 2013, the Company submitted the Registration Statement to the Financial Services Authority ("OJK") relating to the Issuance of Corporate Bonds in 2013 with a fixed interest rate of 8.9% and nominal value of Rp700,000,000,000 with 5 year period through the Indonesia Stock Exchange. The registration statement became effective based on letter No. S-198/D.04.2013 dated June 27, 2013 of Financial Services Authority.

c. The Company and Subsidiaries' structure

Subsidiaries of the Company, directly or indirectly, are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Principal activity*	Tahun operasi/ *Start of operation*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination*	
				2017	2016	2017	2016
PT Mitratani Dua Tujuh	Jember	Industri edamame dan okra/ *Industry of edamame and okra*	2004	65,00%	65,00%	151.506.959.842	135.717.361.186
PT Dasaplast Nusantara	Jepara	Industri plastik dan *fiber* *Industry of plastic and fiber*	2004	90,00%	90,00%	191.032.770.514	159.431.470.133
PT Nusantara Medika Utama	Mojokerto	Pelayanan rumah sakit/ *Medical services*	2013	99,56%	99,56%	291.992.554.327	212.303.697.248
PT Energi Agro Nusantara	Mojokerto	Industri bahan bakar *bioethanol/ Industry of bioethanol fuel*	2013	100,00%	100,00%	55.991.521.275	55.119.901.441

Berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 6 Juni 2017 oleh Elly Herawati Sutedjo, S.H., pemegang saham PT Mitratani Dua Tujuh setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp3,5 miliar berupa dividen saham yang diambil dari laba ditahan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 57 tanggal 13 Juni 2016 oleh Elly Herawati Sutedjo, S.H., pemegang saham PT Mitratani Dua Tujuh setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 6.500 saham atau sebesar Rp6,5 miliar berupa dividen saham yang diambil dari laba ditahan.

Based on Notarial Deed No. 12 dated June 6, 2017 by Elly Herawati Sutedjo, S.H., the shareholders of PT Mitratani Dua Tujuh agreed to increase the issued and fully paid capital Rp3.5 billion in the form of shares dividend from retained earnings.

Based on Notarial Deed No. 57 dated June 13, 2016 by Elly Herawati Sutedjo, S.H., the shareholders of PT Mitratani Dua Tujuh agreed to increase the issued and fully paid capital to 6,500 shares or Rp6.5 billion in the form of shares dividend from retained earnings.

d. Entitas induk dan entitas induk terakhir

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah entitas induk langsung dari Perusahaan. Negara Republik Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

d. The parent entity and ultimate parent entity

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is the direct parent entity of the Company. The Republic of Indonesiais the major shareholders of PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit serta karyawan

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

e. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and employees

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of the Company as of December 31, 2017 is as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris	Prof. Dr. Ir. H. Rudi Wibowo, MS	*President Commissioner*
Komisaris	Arvan Rivaldy R. Siregar, B.Comm	*Commissioner*
Komisaris	Yohanes Babtista Priyatmo Hadi, ME	*Commissioner*
Komisaris	Drs. Sukardi Rinakit, MA, Ph.D	*Commissioner*

Direksi		***Board of Directors***
Presiden Direktur	Ir. Dwi Satriyo Annurogo, MT.	*President Director*
Direktur Operasional	Mustaqim, ST.	*Director of Operations*
Direktur Komersil	Slamet Djumantoro, SH., MM.	*Director of Commercial*

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of the Company as of December 31, 2016 is as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris	Prof. Dr. Ir. H. Rudi Wibowo, MS	*President Commissioner*
Komisaris	Arvan Rivaldy R. Siregar, B.Comm	*Commissioner*
Komisaris	Yohanes Babtista Priyatmo Hadi, ME	*Commissioner*
Komisaris	Drs. Sukardi Rinakit, MA, Ph.D	*Commissioner*

Direksi		***Board of Directors***
Presiden Direktur	Ir. Subiyono, MMA	*President Director*
Direktur Operasional	Ir. Tarsisius Sutaryanto, MM	*Director of Operations*
Direktur Komersil	Muhammad Hanugroho, SAB	*Director of Commercial*
Direktur SDM dan Umum	Ir. Djoko Santoso	*Director of HR and General Affairs*

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan No. SK-271/MBU/12/2017 atau No. 3.06/SKPTS/R/136/2017 tanggal 11 Desember 2017, memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Muhammad Hanugroho, SAB sebagai Direktur serta mengangkat Slamet Djumantoro, S.H., MM sebagai Direktur. Surat Keputusan ini telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 8 Januari 2018 oleh Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0013960 tanggal 13 Januari 2018.

Based on the Decree of the Ministry of State-Owned Enterprises regarding Dismissal and Appointment of the Director of the Company No. SK-271/MBU/12/2017 or No. 3.06/SKPTS/R/136/2017 dated December 11, 2017, it is decided to respectfully discharged Muhammad Hanugroho, SAB as Director and appointing Slamet Djumantoro, S.H., MM as a Director. This decision letter has been stated in Notarial Deed No. 1 dated January 8, 2018 by Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., and approved by Minister of Justice and Human Rights of Republic Indonesia in its letter No. AHU-AH.01.03.0013960 dated January 13, 2018.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit serta karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan No. 8 oleh Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., tanggal 7 Maret 2017, memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Ir. Subiyono, MMA sebagai Direktur Utama, Ir. Tarsisius Sutaryanto, MM sebagai Direktur dan Ir. Djoko Santoso sebagai Direktur serta mengangkat Ir. Dwi Satriyo Annurogo, MT sebagai Direktur Utama dan Mustaqim, ST sebagai Direktur. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-00116057 tanggal 8 Maret 2017.

Komposisi Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

e. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and employees (continued)

Based on Notarial Deed of Dismissal and Appointment of the Director of the Company by Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., No. 8 dated March 7, 2017, it is decided to respectfully discharging Ir. Subiyono, MMA as President Director, Ir. Tarsisius Sutaryanto, MM as a Director and Ir. Djoko Santoso as Director and appointing Ir. Dwi Satriyo Annurogo, MT as a President Director and Mustaqim, ST as a Director. This deed has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-00116057 dated March 8, 2017.

The composition of the Audit Committee of the Company on December 31, 2017 was as follows:

Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Arvan Rivaldy R. Siregar, B.Comm	*Chairman*
Anggota	Drs. Wisnu Pudjiatmoko	*Member*
Anggota	Iljas Achmadi	*Member*

Komposisi Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

The composition of the Audit Committee of the Company on December 31, 2016 was as follows:

Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Arvan Rivaldy R. Siregar, B.Comm	*Chairman*
Anggota	Drs. Wisnu Pudjiatmoko	*Member*
Anggota	Ir. Adi Rahardjo	*Member*

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit No. DK-SURKP.17.02 tanggal 31 Agustus 2017, memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Ir. Adi Rahardjo dan mengangkat Iljas Achmadi sebagai anggota Komite Audit.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of Dismissal and Appointment of Audit Committee No. DK-SURKP17.02 dated August 31, 2017, decided to respectfully discharging Ir. Adi Rahardjo and appointing Iljas Achmadi as a member of the Audit Committee.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit No. DK-SURKP.16.04 tanggal 16 September 2016, memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Brigjen (Purn) H. Heru Sudibyo dan mengangkat Arvan Rivaldy R. Siregar, B.Comm sebagai ketua Komite Audit.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of Dismissal and Appointment of the Chairman of Audit Committee No. DK-SURKP16.04 dated September 16, 2016, decided to respectfully discharging Brigjen (Purn) H. Heru Sudibyo and appointing Arvan Rivaldy R. Siregar, B.Comm as chairman of the Audit Committee.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit serta karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit No. DK-SURKP.16.03 tanggal 31 Maret 2016, memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Herry Soelistiyono dan H. Soepraptono, Bsc., ST., MT. sebagai anggota Komite Audit dan mengangkat Drs. Wisnu Pudjiatmoko dan Ir. Adi Rahardjo sebagai anggota Komite Audit.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") memiliki masing-masing 4.292 dan 4.523 karyawan tetap (tidak diaudit).

f. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini, yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 4 Mei 2018.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Kelompok usaha sesuai dengan standar akuntasi keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"). Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 oleh Kelompok Usaha.

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan dan Peraturan-peraturan serta Pedoman, Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

1. GENERAL (continued)

e. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and employees (continued)

Based on the Decree of the Board of Commissioners of Dismissal and Appointment of the Chairman of Audit Committee No. DK-SURKP16.03 dated March 31, 2016, decided to respectfully discharging Herry Soelistiyono and H. Soepraptono, Bsc., ST., MT. as member of Audit Committee and appointing Drs. Wisnu Pudjiatmoko and Ir. Adi Rahardjo as members of the Audit Committee.

On December 31, 2017 and 2016, the Company and Subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), have 4,292 and 4,523 permanent employees, respectively (unaudited).

f. Completion of the consolidated financial statements

The Company's management is responsible for the preparation of the accompanying consolidated financial statements, which have been completed and authorized for issue by the Company's Directors on May 4, 2018.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The accounting and financial reporting policies adopted by the Group conform to the Indonesian financial accounting standards, which are based on Indonesian Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK"). The accounting policies were applied consistently in the preparation of the consolidated financial statements as of December 31, 2017 and 2016 by the Group.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and the Accounting Guidance for State-Owned Enterprises of Plantations Companies and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority ("OJK").

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual dan dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anaknya pada setiap tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Pengendalian diperoleh bila Kelompok Usaha terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi *investor* kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of each account.

The consolidated statement of cash flows, has been prepared using direct method, by classifying cash receipts and payments into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah, which is the functional currency of the Group.

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries as at December 31 each year. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the investor controls an investee if and only if the investor has all of the following:

i) Power over the investee, that is existing rights that give the investor current ability to direct the relevant activities of the investee,
ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Bila Kelompok Usaha tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Kelompok Usaha mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak Kelompok Usaha memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berhenti pada saat Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Kelompok Usaha memperoleh kendali sampai tanggal Kelompok Usaha tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit.

Seluruh saldo akun, transaksi antar perusahaan yang signifikan, dan laba atau rugi hasil transaksi dari intra Kelompok Usaha yang belum direalisasi dan dividen dieliminasi pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, kepentingan nonpengendali dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara rugi atau laba yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

i) The contractual arrangements with the other vote holders of the investee,
ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of subsidiaries begins when the Group obtains control over the subsidiaries and ceases when the Group losses control of the subsidiaries. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.

All significant accounts, transactions between entities, and unrealized gain or losses resulting from intra-Group transactions and dividends are eliminated in consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a Subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, non-controlling interests and other component of equity, while any resulting gain or loss is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Jika anggota Kelompok Usaha menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk transaksi dan peristiwa dalam keadaan yang serupa, maka penyesuaian dilakukan atas laporan keuangannya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

c. Pengukuran nilai wajar

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 68: Pengukuran Nilai Wajar.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

(a) di pasar utama (*principal market*) untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
(b) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*) untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan harus dapat diakses oleh Kelompok Usaha.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya ("*highest and best use*") atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

The consolidated financial statements are prepared using consistent accounting policies for transactions and events in similar circumstances. If the members of the Group use different accounting policies for transactions and events in similar circumstances, adjustments were made to its financial statements in preparing the consolidated financial statements.

c. Fair value measurement

The Group applies PSAK No. 68: Fair Value Measurement.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

(a) in the principal market for the asset or liability; or
(b) in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal market or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hierarki nilai wajar, dijelaskan sebagai berikut, berdasarkan level *input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2 - Teknik penilaian dimana level *input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar adalah dapat diobservasi secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 - Teknik penilaian dimana level *input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar adalah tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah perpindahan antar level dalam hierarki telah terjadi dengan menilai kembali kategorisasi (berdasarkan level *input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada akhir setiap periode pelaporan.

Komite penilai Kelompok Usaha menentukan kebijakan dan prosedur untuk menentukan pengukuran nilai wajar yang berulang.

Penilai Eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan yaitu tanah. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tiga tahunan oleh komite penilai setelah berdiskusi dan disetujui oleh Komite Audit Perusahaan. Pemilihan didasarkan pada pengetahuan atas pasar, reputasi, independensi, dan apakah standar professional dijaga. Penilai eksternal dirotasi setiap tiga tahun. Komite penilai memutuskan, setelah berdiskusi dengan penilai eksternal Kelompok Usaha, teknik penilaian dan input yang sesuai yang digunakan dalam setiap kondisi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Fair value measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers between levels in the hierarchy have occurred by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Group's valuation committee determines the policies and procedures for recurring fair value measurement.

External valuer is involved for valuation of significant assets which is land. Involvement of external valuer is decided every three years by the valuation committee after discussion with and approval by the Company's audit committee. Selection criteria include market knowledge, reputation, independency, and whether professional standards are maintained. Valuer are rotated every three years. The valuation committee decides, after discussions with the Group's external valuer, which valuation techniques and inputs to use for each case.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, komite penilai menganalisa pergerakan dari nilai aset yang memerlukan pengukuran atau pengevaluasian kembali sesuai kebijakan Kelompok Usaha. Untuk analisa ini, komite penilai melakukan verifikasi atas input utama yang dipakai dalam penilaian terakhir dan mencocokkan dengan kontrak dan dokumen relevan yang lain.

Komite Penilai, bersama dengan penilai eksternal Kelompok Usaha, juga membandingkan setiap perubahan nilai wajar setiap aset dengan sumber eksternal yang relevan untuk menentukan apakah perubahan tersebut wajar.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Kelompok Usaha telah menentukan kelas aset dan liabilitas dengan dasar sifat, karakteristik dan risiko aset atau liabilitas dan level hierarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

d. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis, jika ada, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban-beban administrasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Fair value measurement (continued)

At each reporting date, the valuation committee analyses the movements in the values of assets which are required to be re-measured or re-assessed as per the Group's accounting policies. For this analysis, the valuation committee verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The valuation committee, in conjunction with the Group's external valuer, also compares each changes in the fair value of each asset with relevant external sources to determine whether the change is reasonable.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

d. Business combinations

Business combinations, if any, are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer selects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Kelompok Usaha mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diasumsikan. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto Entitas Anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen menilai kembali identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Kelompok Usaha yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Business combinations (continued)

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the acquirer is remeasured the previously held equity interest in the acquiree at fair value in the acquisition date and recognized gain or loss through consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the Subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash-generating Units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Kombinasi bisnis antara entitas sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan ("*pooling-of-interest*"). Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

e. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan pengendalian atas Entitas Anak.

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Kelompok Usaha atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Jika bagian Kelompok Usaha atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan Kelompok Usaha dikurangkan menjadi nihil, tambahan kerugian dicadangkan, dan liabilitas diakui, hanya sepanjang Kelompok Usaha memiliki kewajiban konstruktif atau hukum, atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Jika entitas asosiasi kemudian melaporkan laba, maka Kelompok Usaha mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagian atas laba tersebut sama dengan bagian atas rugi yang belum diakui.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Business combinations (continued)

Business combinations among entities under common control

Business combination of entities under common control are accounted for the pooling-of-interests method. In applying the pooling-of-interests method, components of the financial statements of combined entities are presented in such a manner as if the combination has already happened since the beginning of the period entities under common control.

e. Investment in Associates

An Associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over Subsidiaries.

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

If the Group's share of losses of an associate equals or exceeds its interest in the associate, it discontinues recognising its share of further losses. After the Group's interest is reduced to nil, additional losses are provided for, and a liability is recognized, only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate. If the associate subsequently reports profits, the Group resumes recognising its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognized.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Laporan laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian Kelompok Usaha atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan penghasilan komprehensif lain ("PKL") dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Kelompok Usaha. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Kelompok Usaha.

Setelah penerapan metode ekuitas, Kelompok Usaha menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi. Kelompok Usaha menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

f. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Mata uang pelaporan yang digunakan pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha. Tiap entitas dalam Kelompok Usaha menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan laporan keuangannya masing-masing diukur menggunakan mata uang fungsional tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Investment in Associates (continued)

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in other comprehensive income ("OCI") of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions among the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The financial statements of the associates are prepared for the same reporting period of the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. In this case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

f. Transactions and balances in foreign currencies

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah, which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and their financial statements are measured using that functional currency.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun yang bersangkutan.

Kurs mata uang asing yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transactions and balances in foreign currencies (continued)

Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the year, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

The exchange rate used at December 31, 2017 and 2016:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
1 Dolar Amerika Serikat/Rupiah	13.548	13.436	*US Dollar 1/Rupiah*
1 Euro/Rupiah	16.174	14.162	*Euro 1/Rupiah*

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Kelompok Usaha mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi, dengan definisi yang diuraikan pada PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.

g. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties, as defined in PSAK No. 7 (2015 Improvements), "Related Parties Disclosures". All significant transactions and balances with related parties are disclosed in notes to the consolidated financial statements.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

h. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak saat penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits which have maturity periods of three months or less at the time of placement and are not pledged as collateral and unrestricted.

i. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan dan kurang dari satu tahun sejak saat ditempatkan, dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, serta tidak dibatasi penggunaannya, dinyatakan sebesar nilai nominal.

i. Short-term investment

Short-term investment in the form of time deposit with maturity period of more than three months and less than one year at the time of placement, and are not pledged as collateral and unrestricted, are stated at nominal value.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Biaya perolehan persediaan ditentukan dengan menggunakan metode biaya rata-rata bergerak ("*moving average method*").

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada setiap akhir tahun keuangan.

k. Instrumen keuangan

i) Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan, pada saat pengakuan awal, sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai efektif, bila memenuhi syarat.

Semua aset keuangan awalnya diakui pada nilai wajar namun dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut.

Aset keuangan Kelompok Usaha meliputi kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang petani tebu rakyat, piutang lain-lain dan piutang pihak berelasi jangka panjang dan penyertaan saham yang tidak memiliki kuotasi pasar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Cost of inventories is determined using the moving average method.

The allowance for obsolescence determined based on periodic reviews of the physical conditions at each financial year.

k. Financial instruments

i) Financial assets

Initial recognition and measurement

Financial assets are classified, at initial recognition, as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available-for-sale financial assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial assets are recognized initially at fair value, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit and loss, the related fair values are added with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets.

The Group's financial assets include cash and cash equivalents, restriced cash and cash aquivalents, short-term investment, trade receivables, sugarcane farmers receivables, other receivables and long-term receivables form related party and unquoted investments in shares of stock.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing seperti berikut ini:

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Keuntungan dan kerugian terkait diakui pada laba atau rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Aset keuangan tersedia untuk dijual [Available-For-Sale ("AFS")]

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam dua kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial recognition, such assets are carried at amortized cost using the Effective Interest Rate ("EIR") method. The related gains or losses are recognized in the profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Available-For-Sale ("AFS") financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the two preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in the equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in the equity is reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

i. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

ii. Kelompok Usaha mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan apabila (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, Kelompok Usaha mengevaluasi sejauh mana Kelompok Usaha memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Pada saat Kelompok Usaha tidak mentransfer maupun tidak mempertaha cdnkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka aset keuangan tersebut diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset, or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

i. the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or

ii. the Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (a) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from a financial asset or has entered into a pass-through arrangement, the Group evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, nor transferred control of the financial asset, the financial asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the financial asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laba rugi.

Penurunan nilai

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Derecognition (continued)

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized in the profit or loss.

Impairment

At each reporting date, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is an objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred "loss event") and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

Evidence of impairment may include indications that the debtor or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi, Kelompok Usaha pertama kali secara individual menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Kelompok Usaha memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit yang diharapkan di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan atas penurunan nilai dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laba atau rugi.

Penghasilan bunga terus diakui atas nilai tercatat yang telah dikurangi tersebut berdasarkan tingkat SBE awal aset keuangan tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, sudah direalisasi atau ditransfer kepada Kelompok Usaha.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Impairment (continued)

Financial assets carried at amortized cost

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether that asset is significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized in the statements of profit or loss.

Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original EIR of the asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika, dalam tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang yang dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun penyisihan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.

Aset keuangan tersedia untuk dijual [*Available-For-Sale* ("AFS")]

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada periode berikutnya.

ii) Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) dapat diklasifikasikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau (ii) liabilitas keuangan lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Impairment (continued)

Financial assets carried at amortized cost (continued)

If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The amount of the reversal cannot exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment was reversed. The reversal of financial assets was recognized in profit or loss.

Avaiable-For-Sale ("AFS") financial assets

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred over equity instruments that do not have the quotation and is not carried at fair value because fair value can not be measured reliably, then the amount of any impairment loss is measured as the difference between the carrying value of financial assets and the present value of estimated future cash flows discounted at the prevailing rate of return on the market for a similar financial asset. Impairment losses are not recoverable in the next period.

ii) Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, or (ii) liabilities measured at amortized cost.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Pada tanggal pelaporan, Kelompok Usaha tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, pinjaman jangka pendek, utang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi ("KKPE"), beban akrual, pinjaman jangka panjang dan utang obligasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Utang usaha, utang lain-lain, pinjaman jangka pendek, beban akrual dan utang KKPE

Liabilitas tersebut dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Pinjaman jangka panjang dan utang obligasi yang dikenakan bunga

Setelah pengakuan awal, pinjaman jangka panjang dan utang obligasi yang dikenakan bunga diukur dengan biaya yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. As at the reporting dates, the Group has no other financial liabilities other than those classified as liabilities measured at amortized cost.

Financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial liabilities.

The Group's financial liabilities consist of trade payables, other payables, short-term loans, food security and energy credit ("KKPE") payables, accrued expenses, long-term loans and bond payable.

Subsequent measurement

Trade payables, other payables, short-term loans, accrued expenses and KKPE payables

Those liabilities are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Interest bearing long-term loans and bond payable

Subsequent to initial recognition, long-term loan and bond payable interest-bearing are measured at amortized costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through amortization process using the EIR method.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Pinjaman jangka panjang dan utang obligasi yang dikenakan bunga (lanjutan)

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

iii) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Financial instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Interest bearing long-term loans and bond payable (continued)

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included under "Finance Expenses" account in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying values is recognized in profit or loss.

iii) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

l. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan melalui amortisasi sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Tanaman perkebunan

Tanaman perkebunan dikelompokkan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan.

Tanaman belum menghasilkan

Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengembangan perkebunan dan biaya bunga sehubungan dengan kredit yang digunakan untuk pengembangan perkebunan dikapitalisasi sampai produksi komersial telah dicapai.

Tanaman menghasilkan

Jangka waktu suatu tanaman dinyatakan mulai menghasilkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran manajemen.

Tanaman kakao, dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila tanaman telah berumur lebih dari 3 tahun.

Penyusutan tanaman kakao dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa produktif yang diestimasi selama 25 tahun atau dengan tarif penyusutan 4% per tahun.

Tanaman semusim

Seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan bibit, tenaga kerja langsung dan biaya lain yang dapat diatribusikan secara langsung, ditangguhkan sampai dengan tanaman semusim dipanen, dan disajikan sebagai akun "Tanaman Semusim" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using straight-line method.

m. Plantations

Plantations are classified as immature plantations and mature plantations.

Immature plantations

All costs relating to the plantations development and interest expense of loan used to finance the plantations development are capitalized, until the commercial production is achieved.

Mature plantations

The period of a plantation classified as mature depends on the vegetative growth and based on the management estimation.

The cocoa plantation is classified as mature plantations when the plantation is more than 3 years.

Depreciation of cocoa plantation is computed using the straight-line method over the estimated productive lives which estimated to be 25 years or with depreciation tariff of 4% per year.

Annual crops

The accumulated costs relating to seedling, direct labor and other directly attributed cost of sugarcane plantation, are deferred until it is harvested, and is presented as "Annual Crops" in the consolidated statements of financial position.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

n. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Biaya untuk mengganti komponen dari aset tetap pada saat penggantian, yang memenuhi kriteria pengakuan, diakui sebagai bagian dari biaya perolehan.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Kelompok Usaha dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset-aset tersebut sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Fixed assets

Fixed assets, except for land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Cost comprises of purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used. Costs of replacing part of fixed assets, which met the recognition criteria, are recognized as part of cost.

Depreciation of an asset commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Group and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	3-20	*Buildings*
Mesin dan peralatan	8-20	*Machinery and equipment*
Alat pengangkutan	5	*Transportations equipment*
Jalan, jembatan dan saluran air	8-20	*Roads, bridges and culvert*
Alat pertanian	2-8	*Agricultural equipment*
Peralatan kantor dan lainnya	5	*Office equipment and others*

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba atau rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu aset, masa manfaat, dan metode penyusutan dievaluasi dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

The assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, at each financial year end and adjusted prospectively if appropriate.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan perbaikan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group, and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap dalam pelaksanaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam pelaksanaan tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam pelaksanaan tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Pada pengakuan awal, tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar tanggal revaluasi dikurangi rugi penurunan nilai. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan.

Surplus revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Defisit revaluasi diakui dalam laba rugi. Namun penurunan nilai tersebut diakui dalam surplus revaluasi aset tetap sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut.

Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Fixed assets (continued)

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed and available for use. Assets under construction are not depreciated until they fulfill the criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

At initial recognition, land is stated at cost and not amortized as management is of the opinion that it is probable that the titles can be renewed/extended upon expiration.

Subsequent to initial recognition, land is measured at fair value on revaluation date less any impairment losses. Revaluation is regularly conducted to ensure that the carrying amount of land does not differ materially from its fair value using its fair value at the end of reporting period.

A revaluation surplus is recorded in other comprehensive income and accumulated in equity as part of other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit and loss to the extent that it reverses a revaluation deficit of the same asset previously recognized in profit or loss.

A revaluation deficit is recognized in profit or loss. However, the decrease shall be recognized in the revaluation surplus to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset.

A revaluation surplus of fixed asset which included in equity could be directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB"), dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB, dan HP diakui sebagai bagian dari akun "Aset Takberwujud" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

Aset tetap - aset pengampunan pajak

Aset pengampunan pajak dicatat sesuai dengan kebijakan yang diterapkan untuk aset tetap dan disusutkan sesuai dengan kelompok aset tetap tersebut.

o. Aset tidak produktif

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha diklasifikasikan ke akun aset tetap non-produktif dalam kelompok aset tidak lancar lainnya dan disajikan sebesar nilai setelah dikurangi penurunan nilai.

Penghapusan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-02/MBU/2010, tentang tata cara penghapusbukukan dan pemindahtanganan aset tetap Badan Usaha Milik Negara.

Aset tetap yang diusulkan untuk dihapusbukukan harus mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN melalui Dewan Komisaris. Setelah mendapat persetujuan, aset direklasifikasi ke aset tidak produktif yang disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya".

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari hasil penjualan aset tidak produktif ini dimasukkan ke dalam laba atau rugi pada tahun penjualan aset tersebut dilakukan.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Fixed assets (continued)

Legal cost of landrights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB"), and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and not amortized. Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of landrights in the form of HGU, HGB, and HP were recognized as part of "Intangible Assets" account in the consolidated statement of financial position and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

Fixed assets - tax amnesty assets

Tax amnesty assets are recorded based on policy applicable to fixed assets and depreciated in accordance with the class of those fixed assets.

o. Non-productive assets

Fixed assets that are not used in operations are classified as non-productive assets in other non-current assets and presented at cost less allowance for impairment losses.

The disposal and transfer of fixed assets is in accordance with the provisions set forth in the Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprises number PER-02/MBU/2010, regarding the procedure for the disposal and transfer fixed assets of State-Owned Enterprise.

Fixed assets that are proposed to be written-off must obtain approval from Ministry of State-Owned Enterprises through Board of Commissioners. After approval, the assets are reclassified as non-productive assets in the account "Other Non-Current Assets".

Any gain or loss arising from the sale non-productive assets is directly included in the profit or loss of year the item is sold.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Aset takberwujud

Biaya royalti, biaya pengembangan, perpanjangan hak atas tanah serta perangkat lunak disajikan dalam akun "Aset Takberwujud" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Intangible assets

Costs of royalty, development cost, renewal of the legal rights over land and softwares are presented as "Intangible Assets" account in the consolidated statements of financial position and amortized over its useful lives using the straight-line method as follows:

	Tahun/*Years*	
Beban pendirian	14	*Establishment cost*
Biaya pengembangan	5	*Development cost*
Perangkat lunak	5	*Software*
Royalti	20	*Royalty*
Hak atas tanah	20	*Landrights*

q. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui sebagai laba atau rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

q. Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting year, the Group assesses whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit's ("CGU") fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

An assessment is made at each reporting date to assess whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

q. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui sebagai laba atau rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

r. Beban tangguhan

Biaya-biaya yang mempunyai manfaat di kemudian hari dan melebihi akhir periode pembukuan dikapitalisasi dan diamortisasikan selama taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

s. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tetap tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Kelompok Usaha sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Impairment of non-financial assets (continued)

If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

r. Deferred charges

Costs that have future benefits for longer than accounting period are capitalized and amortized over their estimated useful lives using the straight-line method.

s. Borrowing cost

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. Otherwise, borrowing costs are recognized as expense when incurred. Borrowing costs consist of interest and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the necessary activities to prepare the asset for intended use in accordance with the aims and expenditures for the asset and borrowing costs have occurred. Capitalization of borrowing costs ceases upon completion of substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset to be used in accordance with the intention.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

t. Perpajakan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan diterima.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kelompok Usaha juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban pajak kini".

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

i. liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak;
ii. dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada Entitas Anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Taxation

Income tax expense represents the sum of the corporate income tax currently payable and deferred tax.

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current years are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. Current tax expenses determined based on current year taxable income which computed based on applicable tax rate.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

The underpayment/overpayment of income tax is presented as part of "Current tax expense" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of "Current tax expense".

Deferred tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

i. where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination, and at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;

ii. in respect of taxable temporary differences associated with investments in Subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

t. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

i. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau
ii. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Kelompok Usaha yang bermaksud untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

i. where the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or
ii. in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

t. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

Pendapatan, beban-beban, dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN, kecuali:

i. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
ii. piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final Kelompok Usaha adalah terkait dengan pendapatan bunga.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46: Pajak Penghasilan.

u. Imbalan kerja

a) Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan. Termasuk dalam program imbalan kerja jangka pendek adalah tantiem and bonus.

(i) Tantiem

Penyisihan atas tantiem dibuat berdasarkan estimasi manajemen dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Tantiem akan dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Selisih antara jumlah tantiem yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana tantiem tersebut disahkan oleh RUPS.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Taxation (continued)

Value Added Tax ("VAT")

Revenue, expenses, and assets are recognized net of the amount of VAT, except:

i. the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and
ii. receivables and payables that are stated inclusive of the VAT amount.

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the consolidated statement of financial position.

Final tax

Based on tax regulation in Indonesia, final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax of the Group related to the interest income.

Final tax is no longer governed by PSAK No. 46: Income Tax.

u. Employee benefits

a) Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they are accrued to the employees. Included in short-term employee benefits are tantiem and bonus.

(i) Tantiem

Provision of tantiem are based on management estimates and charged to the current profit or loss. Tantiem will be paid to Directors and Commissioners after obtaining the approval in the General Shareholders' Meeting ("GSM"). The difference between the provision of tantiem that was estimated by management and the amount approved by the shareholders is recognized in the period when such tantiem is approved by GSM.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

u. Imbalan kerja (lanjutan)

a) Imbalan kerja jangka pendek (lanjutan)

(ii) Bonus

Bonus ditetapkan berdasarkan estimasi manajemen Kelompok Usaha dan disahkan dalam RUPS. Selisih antara jumlah bonus yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana bonus tersebut disahkan dalam RUPS.

b) Imbalan pascakerja

Kelompok Usaha diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UUK"), yang merupakan kewajiban imbalan pasti.

Kelompok Usaha memberikan imbalan pascakerja kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun normal pada umur 55-56 tahun dan imbalan lainnya berupa santunan hari tua, tunjangan masa persiapan pensiun, cuti panjang, penghargaan masa kerja dan iuran BPJS untuk pensiunan dengan syarat-syarat yang telah diputuskan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Kecuali untuk imbalan pensiun, imbalan tersebut tidak didanai.

Berdasarkan PSAK No. 24, kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasti.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Employee benefits (continued)

a) Short-term employee benefits (continued)

(ii) Bonus

Bonus is provided based on the estimates of Group's management and approved in the GSM. The difference between the total bonus estimated by management and approved by shareholders is recognized in the period when bonus is approved in the GSM.

b) Post-employment benefits

The Group is required to provide a minimum pension benefit as stipulated in Labor Law No. 13 Year 2003 (the "Labor Law"), which represents an underlying defined benefit obligation.

The Group provides employee benefits for employees who have reached normal pension age of 55-56 years old and other benefits such as post retirement benefits, allowance for preparation of pension, long vacation, appreciation for service years and BPJS contribution for pensionary which conditions have been agreed in the Collective Labour Agreement. Except for the pension benefits, the other benefits are not funded.

Under PSAK No. 24, the defined benefit obligation is calculated annually using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related defined benefit obligation.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

u. Imbalan kerja (lanjutan)

b) Imbalan pascakerja (lanjutan)

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Kelompok Usaha mengakui perubahan berikut pada kewajiban imbalan pasti neto pada akun "Beban Pokok Pendapatan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, dan
ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

c) Kewajiban imbalan pascakerja lainnya

Kelompok Usaha memberikan imbalan pascakerja lainnya, seperti uang penghargaan. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Employee benefits (continued)

b) Post-employment benefits (continued)

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

i) when the amendment or curtailment happens; and
ii) when the entity recognizes related restructuring costs and termination benefits.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Sales" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, and
ii) Net interest expense or income.

c) Other post-employment obligations

The Group also provides other post-employment benefits, such as gratuity. The benefits in the form of gratuity is awarded when the employees reach their retirement age. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plans.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

u. Imbalan kerja (lanjutan)

d) Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Kelompok Usaha mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Kelompok Usaha menunjukkan komitmennya untuk memutuskan kontrak kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah akhir tanggal pelaporan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kini.

e) Imbalan jangka panjang lainnya

Kelompok Usaha juga memberikan imbalan kerja jangka panjang selain pensiun yang meliputi cuti berimbalan jangka panjang dan kesetiaan yang tidak didanai. Beban imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode Projected Unit Credit dengan metode yang disederhanakan di mana metode ini tidak mengakui pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain. Total nilai neto dari biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui pada laba rugi tahun berjalan.

v. Penggunaan saldo laba berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Saldo laba digunakan untuk pembagian dividen dan penyisihan untuk cadangan.

w. Pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat, dan PPN. Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman barang, diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Employee benefits (continued)

d) Termination benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement age. The Group recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan and the possibility to withdraw the plan is low. Benefits falling due more than 12 months after the end of reporting date are discounted at present value.

e) Other long-term benefits

The Group also provide long-term employee benefits other than pension which include long-term compensation leave and service rewards which are unfunded. The cost of providing other long-term employee benefits is determined using the Projected Unit Credit method using simplified method of not recognizing remeasurements in other comprehensive income. The net total of service cost, net interest on the net defined benefit liability (asset) and remeasurements of the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss for the year.

v. The use of retained earnings based on the decision of the General Meeting of Shareholders

Retained earnings are used for the distribution of dividends and provisions for reserves.

w. Revenue and expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates, and VAT. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Sales of Goods

Revenue from sales arising from the delivery of goods is recognized when the significant risks and rewards have been transferred to the buyer.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

w. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Penjualan jasa Rumah Sakit

Pendapatan diakui pada saat jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien.

Penghasilan/beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Kelompok usaha memperoleh penghasilan bunga dari deposito berjangka dan dicatat sebagai "Pendapatan keuangan", sedangkan beban bunga yang dibayarkan atas pinjaman dicatat sebagai "Beban keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

x. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

y. Laba (rugi) per saham

Laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Revenue and expenses (continued)

Sale of service of Hospital

Revenues are recognized when medical service is rendered to patient.

Interest income/Expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using EIR method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying value of the financial asset or liability.

The Group earned interest income from time deposits and is recorded as "Finance income", while interest expenses paid on loans is recorded as "Finance expenses", in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Expenses

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

x. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

y. Earnings (loss) per share

Earnings (loss) per share are computed by dividing net profit attributable to the owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

z. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa, adalah berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

Sebagai *lessee*

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung sebagai laba rugi.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa penggunaan aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa. Selisih lebih yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui pada laba atau rugi dengan dasar garis lurus ("*straight-line basis*") selama masa sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Lease

Determining whether an arrangement is, or contains, lease, is based on the substance of the agreement at the beginning of the establishment. Agreement is evaluated whether the fulfillment depends on the spesifically use of the asset or certain assets or right transfer agreement to use the asset or assets, although the right is not explicitly mentioned in the agreement.

As lessee

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. The lease is capitalized at the fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments if the present value is lower than fair value. Minimum lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance expenses are charged directly to profit or loss.

If there is reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, the leased asset is depreciated over the estimated period of use of assets based on the useful life of the asset. If there is no such certainty, the leased asset is depreciated over the shorter period between the useful life of the leased asset or the lease term. The excess arising from the sale and leaseback back to be deferred and amortized over the remaining term of the lease.

Leases are classified as operating leases if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards related to ownership of assets. Thus, the lease payments are recognized in profit or loss with straight-line basis over the lease term.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

aa. Informasi segmen

Untuk tujuan manajemen, Kelompok Usaha dibagi menjadi lima segmen operasi berdasarkan produk yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen. Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 42, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Segment information

For management purposes, the Group is organized into five operating segments based on their products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of the respective segments under their charge. The segment managers report directly to the management who regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance. Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 42, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari penjualan barang dan jasa yang diberikan.

3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying values of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by the management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determination of functional currency

The functional currency of each entity in the Group is the currency of the primary economic environment in which the entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and expenses from sale of goods and services rendered.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti diungkapkan pada Catatan 2k.

Tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Otoritas Pajak. Nilai tercatat atas tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 19.

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat tagihan pajak penghasilan pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 19.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2k.

Claim for tax refund and objection on the result of tax assessments

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under those accounts above are recoverable and refundable by the Tax Authority. The carrying amount of the claim and objection and the result of the tax assessments of the Group at the reporting dates are disclosed in Note 19.

Uncertainty exist with respect to the interpretation of complexity tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities of corporate income tax based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The carrying amount of the claim for tax refund at the reporting dates is disclosed in Note 19.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty estimates at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying values of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan informasi dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang.

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan

Penyisihan atas penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian, dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Kelompok Usaha sebelum penyisihan atas penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 11.

Revaluasi tanah

Kelompok Usaha mengukur tanah pada jumlah revaluasian dengan perubahan pada nilai wajar diakui dalam OCI. Nilai wajar tanah ditentukan berdasarkan bukti pasar dengan menggunakan harga yang dapat diperbandingkan dan disesuaikan terhadap faktor-faktor pasar spesifik seperti sifat, lokasi dan kondisi aset tersebut.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan untuk menentukan nilai wajar tanah diungkapkan pada Catatan 15.

3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Allowance for impairment losses on receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgement, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted if additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on receivables.

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion, and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is re-evaluated and adjusted if additional information received affects the amount estimated. The Group's inventories carrying value before provision for decline in market values and obsolescence of inventories at the reporting dates are disclosed in Note 11.

Revaluation of land

The Group measures land at revalued amounts with changes in fair value being recognized in OCI. Land was valued by reference to market-based evidence, using comparable prices adjusted for specific market factors such as nature, location and condition of the asset.

The key assumptions used to determine the fair value of land is provided in Note 15.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dan tanaman menghasilkan

Biaya perolehan aset tetap dan tanaman menghasilkan disusutkan/diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai dengan 20 tahun (Catatan 2n) dan tanaman menghasilkan selama 25 tahun (Catatan 2m), yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian, perkembangan teknologi dan keterbatasan hak atau pembatasan lainnya dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan dan amortisasi masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 15.

Nilai tercatat neto atas tanaman menghasilkan Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 14.

Imbalan kerja

Pengukuran kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk, antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya.

Walaupun Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Depreciation of fixed assets and mature plantations

The costs of fixed assets and mature plantations are depreciated/amortized on a straight-line basis over their estimated economic useful lives. Management estimates the economic useful lives of these fixed assets to be within 2 to 20 years (Note 2n) and plantations within 25 years (Note 2m), which are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses.

Changes in the level of consumption, technology developments and the limitations of rights or other restrictions may affect the economic useful lives and the residual value of assets, and therefore depreciation and amortization future may be revised. The net carrying value of fixed assets in the Group reporting date is disclosed in Note 15.

The net carrying value over the Group's mature plantation at reporting dates is disclosed in Note 14.

Employee benefits

The measurement of Group's obligations and pension costs and employee benefits liabilities depends on the selection of certain assumptions used by independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increases, annual employee resignation rate, disability rate, retirement age and mortality rates. Actuarial gains or losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the incured period.

Although the Group believes that these assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and net employee benefits expense.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan kerja (lanjutan)

Nilai tercatat neto liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diungkapkan dalam Catatan 26.

Pajak penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat tagihan pajak penghasilan pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 19.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi pajak yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Nilai tercatat atas aset pajak tangguhan Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 19.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki rugi fiskal yang dapat dikompensasi masing-masing sebesar Rp266.206.938.073 dan Rp280.045.950.725. Rugi fiskal tersebut terkait Perusahaan yang diperkirakan dapat terpulihkan, diungkapkan pada Catatan 19d.

3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Employee benefits (continued)

The net carrying value of the Group's employee benefits liability as of December 31, 2017 and 2016 is disclosed in Note 26.

Income tax

Uncertainty exist with respect to the interpretation of complexity tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities of corporate income tax based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The carrying amount of the claim for tax refund at the reporting dates is disclosed in Note 19.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable income together with future tax planning strategies. The carrying amount of deferred tax assets of the Group at the reporting date is disclosed in Note 19.

As of December 31, 2017 and 2016, the Company has tax losses amounting to Rp266,206,938,073 and Rp280,045,950,725, respectively. These tax losses which related to the Company are estimated to be recoverable, and are disclosed in Note 19d.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Kas	585.163.309	1.253.739.058	*Cash on hand*
Bank:			*Bank:*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 10)			*Related parties (Note 10)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	191.254.149.539	83.832.744.378	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	38.905.954.472	63.114.552.232	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	27.351.937.372	269.429.471	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.058.558.333	5.621.559.895	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Mandiri	1.713.464.838	984.866.808	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	30.619.732	209.489.051	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank BNI Syariah	4.885.118	-	*PT Bank BNI Syariah*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	5.150.648.894	5.747.031.899	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	2.787.529.020	2.837.064.727	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.236.317.724	1.217.698.942	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Bukopin Tbk	214.766.263	232.722.303	*PT Bank Bukopin Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	54.179.109	54.524.997	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	37.886.381	-	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	26.907.215	70.938.959	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Pihak berelasi (Catatan 10)			*Related parties (Note 10)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.078.393.028	9.018.152.644	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	437.905.094	3.428.790.345	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	11.918.582	12.142.516	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	19.654.046	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	464.199.324	460.533.411	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Bukopin Tbk	381.977.054	378.717.576	*PT Bank Bukopin Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	26.720.450	26.510.034	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Euro			*Euro*
Pihak berelasi (Catatan 10)			*Related parties (Note 10)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.873.824.862	22.960.575.742	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah bank	314.102.742.404	200.497.699.976	*Total bank*
Deposito berjangka:			*Time deposits:*
Pihak berelasi (Catatan 10)			*Related parties (Note 10)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.000.000.000	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	33.675.693.558	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah deposito berjangka	5.000.000.000	33.675.693.558	*Total time deposits*
Jumlah kas dan setara kas	**319.687.905.713**	**235.427.132.592**	***Total cash and cash equivalents***
Tingkat bunga deposito per tahun	7,00%	6,75%	*Annual interest rate of time deposits*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada pihak berelasi masing-masing sebesar 98% dan 97% dari jumlah seluruh kas dan setara kas.

Kas Kelompok Usaha telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Tania Tbk terhadap risiko kehilangan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp8,89 miliar dan Rp21 miliar pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Kelompok Usaha.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

As of December 31, 2017 and 2016, cash and cash equivalents placed in related parties are 98% and 97%, respectively of the total cash and cash equivalents.

The Group's cash are insured with PT Asuransi Jasa Tania Tbk against losses for a sum insured of Rp8.89 billion and Rp21 billion as of December 31, 2017 and 2016, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from risks which may be suffered by the Group.

5. KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

5. RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Pihak berelasi (Catatan 10)			*Related parties (Note 10)*
Giro			*Current accounts*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.882.823.223	17.565.780.768	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Deposito Berjangka			*Time Deposits*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	950.000.000.000	400.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	550.000.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	**959.882.823.223**	**967.565.780.768**	***Total restricted cash and cash equivalents***

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya berasal dari dana program Penyertaan Modal Negara ("PMN") yang diterima pada tahun 2015 dan telah ditentukan penggunaannya (Catatan 27).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dana yang telah digunakan masing-masing sebesar Rp15.117.176.777 dan Rp7.434.219.232.

Tingkat suku bunga deposito per tahun berkisar antara 6,00% - 6,75% (2016: 6,75%), dan berjangka waktu kurang dari tiga bulan.

Restricted cash and cash equivalents were obtained from the funds of the State Capital Investment ("PMN") program which was received in 2015 and have been appropriated (Note 27).

As of December 31, 2017 and 2016, total funds used amounted to Rp15,117,176,777 and Rp7,434,219,232, respectively.

Annual interest rate of time deposits is ranging from 6.00% - 6.75% (2016: 6.75%), and have maturity periods of less than three months.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

6. PIUTANG USAHA / *6. TRADE RECEIVABLES*

a. Berdasarkan pelanggan / *a. Based on customers*

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Pihak berelasi (Catatan 10)	66.741.771.034	45.056.610.177	***Related parties*** *(Note 10)*
Pihak ketiga:			***Third parties:***
PT Berlian Mandiri Perkasa	36.019.007.011	3.017.722.997	*PT Berlian Mandiri Perkasa*
PT Molindo Raya Industrial	13.721.400.000	20.941.946.430	*PT Molindo Raya Industrial*
PT Etanol Ceria Abadi	7.873.677.947	4.600.542.862	*PT Etanol Ceria Abadi*
Tobacco Traders International, Jerman	5.069.805.022	2.235.846.048	*Tobacco Traders International, Germany*
PT Candra Wijaya Sakti	4.774.521.049	695.780.654	*PT Candra Wijaya Sakti*
PT Indonesian Tobacco International	2.858.286.615	1.559.041.107	*PT Indonesian Tobacco International*
PT Makassar Tene	2.272.891.500	1.693.692.000	*PT Makassar Tene*
CV Central Agro Mandiri	2.091.861.247	2.091.861.247	*CV Central Agro Mandiri*
Kohyo Co., Ltd., Jepang	2.027.458.205	1.941.770.723	*Kohyo Co., Ltd., Japan*
Ing Shiang Co., Ltd., China	1.130.876.624	4.539.255.592	*Ing Shiang Co., Ltd., China*
PT Sumber Redjeki	-	10.463.760.175	*PT Sumber Redjeki*
Altadis SA, Spanyol	-	9.411.936.810	*Altadis SA, Spain*
PT Indo Acidatama	-	8.314.068.581	*PT Indo Acidatama*
Royal Agio Cigars, Belanda	-	4.107.277.179	*Royal Agio Cigars, Netherland*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 miliar)	45.099.417.451	44.545.453.933	*Others (each below Rp2 billion)*
Jumlah pihak ketiga	122.939.202.671	120.159.956.338	*Total third parties*
Jumlah piutang usaha	**189.680.973.705**	**165.216.566.515**	***Total trade receivables***
Penyisihan kerugian penurunan nilai			*Allowance for impairment losses*
Pihak berelasi	(161.184.666)	(2.308.383.371)	*Related parties*
Pihak ketiga	(13.701.367.428)	(12.424.727.150)	*Third parties*
Jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai	**(13.862.552.094)**	**(14.733.110.521)**	***Total allowance for impairment losses***
Piutang usaha, neto	**175.818.421.611**	**150.483.455.994**	***Trade receivables, net***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

b. Berdasarkan umur piutang usaha

b. Based on aging of trade receivables

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Lancar dan tidak mengalami penurunan nilai	92.420.989.905	93.383.877.600	*Neither past due nor impaired*
Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai:			*Past due but not impaired:*
1 - 30 hari	52.099.109.217	36.391.708.361	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	28.834.561.881	8.990.041.181	*31 - 60 days*
Lebih dari 60 hari	2.463.760.608	11.717.828.852	*More than 60 days*
Sub-jumlah	175.818.421.611	150.483.455.994	*Sub-total*
Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai			*Past due and impaired*
Lebih dari 60 hari	13.862.552.094	14.733.110.521	*More than 60 days*
Jumlah	**189.680.973.705**	**165.216.566.515**	***Total***

c. Berdasarkan mata uang

c. Based on currencies

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Rupiah	169.128.039.704	131.446.584.868	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	10.518.143.849	25.368.263.571	*United States Dollar*
Euro	10.034.790.152	8.401.718.076	*Euro*
Jumlah	**189.680.973.705**	**165.216.566.515**	***Total***

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai:

Movements of allowance for impairment losses:

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Saldo awal	14.733.110.521	14.453.822.512	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	-	279.288.009	*Additions during the year*
Pemulihan tahun berjalan	(870.558.427)	-	*Recovery during the year*
Saldo akhir	**13.862.552.094**	**14.733.110.521**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Piutang usaha Perusahaan, Dasaplast dan Mitratani digunakan sebagai jaminan pinjaman jangka pendek (Catatan 21) dan pinjaman jangka panjang (Catatan 23) masing-masing sebesar Rp16.313.400.522 dan Rp173.367.573.183.

Trade receivables of the Company, Dasaplast and Mitratani are used as collateral for short-term loans (Note 21) and long-term loans (Note 23) amounting to Rp16,313,400,522 and Rp173,367,573,183, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

7. PIUTANG PETANI TEBU RAKYAT

7. SUGARCANE FARMERS RECEIVABLES

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Unit:			*Unit:*
Gempolkrep	13.411.717.702	61.972.645.637	*Gempolkrep*
Toelangan	10.171.355.077	10.617.150.225	*Toelangan*
Pesantren Baru	9.277.510.607	17.561.973.337	*Pesantren Baru*
Pengembangan Madura	8.615.418.615	9.765.941.996	*Development of Madura*
Djombang Baru	6.353.660.798	15.356.327.004	*Djombang Baru*
Kremboong	5.771.564.701	8.051.147.676	*Kremboong*
Lestari	5.023.811.885	10.587.404.905	*Lestari*
Meritjan	3.820.190.005	5.230.742.390	*Meritjan*
Watoetoelis	1.707.682.243	4.553.940.358	*Watoetoelis*
Ngadiredjo	1.341.931.762	24.168.297.109	*Ngadiredjo*
Modjopanggung	334.420.206	8.106.721.109	*Modjopanggung*
Kebun Klaten	250.600.572	250.600.572	*Klaten Plantation*
Tjoekir	155.565.616	21.894.808.913	*Tjoekir*
Pengembangan Tuban	-	4.870.680.929	*Development of Tuban*
Jumlah piutang petani tebu rakyat	66.235.429.789	202.988.382.160	*Total sugarcance farmes receivables*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(26.095.166.898)	(26.125.599.936)	*Allowance for impairment losses*
Piutang petani tebu rakyat, neto	**40.140.262.891**	**176.862.782.224**	***Sugarcane farmers receivables, net***

Piutang petani tebu rakyat merupakan pinjaman antara lain berupa beban garap, saprodi, bibit, beban traktor, termasuk pemberian pinjaman dalam rangka program pemerintah "Ketahanan Pangan dan Energi". Pelunasan dari piutang ini akan dikompensasi dengan hasil penjualan gula dan tetes milik petani. Pinjaman ini berasal dari paket kredit bank melalui Koperasi Petani Tebu Rakyat. Dalam perjanjian pinjaman tersebut Perusahaan bertindak sebagai penjamin (avalis).

Receivables of sugarcane farmers represents receivables which include loads till, inputs, seed, tractor expenses, including lendings relating to the "Food Security and Energy Loan" Government program. The repayment of the receivables will be compensated from the proceeds of the sales of sugar and molasses owned by the farmers. These loans were obtained from the bank loan package through the Sugarcane Farmers Cooperative. Based on the loan agreements the Company acts as a guarantor (avalist).

Seluruh piutang petani tebu rakyat adalah dalam mata uang Rupiah.

All of the sugarcane farmers receivables are in Rupiah currency.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai:

Movements of allowance for impairment losses:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Saldo awal	26.125.599.936	6.704.894.490	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	-	19.420.705.446	*Additions during the year*
Pemulihan tahun berjalan	(30.433.038)	-	*Recovery during the year*
Saldo akhir	**26.095.166.898**	**26.125.599.936**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang petani tebu rakyat.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible sugarcane farmers receivables accounts.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG LAIN-LAIN / *8. OTHER RECEIVABLES*

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Pihak berelasi (Catatan 10)	6.873.438.211	9.542.861.985	***Related parties*** *(Note 10)*
Pihak ketiga:			***Third parties:***
PT Sakapatria Perkasa	18.307.978.160	22.729.368.295	*PT Sakapatria Perkasa*
PT Medco Intidinamika	11.215.861.004	6.734.576.328	*PT Medco Intidinamika*
Nyoto Sampurno	10.489.223.798	-	*Nyoto Sampurno*
Piutang bunga deposito	2.353.333.333	3.639.452.021	*Deposits interest receivable*
PT Asuransi Jasa Tania Tbk	645.080.000	3.840.043.366	*PT Asuransi Jasa Tania Tbk*
CV Rajawali Usaha Nabati	6.411.038	2.856.262.500	*CV Rajawali Usaha Nabati*
Burger Sohne AG Burg, Swiss	-	3.328.787.411	*Burger Sohne AG Burg, Swiss*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 miliar)	14.459.757.492	9.951.381.148	*Others (each below Rp2 billion)*
Jumlah pihak ketiga	57.477.644.825	53.079.871.069	*Total third parties*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(18.503.866.892)	(18.503.866.892)	*Allowance for impairment losses*
Piutang lain-lain pihak ketiga, neto	38.973.777.933	34.576.004.177	*Other receivables - third parties, net*
Piutang lain-lain, neto	**45.847.216.144**	**44.118.866.162**	***Other receivables, net***

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai: / *Movements of allowance for impairment losses:*

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Saldo awal	18.503.866.892	195.888.732	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	-	18.307.978.160	*Addition during the year*
Saldo akhir	**18.503.866.892**	**18.503.866.892**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA / *9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES*

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Uang muka	9.053.387.482	6.116.005.563	*Advances*
Asuransi	2.637.053.943	1.163.926.891	*Insurance*
Jumlah biaya dibayar di muka	**11.690.441.425**	**7.279.932.454**	***Total prepaid expenses***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

10. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yaitu beberapa bank yang dikendalikan oleh Pemerintah Pusat, entitas dalam pengendalian bersama, entitas asosiasi dan pihak berelasi lainnya.

a. Saldo-saldo signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

10. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Group enters into transactions with related parties, which are several banks that are controlled by the Central Government, under common control entity, associates entity and other related parties.

a. Significant balances with related parties are as follows:

	Saldo/*Balance*		Persentase terhadap total aset/liabilitas/ *Percentage of total assets/ liabilities*		
	31 Desember/*December 31,*		31 Desember/ *December 31,*		
	2017	2016	2017	2016	
Kas dan setara kas (Catatan 4)					***Cash and cash equivalents (Note 4)***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	191.254.149.539	83.832.744.378	1,47%	0,64%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	38.905.954.472	63.114.552.232	0,30%	0,48%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	27.351.937.372	269.429.471	0,21%	0,00%	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.058.558.333	5.621.559.895	0,03%	0,04%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Mandiri	1.713.464.838	984.866.808	0,00%	0,01%	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	30.619.732	209.489.051	0,00%	0,00%	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia Syariah	4.885.118	-	0,01%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia Syariah*
Dolar Amerika Serikat					*United States Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.078.393.028	9.018.152.644	0,09%	0,07%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	437.905.094	3.428.790.345	0,00%	0,03%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	11.918.582	12.142.516	0,00%	0,00%	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	19.654.046	0,00%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Euro					*Euro*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.873.824.862	22.960.575.742	0,21%	0,18%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Deposito berjangka					*Time deposits*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.000.000.000	-	0,04%	0,00%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	33.675.693.558	0,00%	0,26%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah kas dan setara kas	**308.721.610.970**	**223.147.650.686**	**2,41%**	**1,75%**	***Total cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 5)					***Restricted cash and cash equivalents (Note 5)***
Giro					*Current accounts*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.882.823.223	17.565.780.768	0,08%	0,13%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Deposito berjangka					*Time deposits*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	950.000.000.000	400.000.000.000	7,30%	3,06%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	550.000.000.000	0,00%	4,21%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	**959.882.823.223**	**967.565.780.768**	**7,38%**	**7,41%**	***Total restricted cash and cash equivalents***
Piutang usaha (Catatan 6)					***Trade receivables (Note 6)***
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	52.188.569.197	31.552.653.764	0,40%	0,24%	*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*
PT Industri Gula Glenmore	3.263.745.324	-	0,03%	0,00%	*PT Industri Gula Glenmore*
PT Perkebunan Nusantara XIV	280.126.000	647.909.128	0,02%	0,00%	*PT Perkebunan Nusantara XIV*
PT Petrokimia Gresik	3.016.973.850	-	0,02%	0,00%	*PT Petrokimia Gresik*
PT Pupuk Kalimantan Timur	2.805.517.000	-	0,02%	0,00%	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
PT Pupuk Kujang	1.499.286.800	1.158.300.000	0,01%	0,01%	*PT Pupuk Kujang*
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ("Perum BULOG")	-	6.815.531.600	0,00%	0,05%	*Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ("Perum BULOG")*
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	-	2.308.383.371	0,00%	0,02%	*PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	1.300.849.014	0,00%	0,01%	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	3.687.552.863	1.272.983.300	0,03%	0,01%	*Others (each below Rp500 million)*
Jumlah piutang usaha	**66.741.771.034**	**45.056.610.177**	**0,53%**	**0,34%**	***Total trade receivables***
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(161.184.666)	(2.308.383.371)	(0,00%)	(0,02%)	*Allowance for impairment loss*
Piutang usaha, neto	**66.580.586.368**	**42.748.226.806**	**0,53%**	**0,32%**	***Trade receivables, net***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

10. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Saldo-saldo signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

a. Significant balances with related parties are as follows: (continued)

	Saldo/*Balance*		Persentase terhadap total aset/liabilitas/ *Percentage of total assets/ liabilities*		
	31 Desember/*December 31,*		31 Desember/ *December 31,*		
	2017	2016	2017	2016	
Piutang lain-lain (Catatan 8)					***Other receivables (Note 8)***
PT Perkebunan Nusantara XIV	3.071.467.094	3.069.029.178	0,02%	0,02%	*PT Perkebunan Nusantara XIV*
PT Perkebunan Nusantara IX	2.363.856.411	1.850.247.145	0,02%	0,01%	*PT Perkebunan Nusantara IX*
PT Perkebunan Nusantara II	726.286.833	726.286.833	0,01%	0,01%	*PT Perkebunan Nusantara II*
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	-	3.042.546.445	0,00%	0,02%	*PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	711.827.873	854.752.384	0,01%	0,01%	*Others (each below Rp500 million)*
Jumlah piutang lain-lain	**6.873.438.211**	**9.542.861.985**	**0,06%**	**0,07%**	***Total other receivables***
Piutang jangka panjang (Catatan 12)					***Long-term receivables (Note 12)***
PT Perkebunan Nusantara XIV	**1.424.945.314.253**	**1.216.017.167.331**	**10,32%**	**9,31%**	*PT Perkebunan Nusantara XIV*
Investasi saham (Catatan 13)					***Investment in shares (Note 13)***
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	6.884.000.000	6.884.000.000	0,05%	0,05%	*PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara*
PT Riset Perkebunan Nusantara	6.306.600.380	6.306.600.380	0,05%	0,05%	*PT Riset Perkebunan Nusantara*
Jumlah investasi	**13.190.600.380**	**13.190.600.380**	**0,10%**	**0,10%**	***Total investments***
Utang usaha (Catatan 17)					***Trade payable (Note 17)***
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ("Perum BULOG")	**-**	**311.162.730.750**	**0,00%**	**7,74%**	*Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ("Perum BULOG")*
Utang KKPE (Catatan 20)					***KKPE payables (Note 20)***
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL")	150.667.886.065	70.078.403.326	3,77%	1,74%	*Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL")*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.711.334.598	52.226.574.922	0,29%	1,30%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	8.622.996.203	91.512.618.786	0,22%	2,28%	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2.262.466.346	12.288.000.000	0,06%	0,31%	*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
PT Taspen (Persero)	1.398.262.050	14.186.478.450	0,03%	0,35%	*PT Taspen (Persero)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	1.796.696.956	0,00%	0,04%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	315.021.641	0,00%	0,01%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Bukopin Tbk	-	144.162.878	0,00%	0,00%	*PT Bank Bukopin Tbk*
Jumlah utang KKPE	**174.662.945.262**	**242.547.956.959**	**4,37%**	**6,04%**	***Total KKPE payables***
Pinjaman jangka pendek (Catatan 21)					***Short-term loans (Note 21)***
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	300.000.000.000	-	7,50%	0,00%	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	107.660.911.345	163.372.397.219	2,69%	4,07%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.098.371.664	14.294.773.959	0,53%	0,36%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	9.693.866.531	-	0,24%	0,00%	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
Indonesia Eximbank	9.471.409.780	22.211.955.574	0,23%	0,55%	*Indonesia Eximbank*
Badan Usaha Milik Negara	3.600.000.000	3.600.000.000	0,09%	0,09%	*Stated-owned Enterprises*
PT Bank Negara Indonesia Syariah	2.165.982.191	-	0,05%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia Syariah*
Jumlah pinjaman jangka pendek	**453.690.541.511**	**203.479.126.752**	**11,33%**	**5,07%**	***Total short-term loans***
Utang lain-lain (Catatan 22)					***Other payables (Note 22)***
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL")	3.087.125.128	4.187.125.128	0,08%	0,10%	*Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL")*
Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta	734.073.767	630.704.967	0,02%	0,02%	*Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta*
PT Perkebunan Nusantara XI	623.226.251	568.436.787	0,02%	0,01%	*PT Perkebunan Nusantara XI*
Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	-	851.437.443	0,00%	0,02%	*Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	530.432.933	129.017.315	0,01%	0,00%	*Others (each below Rp500 million)*
Jumlah utang lain-lain	**4.974.858.079**	**6.366.721.640**	**0,86%**	**0,57%**	***Total other payables***
Pinjaman jangka panjang (Catatan 23)					***Long-term loans (Note 23)***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.064.087.000.000	1.274.087.000.000	26,69%	31,71%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Mandiri	65.661.502.777	42.667.543.759	1,65%	1,06%	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.555.028.959	8.655.028.959	0,19%	0,22%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Indonesia Eximbank	2.480.000.000	1.491.396.000	0,06%	0,04%	*Indonesia Eximbank*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	50.000.000.000	0,00%	1,24%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah pinjaman jangka panjang	**1.139.783.531.736**	**1.376.900.968.718**	**28,59%**	**34,27%**	***Total long-term loans***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

10. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transaksi dengan pihak berelasi yang melebihi masing-masing Rp1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

10. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Significant transactions with related parties are as follows:

Transactions with related parties above Rp1 billion each for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	Saldo/*Balance*		Persentase terhadap total pendapatan/ beban terkait/ *Percentage to related total income/ expenses*		
	31 Desember/*December 31,*		31 Desember/ *December 31,*		
	2017	2016	2017	2016	
Pendapatan/penjualan					***Revenue/sales***
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ("Perum BULOG")	450.435.169.878	621.056.437.817	17,36%	27,48%	*Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ("Perum BULOG")*
PT Petrokimia Gresik	9.499.000.000	-	0,37%	0,00%	*PT Petrokimia Gresik*
PT Perkebunan Nusantara XIV	4.996.640.000	2.962.400.000	0,19%	0,13%	*PT Perkebunan Nusantara XIV*
PT Pupuk Kujang	1.926.408.000	1.053.000.000	0,07%	0,05%	*PT Pupuk Kujang*
PT Pupuk Kalimantan Timur	1.170.950.000	-	0,05%	0,00%	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
Jumlah pendapatan/penjualan	**468.028.167.878**	**625.071.837.817**	**18,04%**	**27,65%**	***Total revenus/sales***
Pendapatan operasi lain					***Other operating income***
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	**-**	**3.042.546.445**	**0,00%**	**6,06%**	*PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)*
Pembayaran dividen					***Dividend payments***
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	-	48.216.516.921	0,00%	35,01%	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
Negara Republik Indonesia	-	5.357.390.769	0,00%	3,89%	*Republic of Indonesia*
Jumlah pembayaran dividen	**-**	**53.573.907.690**	**0,00%**	**38,90%**	***Total dividen payments***
Iuran Dana Pensiun	**19.543.384.971**	**21.275.035.878**	**0,75%**	**0,92%**	*Pension contributions*
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS")	**15.498.184.310**	**13.872.657.075**	**0,60%**	**0,60%**	*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") contributions*
Biaya tunjangan sosial					***Social benefits expenses***
Lembaga Pendidikan Perkebunan	**568.280.600**	**1.149.155.809**	**0,02%**	**0,05%**	*Lembaga Pendidikan Perkebunan*

c. Kompensasi dan imbalan lain jangka pendek Dewan Komisaris dan Direksi

Kompensasi dan imbalan jangka pendek yang diterima Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.554.942.500 dan Rp3.409.608.679.

Kompensasi dan imbalan jangka pendek yang diterima Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.459.144.000 dan Rp7.001.969.850.

c. Short-term compensation and other benefits of the Board of Commissioners and Board of Directors

Short-term compensation and other benefits received by the Board of Commissioners for the years ended December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp2,554,942,500 and Rp3,409,608,679, respectively.

Short-term compensation and other benefits received by the Board of Directors for the years ended December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp4,459,144,000 and Rp7,001,969,850, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

10. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The details of related parties, nature of relationship and types of significant transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Type of relationship*	Jenis transaksi/ *Nature of transactions*
PT Perkebunan Nusantara I	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dan biaya lainnya.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, and other expenses.)*
PT Perkebunan Nusantara II	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dan biaya lainnya.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, and other expenses.)*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Pemegang saham Perusahaan/ Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Shareholder of the Company/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dan biaya lainnya.) / *Sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, and other expenses.)*
PT Perkebunan Nusantara IV	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dan biaya lainnya.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, and other expenses.)*
PT Perkebunan Nusantara V	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dan biaya lainnya.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, and other expenses.)*
PT Perkebunan Nusantara VI	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dan biaya lainnya.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, and other expenses.)*
PT Perkebunan Nusantara VII	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dan biaya lainnya.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, and other expenses.)*
PT Perkebunan Nusantara VIII	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dan biaya lainnya.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, and other expenses.)*
PT Perkebunan Nusantara IX	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dan biaya lainnya.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, and other expenses.)*
PT Perkebunan Nusantara XI	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dan biaya lainnya.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, and other expenses.)*
PT Perkebunan Nusantara XII	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dan biaya lainnya.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, and other expenses.)*
PT Perkebunan Nusantara XIII	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dan biaya lainnya.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, and other expenses.)*
PT Perkebunan Nusantara XIV	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dan biaya lainnya.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, and other expenses.)*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

10. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

10. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The details of related parties, nature of relationship and types of significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Type of relationship*	Jenis transaksi/ *Nature of transactions*
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Investasi saham/ *Investment in shares*	Jasa pemasaran dan investasi saham/ *Marketing services and shares investment*
PT Riset Perkebunan Nusantara	Investasi saham/ *Investment in shares*	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, dan kredit ketahanan pangan dan energi/ *Placement of current accounts and deposits, interest on deposits, credit facilities for working capital and investment, and food security and energy credit*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, dan kredit ketahanan pangan dan energi/ *Placement of current accounts and deposits, interest on deposits, credit facilities for working capital and investment, and food security and energy credit*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, dan kredit ketahanan pangan dan energi/ *Placement of current accounts and deposits, interest on deposits, credit facilities for working capital and investment, and food security and energy credit*
Indonesia Eximbank	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan fasilitas kredit modal kerja dan investasi/ *Placement credit facilities for working capital and investment*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Biaya pengobatan / *Medical costs*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Biaya pengobatan / *Medical costs*
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Klaim asuransi kesehatan/ *Health insurance claim*
PT Bank Syariah Mandiri	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Fasilitas kredit investasi / *Investment credit facility*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan fasilitas kredit modal kerja/ *Placement of current accounts and credit facilities for working capital.*
PT Pupuk Kujang	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penjualan karung/ *Sale of plastic bags*
Program Kemitraan Bina Lingkungan	Unit Perusahaan/ *the Company's unit*	Penyaluran dana modal kerja ke petani tebu/ *Distribution of working capital to sugarcane farmers*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

10. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The details of related parties, nature of relationship and types of significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat hubungan/** ***Type of relationship***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transactions***
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ("Perum BULOG")	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kerjasama importasi *raw sugar*, pengolahan *raw sugar*, distribusi dan penjualan gula/ *Cooperation in importation of raw sugar, processing of raw sugar, distribution and sale of sugar*
PT Taspen (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penyaluran dana modal kerja ke petani tebu/ *Distribution of working capital to sugarcane farmers*
PT Asuransi Jiwasraya	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penyaluran dana modal kerja ke petani tebu/ *Distribution of working capital to sugarcane farmers*
Dana Pensiun Perkebunan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Pengelola dana pensiun karyawan/ *Management of pensioun fund of the employees*
LPP (Lembaga Pendidikan Perkebunan)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Pendidikan dan pelatihan/ *Education and training*
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan/ *Health and social security program*
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penjualan gula/ *Sale of sugar*
PT Pupuk Kalimantan Timur	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penjualan karung/ *Sale of plastic bags*
PT Petrokimia Gresik	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penjualan karung/ *Sale of plastic bags*
PT Industri Gula Glenmore	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penjualan ampas/ *Sale of plastic dregs*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

11. PERSEDIAAN / *11. INVENTORIES*

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Barang jadi:			*Finished goods:*
Gula	156.983.388.469	352.188.294.280	*Sugar*
Karung	14.951.762.676	8.183.415.798	*Plastic bags*
Okra	13.446.466.047	11.306.942.065	*Okra*
Bioethanol	12.685.562.350	725.736.049	*Bioethanol*
Tetes	6.012.903.025	18.237.397.797	*Molasses*
Edamame	4.229.081.102	4.089.595.356	*Edamame*
Buncis	1.143.856.764	3.594.955.456	*Bean*
Lain-lain	3.577.829.806	4.349.002.697	*Others*
	213.030.850.239	402.675.339.498	
Barang dalam proses:			*Work in process:*
Tembakau	328.127.679.185	312.977.836.895	*Tobacco*
Karung	18.151.062.790	13.857.954.812	*Plasctic bag*
Gula sisan	12.358.743.022	12.696.315.290	*Sisan sugar*
	358.637.484.997	339.532.106.997	
Bahan baku	7.283.097.014	8.422.969.975	*Raw materials*
Bahan pembantu	59.335.620.200	63.712.689.007	*Supporting materials*
Tanaman tebu	66.708.641.385	63.661.355.973	*Sugarcane crop*
Barang dalam perjalanan	16.490.007.263	15.622.158.170	*Good in transit*
Tanaman edamame dan okra	18.288.370.958	13.133.626.371	*Edamame and okra crop*
Jumlah	739.774.072.056	906.760.245.991	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(778.945.667)	(779.562.517)	*Allowance for impairment losses*
Persediaan, neto	**738.995.126.389**	**905.980.683.474**	***Inventories, net***

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

Movements of allowance for impairment losses of inventories are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Saldo awal	779.562.517	21.748.015.096	*Beginning balance*
Pemulihan tahun berjalan	(616.850)	(20.968.452.579)	*Recovery during the year*
Saldo akhir	**778.945.667**	**779.562.517**	***Ending balance***

Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan pada tahun 2016 sebesar Rp20.968.452.579 terjadi di PT Energi Agro Nusantara, Entitas Anak, karena persediaan yang disisihkan tersebut telah seluruhnya dijual.

The recovery of allowance for impairment losses in 2016 amounting to Rp20,968,452,579 pertain to PT Energi Agro Nusantara, a Subsidiary, because the reserved inventories have been entirely sold.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari penurunan nilai persediaan.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from impairment in value of inventories.

Persediaan Perusahaan, Dasaplast dan Mitratani digunakan sebagai jaminan pinjaman jangka pendek (Catatan 21) dan pinjaman jangka panjang (Catatan 23) masing-masing sebesar Rp41.853.687.592 dan Rp367.854.445.216.

Inventories of the Company, Dasaplast and Mitratani are used as collateral for short-term loans (Note 21) and long-term loans (Note 23) amounting to Rp41,853,687,592 and Rp367,854,445,216, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERSEDIAAN (lanjutan)

Seluruh persediaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Tania Tbk terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp974 miliar dan Rp1 triliun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Kelompok Usaha.

11. INVENTORIES (continued)

All inventories are insured with PT Asuransi Jasa Tania Tbk against fire and other risks with coverage amounting to Rp974 billion and Rp1 trillion as of December 31, 2017 and 2016, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the possible risks to be experienced by the Group.

12. PIUTANG PIHAK BERELASI JANGKA PANJANG

12. LONG-TERM RECEIVABLES FROM RELATED PARTY

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
PT Perkebunan Nusantara XIV	1.424.945.314.253	1.216.017.167.331	*PT Perkebunan Nusantara XIV*

Piutang PT Perkebunan Nusantara XIV merupakan pengeluaran Perusahaan dalam rangka penyelamatan PT Perkebunan Nusantara XIV dari kerugian usaha Pabrik Gula Bone, Caming dan Takalar (BCT) sesuai dengan penugasan dari Menteri BUMN berdasarkan surat No. S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Deputi Bidang Agro Industri S-187/MBU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 serta No. S-653/MBU/2011 tanggal 7 Desember 2011. Termasuk dalam saldo piutang tersebut adalah pinjaman novasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dilakukan pada saat penyerahan BCT dari PT Rajawali Nusantara Indonesia, pengelola BCT sebelumnya kepada Perusahaan. Piutang kepada PT Perkebunan Nusantara XIV dikenakan bunga sebesar 8,9% per tahun.

Receivables from PT Perkebunan Nusantara XIV represent cost incurred by the Company in relation to rescue PT Perkebunan Nusantara XIV from operating losses of Bone, Caming and Takalar (BCT) Sugar Factory in accordance with the assignment from the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) based on letter No. S-549/MBU/2009 dated July 31, 2009 and the Letter of Deputy Agro Industries S-187/MBU/2009 dated August 12, 2009 and No. S-653/MBU/2011 dated December 7, 2011. Included in the receivables balance is loan novation from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk during transfer of BCT from PT Rajawali Nusantara Indonesia, the previous management of BCT to the Company. Receivables from PT Perkebunan Nusantara XIV bears interest at 8.9% per year.

13. INVESTASI SAHAM

13. INVESTMENT IN SHARES

Entitas/ *Entities*	Aktivitas utama/ *Main business*	Tempat kedudukan/ *Location*	Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage* 31 Desember / *December 31* 2017	2016	Jumlah/ *Total* 31 Desember / *December 31* 2017	2016
Metode biaya perolehan/*Cost method*						
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Pemasaran/ *Marketing*	Jakarta	7,14%	7,14%	6.884.000.000	6.884.000.000
PT Riset Perkebunan Nusantara	Riset dan pengembangan/ *Research and development*	Bogor	6,67%	6,67%	50.000.000	50.000.000
Jumlah metode biaya perolehan/*Total cost method*					6.934.000.000	6.934.000.000
Metode ekuitas/*Equity method*						
Perantara Makelar Tembakau Indonesia	Pemasaran/ *Marketing*	Jerman/ *Germany*	24,53%	24,53%	-	2.019.371.096
Penghapusan nilai investasi/*Write-off the value of investment*					-	(2.019.371.096)
Jumlah metode ekuitas, neto/*Total equity method, net*					-	-
Uang muka investasi saham/ *Advance in share investments*						
PT Riset Perkebunan Nusantara					6.256.600.380	6.256.600.380
Jumlah/*Total*					**13.190.600.380**	**13.190.600.380**

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

13. INVESTASI SAHAM (lanjutan)

- PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ("KPBN")

  Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan investasi saham pada KPBN sebanyak 1.000 lembar saham setara dengan kepemilikan sebesar 6,67%. Pada tahun 2011, Perusahaan memperoleh tambahan 5.884 saham, sehingga jumlah saham meningkat menjadi 6.884 saham dengan persentase kepemilikan menjadi sebesar 7,14% dan dengan nilai sebesar Rp6.884.000.000. Pada tahun 2016, Perusahaan memperoleh penghasilan dividen sebesar Rp197.939.586 dan dicatat sebagai pendapatan operasi lain.

- PT Riset Perkebunan Nusantara ("RPN")

  Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan investasi saham pada RPN sebanyak 50 lembar saham dan dengan nilai sebesar Rp50.000.000 dan dengan persentase kepemilikan sebesar 6,67%. Pada tahun 2012, Perusahaan melakukan penyetoran modal sebesar Rp6.256.600.380 dan dicatat sebagai uang muka investasi saham pada akun investasi saham di laporan posisi keuangan.

- Perantara Makelar Tembakau

  Pada tahun 1996, Perusahaan melakukan investasi saham pada Perantara Makelar Tembakau sebanyak 75.000 lembar saham dengan total nilai sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.019.371.096 dengan persentase kepemilikan saham 24,53%. Pada tahun 2016, Perusahaan memutuskan untuk menghapus investasi saham tersebut karena terdapat keraguan yang signifikan terhadap kelangsungan usahanya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas investasi saham.

13. INVESTMENT IN SHARES (continued)

- *PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ("KPBN")*

  In 2009, the Company acquired 1,000 shares of KPBN equivalent to ownership of 6.67%. In 2011, the Company acquired additional 5,884 shares, to increase the number of shares to 6,884 shares representing ownership of 7.14% and value of Rp6,884,000,000. In 2016, the Company received dividend income amounting to Rp197,939,586 and is recorded as other operating income.

- *PT Riset Perkebunan Nusantara ("RPN")*

  In 2009, the Company invested 50 shares in RPN amounting to Rp50,000,000 equivalent to ownership of 6.67%. In 2012, the Company injected capital amounting to Rp6,256,600,380 and recorded as advance payment for shares investment in the investment in shares account in the statements of financial position.

- *Perantara Makelar Tembakau*

  In 1996, the Company made shares investment in Perantara Makelar Tembakau by 75,000 shares with a total value as of December 31, 2015 amounting to Rp2,019,371,096 with a percentage ownership of 24.53%. In 2016, the Company decided to write-off the shares investment because of significant doubts about its going concern.

Management believes that there is no impairment in the value of investment in shares.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. TANAMAN PERKEBUNAN

a. Tanaman semusim

Tanaman semusim adalah beban yang telah dikeluarkan terkait dengan beban produksi tanaman tebu giling dan tembakau pada 2 sampai dengan 4 tahun yang akan datang dengan detail sebagai berikut:

14. PLANTATIONS

a. Annual crops

Annual crops represent costs incurred that are related to costs of milled sugarcane and tobacco cost production in 2 to 4 years with details as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Beban produksi gula	15.856.829.556	20.839.020.103	*Sugar production expenses*
Beban produksi tembakau	11.030.741.895	10.326.967.434	*Tobacco production expenses*
Jumlah tanaman semusim	**26.887.571.451**	**31.165.987.537**	***Total annual crops***

Beban tersebut meliputi beban tanaman tebu sendiri di sebelas pabrik gula milik Perusahaan yang tersebar di daerah Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Jombang dan Tulungagung serta tanaman tembakau di Jember dan Klaten.

These expenses include costs of sugarcane crop at eleven sugar factories owned by the Company which are located in Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Jombang and Tulungagung and tobacco crop in Jember and Klaten.

b. Tanaman menghasilkan

Tanaman menghasilkan adalah tanaman kakao yang berada di Kebun Kertosari, Jember.

b. Mature plantations

Mature plantations are cocoa plants located in Kertosari Plantation, Jember.

Perubahan di tahun 2017	Saldo awal 1 Januari 2017/ *Beginning balance January 1, 2017*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir 31 Desember 2017/ *Ending Balance December 31, 2017*	*2017 Movements*
Nilai perolehan	551.368.904	-	-	-	551.368.904	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(531.548.329)	(11.117.552)	-	-	(542.665.881)	*Accumulated depreciation*
Nilai tercatat	**19.820.575**				**8.703.023**	***Carrying value***

Perubahan di tahun 2016	Saldo awal 1 Januari 2016/ *Beginning balance January 1, 2016*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir 31 Desember 2016/ *Ending Balance December 31, 2016*	*2016 Movements*
Nilai perolehan	551.368.904	-	-	-	551.368.904	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(521.301.383)	(10.246.946)	-	-	(531.548.329)	*Accumulated depreciation*
Nilai tercatat	**30.067.521**				**19.820.575**	***Carrying value***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

15. ASET TETAP

15. FIXED ASSETS

Mutasi 2017	Saldo 1 Januari 2017/ *Balance January 1, 2017*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Pemindahan/ *Transfers*	Saldo 31 Desember 2017/ *Balance December 31, 2017*	*2017 Movements*
Biaya Perolehan						***Cost***
Tanah	7.236.086.378.620	-	-	-	7.236.086.378.620	*Land*
Bangunan	392.496.271.220	44.956.624.271	(726.970.554)	7.125.579.496	443.851.504.433	*Buildings*
Mesin dan peralatan	2.790.833.799.312	85.919.149.505	(1.380.671.761)	73.236.881.457	2.948.609.158.513	*Machinery and equipment*
Jalan, jembatan dan saluran air	53.869.399.750	522.702.000	-	-	54.392.101.750	*Roads, bridges and culvert*
Alat pengangkutan	68.921.892.277	2.285.274.182	-	-	71.207.166.459	*Transportations equipment*
Alat pertanian	63.050.821.642	4.081.818.182	-	-	67.132.639.824	*Agricultural equipment*
Peralatan kantor dan lainnya	171.876.655.716	66.695.177.011	(1.475.000)	7.505.877.436	246.076.235.163	*Office equipment and others*
Sub-jumlah	10.777.135.218.537	204.460.745.151	(2.109.117.315)	87.868.338.389	11.067.355.184.762	***Sub-total***
Sewa Pembiayaan						*Finance lease*
Mesin dan peralatan	-	7.290.040.280	-	-	7.290.040.280	*Machinery and equipment*
Perlengkapan Pabrik	-	148.169.205	-	-	148.169.205	*Factory equipment*
Kendaraan	321.166.364	814.934.906	-	-	1.136.101.270	*Vehicle*
Aset dalam pelaksanaan	106.558.326.871	24.869.155.806	(3.955.016.489)	(87.868.338.389)	39.604.127.799	*Construction in progress*
	10.884.014.711.772	**237.583.045.348**	**(6.064.133.804)**	**-**	**11.115.533.623.316**	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	161.037.207.205	27.225.701.608	(438.993.642)	-	187.823.915.171	*Buildings*
Mesin dan peralatan	1.662.264.069.034	179.820.911.880	(818.440.665)	-	1.841.266.540.249	*Machinery and equipment*
Jalan, jembatan dan saluran air	20.295.327.203	3.458.466.604	-	-	23.753.793.807	*Roads, bridges and culvert*
Alat pengangkutan	58.461.866.096	4.826.856.247	-	-	63.288.722.343	*Transportations equipment*
Alat pertanian	42.940.255.715	3.556.104.999	-	-	46.496.360.714	*Agricultural equipment*
Peralatan kantor dan lainnya	114.786.306.279	27.710.651.044	(1.475.000)	-	142.495.482.323	*Office equipment and others*
Sub-jumlah	2.059.785.031.532	246.598.692.382	(1.258.909.307)	-	2.305.124.814.607	***Sub-total***
Sewa Pembiayaan						*Finance lease*
Mesin dan peralatan	-	210.390.193	-	-	210.390.193	*Machinery and equipment*
Perlengkapan Pabrik	-	5.865.031	-	-	5.865.031	*Factory equipment*
Kendaraan	28.904.973	122.876.805	-	-	151.781.778	*Vehicle*
	2.059.813.936.505	**246.937.824.411**	**(1.258.909.307)**	**-**	**2.305.492.851.609**	
Nilai tercatat	**8.824.200.775.267**				**8.810.040.771.707**	***Carrying amount***

Mutasi 2016	Saldo 1 Januari 2016/ *Balance January 1, 2016*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Pemindahan/ *Transfers*	Saldo 31 Desember 2016/ *Balance December 31, 2016*	*2016 Movements*
Biaya Perolehan						***Cost***
Tanah	7.236.086.378.620	-	-	-	7.236.086.378.620	*Land*
Bangunan	341.473.142.331	47.421.140.587	-	3.601.988.302	392.496.271.220	*Buildings*
Mesin dan peralatan	2.631.603.772.571	151.896.786.237	-	7.333.240.504	2.790.833.799.312	*Machinery and equipment*
Jalan, jembatan dan saluran air	36.419.784.148	17.449.615.602	-	-	53.869.399.750	*Roads, bridges and culvert*
Alat pengangkutan	65.641.113.183	2.578.404.094	(153.825.000)	856.200.000	68.921.892.277	*Transportations equipment*
Alat pertanian	60.707.538.007	2.343.283.635	-	-	63.050.821.642	*Agricultural equipment*
Peralatan kantor dan lainnya	117.904.933.740	53.971.721.976	-	-	171.876.655.716	*Office equipment and others*
Sub-jumlah	10.489.836.662.600	275.660.952.131	(153.825.000)	11.791.428.806	10.777.135.218.537	***Sub-total***
Sewa Pembiayaan						*Finance lease*
Kendaraan	-	321.166.364	-	-	321.166.364	*Vehicle*
Aset dalam pelaksanaan	23.901.104.628	94.448.651.049	-	(11.791.428.806)	106.558.326.871	*Construction in progress*
	10.513.737.767.228	**370.430.769.544**	**(153.825.000)**	**-**	**10.884.014.711.772**	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	126.932.889.704	34.104.317.501	-	-	161.037.207.205	*Buildings*
Mesin dan peralatan	1.517.779.630.653	144.484.438.381	-	-	1.662.264.069.034	*Machinery and equipment*
Jalan, jembatan dan saluran air	14.305.490.673	5.989.836.530	-	-	20.295.327.203	*Roads, bridges and culvert*
Alat pengangkutan	54.460.548.507	4.155.142.589	(153.825.000)	-	58.461.866.096	*Transportations equipment*
Alat pertanian	39.899.855.073	3.040.400.642	-	-	42.940.255.715	*Agricultural equipment*
Peralatan kantor dan lainnya	80.436.385.692	34.349.920.587	-	-	114.786.306.279	*Office equipment and others*
Sub-jumlah	1.833.814.800.302	226.124.056.230	(153.825.000)	-	2.059.785.031.532	***Sub-total***
Sewa Pembiayaan						*Finance lease*
Kendaraan	-	28.904.973	-	-	28.904.973	*Vehicle*
	1.833.814.800.302	**226.152.961.203**	**(153.825.000)**	**-**	**2.059.813.936.505**	
Nilai tercatat	**8.679.922.966.926**				**8.824.200.775.267**	***Carrying amount***

Penambahan aset tetap pada tahun 2017 sebesar Rp237.583.045.348 terdiri dari penambahan Rp135.278.762.619 dan Rp102.304.282.729 masing-masing pada aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak.

Additions of fixed assets in 2017 amounting to Rp237,583,045,348 consists of Rp135,278,762,619 and Rp102,304,282,729 additions in the fixed assets of the Company and Subsidiaries, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

15. ASET TETAP (lanjutan)

Penambahan aset tetap pada tahun 2016 sebesar Rp370.430.769.544 terdiri dari penambahan Rp300.346.237.089 dan Rp70.084.532.455 masing-masing pada aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak.

Aset dalam pelaksanaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebagian besar merupakan mesin dan peralatan untuk inspeksi dengan tingkat penyelesaian masing-masing sebesar 10% - 90% dan 30% - 93%. Proyek-proyek ini diharapkan dapat diselesaikan masing-masing di tahun 2018 dan 2017.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada aset dalam pelaksanaan adalah sebesar Rp855.915.445 dan Rp216.328.366 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

15. FIXED ASSETS (continued)

Additions of fixed assets in 2016 amounting to Rp370,430,769,544 consists of Rp300,346,237,089 and Rp70,084,532,455 additions in the fixed assets of the Company and Subsidiaries, respectively.

Construction in progress as of December 31, 2017 and 2016 mainly represents machinery and equipment with percentage completion of 10 – 90% and 30% - 93%, respectively. These projects are expected to be completed in 2018 and 2017.

Total borrowing cost capitalized to the construction in progress amounted to Rp855,915,445 and Rp216,328,366, for the years ended December 31, 2017 and 2016, respectively.

The details of sales of fixed assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2017	**2016**	
Hasil penjualan aset tetap	3.983.216.489	82.272.727	*Proceeds from sales of fixed assets*
Nilai tercatat	4.805.497.224	-	*Carrying amount*
Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset tetap	**(822.280.735)**	**82.272.727**	***Gain (loss) on sales of fixed assets***

Keuntungan (kerugian) atas penjualan aset tersebut dicatat sebagai bagian dari pendapatan (beban) operasi lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi tahun 2017 dan 2016.

Pada tahun 2017, Perusahaan menghapuskan bangunan los pengering dengan nilai buku Rp287.976.912 dikarenakan bangunan tersebut terbakar.

Pada tanggal 31 Desember tahun 2017 dan 2016, Kelompok Usaha tidak memiliki aset yang sementara tidak digunakan dan aset tetap yang dihentikan penggunaannya.

Sejak 2015, Kelompok Usaha mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran tanah menjadi model revaluasi.

Jika tanah diukur menggunakan model biaya, nilai tercatatnya akan menjadi masing-masing sebesar Rp110.024.331.431 dan Rp110.024.331.431 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Surplus revaluasi pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp7.126.062.047.189 dan Rp7.126.062.047.189. Tidak ada surplus revaluasi yang ditransfer ke saldo laba pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Gain (loss) on sale of asset is recorded as part of other operating income (expenses) in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income year 2017 and 2016.

In 2017, the Company wrote-off barn for drying tobacco with net book value of Rp287,976,912 due to fire.

As of December 31, 2017 and 2016, the Group did not have assets that are temporary unused and fixed assets that were discontinued its use.

Starting 2015, the Group has changed its accounting policy for the measurement of land to the revaluation model.

If land was measured using the cost model, the carrying amount would be Rp110,024,331,431 and Rp110,024,331,431 as of December 31, 2017 and 2016, respectively. Revaluation surplus in 2017 and 2016 amounted to Rp7,126,062,047,189 and Rp7,126,062,047,189, respectively. There is no revaluation surplus which was transferred to retained earnings as of December 31, 2017 and 2016.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

15. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah yang dinilai. Nilai wajar tanah didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Antonius Setiady dan Rekan, KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan, KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan, KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan, KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan dan KJPP Herly, Ariawan & Rekan berdasarkan laporannya tanggal 15 Maret 2016. Manajemen percaya bahwa tidak terdapat perubahan nilai wajar yang signifikan atas nilai wajar tanah pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Input penilaian signifikan yang tidak dapat diobservasi adalah harga per meter persegi yang berkisar antara Rp1.244 sampai dengan Rp43.154.185.

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam revaluasi ini adalah pendekatan pasar dengan menggunakan hirarki level 3.

Tidak terdapat perubahan nilai wajar yang signifikan atas aset tetap tanah pada tahun 2017 dan 2016.

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan dalam usaha pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

15. FIXED ASSETS (continued)

The fair value of land was determined by using market comparable method. This means that valuations performed by the valuer are based on active market prices, significantly adjusted for difference in the nature, location or condition of the specific land. The land's fair values are based on valuations performed by the Public Appraisal Service Office ("KJPP") Antonius Setiady and Partners, KJPP Toha, Okky, Heru and Partners, KJPP Abdullah Fitriantoro and Partners, KJPP Rengganis, Hamid and Partners, KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Hanz and Partners, KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Partners and KJPP Herly, Ariawan & Partners with report dated March 15, 2016. Mangement believes that there is no significant changes in fair value of land as of December 31, 2017 and 2016.

Significant unobservable valuation input pertains to price per square meter ranging from Rp1,244 to Rp43,154,185.

The valuation approach used in the assessment of this revaluation is market approach using hierarchy level 3.

There is no significant changes of fair value of land in 2017 and 2016.

Gross carrying amount of fixed assets which are fully depreciated but still used in operations as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Bangunan	60.187.793.033	53.085.234.625	*Buildings*
Mesin dan peralatan	1.133.673.597.424	1.139.383.932.923	*Machinery and equipment*
Jalan, jembatan dan saluran air	9.686.737.281	6.420.010.496	*Roads, bridges and culvert*
Alat pengangkutan	49.865.410.067	45.610.079.210	*Transportations equipment*
Alat pertanian	33.504.104.850	48.621.213.209	*Agricultural equipment*
Peralatan kantor dan lainnya	89.330.420.134	64.127.376.164	*Office equipment and others*
Jumlah	**1.376.248.062.789**	**1.357.247.846.627**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, bangunan, mesin dan peralatan dan kendaraan tertentu telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Tania Tbk terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis tertentu dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp1,3 triliun dan Rp1,1 triliun. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan tersebut.

As of December 31, 2017 and 2016, buildings, machinery and equipment and certain vehicles are insured with PT Asuransi Jasa Tania Tbk against fire and other risks based on certain policies package with total coverage amounting to Rp1.3 trillion and Rp1.1 trillion, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap tertentu Kelompok Usaha kecuali Enero digunakan sebagai jaminan pinjaman jangka pendek (Catatan 21) dan pinjaman jangka panjang (Catatan 23) masing-masing sebesar Rp88.038.980.000 dan Rp1.707.256.280.596.

Beban penyusutan dibebankan ke akun sebagai berikut:

15. FIXED ASSETS (continued)

Certain fixed assets of The Group except Enero are used as collateral for short-term loans (note 21) and long-term loans (Note 23) amounting to Rp88,038,980,000 and Rp1,707,256,280,596, respectively.

Depreciation expenses charged to the following accounts as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2017	**2016**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 32)	222.430.166.628	204.123.650.142	*Cost of sales (Note 32)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 33)	24.507.657.783	22.029.311.061	*General and administrative expenses (Note 33)*
Jumlah	**246.937.824.411**	**226.152.961.203**	***Total***

Aset Pengampunan Pajak

Pada 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang pengampunan pajak No. 11/2016 yang merupakan pengampunan pajak, sanksi administrasi, dan sanksi pidana pajak dengan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengampunan pajak diberikan kepada kewajiban pajak yang belum dibayar atau dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan tahun pajak terbaru (yang berakhir pada tanggal 1 Januari - 31 Desember 2015) melalui Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak mencakup pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan pajak penjualan barang mewah.

PT Mitratani Dua Tujuh, Entitas Anak, menyampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak tanggal 28 September 2016 terkait dengan pengampunan pajak. Aset pengampunan pajak yang dilaporkan berupa mesin sebesar Rp4.059.926.900 dikurangi dengan liabilitas pengampunan pajak sebesar Rp3.044.944.925, dengan nilai tebusan sebesar Rp20.299.640. PT Mitratani Dua Tujuh melaporkan liabilitas pengampunan pajak sebesar 75% dari aset pengampunan pajak. Selisih antara harga perolehan aset pengampunan pajak dengan liabilitas pengampunan pajak dicatat sebagai bagian dari "Komponen ekuitas lainnya".

Aset dan liabilitas pengampunan pajak masing-masing dicatat sebagai "Aset pengampunan pajak, neto" dan "Liabilitas pengampunan pajak" pada laporan posisi keuangan konsolidasian 2017 dan 2016. Aset pengampunan pajak dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi.

Tax Amnesty Assets

In 2016, the Goverment of the Republic of Indonesia issued tax amnesty Law No. 11/2016 which represents a waiver of tax due, administration sanctions, and tax crime sanctions which can be granted by paying redemption money as stipulated in this law.

The tax amnesty is granted on tax obligation which has not been paid or fully settled by taxpayers up to the latest fiscal year (which ended within January 1 - December 31, 2015) through assets declared using the Asset Declaration Letter for Tax Amnesty. The scope of this Tax Amnesty covers Income Tax, Value Added Tax ("VAT") and Luxury-goods Sales Tax.

PT Mitratani Dua Tujuh, a Subsidiary, based on a letter dated September 28, 2016, has submitted an application regarding the tax amnesty. Reported tax amnesty assets in the form of machineries amounting to Rp4,059,926,000 less tax amnesty liabilities amounting to Rp3,044,944,925, with a redemption value of Rp20,299,640. PT Mitratani Dua Tujuh reported liability of tax amnesty amounting to 75% from tax amnesty assets. The difference between the acquisition price of tax amnesty assets and tax amnesty liabilities is recorded as part of "Other component of equity".

Assets and liabilities of tax amnesty are recorded as "Tax amnesty assets, net" and "Tax amnesty liability", respectively, in the consolidated statements of financial position 2017 and 2016. Tax amnesty assets are recorded at cost less accumulated depreciation.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

15. ASET TETAP (lanjutan)

Aset Pengampunan Pajak (lanjutan)

Saldo aset pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

15. FIXED ASSETS (continued)

Tax Amnesty Assets (continued)

The balance of tax amnesty assets are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Harga perolehan	4.059.927.900	4.059.927.900	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(2.086.351.836)	(1.409.697.189)	*Accumulated depreciation*
Jumlah	**1.973.576.064**	**2.650.230.711**	***Total***

Beban penyusutan aset pengampunan pajak adalah masing-masing sebesar Rp676.654.647 dan Rp1.409.697.189 pada tahun 2017 dan 2016 dibebankan ke akun beban pokok pendapatan (Catatan 32).

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Depreciation expense of tax amnesty assets amounted to Rp676,654,647 and Rp1,409,697,189 in 2017 and 2016, respectively charged to cost of sales (Note 32).

Management believes that there are no events or changes in circumstances that may indicate impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2017 and 2016.

16. ASET TAKBERWUJUD

16. INTANGIBLE ASSETS

Mutasi 2017	Saldo 1 Januari 2017/ *Balance January 1, 2017*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo 31 Desember 2017/ *Balance December 31, 2017*	*2017 Movements*
Biaya Perolehan					***Cost***
Beban pendirian	23.595.579.478	-	-	23.595.579.478	*Establishment cost*
Biaya pengembangan	3.183.747.147	-	-	3.183.747.147	*Development cost*
Royalti	28.368.900.000	-	-	28.368.900.000	*Royalty*
Perangkat lunak	16.294.535.744	539.078.920	-	16.833.614.664	*Software*
Goodwill	8.009.588.944	-	-	8.009.588.944	*Goodwill*
Hak atas tanah	7.465.003.493	69.045.455	-	7.534.048.948	*Landrights*
	86.917.354.806	**608.124.375**	**-**	**87.525.479.181**	
Akumulasi Amortisasi					***Accumulated Amortization***
Beban pendirian	23.168.297.087	31.228.238	-	23.199.525.325	*Establishment cost*
Biaya pengembangan	2.230.695.687	31.154.490	-	2.261.850.177	*Development cost*
Perangkat lunak	3.635.285.008	2.583.387.486	-	6.218.672.494	*Software*
Goodwill	453.278.944	-	-	453.278.944	*Goodwill*
Hak atas tanah	947.442.757	529.219.098	-	1.476.661.855	*Landrights*
	30.434.999.483	**3.174.989.312**	**-**	**33.609.988.795**	
Nilai buku	**56.482.355.323**			**53.915.490.386**	***Net book value***

Mutasi 2016	Saldo 1 Januari 2016/ *Balance January 1, 2016*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo 31 Desember 2016/ *Balance December 31, 2016*	*2016 Movements*
Biaya Perolehan					***Cost***
Beban pendirian	23.168.297.087	427.282.391	-	23.595.579.478	*Establishment cost*
Biaya pengembangan	2.939.747.147	244.000.000	-	3.183.747.147	*Development cost*
Royalti	28.368.900.000	-	-	28.368.900.000	*Royalty*
Perangkat lunak	9.140.446.493	7.154.089.251	-	16.294.535.744	*Software*
Goodwill	8.009.588.944	-	-	8.009.588.944	*Goodwill*
Hak atas tanah	6.718.798.730	746.204.763	-	7.465.003.493	*Landrights*
	78.345.778.401	**8.571.576.405**	**-**	**86.917.354.806**	
Akumulasi Amortisasi					***Accumulated Amortization***
Beban pendirian	23.168.297.087	-	-	23.168.297.087	*Establishment cost*
Biaya pengembangan	2.172.057.677	58.638.010	-	2.230.695.687	*Development cost*
Perangkat lunak	1.597.616.711	2.037.668.297	-	3.635.285.008	*Software*
Goodwill	453.278.944	-	-	453.278.944	*Goodwill*
Hak atas tanah	619.941.655	327.501.102	-	947.442.757	*Landrights*
	28.011.192.074	**2.423.807.409**	**-**	**30.434.999.483**	
Nilai buku	**50.334.586.327**			**56.482.355.323**	***Net book value***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Royalti merupakan pembayaran royalti kepada Marubeni Corporation, Tokyo, Jepang sesuai dengan *license agreement* tanggal 13 Oktober 2013 sebesar ¥270.000.000 atau setara dengan Rp28.368.900.000 terkait dengan pembangunan pabrik *bioethanol* di Gempolkrep, Mojokerto, Jawa Timur.

Biaya pengembangan terkait dengan usaha kompos di PG Kremboong dan PG Lestari dan perijinan usaha kompos sebesar Rp1.588.235.344.

Goodwill merupakan selisih antara harga perolehan dan nilai wajar pada saat Perusahaan mengakuisisi saham milik PT Mitratani Dua Tujuh pada tahun 2014.

Perangkat lunak merupakan biaya pembelian perangkat lunak sehubungan dengan implementasi SAP di Perusahaan.

Hak atas tanah merupakan biaya perpanjangan sertifikat Tanah HGU yang diamortisasi selama 20 tahun.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Beban amortisasi dibebankan ke akun sebagai berikut:

16. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Royalty represents payments of royalty to Marubeni Corporation, Tokyo, Japan in accordance with the license agreement dated October 13, 2013 amounting to ¥270,000,000 or equivalent to Rp28,368,900,000 related to the construction of bioethanol plant in Gempolkrep, Mojokerto, East Java.

Development cost relating to compost business in Kremboong Sugar Factory and Lestari Sugar Factory and compost business licenses amounted to Rp1,588,235,344.

Goodwill represents the difference between the acquisition cost and the fair value at the time the Company acquired the shares of PT Mitratani Dua Tujuh in 2014.

Software represents purchase cost of software in connection with the implementation of SAP.

Landrights represents renewal fee of HGU Land amortized over a period of 20 years.

Management believes that there are no events or changes in circumstances that may indicate impairment in the value of intangible assets as of December 31, 2017 and 2016.

Amortization expenses charged to the following accounts:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2017	**2016**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 32)	338.713.264	276.353.602	*Cost of sales (Note 32)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 33)	2.836.276.048	2.147.453.807	*General and administrative expenses (Note 33)*
Jumlah	**3.174.989.312**	**2.423.807.409**	***Total***

Uji penurunan nilai terhadap Royalti

Kelompok usaha menguji penurunan nilai royalti dan *goodwill* setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin mengalami penurunan nilai.

Dalam menguji apakah penurunan nilai diperlukan, nilai tercatat tersebut dialokasikan ke aset atau UPK yang relevan untuk mendapatkan nilai tercatat kombinasian. Nilai tercatat kombinasian tersebut dibandingkan dengan nilai terpulihkan UPK. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai tersebut, jumlah terpulihkan royalti dan *goodwill* yang dialokasikan ditentukan berdasarkan "nilai pakai" (*value-in-use*) dengan menggunakan metode arus kas yang didiskontokan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas royalti dan *goodwill* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Impairment test on Royalty

The Group performs testing of royalty and goodwill impairment annually (on December 31) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

In assessing whether impairment is required, the carrying value is allocated to the relevant assets or CGU to obtain combined carrying value. The combined carrying value is compared with CGU's recoverable amount. For impairment testing purposes, the recoverable amounts of the royalty and goodwill allocated are determined based on "value-in-use" using discounted cash flows method.

Mangement believes that there is no indicators of impairment that existed on the royalty and goodwill for the year ended December 31, 2017.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

17. UTANG USAHA / *17. TRADE PAYABLES*

a. Berdasarkan pemasok / *a. Based on suppliers*

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Pihak berelasi (Catatan 10)	-	311.162.730.750	***Related parties*** *(Note 10)*
Pihak ketiga:			***Third parties:***
PT Laju Brata	13.292.957.726	1.970.762.949	*PT Laju Brata*
CV Tri Karya	9.513.553.450	27.873.171.164	*CV Tri Karya*
PT Bukit Megamas Abadi	9.484.341.350	6.004.572.700	*PT Bukit Megamas Abadi*
PT Verona Multikimia Abadi	8.960.256.459	6.903.123.641	*PT Verona Multikimia Abadi*
PT Inosco Surya Pratama	6.108.964.795	2.284.734.364	*PT Inosco Surya Pratama*
PT Barata Indonesia	5.690.658.496	4.003.044.195	*PT Barata Indonesia*
PT Toya Indo Manunggal	5.625.456.600	349.314.232	*PT Toya Indo Manunggal*
CV Sumber Lancar	5.035.526.285	976.393.572	*CV Sumber Lancar*
PT Windu Kamukten	3.838.221.798	168.430.200	*PT Windu Kamukten*
Toko Mulur	3.304.998.486	-	*Toko Mulur*
PT Artoda Bersaudara	2.936.269.739	5.143.640.508	*PT Artoda Bersaudara*
PT Sinar Roda Utama	2.784.870.000	709.288.000	*PT Sinar Roda Utama*
CV Adi Graha	2.628.482.000	3.613.043.900	*CV Adi Graha*
PT Panca Putra Satriawibawa	2.558.630.134	523.446.611	*PT Panca Putra Satriawibawa*
CV PNP Djaja	2.556.739.105	96.800.000	*CV PNP Djaja*
PT Inja Perkasa Tama	2.524.681.020	-	*PT Inja Perkasa Tama*
PT Anugrah Mitra Jaya	2.332.379.710	3.342.335.410	*PT Anugrah Mitra Jaya*
PT Saprotan Nusantara Agroutama	2.276.072.213	-	*PT Saprotan Nusantara Agroutama*
CV Cahaya Perkasa Indonesia	2.271.396.449	895.646.996	*CV Cahaya Perkasa Indonesia*
CV Gading Mas	2.246.164.568	261.688.550	*CV Gading Mas*
CV Bintang Abadi Teknik	2.229.187.328	390.800.000	*CV Bintang Abadi Teknik*
PT Pijar Nusa Pasifik	2.159.735.529	-	*PT Pijar Nusa Pasifik*
PT Candi Ngrimbi	2.069.191.961	2.621.215.704	*PT Candi Ngrimbi*
UD Keluarga Setia	1.418.156.204	2.533.074.850	*UD Keluarga Setia*
CV Hendra Putra Mandiri	-	2.092.804.392	*CV Hendra Putra Mandiri*
PT Guna Saudara Teknik	-	2.021.285.000	*PT Guna Saudara Teknik*
PT Multinas Indonesia	-	2.013.944.464	*PT Multinas Indonesia*
Itochu Plastics Pte. Ltd, Singapura	-	2.889.277.440	*Itochu Plastics Pte. Ltd, Singapore*
PT Dirgantara Surya Persada	-	8.944.103.993	*PT Dirgantara Surya Persada*
CV Usaha Mandiri	-	2.600.395.351	*CV Usaha Mandiri*
CV Lontar Jaya	-	3.479.394.310	*CV Lontar Jaya*
CV Jaya Utama	-	2.711.475.872	*CV Jaya Utama*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 miliar)	82.787.866.061	58.096.157.822	*Others (each below Rp2 billion)*
Jumlah pihak ketiga	186.634.757.466	155.513.366.190	*Total third parties*
Jumlah	**186.634.757.466**	**466.676.096.940**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG USAHA (lanjutan) / *17. TRADE PAYABLES (continued)*

b. Berdasarkan mata uang / *b. Based on currencies*

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Rupiah	183.137.644.995	462.547.647.165	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	3.497.112.471	4.128.449.775	*United States Dollar*
Jumlah	**186.634.757.466**	**466.676.096.940**	***Total***

18. BEBAN AKRUAL DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK / *18. ACCRUED EXPENSES AND SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Beban akrual			***Accrued expenses***
Bunga obligasi	15.575.000.000	15.575.000.000	*Bond interest*
Profesional	5.748.185.000	13.234.000.000	*Professional*
Listrik, air, dan telepon	6.302.513.884	4.388.979.241	*Utilities*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1,5 miliar)	20.190.797.642	11.903.940.681	*Other (each below Rp1.5 billion)*
Jumlah beban akrual	47.816.496.526	45.101.919.922	*Total accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek			***Short-term employee benefits liabilities***
Bonus karyawan dan tantiem	45.077.519.940	5.185.122.454	*Employees' bonus and tantiem*
Jumlah beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek	**92.894.016.466**	**50.287.042.376**	***Total accrued expenses and short-term employee benefits liabilities***

19. PERPAJAKAN / *19. TAXATION*

a. Pajak dibayar dimuka / *a. Prepaid taxes*

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Perusahaan:			*The Company:*
Pajak Pertambahan Nilai	48.746.935.594	41.477.856.407	*Value Added Tax*
Entitas Anak:			*Subsidiaries:*
Pajak Pertambahan Nilai	1.946.604.517	-	*Value Added Tax*
Jumlah pajak dibayar dimuka	**50.693.540.111**	**41.477.856.407**	***Total prepaid taxes***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / *19. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Perusahaan:			***The Company:***
Pajak penghasilan:			*Income taxes:*
Pasal 4(2)	122.361.031	1.435.239.841	*Article 4(2)*
Pasal 21	3.720.556.864	2.752.769.908	*Article 21*
Pasal 22	5.544.510	24.545.131	*Article 22*
Pasal 23	3.244.233.420	344.116.468	*Article 23*
Pasal 25	-	11.061.955.748	*Article 25*
Pasal 26	-	392.604.008	*Article 26*
Sub-jumlah	**7.092.695.825**	**16.011.231.104**	***Sub-total***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
Pajak penghasilan:			*Income taxes:*
Pasal 4(2)	26.871.322	405.877.961	*Article 4(2)*
Pasal 21	2.031.430.513	1.374.603.537	*Article 21*
Pasal 23	84.941.300	83.090.281	*Article 23*
Pasal 25	568.605.531	192.319.624	*Article 25*
Pasal 29	6.004.650.518	4.749.530.911	*Article 29*
Pajak Pertambahan Nilai	207.381.444	3.464.249.264	*Value Added Tax*
Sub-jumlah	**8.923.880.628**	**10.269.671.578**	***Sub-total***
Jumlah utang pajak	**16.016.576.453**	**26.280.902.682**	***Total taxes payable***

c. Beban (manfaat) pajak / *c. Tax expense (benefit)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,* 2017	(Disajikan kembali/ *As restated)* 2016	
Perusahaan:			***The Company:***
Beban pajak kini (Catatan 19d)	-	-	*Current tax expense (Note 19d)*
Kurang bayar pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (Catatan 19g)	-	2.124.468.283	*Underpayment tax based on the tax assessment letter (Note 19g)*
Beban (manfaat) pajak tangguhan	8.496.025.230	(73.719.495.207)	*Deferred tax expense (benefits)*
Sub-jumlah	**8.496.025.230**	**(71.595.026.924)**	***Sub-total***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
Beban pajak kini	20.888.063.724	18.130.208.750	*Current tax expense*
Kurang bayar pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (Catatan 19g)	-	122.386.000	*Underpayment tax based on the Tax Assessment Letter (Note 19g)*
Manfaat pajak tangguhan	(185.381.426)	(1.656.001.075)	*Deferred tax benefits*
Sub-jumlah	**20.702.682.298**	**16.596.593.675**	***Sub-total***
Jumlah beban (manfaat) pajak	**29.198.707.528**	**(54.998.433.249)**	***Total tax expense (benefit)***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak dengan estimasi penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

19. TAXATION (continued)

d. Current tax

A reconciliation between profit before tax benefit (expense) and estimated taxable income for the years ended December 31, 2017 and 2016 is as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2017	(Disajikan kembali/ *As restated*) 2016	
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan, Kelompok Usaha	93.944.518.104	(207.554.547.094)	*Profit (loss) before tax benefit (expense), Group*
Laba sebelum pajak, Entitas Anak	59.699.181.760	50.463.973.730	*Profit before tax expense, Subsidiaries*
Laba (rugi) sebelum pajak, Perusahaan	**34.245.336.344**	**(258.018.520.824)**	***Profit (loss) before tax expense, the Company***
Beda waktu:			***Temporary differences:***
Liabilitas imbalan kerja	22.496.624.254	18.628.628.237	*Employee benefits liability*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	745.089.060	37.728.683.606	*Allowance for impairment losses on receivables*
Penyesuaian nilai wajar	-	(472.504.370)	*Fair value adjustment*
Depresiasi aset tetap dan amortisasi aset takberwujud	(22.090.246.540)	(41.052.777.369)	*Fixed assets depreciation and intangible assets amortization*
Jumlah beda waktu	1.151.466.774	14.832.030.104	*Total temporary differences*
Beda tetap:			***Permanent difference:***
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(56.185.886.323)	(62.103.389.527)	*Income already subject to final tax*
Penghasilan dividen dari Entitas Anak	(8.958.230.256)	(13.537.870.300)	*Dividend income from Subsidiaries*
Bonus	31.000.000.000	-	*Bonus*
Beban sumbangan	4.585.888.999	4.558.878.671	*Donation expenses*
Beban pengeluaran unit	1.062.336.000	4.442.289.125	*Unit spending expenses*
Beban perjamuan	4.996.892.151	4.107.098.184	*Entertainment expenses*
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	1.941.208.963	25.673.533.842	*Other non-deductible expenses*
Jumlah beda tetap	(21.557.790.466)	(36.859.460.005)	*Total permanent differences*
Estimasi penghasilan (rugi) kena pajak - Perusahaan	13.839.012.652	(280.045.950.725)	***Estimated taxable income (loss) - the Company***
Rugi fiskal tahun 2016	(280.045.950.725)	-	*Fiscal loss carryforward year 2016*
Estimasi rugi fiskal setelah kompensasi rugi fiskal	(266.206.938.073)	(280.045.950.725)	*Estimated tax loss after compensation of tax loss carryforward*
Beban pajak kini	-	-	*Current tax expense*
Dikurangi: Pajak dibayar dimuka - Perusahaan			*Less: Prepaid taxes - the Company*
Pajak penghasilan:			*Income taxes:*
PPh 22	5.009.079.594	16.668.633.975	*Article 22*
PPh 23	316.633	112.731.206	*Article 23*
PPh 25	-	32.854.003.376	*Article 25*
Jumlah	5.009.396.227	49.635.368.557	*Total*
Lebih bayar pajak penghasilan badan - Perusahaan (Catatan 19f)	**(5.009.396.227)**	**(49.635.368.557)**	***Over payment corporate income tax - the Company (Note 19f)***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak kini (lanjutan)

Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Perusahaan tahun 2016 telah disampaikan ke Kantor Pajak sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak tahun 2016. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum melaporkan SPT tahun 2017 kepada Kantor Pajak. Perusahaan akan melaporkan SPT tahun 2017 sesuai dengan estimasi penghasilan kena pajak tahun 2017.

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dan beban pajak, neto adalah sebagai berikut:

19. TAXATION (continued)

d. Current tax (continued)

Annual Tax Return ("SPT") of the Company for the year 2016 has been submitted to the Tax Office in accordance with the estimated taxable income for the year 2016. As of the completion date of the consolidated financial statements, the Company has not reported its 2017 SPT to the Tax Office. The Company will report the 2017 SPT in accordance with the estimated taxable income for the year 2017.

A reconciliation between profit before tax benefit (expense), as presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, multiplied by the applicable tax rate and income tax expense, net are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2017	**(Disajikan kembali/ *As restated*) 2016**	
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan, Kelompok Usaha	93.944.518.104	(207.554.547.094)	*Profit (loss) before tax benefit (expense), Group*
Laba sebelum pajak, Entitas Anak	59.699.181.760	50.463.973.730	*Profit before tax expense, Subsidiaries*
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak - Perusahaan	**34.245.336.344**	**(258.018.520.824)**	***Profit (loss) before tax benefit (expense) - the Company***
Pengaruh pajak atas:			*The tax effect on:*
Pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak	8.561.334.086	(64.504.630.206)	*Income tax based on tax rates*
Beda tetap dan pembulatan	(5.389.447.617)	(9.214.865.001)	*Pemanent difference and rounded*
Total beban (manfaat) pajak penghasilan - Perusahaan	3.171.886.469	(73.719.495.207)	*Total income tax expense (benefit) - the Company*
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Catatan 19g)	-	2.124.468.283	*Underpayment Tax Assessment Letter (Note 19g)*
Penyisihan penilaian atas aset pajak tangguhan	5.324.138.761	-	*Valuation allowance of deferred tax assets*
Total beban pajak penghasilan - Entitas Anak	20.702.682.298	16.596.593.675	*Total income tax expense - Subsidiaries*
Total beban (manfaat) pajak penghasilan - Kelompok Usaha	**29.198.707.528**	**(54.998.433.249)**	***Total income tax expense (benefit) - Group***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak kini (lanjutan)

Akumulasi aset pajak tangguhan yang tidak diakui sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp22.369.463.703 yang terdiri dari aset pajak tangguhan dari perbedaan temporer imbalan kerja dan penyisihan rugi fiskal masing-masing sebesar Rp17.045.324.942 dan Rp5.324.138.761.

e. Aset pajak tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan Perusahaan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

19. TAXATION (continued)

d. Current tax (continued)

The accumulation of deferred tax assets that unrecognized until December 31, 2017 in the amount of Rp22,369,463,703 consist of deferred tax assets from temporary differences of employee benefits and allowance of fiscal loss in the amount of Rp17,045,324,942 and Rp5,324,138,761, respectively

e. Deferred tax assets

The details of deferred tax assets of the Company and Subsidiaries are as follows:

Mutasi 2017	31 Desember 2016 (Disajikan kembali)/ *December 31, 2016 (As restated)*	Dibebankan ke laba rugi/ *Charged to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	*2017 Movements*
Perusahaan:					***The Company:***
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	13.989.946.165	186.272.265	-	14.176.218.430	*Allowance for impairment losses*
Penyisihan aset non produktif	249.561.347	-	-	249.561.347	*Allowance for non-productive assets*
Liabilitas imbalan kerja	181.819.444.675	5.624.156.064	18.046.108.406	205.489.709.145	*Employee benefits liability*
Aset tetap dan aset takberwujud	7.730.322.721	(5.522.561.635)	-	2.207.761.086	*Fixed assets and intangible assets*
Penyisihan penurunan nilai persediaan	194.736.417	-	-	194.736.417	*Allowance for impairment of inventories*
Rugi fiskal	70.011.487.681	(8.783.891.924)	-	61.227.595.757	*Fiscal loss*
Aset pajak tangguhan, neto - Perusahaan	**273.995.499.006**	**(8.496.025.230)**	**18.046.108.406**	**283.545.582.182**	***Deferred tax assets, net - The Company***
Entitas Anak:					***Subsidiaries:***
Aset tetap	1.559.328.839	21.606.709	-	1.580.935.548	*Fixed assets*
Liabilitas imbalan kerja	5.959.645.280	574.526.945	2.352.360.543	8.886.532.768	*Employee benefits liability*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	850.698.170	(410.752.228)	-	439.945.942	*Allowance for impairment losses*
Aset pajak tangguhan, neto - Entitas Anak	**8.369.672.289**	**185.381.426**	**2.352.360.543**	**10.907.414.258**	***Deferred tax assets, net - Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan, neto	**282.365.171.295**	**(8.310.643.804)**	**20.398.468.949**	**294.452.996.440**	***Deferred tax assets, net***

Mutasi 2016	31 Desember 2015 (Disajikan kembali)/ *December 31, 2015 (As restated)*	Dibebankan ke laba rugi/ *Charged to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	31 Desember 2016 (Disajikan kembali)/ *December 31, 2016 (As restated)*	*2016 Movements*
Perusahaan:					***The Company:***
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	4.557.775.263	9.432.170.902	-	13.989.946.165	*Allowance for impairment losses*
Penyisihan aset non produktif	249.561.347	-	-	249.561.347	*Allowance for non-productive assets*
Liabilitas imbalan kerja	179.020.616.986	4.657.157.059	(1.858.329.370)	181.819.444.675	*Employee benefits liability*
Aset tetap dan aset takberwujud	17.993.517.064	(10.263.194.343)	-	7.730.322.721	*Fixed assets and intangible assets*
Piutang jangka panjang	118.126.092	(118.126.092)	-	-	*Long-term receivables*
Penyisihan penurunan nilai persediaan	194.736.417	-	-	194.736.417	*Allowance for impairment of inventories*
Rugi fiskal	-	70.011.487.681	-	70.011.487.681	*Fiscal loss*
Aset pajak tangguhan, neto - Perusahaan	**202.134.333.169**	**73.719.495.207**	**(1.858.329.370)**	**273.995.499.006**	***Deferred tax assets, net - The Company***
Entitas Anak:					***Subsidiaries:***
Aset tetap	764.182.697	795.146.142	-	1.559.328.839	*Fixed assets*
Liabilitas imbalan kerja	4.244.321.435	713.402.276	1.001.921.569	5.959.645.280	*Employee benefits liability*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	821.371.605	29.326.565	-	850.698.170	*Allowance for impairment losses*
Utang jangka panjang pihak berelasi	(118.126.092)	118.126.092	-	-	*Long-term payables to related parties*
Aset pajak tangguhan, neto - Entitas Anak	**5.711.749.645**	**1.656.001.075**	**1.001.921.569**	**8.369.672.289**	***Deferred tax assets, net - Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan, neto	**207.846.082.814**	**75.375.496.282**	**(856.407.801)**	**282.365.171.295**	***Deferred tax assets, net***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

f. Estimasi tagihan pajak

f. Estimated claims for tax refund

	31 Desember/ *December 31,*		
	2017	**2016**	
Perusahaan			***The Company***
2017 (Catatan 19d)	5.009.396.227	-	*2017 (Note 19d)*
2016 (Catatan 19d)	49.635.368.557	49.635.368.557	*2016 (Note 19d)*
Entitas Anak			***Subsidiaries***
PT Dasaplast Nusantara	969.081.311	-	*PT Dasaplast Nusantara*
PT Energi Agro Nusantara	24.376.892	24.376.892	*PT Energi Agro Nusantara*
Jumlah estimasi piutang pajak	**55.638.222.987**	**49.659.745.449**	***Total estimated claim for tax refund***

g. Surat ketetapan pajak

Perusahaan

- Pada 5 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas pajak penghasilan badan tahun 2014 sebesar Rp13.435.873.954 dari tagihan lebih bayar pajak yang diajukan oleh Perusahaan sebesar Rp15.560.342.237. Selisih sebesar Rp2.124.468.283 diakui sebagai bagian dari beban pajak kini tahun 2016.

- Pada tahun 2015, Perusahaan menerima SKPKB dan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ("PPN") jasa giling untuk tahun 2001, 2003 dan 2004 dengan kekurangan bayar PPN masing-masing Rp22.838.261.952, Rp43.609.222.270 dan Rp31.373.487.884. Perusahaan telah melakukan pembayaran secara bertahap. Pada tanggal 31 Desember 2015 Perusahaan masih memiliki sisa kurang bayar PPN sebesar Rp52.932.159.554 dan dicatat sebagai bagian dari akun "Utang Pajak" pada laporan posisi keuangan konsolidasian 2015. Atas SKPKB tersebut, terdapat potensi denda pajak sebesar Rp139.354.007.042 berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Pajak No. S-11960/WPJ.19/KP.03/2015 tanggal 24 November 2015.

  Pada tahun 2016, Perusahaan telah membayar utang kurang bayar atas pokok pajak sebesar Rp40.935.561.069 dan mencatat pendapatan lain-lain sebesar Rp11.996.598.485 (Catatan 35). Potensi denda pajak tidak dicatat Perusahaan karena Perusahaan telah mengikuti pengampunan pajak (Catatan 19h).

g. Tax assessment letters

The Company

- *On April 5, 2016, the Directorate General of Taxes issued Overpayment Tax Letter ("SKPLB") for corporate income tax year 2014 amounting to Rp13,435,873,954 out of the Rp15,560,342,237 claim for tax refund claimed by the Company. The difference amounting to Rp2,124,468,283 is recorded as part of the current tax expense for the year 2016.*

- *In 2015, the Company received SKPKB and Tax Collection Letter ("STP") for milling services Value Added Tax ("VAT") for the years 2001, 2003 and 2004 with the underpayment of VAT amounting to Rp22,838,261,952, Rp43,609,222,270 and Rp31,373,487,884, respectively. The Company has paid the underpayment by installment. As of December 31, 2015, the Company has the remaining VAT payables amounting to Rp52,932,159,554 and recorded as part of "Tax Payables" account in the 2015 consolidated statement of financial position. For these SKPKB, there is a potential tax penalty amounting to Rp139,354,007,042 based on the letter of Directorate General of Taxes No. S-11960/WPJ.19/ KP.03/2015 dated November 24, 2015.*

- *In 2016, the Company paid the principal underpayment tax payables amounting to Rp40,935,561,069 and recorded the difference to other income amounting to Rp11,996,598,485 (Note 35). The Company did not record the potential tax penalty as stated above since the Company filed a tax amnesty (Note 19h).*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Entitas Anak

PT Dasaplast Nusantara ("Dasaplast")

- Pada 5 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas pajak penghasilan badan tahun 2014 sebesar Rp113.093.200 dari tagihan lebih bayar pajak yang diajukan oleh Dasaplast sebesar Rp235.479.200. Selisih sebesar Rp122.386.000 diakui sebagai bagian dari beban pajak kini tahun 2016.

PT Energi Agro Nusantara ("Enero")

- Pada tanggal 21 Januari 2016, Enero menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atas lebih bayar PPN untuk periode September - Desember 2014 senilai Rp2.401.384.039 dan telah diterima oleh Enero pada tanggal 26 Februari 2016.

h. Pengampunan Pajak

Perusahaan

- Pada tahun 2016, Perusahaan memutuskan untuk memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sehubungan dengan hal ini, Perusahaan menyampaikan surat pernyataan harta tanggal 27 September 2016 dan membayar nilai tebusan sebesar Rp436.488.826 yang dicatat sebagai bagian dari "Beban operasi lain" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian 2016. Perusahaan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") tertanggal 11 Oktober 2016.

  Perusahaan menghapus denda pajak atas PPN Jasa Giling yang masih terutang (Catatan 19g) senilai Rp11.996.598.485 dan menyajikan penghapusan tersebut sebagai bagian dari "Pendapatan operasi lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian 2016 (Catatan 35). Penghapusan ini dibukukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak KPP Wajib Pajak Besar III pada tanggal 28 Februari 2017.

19. TAXATION (continued)

g. Tax assessment letters (continued)

Subsidiaries

PT Dasaplast Nusantara ("Dasaplast")

- *On April 5, 2016, the Directorate General of Taxes issued Overpayment Tax Letter for corporate income tax year 2014 amounted to Rp113,093,200 out of Rp235,479,200 claim of tax refund filed by the Dasaplast. The difference amounting to Rp122,386,000 is recorded as part of the current tax expense year 2016.*

PT Energi Agro Nusantara ("Enero")

- *On January 21, 2016, Enero received the Notification of Tax Audit Findings on overpayment of VAT for the period September - December 2014 amounting to Rp2,401,384,039 and has been received by Enero on February 26, 2016.*

h. Tax Amnesty

The Company

- *In 2016, the Company decided to utilize tax amnesty facility based on the Tax Amnesty Law. In relation to that matter, the Company has submitted an application regarding the tax amnesty dated September 27, 2016 and paid a redemption value of Rp436,488,826 which recorded as part of "Other operating expenses" in the 2016 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company has received Tax Amnesty Approval Letter ("Surat Keterangan Pengampunan Pajak - SKPP") dated October 11, 2016.*

  The Company has written-off the remaining tax penalty liabilities (Note 19g) amounting to Rp11,996,598,485 and presented it as part of "Other operating Income" in the 2016 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 35). The write-off was booked upon approval of Director of General of Taxes through its Large Tax Office III dated February 28, 2017.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Pengampunan Pajak (lanjutan)

Entitas Anak

PT Nusantara Medika Utama ("NMU")

- Pada tahun 2016, NMU memutuskan untuk memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sehubungan dengan hal ini, NMU menyampaikan surat pernyataan harta tanggal 30 September 2016 dan membayar nilai tebusan sebesar Rp13.988.210 yang dicatat sebagai bagian dari "Beban operasi lain" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian 2016. Perusahaan telah menerima SKPP tertanggal 4 Oktober 2016.

PT Mitratani Dua Tujuh ("Mitratani")

- Seperti dijelaskan pada Catatan 15, Mitratani memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak dan melaporkan aset sebesar Rp4.059.926.900 dikurangi dengan liabilitas pengampunan pajak sebesar Rp3.044.944.925. Mitratani membayar nilai tebusan sebesar Rp20.299.640 yang dicatat sebagai bagian dari "Beban operasi lain" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian 2016. Perusahaan telah menerima SKPP tertanggal 30 September 2016.

i. Pajak atas Revaluasi Aset Tetap

Perusahaan telah melakukan revaluasi aset tanah tertentu untuk tujuan komersial dan pajak (Catatan 15). Perusahaan telah membayar pajak atas revaluasi tersebut pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp30.107.688.840 dan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka pada laporan posisi keuangan konsolidasian 2015. Pada tahun 2016, Perusahaaan telah memperoleh persetujuan atas revaluasi aset tanah tersebut dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nilai pajak Rp30.119.116.863, sehingga pajak atas surplus revaluasi tersebut disajikan sebagai pengurang surplus revaluasi aset tetap dalam akun penghasilan komprehensif lain pada laporan perubahan ekuitas 2016.

19. TAXATION (continued)

h. Tax Amnesty (continued)

Subsidiaries

PT Nusantara Medika Utama ("NMU")

- *In 2016, NMU decided to utilize tax amnesty facility based on the Tax Amnesty Law. In relation to that matter, NMU has submitted an application regarding the tax amnesty dated September 30, 2016 and paid a redemption value of Rp13,988,210 which recorded as part of "Other operating expenses" in the 2016 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company has received SKPP dated October 4, 2016.*

PT Mitratani Dua Tujuh ("Mitratani")

- *As discussed in Note 15, Mitratani utilized tax amnesty facility and reported tax amnesty assets amounted to Rp4,059,926,900 less with tax amnesty liabilities amounting to Rp3,044,944,925. Mitratani paid redemption value of of Rp20,299,640 which recorded as part of "Other operating expense" in the 2016 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company has received SKPP dated September 30, 2016.*

i. Tax on Revaluation of Fixed Assets

The Company has revalued certain land for commercial and tax purposes (Note 15). The Company has paid tax on the revaluation on December 30, 2015 amounting to Rp30,107,688,840 and was recorded as prepaid tax in the 2015 consolidated statement of financial position. In 2016, the Company has obtained approval for the revaluation of the land assets from the Directorate General of Taxes with value of tax Rp30,119,116,863, therefore the tax on revaluation surplus of fixed assets has been presented as deduction of revaluation surplus of fixed asset in other comprehensive income account in the 2016 statement of changes in equity.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. UTANG KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI ("KKPE")

20. FOOD SECURITY AND ENERGY CREDIT ("KKPE") PAYABLES

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Pihak berelasi: (Catatan 10)			***Related party:*** *(Note 10)*
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	150.667.886.065	70.078.403.326	*Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.711.334.598	52.226.574.922	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2.262.466.346	12.288.000.000	*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
PT Taspen (Persero)	1.398.262.050	14.186.478.450	*PT Taspen (Persero)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	1.796.696.956	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	315.021.641	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank Bukopin Tbk	-	144.162.878	*PT Bank Bukopin Tbk*
Pihak ketiga:			***Third party:***
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	8.622.996.203	91.512.618.786	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
Jumlah	**174.662.945.262**	**242.547.956.959**	***Total***

Seluruh utang KKPE adalah dalam mata uang Rupiah.

All KKPE payables are in Rupiah currency.

Utang KKPE merupakan kredit yang diperoleh Perusahaan dari bank-bank Pemerintah dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") untuk diteruskan kepada Petani Tebu Rakyat melalui Pabrik Gula. Dalam perjanjian kredit ini, Perusahaan bertindak sebagai *avalist* (penjamin) dengan menerbitkan jaminan perusahaan ("*corporate guarantee*").

KKPE payables represent credit obtained by the Company from Government banks and the Partnership Program and Community Development ("PKBL") to be distributed to the Sugarcane Farmers through Sugar Factory. In this agreement, the Company acts as an avalist by issuing a corporate guarantee.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL")

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL")

Pemberian pinjaman dari PKBL memiliki suku bunga pinjaman sebesar 6% per tahun. Jangka waktu pelunasan adalah satu masa giling (sejak tanam tebu hingga bagi hasil). Jaminan yang diberikan berupa jaminan fidusia atas tebu yang dimiliki petani, bukti pemilik kendaraan bermotor, dan Sertifikat Hak Milik dari petani atau koperasi. PKBL mensyaratkan untuk menyampaikan surat rekomendasi dari masing-masing pabrik gula, gambar kebun, identitas petani, dan rencana definitif kebutuhan kelompok/petani sebagai persyaratan pinjaman. Pembayaran pinjaman oleh petani dilakukan pada saat musim giling.

Loan from PKBL bears interest at 6% per year. Repayment period is one period of milling (from planting until the profit sharing). The collateral provided is in the form of fiduciary on cane owned by farmers, certificate of ownership of vehicles, and land certificate from farmers or cooperatives. PKBL required to provide a letter of recommendation from their respective sugar mills, mapping, farmers identity, and a definitive plan needs of groups/ farmers as credit terms. The farmers paid the loan during the milling season.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, tingkat suku bunga pinjaman berubah menjadi 3% per tahun. Peraturan ini berlaku mulai 5 Juli 2017.

Based on the Decree of the Ministry of State-Owned Enterprises Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 regarding Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, the loan interest rate was changed to 3% per year. This decree is effective from July 5, 2017.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

20. UTANG KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI ("KKPE") (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk penyaluran kredit KKPE untuk dua musim tanam tebu dengan suku bunga pinjaman sebesar 10,5% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Pencairan dana disesuaikan dengan kebutuhan dalam masing-masing musim tanam. Pembayaran pinjaman oleh petani dilakukan pada saat musim giling.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama Pelaksanaan KKPE dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk dua musim tanam tebu dengan suku bunga pinjaman adalah 10% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Pencairan dana disesuaikan dengan kebutuhan dalam masing-masing musim tanam. Pembayaran pinjaman oleh petani dilakukan pada saat musim giling.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Taspen (Persero)

Pemberian pinjaman dari BUMN Sinergi memiliki suku bunga pinjaman sebesar 6% per tahun. Jangka waktu pelunasan maksimum 24 bulan dari tanggal pencairan. Jaminan yang diberikan berupa jaminan fidusia atas tebu yang dimiliki petani. Pembayaran pinjaman oleh petani dilakukan pada saat musim giling.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, tingkat suku bunga pinjaman berubah menjadi 3% per tahun. Peraturan ini berlaku mulai 15 Juli 2017.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk 2 (dua) musim tanam tebu dengan suku bunga yang diberikan adalah sebesar 8,25% per tahun. Pembayaran pinjaman oleh petani dilakukan pada saat musim giling.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama pelaksanaan KKPE dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk penyaluran kredit KKPE untuk 2 (dua) musim tanam tebu dengan suku bunga pinjaman adalah sebesar 7,50% - 8,25% per tahun. Pencairan dana disesuaikan dengan kebutuhan dalam masing-masing musim tanam. Pembayaran pinjaman oleh petani dilakukan pada saat musim giling.

20. FOOD SECURITY AND ENERGY CREDIT ("KKPE") PAYABLES (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Company entered into a cooperation agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk relating to KKPE credit for two sugarcane planting seasons with the loan interest rate at 10.5% per year and due within a year. The distribution of funds depends on the needs of each planting season. The farmers paid the loan during the milling season.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

The Company entered into cooperation agreement of the Implementation of KKPE with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk for two sugarcane planting seasons with the interest rate at 10% per year and due within a year. The distribution of funds depends on the needs of each planting season. The farmers paid the loan during the milling season.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) and PT Taspen (Persero)

Loan from BUMN Sinergi bears interest at 6% per year. Repayment period is maximum 24 months since withdrawal date. Collateral provided in the form of fiduciary on sugarcane owned by farmers. The farmers paid the loan during the milling season.

Based on the Decree of the Ministry of State Owned Enterprises Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 regarding Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, the loan interest rate was changed to 3% per year. This decree is effective from July 15, 2017.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

The Company entered into agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk for 2 (two) sugarcane planting seasons with the interest rate at 8.25% per year. The farmers paid the loan during the milling season.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

The Company entered into cooperation agreement of the implementation of KKPE with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk for distribution of KKPE credit for 2 (two) sugarcane planting seasons with the interest rate at 7.50% - 8.25% per year. The distribution of funds depends on the needs of each planting season. The farmers paid the loan during the milling season.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. UTANG KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI ("KKPE") (lanjutan)

PT Bank Bukopin Tbk

Berdasarkan perjanjian kerjasama tentang pembiayaan KKPE Tebu Rakyat atau Kelompok Tani Binaan, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Bank Bukopin Tbk dengan tingkat suku bunga 12,75% per tahun, di mana 4,5% merupakan subsidi dari Pemerintah. Jangka waktu pemberian kredit adalah maksimal 18 bulan dan tidak melebihi masa tanam tebu 2015/2016 serta tidak dapat diperpanjang. Jaminan yang diberikan berupa tagihan atas hasil penjualan gula milik petani/kelompok tani, *corporate guarantee* Perusahaan yang disahkan RUPS sebesar total kewajiban kredit. Pembayaran pinjaman oleh petani dilakukan pada saat musim giling.

20. FOOD SECURITY AND ENERGY CREDIT ("KKPE") PAYABLES (continued)

PT Bank Bukopin Tbk

Under a cooperation agreement of KKPE financing for Sugarcane Farmers or Group (Kelompok Tani Binaan), the Company signed an agreement with PT Bank Bukopin Tbk with interest rate of 12.75% per year, of which 4.5% is subsidized by the Government. The term of loan is a maximum of 18 months and does not exceed the 2015/2016 sugarcane planting season and can not be extended. The collateral provided is in the form of a bill on the sale of sugar from farmers/farmer groups, corporate guarantee of the Company authorized through GSM at credit obligations amount. The farmers paid the loan during the milling season.

21. PINJAMAN JANGKA PENDEK / *21. SHORT-TERM LOANS*

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Pihak berelasi: (Catatan 10)			***Related parties:*** *(Note 10)*
Perusahaan			*The Company*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	300.000.000.000	-	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	97.685.361.590	163.372.397.219	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.098.371.664	14.294.773.959	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	9.975.549.755	-	*PT Bank Mandiri (Persero)Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	9.693.866.531	-	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
Indonesia Eximbank	9.471.409.780	22.211.955.574	*Indonesia Eximbank*
Badan Usaha Milik Negara	3.600.000.000	3.600.000.000	*State-owned Enterprises*
PT Bank Negara Indonesia Syariah	2.165.982.191	-	*PT Bank Negara Indonesia Syariah*
Pihak ketiga:			***Third parties:***
Entitas Anak:			*Subsidiaries*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	22.023.170.079	16.939.459.781	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Jumlah pinjaman jangka pendek	**475.713.711.590**	**220.418.586.533**	***Total short-term loans***

Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dana No: 3.05/SPJ-PTPN X/01/2017 atau XX-KONTR/17.076 tanggal 22 Maret 2017, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp200.000.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017.

The Company

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Based on Loan Credit Agreement No: 3.05/SPJ-PTPN X/01/2017 or XX-KONTR/17.076 dated March 22, 2017, the Company obtained working capital credit facility from PT Perkebunan Nusantara III (Persero) amounting to Rp200,000,000,000. The period of loan is from March 22, 2017 until April 30, 2017.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

21. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (lanjutan)

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan waktu pinjaman terakhir tertanggal 6 Desember 2017 dimana pinjaman diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2018. Perusahaan telah mengajukan perpanjangan jangka waktu pinjaman menjadi 31 Desember 2018. Suku bunga pinjaman sebesar 10% per tahun. Provisi kredit sebesar 0,15% dari limit kredit. *Facility fee* 0,10% dari limit kredit dan biaya administrasi senilai Rp2.000.000. Selama 2017, Perusahan menarik fasilitas tersebut dan telah membayar angsuran pinjaman sebesar Rp50.000.000.000. Saldo terutang atas pinjaman ini pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp150.000.000.000.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dana Nomor: 3.05/SPJ-PTPN X/02/2017 tanggal 30 Mei 2017, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp100.000.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017 dan telah diperpanjang hingga 31 November 2017. Suku bunga pinjaman sebesar 10% per tahun. Provisi kredit sebesar 0,15% dari limit kredit. *Facility fee* 0,10% dari limit kredit dan biaya administrasi senilai Rp2.000.000. Selama 2017, Perusahaan menarik seluruh fasilitas tersebut dan telah melunasinya.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dana No: 3.05/SPJ-PTPN X/08/2017 tanggal 16 Agustus 2017, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp150.000.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017. Perusahaan telah mengajukan perpanjangan jangka waktu pinjaman menjadi 31 Desember 2018. Suku bunga pinjaman sebesar 10% per tahun. Provisi kredit sebesar 0,15% dari limit kredit. *Facility fee* 0,10% dari limit kredit dan biaya administrasi senilai Rp2.000.000. Saldo terutang atas pinjaman ini pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp150.000.000.000.

21. SHORT-TERM LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (continued)

This agreement has been extended several times regarding the period of loan most recently dated December 6, 2017 extending the period of loan until March 31, 2018. The Company has requested for the extention up to December 31, 2018. The loan bears interest rate at 10% per annum. The credit provision is 0.15% of the credit limit. The facility fee is 0.10% of the credit limit and administration fee amounted to Rp2,000,000. During 2017, the Company withdrew the facility amount and has paid loan installment amounting to Rp50,000,000,000. The outstanding balance of the loan as of December 31, 2017 amounted to Rp150,000,000,000.

Based on Loan Credit Agreement No: 3.05/SPJ-PTPN X/02/2017 dated May 30, 2017, the Company obtained working capital credit facility from PT Perkebunan Nusantara III (Persero) amounting to Rp100,000,000,000. The period of loans was from May 30, 2017 until September 5, 2017 and has been extended until November 31, 2017. The loan bore interest rate at 10% per annum. The credit provision was 0.15% of the credit limit. The facility fee was 0.10% of the credit limit and administration fee amounted to Rp2,000,000. During 2017, the Company withdrew the facility amount and has fully paid on due date.

Based on Loan Credit Agreement No: 3.05/SPJ-PTPN X/08/2017 dated August 16, 2017, the Company obtained working capital credit facility from PT Perkebunan Nusantara III (Persero) amounting to Rp150,000,000,000. The period of loan is from August 25, 2017 until Desember 22, 2017. The Company has submitted for the extention up to December 31, 2018. The loan bears interest rate at 10% per annum. The credit provision is 0.15% of the credit limit. The facility fee is 0.10% of the credit limit and administration fee amounted to Rp2,000,000. The outstanding balance of the loan as of December 31, 2017 amounted to Rp150,000,000,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

21. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pinjaman jangka pendek dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terdiri dari:

21. SHORT-TERM LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Short-term loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk consist of:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Mandiri Supplier Finance (MSF)	97.685.361.590	13.372.397.219	*Mandiri Supplier Finance (MSF)*
KMK *Revolving III*	-	150.000.000.000	*KMK Revolving III*
Jumlah	**97.685.361.590**	**163.372.397.219**	***Total***

Mandiri Supplier Finance (MSF)

Berdasarkan perjanjian Kredit Modal Kerja ("KMK") No. CCO-SBY/223/PK-KMK/2004 tanggal 16 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Noor Irawati, S.H., Perusahaan mendapatkan fasilitas Mandiri Supplier Finance ("MSF") untuk *supplier* Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000. Fasilitas ini bersifat *uncommitted* dan *revolving*. Tujuan kredit adalah pembiayaan *Supply Chain Finance* atas dasar akseptasi *invoice* dengan tenor maksimal 180 hari. Jangka waktu fasilitas adalah tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018, dan telah diperpanjang sampai Maret 2019.

Pada tahun 2017, Perusahaan mendapat tambahan fasilitas MSF dengan kontrak No: WBG.CB6/014/2017 atau XX-KONTR 17.220 tanggal 12 Desember 2017 dengan nilai fasilitas tambahan sebesar Rp 100.000.000.000. Fasilitas ini bersifat *uncommitted* dan *revolving* dengan tenor maksimal 90 hari. Jangka waktu fasilitas adalah tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018, dan telah diperpanjang hingga 3 Maret 2019.

Mandiri Supplier Finance (MSF)

Based on Working Capital Loan ("KMK") agreement No. CCO-SBY/223/PK-KMK/2004 dated December 16, 2004 of Notary Noor Irawati, S.H., the Company obtained Mandiri Supplier Finance ("MSF") facility for the Company's supplier amounting to Rp100,000,000,000. This facility is an uncommitted and revolving facility. The purpose of the loan is for financing Supply Chain Finance on the basis of acceptance invoice with maximum 180 days of tenor. The facility is valid from March 3, 2017 until March 3, 2018, and has been extended up to March 2019.

In 2017, the Company obtained additional MSF facility with contract No: WBG.CB6/014/2017 or XX-KONTR 17.220 dated December 12, 2017 amounting to Rp100,000,000,000. This facility is an uncommitted and revolving facility with maximum 90 days tenor. The facility is valid from December 12, 2017 until March 3, 2018, and has been extended up to March 9, 2019.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

21. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

KMK *Revolving* III

Berdasarkan perjanjian Kredit Modal Kerja ("KMK") No. CRO.KP/088/KMK/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp700.000.000.000. KMK tersebut bersifat *revolving* rekening koran dan digunakan untuk membeli tebu rakyat. Jangka waktu pinjaman adalah tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017, dan telah diperpanjang sampai Maret 2018. Suku bunga pinjaman sebesar 10% per tahun dan dibayar setiap bulan. Provisi kredit sebesar 0,25% dari *limit* kredit. Selama tahun 2016, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp317.000.000.000 serta melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp150.000.000.000 di tahun 2017 dan Rp167.000.000.000 di tahun 2016.

Perjanjian antara Perusahaan dengan Bank Mandiri memuat beberapa pembatasan, antara lain mengharuskan Perusahaan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, mengalihkan hak kepemilikan atas barang yang sudah dijaminkan, mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan memperoleh pinjaman baru dari bank lain atau kreditur lain.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi ketentuan rasio keuangan dan persyaratan lainnya yang disyaratkan di atas.

21. SHORT-TERM LOANS (continued)

The Company (continued)

KMK Revolving III

Based on Working Capital Loan ("KMK") agreement No. CRO.KP/088/KMK/2016 dated June 16, 2016 of Notary Mutiara Siswono Patiendra, S.H., the Company obtained a credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp700,000,000,000. The KMK is a revolving current account and used for the purchase of sugarcane. The term of the loan is from June 16, 2016 up to March 23, 2017, and has been extended up to March 2018. The loan bears interest rate at 10% per annum and is paid on a monthly basis. The credit provision is 0.25% from the credit limit. In 2016, the Company withdraw the loans amounting to Rp317,000,000,0000, and paid the loans amounting to Rp150,000,000,000 in 2017 and Rp167,000,000,000 in 2016.

The agreements with Bank Mandiri include certain restrictive covenants, among others, the requirement for the Company to comply with certain financial ratios, transfer the ownership of the guaranteed assets, acting as guarantor to another parties and obtaining new loan facilities from other banks or other creditors.

As of December 31, 2017, the Company has complied with the required financial ratios and covenants stated above.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

21. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Entitas Anak

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Keputusan Kredit PT Dasaplast Nusantara ("Dasaplast") No. SBM/1/512/R tanggal 29 Desember 2015, Dasaplast mendapatkan fasilitas perjanjian KMK 1 dan KMK 2 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp15.000.000.000 dan Rp7.000.000.000, dengan tingkat suku bunga sebesar 11,75%. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2018 dan sedang dalam proses pengajuan perpanjangan jatuh tempo. Provisi kredit sebesar 0,25% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan fidusia yang dinotariskan atas mesin dan peralatan (Catatan 15), persediaan (Catatan 11) dan piutang (Catatan 6), masing-masing sebesar Rp23.038.980.000, Rp35.603.687.592 dan Rp8.777.400.522. Fasilitas ini juga dijamin dengan Surat Hak Tanggungan Pertama (*first registered hypothecation)* atas tanah dan bangunan (Catatan 15) sebesar Rp28.000.000.000. Selama tahun 2017, Dasaplast melunasi pinjaman sebesar Rp21.784.016.110. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp21.098.371.664 dan Rp14.294.773.959 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Perjanjian antara Dasaplast dengan Bank BNI di atas memuat beberapa pembatasan, antara lain mengharuskan Dasaplast untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, tidak mengubah bentuk dan status hukum perusahaan, anggaran dasar, susunan direksi, komisaris dan pemegang saham, tidak mengijinkan pihak lain menggunakan Dasaplast untuk kegiatan usaha pihak lain dan tidak menggunakan kredit diluar tujuan pemberian kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Dasaplast telah memenuhi rasio keuangan dan persyaratan lainnya yang disyaratkan di atas.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 16 Agustus 2017, PT Nusantara Medika Utama ("NMU") memperoleh fasilitas kredit jangka pendek *Receivable Refinancing* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maksimum sebesar Rp10.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar suku bunga mingguan yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan kisaran 8,5% hingga 10%. Pinjaman akan jatuh tempo maksimum 90 hari dari tanggal pencairan. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp9.975.549.755.

21. SHORT-TERM LOANS (continued)

Subsidiaries

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on Decision Letter of Credit PT Dasaplast Nusantara ("Dasaplast") No. SBM/1/512/R dated December 29, 2015, Dasaplast obtained KMK 1 and KMK 2 from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp15,000,000,000 and Rp7,000,000,000, respectively, with interest rate at 11.75%. The loan is due on March 3, 2018 and is currently still in the process of extending the due date. The credit provision is equivalent to 0.25% per annum. The loan is secured by notarized fiduciary over machinery and equipment (Note 15), inventory (Note 11) and receivables (Note 6), amounting to Rp23,038,980,000, Rp35,603,687,592 and Rp8,777,400,522, respectively. Facility is also secured by first registered hypothecation of land and buildings (Note 15) amounting to Rp28,000,000,000. During 2017, Dasaplast paid loan installments amounting to Rp21,784,016,110. The outstanding loan related to this facility amounted to Rp21,098,371,664 and Rp14,294,773,959 as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

The agreements with Bank BNI above include certain restrictive covenants, among others, the requirement for Dasaplast to comply with certain financial ratios, not allowing to change articles of association, composition of boards of directors, commissioners and stockholders, not allowing other parties to operate Dasaplast for other business activities and not using the loan other than for its purposes.

As of December 31, 2017 and 2016, Dasaplast has complied with the required financial ratios and covenants stated above.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On August 16, 2017, PT Nusantara Medika Utama ("NMU") obtained a short-term credit facility Receivable Refinancing from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with maximum amount of Rp10,000,000,000 with weekly interest rate issued by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ranging from 8.5% to 10%. This loan will be matured 90 days from withdrawal date. The outstanding balance of the loans as of December 31, 2017 amounted to Rp9,975,549,755.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

21. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.312 yang dibuat pada tanggal 13 November 2017 oleh notaris Jane Margaretha H., S.H., Mkn, Dasaplast mendapatkan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja dalam bentuk Pinjaman Tetap Reguler sebesar Rp3.000.000.000, dengan tingkat suku bunga sebesar 11,50% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 13 November 2018. Pinjaman ini dijamin dengan persediaan (Catatan 11) dan piutang usaha (Catatan 6) masing-masing sebesar Rp6.250.000.000 dan Rp3.750.000.000. Pinjaman ini juga dijamin dengan Surat Hak Tanggungan Pertama (*first registered hypothecation*) atas tanah dan bangunan (Catatan 15) milik Dasaplast sebesar Rp12.500.000.000. Saldo terutang atas fasilitas ini sebesar Rp3.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2017.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.313 yang dibuat pada tanggal 13 November 2017 oleh notaris Jane Margaretha H., S.H., Mkn, di Jepara, Dasaplast mendapatkan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja dalam bentuk Pinjaman Tetap Reguler sebesar Rp7.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 11,50% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 13 November 2018. Pinjaman ini dijamin dengan persediaan (Catatan 11) dan piutang usaha (Catatan 6) masing-masing sebesar Rp6.250.000.000 dan Rp3.750.000.000. Pinjaman ini juga dijamin dengan Surat Hak Tanggungan Pertama (*first registered hypothecation*) atas tanah dan bangunan (Catatan 15) milik Dasaplast sebesar Rp12.500.000.000. Saldo terutang atas fasilitas ini sebesar Rp6.693.866.531 pada tanggal 31 Desember 2017.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pada tahun 1997, PT Mitratani Dua Tujuh ("Mitratani"), Entitas Anak, memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari 20 BUMN sesuai surat Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN No.S-171/MK-16/1997 tanggal 3 Juni 1997. Tujuan kredit adalah untuk meningkatkan fasilitas produksi dan produktivitas kedelai nasional.

Sehubungan dengan pinjaman dana yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2007, Mitratani dan ke-20 BUMN telah mengirimkan surat nomor 02/ETR-DIR/M27/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 kepada Kementerian Negara BUMN tentang permohonan atas dana tersebut untuk dihibahkan. Sampai tanggal laporan keuangan konsolidasian, belum ada jawaban dari Kementerian Negara BUMN atas surat tersebut.

21. SHORT-TERM LOANS (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Based on Working Capital Credit Agreement No. 312 dated November 13, 2017 by notary Jane Margaretha H., S.H., Mkn, Dasaplast obtained a working capital credit facility in form of Fixed Reguler Loans amounting to Rp3,000,000,000 with interest rate at 11.50% per annum and due on November 13, 2018. This loan is secured by inventory (Note 11) and trade receivables (Note 6) amounting to Rp6,250,000,000 and Rp3,750,000,000, respectively. The loan also secured by first registered hypothecation of land and buildings (Note 15) owned by Dasaplast amounting to Rp12,500,000,000. The outstanding loan related to this facility amounted to Rp3,000,000,000 as of December 31, 2017.

Based on Working Capital Credit Agreement No. 313 dated November 13, 2017 by notary Jane Margaretha H., S.H., Mkn, Dasaplast obtained a working capital credit facility in form of Fixed Reguler Loans amounting to Rp7,000,000,000 with interest rate at 11.50% per annum and due on November 13, 2018. This loan is secured by inventory (Note 11) and trade receivables (Note 6) amounting to Rp6,250,000,000 and Rp3,750,000,000, respectively. The loan also secured by first registered hypothecation of land and buildings (Note 15) owned by Dasaplast amounting to Rp12,500,000,000. The outstanding loan related this facility amounted to Rp6,693,866,531 as of December 31, 2017.

State-Owned Enterprises (BUMN)

In 1997, PT Mitratani Dua Tujuh ("Mitratani"), a Subsidiary, obtained a soft loan from 20 BUMN in accordance with letter from Directorate General of Supervising BUMN No. S-171/MK-16/1997 dated June 3, 1997. The purpose of the credit is to improve the production facilities and national soybean productivity.

As the loan matured on December 31, 2007, Mitratani and all 20 BUMN sent a letter No. 02/ETR-DIR/M27/I/2009 dated January 16, 2009 to the Ministry of State-Owned Enterprises requesting for the funds to be granted. Up to date of the consolidated financial statements, there has been no answer from the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

21. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 38 oleh notaris Sari Nitiyudo, S.H., tanggal 23 Agustus 2016, Dasaplast memperoleh fasilitas KMK dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon") sebesar Rp17.500.000.000 dengan tingkat suku bunga 11% per tahun. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.45 oleh notaris Sari Nitiyudo, S.H., tanggal 25 Januari 2017, Danamon setuju untuk meningkatkan fasilitas pinjaman menjadi Rp22.500.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,75% per tahun. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 17 September 2017 dan telah diperpanjang hingga 17 September 2018.

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia yang dinotariskan atas piutang usaha (Catatan 6) sebesar Rp3.786.000.000. Pinjaman ini juga dijamin dengan Surat Hak Tanggungan Pertama (*first registered hypothecation*), Surat Hak Tanggungan Kedua (*second registered hypothecation*), Surat Hak Tanggungan Ketiga (*third registered hypothecation*), dan Surat Hak Tanggungan Keempat (*fourth registered hypothecation)* atas tanah dan bangunan (Catatan 15) masing-masing sebesar Rp15.000.000.000, Rp3.000.000.000, Rp1.000.000.000, dan Rp5.500.000.000.

Selama tahun 2017, Dasaplast melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp19.081.000.491 dan membayar pinjaman sebesar Rp13.997.290.193.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp22.023.170.079 dan Rp16.939.459.781.

Indonesia Eximbank

Berdasarkan perjanjian kredit sesuai dengan Akta Notaris No. 29 oleh notaris Ranti N. Handayani, S.H., tanggal 12 Desember 2014, Mitratani mendapat fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) untuk modal kerja dari Indonesia Eximbank dengan *limit* fasilitas sebesar AS$1.133.000 yang terbagi atas AS$933.000 untuk *take-over* pinjaman PT Bahana Artha Ventura dan AS$200.000 untuk *limit* tambahan.

Mitratani juga mendapatkan fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) untuk modal kerja ekspor-transaksional (*Letter of Credit*) dan negosiasi wesel ekspor dengan *limit* fasilitas sebesar AS$530.000.

21. SHORT-TERM LOANS (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Based on credit agreement No. 38 by notary Sari Nitiyudo, S.H., dated August 23, 2016, Dasaplast obtained KMK facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon") amounting to Rp17,500,000,000 with interest rate at 11% per annum. Based on Renewal Credit Agreement No.45 by notary Sari Nitiyudo, S.H., dated January 25, 2017, Danamon agreed to increase the loan facility to Rp22,500,000,000 with interest rate at 10.75% per annum. The loan was due on September 17, 2017 and has been extended up to September 17, 2018.

The loan is secured by notarized fiduciary on trade receivables (Note 6) amounting to Rp3,786,000,000. This loan also secured by a first registered hypothecation, second registered hypothecation, third registered hypothecation and fourth registered hypothecation of land and buildings (Note 15) amounting to Rp15,000,000,000, Rp3,000,000,000, Rp1,000,000,000 and Rp5,500,000,000, respectively.

During 2017, Dasaplast has withdrawn the loans amounting to Rp19,081,000,491 and paid loan amounting to Rp13,997,290,193.

The outstanding loans as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp22,023,170,079 and Rp16,939,459,781, respectively.

Indonesia Eximbank

Based on the credit agreement in accordance with the Deed No. 29 by notary Ranti N. Handayani, S.H., dated December 12, 2014, Mitratani received revolving loan facility for working capital from Indonesia Eximbank with a facility limit amounting to US$1,133,000, consisting of US$933,000 to refinance the loans from PT Bahana Artha Ventura and US$200,000 for additional limit.

Mitratani also obtained a revolving credit facility for export-transactional working capital (Letter of Credit) and negotiated export bill with a facility limit of US$530,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

21. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Indonesia Eximbank (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 17 oleh notaris Ranti N. Handayani, S.H., tanggal 7 Desember 2016, jangka waktu fasilitas diperpanjang menjadi hingga 8 Desember 2017 dengan suku bunga efektif sebesar 6,5% per tahun dengan pembayaran bunga setiap bulannya.

Berdasarkan perubahan ketiga Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 575/ADDPK/12/2017, fasilitas KMK diperpanjang hingga 8 Desember 2018, dengan suku bunga efektif sebesar 6,50% per tahun dengan pembayaran bunga setiap bulannya. Selama 2017, Mitratani telah melakukan penarikan sebesar AS$250.000 (setara dengan Rp3.321.500.000) dan pembayaran pinjaman sebesar AS$1.204.067 (setara dengan Rp16.084.125.781).

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar AS$699.100 (setara dengan Rp9.471.409.780) dan AS$1.653.157 (setara dengan Rp22.211.955.574).

Perjanjian di atas memuat beberapa pembatasan, antara lain mengharuskan Mitratani untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, melakukan perpanjangan polis asuransi paling lambat satu bulan setelah tanggal jatuh tempo asuransi, melakukan merger atau akuisisi, memperluas/mempersempit bisnis, mengubah Anggaran Dasar termasuk mengubah struktur modal, dan membagikan dividen.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Mitratani telah memenuhi seluruh persyaratan yang disyaratkan.

PT Bank Negara Indonesia Syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Plafond Pembiayaan Anjak Piutang No. SMS/07/0743/R dari PT Bank BNI Syariah, tanggal 11 Agustus 2017, PT Dasaplast Nusantara mendapatkan fasilitas anjak piutang atas tagihan yang belum dibayar oleh PT Perkebunan Nusantara X dengan maksimal fasilitas sebesar Rp10.000.000.000 dengan marginal deposit sebesar 15% dari realisasi pencairan, dan jatuh tempo 12 bulan sejak realisasi. Saldo pinjaman pembiayaan anjak piutang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.165.982.191. Marginal deposit sebesar Rp324.897.328 pada 31 Desember 2017, dan dicatat sebagai aset lancar lainnya.

21. SHORT-TERM LOANS (continued)

Subsidiaries (continued)

Indonesia Eximbank (continued)

Based on the Deed No. 17 by notary Ranti N. Handayani, S.H., dated December 7, 2016, the validity of the facility is extended until December 8, 2017 with effective interest rate at 6.5% per year with monthly interest payments.

Based on Working Capital Export Credit Agreement Addendum III No. 575/ADDPK/12/2017, the validity of the facility is extended until December 8, 2018, with effective interest rate at 6.50% per year with monthly interest payments. During 2017, Mitratani withdrew the loans amounting to US$250,000 (equivalent to Rp3,321,500,000) and has paid the loans amounting to US$1,204,067 (equivalent to Rp16,084,125,781).

The loan outstanding as of December 31, 2017 and 2016 amounted to US$699,100 (equivalent to Rp9,471,409,780) and US$1,653,157 (equivalent to Rp22,211,955,574), respectively.

The above facility include certain restrictive covenants, among others, the requirement for Mitratani to comply with certain financial ratios, extend the insurance policy not later than one month after the maturity date of insurance, enter into merger or acquisition, expand or restrict bussiness, change the Articles of Association including changes the capital structure, and declaring any dividends.

As of December 31, 2017, Mitratani has complied with all covenants.

PT Bank Negara Indonesia Syariah

Based on Decision Letter of Factoring Financing Limit No. SMS/07/0743/R from PT Bank Negara Indonesia Syariah dated August 11, 2017, PT Dasaplast Nusantara obtained a factoring facility for its receivables to PT Perkebunan Nusantara X with facility limit of Rp10,000,000,000 with marginal deposit equivalent to 15% of amount availed and will due 12 months after availment. The outstanding balance of the factoring facility loan amounted to Rp2,165,982,191 as of December 31, 2017. The margin deposits amounted to Rp324,897,328 as of December 31, 2017, and is recorded as part of other current assets.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. UTANG LAIN-LAIN / *22. OTHER PAYABLES*

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Pihak berelasi (Catatan 10)	4.974.858.079	6.366.721.640	***Related parties*** *(Note 10)*
Pihak ketiga:			***Third parties****:*
Utang karyawan	22.931.720.790	7.445.636.909	*Employees payables*
Utang retensi	18.987.407.805	22.781.959.208	*Retention payables*
Nyoto Sampurno	17.385.660.650	5.437.770.999	*Nyoto Sampurno*
Dokter spesialis	11.374.869.650	4.935.296.705	*Medical specialist*
PT Citra Jaya Makmur Sejahtera	7.962.195.591	-	*PT Citra Jaya Makmur Sejahtera*
PT Dupan Anugerah Lestari	7.751.108.897	-	*PT Dupan Anugerah Lestari*
PT Prima Anjaya Santosa	6.765.000.000	-	*PT Prima Anjaya Santosa*
PT Agro Karya Abadi	6.441.848.986	753.465.328	*PT Agro Karya Abadi*
CV Industrialindo	5.633.407.156	-	*CV Industrialindo*
S.I. Energy Ventures PVT. LTD., India	4.839.659.643	4.742.109.961	*S.I. Energy Ventures PVT. LTD., India*
PT Ambar Agung Lestari	4.734.545.456	13.750.000	*PT Ambar Agung Lestari*
PT Laju Brata	4.689.945.722	-	*PT Laju Brata*
PT Randhoetatah Cemerlang	4.684.234.291	-	*PT Randhoetatah Cemerlang*
PT Intidaya Dinamika Sejati	3.925.115.252	628.327.625	*PT Intidaya Dinamika Sejati*
PT Rezki Energi Abadi	3.715.610.516	-	*PT Rezki Energi Abadi*
PT Inti Makmur Jaya Perkasa	3.405.934.731	7.363.680.039	*PT Inti Makmur Jaya Perkasa*
CV Daya Guna	3.183.698.493	882.873.900	*CV Daya Guna*
PT Toya Indo Manunggal	2.989.536.000	-	*PT Toya Indo Manunggal*
PT Wahyu Daya Mandiri	2.741.881.997	299.200.000	*PT Wahyu Daya Mandiri*
CV Putrako Jaya	2.661.363.880	-	*CV Putrako Jaya*
PT Boma Bisma Indra (Persero)	2.614.950.000	43.961.949	*PT Boma Bisma Indra (Persero)*
CV Mitra Utama	2.512.110.949	-	*CV Mitra Utama*
PT Margatama Bangun Karsa	2.415.264.317	2.540.587.963	*PT Margatama Bangun Karsa*
CV Jaya Utama	2.396.737.302	-	*CV Jaya Utama*
PT Serikat Sejahtera Utama	2.370.280.162	-	*PT Serikat Sejahtera Utama*
CV Agro Niaga Jaya	2.313.397.350	-	*CV Agro Niaga Jaya*
PT Mekatata Perkasa	2.238.594.044	706.903.381	*PT Mekatata Perkasa*
PT Asuransi Jasa Tania Tbk	2.111.992.885	-	*PT Asuransi Jasa Tania Tbk*
Koperasi Karyawan PG Camming	2.012.160.940	-	*Koperasi Karyawan PG Camming*
PT Handarusa Tirta Sarana	1.981.580.671	-	*PT Handarusa Tirta Sarana*
Koperasi Macinnong	1.617.793.761	-	*Koperasi Macinnong*
PT Verona Multikimia Abadi	1.584.169.439	-	*PT Verona Multikimia Abadi*
CV Widya Multi Sarana	1.395.712.701	-	*CV Widya Multi Sarana*
CV Aneka Teknik	1.363.868.848	-	*CV Aneka Teknik*
CV Multi Teknik Mandiri	1.323.572.303	-	*CV Multi Teknik Mandiri*
CV Buana Cipta	1.237.165.000	-	*CV Buana Cipta*
PT Indo Separator	1.233.400.000	-	*PT Indo Separator*
CV PNP Djaja	1.095.550.000	-	*CV PNP Djaja*
CV Rajawali Usaha Nabati	46.440.000	4.046.440.000	*CV Rajawali Usaha Nabati*
PT Arsy Amanah Timur	-	2.256.045.586	*PT Arsy Amanah Timur*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	92.661.568.350	65.013.105.821	*Others (each below Rp1 billion)*
Sub-jumlah	273.331.054.528	129.891.115.374	*Sub-total*
Jumlah	**278.305.912.607**	**136.257.837.014**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG / *23. LONG-TERM LOANS*

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Perusahaan:			*The Company:*
Pihak berelasi: (Catatan 10)			***Related parties**: (Note 10)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.064.087.000.000	1.274.087.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	50.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Pihak ketiga:			***Third parties**:*
Burger Sohne AG Burg, Swiss (Catatan 41)	5.745.663.285	6.085.203.285	*Burger Sohne AG Burg, Swiss (Note 41)*
Entitas Anak:			*Subsidiaries:*
Pihak berelasi: (Catatan 10)			***Related parties**: (Note 10)*
PT Bank Syariah Mandiri	65.661.502.777	42.667.543.759	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.555.028.959	8.655.028.959	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Indonesia Eximbank	2.480.000.000	1.491.396.000	*Indonesia Eximbank*
Pihak ketiga:			***Third parties**:*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.949.264.457	2.369.074.982	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Jumlah	1.147.478.459.478	1.385.355.246.985	*Total*
Dikurangi:			***Less:***
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			***Current portion of long-term loans***
Perusahaan:			*The Company:*
Pihak berelasi:			*Related party:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	(144.587.000.000)	(130.000.000.000)	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Entitas Anak:			*Subsidiaries:*
Pihak berelasi:			*Related parties:*
PT Bank Syariah Mandiri	(6.477.443.066)	(4.753.237.957)	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	(1.200.000.000)	(1.200.000.000)	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Indonesia Eximbank	(322.000.000)	(1.491.396.000)	*Indonesia Eximbank*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	(419.810.525)	-	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Jumlah	(153.006.253.591)	(137.444.633.957)	*Total*
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	**994.472.205.887**	**1.247.910.613.028**	***Long-term loans, net of current portion***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pinjaman jangka panjang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terdiri dari:

23. LONG-TERM LOANS (continued)

The Company

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Long-term loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk consist of:

	31 Desember/*December 31*,		
	2017	**2016**	
KMK *Revolving I*	370.000.000.000	450.000.000.000	*KMK Revolving I*
KMK *Revolving II*	499.500.000.000	499.500.000.000	*KMK Revolving II*
Kredit Investasi - *Bioethanol*	124.587.000.000	204.587.000.000	*Kredit Investasi - Bioethanol*
Kredit Investasi - Biaya modal	70.000.000.000	120.000.000.000	*Kredit Investasi - Cost of capital*
Jumlah	**1.064.087.000.000**	**1.274.087.000.000**	***Total***

a. KMK *Revolving I*

Berdasarkan perjanjian Kredit Modal Kerja ("KMK") No. CCO-SBY/223/PK-KMK/2004 tanggal 16 Desember 2004 oleh Notaris Noor Irawati, S.H., Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp450.000.000.000. Pada tanggal 19 Februari 2014, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan tambahan *limit* fasilitas menjadi sebesar Rp550.000.000.000. Pada tanggal 3 Maret 2016 PT Bank Mandiri (persero) Tbk melakukan pengurangan *limit* menjadi Rp450.000.000.000, termasuk di dalamnya *Sub-limit Non-Cash Loan* senilai Rp10.000.000.000. KMK tersebut bersifat *revolving* dan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Jangka waktu pinjaman adalah sampai tanggal 3 Maret 2018 dan telah diperpanjang sampai dengan Maret 2019. Suku bunga pinjaman sebesar 10,00% per tahun dibayar setiap bulan. Provisi kredit sebesar 0,25% dari *limit* kredit.

Selama tahun 2017 dan 2016, perusahaan melakukan penarikan pinjaman masing-masing sebesar Rp325.000.000.000 dan Rp320.000.000.0000 serta melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp405.000.000.000 dan Rp68.000.000.000.

Fasilitas ini dijamin dengan fidusia yang dinotariskan atas persediaan (Catatan 11), piutang usaha (Catatan 6) dan mesin (Catatan 15) masing-masing sebesar Rp295.351.445.216, Rp167.858.573.183 dan Rp6.479.650.000.

a. KMK Revolving I

Under the Working Capital Credit Loan ("KMK") agreement No. CCO-SBY/223/PK-KMK/2004 dated December 16, 2004 of Notary Noor Irawati, S.H., the Company obtained a credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp450,000,000,000. On February 19, 2014, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided additional facility limit amounting to Rp550,000,000,000. On March 3, 2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk decreased the loan limit to Rp450,000,000,000, including Sub-limit Non-Cash Loan amounting to Rp10,000,000,000. This KMK is a revolving loan and used for working capital of the Company. The term of the loan is until March 3, 2018 and has been extended up to March 2019. The interest rate at 10.00% per annum is paid monthly. The credit provision is equivalent to 0.25% of credit limit.

During 2017 and 2016, the Company withdrew the loans amounting to Rp325,000,000,000 and Rp320,000,000,000, and paid the loan amounting to Rp405,000,000,000 and Rp68,000,000,000, respectively.

This facility is secured by notarized fiduciary over inventories (Note 11) and trade receivables (Note 6) and machinery (Note 15) amounting to Rp295,351,445,216, Rp167,858,573,183 and Rp6,479,650,000, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

a. KMK *Revolving I* (lanjutan)

Fasilitas ini juga dijamin dengan Surat Hak Tanggungan Pertama (*first registered hypothecation*), Surat Hak Tanggungan Kedua (*second registered hypothecation*) dan Surat Hak Tanggungan Ketiga (*third registered hypothecation*) atas tanah dan bangunan (Catatan 15) masing-masing sebesar Rp290.178.000.000, Rp418.864.180.000 dan Rp51.000.000.000 yang bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan jaminan fasilitas kredit lainnya yang diterima oleh Perusahaan dari Bank Mandiri.

b. KMK *Revolving II*

Berdasarkan perjanjian KMK No. CCO-SBY/066/KMK/13 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp100.000.000.000. Pada tanggal 3 Maret 2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan tambahan *limit* fasilitas menjadi sebesar Rp500.000.000.000. KMK tersebut bersifat *revolving* dan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Jangka waktu pinjaman adalah sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 dan telah diperpanjang sampai dengan Maret 2019. Suku bunga pinjaman sebesar 10,00% per tahun dibayar setiap bulan. Provisi kredit sebesar 0,25% dari *limit* kredit. Selama tahun 2016, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp667.500.000.0000 serta melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp168.000.000.000.

Fasilitas ini dijamin dengan fidusia yang dinotariskan atas persediaan (Catatan 11), piutang usaha (Catatan 6) dan mesin (Catatan 15) masing-masing sebesar Rp295.351.445.216, Rp167.858.573.183 dan Rp6.479.650.000. Fasilitas ini juga dijamin dengan Surat Hak Tanggungan Pertama (*first registered hypothecation*), Surat Hak Tanggungan Kedua (*second registered hypothecation*) dan Surat Hak Tanggungan Ketiga (*third registered hypothecation*) atas tanah dan bangunan (Catatan 15) masing-masing sebesar Rp290.178.000.000, Rp418.864.180.000 dan Rp51.000.000.000 yang bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan jaminan fasilitas kredit lainnya yang diterima oleh Perusahaan dari Bank Mandiri.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

23. LONG-TERM LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

a. KMK Revolving I (continued)

This facility is also secured by a first registered hypothecation, second registered hypothecation and third registered hypothecation of land and buildings (Note 15) amounting to Rp290,178,000,000, Rp418,864,180,000 and Rp51,000,000,000, respectively, with cross collateral and cross default with other loan facility collateral obtained by the Company from Bank Mandiri.

b. KMK Revolving II

Under the KMK agreement No. CCO-SBY/066/KMK/13 dated March 25, 2013 of Notary Mutiara Siswono Patiendra, S.H., the Company obtained a credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp100,000,000,000. On March 3, 2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided additional facility limit amounting to Rp500,000,000,000. The KMK is a revolving loan and used for working capital of the Company. The loan term is up to March 3, 2018, and has been extended up to March 2019. The loan bears interest rate at 10.00% per annum which is paid monthly. The credit provision is equivalent to 0.25% of credit limit. In 2016, the Company withdrew the loan amounting to Rp667,500,000,000 and paid loan amounting to Rp168,000,000,000.

This facility is secured by notarized fiduciary over inventories (Note 11) and trade receivables (Note 6) and machinery (Note 15) amounting to Rp295,351,445,216, Rp167,858,573,183 and Rp6,479,650,000, respectively. This facility is also secured by a first registered hypothecation, second registered hypothecation and third registered hypothecation of land and buildings (Note 15) amounting to Rp290,178,000,000, Rp418,864,180,000 and Rp51,000,000,000, respectively, with cross collateral and cross default with other loan facility collateral obtained by the Company from Bank Mandiri.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

b. KMK *Revolving II* (lanjutan)

Perjanjian di atas memuat beberapa pembatasan antara lain mengharuskan Perusahaan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, mengalihkan hak kepemilikan atas barang yang sudah dijaminkan, mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan memperoleh pinjaman baru dari bank atau kreditur lain.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi ketentuan rasio keuangan dan persyaratan lainnya yang disyaratkan.

c. Kredit Investasi - *Bioethanol*

Berdasarkan perjanjian KI No. CRO.KP/065/KI/11 tanggal 12 April 2012 No. 64, oleh notaris Anita Anggawidjaja, S.H., Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp282.412.000.000. Pinjaman bersifat *non-revolving* ini digunakan untuk pembiayaan lokal/konten pembangunan pabrik *bioethanol* di area Gempolkrep. Suku bunga pinjaman adalah sebesar 10,00% per tahun dibayar setiap bulan. Provisi kredit sebesar 0,25% dari limit kredit. Jangka waktu pinjaman adalah dari tanggal 12 April 2012 sampai tanggal 23 Desember 2018. Selama tahun 2017 dan 2016, Perusahaan melakukan pembayaran pinjaman masing-masing sebesar Rp80.000.000.000 dan Rp40.000.000.000.

Jaminan atas pinjaman ini adalah seluruh obyek yang dibiayai dengan fasilitas KI ini dan tanah berikut bangunan (Catatan 15) di atas lokasi pabrik *bioethanol* dengan Surat Hak Tanggungan Pertama (*first registered hypothecation*), Surat Hak Tanggungan Kedua (*second registered hypothecation*), Surat Hak Tanggungan Ketiga (*third registered hypothecation*) dan Surat Hak Tanggungan Keempat (*fourth registered hypothecation*) masing-masing sebesar Rp323.912.000.000, Rp9.000.000.000, Rp122.000.000.000, dan Rp16.300.000.000.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

b. KMK Revolving II (continued)

The agreements with Bank Mandiri above include certain restrictive covenants including, among others, the requirement for the Company to comply with certain financial ratios, transfer the ownership of the guaranteed assets, acting as guarantor to another parties and obtaining new loan facilities from banks or other creditors.

As of December 31, 2017, the Company complied with the required financial ratios and covenants.

c. Investment Credit - Bioethanol

Based on KI agreement No. CRO.KP/065/KI/11 dated April 12, 2012 No. 64, of notary Anita Anggawidjaja, S.H., the Company obtained a credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp282,412,000,000. This non-revolving loan facility was used to finance local/content development of bioethanol plant in Gempolkrep area. The loan bears interest rate at 10.00% per annum and is paid monthly, the credit provision is equivalent to 0.25% of the credit limit. The credit period is from April 12, 2012 until December 23, 2018. During 2017 and 2016, the Company paid loans amounting to Rp80,000,000,000 and Rp40,000,000,000, respectively.

Collaterals of this loan include all assets financed by this investment credit, and land and buildings (Note 15) on the plant site of bioethanol with first registered hypothecation, second registered hypothecation, third registered hypothecation and fourth registered hypothecation amounting to Rp323,912,000,000, Rp9,000,000,000, Rp122,000,000,000 and Rp16,300,000,000, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

c. Kredit Investasi - *Bioethanol* (lanjutan)

Perjanjian di atas memuat beberapa pembatasan, antara lain mengharuskan Perusahaan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, mengalihkan hak kepemilikan atas barang yang sudah dijaminkan, mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan mengharuskan untuk melapor jika Perusahaan mengumumkan atau membayar dividen.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi ketentuan rasio keuangan dan persyaratan lainnya yang disyaratkan di atas.

d. Kredit Investasi - Biaya modal

Berdasarkan perjanjian kredit No. CRO.KP/165/KI/14 No. 07 pada tanggal 21 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi ("KI") dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp200.000.000.000 dan bersifat *aflopend plafond*. Pinjaman ini digunakan untuk membayar investasi biaya modal tahun 2014 dengan jangka waktu hingga 31 Desember 2019. Suku bunga sebesar 10,00% per tahun dan dibayar setiap bulan. Provisi kredit sebesar 0,25% dari *limit* kredit.

Fasilitas ini dijamin dengan fidusia yang dinotariskan atas persediaan (Catatan 11) dan piutang usaha (Catatan 6) masing-masing sebesar Rp250.250.000.000 dan Rp167.858.573.183. Fasilitas ini juga dijamin dengan Surat Hak Tanggungan Kedua (*second registered hypothecation*) dan Surat Hak Tanggungan Keempat (*fourth registered hypothecation*) atas tanah dan bangunan (Catatan 15) masing-masing sebesar Rp240.314.180.000 dan Rp88.011.730.000 yang bersifat *joint collateral* dan *cross default* dengan jaminan fasilitas kredit lainnya yang diterima oleh Perusahaan dari Bank Mandiri. Jaminan yang diserahkan, wajib diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, serta diasuransikan dengan *banker's clause* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selama tahun 2017 dan 2016, Perusahaan melakukan pembayaran pinjaman masing-masing sebesar Rp50.000.000.000 dan Rp40.000.000.000.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

c. Investment Credit - Bioethanol (continued)

The agreements with Bank Mandiri above include certain restrictive covenants, among others, the requirement for the Company to comply with certain financial ratios, transfer the ownership of the guaranteed assets, acting as guarantor to another parties and the requirement for the Company to declare or pay any dividends.

As of December 31, 2017, the Company complied with the required financial ratios and covenants.

d. Investment Credit - Cost of capital

Based on credit agreement No. CRO.KP/165/KI/14 No. 07 dated July 21, 2014 of Notary Mutiara Siswono Patiendra, S.H., the Company obtained investment credit ("KI") from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp200,000,000,000 and it is aflopend plafond loan. The loan was used to finance the capital investments in 2014 with credit term until December 31, 2019. The loan bears interest rate at 10.00% per annum and is paid monthly. The credit provision is equivalent to 0.25% of the credit limit.

This facility is secured by notarized fiduciary over inventories (Note 11) and trade receivables (Note 6) amounting to Rp250,250,000,000 and Rp167,858,573,183, respectively. This facility is also secured by a second registered hypothecation and fourth registered hypothecation of land and buildings (Note 15) amounting to Rp240,314,180,000, and Rp88,011,730,000, respectively, with joint collateral and cross default with other loan facility collateral obtained by the Company from Bank Mandiri. The guarantees provided, should be bound in accordance with applicable laws, and insured with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk banker's clause. During 2017 and 2016, the Company paid loans amounting to Rp50,000,000,000 and Rp40,000,000,000, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian KMK No. 026 tanggal 23 Juni 2016 oleh notaris Yatty Sriyanti Suhadiwiraatmaja, S.H., MM., Mhum, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp250.000.000.000. Kredit Modal Kerja tersebut bersifat *withdrawal approval* dan digunakan untuk pembiayaan talangan petani tebu rakyat dan pembiayaan tebu sendiri.

Jangka waktu pinjaman adalah tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018. Suku bunga pinjaman sebesar 9,75% per tahun yang dibayar setiap bulan. Provisi kredit sebesar 0,25% dari *limit* kredit. Selama tahun 2017 dan 2016, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman masing-masing sebesar Rp138.875.850.119 dan Rp50.000.000.000 serta melakukan pembayaran pinjaman masing-masing sebesar Rp188.875.850.119 dan RpNihil.

Fasilitas ini dijamin dengan persediaan (Catatan 11) sebesar Rp50.000.000.000 dan dijamin juga dengan Surat Hak Tanggungan Pertama (*first registered hypothecation*) atas tanah dan bangunan (Catatan 15) sebesar Rp262.574.000.000.

Perjanjian antara Perusahaan dengan Bank BRI di atas memuat beberapa pembatasan antara lain mengajukan permohonan pailit, mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain, menyewakan aset yang dijaminkan, menerima pinjaman dari pihak lain apabila *debt equity ratio* (DER) melebihi 400% dan melunasi atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang bank dilunasi.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on KMK agreement No. 026 dated June 23, 2016 of notary Yatty Sriyanti Suhadiwiraatmaja, S.H., MM., Mhum, the Company obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp250,000,000,000. The Working Capital Loan is withdrawal approval and used for financing bailouts for sugarcane farmers and financing the Company's own sugarcane.

The period of loan is from June 23, 2016 and up to December 23, 2018. The loan bears interest rate at 9.75% per annum and is paid monthly. The credit provision is equivalent to 0.25% of the credit limit. During 2017 and 2016, the Company availed the loans amounting to Rp138,875,850,119 and Rp50,000,000,000, respectively, and paid loans amounting to Rp188,875,850,119 and RpNil, respectively.

This facility is secured by inventories (Note 11) amounting to Rp50,000,000,000 and also secured by first registered hypothecation of land and buildings (Note 15) amounting to Rp262,574,000,000.

The agreements with Bank BRI above include certain restrictive covenants including, among others, filing for bankruptcy, acting as guarantor or pledging the Company's assets to another party, renting out the secured assets, receiving loan from other parties if debt equity ratio (DER) is higher than 400% and pay debt to shareholders before the loan has been repaid.

As of December 31, 2017, the Company complied with the required covenants.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Entitas Anak

PT Bank Syariah Mandiri

PT Nusantara Medika Utama ("NMU") mendapatkan Kredit Investasi Al-Murabahah dari PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 20 Desember 2014 dengan fasilitas maksimum sebesar Rp40.000.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah 84 bulan (termasuk masa tenggang) dengan provisi kredit sebesar 0,5% dari *limit* pencairan dan tingkat bunga 11% per tahun.

NMU memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang Musyarakah Mutanaqisah dari PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan fasilitas maksimum sebesar Rp6.200.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11% per tahun. Utang akan jatuh tempo dalam 108 bulan dari tanggal pencairan.

Pada tahun 2017, NMU memperoleh sejumlah fasilitas kredit investasi jangka panjang Musyarakah Mutanaqisah dan Al - Murabahah dari PT Bank Syariah Mandiri dengan total fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp4.000.000.000 dan Rp23.800.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11% per tahun. Utang akan jatuh tempo masing-masing dalam 60 dan 108 bulan dari tanggal pencairan.

Kredit ini dijamin dengan tanah, bangunan, mesin dan peralatan, alat pengangkutan, peralatan kantor dan lainnya (Catatan 15) masing-masing sebesar Rp5.191.650.000, Rp35.064.625.416, Rp6.613.738.655, Rp5.877.381.818 dan Rp13.105.324.707

Selama 2017 dan 2016, NMU telah membayar pinjaman masing-masing sebesar Rp4.806.040.983 dan Rp3.327.840.436. Saldo terutang adalah masing-masing sebesar Rp65.661.502.777 dan Rp42.667.543.759 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Perjanjian di atas memuat beberapa pembatasan, antara lain melakukan transaksi penggabungan usaha atau akuisisi, menjual seluruh atau sebagian aset, mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain, mengubah anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan direksi dan/atau komisaris, mengalihkan hak kepemilikan atas barang yang sudah dijaminkan dan menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atas sebagian atau seluruh aset.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, NMU telah memenuhi rasio keuangan dan persyaratan lainnya.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

Subsidiaries

PT Bank Syariah Mandiri

PT Nusantara Medika Utama ("NMU") obtained Al-Murabahah Investment Credits from PT Bank Syariah Mandiri on December 20, 2014 with maximum facility amounting to Rp40,000,000,000. The loan period is 84 months (including grace period) with a credit provision of 0.5% of the credit withdrawal limit. The loan bears interest rate at 11% per year.

NMU obtained Musyarakah Mutanaqisah a long term investment credit facility from PT Bank Syariah Mandiri on August 24, 2016 with maximum facility amounting to Rp6,200,000,000 with interest rate at 11% per year. The loan will be due within 108 months from withdrawal date.

In 2017, NMU obtained Musyarakah Mutanaqisah and Al - Murabahah a long term investment credit facility from PT Bank Syariah Mandiri with maximum facility amounting to Rp4,000,000,000 and Rp23,800,000,000, respectively with interest rate at 11% per year. The loan will be due within 60 and 108 months from withdrawal date, respectively.

The credit is secured by land, buildings, machinery and equipment, transportations equipment, office equipment and others (Note 15) amounting to Rp5,191,650,000, Rp35,064,625,416, Rp 6,613,738,655, Rp5,877,381,818 and Rp13,105,324,707, respectively.

During 2017 and 2016, NMU paid the loans amounting to Rp4,806,040,983 and Rp3,327,840,436, respectively. The outstanding loan amounted to Rp65,661,502,777 and Rp42,667,543,759 as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

The agreements include certain restrictive covenants, among others, entering into liquidation, merger or acquisition transactions, sell assets in whole or in part, acting as guarantor or pledge NMU's assets to another party, changing the articles of association, members of its stockholders, and boards of directors and/or commissioners, transfer the ownership of the guaranteed assets and appoint executor, curator, liquidator to value some or all NMU's assets.

As of December 31, 2017 and 2016, NMU complied with the required financial ratios and covenants.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Keputusan Kredit No.SBM/1/512/R tanggal 29 Desember 2015, Dasaplast mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam bentuk Kredit Investasi dengan maksimal pinjaman sebesar Rp9.000.000.000 dan tingkat suku bunga sebesar 12,25% dan akan jatuh tempo pada 3 Januari 2023. Pinjaman ini dijamin dengan mesin (Catatan 15) yang diikat secara fidusia sebesar Rp14.280.000.000. Selama tahun 2017, Dasaplast telah membayar pinjaman sejumlah Rp1.100.000.000. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp7.555.028.959 dan Rp8.655.028.959 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Perjanjian ini memuat beberapa pembatasan, antara lain mengharuskan Dasaplast untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, mengubah bentuk dan status hukum Perusahaan, anggaran dasar, susunan direksi, komisaris dan pemegang saham tanpa pemberitahuan tertulis, mengijinkan pihak lain menggunakan Dasaplast untuk kegiatan usaha pihak lain dan menggunakan kredit diluar tujuan pemberian kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Dasaplast telah memenuhi rasio keuangan dan persyaratan lainnya yang disyaratkan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit no. 13 pada tanggal 10 Agustus 2016 dihadapan notaris Sari Nitiyudo, S.H., Dasaplast mendapatkan fasilitas Kredit Angsuran Berjangka-Bisa (KAB-Bisa) dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan maksimal pinjaman sebesar Rp2.500.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,95% dan akan jatuh tempo pada 10 Agustus 2021. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Sertifikat HGB No.644/Wonotingal. Selama tahun 2017, Dasaplast telah membayar pinjaman sejumlah Rp419.810.525. Saldo terutang adalah masing-masing sebesar Rp1.949.264.457 dan Rp2.369.074.982 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on Decision Letter Loan No. SBM/1/512/R dated December 29, 2015, Dasaplast obtained credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp9,000,000,000, with interest rate at 12.25% per annum and will mature on January 3, 2023. This loan is secured by certain machine (Note 15) which are bound by fiduciary amounting to Rp14,280,000,000. During 2017, Dasaplast paid loan amounting to Rp1,100,000,000. The outstanding loan related to this facility amounted to Rp7,555,028,959 and Rp8,655,028,959 as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

The agreements include certain restrictive covenants, among others, the requirement for Dasaplast to comply with certain financial ratios, changing articles of association, members of its boards of directors, commissioners and stockholders without written notification, allowing other parties to operate Dasaplast for other business activities and using the credit outside credit lending purposes.

As of December 31, 2017 and 2016, Dasaplast complied with the required financial ratios and covenants.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Based on Loan Deed Agreement No. 13 dated August 10, 2016 of notary Sari Nitiyudo, S.H., Dasaplast obtained Kredit Angsuran Berjangka-Bisa (KAB-Bisa) facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk, with maximum loan amounting to Rp2,500,000,000 with interest rate at 9.95% per annum and maturity date on August 10, 2021. This facility loan is secured by HGB Certificate No.644/Wonotingal. During 2017, Dasaplast paid loan amounting to Rp419,810,525. The outstanding loan amounted to Rp1,949,264,457 and Rp2,369,074,982 as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Indonesia Eximbank

Berdasarkan perjanjian kredit No. 30 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat dihadapan notaris Ranti N. Handayani, S.H., PT Mitratani Dua Tujuh ("Mitratani") mendapatkan fasilitas KI jangka panjang dari Indonesia Eximbank dengan *limit* fasilitas sebesar AS$498.500 dengan jangka waktu 40 bulan sejak tanggal perjanjian. Suku bunga pinjaman adalah 10,50% per tahun dan dapat diperbaharui setiap 6 bulan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 18 oleh notaris Ranti N. Handayani, S.H., tanggal 7 Desember 2016, Mitratani mendapatkan tambahan fasilitas kredit investasi tambahan dari Indonesia Eximbank untuk pembangunan perluasan pabrik dan pembelian dua unit *cold storage* dengan limit fasilitas masing-masing sebesar Rp10.595.000.000 dan Rp3.625.000.000. Jangka waktu fasilitas sejak 7 Desember 2016 sampai dengan 7 Desember 2022 dengan masa tenggang sampai dengan 7 Desember 2017.

Perubahan Kedua Perjanjian Kredit Investasi No. 576/ADDPK/12/2017, Indonesia Eximbank memperpanjang masa tenggang sampai dengan 7 Juni 2018.

Fasilitas ini dijamin dengan fidusia yang dinotariskan atas persediaan (Catatan 11) dan piutang usaha (Catatan 6) masing-masing sebesar Rp22.503.000.000 dan Rp5.509.000.000. Fasilitas ini juga dijamin dengan Surat Hak Tanggungan Pertama (*first registered hypothecation)* atas tanah, bangunan, dan mesin tertentu (Catatan 15) milik Mitratani sebesar Rp38.804.000.000.

Selama 2017, Mitratani telah membayar pinjaman sejumlah AS$111.000 (setara dengan Rp1.481.073.500). Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.480.000.000 dan AS$111.000 (setara dengan Rp1.491.396.000).

Perjanjian ini memuat beberapa pembatasan, antara lain mengharuskan Mitratani untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, melakukan perpanjangan polis asuransi paling lambat satu bulan setelah tanggal jatuh tempo asuransi, melakukan merger atau akuisisi, memperluas/mempersempit bisnis, mengubah Anggaran Dasar termasuk mengubah struktur modal, dan membagikan dividen.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Mitratani telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

Subsidiaries (continued)

Indonesia Eximbank

Based on credit agreement No. 30 dated December 12, 2014 of notary Ranti N. Handayani, S.H., PT Mitratani Dua Tujuh ("Mitratani") obtained a long-term KI facility from Indonesia Eximbank with facility limit amounting to US$498,500 and credit term of 40 months from the date of the agreement. The loan bears interest rate at 10.50% per year and subject to review every 6 months.

Based on Notarial Deed No. 18 of Notary Ranti N. Handayani, S.H., dated December 7, 2016, Mitratani obtained an extra loan invesment facility from Indonesia Eximbank for factory construction expansion and purchase of two units of cold storage with limit of facility amounting to Rp10,595,000,000 and Rp3,625,000,000, respectively. The period of facility is from December 7, 2016 until December 7, 2022 with grace period until December 7, 2017.

The Second Amendment of the Credit Investment Agreement No. 576/ADDPK/12/2017, Indonesia Eximbank extend the grace period of the facility to June 7, 2018.

This facility is secured by notarized fiduciary over inventories (Note 11) and trade receivables (Note 6) amounted to Rp22,503,000,000 and Rp5,509,000,000, respectively. This facility is also secured by a first registered hypothecation of land, buildings, and certain machineries (Note 15) owned by Mitratani amounting to Rp38,804,000,000.

During 2017, Mitratani paid loan amounting to US$111,000 (equivalent to Rp1,481,073,500). The loan outstanding as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp2,480,000,000 and US$111,000 (equivalent to Rp1,491,396,000), respectively.

The agreement include certain restrictive covenants, among others, the requirement for Mitratani to comply with certain financial ratios, extend the insurance policy not later than one month after the expiry date of the insurance, merger or acquisition, expand or restrict business, change the Articles of Association including changing the capital structure, and declaring any dividends.

As of December 31, 2017, the Mitratani complied with the required covenants.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. PINJAMAN SEWA PEMBIAYAAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Pinjaman sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen merupakan sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen entitas anak dari PT BNI Multi Finance, PT Maybank Finance, PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mitra Langsung Jaya untuk pembelian mesin dan peralatan, alat pengangkutan dan peralatan kantor dan lainnya. Rincian pembayaran minimum angsuran sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

24. OBLIGATIONS UNDER LEASE AND CONSUMER FINANCING LOANS

Obligations under lease and consumer financing loans represents a subsidiary's leasing and consumer financing loans from PT BNI Multi Finance, PT Maybank Finance, PT Mandiri Tunas Finance and PT Mitra Langsung Jaya for purchase of machinery and equipment, transportation equipment and office equipment and others. Details of minimum installment are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Tahun			***Years***
2017	-	3.783.568.400	*2017*
2018	9.095.600.400	3.783.568.400	*2018*
2019	9.024.066.400	3.711.208.400	*2019*
2020	8.426.823.300	3.217.888.100	*2020*
2021	7.847.532.000	2.677.220.000	*2021*
2022	3.248.207.073	-	*2022*
Jumlah	**37.642.229.173**	**17.173.453.300**	***Total***
Dikurangi bagian bunga	(11.332.269.791)	(5.627.136.772)	*Less interest*
Pinjaman sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	**26.309.959.382**	**11.546.316.528**	***Obligations under lease and consumer financing loans***
Dikurangi bagian pinjaman sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(6.346.462.322)	(2.490.474.168)	*Less current portion of obligations under lease and consumer financing loans*
Pinjaman sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	**19.963.497.060**	**9.055.842.360**	***Obligations under lease and consumer financing loans, net of current portion***

Pinjaman sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen ini terdiri dari:

Sewa pembiayaan

PT Dasaplast Nusantara mengadakan perjanjian sewa pembiayaan untuk pembelian mesin dan kendaraan dengan PT BNI Multifinance, PT Mandiri Tunas Finance dan PT Maybank Indonesia Finance dengan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan jaminan masing-masing aset yang dibeli tersebut. Tingkat bunga sewa pembiayaan adalah 12,5% per tahun.

Obligations under lease and consumer financing loans are as follows:

Leasing

PT Dasaplast Nusantara entered into leasing agreement for purchasing machinery and vehicles with PT BNI Multifinance, PT Mandiri Tunas Finance and PT Maybank Indonesia Finance with duration of payment of 3 (three) to 5 (five) years with collateral of each asset leased. The interest rate of the finance lease is 12.5% per annum.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

24. PINJAMAN SEWA PEMBIAYAAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Pembiayaan konsumen

Pada tanggal 14 November 2016, 16 Desember 2016 dan 3 Mei 2017, PT Nusantara Medika Utama ("NMU") mengadakan perjanjian pembelian kredit dengan PT Mitra Langsung Jaya sehubungan dengan pembelian *X-Ray, CT Scan* dan pembelian meja operasi, perangkat anestesi dan lampu operasi seharga Rp17.525.000.000. NMU telah membayar uang muka sebesar Rp5.257.500.000. Saldo utang sebesar Rp17.631.740.000 dibayar dengan angsuran selama 5 tahun.

Pada tanggal 16 dan 20 September 2016, NMU mengadakan perjanjian pembelian kredit dengan PT Mitra Langsung Jaya sehubungan dengan pembelian *CT Scan* seharga Rp13.000.000.000. NMU telah membayar uang muka sebesar Rp3.900.000.000. Saldo utang sebesar Rp13.386.100.000 dibayar dengan angsuran selama 5 tahun.

Pada tanggal 21 November 2014 dan 18 Agustus 2015, NMU mengadakan perjanjian pembelian kredit dengan PT Mitra Langsung Jaya sehubungan dengan pembelian meja operasi, perangkat anestesi dan lampu operasi seharga Rp4.878.000.000. NMU telah membayar uang muka sebesar Rp1.463.400.000. Saldo utang sebesar Rp5.097.582.000 dibayar dengan angsuran selama 5 tahun.

24. OBLIGATIONS UNDER LEASE AND CONSUMER FINANCING LOANS (continued)

Consumer financing loans

As of November 14, 2016, December 16, 2016 and May 3, 2017, PT Nusantara Medika Utama ("NMU") entered into credit purchase agreement with PT Mitra Langsung Jaya related to X-Ray, CT Scan and purchases of operating table, anesthesia set, and operating lights amounting to Rp17,525,000,000. NMU has paid the advancing payments amounting to Rp5,257,500,000. The payables balance amounting to Rp17,631,740,000 is paid with installment over 5 years.

As of September 16 and 20, 2016, NMU entered into credit purchase agreement with PT Mitra Langsung Jaya related to CT Scan purchase amounting to Rp13,000,000,000. NMU has paid the advance payments amounting to Rp3,900,000,000. The payables balance amounting to Rp13,386,100,000 is paid with installment over 5 years.

As of November 21, 2014 and August 18, 2015, NMU entered into credit purchase agreement with PT Mitra Langsung Jaya related to operating table, anesthesia set, and operating lights purchases amounting to Rp4,878,000,000. NMU has paid the advance payments amounting to Rp1,463,400,000. The payables balance amounting to Rp5,097,582,000 is paid with installment over 5 years.

25. UTANG OBLIGASI

25. BONDS PAYABLE

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Obligasi I PTPN X Tahun 2013	**700.000.000.000**	**700.000.000.000**	*Bonds I PTPN X Year 2013*
Dikurangi bagian utang obligasi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	700.000.000.000	-	*Less current portion of bonds payable*
Utang obligasi, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	**-**	**700.000.000.000**	***Bonds payable, net of current portion***

Pada tahun 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi I PTPN X Tahun 2013 dalam mata uang Rupiah dengan nilai nominal Rp700.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,9% per tahun yang dibayar tiap 3 bulan dengan nama "Obligasi I PTPN X Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap". Obligasi tersebut berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2018. Seluruh obligasi dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan PT CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.

In 2013, the Company issued Bonds I PTPN X Year 2013 denominated in Rupiah with nominal amount of Rp700,000,000,000 with fixed interest rate at 8.9% per annum which is paid every three months. The bonds have a term of 5 years and will be due on July 5, 2018. All the bonds were sold at nominal value and are listed on the Indonesia Stock Exchange with PT CIMB Niaga Tbk as a Trustee.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, obligasi ini dijamin dengan aset Perusahaan yang belum dijaminkan secara *pari passu* dengan kreditur lain yang tidak dijamin secara khusus.

Perusahaan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak boleh melakukan:

- Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen keuangan yang lain yang sejenis dengan kedudukan yang lebih tinggi dari obligasi;
- Melaksanakan perubahan bidang usaha utama, kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perusahaan;
- Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain;
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perusahaan termasuk hak atas pendapatan Perusahaan baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang;
- Memberikan pinjaman atau jaminan Perusahaan kepada pihak ketiga;
- Melakukan pengalihan atas aset tetap Perusahaan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset tetap yang dimiliki Perusahaan; dan
- Mengajukan permohonan pailit.

Tujuan penerbitan obligasi adalah sebagai berikut:

- 39% untuk pelunasan saldo kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; dan
- 61% untuk belanja modal dan atau modal kerja dalam rangka optimalisasi 11 unit Pabrik Gula milik Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan.

Berdasarkan hasil pemantauan tahunan pemeringkatan atas Obligasi I PTPN X Tahun 2013, sesuai dengan surat No. RC-113/PEF-DIR/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) telah menetapkan peringkat obligasi Perusahaan adalah BBB. Peringkat ini berlaku hingga tanggal 5 Juli 2018.

25. BONDS PAYABLE (continued)

Based on the trustee agreement, the bonds are secured by assets of the Company that has not been pledged as pari passu with other unsecured creditors in particular.

The Company, without the written consent of the Trustee cannot:

- *Perform bond issuance or other similar financial instruments at a level that is higher than the bonds;*
- *Implement changes to the main business areas, except on the decision of the Government of Indonesia as the shareholder of the Company;*
- *Conduct merger or consolidation with another company;*
- *Reduce of the authorized, issued and paid-up capital;*
- *Pledge and or in any way encumber the Company's assets including the rights to the Company's revenue either existing or to be acquired in the future;*
- *Provide loan or guarantee of the Company to the third party;*
- *Transfer of the Company's fixed assets in one or a series of transactions in the current financial year that exceeded 10% of total fixed assets owned by the Company; and*
- *File for bankruptcy.*

The purpose of bond issuance are as follows:

- *39% for the repayment of outstanding credit at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; and*
- *61% for capital expenditure and or working capital in order to optimize 11 units of sugar factories owned by the Company.*

As of December 31, 2017 and 2016, the Company complied with the required covenants .

Based on the results of the annual rating monitoring of Bonds I PTPN X Year 2013, according to the letter No. RC-113/PEF-DIR/II/2018 dated February 13, 2018, PT Pemeringkatan Efek Indonesia (“Pefindo”) has set the bonds rating of the Company to BBB. This rating is valid up to July 5, 2018.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemantauan tahunan pemeringkatan atas Obligasi I PTPN X Tahun 2013, sesuai dengan surat No. RC-102/PEF-DIR/II/2017 tanggal 20 Februari 2017, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") telah menurunkan peringkat obligasi Perusahaan dari BBB+ menjadi BBB. Peringkat ini berlaku hingga tanggal 1 Februari 2018.

Terkait dengan jatuh tempo obligasi pada tanggal 5 Juli 2018, Perusahaan akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Menerbitkan fasilitas *Medium Term Note* (MTN) atau MTN Sukuk sebesar Rp500.000.000.000 dengan sifat agunan *clean basis* dengan *arranger* PT BNI Sekuritas;
- Alokasi dana internal Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 yang berasal dari penjualan gula.

25. BONDS PAYABLE (continued)

Based on the results of the annual rating monitoring of Bonds I PTPN X Year 2013, according to the letter No. RC-102/PEF-DIR/II/2017 dated February 20, 2017, PT Pemeringkatan Efek Indonesia ("Pefindo") has downgraded the bonds rating of the Company from BBB+ to BBB. This rating is valid up to February 1, 2018.

In relation with the maturity of the bonds on July 5, 2018, the Company will take the following steps:

- *Issuing Medium Term Note (MTN) or MTN Sukuk amounted to Rp500,000,000,000 with the collateral of clean base properties with the arranger of PT BNI Sekuritas;*
- *The Company allocate internal funding amounting to Rp200,000,000,000 from sales of sugar.*

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan manfaat imbalan kerja untuk karyawan yang mencapai usia pensiun berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Kecuali untuk imbalan pensiun, imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Tabel berikut menyajikan unsur-unsur beban imbalan karyawan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan liabilitas imbalan pascakerja karyawan dalam laporan posisi keuangan yang ditentukan berdasarkan laporan aktuaris independen PT Quattro Asia Consulting, tertanggal 17 April 2018 untuk tahun 2017 dan PT Bestama Aktuaria, tertanggal 10 Januari 2017 untuk tahun 2016 dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

a. Beban imbalan kerja, neto

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The Company and its Subsidiaries provide employee benefits for employees who achieve retirement age based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003. Except for pension program, post-employment benefits are unfunded.

The following table summarizes the elements of employee benefits expense included in the statements of profit or loss and other comprehensive income and employee benefits included in the statements of financial position determined by independent actuary PT Quattro Asia Consulting, on its report dated April 17, 2018 for the year 2017 and PT Bestama Aktuaria, on its report dated January 10, 2017 for year 2016 using the projected unit credit method.

a. Employee benefits expense, net

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**(Disajikan kembali/ *As restated*) 2016**	
Beban jasa kini	28.394.305.383	30.504.409.579	*Current service cost*
Beban bunga	61.467.503.806	62.724.493.791	*Interest cost*
Biaya jasa lalu *(vested)*	-	18.951.268.447	*Past service cost (vested)*
Kerugian (keuntungan) aktuaria atas penyelesaian	16.130.115.173	(2.537.369.043)	*Actuarial loss (gains) on settlement*
Beban imbalan kerja, neto	**105.991.924.362**	**109.642.802.774**	***Employee benefits expense, net***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

b. Liabilitas imbalan kerja, neto

b. Employee benefits liability, net

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	(Disajikan kembali/ *As restated*) 2016	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.167.594.413.369	1.052.086.833.231	*Present value of benefit obligation*
Nilai wajar aset program	(310.089.445.729)	(300.970.473.416)	*Fair value of plan assets*
Liabilitas imbalan kerja, neto	**857.504.967.640**	**751.116.359.815**	***Employee benefits liability, net***

Perubahan liabilitas imbalan kerja neto selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Changes in net liabilities for employee benefits for the year ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	(Disajikan kembali/ *As restated*) 2016	
Saldo awal tahun	751.116.359.815	733.059.753.685	*Balance at beginning of year*
Beban imbalan pada tahun berjalan	105.991.924.362	109.642.802.774	*Employee benefits expense during the year*
Kerugian (keuntungan) pengukuran kembali liabilitas tahun berjalan:			*Loss (gain) on re-measurement of liabilities during the year:*
Perubahan aktuaria yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	71.959.061.774	57.098.103.683	*Actuarial changes arising from changes in financial assumption*
Penyesuaian atas pengalaman	9.634.814.018	(60.523.734.890)	*Experience adjustments*
	81.593.875.792	(3.425.631.207)	
Pembayaran tahun berjalan	(81.197.192.329)	(88.160.565.437)	*Payments during the year*
Saldo akhir tahun	**857.504.967.640**	**751.116.359.815**	***Ending balance***

Total liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Total employee benefits liability is as follow:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	(Disajikan kembali/ *As restated*) 2016	
Program imbalan pascakerja	478.505.589.014	403.575.397.698	*Post employment benefits program*
Program pensiun	222.814.628.289	220.708.760.508	*Pension program*
Program iuran BPJS pensiunan	119.285.716.553	99.373.077.273	*BPJS dues retirement program*
Program imbalan jangka panjang lain	36.899.033.784	27.459.124.336	*Other long-term benefits*
Total liabilitas imbalan pascakerja	**857.504.967.640**	**751.116.359.815**	***Total employee benefits liability***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program imbalan pascakerja

Perusahaan dan Entitas Anak memberikan imbalan pascakerja yang merupakan pesangon pensiun, santunan meninggal dunia, santunan cacat dan pesangon pengunduran diri. Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Post employment benefits program

The Company and Subsidiaries provide employment benefits consisting of severance pension, death benefit, disability compensation and severance resignation. The key assumptions in the calculation of employee benefit liabilities are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Tingkat diskonto	6,38%-7,47%	8,10%-8,50%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji tahunan	4,00%-8,00%	4,00%-8,00%	*Annual basic salary increase*
Usia pensiun normal	55-56 tahun/*years*	55-56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat pengunduran diri	5% pada usia 20 dan 45 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 and 45 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	5% pada usia 20 dan 45 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 and 45 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	*Resignation rate*
Tingkat mortalita	Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) *Indonesia Mortality Table 2011 (Male)*	Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) *Indonesia Mortality Table 2011 (Male)*	*Mortality rate*
Tingkat cacat	1%-10% dari mortalita/ *1%-10% of mortality rate*	1%-10% dari mortalita/ *1%-10% of mortality rate*	*Disability rate*

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

Movement of post employment benefits liability are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Saldo awal	403.575.397.698	426.253.529.755	*Beginning balance*
Beban imbalan pada tahun berjalan	52.116.033.791	58.454.757.183	*Employee benefits expense during the year*
Kerugian (keuntungan) pengukuran kembali liabilitas tahun berjalan:			*Loss (gain) on re-measurement of liabilities during the year:*
Perubahan aktuaria yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	39.960.739.917	13.435.944.204	*Actuarial changes arising from changes in financial assumption*
Penyesuaian atas pengalaman	40.882.044.944	(45.404.441.672)	*Experience adjustments*
	80.842.784.861	(31.968.497.468)	
Pembayaran tahun berjalan	(58.028.627.336)	(49.164.391.772)	*Payments during the year*
Total liabilitas imbalan pascakerja	**478.505.589.014**	**403.575.397.698**	***Total post employment benefits liability***

Program pensiun

Perusahaan dan Entitas Anak tertentu menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dihitung berdasarkan gaji pada tahun tertentu dan masa kerja karyawan. Dana Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-344/KMK/17/1999 tanggal 13 September 1999.

Pension program

The Company and certain Subsidiaries provided defined benefits pension plan for all permanent employees calculated based on salary in certain year and service years of employees. The pension plan is managed by Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) based on the the Decision Letter of Ministry of Finance No. Kep-344/KMK/17/1999 dated September 13, 1999.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun (lanjutan)

Iuran dana pensiun yang ditanggung Perusahaan dan Entitas Anak tertentu di atas masing-masing sebesar 6,59% dan 6,00% dari penghasilan dasar pensiun untuk Perusahaan dan karyawan.

Nilai wajar liabilitas imbalan kerja Perusahaan dan Entitas Anak tertentu pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan asumsi-asumsi utamanya adalah sebagai berikut:

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Pension program (continued)

A pension contribution by the Company and certain Subsidiaries is 6.59% and 6.00%, respectively of pension basic income for the Company and its employees.

The fair value of employee benefits liability of the Company and certain Subsidiaries as of December 31, 2017 and 2016 and the key assumptions are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Tingkat diskonto	7,31%	8,10%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji pokok rata-rata	2,50%	2,50%	*Annual basic salary increase*
Usia pensiun normal	55-56 tahun/ *years*	55-56 tahun/ *years*	*Normal retirement age*
Tingkat pengunduran diri	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	*Resignation rate*
Tingkat mortalita	Aktif: Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) Tidak aktif: *The 1971 Group Annuity Mortality Table* (Pria)/ *Active: Indonesia Mortality Table 2011 (Male) Not active: The 1971 Group Annuity Mortality Table (Male)*	Aktif: Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) Tidak aktif: *The 1971 Group Annuity Mortality Table* (Pria)/ *Active: Indonesia Mortality Table 2011 (Male) Not active: The 1971 Group Annuity Mortality Table (Male)*	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	*Disability rate*

Mutasi liabilitas program pensiun adalah sebagai berikut:

Movement of pension program liability are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**(Disajikan kembali/ *As restated*) 2016**	
Saldo awal	220.708.760.508	200.359.316.422	*Beginning balance*
Beban imbalan pada tahun berjalan	22.272.248.410	20.101.622.324	*Employee benefits expense during the year*
Kerugian (keuntungan) pengukuran kembali liabilitas tahun berjalan:			*Loss (gain) on re-measurement of liabilities during the year:*
Perubahan aktuaria yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	26.380.402.547	38.385.434.348	*Actuarial changes arising from changes in financial assumption*
Penyesuaian atas pengalaman	(43.380.173.644)	(13.172.125.113)	*Experience adjustments*
	(16.999.771.097)	25.213.309.235	
Pembayaran tahun berjalan	(3.166.609.532)	(24.965.487.473)	*Payments during the year*
Total liabilitas program pensiun	**222.814.628.289**	**220.708.760.508**	***Total pension program liability***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Program pensiun (lanjutan)

Pension program (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2017	(Disajikan kembali/ *As restated*) 2016	
Nilai kini kewajiban	532.904.074.018	521.679.233.925	*Present value of defined obligation*
Nilai wajar dari aset program	(310.089.445.729)	(300.970.473.417)	*Fair value of plan assets*
Defisit	**222.814.628.289**	**220.708.760.508**	***Deficit***

Mutasi saldo nilai wajar dari program pensiun adalah sebagai berikut:

Movement of fair value of pension program are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2017	(Disajikan kembali/ *As restated*) 2016	
Saldo awal	300.707.594.994	280.882.150.159	*Beginning balance*
Iuran yang dibayarkan oleh Perusahaan	3.166.609.532	24.965.487.473	*Contribution paid by Company*
Iuran yang dibayarkan oleh karyawan	2.449.072.123	2.627.333.904	*Contribution paid by employee*
Pembayaran manfaat	(43.896.158.811)	(41.964.029.895)	*Benefit payments*
Pendapatan bunga	22.266.955.982	23.989.511.655	*Interest income*
Imbal hasil lainnya	25.395.371.909	10.470.020.121	*Other return on plant assets*
Total nilai wajar program pensiun	**310.089.445.729**	**300.970.473.417**	***Total fair value of pension program***

Program iuran BPJS pensiunan

Perusahaan dan Entitas Anak tertentu memberikan pembayaran premi BPJS kepada karyawan aktif yang akan pensiun dimasa yang akan datang. Nilai wajar liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan Entitas Anak tertentu pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan asumsi-asumsi utamanya adalah sebagai berikut:

BPJS dues retirement program

The Company and certain Subsidiaries provide BPJS premium payments to active employees who will retire in the future. The fair value of employment benefit liability of The Company and certain Subsidiaries as of December 31, 2017 and 2016 and the key assumptions are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2017	2016	
Tingkat diskonto	7,31%	8,00%	*Discount rate*
Usia pensiun normal	55-56 tahun/*years*	55-56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat pengunduran diri	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	*Resignation rate*
Tingkat mortalita	Aktif: Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) Tidak aktif: *The 1971 Group Annuity Mortality Table* (Pria)/ *Active: Indonesia Mortality Table 2011 (Male) Not active: The 1971 Group Annuity Mortality Table (Male)*	Aktif: Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) Tidak aktif: *The 1971 Group Annuity Mortality Table* (Pria)/ *Active: Indonesia Mortality Table 2011 (Male) Not active: The 1971 Group Annuity Mortality Table (Male)*	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	*Disability rate*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Program iuran BPJS pensiunan (lanjutan)

Mutasi liabilitas program iuran BPJS pensiunan adalah sebagai berikut:

BPJS dues retirement program (continued)

Movement of BPJS dues retirement program liability are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Saldo awal	99.373.077.273	76.189.180.278	*Beginning balance*
Beban imbalan pada tahun berjalan	8.943.229.467	27.623.791.420	*Employee benefits expense during the year*
Kerugian pengukuran kembali liabilitas tahun berjalan:			*Loss on re-measurement of liabilities during the year:*
Perubahan aktuaria yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	5.617.919.310	5.276.725.131	*Actuarial changes arising from changes in financial assumption*
Penyesuaian atas pengalaman	12.132.942.718	(1.947.168.105)	*Experience adjustments*
	17.750.862.028	3.329.557.026	
Pembayaran tahun berjalan	(6.781.452.215)	(7.769.451.451)	*Payments during the year*
Total liabilitas program iuran BPJS pensiunan	**119.285.716.553**	**99.373.077.273**	***Total BPJS dues retirement program liability***

Program imbalan jasa masa kerja lainnya

Perusahaan dan Entitas Anak tertentu memberikan imbalan jasa masa kerja lainnya meliputi santunan hari tua, bantuan kematian, dan cuti panjang. Nilai wajar liabilitas imbalan pascakerja Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan asumsi-asumsi utamanya sebagai berikut:

Other long-term employee benefits

The Company and certain Subsidiaries provide other long-term employee benefits, such as post-retirement benefits, money grave and long service leave. The fair value of employment benefit liability Group as of December 31, 2017 and 2016 and the key assumptions are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Tingkat diskonto	6,80%	8,20%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji pokok rata-rata	6,00%	4,00%	*Annual basic salary increase*
Usia pensiun normal	55-56 tahun/*years*	55-56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat pengunduran diri	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	*Resignation rate*
Tingkat mortalita	Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) *Active: Indonesia Mortality Table 2011 (Male)*	Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) *Active: Indonesia Mortality Table 2011 (Male)*	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	*Disability rate*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program imbalan jasa masa kerja lainnya (lanjutan)

Mutasi liabilitas program imbalan jasa masa kerja lainnya adalah sebagai berikut:

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Other long-term employee benefits (continued)

Movement of other long-term employee benefits liability are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Saldo awal	27.459.124.336	30.257.727.230	*Beginning balance*
Beban imbalan pada tahun berjalan	22.660.412.693	3.462.631.846	*Employee benefits expense during the year*
Pembayaran	(13.220.503.245)	(6.261.234.740)	*Payments during the year*
Total liabilitas program imbalan jasa masa kerja lainnya	**36.899.033.784**	**27.459.124.336**	***Total other long-term employee benefits liability***

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja tanpa diskonto adalah sebagai berikut:

The maturity profile of undiscounted employee benefits liability are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Dalam 12 bulan mendatang	46.561.991.043	78.552.646.149	*Within 1 year*
Antara 1 sampai 2 tahun	65.733.039.332	77.272.376.005	*Between 1 and 2 years*
Antara 2 sampai 5 tahun	271.124.584.893	207.918.621.743	*Between 2 and 5 years*
Di atas 5 tahun	1.756.036.382.324	1.631.688.663.917	*More than 5 years*
Jumlah	**2.139.455.997.592**	**1.995.432.307.814**	***Total***

Analisa sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto

Pada tanggal 31 Desember 2017, jika tingkat diskonto meningkat sebesar 1% dan semua variabel lainnya konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan lebih rendah sebesar Rp78.054.641.017, sedangkan jika tingkat diskonto menurun 1%, maka nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan lebih tinggi sebesar Rp89.826.488.001.

Sensitivity analysis of discount rate risk

As of December 31, 2017, if the discount rate of the Group is 1% higher and all other variables constant, the present value of employee benefits liability would be lower by Rp78,054,641,017, whereas if the discount rate of the Group is 1% lower, the present value of employee benefits liability would be higher by Rp89,826,488,001.

Analisa sensitivitas untuk risiko tingkat kenaikan upah

Pada tanggal 31 Desember 2017, jika tingkat kenaikan upah meningkat sebesar 1% dan semua variabel lainnya konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan lebih tinggi sebesar Rp36.489.316.462, sedangkan jika tingkat kenaikan upah menurun 1%, maka nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan lebih rendah sebesar Rp33.148.474.739.

Sensitivity analysis of increased wages rate risk

On December 31, 2017, if the increased wages rate of the Group is 1% higher and all other variables constant, the present value of employee benefits liability would be higher by Rp36,489,316,462, whereas if the wages rate of the Group is 1% lower, the present value of employee benefits liability would be lower by Rp33,148,474,739.

Durasi rata-rata liabilitas manfaat pasti Kelompok Usaha pada akhir periode pelaporan adalah antara 8,5 tahun.

The average duration of the Group's defined benefits liabilities at the end of the reporting period is between 8.5 years.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Kategori aset program pada akhir periode pelaporan terdiri dari:

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

The categories of asset program at the end of the reporting period consist of:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Surat berharga negara	23,28%	25,90%	*Government bonds*
Deposito berjangka	18,32%	9,73%	*Time deposits*
Saham	16,55%	19,58%	*Shares*
Tanah dan bangunan	14,35%	15,59%	*Land and buildings*
Obligasi	13,37%	13,86%	*Bonds*
Lain-lain	14,13%	15,34%	*Others*

27. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan dan saldo yang terkait pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

27. SHARE CAPITAL

The Company's shareholders and their related shareholdings as of December 31, 2017 and 2016:

Pemegang saham	Jumlah saham/ *Number of share*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholders*
Saham seri A				*Series A share*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1	0,00%	1.000.000	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
Saham seri B				*Series B shares*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1.661.035	90,00%	1.661.035.000.000	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
Negara Republik Indonesia	184.560	10,00%	184.560.000.000	*Republic of Indonesia*
Jumlah	**1.845.596**	**100,00%**	**1.845.596.000.000**	***Total***

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, efektif tanggal 16 Agustus 2007, untuk menyisihkan sampai dengan minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 14 Maret 2016 dari Nanda Faux Iwan, S.H., pemegang saham menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan sebanyak 975.000 saham dengan nominal Rp1.000 per saham atau sejumlah Rp975.000.000.000 yang diambil dari dana Penyertaan Modal Negara ("PMN") 2015.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham No. RIS-K.BUMN/16.001 tanggal 14 Juni 2016, para pemegang saham menyetujui untuk menyisihkan Rp65.479.220.511 untuk cadangan umum.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun penyajian.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company is also required by the Limited Liability Company Law No. 40, Year 2007 effective on August 16, 2007 to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches at least 20% of the issued and paid-up capital.

Based on the Notarial Deed No. 11 dated March 14, 2016 of Nanda Faux Iwan, S.H., the shareholder ratified the increase in the Company's issued and fully paid capital by 975,000 shares, with nominal value of Rp1,000 per share or totaling Rp975,000,000,000 taken from State Capital Investment ("PMN") funds 2015.

Based on minutes of the General Meeting of Shareholders No. RIS-K.BUMN/16.001 dated June 14, 2016, the Shareholders approved to allocate Rp65,479,220,511 as general reserve.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the years presented.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

27. MODAL SAHAM (lanjutan)

Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015

Perusahaan menerima dana program Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp975.000.000.000 pada tanggal 30 Desember 2015.

Dana ini akan digunakan dalam beberapa program kegiatan Perusahaan, antara lain:

- Peningkatan kapasitas giling dan rendemen tebu untuk PG Tjoekir dan PG Gempolkrep;
- Pembangunan proyek *co-generation* untuk pembangkit listrik di PG Ngadiredjo, PG Tjoekir dan PG Gempolkrep;
- Pemantapan kinerja pabrik *Bioethanol* di PG Gempolkrep dan
- Pembangunan 1 pabrik *Bioethanol* berkapasitas 100 KL/hari di PG Ngadiredjo.

27. SHARE CAPITAL (continued)

State Capital Investment (PMN) 2015

The Company received State Capital Investment program fund (PMN) amounting to Rp975,000,000,000 on December 30, 2015.

This fund will be allocated to several program activities of the Company, among others:

- *The increase in milling capacity and sugarcane yield rendement for Tjoekir Sugar Factory and Gempolkrep Sugar Factory;*
- *Project development of co-generation for power plant in Ngadirejo Sugar Factory, Tjoekir Sugar Factory and Gempolkrep Sugar Factory;*
- *Stabilization of Bioethanol plant performance in Gempolkrep Sugar Factory and*
- *Development of one Bioethanol plant with capacity of 100 KL/day in Ngadiredjo Sugar Factory.*

28. MODAL SUMBANGAN

28. DONATED CAPITAL

Donor	Aset/ *Assets*	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016
Burger Sohne AG Burg, Swiss	Gudang *cooler*, ruang reparasi mesin, rumah sakit, gudang pengering, gedung *cigarillos/ Coller warehouse, machinery repair room, hospital, drying warehouse, cigarillos building*	9.739.880.250	9.739.880.250
The International Agency for International Development - Australia	*Stabilizing pond* dan modifikasi kolam *aerasi/ Stabilizing pond and modification of an aeration*	286.588.087	286.588.087
Dokter/ *Doctor*	Inventaris/ *Equipments*	35.035.801	35.035.801
Jumlah modal sumbangan/ *Total donated capital*		**10.061.504.138**	**10.061.504.138**

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA / *29. OTHER COMPONENT OF EQUITY*

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	(Disajikan kembali/*As restated)* 2016	
Tambahan modal disetor dari pengajuan pengampunan pajak	488.870.432	488.870.432	*Additional paid in capital from tax amnesty*
Jumlah ekuitas lainnya	**488.870.432**	**488.870.432**	***Total other equity***

Tambahan modal disetor dari pengampunan pajak

Pada tanggal 28 September 2016, PT Mitratani Dua Tujuh, Entitas Anak, mengajukan pengampunan pajak dengan mencatat selisih antara harga perolehan aset dan liabilitas sebesar Rp752.126.671 sebagai tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangannya.

Additional paid-in capital from tax amnesty

On September 28, 2016, PT Mitratani Dua Tujuh, a Subsidiary, submitted tax amnesty by recording a difference between value of assets and liability amounting to Rp752,126,671 as additional paid in capital in the statements of financial position.

30. KEPENTINGAN NONPENGENDALI / *30. NON-CONTROLLING INTERESTS*

Akun ini merupakan hak pemegang saham nonpengendali atas aset bersih dan bagian laba rugi bersih Entitas Anak yang dikonsolidasikan.

a. Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali:

This account represents the right of non-controlling interest shareholders of net assets and net income (loss) of consolidated Subsidiaries.

a. Net equity attributable to non-controlling interest:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	2016	
PT Kelola Mina Laut	37.378.518.228	30.832.255.065	*PT Kelola Mina Laut*
PT Surya Satria Sembada	7.845.395.681	8.007.410.883	*PT Surya Satria Sembada*
Koperasi Karyawan	552.333.152	446.077.987	*Koperasi Karyawan*
Jumlah	**45.776.247.061**	**39.285.743.935**	***Total***

b. Laba (rugi) bersih dan penghasilan komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali:

b. Net income (loss) and other comprehensive income attributable to non-controlling interests:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2017	2016	
PT Kelola Mina Laut	7.520.860.597	4.658.477.682	*PT Kelola Mina Laut*
Koperasi Karyawan	122.548.815	99.166.233	*Koperasi Karyawan*
PT Surya Satria Sembada	(85.084.604)	490.373.191	*PT Surya Satria Sembada*
Jumlah	**7.558.324.808**	**5.248.017.106**	***Total***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

30. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

c. Dividen yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali:

c. Dividends attributable to non-controlling interests:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2017	**2016**	
PT Kelola Mina Laut	1.237.252.371	1.400.000.000	*PT Kelola Mina Laut*
PT Surya Satria Sembada	76.930.598	-	*PT Surya Satria Sembada*
Koperasi Karyawan	16.150.584	19.407.600	*Koperasi Karyawan*
Jumlah	**1.330.333.553**	**1.419.407.600**	***Total***

31. PENDAPATAN

31. REVENUE

a. Rincian pendapatan berdasarkan segmen adalah sebagai berikut:

a. Details revenue by segment is as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2017	**2016**	
Gula	1.302.238.962.780	1.021.885.407.268	*Sugar*
Rumah Sakit	332.590.748.397	293.483.314.117	*Hospital*
Tembakau	327.735.658.600	331.435.383.035	*Tobacco*
Edamame dan okra	246.714.064.212	208.638.522.762	*Edamame and Okra*
Tetes	183.072.427.440	205.045.723.342	*Molasses*
Bioethanol	88.598.200.000	115.028.572.030	*Bioethanol*
Karung plastik	81.878.998.951	51.873.715.123	*Plastic bag*
Cutting bobbin	31.113.166.056	32.982.882.112	*Cutting Bobbin*
Jumlah pendapatan	**2.593.942.226.436**	**2.260.373.519.789**	***Total revenue***

b. Rincian pendapatan menurut daerah geografis adalah sebagai berikut:

b. Details revenue by geographic region is as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2017	**2016**	
Lokal	2.022.799.841.069	1.737.780.165.547	*Local*
Ekspor	571.142.385.367	522.593.354.242	*Export*
Jumlah pendapatan	**2.593.942.226.436**	**2.260.373.519.789**	***Total revenue***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PENDAPATAN (lanjutan)

31. REVENUE (continued)

c. Penjualan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan dilakukan kepada pelanggan adalah sebagai berikut:

c. Sales to individual customer exceeding 10% of the total revenue are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*				
	2017		2016		
	Jumlah / *Total*	Persentase dari penjualan neto / *The percentage of net sales*	Jumlah / *Total*	Persentase dari penjualan neto / *The percentage of net sales*	
Perusahaan Umum					*Perusahaan Umum*
Badan Urusan Logistik	444.395.169.878	17,13%	621.056.437.817	27,48%	*Badan Urusan Logistik*
PT Fajar Mulia Transindo	300.581.818.182	11,59%	70.636.363.637	3,12%	*PT Fajar Mulia Transindo*
Tobacco Traders International	278.699.838.959	10,74%	262.437.645.238	11,61%	*Tobacco Traders International*
Jumlah	**1.023.676.827.019**	**39,46%**	**954.130.446.692**	**42,21%**	***Total***

32. BEBAN POKOK PENDAPATAN

32. COST OF SALES

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Year ended December 31, 2017

	Gula / Sugar	Tetes / Molasses	Tembakau / Tobacco	Rumah Sakit / Hospital	Lainnya / Others	Jumlah / Total	
Biaya langsung							Direct cost
Biaya tanaman							Plantation cost
Pembibitan/pemupukan	14.664.805.247	2.578.549.518	15.541.337.065	-	17.445.438.067	50.230.129.897	Seedling/fertilization
Pemeliharaan	51.579.780.390	8.105.046.051	114.631.697.969	-	4.493.830.706	178.810.355.116	Maintenance
Pengangkutan	36.386.682.451	6.426.216.067	15.480.855.618	-	12.846.686.200	71.140.440.336	Transportation
Gaji dan tunjangan karyawan	88.175.974.435	15.572.671.801	30.350.890.026	-	40.693.267.874	174.792.804.136	Salaries and allowances
Bahan baku	-	-	-	-	120.584.268.908	120.584.268.908	Raw materials
Jumlah biaya tanaman	**190.807.242.523**	**32.682.483.437**	**176.004.780.678**	**-**	**196.063.491.755**	**595.557.998.393**	**Total cost of plants**
Biaya pabrik							Factory cost
Biaya pengolahan	39.687.120.128	7.189.488.274	47.046.112.270	-	39.315.969.122	133.238.689.794	Processing expenses
Pemeliharaan mesin dan peralatan	94.272.903.521	25.218.256.795	-	-	6.769.867.330	126.261.027.646	Maintenance of machinery and equipment
Gaji dan tunjangan karyawan	182.808.938.763	32.285.706.210	47.764.746.791	-	82.986.130.985	345.845.522.749	Salaries and allowances
Biaya pengemasan	20.351.710.703	-	-	-	5.503.804.793	25.855.515.496	Packaging expenses
Lain-lain	10.307.934.049	889.256.951	11.117.552	-	8.017.250.829	19.225.559.381	Others
Jumlah biaya pabrik	**347.428.607.164**	**65.582.708.230**	**94.821.976.613**	**-**	**142.593.023.059**	**650.426.315.066**	**Total factory cost**
Biaya langsung rumah sakit	-	-	-	169.381.059.735	-	169.381.059.735	Direct cost of hospital
Penyusutan (Catatan 15)	154.166.146.406	27.545.667.803	6.403.604.087	22.524.951.770	11.789.796.562	222.430.166.628	Depreciation (Note 15)
Penyusutan aset pengampunan pajak (Catatan 15)	-	-	-	-	676.654.647	676.654.647	Depreciation of tax amnesty's asset (Note 15)
Amortisasi (Catatan 16)	225.495.483	46.584.815	35.404.728	-	31.228.238	338.713.264	Amortization (Note 16)
Jumlah biaya langsung	**692.627.491.576**	**125.857.444.285**	**277.265.766.106**	**191.906.011.505**	**351.154.194.261**	**1.638.810.907.733**	**Total direct cost**
Biaya tidak langsung							Indirect cost
Gaji dan tunjangan karyawan	87.013.864.328	15.283.045.673	30.872.147.060	6.593.206.921	4.342.361.872	144.104.625.854	Salaries and allowances
Pengangkutan dan perjalanan	1.841.518.809	325.228.819	-	2.251.193.087	-	4.417.940.715	Transportation and travel
Pemeliharaan bangunan, mesin, dan peralatan	3.334.968.331	588.985.465	6.343.787.459	1.804.933.276	36.812.170	12.109.486.701	Maintenance of building, machinery and equipment
Lain-lain	9.260.372.129	4.293.018.623	10.595.621.269	55.111.381.563	18.189.474.406	97.449.867.990	Others
Jumlah biaya tidak langsung	**101.450.723.597**	**20.490.278.580**	**47.811.555.788**	**65.760.714.847**	**22.568.648.448**	**258.081.921.260**	**Total indirect cost**
Jumlah biaya produksi	**794.078.215.173**	**146.347.722.865**	**325.077.321.894**	**257.666.726.352**	**373.722.842.709**	**1.896.892.828.993**	**Total production cost**
Persediaan barang dalam proses - awal tahun	12.696.315.290	-	312.977.836.895	-	13.857.954.812	339.532.106.997	Work in process inventory - at beginning of year
Persediaan barang dalam proses - akhir tahun	(12.358.743.022)	-	(328.127.679.185)	-	(18.151.062.790)	(358.637.484.997)	Work in process inventory - at end of year
Persediaan barang jadi - awal tahun	352.188.294.280	18.237.397.797	-	-	27.900.644.724	398.326.336.801	Finished goods inventory - at beginning of year
Persediaan barang jadi - akhir tahun	(156.983.388.469)	(6.012.903.025)	-	-	(46.456.728.939)	(209.453.020.433)	Finished goods inventory - at end of year
Jumlah beban pokok pendapatan	**989.620.693.252**	**158.572.217.637**	**309.927.479.604**	**257.666.726.352**	**350.873.650.516**	**2.066.660.767.361**	**Total cost of sales**

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

32. COST OF SALES (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (Disajikan kembali)

Year ended December 31, 2016 (As restated)

	Gula / *Sugar*	Tetes / *Molasses*	Tembakau / *Tobacco*	Rumah Sakit / *Hospital*	Lainnya / *Others*	Jumlah / *Total*	
Biaya langsung							*Direct cost*
Biaya tanaman							*Plantation cost*
Pembibitan/pemupukan	7.650.450.827	1.971.017.516	46.120.606.307	-	14.960.893.178	70.702.967.828	*Seedling/fertilization*
Pemeliharaan	62.365.316.746	15.785.706.569	150.436.614.613	-	10.852.294.974	239.439.932.902	*Maintenance*
Pengangkutan	47.063.860.927	11.565.175.804	14.928.715.249	-	11.922.084.950	85.479.836.930	*Transportation*
Gaji dan tunjangan karyawan	81.797.506.814	23.736.225.623	22.784.600.975	-	35.203.382.721	163.521.716.133	*Salaries and allowances*
Bahan baku	-	-	-	-	56.982.989.075	56.982.989.075	*Raw materials*
Jumlah biaya tanaman	**198.877.135.314**	**53.058.125.512**	**234.270.537.144**	**-**	**129.921.644.898**	**616.127.442.868**	***Total cost of plants***
Biaya pabrik							*Factory cost*
Biaya pengolahan	388.318.010.180	20.852.209.802	45.823.031.886	-	29.754.875.189	484.748.127.057	*Processing expenses*
Pemelihaan mesin dan peralatan	167.465.088.271	47.138.749.924	-	-	4.301.835.390	218.905.673.585	*Maintenance of machinery and equipment*
Gaji dan tunjangan karyawan	182.735.580.755	55.466.053.957	6.567.438.524	-	83.024.499.645	327.793.572.881	*Salaries and allowances*
Biaya pengemasan	24.892.916.545	-	-	-	4.644.243.711	29.537.160.256	*Packaging expenses*
Lain-lain	11.796.306.224	3.313.936.584	10.246.946	-	22.220.313.799	37.340.803.553	*Others*
Jumlah biaya pabrik	**775.207.901.975**	**126.770.950.267**	**52.400.717.356**	**-**	**143.945.767.734**	**1.098.325.337.332**	***Total factory cost***
Biaya langsung rumah sakit	-	-	-	151.919.336.392	-	151.919.336.392	*Direct cost of hospital*
Penyusutan (Catatan 15)	136.294.163.764	36.821.756.170	5.457.274.558	15.895.091.729	9.655.363.921	204.123.650.142	*Depreciation (Note 15)*
Penyusutan aset pengampunan pajak (Catatan 15)	-	-	-	-	1.409.697.189	1.409.697.189	*Depreciation of tax amnesty's asset (Note 15)*
Amortisasi (Catatan 16)	194.768.737	52.619.472	28.965.393	-	-	276.353.602	*Amortization (Note 16)*
Jumlah biaya langsung	**1.110.573.969.790**	**216.703.451.421**	**292.157.494.451**	**167.814.428.121**	**284.932.473.742**	**2.072.181.817.525**	***Total direct cost***
Biaya tidak langsung							*Indirect cost*
Gaji dan tunjangan karyawan	73.645.554.659	21.465.202.629	20.662.008.197	4.911.297.118	3.955.302.540	124.639.365.143	*Salaries and allowances*
Pengangkutan dan perjalanan	-	-	10.481.140.221	1.856.016.627	144.300.760	12.481.457.608	*Transportation and travel*
Pemeliharaan bangunan, mesin, dan peralatan	12.407.883.694	3.049.034.938	14.916.291.429	1.370.542.683	779.399.523	32.523.152.267	*Maintenance of building, machinery and equipment*
Lain-lain	10.050.118.861	2.266.173.069	6.211.700.427	48.431.151.507	19.606.002.588	86.565.146.452	*Others*
Jumlah biaya tidak langsung	**96.103.557.214**	**26.780.410.636**	**52.271.140.274**	**56.569.007.935**	**24.485.005.411**	**256.209.121.470**	***Total indirect cost***
Jumlah biaya produksi	**1.206.677.527.004**	**243.483.862.057**	**344.428.634.725**	**224.383.436.056**	**309.417.479.153**	**2.328.390.938.995**	***Total production cost***
Persediaan barang dalam proses - awal tahun	16.941.680.055	-	266.743.378.672	-	17.770.817.613	301.455.876.340	*Work in process inventory - at beginning of year*
Persediaan barang dalam proses - akhir tahun	(12.696.315.290)	-	(312.977.836.895)	-	(13.857.954.812)	(339.532.106.997)	*Work in process inventory - at end of year*
Persediaan barang jadi - awal tahun	63.095.794.331	7.978.725.546	2.720.326.751	-	43.791.720.126	117.586.566.754	*Finished goods inventory - at beginning of year*
Persediaan barang jadi - akhir tahun	(352.188.294.280)	(18.237.397.797)	-	-	(27.900.644.724)	(398.326.336.801)	*Finished goods inventory - at end of year*
Jumlah beban pokok pendapatan	**921.830.391.820**	**233.225.189.806**	**300.914.503.253**	**224.383.436.056**	**329.221.417.356**	**2.009.574.938.291**	***Total cost of sales***

Pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan dilakukan kepada pemasok adalah sebagai berikut:

Purchases from individual suppliers exceeding 10% of the total revenue are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*				
	2017		2016		
	Jumlah / *Total*	Persentase dari penjualan neto / *The percentage of net sales*	Jumlah / *Total*	Persentase dari penjualan neto / *The percentage of net sales*	
Agrocorp International Pte Ltd., Singapura	-	-	279.985.555.319	12,39%	*Agrocorp Internationl Pte Ltd., Singapore*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. BEBAN PENJUALAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *33. SELLING EXPENSES AND GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

a. Beban penjualan / *a. Selling expenses*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2017	**2016**	
Transportasi	12.051.555.609	9.444.144.755	*Transportation*
Beban penjualan tembakau	2.039.934.184	3.194.522.204	*Tobacco sales expense*
Beban penjualan gula dan tetes	1.583.127.791	1.713.120.849	*Sugar and molasses sales expense*
Jasa perantara	1.543.544.984	1.185.561.588	*Brokerage service*
Beban promosi	388.466.689	321.926.684	*Promotion expense*
Beban kirim dan bongkar	169.660.017	1.693.211.925	*Shipping and unloading cost*
Lain-lain	2.122.294.839	1.996.429.784	*Others*
Jumlah	**19.898.584.113**	**19.548.917.789**	***Total***

b. Beban umum dan administrasi / *b. General and administrative expenses*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2017	**2016**	
Gaji, upah dan tunjangan kesejahteraan	189.862.750.892	172.592.414.475	*Salaries, wages and welfare benefits*
Tunjangan sosial karyawan	39.707.034.480	18.700.693.204	*Employee social benefits*
Beban kantor, gedung dan mess	29.338.875.834	26.550.319.700	*Office, building, and hostel cost*
Penyusutan (Catatan 15)	24.507.657.783	22.029.311.061	*Depreciation (Note 15)*
Beban penelitian dan pengembangan	10.341.906.802	21.047.571.578	*Research and development cost*
Pajak dan asuransi	9.783.857.443	1.927.053.558	*Taxes and insurances*
Perjamuan	6.556.501.655	8.628.137.692	*Entertainment*
Perjalanan dinas	5.676.690.964	6.175.619.023	*Business travelling*
Transportasi	5.014.112.777	4.667.078.781	*Transportation*
Amortisasi (Catatan 16)	2.836.276.048	2.147.453.807	*Amortization (Note 16)*
Beban komisaris dan direksi	636.632.000	3.281.128.125	*Commissioners and directors fees*
Lain-lain	4.478.000.219	9.638.381.420	*Others*
Jumlah	**328.740.296.897**	**297.385.162.424**	***Total***

34. BEBAN KEUANGAN / *34. FINANCE EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2017	**2016**	
Bunga kredit modal kerja	66.189.953.921	26.288.203.834	*Interest of working capital credit*
Bunga obligasi	37.747.014.236	37.746.934.236	*Interest of bond*
Bunga kredit investasi	36.958.155.100	47.726.930.206	*Interest of investment credit*
Jumlah	140.895.123.257	111.762.068.276	*Total*
Dikurangi bunga yang dikapitalisasi	(855.915.445)	(216.328.366)	*Less capitalized interest*
Beban keuangan, neto	**140.039.207.812**	**111.545.739.910**	***Finance expenses, net***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

35. PENDAPATAN (BEBAN) USAHA LAINNYA / *35. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2017	**2016**	
BEBAN OPERASI LAIN			***OTHER OPERATING EXPENSES***
Beban konsultan	10.942.165.327	57.353.037.630	*Consultant expenses*
Jaminan sosial pensiun	6.661.200.682	13.797.331.217	*Social security pensions*
Beban penyisihan piutang	4.622.013.551	37.845.989.866	*Provision for impairment losses on receivables*
Sumbangan	3.817.585.596	6.565.999.716	*Donation*
Beban kompos	3.706.965.407	4.930.002.859	*Compost expenses*
Beban CSR	1.939.970.922	6.371.996.257	*CSR expenses*
Kerugian atas selisih kurs	1.544.545.972	-	*Loss on foreign exchange*
Kerugian penyertaan di entitas asosiasi	-	2.019.371.094	*Losses on investment in associate*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	6.460.964.341	8.821.660.997	*Others (each below Rp1 million)*
Jumlah	**39.695.411.798**	**137.705.389.636**	***Total***
PENDAPATAN OPERASI LAIN			***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan *cigarillos*	6.944.509.231	5.734.486.942	*Cigarillos revenue*
Penjualan barang bekas, ampas dan lainnya	4.887.884.714	929.785.459	*Scraps, dregs and other sales*
Pendapatan sewa	4.678.108.268	2.624.168.206	*Rental income*
Penjualan dan *fee* dari Peserta Koordinasi	3.575.561.805	1.695.425.241	*Sales and fees from Peserta Koordinasi*
Pendapatan kakao, bibit dan lainnya	2.576.044.426	4.230.359.785	*Cocoa, seed and other revenues*
Setoran gula polutan	2.472.356.566	1.493.879.538	*Revenue from pollutant sugar*
Denda keterlambatan/ administrasi	1.618.515.317	2.429.816.530	*Late penalty/administration*
Pendapatan sortir tembakau	1.211.035.559	543.651.967	*Tobacco sorting fee*
Pendapatan atas klaim asuransi	1.004.480.000	4.367.440.000	*Revenue from insurance claim*
Pengampunan pajak (Catatan 19h)	-	11.996.598.485	*Tax amnesty (Note 19h)*
Pendapatan bagi hasil	-	3.042.546.445	*Profit sharing income*
Pendapatan atas selisih kurs	-	2.172.647.378	*Gain on foreign exchange*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	13.909.166.550	8.941.775.554	*Others (each below Rp1 billion)*
Jumlah	**42.877.662.436**	**50.202.581.530**	***Total***

36. DIVIDEN TUNAI / *36. CASH DIVIDENDS*

Pada tahun 2017, tidak terdapat pembagian dividen tunai kepada pemegang saham.

Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 14 Juni 2016, menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp53.573.907.690 atau Rp29.028 per lembar saham kepada seluruh pemegang saham tanggal 31 Desember 2015, yang telah dibayarkan pada tahun 2016.

In 2017, there is no distribution of cash dividends to shareholders.

The General Shareholders' Meeting dated June 14, 2016, approved the distribution of cash dividends amounting to Rp53,573,907,690 or Rp29,028 per share to all shareholders as of December 31, 2015, which has been paid in 2016.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR

Laba (rugi) bersih per saham dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi rata-rata tertimbang saham, dengan rincian sebagai berikut:

37. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Earnings (loss) per share calculated from profit (loss) for the year attributable to owners of the parent entity divided by the weighted average shares, with details as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Years ended December 31,*		
	2017	**(Disajikan kembali/*As restated*) 2016**	
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	56.327.592.760	(158.125.789.700)	*Profit (loss) for the year attributable to owners of the parent entity*
Jumlah rata-rata tertimbang saham selama tahun berjalan	1.845.596	1.642.471	*The weighted average number of shares during the year*
Laba (rugi) per saham dasar	**30.520**	**(96.273)**	***Basic earnings (loss) per share***

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan tidak lagi mengakui rugi per saham dilusian mengingat Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi dilutif.

As of December 31, 2017, the Company no longer recognized diluted loss per share considering the Company has no potentially dilutive stock.

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama dari instrumen keuangan Kelompok Usaha adalah risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko harga komoditas dan risiko kredit. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas

Risiko suku bunga Kelompok Usaha terutama timbul dari piutang pihak berelasi jangka panjang, piutang petani tebu rakyat, utang KKPE, pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Kelompok Usaha.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2017, jika tingkat suku bunga Kelompok Usaha sebesar 1% lebih rendah/tinggi, dengan semua variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan sebelum kapitalisasi beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp15,1 miliar lebih rendah/tinggi.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Group's financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, commodity price risk, and credit risk. The management reviews and approves policies for managing each of these financial risk, which are described in more detail as follows:

Interest rate risk on fair value and cash flow

The Group interest rate risk mainly arises from long-term receivables from related party, sugarcane farmers receivables, KKPE payables, working capital loans and investment. Loans at various interest rates cause a risk of interest rates on the fair value to the Group.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures.

Sensitivity analysis of interest rate risk

On December 31, 2017, if the interest rate of the Group is 1% lower/higher, with all other variables constant, profit before tax expense before the capitalization of financial expenses for the year then ended amounted to Rp15.1 billion lower/higher.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko mata uang

Risiko mata uang merupakan risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang. Risiko Kelompok Usaha atas fluktuasi nilai tukar mata uang terutama timbul dari piutang dagang dari penjualan dalam mata uang asing dan hutang dari pembelian dalam mata uang asing.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk mengelola risiko mata uang. Namun harga produk utama Kelompok Usaha akan berfluktuasi sesuai dengan harga yang diperdagangkan di pasar internasional. Keterkaitan fluktuasi harga produk Kelompok Usaha dengan perubahan nilai tukar mata uang secara alamiah tersebut dipandang dapat mengurangi risiko mata uang Kelompok Usaha.

Analisis sensitivitas untuk risiko nilai mata uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2017, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan Euro melemah/menguat sebesar 10% dengan semua variabel lain konstan, laba sebelum manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebesar Rp5,6 miliar lebih tinggi/rendah.

Risiko harga komoditas

Kelompok Usaha terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor, antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar, dan lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut terutama timbul dari penjualan dan produk lainnya di mana marjin laba atas penjualan barang tersebut dapat terpengaruh fluktuasi harga pasar internasional.

Pada saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko harga komoditas.

Risiko kredit

Kelompok Usaha terekspos pada risiko kredit terutama berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk meminimalisasi risiko ini, Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya kepada pelanggan yang dapat dipercaya dan terbukti mempunyai sejarah kredit yang baik. Ini merupakan kebijakan Kelompok Usaha dimana semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Currency risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to trade receivables from sales denominated in foreign currency and loans denominated in foreign currency.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy to manage currency risk. But the price of the main product groups will fluctuate according to the traded price in the international market. Linkage price fluctuations of the Group's product with changes in the currency exchange rate naturally will reduce the currency risk of the Group.

Sensitivity analysis of foreign exchange risk

On December 31, 2017, if the value of the Rupiah against the US Dollar and the Euro weakened/ strengthened by 10% with all other variables constant, profit before tax benefit for the year then ended amounted to Rp5.6 billion higher/lower.

Commodity price risk

The Group is affected by the commodity price as a result of several factors, specifically from weather, government policies, the level of market supply and demand, and the global economic environment. These impact mainly arise from sales and other products where the profit margin on the sale of these goods can be affected by fluctuations in international market prices.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for commodity price risk exposures.

Credit risk

The Group is exposed to credit risk mainly from credits granted to their customers. To minimize this risk, the Group set a policy to ensure the sales of their products are made only to reliable customers with good credit history. Based on the Group' policy, all customers who will purchase on credit should pass the credit verification procedures.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dan dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Kelompok Usaha bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Untuk penjualan ekspor, Kelompok Usaha mensyaratkan pembayaran saat penyerahan dokumen penjualan.

Kelompok Usaha memiliki kebijakan yang membatasi jumlah kredit untuk tiap-tiap pelanggan dan saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih.

Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat pembayaran, Kelompok Usaha akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kelompok Usaha akan menempuh jalur hukum. Sesuai dengan evaluasi oleh Kelompok Usaha, penyisihan spesifik dapat dibuat jika utang dianggap tidak tertagih. Untuk menekan risiko kredit, Kelompok Usaha akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang terlambat dan/atau gagal bayar.

Selain itu, Kelompok Usaha melakukan monitoring portofolio kredit secara berkesinambungan, monitoring umur piutang, dan melakukan pengelolaan penagihan atas piutang.

Eksposur maksimum atas risiko kredit tercermin dari nilai tercatat setiap aset keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit risk (continued)

There is a policy to ensure the sales of products are only made to trusted customers and with a good track record or good credit history. It is the Group's policy that all customers that purchase on credit must pass the credit verification procedures. For export sales, the Group requires payment upon delivery of sales documents.

The Group has policies that limit the amount of credit for each customer and account receivables are monitored continuously to reduce the risk of bad debts.

When customers fail to make payment in accordance with the payment terms, the Group will contact the customer to follow up receivables that are past due. If the customers do not pay the debts that are due within a predetermined time period, the Group will take legal action. According to evaluations by the Group, a specific allowance can be made if the debt is considered uncollectible. To reduce the risk of credit, the Group will cease distribution of all products to the customers who are late and / or failed to pay.

In addition, the Group continuously monitor their credit portfolio and aging of receivables, and manage the collection of receivables.

The maximum credit risk exposure is reflected in the carrying amount of each financial asset after deducting the allowance for impairment losses in the consolidated statements of financial position.

	31 Desember 2017/*December 31, 2017*				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due not impaired*	Lewat jatuh tempo tidak mengalami penurunan nlai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan					*Financial assets*
Kas dan setara kas	319.687.905.713	-	-	319.687.905.713	*Cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	959.882.823.223	-	-	959.882.823.223	*Restricted cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	250.000.000	-	-	250.000.000	*Short-term investment*
Piutang usaha, neto	92.420.989.905	83.397.431.706	13.862.552.094	189.680.973.705	*Trade receivables, net*
Piutang petani tebu rakyat, neto	40.140.262.891	-	26.095.166.898	66.235.429.789	*Sugarcane farmers receivables, net*
Piutang lain-lain, neto	45.847.216.144	-	18.503.866.892	64.351.083.036	*Other receivables, net*
Piutang pihak berelasi jangka panjang	1.424.945.314.253	-	-	1.424.945.314.253	*Long-term receivables from related parties*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

	31 Desember 2016/*December 31, 2016*				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due not impaired*	Lewat jatuh tempo tidak mengalami penurunan nlai/ *Past due but not impaired*	Mengalami |penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan					*Financial assets*
Kas dan setara kas	235.427.132.592	-	-	235.427.132.592	*Cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	967.565.780.768	-	-	967.565.780.768	*Restricted cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	*Short-term investment*
Piutang usaha, neto	93.383.877.600	57.099.578.394	14.733.110.521	165.216.566.515	*Trade receivables, net*
Piutang petani tebu rakyat, neto	176.862.782.224	-	26.125.599.936	202.988.382.160	*Sugarcane farmers receivables, net*
Piutang lain-lain, neto	44.118.866.162	-	18.503.866.892	62.622.733.054	*Other receivables, net*
Piutang pihak berelasi jangka panjang	1.216.017.167.331	-	-	1.216.017.167.331	*Long-term receivables from related parties*

Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan, yang meliputi kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang petani tebu rakyat, piutang lain-lain, dan piutang pihak berelasi jangka panjang, berkaitan dengan eksposur Kelompok Usaha terhadap kerugian dari kemungkinan kegagalan pihak lain. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan.

Credit risk arising from the financial assets, which include cash and cash equivalents, restricted cash and cash equivalent, trade receivables, sugarcane farmers receivables, other receivables and long-term receivables from related parties, relates to the Group' exposure to losses from the possible default of the counterparties. There is no significant concentration of credit risk.

Sehubungan dengan penempatan dari kas dalam lembaga keuangan, Kelompok Usaha memiliki risiko kredit terpusat dari penempatan kas dan setara kas sebesar 74% yang ditempatkan pada satu bank. Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasi pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi. Kas di bank dan deposito bank jangka pendek ditempatkan pada bank dalam negeri yang memiliki reputasi baik.

With respect to placements of cash in financial institutions, the Group has concentration of credit risk from the placement of cash and cash equivalent, which is 74% place at one bank. The Group has a policy not to place investments in instruments that have a high credit risk and only put the investments in banks with high credit rating. Cash in banks and short-term bank deposits are placed with highly reputable domestic banks.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, risiko kredit maksimum Kelompok Usaha sebesar nilai tercatat aset moneter mereka terutama terdiri dari kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang petani tebu rakyat, piutang lain-lain, dan piutang pihak berelasi jangka panjang.

As of December 31, 2017 and 2016, the Group' maximum credit risk amounted to the carrying value of their monetary assets mainly consisting of cash and cash equivalents, restricted cash and cash equivalent, trade receivables, sugarcane farmers receivables, other receivables and long-term receivables from related parties.

Risiko likuiditas

Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Kelompok Usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya.

Liquidity risk is the risk that the Group experienced difficulties in fulfilling financial obligations which must be settled by delivery of cash or other financial assets.

Kelompok Usaha mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

The Group manages liquidity risk by monitoring production and actual cash flows continuously and monitoring the maturity date financial assets and liabilities.

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha, berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities, based on contractual cash flows which are not discounted.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

31 Desember 2017 / *December 31, 2017*

	Jumlah / *Total*	Dalam 1 tahun / *Within 1 year*	Lebih dari 1 tahun kurang dari 5 tahun / *More that a year less than 5 years*	Lebih dari 5 tahun / *More than 5 years*	
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak berelasi	-	-	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	186.634.757.466	186.634.757.466	-	-	*Third parties*
Beban akrual	47.816.496.526	47.816.496.526	-	-	*Accrued expenses*
Utang KKPE	174.662.945.262	174.662.945.262	-	-	*KKPE payables*
Pinjaman jangka pendek	475.713.711.590	475.713.711.590	-	-	*Short-term loans*
Utang lain-lain					*Other payables*
Pihak berelasi	4.974.858.079	4.974.858.079	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	273.331.054.528	273.331.054.528	-	-	*Third parties*
Pinjaman jangka panjang					*Long-term loans*
Pinjaman bank dan lainnya	1.190.701.646.841	163.746.821.341	1.002.277.839.356	24.676.986.144	*Bank and other loans*
Pinjaman sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	37.642.229.173	9.095.600.400	28.546.628.773	-	*Obligations under lease and consumer financing loans*
Liabilitas pengampunan pajak	839.290.471	177.370.417	661.920.054	-	*Tax amnesty liability*
Utang obligasi	731.747.397.260	731.747.397.260	-	-	*Bonds payable*
Jumlah	**3.124.064.387.196**	**2.067.901.012.869**	**1.031.486.388.183**	**24.676.986.144**	***Total***

31 Desember 2016 / *December 31, 2016*

	Jumlah / *Total*	Dalam 1 tahun / *Within 1 year*	Lebih dari 1 tahun kurang dari 5 tahun / *More that a year less than 5 years*	Lebih dari 5 tahun / *More than 5 years*	
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak berelasi	311.162.730.750	311.162.730.750	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	155.513.366.190	155.513.366.190	-	-	*Third parties*
Beban akrual	45.101.919.922	45.101.919.922	-	-	*Accrued expenses*
Utang KKPE	242.547.956.959	242.547.956.959	-	-	*KKPE payables*
Pinjaman jangka pendek	220.418.586.533	220.418.586.533	-	-	*Short-term loans*
Utang lain-lain					*Other payables*
Pihak berelasi	6.366.721.640	6.366.721.640	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	129.891.115.374	129.891.115.374	-	-	*Third parties*
Pinjaman jangka panjang					*Long-term loans*
Pinjaman bank dan lainnya	1.408.948.151.092	144.311.349.220	1.244.854.307.579	19.782.494.293	*Bank and other loans*
Pinjaman sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	17.173.453.300	3.783.568.400	13.389.884.900	-	*Obligations under lease and consumer financing loans*
Liabilitas pengampunan pajak	2.106.431.862	1.343.600.000	762.831.862	-	*Tax amnesty liability*
Utang obligasi	794.047.397.260	62.300.000.000	731.747.397.260	-	*Bonds payable*
Jumlah	**3.333.277.830.882**	**1.322.740.914.988**	**1.990.754.421.601**	**19.782.494.293**	***Total***

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

39. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN EXCHANGE

	Saldo dalam mata uang asing/ *Balance in foreign currencies*		Tanggal pelaporan 31 Desember 2017/ *Reporting date December 31, 2017*	
Aset moneter				***Monetary assets***
Kas dan setara kas	AS$	989.518	13.401.113.532	*Cash and cash equivalents*
	EUR	1.723.413	27.873.824.862	
Piutang usaha	AS$	776.361	10.518.143.849	*Trade receivables*
	EUR	677.292	10.034.790.152	
Piutang lain-lain	EUR	643.436	10.406.689.358	*Other receivables*
Jumlah aset moneter			**72.234.561.753**	***Total monetary assets***
Liabilitas moneter				***Monetary liabilities***
Pinjaman bank	AS$	699.100	9.471.406.800	*Bank Loans*
Utang usaha	AS$	258.128	3.497.112.471	*Trade payables*
Utang lain-lain	AS$	165.773	2.245.897.888	*Other payables*
	EUR	47.222	763.749.390	
Jumlah liabilitas moneter			**15.978.166.549**	***Total monetary liabilities***
Aset moneter, neto			**56.256.395.204**	***Monetary assets, net***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

40. NILAI WAJAR

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya sebagai berikut:

- Kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang petani tebu rakyat dan piutang lain-lain.

  Seluruh aset keuangan di atas merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

- Utang usaha, beban akrual, utang KKPE, utang lain-lain dan pinjaman jangka pendek.

  Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

- Pinjaman jangka panjang dan liabilitas pengampunan pajak, termasuk bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

  Liabilitas keuangan di atas merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga variabel dan tetap yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.

- Piutang pihak berelasi jangka panjang.

  NIlai wajar piutang pihak berelasi jangka panjang dicatat pada biaya perolehan karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

- Investasi saham

  Investasi saham biasa yang tidak memiliki kuotasi pasar dengan kepemilikan saham di bawah 20% dicatat pada biaya perolehan karena nilai wajarn ya tidak dapat diukur secara handal.

Obligasi
Nilai wajar obligasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp770.672.000.000.

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

40. FAIR VALUE

As of December 31, 2017 and 2016, the carrying amounts of financial assets and liabilities approximate their fair value as follows:

- *Cash and cash equivalents, restricted cash and cash equivalent, short-term investments, trade receivables, sugarcane farmers receivables and other receivables.*

  All of the above financial assets are due within 12 months, thus the carrying values of the financial assets approximate their fair values.

- *Trade payables, accrued expenses, KKPE payables, other payables and short-term loans.*

  All of the above financial liabilities are due within 12 months, thus the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.

- *Long-term loans and tax amnesty liability, including their current maturities.*

  The above financial liabilities are liabilities with floating and fixed interest rates which are adjusted with the movements of market interest rates, thus the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.

- *Long-term receivables from related parties.*

  The fair value of long-term receivables from related parties are carried at cost as their fair value cannot be reliably measured.

- *Investment in shares*

  Investments in unquoted ordinary shares representing equity ownership interest of below 20% are carried at cost as their fair values cannot be reliably measured.

Bonds
Fair value of bonds as of December 31, 2017 is Rp770,672,000,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

40. NILAI WAJAR (lanjutan)

Tanah

Nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah yang dinilai (Catatan 15).

Hirarki Nilai Wajar

Aset dan liabilitas keuangan diklasifikasikan secara keseluruhan berdasarkan tingkat terendah dari masukan (*input*) yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar. Penilaian dampak signifikan dari suatu input tertentu terhadap pengukuran nilai wajar membutuhkan pertimbangan dan dapat mempengaruhi penilaian dari aset dan liabilitas yang diukur dan penempatannya dalam hirarki nilai wajar.

Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga yang dikuotasikan (*quoted prices*) dalam sebuah pasar yang aktif. Jika pasar untuk sebuah instrumen keuangan tidak aktif, entitas menetapkan nilai wajar dengan menggunakan metode penilaian. Tujuan dari penggunaan metode penilaian adalah untuk menetapkan harga transaksi yang terbentuk pada tanggal pengukuran dalam sebuah transaksi pertukaran yang wajar dengan pertimbangan bisnis normal.

Metode penilaian termasuk penggunaan harga dalam transaksi pasar yang wajar (*arm's length*) terakhir antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan, jika tersedia, referensi kepada nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan.

Jika terdapat metode penilaian yang biasa digunakan oleh para peserta pasar untuk menentukan harga dari instrumen dan metode tersebut telah didemonstrasikan untuk menyediakan estimasi yang andal atas harga yang diperoleh dari transaksi pasar yang aktual, entitas harus menggunakan metode tersebut. Metode penilaian yang dipilih membuat penggunaan maksimum dari input pasar dan bergantung sedikit mungkin atas input yang spesifik untuk entitas (*entity-specific input*). Metode tersebut memperhitungkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh peserta pasar dalam menentukan sebuah harga dan selaras dengan metode ekonomis untuk penilaian sebuah instrumen keuangan. Secara berkala, Perusahaan menelaah metode penilaian dan mengujinya untuk validitas dengan menggunakan harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi dan pengemasan kembali) atau berdasarkan data pasar yang tersedia dan dapat diobservasi.

40. FAIR VALUE (continued)

Land

The fair value of land was determined by using market comparable method. This means that valuations performed by the valuer are based on active market prices, significantly adjusted for difference in the nature, location or condition of the specific land (Note 15).

Fair Value Hierarchy

Financial assets and liabilities are classified in their entirety based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurements. The assessment of the significance of a particular input to the fair value measurements requires judgement, and may affect the valuation of the assets and liabilities being measured and their placement within the fair value hierarchy.

The best evidence of fair value is quoted prices in an active market. If the market for a financial instrument is not active, an entity establishes fair value by using a valuation technique. The objective of using a valuation technique is to establish what the transaction price would have been on the measurement date in an arm's length exchange motivated by normal business considerations.

Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis.

If there is a valuation technique commonly used by market participants to price the instrument and that technique has been demonstrated to provide reliable estimates of prices obtained in actual market transactions, the entity uses that technique. The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs and relies as little as possible on entity-specific inputs. It incorporates all factors that market participants would consider in setting a price and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. Periodically, the Company calibrates the valuation technique and tests it for validity using prices from any observable current market transactions in the same instrument (i.e., without modification or repackaging) or based on any available observable market data.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

40. NILAI WAJAR (lanjutan)

Hirarki Nilai Wajar (lanjutan)

Hirarki nilai wajar Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

40. FAIR VALUE (continued)

Fair Value Hierarchy (continued)

The Company's fair value hierarchy as of December 31, 2017 and 2016 is as follows:

	31 Desember 2017/*December 31, 2017*				
	Total/ *Total*	**Level 1/ *Level 1***	**Level 2/ *Level 2***	**Level 3/ *Level 3***	
Aset tidak lancar					***Non-current assets***
Revaluasi tanah	-	-	-	7.126.062.047.189	*Revaluation of land*

	31 Desember 2016/*December 31, 2016*				
	Total/ *Total*	**Level 1/ *Level 1***	**Level 2/ *Level 2***	**Level 3/ *Level 3***	
Aset tidak lancar					***Non-current assets***
Revaluasi tanah	-	-	-	7.126.062.047.189	*Revaluation of land*

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Level 1 dan Level 2.

For the years ended December 31, 2017 and 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2 fair value measurements.

41. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Raw Sugar

Pada tanggal 5 Agustus 2016, Perusahaan dan beberapa perusahaan BUMN produsen gula melakukan perjanjian kerjasama importasi *raw sugar*, pengolahan *raw sugar* dan distribusi gula hasil pengolahan *raw sugar* impor dengan Perum BULOG. Dalam perjanjian ini, Perum BULOG bertanggung jawab menyediakan pendanaan, mendistribusikan dan melakukan penjualan gula; sementara Perusahaan bertanggung jawab untuk melaksanakan importasi dan pengolahan *raw sugar* hingga menjadi gula. Di tahun 2016, *raw sugar* diimpor dari Agrocrop International Pte.Ltd. yang didanai oleh Perum BULOG. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan mencatat utang usaha sebesar Rp311.162.730.750 (Catatan 10). Di tahun 2017, Perusahaan tidak melakukan impor atas *raw sugar.*

41. COMMITMENT AND CONTINGENCY

Raw Sugar

On August 5, 2016, the Company and several sugar producers BUMN companies entered into coorperation agreement on raw sugar importation, raw sugar processing and distribution of sugar as result of raw sugar import with Perum BULOG. In this agreement, Perum BULOG is responsible to provide financing, distribute, and sell sugar; while the Company responsible to do the importation and processing of raw sugar into sugar. In 2016, raw sugar was imported from Agrocrop International Pte.Ltd. which was financed by Perum BULOG. As of December 31, 2016, the Company's accounts payable amounted to Rp311,162,730,750 (Note 10). In 2017, the Company did not import raw sugar.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

41. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Off-taker gula

Pada tanggal 19 September 2017, Perusahaan dan BUMN produsen gula (PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIV dan PT RNI (Persero)) mengadakan kesepakatan dengan Perum BULOG dimana Perum BULOG setuju untuk melakukan *off-taker* gula milik BUMN produsen gula dengan harga dan kuantum tertentu. Alokasi *off-taker* gula untuk Perusahaan adalah 50.000 ton (tidak diaudit).

Burger Sohne AG Burg ("BSB")

Pada tanggal 15 April 2002, BSB memberikan pinjaman dana kepada Perusahaan sebesar EUR1.558.000 untuk membangun pabrik *bobbin* baru diatas tanah milik Perusahaan di Kawasan Berikat Jelbuk Jember yang akan digunakan proses produksi *cutting* tembakau untuk kepentingan BSB. Pinjaman tersebut berjangka waktu 20 tahun sampai dengan 31 Desember 2022 dan tidak dikenakan bunga (kontraprestasi). Perusahaan akan dibebaskan dari kewajiban pembayaran pinjaman dengan syarat:

- Perusahaan menggunakan pinjaman semata-mata hanya untuk pembangunan pabrik *bobbin* baru untuk proses produksi *cutting* tembakau untuk kepentingan BSB.
- Proses produksi *cutting* tembakau untuk kepentingan BSB akan terus berlangsung sampai dengan 31 Desember 2022.
- Perusahaan mengikatkan diri atas pembelian mesin dan peralatan milik BSB yang telah ditempatkan di lokasi Pabrik *bobbin* dengan harga EUR265.682. Selain itu, BSB juga mengikatkan diri untuk membeli kembali mesin dan peralatan tersebut dengan harga jual yang akan ditetapkan kemudian sampai dengan berakhirnya perjanjian, yaitu tanggal 31 Desember 2022.

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi ("KKPE")

Dalam rangka pelaksanaan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi ("KKPE") tebu rakyat dengan pola kemitraan, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa Bank dalam pemberian kredit kepada petani tebu. Perusahaan bertindak sebagai penjamin (avalis).

41. COMMITMENT AND CONTINGENCY (continued)

Off-taker of sugar

On September 19, 2017, the Company and BUMN sugar producers (PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIV dan PT RNI (Persero)) entered into an agreement with Perum BULOG whereby Perum BULOG agreed to act as off-taker of BUMN sugar at certain price and quantity. The allocation of the off-taker sugar for the Company is 50,000 tons (unaudited).

Burger Sohne AG Burg ("BSB")

On April 15, 2002, BSB provided funds to the Company amounting to EUR1,558,000 to build a new bobbin factory on the land owned by the Company in bonded zone of Jember Jelbuk that will be used for tobacco cutting production process for BSB interests. The loan period is 20 years up to December 31, 2022 and bears no interest. The Company will not pay the funds provided the following conditions:

- *The company use the loan solely for the construction of a new bobbin factory for tobacco cutting production processes for BSB interests.*
- *The process of tobacco cutting production for BSB interests continued until December 31, 2022.*
- *The Company binds itself on the purchase of machinery and equipment owned by BSB that has been placed in bobbin factory amounting to EUR265,682. In addition, BSB also binds itself to buy back the equipment and machinery with selling price that will be determined later until the expiry of the agreement which is dated December 31, 2022.*

Food Security and Energy Credit ("KKPE")

In connection with implementation of the Food Security and Energy Credit ("KKPE") program in the form of partnership, the Company entered into agreements with several banks to provide credit to sugarcane farmers. The Company acts as guarantor (avalist).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

41. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Pengelolaan Pabrik Gula Camming dan Bone PT Perkebunan Nusantara XIV

Menunjuk surat dari Kementerian BUMN nomor S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan S-187/MBU/2009 tanggal 12 Agustus 2009, dalam rangka peningkatan kinerja Pabrik Gula Camming dan Bone dari PT Perkebunan Nusantara XIV, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan melalui Kuasa Direksi di Makassar untuk melakukan perencanaan dan implementasi kegiatan produksi mulai dari tanam, persiapan pabrik, giling dan penjualan maupun menerima manfaat dari Pabrik Gula Bone dan Camming.

Pada tanggal 7 Desember 2011, berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.S-53/MBU/2011 yang menyatakan bahwa kerjasama pengelolaan antara PT Perkebunan Nusantara X dengan PT Perkebunan Nusantara XIV atas pengelolaan PG Bone dan PG Caming serta kerjasama antara PT Rajawali Nusantara Indonesia dengan PT Perkebunan Nusantara XIV atas pengelolaan PG Takalar tidak dapat dioptimalkan, maka Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham dari ketiga perusahaan tersebut memutuskan bahwa pengelolaan PG Bone, PG Caming dan PG Takalar akan dilakukan dengan membentuk perusahaan baru (*new company*) yang didirikan bersama antara PT Perkebunan Nusantara X dan PT Perkebunan Nusantara XIV. Langkah awal yang dilakukan adalah mengalihkan pengelolaan PG Takalar dari PT Rajawali Nusantara Indonesia kepada Perusahaan (Catatan 12).

Proyek *Bioethanol* Bantuan NEDO - Jepang berlokasi di PG Gempolkrep

Pada tanggal 2 Agustus 2010, Perusahaan melalui Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, membuat perjanjian *Memorandum of Understanding* dengan New Energy and Industrial Technology Development Organization of Japan ("NEDO") mengenai penerushibahan model proyek *Bioethanol* kepada Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Melakukan kerjasama model proyek untuk memproduksi *bioethanol* dari tetes di Pabrik Gula dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan untuk melestarikan lingkungan di wilayah Republik Indonesia. Penunjukan Perusahaan sebagai pelaksana proyek dan penerapannya.
- NEDO memberikan bantuan berupa peralatan utama (*main equipment*) pabrik *bioethanol*.

41. COMMITMENT AND CONTINGENCY (continued)

Management of Camming and Bone Sugar Factory of PT Perkebunan Nusantara XIV

Referring to the letter from the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) No. S-549/MBU/2009 dated July 31, 2009 and S-187/MBU/2009 dated August 12, 2009, in order to improve the performance of the Camming and Bone Sugar Factory of PT Perkebunan Nusantara XIV, the Company entered into agreement of management cooperation through the Board of Directors' Power of Attorney in Makassar to perform the planning and implementation of production activities starting from planting, plant preparation, milling and sales or receiving benefit from the Bone and Camming Sugar Factory.

On December 7, 2011, based on letter of the Minister of State-Owned Enterprises ("BUMN") No.S-53/MBU/2011, which states that management cooperation between PT Perkebunan Nusantara X with PT Perkebunan Nusantara XIV for managing Bone and Caming Sugar Factory and cooperation between PT Rajawali Nusantara Indonesia with PT Perkebunan Nusantara XIV for managing Takalar Sugar Factory cannot be optimalized, the Ministry of BUMN as shareholder of these companies, decided that the management of Bone, Caming and Takalar Sugar Factory will be conducted through a new company jointly established between PT Perkebunan Nusantara X and PT Perkebunan Nusantara XIV. The first step is to transfer the management of Takalar Sugar Factory from PT Rajawali Nusantara Indonesia to the Company (Note 12).

Bioethanol Project granted by NEDO - Japan located in Gempolkrep Sugar Factory

On August 2, 2010, the Company, through the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, entered into a Memorandum of Understanding Agreement with the New Energy and Industrial Technology Development Organization of Japan ("NEDO") regarding the continued grant of Bioethanol project model to the Company with the following conditions:

- *Doing cooperation of project model to produce bioethanol from molasses at the Sugar Factory with the aim to reduce using fossil fuels and to preserve the environment in area. The appointment of the Company, as the executor of the project and its application.*
- *NEDO provides assistance in the form of main equipment of Bioethanol plant.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2017 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Proyek *Bioethanol* Bantuan NEDO - Jepang berlokasi di PG Gempolkrep (lanjutan)

- Pembagian kerja, pembiayaan dan tanggung jawab dilakukan bersama sesuai dengan pembagiannya masing masing.
- Kepemilikan alat dan pengalihannya:
  - Selama masa pembangunan proyek, kepemilikan peralatan yang disediakan oleh NEDO sesuai dengan pembagian kerja merupakan milik NEDO.
  - Setelah pembangunan proyek selesai, peralatan utama bantuan NEDO menjadi milik Kementerian Perindustrian secara otomatis tanpa biaya dan Kementerian Perindustrian langsung saat itu juga menerushibahkan kepada Perusahaan.

41. COMMITMENT AND CONTINGENCY (continued)

Bioethanol Project granted by NEDO - Japan located in Gempolkrep Sugar Factory (continued)

- *The job allocation, financing and responsibilities performed together in accordance with their respective division.*
- *Ownership of equipment and its transfer:*
  - *During the project development, ownership of the equipment supplied by NEDO in accordance with the job allocation is owned by NEDO.*
  - *After the construction project is completed, the NEDO main equipment belongs to the Ministry of Industry automatically without cost, and the Ministry of Industry then grants to the Company.*

42. INFORMASI SEGMEN

Kelompok Usaha mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi lima segmen usaha, yang terdiri atas segmen gula, segmen tetes, segmen tembakau, segmen rumah sakit dan segmen lainnya. Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba sehubungan dengan segmen operasi Kelompok Usaha:

42. SEGMENT INFORMATION

The Group classifies its business activities into five business segments, consisting of sugar segment, molasses segment, tobacco segment, the hospital segment and other segments. Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Performance is evaluated based on segment operating profit or loss and is measured consistently by operating profit or loss in the consolidated financial statements.

The following table presents information with respect to revenue and profit of Group operating segments:

	2017						
	Gula / *Sugar*	Tetes / *Molasses*	Tembakau / *Tobacco*	Rumah Sakit / *Hospital*	Lain-lain / *Others*	Jumlah / *Total*	
Laba usaha segmen							***Business segmen profit***
Pendapatan usaha							***Revenue***
Pendapatan eksternal	1.302.238.962.780	183.072.427.440	327.735.658.600	332.590.748.397	448.304.429.219	2.593.942.226.436	*External revenue*
Beban pokok pendapatan	(989.620.693.252)	(158.572.217.637)	(309.927.479.604)	(257.666.726.352)	(350.873.650.516)	(2.066.660.767.361)	*Cots of sales*
Laba kotor	312.618.269.528	24.500.209.803	17.808.178.996	74.924.022.045	97.430.778.703	527.281.459.075	*Gross profit*
Beban usaha	(184.101.659.128)	(25.881.530.653)	(48.023.646.433)	(21.573.757.024)	(65.876.037.134)	(345.456.630.372)	*Operating expense*
Laba operasi	128.516.610.400	(1.381.320.850)	(30.215.467.437)	53.350.265.021	31.554.741.569	181.824.828.703	*Operating income*
Beban keuangan - neto						(87.880.310.599)	*Finance expenses, net*
Laba sebelum pajak						93.944.518.104	*Income before tax*
Beban pajak penghasilan						(29.198.707.528)	*Income tax expense*
Laba bersih tahun berjalan						**64.745.810.576**	*Net income*
Informasi geografis							***Geographic information***
Penjualan bersih							*Net sales*
Indonesia	1.302.238.962.780	183.072.427.440	17.706.546.591	332.590.748.397	187.191.155.861	2.022.799.841.069	*Indonesia*
Negara - negara asing	-	-	310.029.112.009	-	261.113.273.358	571.142.385.367	*Foreign countries*
Jumlah pendapatan	**1.302.238.962.780**	**183.072.427.440**	**327.735.658.600**	**332.590.748.397**	**448.304.429.219**	**2.593.942.226.436**	***Total sales***
Aset segmen	6.615.131.903.758	1.154.619.373.272	4.559.512.010.151	284.827.147.867	442.704.937.091	13.056.795.372.139	*Segment assets*
Liabilitas segmen	2.561.071.072.734	447.014.862.278	644.547.075.256	163.717.773.103	203.224.041.670	4.019.574.825.041	*Segment liabilities*
Informasi segmen lainnya							***Other segment information***
Pengeluaran modal	109.469.142.765	19.106.980.004	6.687.237.243	69.834.855.673	32.484.829.663	237.583.045.348	*Capital expenditures*
Penyusutan	169.655.341.039	30.256.411.549	10.121.519.535	23.419.603.477	13.484.948.811	246.937.824.411	*Depreciation*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

42. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

42. SEGMENT INFORMATION (continued)

	2016						
	Gula / *Sugar*	Tetes / *Molasses*	Tembakau / *Tobacco*	Rumah Sakit / *Hospital*	Lain-lain / *Others*	Jumlah / *Total*	
Laba usaha segmen							***Business segmen profit***
Pendapatan usaha							***Revenue***
Pendapatan eksternal	1.021.885.407.268	205.045.723.342	331.435.383.035	293.483.314.117	408.523.692.027	2.260.373.519.789	*External revenue*
Beban pokok pendapatan	(921.830.391.820)	(233.225.189.806)	(300.914.503.253)	(224.383.436.056)	(329.221.417.356)	(2.009.574.938.291)	*Cots of sales*
Laba kotor	100.055.015.448	(28.179.466.464)	30.520.879.782	69.099.878.061	79.302.274.671	250.798.581.498	*Gross profit*
Beban usaha	(208.434.596.477)	(45.513.133.617)	(73.945.403.039)	(24.142.613.110)	(52.401.142.076)	(404.436.888.319)	*Operating expense*
Laba operasi	(108.379.581.029)	(73.692.600.081)	(43.424.523.257)	44.957.264.951	26.901.132.595	(153.638.306.821)	*Operating income*
Beban keuangan - neto						(53.916.240.273)	*Finance expenses, net*
Laba (rugi) sebelum pajak						(207.554.547.094)	*Income (loss) before tax*
Beban pajak penghasilan						54.998.433.249	*Income tax expense*
Laba bersih tahun berjalan						**(152.556.113.845)**	*Net income*
Informasi geografis							***Geographic information***
Penjualan bersih							*Net sales*
Indonesia	1.021.885.407.268	205.045.723.342	39.814.431.638	293.483.314.117	177.551.289.182	1.737.780.165.547	*Indonesia*
Negara - negara asing	-	-	291.620.951.397	-	230.972.402.845	522.593.354.242	*Foreign countries*
Jumlah pendapatan	**1.021.885.407.268**	**205.045.723.342**	**331.435.383.035**	**293.483.314.117**	**408.523.692.027**	**2.260.373.519.789**	***Total sales***
Aset segmen	6.149.535.921.592	1.605.194.724.790	4.687.707.219.912	206.013.415.552	415.567.069.217	13.064.018.351.063	*Segment assets*
Liabilitas segmen	2.371.482.204.409	579.020.667.398	768.057.436.912	100.610.074.145	193.552.166.339	4.012.722.549.203	*Segment liabilities*
Informasi segmen lainnya							***Other segment information***
Pengeluaran modal	225.789.131.040	61.175.179.713	13.020.684.288	39.352.608.283	31.093.166.220	370.430.769.544	*Capital expenditures*
Penyusutan	149.126.258.624	40.973.396.909	9.878.380.044	15.895.039.259	10.279.886.367	226.152.961.203	*Depreciation*

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015

Pada tanggal 5 Februari 2018, Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Penggunaan Tambahan Dana PMN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku pemegang saham Perusahaan. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan kondisi, baik secara ekonomi maupun sosial yang menyebabkan program awal penggunaan dana PMN tidak layak untuk dilanjutkan.

Perusahaan telah memperoleh Laporan Studi Kelayakan Realokasi Penggunaan Dana PMN 2015 PTPN X dari GMPJ Consulting tanggal 13 Februari 2018, serta Laporan Hasil Reviu atas Rencana Realokasi Penggunaan Tambahan Dana PMN Tahun 2015 pada PT Perkebunan Nusantara X oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") Jawa Timur yang mendukung perubahan ini. Program kegiatan PMN setelah realokasi adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas giling PG Gempolkrep
- Pemantapan kinerja pabrik Bioethanol di PG Gempolkrep
- Pengembangan lahan perkebunan

Pada tanggal 27 Maret 2018, Menteri BUMN dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku pemegang saham Perusahaan telah menyetujui perubahan penggunaan tambahan dana PMN yang tertuang dalam Surat Persetujuan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara X No. S-172/MBU/03/2018.

43. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

State Capital Investment (PMN) 2015

On February 5, 2018, the Company submitted Application Letter for Approval of Changes related to the Additional Funds of PMN to PT Perkebunan Nusantara III (Persero), as a shareholder. This is due to changes in the conditions, either in economic or social, which caused the initial program of exertion PMN funds not feasible to be continued.

The Company has obtained Reallocation PMN Funds Exertion Feasibility Study Report 2015 PTPN X from GMPJ Consulting dated February 13, 2018, and Review Report of Reallocation Planning Additional Exertion PMN Funds 2015 from Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") East Java which supported the changes. The PMN activity program after reallocation are as follows:

- *The increase in milling capacity Gempolkrep Sugar Factory*
- *Stabilization of Bioethanol plant performance in Gempolkrep Sugar Factory*
- *On-farm development*

On March 27, 2018, Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) and PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as the Company's shareholders has approved the changes of the additional funds of PMN as stated in the Shareholders Agreement of PT Perkebunan Nusantara X No. S-172/MBU/03/2018.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

44. STANDAR AKUNTANSI BARU

Efektif 1 Januari 2017, Kelompok Usaha menerapkan amandemen dan penyesuaian PSAK. Penerapan dari amandemen dan penyesuaian PSAK berikut, tidak menimbulkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian

- PSAK No. 1 (Amandemen 2015): Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan, memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan.

- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja, mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut.

- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan - Pengungkapan, mengklarifikasi apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset.

Standar akuntansi baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif

Berikut ini adalah beberapa amandemen, interpretasi dan standar akuntansi baru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Kelompok Usaha namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut:

Efektif pada 1 Januari 2018:

- PSAK No. 2 (Amandemen 2016): Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan.

  Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

44. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Effective January 1, 2017, the Group adopts amendments and improvements to PSAK. The adoption of these amendments and improvements does not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements.

- *PSAK No. 1 (Amendments 2015): Presentation of Financial Statements on Disclosures Initiative, provides clarification related to the application of materiality, flexibility in the systematic sequence of the notes to the financial statements.*

- *PSAK No. 24 (Improvement 2016): Employee Benefits, which clarifies that the market of high quality corporate bonds is assessed based on the currency in which the obligation is denominated.*

- *PSAK No. 58 (Improvement 2016): Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operation.*

- *PSAK No. 60 (Improvement 2016): Financial Instrument - Disclosure, clarifies whether the entity has a continuing involvement in financial assets.*

New accounting standards, amendments and interpretations issued but not yet effective

The following are several amendments, interpretations and new accounting standards that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK") that are considered relevant to the financial reporting of the Group but not yet effective for consolidated financial statements as of December 31, 2017 and for the year then ended:

Effective on or after January 1, 2018:

- *PSAK No. 2 (Amendment 2016): Statement of Cash Flow on the Disclosure Initiative.*

  This amendment requires entities to provide disclosures that enable the financial statements users to evaluate the changes in liabilities arising from financing activities, including changes from cash flow and non-cash changes.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

44. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Efektif pada 1 Januari 2018: (lanjutan)

- PSAK No. 46 (Amandemen 2016): Pajak Penghasilan atas Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang belum Direalisasi.

  Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

- PSAK No. 69: Agrikultur.

  PSAK ini mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Selisih yang timbul dari perubahan nilai wajar aset diakui dalam laba rugi periode terjadinya. Pengecualian diberikan apabila nilai wajar secara jelas tidak dapat diukur secara andal.

Efektif pada 1 Januari 2019:

- ISAK No. 33 (Diadopsi dari IFRIC 22): Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka.

  Interpretasi ini mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

- ISAK No. 34 (Diadopsi dari IFRIC 23): Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

  Interpretasi ini menyediakan pedoman dalam mempertimbangkan ketidakpastian perlakuan pajak secara terpisah atau bersamaan, yang diperiksa oleh otoritas perpajakan, metode yang sesuai untuk merefleksikan ketidakpastian dan akuntansi atas perubahan fakta dan keadaan.

44. NEW ACCOUNTING STANDARDS (continued)

Effective on or after January 1, 2018: (continued)

- *PSAK No. 46 (Amendment 2016): Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealized Losses.*

  This amendment clarifies that to determine whether the taxable income will be available so that the deductible temporary differences can be utilized, estimates of the most likely future taxable income can include recovery of certain assets of the entity exceeding their carrying amounts.

- *PSAK No. 69: Agriculture.*

  This PSAK provides that a biological asset or agricultural products are recognized when fulfilling some of the same criteria as the criteria for asset recognition. These assets are measured at initial recognition, and at the end of each financial reporting period at fair value less costs to sell. Differences arising from changes in fair value of assets recognized in profit and loss as incurred. Exceptions are granted if the fair value clearly can't be measured reliably.

Effective on or after January 1, 2019:

- *ISAK No. 33 (Adopted from IFRIC 22): Foreign currency Transaction and Advance Consideration.*

  This interpretation clarifies the use of the transaction date to determine the exchange rate used in the initial recognition of the related asset, expense or income at the time the entity has received or paid advance consideration in the foreign currency.

- *ISAK No. 34 (Adopted from IFRIC 23): Uncertainty over Income Tax Treatments.*

  The interpretation provides guidance on considering uncertain tax treatments separately or together, examination by tax authorities, the appropriate method to reflect uncertainty and accounting for changes in facts and circumstances.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

44. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Efektif pada 1 Januari 2020:

- PSAK No. 71 (Diadopsi dari IFRS 9): Instrumen Keuangan.

  Standar akuntansi ini diperkirakan akan mempengaruhi klasifikasi dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan Perusahaan. Oleh karena itu, memerlukan pertimbangan Perusahaan, termasuk evaluasi dari model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktual. Standar ini juga mensyaratkan pengukuran penurunan nilai berdasarkan model rugi kredit yang diharapkan dari sebelumnya model kerugian yang terjadi tercatatnya.

- PSAK No. 72 (Diadopsi dari IFRS 15): Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

  Standar akuntansi ini mengharuskan Perusahaan menerapkan model 5-langkah dalam mengakui pendapatan. Perusahaan harus mengindentifikasi pelaksanaan obligasi yang disyaratkan tiap kontrak dengan pelanggan, termasuk pertimbangan variabel, dan hanya mengakui pendapatan sesuai harga transaksi yang dialokasi/ditentukan pada saat pelaksanaan obligasi dipenuhi.

- PSAK No. 73 (Diadopsi dari IFRS 16): Sewa.

  Standar akuntansi ini mensyaratkan lessee untuk mencatat serupa dengan sewa dalam model tunggal neraca seperti sewa pembiayaan dalam PSAK No. 30 yang digantikannya. Standar mengecualikan dua pengakuan atas sewa atas aset dengan nilai rendah dan sewa jangka pendek. Saat tanggal sewa dimulai, lessee mengakui liabilitas atas pembayaran sewa dan aset atas hak penggunaan aset sewa selama jangka waktu sewa. Lessee disyaratkan untuk mengakui secara terpisah beban bunga untuk liabilitas sewa dan beban depresiasi untuk hak penggunaan aset. Perlakuan akuntansi untuk lessor secara substansi tidak berubah dari PSAK No. 30 yang digantikan.

44. NEW ACCOUNTING STANDARDS (continued)

Effective on or after January 1, 2020:

- *PSAK No. 71 (Adopted from IFRS 9): Financial Instruments.*

  This accounting standard are expected to have impact to the Company's classification and measurement of financial assets and liabilities. Thus, it requires the Company's exercise of judgment, including the assessment of business model and characteristics of contractual cash flows. The standard also require impairment model under expected credit loss ("ECL") model from the previous requirement under occurred loss model.

- *PSAK No. 72 (Adopted from IFRS 15): Revenue from Contracts with Customers.*

  This accounting standard requires the Company to apply 5-step model in recognizing revenue. The Company will be required to identify performance obligation promised in each contract with the customer, including any variable consideration, and only recognize revenue in accordance with the determined/allocated transactions price upon satisfaction of the performance obligation.

- *PSAK No. 73 (Adopted from IFRS 16): Leases.*

  This accounting standard requires lessees to account all leases under a single on-balance sheet model in a similar way to finance leases under the superseded PSAK No. 30. The standard includes two recognition exemptions for lessees such as for leases of 'low-value' assets and short-term leases. At the commencement date of a lease, a lessee will recognize a liability to make lease payments and an asset representing the right to use the underlying asset during the lease term. Lessees will be required to separately recognize the interest expense on the lease liability and the depreciation expense on the right-of-use asset. Lessor accounting is substantially unchanged from the superseded PSAK No. 30.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

44. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Efektif pada 1 Januari 2020: (lanjutan)

- PSAK No. 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama - Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

  Standar akuntansi ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK No. 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama di mana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

- PSAK 71 (Amandemen 2017): Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif.

  Amandemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah poko terutang.

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari amandemen dan penyesuaian standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

44. NEW ACCOUNTING STANDARDS (continued)

Effective on or after January 1, 2020: (continued)

- *PSAK No. 15 (2017 Amendment): Investments in Associates and Joint Ventures - Long-term Interests in Associates and Joint Ventures.*

  This accounting standard gives guidance that the entity also applies PSAK No. 71 on the financial instruments to associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantively form the entity's net investment in an associates or joint ventures.

- *PSAK No. 71 (2017 Amendment): Financial Instruments - Prepayment Features with Negative Compensation.*

  This amendment provide that a financial asset with prepayment features that may result in negative compensation qualifies as a contractual cashflow derived solely from the principal and interest of the principal amount owed.

The Group is presently evaluating and has not yet determined the effects of these amendments and improvements to accounting standards on its consolidated financial statements.

45. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Kelompok Usaha menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2016/31 Desember 2015 untuk:

(i) Mengkoreksi perhitungan liabilitas imbalan kerja, penyajian penghasilan komprehensif lain dan akun terkait lainnya.
(ii) Reklasifikasi komponen ekuitas lainnya atas kuasi reorganisasi Entitas Anak ke saldo laba.

45. RESTATEMENTS AND RECLASSFICATIONS OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Group restated its consolidated financial statements as of December 31, 2016 and for the year then ended, and the consolidated statement of financial position as of January 1, 2016/December 31, 2015 to:

(i) Correct calculation of employee benefit liability, presentation of other comprehensive income and other related accounts.
(ii) Reclassification of other component of equity arising from quasi-reorganization in a subsidiary to retained earnings.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

45. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Akun-akun yang dipengaruhi atas penyajian kembali dan reklasifikasi diikhtisarkan sebagai berikut:

45. RESTATEMENTS AND RECLASSFICATIONS OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

The accounts were affected by restatements and reclassifications are summarized as follows:

	Dilaporkan sebelumnya/ *Previously reported*	Penyesuaian atas penyajian kembali/ *Restatement adjustment*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah penyajian kembali/ *After restatement*	
Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016					***Consolidated statement of financial position as of December 31, 2016***
Aset tidak lancar					***Non-current assets***
Aset pajak tangguhan, neto	279.468.528.493	2.896.642.802	-	282.365.171.295	*Deferred tax assets, net*
Liabilitas jangka panjang					***Non-current liabilities***
Liabilitas imbalan kerja	739.529.788.604	11.586.571.211	-	751.116.359.815	*Employee benefits liability*
Ekuitas					***Equity***
Penghasilan komprehensif lain	6.792.289.390.771	308.850.236.729	-	7.101.139.627.500	*Other comprehensive income*
Saldo laba (akumulasi rugi) - Belum ditentukan penggunaannya	(267.702.743.737)	(300.813.164.880)	-	(568.515.908.617)	*Retained earnings (accumulated losses) - Unappropriated*
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016					***Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2016***
Beban umum dan administrasi	(306.666.606.157)	9.281.443.733	-	(297.385.162.424)	*General and administrative expenses*
Manfaat (beban) pajak	61.052.996.256	(6.054.563.007)	-	54.998.433.249	*Tax benefit (expense)*
Kerugian pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	22.529.699.148	(19.104.067.941)	-	3.425.631.207	*Re-measurement losses on employee benefits liability*
Pajak tangguhan terkait dengan pengkuran kembali liabilitas imbalan kerja	(5.632.424.786)	4.776.016.985	-	(856.407.801)	*Deferred tax effect related to the re-measurement of employee benefits liability*
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					*Profit (loss) for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk	(161.352.670.426)	3.226.880.726	-	(158.125.789.700)	*Owners of the parent entity*
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					*Total comprehensive income (loss) for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk	(144.133.737.315)	(11.101.170.230)	-	(155.234.907.545)	*Owners of the parent entity*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

45. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Akun-akun yang dipengaruhi atas penyajian kembali dan reklasifikasi diikhtisarkan sebagai berikut: (lanjutan)

45. RESTATEMENTS AND RECLASSFICATIONS OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

The accounts were affected by restatements and reclassifications are summarized as follows: (continued)

	Dilaporkan sebelumnya/ *Previously reported*	Penyesuaian atas penyajian kembali/ *Restatement adjustment*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah penyajian kembali/ *After restatement*	
Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2016/ 31 Desember 2015					***Consolidated statement of financial position as of January 1, 2016/December 31, 2015***
Aset tidak lancar					***Non-current assets***
Aset pajak tangguhan	203.670.893.990	4.175.188.824	-	207.846.082.814	*Deferred tax assets, net*
Liabilitas jangka panjang					***Non-current liabilities***
Liabilitas imbalan kerja karyawan	716.358.998.388	16.700.755.297	-	733.059.753.685	*Employee benefits liability*
Ekuitas					***Equity***
Penghasilan komprehensif lain	6.799.992.877.349	326.069.169.840	-	7.126.062.047.189	*Other comprehensive income*
Komponen ekuitas lainnya	985.137.116.356	-	(10.137.116.356)	975.000.000.000	*Other component equity*
Saldo laba (akumulasi rugi) - Belum ditentukan penggunaannya	18.387.240.193	(306.930.927.761)	10.137.116.356	(278.406.571.212)	*Retained earnings (accumulated losses) - Unappropriated*

46. AKTIVITAS NON-KAS

Aktivitas non-kas yang mendukung laporan arus kas konsolidasian pada setiap tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

46. NON-CASH ACTIVITIES

Non-cash activities supporting the consolidated cash flows at each reporting dates are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2017	**2016**	
Penambahan aset tetap yang diperoleh dari uang muka, utang dan pinjaman	131.583.057.438	65.809.071.649	*Additions to property, plant and equipment through incurrence of advances, payables and loans*

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Perkebunan Nusantara X, entitas induk, yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara X dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

The following information is the separate financial statements of PT Perkebunan Nusantara X, parent entity, which is presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Perkebunan Nusantara X and its Subsidiaries as of December 31, 2017 and for the year then ended.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Disajikan kembali/*As restated*		
	31 Desember/ ***December 31, 2017***	**31 Desember/** ***December 31, 2016***	**1 Januari 2016/ 31 Desember 2015/** ***January 1, 2016/ December 31, 2015***	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	277.508.520.968	202.776.546.981	382.009.409.315	*Cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	959.882.823.223	967.565.780.768	975.000.000.000	*Restricted cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	-	5.000.000.000	-	*Short-term investment*
Piutang usaha, neto				*Trade receivables, net*
Pihak berelasi	20.347.720.374	3.396.754.201	13.859.160.621	*Related parties*
Pihak ketiga, neto	59.897.886.049	40.652.475.401	107.211.096.672	*Third parties, net*
Piutang petani tebu rakyat, neto	40.140.262.891	176.862.782.224	178.490.052.924	*Sugarcane farmers receivables, net*
Piutang lain-lain, neto				*Other receivables*
Pihak berelasi	43.081.403.230	54.179.729.775	40.956.074.921	*Related parties*
Pihak ketiga, neto	37.001.019.162	33.387.890.955	43.329.538.255	*Third parties, net*
Persediaan, neto	630.074.387.516	820.183.196.780	489.886.153.342	*Inventories, net*
Pajak dibayar di muka	48.746.935.594	41.477.856.407	30.107.688.840	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar di muka	8.424.513.074	5.835.897.537	2.042.155.138	*Prepaid expenses*
Uang muka - pihak berelasi	4.212.657.409	3.236.744.000	4.500.119.223	*Advance payments - a related party*
Aset lancar lainnya	11.068.336.386	23.570.636.544	20.990.756.485	*Other current assets*
JUMLAH ASET LANCAR	**2.140.386.465.876**	**2.378.126.291.573**	**2.288.382.205.736**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang pihak berelasi jangka panjang	1.432.945.314.253	1.224.017.167.331	902.945.177.975	*Long-term receivables from related parties*
Investasi saham	176.824.573.275	174.549.573.275	163.068.944.371	*Investment in shares*
Aset pajak tangguhan, neto	283.545.582.180	273.995.499.004	202.134.333.169	*Deferred tax assets, net*
Tanaman perkebunan				*Plantations*
Tanaman semusim	26.887.571.451	31.165.987.537	26.498.072.837	*Annual crops*
Tanaman menghasilkan	8.703.023	19.820.575	30.067.521	*Mature plantations*
Aset tetap, neto	8.443.698.617.977	8.521.061.827.401	8.422.072.256.722	*Fixed assets, net*
Aset takberwujud, neto	53.025.364.932	56.041.512.932	50.319.532.690	*Intangible assets, net*
Estimasi tagihan pajak	54.644.764.784	49.635.368.557	15.560.342.237	*Estimated claims for tax refund*
Uang muka pembelian aset tetap	25.274.857.453	22.835.938.272	5.180.869.824	*Advance for purchase of fixed assets*
Aset tidak lancar lainnya	54.190.342	54.190.342	54.190.342	*Other non current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**10.496.909.539.670**	**10.353.376.885.226**	**9.787.863.787.688**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET	**12.637.296.005.546**	**12.731.503.176.799**	**12.076.245.993.424**	***TOTAL ASSETS***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Disajikan kembali/*As restated*		
	31 Desember/ ***December 31, 2017***	**31 Desember/** ***December 31, 2016***	**1 Januari 2016/ 31 Desember 2015/** ***January 1, 2016/ December 31, 2015***	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak berelasi	15.839.040.434	315.302.128.650	-	*Related parties*
Pihak ketiga	146.037.087.855	122.516.601.871	38.701.967.782	*Third parties*
Beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek	74.209.636.069	41.803.711.464	89.275.947.348	*Accrued expenses and short-term employee benefits liabilities*
Utang pajak	7.092.695.825	16.011.231.104	126.595.629.368	*Taxes payable*
Utang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi ("KKPE")	174.662.945.262	242.547.956.959	205.831.736.897	*Food security and energy credit ("KKPE") payables*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak berelasi	12.551.995.798	12.657.003.336	10.226.651.040	*Related parties*
Pihak ketiga	257.278.973.514	114.820.185.256	70.955.977.222	*Third parties*
Pinjaman jangka pendek	397.685.361.590	163.372.397.219	100.000.000.000	*Short-term loans*
Uang muka pelanggan	62.456.486.823	18.942.682.337	7.075.446.720	*Advance from customers*
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	144.587.000.000	130.000.000.000	198.000.000.000	*Current portion of long-term loans*
Bagian utang obligasi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	700.000.000.000	-	-	*Current portion of bonds payable*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**1.992.401.223.170**	**1.177.973.898.196**	**846.663.356.377**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	925.245.663.285	1.200.172.203.285	622.879.342.143	*Long-term loans, net of current portion*
Utang obligasi	-	700.000.000.000	700.000.000.000	*Bonds payable*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	821.958.836.577	727.277.778.702	716.082.467.944	*Employee benefits liability*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**1.747.204.499.862**	**2.627.449.981.987**	**2.038.961.810.087**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS	**3.739.605.723.032**	**3.805.423.880.183**	**2.885.625.166.464**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham				*Share capital*
Nilai nominal Rp1.000.000 per saham				*Par value Rp1,000,000 per share*
Modal dasar - 7.300.000 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 7.299.999 saham Seri B pada tahun 2016; 3.400.000 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 3.399.999 saham Seri B pada tahun 2015				*Authorized capital - 7,300,000 shares which consist of 1 Series A share and 7,299,999 Series B shares in 2016; 3,400,000 shares which consist of 1 Series A and 3,399,999 Series B in 2015*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.845.596 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 1.845.595 saham Seri B pada tahun 2016; 870.596 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 870.595 saham Seri B pada tahun 2015	1.845.596.000.000	1.845.596.000.000	870.596.000.000	*Issued and fully paid - 1,845,596 shares which consist of 1 Series A share and 1,845,595 Series B shares in 2016; 870,596 shares which consist of 1 Series A share and 870,595 Series B shares in 2015*
Modal sumbangan	10.061.504.138	10.061.504.138	10.061.504.138	*Donated capital*
Penghasilan komprehensif lainnya	7.059.851.386.698	7.059.851.386.698	7.089.970.503.561	*Other comprehensive income*
Komponen ekuitas lainnya	-	-	975.000.000.000	*Other component of equity*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	613.102.848.116	613.102.848.116	547.623.627.605	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	(630.921.456.438)	(602.532.442.336)	(302.630.808.344)	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS	**8.897.690.282.514**	**8.926.079.296.616**	**9.190.620.826.960**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**12.637.296.005.546**	**12.731.503.176.799**	**12.076.245.993.424**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year then ended December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2017	**Disajikan kembali/*As restated* 2016**	
PENJUALAN	1.888.383.381.376	1.637.631.702.667	***REVENUE***
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.534.420.708.753)	(1.538.606.928.098)	***COST OF SALES***
LABA KOTOR	**353.962.672.623**	**99.024.774.569**	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	(255.507.695.624)	(239.867.531.997)	*General and administrative expenses*
Beban penjualan	(3.623.061.975)	(4.907.643.053)	*Selling expenses*
Pendapatan (beban) lain-lain, neto	13.217.270.840	(70.265.848.404)	*Other operating income (expense), net*
LABA (RUGI) USAHA	**108.049.185.864**	**(216.016.248.885)**	***OPERATING PROFIT (LOSS)***
Pendapatan keuangan	64.059.530.012	71.461.607.665	*Finance income*
Pajak final	(12.811.906.002)	(14.292.321.533)	*Final tax*
Beban keuangan	(125.051.473.530)	(99.171.558.071)	*Finance expense*
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK	**34.245.336.344**	**(258.018.520.824)**	***PROFIT (LOSS) BEFORE TAX BENEFIT (EXPENSE)***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(8.496.025.230)	71.595.026.924	***TAX BENEFIT (EXPENSE)***
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**25.749.311.114**	**(186.423.493.900)**	***PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya:			***Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent years:***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(72.184.433.622)	7.433.317.479	*Re-measurement on employee benefits liability*
Pajak tangguhan terkait	18.046.108.406	(1.858.329.370)	*Deferred tax effect*
Penghasilan komprehensif lain, neto	(54.138.325.216)	5.574.988.109	*Other comprehensive income, net*
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(28.389.014.102)**	**(180.848.505.791)**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Year ended
December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Authorized issued and fully paid*	Saldo laba (defisit)/ *Retained earnings (deficit)*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Modal sumbangan/ *Donated capital*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other component of equity*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
		Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*					
Saldo 31 Desember 2015 (sebelum disajikan kembali)	**870.596.000.000**	**547.623.627.605**	**(6.788.406.728)**	**6.764.852.743.510**	**10.061.504.138**	**985.137.116.356**	**9.171.482.584.881**	***Balance as of December 31, 2015 (before restated)***
Dampak penyajian kembali	-	-	(295.842.401.616)	325.117.760.051	-	(10.137.116.356)	19.138.242.079	*Effects of restatements*
Saldo 31 Desember 2015 (disajikan kembali)	**870.596.000.000**	**547.623.627.605**	**(302.630.808.344)**	**7.089.970.503.561**	**10.061.504.138**	**975.000.000.000**	**9.190.620.826.960**	***Balance as of December 31, 2015 (as restated)***
Penambahan modal saham	975.000.000.000	-	-	-	-	(975.000.000.000)	-	*Additional share capital*
Rugi tahun berjalan	-	-	(186.423.493.900)	-	-	-	(186.423.493.900)	*Loss for the year*
Pembayaran dividen tunai	-	-	(53.573.907.690)	-	-	-	(53.573.907.690)	*Cash dividend payment*
Cadangan umum	-	65.479.220.511	(65.479.220.511)	-	-	-	-	*General reserve*
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	(30.119.116.863)	-	-	(30.119.116.863)	*Revaluation surplus of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto	-	-	5.574.988.109	-	-	-	5.574.988.109	*Re-measurement on employee benefits liability, net*
Saldo 31 Desember 2016 (disajikan kembali)	**1.845.596.000.000**	**613.102.848.116**	**(602.532.442.336)**	**7.059.851.386.698**	**10.061.504.138**	**-**	**8.926.079.296.616**	***Balance as of December 31, 2016 (as restated)***
Laba tahun berjalan	-	-	25.749.311.114	-	-	-	25.749.311.114	*Profit for the year*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto	-	-	(54.138.325.216)	-	-	-	(54.138.325.216)	*Re-measurement on employee benefits liability, net*
Saldo 31 Desember 2017	**1.845.596.000.000**	**613.102.848.116**	**(630.921.456.438)**	**7.059.851.386.698**	**10.061.504.138**	**-**	**8.897.690.282.514**	***Balance as of December 31, 2017***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year then ended
December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	1.662.564.340.828	1.940.730.657.905	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok	(921.678.146.345)	(2.040.265.095.405)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran ke Direksi dan karyawan	(606.934.071.494)	(702.725.235.456)	*Cash payments to Directors and employees*
Kas yang digunakan untuk operasi	133.952.122.989	(802.259.672.956)	*Cash used for operations*
Penerimaan dari piutang Bone, Camming dan Takalar	365.356.904.339	163.469.225.735	*Proceeds from receivable of Bone, Camming and Takalar*
Pengembalian dari petani tebu rakyat	369.287.308.380	318.513.551.066	*Repayments from sugarcane farmers*
Pembayaran atas operasional Bone, Camming, dan Takalar	(346.259.239.412)	(388.920.733.014)	*Payment for the operational of Bone, Camming and Takalar*
Pembayaran pajak	(16.071.351.975)	(61.772.598.016)	*Tax payment*
Penyaluran ke petani tebu rakyat	(294.350.335.916)	(319.014.369.508)	*Distribution to sugarcane farmers*
Pembayaran bunga atas pinjaman	(226.758.829.256)	(192.313.770.223)	*Interest payment*
Lain-lain	145.442.127.445	855.200.004.841	*Others*
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**130.598.706.594**	**(427.098.362.075)**	***Net cash flows provided by (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian aset tetap	(12.878.322.057)	(295.088.021.107)	*Purchase of fixed assets*
Penyertaan saham	-	(7.000.000.000)	*Investments in shares*
Penerimaan dividen	9.283.230.256	4.437.870.300	*Dividend receipt*
Penempatan pada investasi jangka pendek	-	(5.000.000.000)	*Placement in short-term investment*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(3.595.091.801)**	**(302.650.150.807)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman bank dan pihak berelasi	1.122.424.025.021	1.499.055.311.583	*Proceeds of bank loans*
Penerimaan pinjaman KKPE	283.452.505.144	573.893.468.892	*Proceeds of KKPE payables*
Pembayaran dividen	-	(53.573.907.690)	*Dividend payment*
Pembayaran angsuran atas pinjaman bank dan lainnya	(1.148.111.060.650)	(920.182.914.364)	*Installment payments of bank loans and others*
Pembayaran angsuran pinjaman KKPE	(310.037.110.321)	(548.676.307.873)	*Installment payments of KKPE payables*
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(52.271.640.806)**	**550.515.650.548**	***Net cash flows (used in) provided by funding activities***

The original separate financial statements as supplementary information included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the year then ended
December 31, 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	2016	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**74.731.973.987**	**(179.232.862.334)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**202.776.546.981**	**382.009.409.315**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**277.508.520.968**	**202.776.546.981**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***
Aktivitas non-kas:			***Non-cash activities:***
Penambahan aset tetap yang diperoleh dari uang muka, utang dan pinjaman	126.894.606.189	50.954.953.892	*Additions to property, plant and equipment through incurrence of advance, payables and loans*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
For the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri Entitas Induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.

Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2013), Entitas Induk mencatat penyertaan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi dengan menggunakan metode biaya perolehan. Entitas Induk mengakui dividen dari Entitas Anak dan Entitas Asosiasi pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

Mata uang fungsional Entitas Induk adalah Rupiah. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tersendiri adalah mata uang Rupiah. Laporan Keuangan Tersendiri disusun untuk keperluan pelaporan perpajakan Perusahaan.

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity

The separate financial statements of the Parent Entity are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements".

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in Subsidiaries and Association Entities.

In accordance with PSAK No. 4 (Revised 2013), Parent Entity recorded its investment in Subsidiary and Associates using the cost method. Parent Entity recognizes dividends of Subsidiary and Associates in the income statement in the separate financial statements when the right to receive the dividend is set.

Parent Entity's functional currency is Rupiah. Presentation currency used for the preparation of separate financial statements is Rupiah. Separate Financial Statements prepared for Company's tax reporting purposes.

2. INVESTASI SAHAM

Entitas Induk memiliki investasi saham pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi sebagai berikut:

2. INVESTMENT IN SHARES

The Parent Entity has the following investment in shares in Subsidiaries and Associates as follow:

Nama entitas	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan 1 Januari 2017/ *As restated Acquisition cost January 1, 2017*	Penambahan (Pengurangan)/ *Additions (Reduction)*	Biaya perolehan 31 Desember 2017/ *Acquisition cost December 31, 2017*	*Entity name*
Entitas Anak					*Subsidiaries*
PT Mitratani Dua Tujuh	65,00%	20.533.000.000	2.275.000.000	22.808.000.000	*PT Mitratani Dua Tujuh*
PT Dasaplast Nusantara	90,00%	40.928.133.660	-	40.928.133.660	*PT Dasaplast Nusantara*
PT Nusantara Medika Utama	99,56%	34.300.000.000	-	34.300.000.000	*PT Nusantara Medika Utama*
PT Energi Agro Nusantara	100,00%	65.597.839.235	-	65.597.839.235	*PT Energi Agro Nusantara*
Jumlah Entitas Anak		**161.358.972.895**	**2.275.000.000**	**163.633.972.895**	***Total Subsidiaries***
Entitas Asosiasi					*Associates*
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	7,14%	6.884.000.000	-	6.884.000.000	*PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara*
Perantara Makelar Tembakau Indonesia	24,53%	-	-	-	*Perntara Makelar Tembakau Indonesia*
PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)	6,67%	50.000.000	-	50.000.000	*PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)*
Sub-jumlah Entitas Asosiasi		**8.953.371.096**	**-**	**8.953.371.096**	***Sub-total Associates***
Penghapusan nilai investasi		-	-	-	*Write-off the value of investment*
Jumlah Entitas Asosiasi, neto		**6.934.000.000**	**-**	**6.934.000.000**	***Total Associates, net***
Uang muka investasi saham: PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)		6.256.600.380	-	6.256.600.380	*Advance in share investment: PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)*
Jumlah investasi saham		**174.549.573.275**	**2.275.000.000**	**176.824.573.275**	***Total shares investments***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
For the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INVESTASI SAHAM (lanjutan) / *2. INVESTMENTS IN SHARES (continued)*

Nama entitas	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan 1 Januari 2016/ *As restated Acquisition cost January 1, 2016*	Penambahan (Pengurangan)/ *Additions (Reduction)*	Biaya perolehan 31 Desember 2016/ *Acquisition cost December 31, 2016*	*Entity name*
Entitas Anak					*Subsidiaries*
PT Mitratani Dua Tujuh	65,00%	14.033.000.000	6.500.000.000	20.533.000.000	*PT Mitratani Dua Tujuh*
PT Dasaplast Nusantara	90,00%	40.928.133.660	-	40.928.133.660	*PT Dasaplast Nusantara*
PT Nusantara Medika Utama	99,56%	34.300.000.000	-	34.300.000.000	*PT Nusantara Medika Utama*
PT Energi Agro Nusantara	100,00%	58.597.839.235	7.000.000.000	65.597.839.235	*PT Energi Agro Nusantara*
Jumlah Entitas Anak		**147.858.972.895**	**13.500.000.000**	**161.358.972.895**	***Total Subsidiaries***
Entitas Asosiasi					*Associates*
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	7,14%	6.884.000.000	-	6.884.000.000	*PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara*
Perantara Makelar Tembakau Indonesia	24,53%	2.019.371.096	-	2.019.371.096	*Perantara Makelar Tembakau Indonesia*
PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)	6,67%	50.000.000	-	50.000.000	*PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)*
Sub-jumlah Entitas Asosiasi		**8.953.371.096**	**-**	**8.953.371.096**	***Sub-total Associates***
Penghapusan nilai investasi		-	(2.019.371.096)	(2.019.371.096)	*Write-off the value of investment*
Jumlah Entitas Asosiasi, neto		**8.953.371.096**	(2.019.371.096)	**6.934.000.000**	***Total Associates, net***
Uang muka investasi saham:					*Advance in share investment:*
PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)		6.256.600.380	-	6.256.600.380	*PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)*
Jumlah investasi saham		**163.068.944.371**	**11.480.628.904**	**174.549.573.275**	***Total shares investments***

3. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN ENTITAS ANAK / *3. TRANSACTIONS AND BALANCE WITH SUBSIDIARIES*

Piutang usaha			***Trade receivable***
PT Energi Agro Nusantara	**17.023.124.121**	**3.396.754.201**	*PT Energi Agro Nusantara*
Piutang lain-lain			***Other receivables***
PT Energi Agro Nusantara	28.724.675.340	27.399.170.890	*PT Energi Agro Nusantara*
PT Nusantara Medika Utama	4.884.053.572	12.738.460.789	*PT Nusantara Medika Utama*
PT Dasaplast Nusantara	2.599.236.107	1.899.236.111	*PT Dasaplast Nusantara*
PT Mitratani Dua Tujuh	-	2.600.000.000	*PT Mitratani Dua Tujuh*
Jumlah piutang lain-lain	**36.207.965.019**	**44.636.867.790**	***Total other receivables***
Uang muka			***Advance payments***
PT Dasaplast Nusantara	**4.212.657.409**	**3.236.744.000**	*PT Dasaplast Nusantara*
Beban akrual			***Accrued expense***
PT Nusantara Medika Utama	**2.389.528.741**	-	*PT Nusantara Medika Utama*
Piutang jangka panjang			***Long-term receivables***
PT Dasaplast Nusantara	**8.000.000.000**	**8.000.000.000**	*PT Dasaplast Nusantara*
Utang usaha			***Trade payable***
PT Dasaplast Nusantara	**15.839.040.434**	**4.139.397.900**	*PT Dasaplast Nusantara*
Utang lain-lain			***Other payables***
PT Nusantara Medika Utama	4.775.877.719	6.290.281.696	*PT Nusantara Medika Utama*
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	3.087.125.128	4.187.125.128	*Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*
PT Dasaplast Nusantara	2.801.260.000	-	*PT Dasaplast Nusantara*
Jumlah utang lain-lain	**10.664.262.847**	**10.477.406.824**	***Total other payables***

2017
Annual Report
Laporan Tahunan

PT Perkebunan Nusantara X

Kantor Pusat
Jl. Jembatan Merah No 3-11,
Surabaya 60175
Jawa Timur, Indonesia
Telp: (031) 3523143 (hunting)
email: contact@ptpn10.co.id

www.ptpn10.co.id